

NAZARUDDIN SJAMSUDDIN



**PEMBERONTAKAN
KAUM REPUBLIK**
KASUS DARUL ISLAM ACEH



085 890 103

BIBLIOTHEEK KITLV



0072 5265

6-2797-N

NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

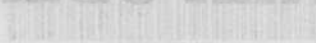
PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK

PEMBERONTAKAN
KAUM REPUBLIK
KASUS DARUL ISLAM ACEH



PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

**PEMBERONTAKAN
KAMU REPUBLIK**



0072 2065

REKORSAH
KAMU REPUBLIK
KAS. 2001. 2001. 2001

i - 2797 - N

Republik Indonesia: Katalog Dalam Teras (KDT)
NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Pemberontakan kaum republik : kasus Darul Islam
Aceh / Nazaruddin Sjamsuddin. -- Jakarta :
Pustaka Utama Grafiti, 1990.
viii, 377 hlm. ; 21 cm.

Bibliografi.

Indeks.

PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK

KASUS DARUL ISLAM ACEH

PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK

Kasus Darul Islam Aceh

Nazaruddin Sjamsuddin

Ditribusikan pertama kali dalam bahasa Inggris dengan judul

The Republicans Revolt: A Study of the Darul Islam

(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987)

Edisi Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti



grafiti



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

SJAMSUDDIN, Nazaruddin.

Pemberontakan kaum republik : kasus Darul Islam
Aceh / Nazaruddin Sjamsuddin. -- Jakarta :
Pustaka Utama Grafiti, 1990.
xviii, 377 hlm. ; 21 cm.

Bibliografi.

Indeks.

ISBN 979-444-097-3

1. Aceh - Sejarah - Politik. 2. Darul Islam.

I. Judul.

959.811

PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK

Kasus Darul Islam Aceh

©Nazaruddin Sjamsuddin

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris dengan judul

The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion
(Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1985).

Edisi Indonesia diterbitkan dengan persetujuan ISEAS.

No. : 128/90

Kulit Muka: S. Malela

Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti

Kelapa Gading Boulevard TN-2 No.14-15

Jakarta 14240

Anggota Ikapi

Cetakan Pertama, 1990

Percetakan PT Temprint, Jakarta

Pengantar Penerbit

TIDAK DISANGSIKAN LAGI, terlebih pada periode sulit 1945-1949, rakyat Aceh memperlihatkan kesetiaan penuh kepada Republik Indonesia. Tetapi dalam sejarah, daerah yang kerap disebut "serambi Mekah" ini tidak pernah sepi dari gejolak. Lalu timbul pertanyaan: faktor-faktor apakah yang memicu pergolakan yang nyaris tiada henti tersebut? Di balik keunikan setiap gejolak, adakah benang merah yang menghubungkan berbagai gejolak itu satu sama lain? Kemudian, bagaimana hubungannya dengan gejolak sejenis di daerah-daerah lain?

Salah satu di antara pergolakan tersebut, dan ini merupakan yang terbesar, adalah yang meletus tahun 1953-1962 di bawah panji Darul Islam pimpinan *Aud Beuruch*. Penafsiran beberapa penulis menjelaskan, gejolak ini disebabkan oleh konflik antara ulama-ulama tradisional dengan golongan lain yang menganggap pergolakan itu sebagai ancaman terhadap pemerintahan yang menekankan pengaruh perkembangan politik tingkat nasional yang berkecamuk di Aceh.

Kajias Nizaruddin Sjamsuddin ini di lain pihak, karena ditulis dari perspektif daerah, memaparkan penulisnya memiliki banyak peluang untuk melihat berbagai faktor yang bekerja dan berinteraksi dalam pergolakan itu. Telah penulis yang luas mengenai sejarah politik dan latar belakang pergolakan menjelaskan banyak hal: faktor-faktor regional dan religius, cita-cita mendirikan negara Islam, percontohan kepentingan di dalam lingkungan kaum pemberontak itu sendiri, serta hubungannya dengan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Kartosuwirjo di Jawa Barat.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

SJAMSUDDIN, Nazaruddin.

Pemberontakan kaum republik : kasus Darul Islam
Aceh / Nazaruddin Sjamsuddin. -- Jakarta :
Pustaka Utama Grafiti, 1990.
xviii, 377 hlm. ; 21 cm.

Bibliografi.

Indeks.

ISBN 979-444-097-3

1. Aceh - Sejarah - Politik. 2. Darul Islam.

I. Judul.

PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK

Kasus Darul Islam Aceh

©Nazaruddin Sjamsuddin

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh

The Republican Revolt: A Study of the

(Singapura: Institute of Southeast Asian Studies)

Edisi Indonesia diterbitkan dengan persetujuan IRIAS

No. : 128/90

Kuif Muka: S. Malisa

Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti

Kelapa Gading Boulevard TIN-2 No.14-15

Jakarta 14240

Anggota Ikapi

Cetakan Pertama, 1990

Percetakan PT Tempriat, Jakarta

Kajian dalam buku yang diangkat dari disertasi ini telah mendapat

Jakarta, September 1990

Daftar Isi

Pengantar Penerbit

PENGANTAR PENERBIT

TIDAK DISANGSIKAN LAGI, terlebih pada periode sulit 1945-1949, rakyat Aceh memperlihatkan kesetiaan penuh kepada Republik Indonesia. Tetapi dalam sejarah, daerah yang kerap disebut "serambi Mekah" ini tidak pernah sepi dari gejolak. Lalu timbul pertanyaan: faktor-faktor apakah yang memicu pergolakan yang nyaris tiada henti tersebut? Di balik keunikan setiap gejolak, adakah benang merah yang menghubungkan berbagai gejolak itu satu sama lain? Kemudian, bagaimana hubungannya dengan gejolak sejenis di daerah-daerah lain?

Salah satu di antara pergolakan tersebut, dan ini merupakan yang terbesar, adalah yang meletus tahun 1953-1962 di bawah panji Darul Islam pimpinan Daud Beureueh. Penafsiran beberapa penulis menjelaskan, gejolak besar di Aceh tersebut disebabkan oleh konflik antara ulama-*ule-balang*, sedang penafsiran yang lain menganggap pergolakan itu sebagai akibat "stagnasi sosial". Ada pula penafsiran yang menekankan pengaruh perkembangan politik tingkat nasional yang berkecamuk di Aceh.

Kajian Nazaruddin Sjamsuddin ini di lain pihak, karena ditulis dari perspektif daerah, memungkinkan penulisnya memiliki banyak peluang untuk melihat berbagai faktor yang bekerja dan berinteraksi dalam pergolakan itu. Telaah penulis yang luas mengenai sejarah politik dan latar belakang pergolakan menjelaskan banyak hal: faktor-faktor regional dan religius, cita-cita mendirikan negara Islam, pertentangan kepentingan di dalam lingkungan kaum pemberontak itu sendiri, serta hubungan gerakan ini dengan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Kartosuwirjo di Jawa Barat.

Kajian dalam buku yang diangkat dari disertasi ini telah menempatkan kasus gerakan Aceh itu dalam kerangka yang jelas, yakni sebagai salah satu upaya memahami masalah integrasi nasional Indonesia.

Jakarta, September 1990

Pengantar Penulis

TIDAK DISANGKAN LAGI, terdapat pada periode suli 1942-1949, tak-
 yang Aceh mempertahankan kesetiaan penuh kepada Republik Indonesia.
 Tapi dalam sejarah daerah yang kerap disebut "serambi Mekah" ini
 tidak pernah sepi dari gejolak. Lalu timbul pertanyaan: faktor-faktor
 apakah yang memicu pergolakan yang nyaris tiada henti tersebut? Di
 balik keunikan setiap gejala, adakah benang merah yang menghubungkan-
 kan berbagai gejala itu satu sama lain? Kemudian, bagaimana hubung-
 annya dengan gejala sejenis di daerah-daerah lain?

Salah satu di antara pergolakan tersebut, dan ini merupakan yang ter-
 besar, adalah yang meluas tahun 1953-1963 di bawah panji Darul Islam
 pimpinan Daud Beureueh. Penalaran beberapa penulis menjelaskan ge-
 jolak besar di Aceh tersebut disebabkan oleh konflik antara ulama-
 balang, sedang penalaran yang lain menganggap pergolakan itu sebagai
 akibat "latensi sosial". Ada pula penalaran yang menekankan penga-
 ruh perkembangan politik tingkat nasional yang berkecamuk di Aceh.

Kajian Nasaruddin Sjamsuddin ini di lain pihak, karena ditulis dari
 perspektif daerah, memantapkan penulisnya memiliki banyak peluang
 untuk melihat berbagai faktor yang bekerja dan berinteraksi dalam per-
 golakan itu. Telah penulis yang luas mengenai sejarah politik dan latar
 belakang pergolakan menjelaskan banyak hal: faktor-faktor regional dan
 religius, cita-cita mendirikan negara Islam, pemerintahan kepribadian di
 dalam lingkungan kaum pembetotak itu sendiri, serta hubungan etnik-
 an ini dengan Kabat Muzakar di Solawesi Selatan dan Karosuwajo di
 Jawa Barat.

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	vii
PRAKATA	ix
PENGANTAR EDISI INDONESIA	xv
CATATAN TENTANG EJAAN	xvii
PETA ACEH TAHUN 1953	xviii
BAB I. PENDAHULUAN 1	
BAB II. MENJELANG PEMBERONTAKAN 34	
Pembubaran Propinsi Aceh	34
Jakarta dan Pertarungan Kekuasaan Lokal	49
Dampak Sosial Ekonomis Pembubaran Propinsi	67
BAB III. PEMBERONTAKAN 83	
Pecahnya Pemberontakan	84
Sebab dan Penjelasan	102
BAB IV. JAWABAN JAKARTA 124	
Kebijaksanaan yang Konfrontatif	124
Kebijaksanaan yang Akomodatif	144
BAB V. LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN 165	
Rakyat dan Pemberontakan	165
Para Pemimpin dan Pemberontakan	188

BAB VI. KALANGAN DARUL ISLAM 204	
Pemerintahan Negara Bagian Aceh	204
Konflik dalam NBA	222
Hubungan NBA-NII	244
BAB VII. MENUJU PENYELESAIAN 265	
"Konsepsi Prinsipil Bijaksana"	265
Dewan Repolusi	287
Episode Akhir	313
BAB VIII. KESIMPULAN 334	
ISTILAH DAN SINGKATAN	348
DAFTAR PUSTAKA	351
INDEKS	367
xvii	
xviii	
BAB I. PENDAHULUAN	
BAB II. MENJELANG PEMERONTAKAN	
34	
49	
67	
BAB III. PEMERONTAKAN	
84	
102	
BAB IV. JAWABAN JAKARTA	
124	
144	
BAB V. LATAR BELAKANG PEMERONTAKAN	
162	
188	

Prakata

SEJAUH MENYANGKUT hubungan antara Aceh dan Pemerintah Pusat, pemberontakan yang terjadi di Aceh pada bulan September 1953 merupakan suatu titik balik dalam sejarah politik daerah tersebut. Pemberontakan itu merupakan titik balik yang penting bila diingat bahwa hanya beberapa tahun sebelumnya rakyat Aceh telah memperlihatkan apa yang agaknya merupakan kesetiaan penuh kepada Pemerintah Pusat, justru pada saat pemerintah menghadapi krisis mempertahankan hidupnya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Seluruh jaringan lembaga dan kekuatan politik setempat yang telah memobilisasi rakyat untuk menentang Belanda pada masa revolusi 1945-1949 dan mendukung Republik Indonesia sepanjang perjalanan revolusi nasional itu, beberapa tahun kemudian berbalik menentang Pemerintah Pusat dalam suatu perjuangan berdarah.

Setiap studi mengenai pemberontakan ini, oleh karena itu, harus dikaitkan dengan latar belakang yang luas mengenai jalannya revolusi nasional di daerah itu, di samping berbagai aspirasi dan harapan yang didorong oleh prospek kemerdekaan. Bagi pemerintah yang baru merdeka di Jakarta, sebagaimana halnya bagi penguasa kolonial dahulu di Batavia, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang sulit dikuasai. Pada kenyataannya banyak orang Indonesia memandang rakyat Aceh sebagai orang yang keras kepala. Seberapa jauh kebenaran gambaran itu, pembaca akan dapat menilai dengan baik setelah membaca kajian ini. Untuk menjelaskan masalah politik yang dihadapi Pemerintah Pusat, saya mengaitkan kajian tentang pemberontakan ini tidak hanya dengan jalannya berbagai peristiwa dalam revolusi nasional secara umum, tetapi juga dengan kecenderungan-kecenderungan sosial-politik tertentu di daerah itu

pada masa kolonial.

Berbeda dari kajian-kajian lain tentang politik lokal di Indonesia, buku ini mencoba meninjau permasalahannya dari perspektif daerah yang bersangkutan, dan bukan dari tingkat nasional. Dengan demikian, kajian ini diharapkan akan dapat menerangkan sebagian besar aspek tingkah laku dan kehidupan politik Aceh yang mengarahkan rakyat untuk memberontak terhadap kekuasaan Pemerintah Pusat di Jakarta. Saya yakin bahwa hal ini akan sangat mungkin dicapai dengan mengkaji secara teliti perkembangan di daerah itu, dengan memberikan perhatian besar terhadap nuansa-nuansa yang barangkali terabaikan jika dikaji dengan cara yang lain. Hanya dengan jalan inilah masalah ketegangan hubungan antara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta akan dapat ditempatkan di atas basis yang seimbang. Dengan cara demikianlah, kajian ini akan menjadi pelengkap bagi kajian-kajian lain yang memusatkan diri pada pendekatan tingkat nasional.

Melihat masalah yang dihadapi rakyat setempat dari daerah mereka sendiri memberi beberapa keuntungan yang lain. Pertama, tinjauan dari dekat akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang lebih matang, sebab dapat dipertimbangkan lebih banyak faktor, yang kadang-kadang terasa jalin-menjalin dan terlalu mendetail untuk diperhatikan. Berbagai faktor, atau bahkan nuansa-nuansa ini, yang mungkin diabaikan oleh pendekatan pada tingkat nasional, sering memerlukan pertimbangan yang lebih baik. Kedua, kajian semacam ini pasti akan memunculkan hal-hal yang khusus ke permukaan, sehingga memungkinkan kita membandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Pendekatan ini akan memberi pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah nasional yang dihadapi oleh suatu negeri yang multietnis seperti Indonesia. Yang terakhir, dan terpenting, ialah bahwa melalui pendekatan ini diharapkan kita akan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang daerah itu.

Tentu saja ada kelemahan pokok pada penekanan yang berlebihan pada pendekatan tingkat daerah. Terlalu menekankan unsur daerah guna menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi akan dapat membahayakan, sebab tidak hanya akan menyesatkan, melainkan juga menciptakan pandangan yang berat sebelah. Tapi kelemahan ini dapat diperkecil jika kita juga memperhatikan karya-karya lain yang mendasarkan diri pada pendekatan tingkat nasional.

Buku ini berasal dari tesis doktoral yang saya ajukan pada Jurusan Politik, Universitas Monash di Melbourne, Australia, dan terutama didasarkan pada data yang saya kumpulkan dalam dua penelitian di Indonesia pada tahun 1973 dan 1975. Berbagai lembaga telah berlaku sangat baik terhadap saya sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Sementara penelitian lapangan pada tahun 1973 dibiayai oleh Ford Foundation, biaya penelitian tahun 1975 disumbangkan oleh Centre of Southeast Asian Studies, Universitas Monash. Saya sangat menghargai bantuan kedua lembaga ini, terutama Ford Foundation yang menyediakan sebagian besar biaya bagi studi doktoral saya itu. Ketika bantuan Ford Foundation ini berakhir, Colombo Plan Australia melanjutkannya dengan membiayai sisa masa studi saya, dan di sini saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya kepada mereka. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yayasan Supersemar, Jakarta, yang telah memberikan bantuan tambahan kepada saya. Kemudian, saya pun berutang budi kepada Institute of Southeast Asian Studies yang telah mengambil langkah-langkah untuk menerbitkan karya ini.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang khusus harus ditujukan kepada Profesor J.A.C. Mackie dan Dr. Herbert Feith. Melalui bimbingan, keduanya telah mempengaruhi bentuk keseluruhan karya ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Centre of Southeast Asian Studies, Universitas Monash, terutama atas partisipasi mereka dalam seminar-seminar saya, yang tanpa diragukan lagi, sangat menguntungkan saya. Rasa terima kasih harus pula saya tujukan kepada Lions Club di Dandenong, Victoria, yang telah membiayai hidup dan perjalanan istri saya, sehingga memungkinkannya menemani saya di Australia.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak sekali pihak yang telah membantu saya selama saya mengadakan penelitian di Indonesia, yang tidak mungkin dapat saya sebutkan semua nama mereka di sini. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak S.M. Amin di Jakarta, almarhum Husin Jusuf, Ali Hasjmy, Acha, dan Saudara Zulkarnaen A.R. Hasjim, semuanya di Kutaraja, dan Bapak Mohamad Said di Medan, atas segala bantuan mereka. Perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kaye Bysouth, Bette Moore, Pam Sayers, Krishna Sen, Kamaludin Diradji, Elaine McKay, Joy Tuckett dan Djoko Gunawan atas bantuan yang mereka berikan. Terima

kasih juga saya tujukan kepada Dr. Sharon Siddique dan Ny. Triena Ong yang telah memberikan nasihat-nasihat editorial. Bantuan editorial Ny. Roselie Ang juga sangat saya hargai.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Profesor Miriam Budiardjo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yang telah mengusahakan agar saya bisa mendapat tugas belajar. Saya juga berutang budi kepada rekan-rekan di fakultas yang sama, terutama di Jurusan Ilmu Politik, atas bantuan yang mereka berikan dengan cara mereka masing-masing.

Akhirnya, sebuah ungkapan terima kasih saya tujukan kepada istri saya, yang tanpa pengertian dan rasa cintanya maka karya ini tidak akan pernah mencapai bentuknya yang sekarang.

Nazaruddin Sjamsuddin

Ticket dan Djoko Gunawan atas bantuan yang mereka berikan. Terima
Moore, Pam Savers, Krishna Sen, Kamaludin Durani, Elaine McKay, Joy
kan juga saya sampaikan terima kasih kepada Kave Byonin, Belle
Bapak, Norman, dan di Medan, atas segala bantuan mereka. Terkesan
Acha dan saudara Zulman A.R. Izzati, semuanya di Kulawi, dan
pak-pak S.M. Amin di Jakarta, Almarhum Huan Jusu, Ali Hasmy
dan saudara lain-lain. Semoga Allah SWT memberi mereka pahala
yang banyak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada
saya yang mengucapkan terima kasih kepada banyak sekali pihak
lain-lain. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada
yang telah membantu saya selama saya mengadakan penelitian di
dunias, yang tidak mungkin dapat saya sebutkan semua nama mereka di
ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pa-
dan saudara lain-lain. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada
pak-pak S.M. Amin di Jakarta, Almarhum Huan Jusu, Ali Hasmy
dan saudara lain-lain. Semoga Allah SWT memberi mereka pahala
yang banyak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada
saya yang mengucapkan terima kasih kepada banyak sekali pihak
lain-lain. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada
yang telah membantu saya selama saya mengadakan penelitian di

Pengantar Edisi Indonesia

BUKU INI berkenaan dengan pemberontakan Darul Islam yang terjadi di Aceh pada tahun 1953, hampir genap empat dasawarsa yang lalu. Pemberontakan semacam itu juga pernah terjadi di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Meskipun peristiwa-peristiwa berdarah itu sudah lama terjadi, "getaran-getarannya" saya kira masih cukup terasa dalam kepolitikan bangsa kita hingga hari ini. Khusus menyangkut pemberontakan di Aceh itu, tampaknya getaran-getaran itu lebih terasa lagi, baik di kalangan rakyat Aceh sendiri maupun di luarnya. Kesan yang demikian timbul, mungkin karena pergolakan itu didukung oleh keunikan Aceh, atau karena konsekuensi-konsekuensinya yang tampak menantang sistem nasional.

Dari segi konsekuensi, kita lihat bahwa tidak lama setelah pemberontakan itu meletus, Aceh diberi status propinsi, padahal justru status itulah yang ditampik oleh Pemerintah Pusat pada masa sebelumnya. Kemudian kepada propinsi itu juga diberikan status istimewa, dalam bidang agama, adat-istiadat, dan pendidikan. Perkembangan yang terakhir itu menjadikan Aceh salah satu dari tiga daerah "istimewa" yang kita miliki hingga sekarang; dua daerah istimewa lainnya adalah Jakarta dan Yogyakarta. Sementara itu Aceh masih juga dipandang sebagai suatu daerah yang relatif rawan dalam arti politis. Adanya gerakan-gerakan dalam skala yang jauh lebih kecil seperti Aceh Merdeka dan Bantaqiah, selama masa Orde Baru ini, mengingatkan kita akan getaran-getaran pemberontakan pada masa lalu itu.

Buku ini adalah edisi Indonesia dari buku saya yang berjudul *The Republican Revolt, a Study of the Acehnese Rebellion*, yang diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies di Singapura pada tahun 1985. Se-

bagai suatu edisi, tentu saja buku ini tidak persis sama dengan edisi bahasa Inggris itu. Beberapa hal telah saya sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita, sehingga buku ini pantas disebut sebagai edisi Indonesia. Kendati demikian, jalannya argumentasi tetap sama. Perlu pula saya kemukakan di sini bahwa dalam edisi ini saya mengalami banyak kesulitan di dalam menampilkan kembali istilah dan kalimat yang semula telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu mungkin di sana sini para pembaca akan menemukan bahwa kutipan-kutipan tersebut berbeda dari dokumen aslinya. Maklumlah, setelah sekian lama tersimpan, maka tidak lagi mungkin bagi saya sekarang ini untuk membongkar kembali berkas-berkas arsip saya. Meskipun ada perbedaan yang demikian, hal ini tidak akan mengurangi ketepatan data. Namun demikian saya berharap pula kiranya ia tidak menjadi sesuatu yang mengganggu.

Penerbitan edisi Indonesia ini telah dimungkinkan terutama oleh kerja sama yang diberikan oleh The Asia Foundation dan PT Pustaka Utama Grafiti. Sementara PT Pustaka Utama Grafiti sudah lama menyatakan kesediaannya untuk menerbitkan karya ini, The Asia Foundation telah menyediakan dana sehingga memungkinkan saya untuk menyelesaikan naskahnya dalam waktu relatif cepat, di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Untuk itu kepada kedua lembaga tersebut saya sampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, dalam bentuk yang seperti inilah buku ini mampu saya persembahkan kepada masyarakat. Harapan saya tiada lain, semoga ia bermanfaat kiranya bagi kita semua.

Jakarta, Mei 1990

Nazaruddin Sjamsuddin

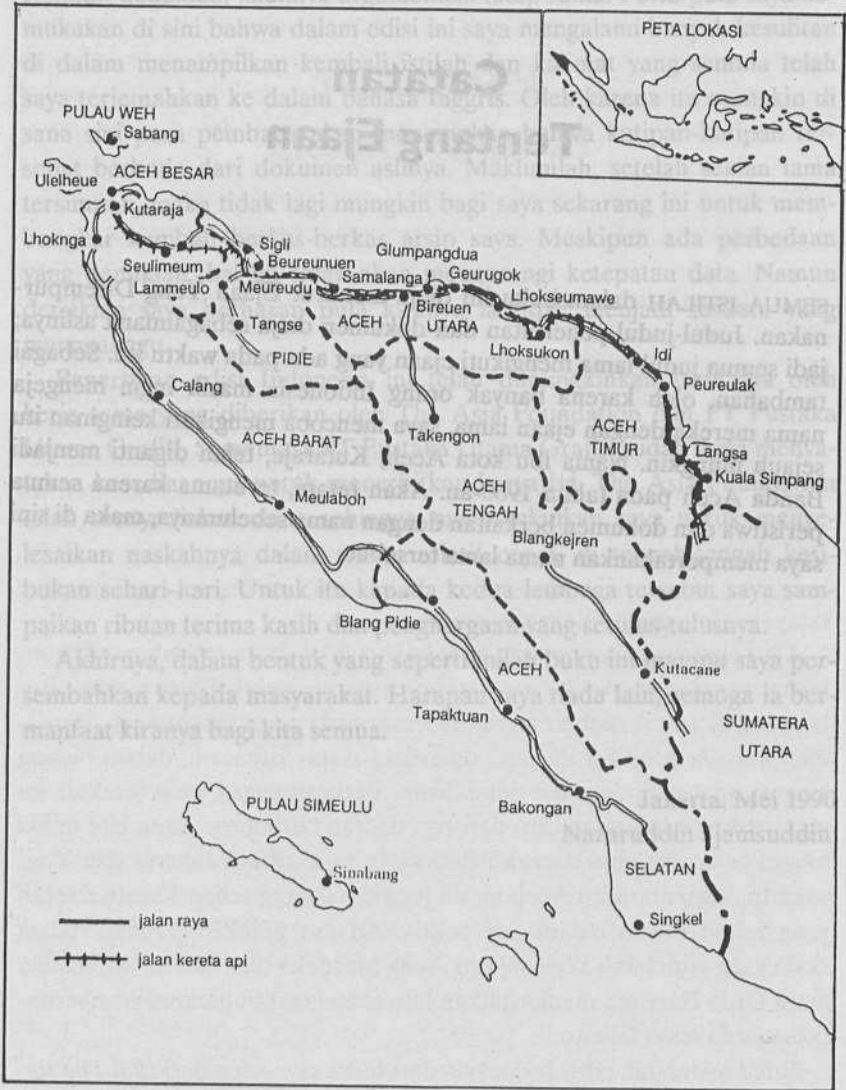
Catatan Tentang Ejaan

SEMUA ISTILAH dalam buku ini dieja menurut Ejaan Yang Disempurnakan. Judul-judul penerbitan dan dokumen dieja sebagaimana aslinya; jadi semua judul lama mengikuti ejaan yang ada pada waktu itu. Sebagai tambahan, oleh karena banyak orang Indonesia masih ingin mengeja nama mereka dengan ejaan lama, saya mencoba mengikuti keinginan itu sejauh mungkin. Nama ibu kota Aceh, Kutaraja, telah diganti menjadi Banda Aceh pada tahun 1960-an. Akan tetapi, terutama karena semua peristiwa dan dokumen berkaitan dengan nama sebelumnya, maka di sini saya mempertahankan nama lama tersebut.

... organisasi-organisasi nasional di berbagai daerah lain dan luar negeri. Di lain pihak, perjuangan rakyat Aceh dalam revolusi nasional merupakan salah satu perjuangan yang paling menonjol. Perjuangan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap mempertahankan suatu hubungan istimewa — sedikit-tidakanya dalam pikiran rakyat Aceh — antara mereka dan Pemerintah Pusat pada masa revolusi.

Dari sudut politik pelaksanaan, hubungan ini didasarkan pada situasi saling tergantung. Bagi Pemerintah Pusat, pentadbiran Aceh terletak dalam benak-benak bahwa daerah itu merupakan satu-satunya wilayah Republik yang benar-benar merdeka dan berdaulat luar kendali Belanda sepanjang periode 1945-1949. Pada satu sisi, perjuangan kemerdekaan Aceh dalam revolusi nasional berarti menyediakan penerangan dan dukungan semangat, memperkuat kemampuan tawar-menawar rakyat Aceh pada masa revolusi dalam memperjuangkan tuntutan mereka terhadap pemerintah nasional. Kebutuhan akan dukungan rakyat Aceh menyebabkan Pemerintah Pusat memajukan rakyat Aceh dengan memberikan jabatan-jabatan tinggi kepada para pemimpin di daerah itu, terutama kepada

Peta Aceh Tahun 1953



Bab I

Pendahuluan

HUBUNGAN ANTARA Aceh dan Pemerintah Pusat menyajikan suatu gambaran yang unik dalam sejarah politik Indonesia. Kekhasan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya menjadikan Aceh daerah khas yang harus dihadapi Pemerintah Pusat, terutama sekali pada tahun-tahun pertama sesudah tercapainya kemerdekaan. Di satu pihak, Aceh memiliki catatan yang panjang tentang perlawanan terhadap Belanda dan integrasi yang minimal dengan wilayah Indonesia lainnya. Minimalnya integrasi ini disebabkan karena pada masa kolonial masyarakat Aceh hampir-hampir tidak berhubungan dengan organisasi-organisasi nasionalis di berbagai daerah lain di Nusantara. Di lain pihak, perjuangan rakyat Aceh dalam revolusi nasional merupakan salah satu perjuangan yang paling menonjol. Peranan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menciptakan suatu hubungan istimewa -- setidaknya dalam pikiran rakyat Aceh -- antara mereka dan Pemerintah Pusat pada masa revolusi.

Dari sudut politik kekuasaan, hubungan ini didasarkan pada situasi saling tergantung. Bagi Pemerintah Pusat, pentingnya Aceh terletak dalam kenyataan bahwa daerah itu merupakan satu-satunya wilayah Republik yang benar-benar merdeka dan berada di luar kendali Belanda sepanjang periode 1945-1949. Pada satu sisi, pentingnya peranan Aceh dalam revolusi nasional, dalam arti menyediakan pejuang dan dukungan keuangan, memperkuat kemampuan tawar-menawar rakyat Aceh pada masa revolusi dalam memperjuangkan tuntutan mereka terhadap pemerintah nasional. Kebutuhan akan dukungan rakyat Aceh menyebabkan Pemerintah Pusat memanjakan rakyat Aceh dengan memberikan jabatan-jabatan tinggi kepada para pemimpin di daerah itu, terutama kepada

kelompok yang dominan, yaitu kaum ulama. Pada sisi lain, dalam perjuangan menentang Belanda, para pemimpin Aceh telah mengaitkan keselamatan mereka sendiri dengan nasib Republik. Dalam pandangan mereka, kekalahan Republik mungkin akan mempercepat berakhirnya kekuasaan politik mereka, sebab kekalahan itu akan membuka lagi kesempatan bagi Belanda untuk membalas dendam dengan mendudukkan kembali saingan mereka, kaum *ulebalang* (bangsawan),¹ pada tampuk kekuasaan di daerah itu. Kepentingan ulama Aceh akan dukungan Pemerintah Pusat tampak pada keputusan mereka bergabung dengan partai politik di tingkat nasional, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).

Namun, sifat hubungan antara Aceh dan Pemerintah Pusat pada masa revolusi juga ditandai oleh kenyataan bahwa Aceh memiliki otonomi yang efektif. Revolusi nasional menyebabkan rakyat Aceh memperoleh kembali otonomi di bidang sosial, ekonomi, dan politik, sebab Pemerintah Pusat tidak mampu campur tangan dalam masalah-masalah setempat. Kenyataan bahwa rakyat Aceh berhasil mencegah Belanda menguasai kembali daerah mereka memperkuat rasa otonomi mereka. Namun demikian, rakyat Aceh sangat setia kepada kepemimpinan nasional selama masa revolusi itu. Tidak sukar bagi mereka untuk tetap setia kepada Pemerintah Pusat, sebab mereka merasa aman dengan otonomi yang telah mereka miliki. Tetapi di lain pihak, otonomi ini menyebabkan Pemerintah Pusat kehilangan muka karena sering dihadapkan pada situasi yang memaksa Pemerintah Pusat tunduk pada tuntutan Aceh sebagai imbalan atas kesetiaan mereka.

Tatkala revolusi berakhir, konsolidasi kekuasaan oleh para pemimpin pusat juga mengakhiri hubungan baik yang telah ada antara Pemerintah Pusat dan para pemimpin Aceh. Tamatnya hubungan baik ini mempunyai akibat yang panjang, dan pada kenyataannya, menurut pendapat saya, mendorong rakyat Aceh memberontak. Memang, dalam pandang-

1. Di Aceh, ulama memakai gelar *Teungku* (disingkat Tgk.), yang juga dipakai oleh rakyat biasa dalam membahasakan setiap orang lelaki; dalam hal yang kedua istilah *teungku* berarti "saudara". Gelar *ulebalang* semula berarti "kepala *nanggro*". Masyarakat Aceh juga menyebut kaum bangsawan, yang biasanya menyandang gelar *Teuku* (disingkat, T.) sebagai *ulebalang*. Akan tetapi dalam buku ini saya menggunakan *Ulebalang* dengan "U" besar untuk menunjuk pada kepala *nanggro*, lain dari itu istilah tersebut hanya bermakna "bangsawan".

an rakyat Aceh berkembangnya hubungan yang kaku antara Aceh dan Jakarta mengandung arti bahwa Pemerintah Pusat tidak lagi bersedia melayani para pemimpin Aceh dengan baik. Kenyataan bahwa Pemerintah Pusat diam-diam menyetujui tindakan para pemimpin Aceh pada masa paling sulit selama revolusi, dan kemudian melupakan mereka sesudah kemerdekaan tercapai, menimbulkan dendam di kalangan rakyat Aceh. Mereka merasa terhina karena status propinsi mereka dibatalkan pemerintah, dan nilai-nilai keagamaan mereka diabaikan para pejabat yang datang ke daerah itu. Hal ini menimbulkan rasa kedaerahan yang kuat, yang kemudian mengarahkan rakyat pada sebuah pemberontakan berdarah.

Kenyataan ini membawa kita pada berbagai tafsiran tentang penyebab pemberontakan Aceh. Sebuah interpretasi yang penting menilai pemberontakan itu sebagai ungkapan konflik di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat Aceh sendiri. Tafsiran ini sangat dipengaruhi asumsi bahwa perkembangan politik di Aceh sesudah tercapainya kemerdekaan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kehidupan politik masa lalu, yang didominasi pertikaian antara kaum ulama dan *ulebalang*. Di kalangan sarjana asing, agaknya Wertheim-lah sarjana pertama yang mengakui pentingnya arti konflik ulama-*ulebalang* sebagai faktor penyebab pemberontakan. Perselisihan di antara kedua kelompok ini muncul kembali, atau lebih tepat, berlanjut, pada masa sesudah merdeka. Sebab, revolusi tidak melahirkan keadaan yang berbeda dari masa sebelumnya. Tentang hasil revolusi nasional ini Wertheim menulis, "Apa yang dipelihara oleh tata aristokrasi lama diintegrasikan ke dalam tata sosial baru".² Perkembangan demikian menimbulkan perselisihan lagi antara ulama dan *ulebalang*, karena sekarang *ulebalang* mempunyai kesempatan untuk balas dendam terhadap ulama, yaitu pihak yang telah menyingkirkan mereka pada masa revolusi nasional.

Dalih semacam ini juga dianut oleh Pemerintahan Ali Sastroamidjjo,³ serta S.M. Amin,⁴ bekas gubernur Sumatera Utara dan seorang

2. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, (The Hague: W. van Hoeve, 1969), edisi kedua yang diperbaiki, hal. 165.

3. Kementerian Penerangan RI, *Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueb* (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1953); selanjutnya akan dikutip sebagai *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*.

4. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan N.V., 1956).

penulis kepolitikan Aceh yang terkemuka. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menolak setiap pendapat yang menghubungkan pemberontakan di Aceh itu dengan penolakan tuntutan otonomi rakyat Aceh oleh pemerintahnya. Seperti Wertheim, ia percaya bahwa di balik gerakan para pemimpin Aceh terdapat konflik dengan kaum *ulebalang*. Wertheim dan Ali Sastroamidjojo yakin, karena pertikaian itu muncul kembali dan mengancam pengaruh ulama dalam gelanggang politik pada awal tahun 1950-an, maka para pemimpin ulama mencoba mengatasinya dengan mencari dukungan dari Pemerintah Pusat. Karena Pemerintah Pusat menolak memberikan dukungan dengan membiarkan perselisihan itu berlangsung terus, mereka menanggapinya dengan menuntut otonomi untuk Aceh. Dengan demikian, tuntutan otonomi Aceh oleh pemerintah tidak dianggap sebagai penyebab pemberontakan yang sesungguhnya. Pemerintah menganggap tuntutan tersebut hanya sebagai selubung pertikaian antara ulama dan *ulebalang*. S.M. Amin malah sama sekali meragukan sumbangan faktor agama terhadap timbulnya pemberontakan itu. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa para pemimpin Aceh hanya memanipulasi agama guna memperoleh dukungan rakyat.

Di lain pihak, Feith melihat pemberontakan itu dengan cara yang berbeda. Meskipun memberikan perhatian pada keadaan setempat, termasuk perselisihan antara ulama dan *ulebalang*, Feith menjelaskan pemberontakan itu terutama dalam kaitannya dengan kepolitikan di tingkat nasional, khususnya konflik antara Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada saat konflik di antara kedua partai besar ini mencapai tahap baru pada tahun 1953, yaitu pengucilan Masyumi dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dikuasai PNI, pecalah pemberontakan di Aceh, salah satu basis terkuat Masyumi.⁵ Dalam tafsiran ini, pemberontakan dilihat sebagai ungkapan aspirasi Islam dan dihubungkan dengan turun-naiknya pengaruh Masyumi dalam pemerintahan. Interpretasi ini menyiratkan bahwa pemberontakan itu tidak akan meletus bilamana Masyumi tidak disisihkan dari Kabinet Ali pada pertengahan tahun 1953 (baru pertama kalinya terjadi). Hal ini tidak lain karena Aceh menganggap penyingkiran Masyumi sebagai pertanda bahwa pemerintah akan menghadapi para pemimpin setempat dengan cara yang lebih keras. Karena

5. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968), hal. 343-348.

khawatir akan tindakan ini, rakyat Aceh mendahului dengan melancarkan pemberontakan sebelum Kabinet Ali berbuat sesuatu terhadap mereka.

Pendekatan ketiga memandang pemberontakan sebagai akibat konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat yang timbul karena perbedaan kepentingan. Dalam pandangan ini, kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang mengejar sentralisme melalui birokratisasi telah menyebabkan perselisihan dengan para pemimpin Aceh yang sedang memperjuangkan otonomi daerah mereka. Sehubungan dengan kecenderungan pemerintah ke arah sentralisme dan rasa identitas rakyat Aceh yang kuat, maka kegagalan Pemerintah Pusat untuk mengabdikan tuntutan otonomi rakyat Aceh menjadi penyebab pemberontakan. Pertikaian ulama-*ulebalang* dan konflik Masyumi-PNI di Jakarta, oleh para penganut pandangan ini dianggap sebagai masalah sampingan. Di Aceh, tafsiran ini pada umumnya dianut oleh mereka yang tidak berorientasi kepada *ulebalang*, di samping para penentang Kabinet Ali di Jakarta. Selain mereka, Nawawi⁶ pun merupakan pendukung teguh tafsiran ini.

Pandangan ini menyatakan bahwa regionalisme di Aceh dinyalakan oleh besarnya harapan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang telah diidam-idamkan para pemimpin Aceh sejak akhir tahun 1920-an. Sejak itu, para ulama reformis mencurahkan segenap pikiran untuk pertumbuhan sosial ekonomi yang mereka harapkan akan dapat menciptakan suatu masyarakat Aceh yang baru, suatu masyarakat yang dapat menerima kemajuan.⁷ Ketetapan hati yang sangat kuat terhadap pembangunan itu tidak pernah mendapat tantangan yang serius dari kaum ulama tradisional. Oleh karena itu harapan yang besar ini menyebar luas dan menerpa sebagian besar masyarakat Aceh. Akan tetapi pecahnya Perang Dunia II yang diikuti oleh revolusi nasional menghentikan rencana-rencana kaum ulama reformis secara mendadak. Oleh sebab itu kaum reformis melihat dengan penuh harap akan datangnya kemerdekaan, yang mereka harap menjadi basis untuk mewujudkan program reformis mereka.

6. M.A. Nawawi, "Regionalism and Regional Conflict in Indonesia" (disertasi doktor, Princeton University, 1968), hal. 344-347.

7. Perkembangan ini telah dibahas secara mendalam oleh James T. Siegel dalam *The Rope of God* (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969), terutama hal. 116-133.

Dengan dukungan yang kuat dari sebagian besar penduduk, reformisme ini disalurkan melalui PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang didirikan pada tahun 1939 dan dipimpin oleh seorang ulama muda, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam melancarkan gerakan pembaharuan, kaum reformis ini tidak menganut pendekatan seperti Muhammadiyah,⁸ yang dalam penilaian rakyat Aceh cenderung merendahkan pandangan-pandangan tradisional para ulama setempat. Berbeda dari Muhammadiyah, para pemimpin PUSA berusaha menghindari fanatisme kaum tradisional dengan menggunakan pendekatan persuasif yang dapat mencegah terjadinya serangan yang keras terhadap mereka. Pendekatan ini memungkinkan organisasi itu merangkul tidak hanya kaum ulama reformis, melainkan juga sejumlah besar ulama tradisional. Pendekatan ini jugalah yang, di samping kenyataan bahwa gerakan reformis Muhammadiyah dikendalikan oleh ulama-ulama Minangkabau dan melibatkan unsur-unsur *ulebalang* dalam kepemimpinan setempat, menyebabkan para ulama reformis Aceh lebih menyukai PUSA daripada Muhammadiyah. Agaknya karena pendekatan persuasif inilah, di samping karena PUSA mendapat dukungan rakyat, sikap kebanyakan ulama tradisional terhadap kaum reformis pada masa kolonial itu hampir pasif sama sekali. Namun, pada akhirnya, setelah kaum reformis memperoleh kekuasaan politik pada masa revolusi nasional, para ulama tradisional merasa perlu menentang PUSA, yakni ketika mereka menyadari bahwa pengaruh mereka terhadap rakyat mulai terancam.⁹ Karena itu tidak terlalu mengherankan jika ketika ulama-ulama reformis PUSA memberontak terhadap Pemerintah Pusat pada tahun 1953, banyak ulama tradisional yang memihak pemerintah.

Pada hemat saya, masing-masing tafsiran di atas lebih memperhatikan suatu unsur tertentu dalam situasi tersebut dan yang mengakibatkan konflik. Karena terlalu menekankan suatu unsur tertentu sehingga merugikan unsur lainnya, dalam beberapa hal kasus-kasus tersebut memberikan penjelasan yang tidak sempurna, dan tidak menjelaskan semua

8. Gerakan Muhammadiyah, yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912, merupakan suatu organisasi sosial keagamaan yang bertujuan memperbaharui pengajaran dan kepercayaan Islam.

9. Untuk studi yang mendalam tentang kepolitikan ulama tradisional dan reformis selama masa revolusi di Aceh, lihat Nazaruddin Sjamsuddin, "The Course of the National Revolution in Aceh, 1945-1949" (tesis MA, Monash University, 1974), *passim*.

fakta secara memadai. Hal ini terjadi karena penjelasan kadang-kadang dibuat untuk tujuan politik tertentu, seperti dalam penjelasan Kabinet Ali dan Gubernur Amin. Ketidaksempurnaan mungkin pula disebabkan oleh kurang lengkapnya fakta, sebagaimana yang terdapat dalam kasus Wertheim dan Feith. Oleh sebab itu, saya ingin menampilkan suatu penjelasan yang lebih eklektis, yang menggabungkan unsur-unsur yang kuat dari sejumlah interpretasi ini sambil menunjukkan beberapa keterbatasannya. Penjelasan saya lebih diperdalam dengan memasukkan keterangan tentang mengapa pemberontakan itu berakhir sebagaimana ia dimulai, dan bagaimana sumber utama dukungannya berubah antara tahun 1953-1961.

Penafsiran saya tentang pemberontakan ini didasarkan pada upaya membedakan berbagai unsur yang membentuk setiap kubu agama. Perbedaan-perbedaan ini, sebegitu jauh telah diabaikan oleh banyak sarjana. Dengan memperhatikan keterlibatan para pemimpin agama dalam politik, menjadi jelas bahwa konfigurasi keagamaan tidak seluruhnya terdiri atas para ulama, karena politik mengharuskan mereka menarik dukungan dari luar dunia mereka sendiri. Proses penarikan ini memaksa kita melihat lebih dekat para anggota masing-masing kubu itu yang sesungguhnya, yakni untuk membedakan para ulama dari unsur-unsur bukan-ulama, yang dalam istilah Arab disebut "zuama". Perbedaan ini perlu dibuat karena di antara keduanya mungkin terdapat aspirasi dan pandangan politik yang berbeda, yaitu yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang. Istilah zuama dalam konteks ini menunjuk pada para pemimpin Muslim yang mempunyai cukup pengetahuan tentang Islam tetapi, berbeda dari para ulama, tidak menganggap pengajaran atau penyebaran agama dengan cara lain sebagai profesi mereka. Dengan demikian, kriteria utama dalam menentukan apakah seorang pemimpin itu ulama atau zuama adalah pekerjaannya, dan bukan pengetahuan dia tentang Islam. Dalam pemerintahan, para ulama biasanya memilih jabatan-jabatan yang berhubungan dengan masalah keagamaan, sementara zuama umumnya terlibat dalam bidang-bidang sekular.

Namun demikian, karena ulama dan zuama bergabung dalam partai politik yang berlatar belakang keagamaan, agak sukar menerangkan aliansi politik mereka di luar perjuangan kekuasaan pada tingkat intra dan antarkelompok. Hal ini terutama berlaku untuk kaum ulama sendiri, di mana yang lebih menonjol di antara mereka pun memasuki partai

politik Islam yang berbeda. Dalam hal ini penggunaan istilah "tradisional" dan "reformis" masih tetap perlu. Kaum ulama reformis PUSA berkumpul dalam Masyumi ketika mereka merasa perlu bergabung dengan suatu kekuatan politik luar sesudah proklamasi kemerdekaan, sementara kaum ulama tradisional mengaitkan diri mereka dengan Perti (Pergerakan Tarbiyah Islamiyah), sebuah partai tradisional yang berpusat di Sumatera Barat. Para zuama, yang kebanyakan anggota PUSA, tidak bergabung dalam Masyumi melainkan mendirikan cabang partai reformis lain, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), yang kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh pertikaian intrakelompok. Dalam pada itu, sejumlah unsur *ulebalang* yang menganggap diri sebagai zuama masuk ke dalam Perti.

Sekalipun pembedaan ulama-zuama sukar dipergunakan untuk menjelaskan aliansi politik para pemimpin, pembedaan ini tetap dapat diterapkan mengingat sifat pemberontakan dan kepemimpinannya itu. Dalam hubungan ini, di satu pihak, ciri kedaerahan dan keagamaan pemberontakan itu sejajar dengan kepentingan para zuama dan ulama yang terlibat di dalamnya, seperti akan kita lihat nanti. Di lain pihak, jelas bahwa kepemimpinan pemberontakan didominasi oleh pemimpin PUSA, sehingga pemberontakan itu dapat pula dikatakan sebagai pemberontakan PUSA. Oleh karena itu, kepemimpinan pemberontakan memiliki suatu kesamaan dengan kepemimpinan PUSA, yakni para pemimpin terbagi atas unsur-unsur ulama dan zuama. Jadi, pendekatan ulama-zuama dapat didayagunakan untuk menjelaskan sifat pemberontakan Aceh secara keseluruhan, termasuk tentang kepemimpinannya. Pendekatan ini mungkin pula bermanfaat untuk menerangkan mengapa pemberontakan itu pecah dan mengapa kemudian berakhir.

Dengan bantuan pembedaan ini, kita sekarang mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana pemberontakan itu dimulai dan berakhir, dalam kaitannya dengan suatu analisa kelompok dan kepentingan. Gambaran kepolitikan Aceh pada awal tahun 1950-an memperlihatkan bahwa para pemimpin ulama dan zuama memiliki bentuk-bentuk kekecewaan yang berbeda terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Kelompok pertama pada dasarnya bersifat keagamaan dan sangat sulit dipuaskan dalam hal kaidah agama. Kelompok kedua lebih memperhatikan masalah otonomi dan pengaruh politik, yakni dua hal yang konsesinya mungkin diberikan kepada mereka. Kenyataan bahwa kedua kelompok

ini telah bergabung dalam suatu oposisi terhadap Pemerintah Pusat pada tahun 1951-1953, di samping adanya warna Islam yang kuat dalam pemberontakan itu, membantu kita menjelaskan intensitas kekecewaan yang meletus dalam bentuk pemberontakan.

Bagi para ulama, otonomi bukanlah suatu hal yang sangat dikhawatirkan dan bukan pula merupakan sumber langsung pengaruh politik. Mereka menganggap otonomi semata-mata sebagai alat untuk memelihara dan melindungi nilai-nilai agama masyarakat Aceh yang merupakan kepentingan mereka yang lebih besar. Tentu saja mereka mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut tanpa otonomi, tetapi mereka khawatir intervensi politik pemerintah yang tidak simpatik mungkin mengganggu dunia yang ingin mereka bina. Dengan demikian, bagi kaum ulama, kepentingan agama jauh lebih penting daripada kepentingan politik. Alasan inilah yang menyebabkan mereka siap menyerahkan semua posisi non-agama kepada para zuama, baik pada masa revolusi maupun sesudahnya, asalkan para zuama itu berketetapan hati untuk melindungi nilai-nilai agama rakyat Aceh. Bagaimanapun, tentunya sudah jelas bagi kaum ulama bahwa politik, khususnya masalah otonomi, cenderung berpengaruh besar terhadap perkembangan nilai-nilai agama. Dalam hubungan ini, mereka telah menyaksikan bagaimana daerah mereka dilanda oleh gagasan dan praktek-praktek non-Islam yang berlawanan dengan kepercayaan rakyat, yaitu ketika Aceh kehilangan status propinsi pada tahun 1951. Mereka juga menyadari tidak ada jalan untuk menghambat nilai-nilai baru itu kecuali jika mereka memiliki pengaruh politik dalam pemerintahan. Tatkala gagal mencegah masuknya nilai-nilai tersebut, dendam mereka terhadap Pemerintah Pusat pun meningkat. Namun demikian, mungkin timbul pertanyaan, apakah para ulama non-PUSA juga merasa kecewa dengan dihapuskannya status propinsi itu? Tampaknya mereka tidak kecewa karena persaingan antarkelompok di antara para ulama PUSA dan Perti tidak memberikan banyak pilihan kepada kelompok yang terakhir selain bersahabat dengan musuh-musuh kelompok pertama.

Berbeda dari ulama, para zuama langsung menghubungkan otonomi daerah dengan kepentingan politik mereka. Mereka menganggap penghapusan status propinsi sebagai ancaman terhadap posisi mereka dalam pemerintahan daerah. Dengan tindakan pemerintah yang menghapuskan otonomi itu, para zuama dihadapkan pada situasi yang menyebabkan

mereka tidak mempunyai alternatif lain selain mempertahankan posisi mereka dalam pemerintahan. Hal ini karena, berbeda dari kaum ulama, mereka tidak memiliki peranan dalam masyarakat, yaitu peranan yang dapat mereka duduki kembali setelah kedudukan dalam pemerintahan mereka lepaskan. Dengan demikian, tampak bahwa penghapusan otonomi oleh Pemerintah Pusat memukul zuama lebih keras daripada ulama, dan justru dalam hal inilah zuama merasa lebih terhina. Oleh para zuama, alasan pemerintah bahwa di Aceh tidak cukup tersedia pegawai yang ahli untuk menjalankan pemerintahan daerah dirasakan sangat provokatif, sementara kaum ulama merasa bebas dari tuduhan semacam itu sebab mereka memang sangat mampu dalam bidang mereka sendiri. Oleh karena itu, zuama harus melupakan segala perselisihan yang pernah terjadi dengan ulama dan bekerja sama dengan mereka untuk menentang Pemerintah Pusat.

Selanjutnya perlu pula dipersoalkan mengapa pemberontakan tersebut kemudian berhenti. Perlu diingat, situasi di Aceh pada masa sebelum berakhirnya pemberontakan sangat rumit. Secara politis, baik di tingkat nasional maupun daerah, terdapat semacam situasi kompromis yang mengurangi, jika bukan menghapuskan, penyebab ketegangan antara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat. Bila dibandingkan dengan keadaan politik pada awal tahun 1950-an, ketika pemberontakan meletus, suatu perubahan besar telah terjadi dalam kepolitikan Indonesia sesudah awal tahun 1957. Perubahan ini ditandai oleh berpindahannya pusat kekuasaan dari partai politik ke tangan Presiden Soekarno dan para pemimpin militer pusat, yang pada akhirnya memunculkan sistem Demokrasi Terpimpin.¹⁰ Dalam pengertian politik, perubahan ini memang menghasilkan suatu pemerintahan yang relatif stabil, karena Soekarno berhasil menguasai sistem politik dan menjadikan dirinya tokoh sentral. Dalam pengertian militer, sejak tahun 1959 Angkatan Darat telah dapat menguasai daerah-daerah yang memberontak, terutama sesudah kalahnya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958, sehingga mampu memberikan dukungan yang kuat bagi stabilitas politik. Dengan kata lain, kekuasaan Angkatan Darat kini lebih besar dari masa sebelumnya dan para pemimpinnya lebih bersatu dan mampu meng-

10. Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy", dalam *Indonesia*, diedit oleh Ruth T. McVey (New Haven: HRAF Press, 1967), edisi yang diperbaiki, *passim*.

dalikan perlawanan daerah, meskipun dendam daerah mungkin masih tetap membara.

Kendatipun bertambah kuatnya pengaruh Angkatan Darat membuka pintu bagi suatu sistem yang sentralistis, pada waktu yang sama juga secara paradoks mempunyai efek yang memungkinkan penguasa militer daerah (dalam samaran "penguasa perang") menikmati otonomi. Salah satu akibat dari perubahan ini terhadap suatu daerah yang tercabik oleh pemberontakan seperti Aceh ialah bahwa kehidupan politik sangat diwarnai oleh upaya mengembalikan keamanan dan perdamaian. Kecenderungan ini menyebabkan partai-partai politik membatasi kegiatan dalam dewan perwakilan daerah, yang pada kenyataannya hampir tidak memiliki kekuasaan. Ini berarti, partai-partai dapat dengan mudah didiamkan oleh pimpinan militer setempat jika mereka menentang kebijaksanaan pimpinan militer dalam rangka pemulihan keamanan dan perdamaian.

Adanya kecenderungan ke arah otonomi de facto dalam sistem sentralistis memungkinkan sistem politik meredam sebagian dendam di berbagai daerah. Di Aceh, sejak tahun 1957 situasi juga menguntungkan usaha untuk mengakhiri pemberontakan. Sementara pemberontakan, dan kenyataan bahwa pemberontakan itu sangat sukar dihancurkan, memperlihatkan kekuatan para pemimpin PUSA, upaya untuk memulihkan keamanan pada akhirnya menyebabkan pemerintah mencari jalan untuk membujuk tokoh-tokoh utama PUSA, sehingga merugikan kelompok lain. Pada tahun 1957 pemerintah mengabdikan tuntutan tokoh-tokoh tersebut, yaitu berupa pemberian status propinsi bagi Aceh. Oleh karena itu, kebanyakan kecamatan daerah yang semula dipandang sebagai salah satu penyebab utama pemberontakan, kini menjadi berkurang, terutama setelah Jakarta membentuk kembali Propinsi Aceh dengan seorang gubernur yang berasal dari Aceh serta mengembalikan kesatuan-kesatuan militer dan perwira Aceh ke daerah itu. Kesemua ini dirasakan mencerminkan otonomi daerah yang lebih luas. Dalam kaitan pembangunan ekonomi, otonomi daerah juga memberikan keuntungan bagi rakyat pada umumnya, yaitu melalui penghidupan kembali aktivitas ekonomi, yang didukung oleh perdagangan barter dengan Malaya (kini: Malaysia Barat) dan Singapura, seperti proyek-proyek perbaikan jalan (yang memang penting sekali bagi daerah seperti Aceh), peningkatan jumlah sekolah, dan lain sebagainya.

Perkembangan ini jelas mempengaruhi dan memang mengguncang kepemimpinan pemberontak yang akhirnya, pada tahun 1957, menyetujui gencatan senjata sebagai jawaban atas pendekatan pemerintah. Ternyata, pengaruhnya terasa lebih jauh dari itu. Otonomi yang diberikan kepada Aceh telah memecah kubu kaum pemberontak karena membangkitkan kembali perbedaan antara ulama dan zuama. Para pemimpin zuama yang menentang Jakarta atas dasar dendam kedaerahan, kini merasa bahwa pemberontakan mereka telah mencapai tujuan utamanya, sebab status propinsi telah dikembalikan. Oleh karena itu mereka mendesak kaum ulama agar menghentikan pemberontakan. Tatkala para ulama menolak, kaum zuama kemudian meninggalkan perjuangan dan berunding dengan Pemerintah Pusat. Perundingan ini antara lain menghasilkan status "daerah istimewa" bagi Aceh, khususnya dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.

Walaupun agak sangsi, kaum ulama rupanya tidak mempunyai pilihan selain mengikuti langkah para zuama itu. Meski sadar bahwa mereka didukung oleh sebagian besar rakyat Aceh, para ulama harus mengakui pula bahwa pemberontakan itu telah merugikan mereka sendiri dalam dua hal. Pertama, peranan mereka dalam pemberontakan telah menyebabkan mereka menelantarkan sekolah-sekolah mereka, yang berarti putusannya hubungan dengan murid dan para pengikut lainnya di pedesaan. Kedua, penelantaran ini memberi kesempatan kepada saingan mereka, kaum ulama tradisional, untuk mengembangkan sekolah-sekolah mereka sendiri di tempat-tempat yang berada di luar jangkauan Darul Islam. Malahan, fakta bahwa sebagian besar kekuatan militer Darul Islam bersepakat dengan kaum zuama untuk menerima tawaran pemerintah bahkan membuka kesempatan yang lebih baik bagi ulama tradisional untuk meningkatkan pengaruh mereka, sebab ulama PUSA kini tidak dapat menekan mereka lagi. Walaupun pertumbuhan pengaruh Perti di bagian-bagian lain daerah ini tidak secepat di Aceh Selatan, di mana pemberontak kurang aktif, kenyataan itu tetap mengganggu, terutama pada saat para ulama PUSA tidak mampu memelihara pengaruh mereka.

Namun demikian, hal yang dipikirkan oleh para ulama reformis bukanlah semata-mata meningkatnya pengaruh kaum ulama tradisional. Mereka juga harus memperhitungkan semangat dan perasaan rakyat. Sebagai pendukung utama pemberontakan, terserah pada rakyat untuk

menilai apakah perjuangan masih berharga untuk diteruskan atau tidak. Tanpa dukungan rakyat, perjuangan tentu tidak akan dapat bertahan. Para ulama yang memberontak itu akan dapat mempertahankan dukungan rakyat sejauh mereka mampu memperlihatkan bahwa mereka masih berada di jalan menuju tujuan semula. Apa yang paling meresahkan para ulama adalah, sikap keagamaan mereka dalam menentang Jakarta hanyalah menarik perhatian rakyat sampai tahun 1959, tatkala Aceh mendapat status daerah istimewa. Kebanyakan orang menilai status istimewa ini, khususnya dalam bidang agama, telah memenuhi tuntutan para ulama. Rakyat berpendapat bahwa pemberontakan telah mencapai tujuannya. Oleh karena itulah kembalinya para zuama dapat diterima rakyat dan mereka tidak memperlakukan zuama sebagai "pengkhianat", meskipun didesak bersikap demikian oleh kaum ulama. Dengan demikian, para ulama kehilangan sebagian dari pembenaran dasar bagi perjuangan mereka. Tetapi upaya untuk memperoleh syarat-syarat penyelesaian yang lebih baik memperlambat berakhirnya pemberontakan untuk beberapa lama, walaupun suatu penyelesaian pada akhirnya tidak dapat dihindarkan.

Apakah perlawanan rakyat Aceh akan berhenti jika Pemerintah Pusat, yang memiliki kemampuan militer untuk mengalahkan mereka, tidak bersedia memberikan konsesi politik? Atau, apakah pemberontak akan meneruskan perjuangan mereka sekiranya pemerintah tidak cukup kuat secara militer namun bersedia menawarkan konsesi? Menjawab pertanyaan pertama, sangat sukar membayangkan rakyat Aceh, yang mempunyai reputasi tradisi perang dan perjuangan yang menonjol dalam menentang Belanda, akan tunduk pada tekanan militer Jakarta. Apabila Jakarta menolak mengabulkan tuntutan utama mereka, rakyat Aceh jelas akan meneruskan perjuangan sampai mereka benar-benar dikalahkan. Tetapi bilamana hal ini terjadi di Aceh, berlainan dengan di Sulawesi Selatan di mana Kahar Muzakkar tidak menikmati dukungan penuh dari penduduk setempat, rakyat Aceh akan menganggapnya sebagai "pasifikasi" suku Jawa, dan dengan demikian akan menyamakannya dengan strategi Belanda pada masa sebelum perang. Dalam hal demikian, dendam mereka akan hidup terus, mungkin untuk selamanya.

Masih menyangkut pertanyaan pertama, sulit pula membayangkan kemungkinan bahwa ancaman tindakan militer semata-mata akan memecah koalisi ulama-zuama dalam kepemimpinan kaum pemberontak serta

akan mengakhiri pemberontakan tersebut. Kita memang telah melihat bahwa unsur-unsur zuama bersedia menanggapi tawaran otonomi Jakarta pada akhir tahun 1950-an. Tanggapan positif mereka, dengan satu dan lain cara, terdorong oleh kesediaan rakyat untuk menghargai adanya perubahan penting dalam kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Sekiranya mereka tidak memperoleh syarat yang wajar dari pemerintah, yang jelas menunjukkan kepada rakyat bahwa tujuan pemberontakan telah tercapai, kaum zuama akan dianggap telah meninggalkan perjuangan dan mereka akan dicap "pengkhianat". Sanksi sosial semacam ini akan mengakibatkan mereka tidak akan diterima dalam masyarakat mereka sendiri. Kenyataannya ialah, bahkan setelah Aceh mendapatkan kembali status propinsinya, kaum zuama tidak dapat serta-merta meninggalkan para ulama, yang masih berpengaruh baik di dalam maupun di luar lingkungan pemberontak dan masih berperang atas dasar agama, sampai Jakarta juga bersedia memuaskan rakyat Aceh dalam bidang agama.

Di lain pihak, rakyat Aceh agaknya akan siap menghentikan perjuangan mereka pada akhir tahun 1957 sekiranya pemerintah bersedia memuaskan mereka dalam bidang agama, sekalipun secara militer Jakarta tidaklah sekuat tahun 1959. Suatu indikasi yang baik tentang kemungkinan ini dapat ditemukan pada gencatan senjata yang tercapai pada tahun 1957 dan bertahan sampai awal tahun 1959. Gencatan senjata tersebut dicapai saat Pemerintah Pusat sedang menghadapi ancaman dari para panglima militer daerah di Sumatera dan Sulawesi. Justru pada saat yang sulit, yaitu ketika pemerintah terpaksa memusatkan sebagian besar kekuatan militernya di tempat lain, kaum pemberontak di Aceh menyetujui gencatan senjata. Situasi ini pasti memberikan kesempatan yang lebih baik kepada pemberontak Aceh bilamana mereka tidak mengurangi kegiatan pada waktu itu. Tetapi kenyataannya ialah, mereka memilih bekerja sama dengan penguasa sipil dan militer setempat, yang pada waktu itu sebagian besar terdiri atas putra-putra Aceh. Namun demikian, ketika kemudian ternyata bahwa mereka tidak dapat memperoleh konsesi lebih jauh lagi dari Jakarta, mereka pun menggagalkan gencatan senjata tersebut padahal, dengan hancurnya gerakan PRRI, posisi pemerintah telah menjadi lebih baik.

Apakah makna daripada berakhirnya pemberontakan di Aceh itu bagi masalah integrasi nasional di Indonesia? Kita dapat membuat hipotesa

bahwa berakhirnya pemberontakan tersebut berkaitan dengan adanya suatu konsensus normatif antara Aceh dan Jakarta yang lebih tinggi tingkatnya bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun-tahun 1950-1953. Perubahan-perubahan dalam bidang politik, baik pada tingkat nasional maupun daerah, telah membantu terbentuknya konsensus normatif yang lebih besar di antara para pelaku politik, dan hal ini memperkuat proses integrasi nasional itu. Salah satu perubahan utama yang terjadi antara tahun 1953 dan 1961, yaitu diperkenalkannya Demokrasi Terpimpin, telah meningkatkan harapan di kalangan rakyat biasa bahwa sistem politik mereka yang baru adalah berbeda dari sistem sebelumnya, yang penuh dengan pertikaian pada tingkat nasional dengan akibat terabaikannya kepentingan daerah. Kembali ke UUD 1945, yang menandai kelahiran Demokrasi Terpimpin, tidak hanya meningkatkan perasaan nasionalisme, melainkan juga menghidupkan kembali harapan akan perbaikan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sesungguhnya sistem baru ini mampu menampung keresahan daerah melalui peremajaan semangat revolusi yang penuh dengan slogan-slogan simbolis seperti "masyarakat adil dan makmur" dan "pembangunan daerah".

Perubahan penting lainnya ialah bahwa semua perlawanan daerah, kecuali Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar, pada tahun 1959-1960 telah melepaskan usaha untuk mengubah syarat dasar hubungan pusat-daerah dan sistem politik secara keseluruhan. Di samping itu, para penggerak perlawanan tersebut telah menetapkan untuk menerima sistem itu, seperti dikemukakan Feith dalam tulisannya yang berjudul "Dynamics of Guided Democracy".¹¹ Oleh karena itu, harapan tinggi yang tidak realistis, yang sangat mengecewakan daerah pada awal tahun 1950-an, telah membisu pada tahun-tahun 1960-1961 karena rakyat cenderung untuk menerima sistem politik baru yang, sampai batas-batas tertentu, bersifat akomodatif terhadap rasa ketidakpuasan daerah. Bahkan kekhawatiran mereka akan pengaruh komunis yang sedang meningkat telah diperkecil oleh pengungkapan gagasan-gagasan anti-komunis dalam banyak program indoktrinasi pemerintah, di samping peranan yang dimainkan Angkatan Darat dalam sistem Demokrasi Terpimpin.

Dalam beberapa hal, pemahaman kita akan perkembangan politik di Aceh selama dekade 1950-an tergantung pada interpretasi yang tepat

11. *Ibid.*, hal. 347-350.

atas jalannya perubahan sosial dan politik selama lima atau enam puluh tahun sebelumnya. Dua perkembangan penting yang menandai masa kolonial dan revolusi dalam sejarah Aceh adalah turun-naiknya pengaruh politik kaum ulama dan *ulebalang*, dan pergesekan antara ulama tradisional dan kaum reformis. Karena berhasil dengan kebijaksanaan untuk memperkuat kekuasaan para *Ulebalang* dan ditantang sepenuhnya oleh kaum ulama beserta pengikut mereka selama berlangsungnya Perang Aceh (1873-1903), maka sepanjang masa kekuasaan selanjutnya Belanda menganut kebijaksanaan yang sama, yaitu mendukung wibawa para *Ulebalang* sebagai penguasa yang berdaulat di wilayah masing-masing (yang disebut *nanggro*) dan membatasi pengaruh kaum ulama. Sesudah runtuhnya kekuasaan Belanda pada tahun 1942, Jepang juga mempertahankan perimbangan antara kedua kelompok itu, meskipun kurang mendukung kaum *ulebalang* dan memberikan kelonggaran kepada ulama. Oleh sebab itulah kaum *ulebalang* menyadari adanya ancaman potensial terhadap wibawa mereka menjelang akhir pendudukan Jepang. Tatkala dukungan asing terhadap kekuasaan kaum *ulebalang* runtuh pada tahun 1945, maka terjadilah pertikaian terbuka di antara kedua pihak, dan kekuatan-kekuatan *ulebalang* dengan mudah dihancurkan oleh saingannya.

Pada pihak lain persaingan antara ulama tradisional dan ulama reformis meningkat, secara perlahan-lahan tapi tenang, pada akhir masa kolonial. Namun, tatkala revolusi dan penghancuran *ulebalang* membawa para ulama reformis kepada kekuasaan, hubungan di antara kedua kelompok agama ini pun berubah secara mendasar. Menyadari bahwa kekuasaan politik kini berada di tangan kaum reformis, dan bahwa pengaruh keagamaan mereka sendiri mungkin akan terancam, maka kaum tradisional pun mulai menentang kaum reformis secara fisik.

Kelak kita akan melihat betapa pentingnya kedudukan kedua kubu antagonisme sosial ini dalam konflik tersebut selama dasawarsa 1950-an. Namun untuk menempatkannya dalam perspektif dan mencegah timbulnya pola interpretasi yang sangat kaku, kiranya ada manfaatnya untuk meninjau perkembangan perpecahan ini pada era akhir kolonial dan revolusi. Sepanjang menyangkut kekuasaan *ulebalang*, pertama-tama, pemahaman atas dinamika politik masa kolonial akan berguna dalam menjelaskan mengapa kekuatan-kekuatan *ulebalang* memudar dengan cepat pada pertengahan tahun 1950-an setelah mereka kehilangan pelin-

dung dan pendukung dari luar daerah. Dinamika ini juga menjelaskan mengapa perpecahan ulama-*ulebalang* memudar sehingga menjadi tidak penting pada tahun 1960 ketika Pemerintah Pusat tidak mampu lagi mendukung kaum bangsawan itu seperti tahun-tahun 1950-1953. Kedua pertikaian reformis-tradisional dalam kubu kaum ulama juga merupakan bagian penting dari faktor penyebab pemberontakan, dalam arti bahwa kaum tradisional telah berpihak pada pemerintah dan menentang kaum reformis. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan asal-muasal perpecahan ini berikut perkembangannya selama masa kolonial dan revolusi.

Kekalahan Aceh terhadap Belanda pada tahun 1903, ketika Sultan menyerah, telah mengganggu perimbangan kekuatan tradisional, yaitu di antara kekuatan-kekuatan sosial-politik utama di Aceh: Sultan, *Ulebalang*, dan ulama. Dalam usaha mengalahkan Aceh, pada tahun 1874 Belanda mencoba mengusik keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan tradisional ini dengan memperkenalkan sistem kekuasaan "pemerintahan sendiri" bagi para *Ulebalang* dalam bentuk *korte verklaring* (perjanjian pendek). Namun tampaknya Belanda tidak begitu puas dengan hasil perjanjian ini, sehingga pada tahun 1898 mereka mengubahnya dan memaksa para *Ulebalang* untuk menganggap wilayah mereka sebagai bagian dari Hindia Belanda dan memandang musuh Belanda sebagai musuh mereka pula.¹²

Berkat kebijaksanaan ini, Belanda berhasil memecah-belah kekuatan-kekuatan Aceh dengan menciptakan konflik terus-menerus antara kelompok-kelompok pro-Sultan dan pro-*Ulebalang*. Kebanyakan *Ulebalang* bersedia menerima *korte verklaring* itu dan hanya sejumlah kecil saja yang tetap setia kepada Sultan. Akan tetapi Sultan sepenuhnya didukung oleh para ulama, yang dengan kukuh menentang Belanda dan pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan dalam perjuangan menentang Belanda. Bersama sejumlah kecil bangsawan yang mendukung Sultan, kaum ulama memberikan warna agama pada perang itu dan bertumpu pada taktik gerilya. Dengan demikian para ulama berhasil memperpanjang perlawanan dan mencegah Belanda meletakkan Aceh di bawah kendalinya secara penuh sampai kira-kira sepuluh tahun setelah Sultan menyerah. Malah Belanda tidak mampu memperkenalkan pemerintahan sipil di

12. J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh, vroeger en nu* (Baarn: Hoelandia Drukkerij, 1939), hal. 285-286.

Aceh sampai akhir tahun 1918, empat puluh lima tahun sesudah pecahnya Perang Aceh.

Setelah berhasil memecah kekuatan Aceh, Belanda menempatkan Aceh dalam suatu karantina politik dan agama. Mereka mencegah masuknya pengaruh politik dari luar yang mungkin bisa memanfaatkan kekecewaan kaum ulama. Barulah pada tahun 1921 Aceh berkenalan dengan gagasan politik luar ketika para pemuda di Sabang, yang kebanyakan bukan asli Aceh, berhubungan dengan komunisme. Dan baru pada tahun 1939 partai politik pertama, Parindra (Partai Indonesia Raya), berdiri di Aceh. Dalam bidang agama, Belanda juga menghalangi misi-misi Kristen menjalankan kegiatan mereka di Aceh.

Penurunan Sultan dari takhta telah menyebabkan hancurnya salah satu dari ketiga unsur perimbangan kekuasaan yang rumit dalam masyarakat Aceh, sehingga mengarah pada konflik antara kepentingan adat dan agama. Untuk menjaga agar konflik potensial di antara kedua kelompok ini tidak berkembang ke arah yang mengganggu sistem kolonial, maka pada dasawarsa akhir pemerintahan kolonialnya, Belanda dengan pintar memainkan tangannya. Sementara tidak mengembalikannya Sultan sebagai pengimbang antara kaum ulama dan *ulebalang*, mereka juga mencegah timbulnya pertikaian terbuka di antara kedua unsur dari struktur kekuasaan Aceh ini. Dalam menjalankan strategi ini, Belanda berkawan dengan para *Ulebalang*,¹³ yakni kelompok terlemah dalam konflik itu, dan melindungi mereka dari kaum ulama dengan jalan memperkuat kekuasaan mereka dalam wilayah mereka masing-masing, namun tanpa kehilangan kontrol atasnya. Pada waktu yang sama Belanda memperkecil pengaruh ulama dalam masyarakat.

Dampak pasifikasi yang paling besar terhadap para ulama datang dari kebijaksanaan yang membuka pintu bagi pendidikan sekular di Aceh. Kaum ulama segera menyadari bahwa Belanda bermaksud menjauhkan pemuda-pemuda Aceh dari pengaruh ulama. Dengan sendirinya mereka sangat prihatin menyaksikan ribuan anak Aceh memasuki berbagai jenis dan tingkat sekolah sekular. Bahkan lebih pahit lagi, banyak di antara anak-anak ini, termasuk anak-anak mereka sendiri, dipaksa Belanda memasuki sekolah-sekolah sekular yang semi-modern itu melalui para

13. Bernhard H.M. Vlekke, *Nusantara, A History of Indonesia* (The Hague dan Bandung: W. van Hoeve, 1959), hal. 326-327.

Ulebalang setempat. Pengaruh kaum ulama dalam pemerintahan juga dikurangi Belanda, dari sebagai pemimpin penting di istana pada masa kesultanan, menjadi penasihat pemerintahan kolonial dalam masalah-masalah keagamaan.

Namun perkembangan sosial-ekonomis ini tidak seluruhnya merugikan kepentingan kaum ulama. Sebab, mereka juga menarik keuntungan dari perkembangan ekonomi, umpamanya melalui peningkatan hasil pertanian dan perluasan sistem pemasaran, sementara horison mental mereka juga meluas berkat perbaikan sarana komunikasi. Pembukaan jalan raya dan kereta api memungkinkan mereka mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya serta memudahkan komunikasi dengan kolega-kolega dan rakyat di luar desa mereka sendiri. Kemudian, popularitas mereka pun meluas melampaui perbatasan kampung mereka. Keuntungan ini menjadi jelas pada tahun 1920-an, ketika mereka terlibat dalam kampanye ekstensif dalam rangka pembaharuan agama.

Kini pergesekan mulai berkembang dalam masyarakat Aceh, yaitu pergesekan antara ulama dari kelompok tradisional dan reformis, di samping antara kaum ulama dan *ulebalang*. Pergesekan ini akan menjadi bagian penting dalam kepolitikan Aceh sepanjang tahun 1940-an dan 1950-an. Walaupun begitu, akan salah kiranya bila kita membayangkan masing-masing kelompok bersifat monolitik, atau bahwa hubungan di antara mereka bersifat antagonistis dalam semua hal.

Kemajuan sekolah-sekolah sekular yang merugikan pendidikan agama menimbulkan perkembangan politik yang rumit sepanjang dua dekade terakhir masa penjajahan Belanda di Aceh. Pada satu sisi, keadaan ini memperkuat hubungan antagonistis antara ulama dan *ulebalang*, dan di sisi lain menyadarkan *Ulebalang-ulebalang* tertentu akan pentingnya gerakan keagamaan. Yang terakhir ini juga menimbulkan baik konflik maupun rekonsiliasi antara ulama dan *ulebalang*.

Sementara itu, ketidakberdayaan ulama-ulama Aceh untuk mengatasi kemunduran pendidikan agama menyebabkan para pemimpin Muhammadiyah di Jawa memutuskan untuk mendirikan cabang Aceh yang pertama di Kutaraja pada tahun 1923, sebelas tahun setelah organisasi itu sendiri didirikan di Yogyakarta. Mendesaknya pembentukan cabang Muhammadiyah di Aceh itu terlihat pada kenyataan bahwa tindakan yang sama tidak dilakukan di daerah lain yang juga sangat kuat keislamannya, yakni Sumatera Barat. Di pantai barat Sumatera itu, Muham-

madiyah baru didirikan oleh pemimpin-pemimpin setempat dua tahun kemudian.

Dalam upaya untuk mendirikan cabang di Aceh, para pemimpin Muhammadiyah agaknya terpaksa bekerja sama dengan unsur-unsur *ulebalang* demi menghindari kecurigaan Belanda. Beberapa orang bangsawan dimasukkan ke dalam organisasi itu, sebagaimana juga halnya dengan sejumlah ulama setempat yang terkenal. Namun demikian, pimpinan organisasi berada di tangan para pemimpin yang berasal dari Minangkabau. Penyertaan para bangsawan di dalam Muhammadiyah memang telah memungkinkan organisasi reformis keagamaan ini untuk menghindar dari kecurigaan penguasa Belanda, akan tetapi, sayangnya; menimbulkan pula kecurigaan ulama-ulama Aceh. Para pemimpin pusat Muhammadiyah akhirnya menyadari hal ini sehingga mereka mengangkat seorang ulama Aceh untuk memimpin cabang Kutaraja semenjak tahun 1929.¹⁴ Namun begitu, karena kepengurusan setempat sangat memihak kepada pemimpin-pemimpin dengan latar belakang Minangkabau, maka Muhammadiyah tidak dapat menjadi sebuah organisasi besar di Aceh.

Keberadaan Muhammadiyah dipandang sebagai suatu tantangan oleh para ulama Aceh. Akibatnya, sejumlah madrasah bermunculan untuk menggantikan *dayah* (pesantren) pada tahun 1928-1929; delapan tahun kemudian terdapat sekurang-kurangnya 98 madrasah di daerah itu.¹⁵ Untuk menyebarkan ajaran agama, para ulama berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memberikan tablig kepada pendengar yang lebih luas. Banyak di antara mereka yang mengajar ke luar kampung mereka sendiri sehingga memperluas horison mereka. Sementara para ulama menyebarkan agama melalui dakwah yang membangkitkan harapan rakyat akan kemajuan, anak-anak muda memasuki sekolah mereka dengan penuh minat. Oleh karena itu, masa ini pada umumnya

14. "Mochammadijah" (Kutaraja, 1935), sebuah brosur; kutipan pada halaman yang tidak bernomor.

15. Lihat "Verslag Tablegh Akbar di Loeboek III Mks. Keurukon dan Pertemoean Oelama-oelama di Koetaradja 1-2 October 1936", sebuah brosur yang dikeluarkan oleh Pengoeroes Besar Djami'ijah Al-Ishlaahijjah, Sungei Limpah (Kutaraja), 1936, hal. 10-12. Sebagai perbandingan, terdapat 328 *volkscholen* (sekolah desa) yang didirikan Belanda di seluruh Aceh sampai tahun 1938, di samping sekolah-sekolah sekular dalam bentuk lain. Lihat Jongejans, *op. cit.*, hal. 264.

dikenal dengan sebutan "zaman kesadaran" atau "zaman kemajuan".¹⁶ Dalam suasana inilah para ulama reformis mendirikan organisasi mereka sendiri, PUSA, dan memilih Daud Beureueh sebagai pemimpin mereka pada tahun 1939.

Karena kebanyakan ulama yang menguasai madrasah dan terlibat dalam penyebaran zaman kemajuan adalah anggota PUSA, di samping karena kenyataan bahwa Muhammadiyah tidak mampu mengembangkan diri, maka semua reputasi atas "kemajuan" disandang oleh organisasi baru itu. Oleh sebab itu dukungan rakyat bagi organisasi tersebut adalah luar biasa. Hal ini tercermin pada dukungan yang diberikan mereka terhadap kegiatan-kegiatan PUSA. Kendatipun, dari namanya, merupakan suatu perkumpulan para ulama, rakyat menganggap PUSA sebagai organisasi mereka. Untuk menampung dukungan rakyat yang luar biasa itu, maka pada tahun 1940 para pemimpin PUSA membentuk suatu organisasi massa, Pemuda PUSA, di bawah kepemimpinan seorang ulama muda, Amir Husin Al-Mudjahid.

Selain mendirikan sekolah-sekolah baru di seluruh daerah, para pemimpin gerakan baru itu juga menyebarkan gagasan keagamaan yang baru dan belum dikenal. Akibatnya, konflik dengan ulama tradisional tidak dapat dihindarkan. Kaum reformis dipimpin oleh Daud Beureueh dan Teungku Hasballah Indrapuri, sedangkan kaum tradisional dipimpin oleh berbagai ulama, yang paling terkenal di antara mereka adalah Teungku Hasan Krueng Kalee. Di lain pihak, gerakan itu menyebabkan adanya rekonsiliasi antara para ulama reformis dan *Ulebalang-ulebalang*. Gerakan tersebut menarik banyak *Ulebalang* ke dalam persaingan untuk membangun *nanggro* mereka; akibatnya mereka bersaing satu sama lain untuk mendirikan sekolah-sekolah, dan berusaha mendapatkan ulama-ulama terkenal untuk mengajar di daerah mereka. Perkembangan ini mendorong tumbuhnya saling pengertian antara beberapa ulama dan *Ulebalang* untuk menentang Belanda apabila ada kesempatan.¹⁷ Rekonsiliasi ini membuka jalan bagi kerja sama selanjutnya di antara kedua kekuatan tersebut. Oleh sebab itu, ketika kaum reformis membentuk

16. Ismail Jakub, "Pergerakan di Atjeh dalam 10 Tahun", *Sinar*, 7 (15 April 1940), hal. 125. Lihat juga Osman Raliby, "Masjarakat Atjeh Baroe", *Penjoeloeb*, Oktober 1941, dikutip dalam Siegel, *op. cit.*, hal. 120.

17. T.M.A. Panglima Polim, "Memoir (Tjatanan), T.M.A. Panglima Polim" (Banda Aceh, 1972), hal. 2.

PUSA, banyak *Ulebalang* mendukung mereka meskipun kaum bangsawan beraliran keras menentanginya.

Para penguasa Belanda pastilah melihat adanya bahaya dalam perkembangan ini. Oleh sebab itu pendekatan *divide et impera* yang klasik itu kembali dipakai. Untuk memisahkan *Ulebalang-ulebalang* dari kerja sama yang erat dengan para ulama, Belanda memanfaatkan ketidaksenangan para *ulebalang* terhadap Sultan. Demikianlah pada akhir tahun 1930-an secara licik Belanda mengeluarkan gagasan bagi kemungkinan untuk mendirikan kembali Kesultanan Aceh. Secara kebetulan langkah Belanda ini diambil bersamaan dengan pembentukan PUSA pada tahun 1939. Kebanyakan *Ulebalang* yang menentang kembalinya Sultan, terutama di Kabupaten Pidie, mengaitkan organisasi baru ini dengan gagasan Belanda untuk mendirikan kembali Kesultanan, meskipun sesungguhnya banyak pemimpin puncak PUSA sendiri tidak menyukai gagasan tersebut. Mereka menuduh para *Ulebalang* yang dekat dengan PUSA memiliki kepentingan pribadi dalam usaha membangun kembali Kesultanan itu. Seperti sebuah ramalan, mereka menyindir bahwa PUSA sebenarnya merupakan kepanjangan dari "Pembunuh *Ulebalang* Seluruh Aceh". Namun demikian, kenyataannya ialah bahwa sampai Belanda takluk kepada Jepang pada tahun 1942, mereka tidak pernah menghidupkan kembali Kesultanan itu.

Kendatipun berhasil menghidupkan kembali antagonisme antara *Ulebalang-ulebalang* tertentu dengan kaum ulama, Belanda tidak dapat mencegah timbulnya suatu pemberontakan yang meluas terhadap mereka pada akhir Februari 1942. Beberapa *Ulebalang*, dipimpin oleh Teuku Njak Arif, seorang *Ulebalang* yang populer dari daerah Kutaraja, dan Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, putra seorang pahlawan terkenal dalam Perang Aceh, berhasil mendesak *Ulebalang-ulebalang* untuk bekerja sama dengan para ulama dalam menentang Belanda. Tentu saja para *Ulebalang* penganut garis keras tidak mempunyai alternatif lain selain daripada melupakan antagonisme mereka dan mendukung gerakan anti-Belanda, sebab ketika itu Jepang sudah menyita Malaya dan Singapura dari Inggris. Belanda sendiri benar-benar tidak sempat menangani pemberontakan itu, karena pendaratan serdadu Jepang di Sabang pada awal Maret telah memaksa mereka meninggalkan

ibu kota dan kota-kota pantai lainnya.¹⁸ Dua minggu kemudian Jepang menguasai seluruh daerah tersebut secara penuh.

Namun demikian, setelah Belanda kalah, segera menjadi jelas bahwa Jepang pun tidak memenuhi harapan pemimpin-pemimpin PUSA. Tampaknya penguasa-penguasa Jepang menaruh curiga terhadap para pemimpin PUSA; dan mereka percaya bahwa pemimpin Aceh bekerja sama dengan mereka hanya untuk memperoleh kekuasaan bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka akhirnya sangat khawatir akan langkah-langkah Aceh menempatkan beberapa pemimpin PUSA dalam dinas pemerintahan setempat segera setelah kantor-kantor tersebut ditinggalkan oleh Belanda. Karena tidak menyenangkan keadaan ini, Jepang pun bergerak menentang PUSA. Segera setelah pendaratan di daerah itu, mereka menangkap beberapa pemimpin puncak PUSA, termasuk Daud Beureueh dan Husin Al-Mudjahid.¹⁹

Akibatnya, PUSA dan Pemuda PUSA menjadi tidak aktif selama masa pendudukan Jepang di Aceh. Hanya sesudah itulah Jepang dapat menguasai daerah tersebut dan, walaupun tidak mudah, melemahkan pengaruh para ulama. Setelah menaklukkan PUSA, Jepang menempuh taktik klasik yang menyeimbangkan kaum ulama dan bangsawan seperti yang pernah dilakukan Belanda. Kebanyakan unsur PUSA dipaksa melepaskan posisi mereka dalam pemerintahan lokal. Sebagai gantinya, sesudah menguatkan kekuasaan para *Ulebalang*, Jepang menempatkan beberapa bangsawan. Tetapi Jepang juga mempertahankan beberapa pemimpin muda atau anggota Pemuda PUSA dalam beberapa jawatan pemerintahan.²⁰ Barangkali Jepang tidak merasa terancam oleh orang-orang ini setelah PUSA dan Pemuda PUSA dilumpuhkan.

Namun demikian, Jepang tidak dapat terus mengabaikan para pemimpin PUSA, sebab keresahan yang meningkat di kalangan rakyat

18. Untuk pembahasan yang mendalam tentang pemberontakan tersebut, lihat A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* ('sGravenhage dan Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949), hal. 57-106.

19. Wawancara dengan Teuku Muhammad Amin, Kutaraja, 15 Oktober 1973, dan Husin Al-Mudjahid, Lhokseumawe, 2 Agustus 1973.

20. Abdullah Hussain, salah seorang Aceh yang terlibat dalam kegiatan rahasia PUSA-Jepang itu, menjelaskan bahwa banyak anggota Pemuda PUSA, terutama mereka yang telah menerima latihan dari Jepang di Malaya, dipekerjakan sebagai klerk pada kantor Residen Jepang di Kutaraja. Lihat Abdullah Hussain, *Terjebak* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1956), hal. 118 dan seterusnya.

setempat memaksa mereka bekerja sama dengan pemimpin PUSA itu. Rakyat Aceh, yang merasa sangat terganggu oleh ketidakpedulian Jepang terhadap nilai-nilai agama dan adat, menjadi tidak puas. Ketidakpuasan ini menimbulkan berbagai tantangan terhadap Jepang dalam bentuk serangkaian pemberontakan, yang akhirnya mengembalikan pendulum ke arah PUSA. Meningkatnya keresahan sosial di daerah itu dan kekalahan-kekalahan besar yang dialami di medan pertempuran Pasifik memaksa Jepang berpaling kepada pemimpin-pemimpin PUSA demi bantuan. Karena itu kekuatan tawar-menawar para pemimpin PUSA pun meningkat, sehingga Jepang tidak punya pilihan selain daripada berbaik-baik dengan mereka, dan ini merugikan kaum *ulebalang*. Ketergantungan Jepang kepada PUSA ini terutama sekali dirasakan dalam pengerahan rakyat untuk pertahanan. Benteng-benteng dan lapangan-lapangan terbang tidak akan dapat kiranya dibangun tanpa bantuan pemimpin PUSA, sebab rakyat menolak dijadikan romusha jika disuruh oleh para *Ulebalang*.

Adalah jelas bahwa para pemimpin PUSA tidak bekerja sama dengan Jepang tanpa sesuatu alasan. Sebagai imbalan untuk kerja sama itu mereka memperoleh ganjaran politik dari Jepang, yang kini bersedia mengakui peranan kaum ulama dalam bidang politik. Pada awal tahun 1943, Jepang dengan segan-segan sepakat untuk membentuk badan penasihat agama dalam pemerintahan seperti badan penasihat politik yang dipimpin oleh Teuku Njak Arif. Akan tetapi, karena masih tidak dapat mempercayai para pemimpin PUSA, Jepang memberikan kedudukan itu kepada Tuanku Abdul Aziz, seorang ulama yang netral dan keturunan Sultan. Namun begitu posisi para pemimpin PUSA meningkat sedikit demi sedikit, terutama ketika Jepang mengubah badan penasihat itu menjadi suatu dewan ulama pada bulan Maret 1943, dan mengangkat Ketua PUSA Daud Beureueh sebagai wakil ketua II.²¹

Suatu indikasi yang baik tentang meningkatnya posisi para pemimpin PUSA pada masa Jepang tercermin dalam komposisi Dewan Penasihat Keresidenan untuk Aceh. Waktu dibentuk pertama kali pada tahun 1943, dewan ini didominasi oleh kaum *ulebalang* yang menguasai delapan belas dari tiga puluh kursi yang ada, sementara PUSA hanya diberi satu dari

21. Wawancara dengan Teungku Junus Djamil, Kutaraja, 30 Juli 1973. Lihat juga Piekaar, *op. cit.*, hal. 205-206.

tujuh kursi yang diperuntukkan bagi para ulama.²² Perombakan yang dilakukan pada awal tahun 1945 memperluas keanggotaan dewan itu menjadi tiga puluh delapan, dan meningkatkan jumlah wakil kaum ulama menjadi sepuluh, lima di antaranya berasal dari PUSA, padahal perwakilan *ulebalang* tidak berubah. Angka ini menunjukkan peningkatan kepercayaan Jepang terhadap PUSA.

Tentu saja kaum *ulebalang* sangat cemas akan peningkatan pengaruh politik PUSA. Mereka tidak mampu memperoleh simpati Jepang sebab mereka gagal bersaing dengan para pemimpin PUSA dalam pengerahan tenaga kerja untuk romusha. Kemunduran posisi ini mendorong para *ulebalang* bereaksi dalam dua cara. Sebagian dari mereka, seperti Teuku Njak Arif dan Panglima Polim, tetap mempertahankan kerja sama dengan Jepang. Yang lainnya mengambil langkah ekstrem dan menggabungkan diri dengan gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dipimpin oleh beberapa unsur pro-Belanda dalam masyarakat Ambon, Manado, Indo, dan Belanda. Akan tetapi pendekatan garis-keras ini berakhir dengan kegagalan ketika Jepang berhasil membongkar gerakan tersebut dan menghukum mati bangsawan-bangsawan itu.²³ Hal ini mendorong Jepang lebih dekat lagi kepada para pemimpin PUSA.

Antagonisme antara kaum ulama dan para *Ulebalang* muncul kembali segera setelah penyerahan Jepang diberitahukan kepada rakyat Aceh pada tanggal 21 Agustus 1945; pengumuman ini mengejutkan pemimpin ulama dan *ulebalang*. Para pemimpin PUSA dan beberapa *Ulebalang* yang pernah terlibat dalam pemberontakan melawan Belanda pada tahun 1942 kini merasa terancam karena khawatir bahwa Belanda pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kegiatan-kegiatan anti-Belanda. Di pihak lain, banyak *Ulebalang*, yang telah mengalami kesulitan dengan Jepang dan para pemimpin PUSA, terutama mereka yang berada di Kabupaten Pidie, sangat mengharapkan kedatangan sang majikan lama. Tanggapan yang kontras terhadap penyerahan Jepang ini, dan perhitungan akan kembalinya Belanda, menimbulkan ketegangan di Aceh. Dalam suasana itulah berita-berita tentang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai daerah tersebut.

Pemerintahan Republik di daerah itu (Keresidenan), yang terbentuk

22. Untuk daftar anggota dewan itu, lihat *ibid.*, hal. 344-347.

23. Tentang gerakan ini, lihat *ibid.*, hal. 308-315.

di Kutaraja pada awal Oktober 1945, memperlihatkan kerja sama antara para ulama dan *Ulebalang* yang anti-Belanda. Tampaknya, para ulama membiarkan unsur-unsur *ulebalang* untuk menguasai posisi-posisi penting dalam pemerintahan setempat semata-mata karena kekhawatiran bersama terhadap kembalinya Belanda. Teuku Njak Arif, *Ulebalang* dari suatu *nanggro* di Aceh Besar, menjadi residen Aceh. Di dalam stafnya termasuk Ketua PUSA Daud Beureueh, yang menjadi kepala Kantor Urusan Agama dan anggota Komite Nasional Daerah. Namun demikian, persaingan antara kaum ulama dan *ulebalang* terus berlangsung dalam barisan Republik, terutama di kalangan para pemuda. Ketika Residen Arif mendirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia),²⁴ suatu embrio tentara nasional di daerah itu, korps perwiranya didominasi oleh para perwira Giyugun yang berorientasi kepada *ulebalang* dan bukan kepada PUSA. Pembentukan API segera diikuti oleh pendirian IPI (Ikatan Pemuda Indonesia), yang kemudian menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dikendalikan pemuda-pemuda yang berorientasi kepada PUSA.

Meskipun sangat dipengaruhi oleh kaum bangsawan, di Aceh pemerintah Republik gagal memperoleh dukungan dari banyak *Ulebalang* lainnya. Oleh karena itu pecahlah serangkaian konflik fisik ketika para *ulebalang* mulai menangkap unsur-unsur pro-Republik di daerah Lammeulo di Kabupaten Pidie pada akhir Oktober. Pertikaian meningkat di daerah-daerah pedesaan pada saat kekuatan-kekuatan Republik dan *ulebalang* setempat berusaha untuk menguasai kampung-kampung di kabupaten tersebut. Akhirnya kaum *ulebalang* dihancurkan pada pertengahan Januari 1946 ketika kekuatan-kekuatan Republik dari seluruh Aceh mengalir ke kabupaten itu. Walaupun kampanye melawan kelompok *ulebalang* Cumbok berlangsung lebih atas dasar konflik antara unsur-unsur pro dan anti-Republik, kampanye itu sendiri sebenarnya mencerminkan pertikaian antara kaum ulama dan *ulebalang*. Sementara sudah jelas bahwa para ulama PUSA berada di belakang kekuatan pro-Republik, pemimpin-pemimpin PUSA juga mengaitkan bangsawan-bangsawan nasionalis, seperti Residen Arif, dengan kelompok Cumbok itu. Mereka menuduh Arif dan beberapa *ulebalang* pro-Republik lainnya

24. Kemudian ia menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

bersimpati pada para *ulebalang* di Cumbok. Oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin PUSA mendesak Gubernur Sumatera Mr. Teuku Muhammad Hasan agar memecat mereka. Gubernur Hasan sepakat untuk mengganti Arif, tetapi karena sudah mengetahui maksud Gubernur lebih dahulu, Arif meminta agar diizinkan mengambil "cuti sakit" sebelum ia diberhentikan. Gubernur Hasan kemudian mengangkat Teuku Chik Daudsjah, seorang *Ulebalang* dari Aceh Timur yang mempunyai hubungan dekat dengan para pemimpin PUSA, sebagai akting (penjabat) residen.

Peristiwa Cumbok menyebabkan pengaruh PUSA dalam politik meningkat, meskipun pemimpin-pemimpinnya sama sekali tidak menguasai pemerintahan daerah. Kemenangan para ulama PUSA dalam kampanye menentang kekuatan Cumbok pastilah merupakan suatu faktor yang mendorong para pemimpin-pemimpin PUSA untuk memperluas pengaruh mereka di Kutaraja dengan jalan mengamankan posisi-posisi penting dalam tangan mereka sendiri. Akan tetapi langkah itu tidaklah mudah bagi pemimpin-pemimpin PUSA sebab akan mengancam integrasi organisasi mereka. Tekanan yang kuat dari unsur ekstrem dalam kepemimpinan PUSA supaya mengambil alih kendali atas daerah itu hampir saja menimbulkan disintegrasi organisasi tersebut. Agar dapat menaklukkan unsur-unsur ekstrem ini, Daud Beureueh menyetujui permintaan mereka supaya menguasai badan koordinasi pertahanan, yang hingga saat itu dipimpin Komandan Divisi TRI Sjammaun Gaharu. Oleh karena itu, pada akhir Januari 1946 dibentuklah suatu badan koordinasi baru yang kepemimpinannya didominasi para pemimpin PUSA. Di luar Kutaraja, pengaruh pemimpin PUSA dalam bidang keamanan juga meningkat setelah Akting Residen Daudsjah memberi wewenang kepada Pesindo dan Mujahidin untuk mengambil alih tanggung jawab kepolisian dalam pemeliharaan ketertiban di daerah perkotaan dan pedesaan.

Akan tetapi sangatlah sulit untuk memuaskan kaum ekstrem ini sebab situasi belum berubah secara fundamental sejak peristiwa Cumbok, khususnya dalam bidang pemerintahan. Kendati lembaga pemerintahan *ulebalang* telah dihapus dan diganti dengan sistem *negeri* (yang kemudian menjadi *kecamatan*) dan anggota-anggota PUSA diangkat menjadi pemimpin unit-unit pemerintahan ini, kenyataannya adalah bahwa di luar Kabupaten Pidie tetap masih banyak bangsawan yang menjadi bupati atau wedana. Karena kecewa akan situasi ini, Al-Mudjahid pun meren-

canakan untuk mengambil alih kekuasaan sehingga dapat menghancurkan para pemimpin nasionalis bukan-PUSA yang dianggapnya "sisa-sisa *ulebalang*". Oleh karena itu, pada awal Februari 1946 ia membentuk Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di Idi, dengan mana ia bermaksud untuk membersihkan semua sisa *ulebalang* di seluruh Aceh. Dengan segera Aceh Timur mengalami aksi pembersihannya. Kemudian pasukannya bergerak ke utara, dan akhirnya menekan Kutaraja karena pemerintah tidak mampu menghentikannya. Di sepanjang jalan ke Kutaraja, ratusan keluarga *ulebalang* dan para pemimpin nasionalis dibunuh atau dikirim ke tempat tahanan di Aceh Tengah, dan anggota-anggota PUSA ditempatkan pada jabatan-jabatan yang ditinggalkan mereka.

Dengan demikian, gerakan TPR menyebabkan berdirinya rezim PUSA di Aceh setelah semua pejabat bukan-PUSA diberhentikan dari pemerintahan lokal, dan sebagai gantinya diangkatlah pejabat yang berorientasi pada PUSA. Namun demikian, rezim tersebut mempertahankan beberapa pejabat bukan-Aceh yang memiliki keahlian teknis. Meskipun ada perubahan mendadak dalam struktur pemerintahan, rezim baru itu tampaknya tidak sulit memelihara keamanan dan ketertiban. Pada kenyataannya, itulah saat, untuk pertama kalinya sejak Jepang meninggalkan Aceh pada akhir Januari 1946, pemerintah daerah berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik.

Kendatipun pemerintahan berjalan dengan lancar, sesungguhnya rezim PUSA itu jauh dari bersatu. Rezim itu dihadapkan pada antagonisme dalam dirinya sendiri, yaitu karena adanya konflik antara unsur-unsur ulama dan zuama dalam PUSA. Dalam hubungan ini, tampaknya revolusi mempunyai dampak terhadap PUSA sebab menyingkapkan perbedaan pandangan dan kepentingan antara unsur-unsur ulama dan zuama dalam PUSA, yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam arti kelembagaan, situasi revolusioner memberikan lebih banyak alternatif bagi masyarakat Aceh, dan ini pada akhirnya mengancam kesatuan PUSA. Oleh karena di daerah itu kini terdapat banyak organisasi untuk menyalurkan ambisi-ambisi sosial dan politik, maka PUSA mulai dianggap sebagai organisasi kaum ulama. Dengan demikian, segera setelah membentuk sebuah basis lain, para pemimpin zuama pun mulai melepaskan diri dari para ulama. Bagi sebagian pemimpin ini, Pesindo terlihat lebih menarik daripada PUSA atau Pemuda PUSA, sebab dengan memasuki Pesindo, yang tidak dikendalikan oleh para ulama, mereka

dapat melepaskan diri dari pengaruh kaum ulama itu. Mereka merasa lebih yakin setelah memegang posisi-posisi penting dalam pemerintahan setempat, dan hal ini menyebabkan para pemimpin yang lebih sekular (dan sering terdidik lebih baik) itu semakin menjauhkan diri dari kendali senior mereka, kaum ulama.

Akan tetapi perkembangan politik setelah Aksi Militer Belanda pertama, yang dilancarkan pada akhir Juli 1947, mendamaikan unsur-unsur ulama dan zuama ini. Direbutnya Medan dan beberapa kota lain di Sumatera Timur oleh Belanda menyebabkan lebih kurang dua ratus ribu pengungsi dari Sumatera Timur memasuki Aceh. Di antara pengungsi ini ada pemimpin-pemimpin sayap kiri Pesindo dan Persatuan Perjuangan yang menjadikan Langsa sebagai pusat kegiatan mereka.²⁵ Kehadiran unsur-unsur kiri ini di Aceh Timur menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin Pesindo cabang Aceh. Oleh karena itu mereka terpaksa mendekati senior mereka kembali.

Di lain pihak, Aksi Militer Belanda itu memperkuat pengaruh Daud Beureueh di daerah tersebut. Jatuhnya Medan ke tangan Belanda menyebabkan Pemerintah Pusat membentuk dua daerah militer di Sumatera Utara menurut pola yang telah ada di Jawa. Dalam kaitan ini, Pemerintah Pusat mengangkat Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jenderal. Hal ini dengan sendirinya menjadikan Daud Beureueh orang nomor satu di daerah itu, sebab baik kekuatan sipil maupun militer kiri ditempatkan di bawah pengawasannya. Dengan pemusatan kekuasaan seperti itu, Daud Beureueh menjadi sangat berpengaruh bahkan memungkinkannya membayangi kekuasaan Wakil Pemerintah Pusat di Sumatera Utara. Pengangkatan Daud Beureueh jelas berpangkal pada pengakuan Pemerintah Pusat akan dukungan rakyat terhadapnya melalui PUSA. Namun demikian, hal ini menjengkelkan para pemimpin Pesindo kelompok Kutaraja, yang menganggap rendah kualifikasi militer Daud Beureueh dan, sebagai pimpinan unit militer Pesindo yang tangguh, ingin mendapatkan pos-pos militer yang penting bagi mereka sendiri.

Kekecewaan yang mendalam terhadap pengangkatan Daud Beureueh

25. Persatuan Perjuangan didirikan di Jawa oleh pemimpin kiri, Tan Malaka, untuk menolak setiap usaha Pemerintah Sjahrir untuk berunding dengan Belanda. Tan Malaka ingin menjadikan Persatuan Perjuangan sebagai organisasi perjuangan pusat di Indonesia.

terpendam terus di kalangan pemimpin zuama, seperti diperlihatkan secara terbuka dalam oposisi mereka terhadap langkah Daud Beureueh untuk mendirikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh daerah militernya pada bulan Desember 1947. Direncanakan oleh Pemerintah Pusat pada awal 1947, TNI dimaksudkan sebagai suatu gabungan dari lasykar-lasykar rakyat dan TRI. Di Sumatera rencana ini sangat ditentang oleh pimpinan Pesindo dan Mujahidin yang menginginkan adanya latihan kembali atas TRI sebagai prasyarat penggabungan itu. Mereka mengatakan bahwa pasukan-pasukan mereka terlatih dan dilengkapi lebih baik daripada TRI. Namun para pemimpin Mujahidin di Aceh segera membatalkan oposisi mereka ketika Daud Beureueh berketetapan hati membentuk TNI.

Para pemimpin zuama tetap tidak senang terhadap penggabungan yang direncanakan itu, sebab hal ini berarti akan lepasnya kekuatan militer dari tangan mereka. Oleh sebab itu, ketika ternyata bahwa Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin Mujahidin lainnya menjadi lebih terikat untuk mendirikan TNI, para pemimpin zuama menantang pengaruh pihak pertama di daerah itu. Mereka berusaha menarik kaum ulama keluar dari Masyumi dengan menyebarkan cabang-cabang PSII, yang telah didirikan setahun sebelumnya, di seluruh Aceh pada akhir tahun 1947, seraya tetap menentang pembentukan TNI. Tantangan terhadap Daud Beureueh ini tidak berhasil. Pada bulan Juni 1948 mereka terpaksa menghentikan perlawanan mereka dan membiarkan Daud Beureueh menggabungkan unit-unit Pesindo ke dalam TNI.

Perubahan sikap terhadap Daud Beureueh itu menentukan hubungan antara para pemimpin ulama dan zuama pada masa revolusi dan seterusnya, sebab kaum zuama menjadi semakin tergantung pada perlindungan Daud Beureueh. Walaupun ancaman dari pihak sayap kiri sudah banyak berkurang setelah Daud Beureueh menyelamatkan para pemimpin Pesindo Kutaraja dengan mengawasi kegiatan pemimpin-pemimpin sayap kiri di Aceh Timur, zuama-zuama tersebut tetap tergantung pada Daud Beureueh. Perubahan sikap terhadap Daud Beureueh disebabkan oleh adanya keresahan yang semakin berkembang di Kutaraja terhadap penampilan kaum zuama dalam pemerintahan.

Sejak awal tahun 1948, sekelompok orang Aceh dari berbagai latar belakang telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Pada bulan Maret 1948, kritik pun men-

jelma menjadi suatu gerakan yang dipimpin Said Ali. Gerakan Said Ali ini menuduh para pemimpin zuama terlibat dalam korupsi, perdagangan ilegal, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh mereka. Oleh karena itu gerakan ini menuntut agar pemerintah mengambil tindakan yang perlu dengan memberi rakyat suatu pemerintahan yang stabil, adil, makmur, dan kedaulatan rakyat.²⁶ Karena menyerang unsur-unsur PUSA, dengan segera gerakan itu mendapat dukungan unsur-unsur *ulebalang* dan ulama tradisional. Akan tetapi, meskipun ada desakan yang kuat dari Hasjmy dan Teuku Muhammad Amin, Gubernur Militer menolak mengambil tindakan terhadap gerakan itu sampai bulan November, ketika kekuasaannya sendiri mulai terancam.

Kemampuan rezim PUSA untuk menghancurkan lawan-lawannya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat memperlihatkan derajat otonomi daerah itu sepanjang masa revolusi. Tentu saja Pemerintah Pusat cukup mengetahui apa yang sedang terjadi di daerah tersebut, tetapi Pemerintah Pusat benar-benar tidak memiliki pilihan selain daripada membiarkan saja penguasa setempat untuk mengatasi sendiri masalah mereka. Kegagalan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan protes Gerakan Said Ali merupakan bukti adanya otonomi Aceh. Menjelang kunjungan Soekarno pada pertengahan Juni 1948, Daud Beureueh menempatkan pemimpin-pemimpin Gerakan Said Ali dalam tahanan sementara, karena khawatir akan tindakan yang tidak diharapkan yang mungkin dilakukan oleh para pemimpin ini selama kunjungan Presiden.

Dibiarkan tidak terganggu oleh Pemerintah Pusat, Daud Beureueh bukan saja dapat menghancurkan Gerakan Said Ali dan kegiatan para pemimpin kiri yang terus berlanjut, tetapi juga mampu mengerahkan rakyat untuk menghadapi Aksi Militer Belanda yang kedua pada pertengahan Desember 1948. Perlawanan terhadap Belanda tampaknya tidak terpengaruh oleh gejolak politik intern. Perselisihan antara kaum reformis PUSA dan ulama tradisional dalam masalah politik sama sekali tidak menyebabkan ulama tradisional itu tidak mendukung Gubernur Militer dalam perjuangan menentang Belanda. Kedua kelompok ulama ini telah lebih dahulu sepakat untuk mengumumkan bahwa perjuangan merebut

26. Amin, *op. cit.*, hal. 15 dan 27. Juga wawancara dengan Teungku Muhammad Asjik, salah seorang pemimpin Gerakan Said Ali, Medan, 28 November 1973.

kemerdekaan dari Belanda adalah wajib bagi umat Islam,²⁷ sehingga mereka mengubah revolusi menjadi sebuah perjuangan keagamaan. Oleh sebab itu para ulama tidak sukar memperoleh dukungan rakyat untuk revolusi. Sudah sejak Perang Aceh, rakyat Aceh telah memandang Belanda sebagai *kaphee* (kafir), sehingga mereka mudah menerima interpretasi perlawanan terhadap Belanda sebagai suatu perjuangan agama.

Namun, dukungan kaum ulama untuk Republik sangat banyak ditentukan oleh harapan mereka tentang masa depan dasar negara Indonesia yang sama sekali belum jelas bagi mereka. Mereka berpendapat bahwa jikalau negara tidak didasarkan pada hukum Islam, maka mereka tidak dapat memperjuangkannya, sebab perjuangan tersebut bukan merupakan suatu perjuangan agama, sehingga korban yang jatuh akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dalam suatu pertemuan dengan Soekarno di Kutaraja pada tahun 1948, baik ulama tradisional maupun reformis telah mempersoalkan dasar negara ini kelak, di samping mendesak Presiden agar menerapkan hukum Islam secara luas. Dalam jawabannya, Presiden hanya menunjuk pada Piagam Jakarta yang menjamin pelaksanaan syariat Islam terhadap semua umat Islam di Indonesia, dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Aceh sebagai daerah Islam.²⁸ Jawaban ini tidak memuaskan para ulama. Hanya setelah Soekarno menegaskan kembali bahwa Indonesia akan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam barulah mereka menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung Republik.²⁹

Apa yang menyebabkan Pemerintah Pusat tunduk pada rakyat Aceh dan membiarkan mereka memiliki otonomi yang demikian besar? Barangkali jawaban terhadap pertanyaan ini terletak pada fakta bahwa Pemerintah Pusat tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan kontrol yang nyata di daerah itu dalam situasi 1945-1949, sementara rakyat Aceh benar-benar bebas dari pengaruh Belanda. Kenyataan bahwa Aceh luput dari pendudukan Belanda dalam dua Aksi Militer pada tahun 1947 dan 1948, sementara daerah lain termasuk ibu kota

27. "Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh", pamflet, bertanggal Kutaraja, 15 Oktober 1945.

28. *Kronik Kementerian Penerangan*, 20 (1954?), hal. 79-80.

29. Wawancara dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Beureunuen, 11 Juli 1973.

Republik telah dikuasai Belanda, merupakan modal penting bagi pemimpin-pemimpin Republik. Dengan demikian dapatlah ditunjukkan kepada dunia bahwa Republik masih ada. Di pihak lain, karena bebas dari tekanan Belanda, Aceh menjadi markas operasi militer Republik di Sumatera, selain berfungsi sebagai sumber keuangan yang penting bagi Pemerintah Pusat, terutama untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri. Berbagai kegiatan Republik di luar negeri itu dibiayai oleh perdagangan antara Aceh dan Malaya, meski ada blokade Belanda, dan melalui penjualan obligasi nasional yang sangat berhasil di Aceh, di samping dibiayai dengan harta yang disita dari para *Ulebalang*.

Otonomi Aceh juga melayani kepentingan Pemerintah Pusat pada masa revolusi, karena Aceh selalu memperlihatkan loyalitas kepada pemerintah dengan dukungan dalam setiap peristiwa. Jadi, rakyat Aceh tidak hanya menolak Persatuan Perjuangan,³⁰ ketika mereka berusaha menggagalkan perundingan antara Republik dan Belanda, tetapi juga menolak menghadiri konferensi para pemimpin seluruh Sumatera yang disponsori Belanda untuk mendirikan Negara Sumatera pada awal tahun 1948. Sehubungan dengan kesetiaan ini, adalah menjadi kepentingan Pemerintah Pusat untuk mempertahankan kekuatan politik Aceh yang kuat dan bersatu, tanpa mempersoalkan siapa yang menguasai. Dengan demikian, Pemerintah Pusat terpaksa mengizinkan pemimpin-pemimpin setempat untuk mengatasi masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, dan karena ketidakhadiran Belanda di Aceh, Pemerintah Pusat bebas dari segala kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa lawan-lawan PUSA akan bekerja sama dengan Belanda.

30. Osman Raliby, *Documenta Historica* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hal. 223.

Bab II

Menjelang Pemberontakan

BAGI RAKYAT Aceh, persetujuan yang dicapai Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag bukanlah merupakan suatu akhir dari perjuangan untuk membentuk diri melainkan hanya mengubah watak perjuangan mereka saja. Segala kegiatan di bidang militer memang telah berakhir dengan adanya konferensi itu, akan tetapi dinamika politik di daerah tersebut tidak mengalami perubahan. Pengiriman beberapa pemimpin Gerakan Said Ali ke pembuangan pada akhir tahun 1949 dan kembalinya para pemimpin sayap kiri Sumatera Timur ke Medan bersamaan dengan perjanjian itu untuk sementara cukup menenangkan panggung politik Aceh. Akan tetapi, ketenangan ini tidak berlangsung lama, sebab suatu rangkaian dinamika lainnya mulai bermunculan di bidang politik. Apabila pada masa revolusi kehidupan politik lokal diwarnai perjuangan pribadi atau kelompok untuk memperoleh kekuasaan, kedudukan, dan status, maka masa awal seusai-revolusi penuh dengan pertikaian kepentingan antara penguasa lokal dan pusat. Pembentukan Propinsi Aceh menjelang akhir tahun 1949 agaknya telah menjadi sebab utama meningkatnya ketegangan di tengah akrabnya hubungan selama ini antara rakyat Aceh dan pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta.

Pembubaran Propinsi Aceh

PARA PEMIMPIN Aceh sangat memperhatikan perundingan Indonesia-Belanda. Tampaknya mereka memperhitungkan bahwa sekali penyelesaian damai antara Belanda dengan Republik tercapai, maka hubungan antara para pemimpin Aceh dan pusat akan terpengaruh. Mungkin mereka juga memperkirakan bahwa Aceh akan kehilangan peranan menonjol yang biasa dimainkan dalam masa revolusi, dan bahwa

kemungkinan seperti itu akan mengurangi maknanya bagi Republik, di samping Pemerintah Pusat akan mengabaikan kepentingan-kepentingan daerah itu. Mempertimbangkan betapa sukarnya mereka mengalahkan politisi-politisi Sumatera Timur yang mencoba untuk memindahkan ibu kota propinsi dari Kutaraja ke Sibolga pada tahun 1948, maka orang Aceh tentu sadar bahwa kali ini saingan mereka mungkin akan berhasil menjadikan Medan sebagai ibu kota yang baru bagi propinsi itu. Satu hal sudah pasti, jika perundingan itu berhasil dengan memuaskan, maka hal tersebut akan mengakibatkan dihapuskannya jabatan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo yang dipegang oleh Daud Beureueh, sebab pemerintahan harus kembali kepada bentuk yang normal. Oleh karena itu, jalan keluar bagi mereka adalah menyelamatkan kepentingan Aceh dengan memiliki suatu propinsi sendiri, sebelum terlambat.

Pada mulanya gerakan orang Aceh ke arah pembentukan propinsi tersebut cukup berhasil. Di bawah tekanan kuat para pemimpin Aceh, Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang bertindak selaku wakil Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Sumatera, membubarkan daerah-daerah militer Aceh, Langkat, Tanah Karo, dan Tapanuli/Sumatera Timur, dan sebagai gantinya membentuk dua propinsi baru, Aceh dan Tapanuli/Sumatera Timur, pada bulan Desember 1949. Dalam keputusan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950 ini ditetapkan bahwa gubernur militer kedua daerah militer itu masing-masing akan diangkat menjadi gubernur Aceh dan Tapanuli/Sumatera Timur.

Oposisi terhadap langkah-langkah Aceh ini tumbuh dengan cepat di luar Aceh. Di satu pihak, pemerintah Republik yang baru di Yogyakarta, di bawah Perdana Menteri Abdul Halim, merasa sukar untuk menerima Propinsi Aceh, meski pada mulanya tetap berdiam diri. Para pemimpin di Yogyakarta percaya bahwa propinsi-propinsi baru di Sumatera Utara itu didirikan secara tidak konstitusional. Sjafruddin mengumumkan pembentukan Propinsi Aceh tiga hari sesudah Kabinet Hatta, di mana ia menjadi wakil perdana menteri, dibubarkan pada tanggal 2 Desember 1949. Meskipun Sjafruddin mengemukakan bahwa pemberian status propinsi kepada Aceh telah mendapatkan persetujuan Hatta,¹ para

1. Lihat pidato Sjafruddin di Kutaraja pada tanggal 26 September 1950, sebagaimana dimuat dalam Dada Meuraxa, *Atjeh 1000 Tahun Dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh c. s.*, (Medan: Pustaka Hasmar, t.t.), hal. 67.

pemimpin di Yogyakarta tetap menolak untuk mengakui. Mereka percaya bahwa Sjafruddin tidak memiliki kekuasaan konstitusional untuk mengubah struktur negara. Penolakan pengakuan kedua propinsi baru ini dinyatakan secara resmi ketika pemerintah Republik tidak mengirimkan seorang wakil pun untuk menghadiri pelantikan Gubernur Daud Beureueh pada tanggal 30 Januari 1950.²

Para pemimpin Sumatera Utara juga memberikan reaksi yang segaris dengan pemimpin-pemimpin di Yogyakarta. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dan menyalahkan Sjafruddin karena tidak berkonsultasi dengan Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara sebelum keputusan itu dibuat, dan ia juga disalahkan karena mengadakan persetujuan hanya dengan beberapa tokoh Aceh dan Tapanuli saja. Akan tetapi mereka tidak mengecam pembentukan Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur, sebab mereka percaya bahwa propinsi itu hanya merupakan suatu akibat sampingan saja, selain menganggapnya sebagai "sisa" Propinsi Sumatera Utara yang asli.

Dalam menolak keputusan itu, orang-orang Sumatera Utara telah memilin sejarah pemerintahan kolonial dan Republik di Sumatera sebagai suatu kesatuan, dan berdalih bahwa pada masa kolonial sekalipun, pulau itu hanya dibagi atas tiga bagian saja, Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan. Kendatipun pada suatu saat pada masa awal revolusi Sumatera pernah menjadi satu propinsi, mereka berargumentasi bahwa pada kenyataannya segala kegiatan partai politik, pemerintahan sipil, dan militer bergerak dalam ketiga bagian itu. Mereka menuduh bahwa pemisahan Aceh dari Sumatera Utara bertujuan untuk melayani kepentingan beberapa pemimpin Aceh saja, dan merupakan manifestasi dari perasaan kedaerahan.³ Reaksi resmi disuarakan oleh DPRD Tapanuli pada minggu pertama bulan Januari ketika lembaga itu menginstruksikan Residen Tapanuli agar mendesak pemerintah Republik di Yogyakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Sjafruddin. Sikap ini dianut pula oleh cabang Masyumi setempat.⁴

2. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan NV, 1956), hal. 29.

3. Lihat tajuk *Waspada*, 1 Februari 1950; dan *Insider* (nama samaran), *Atjeh Sepintas Lalu* (Jakarta: Archapada, 1950), hal. 51-56.

4. Tajuk *Waspada*, 1 Februari 1950.

Mengapa orang Sumatera Utara begitu memperhatikan masalah ini? Apakah masuknya Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara begitu bermakna pada mereka? Pemisahan Aceh memang merupakan suatu perkara penting bagi orang Sumatera Utara dalam hal implikasi daerah pemilihan. Ini bukan hanya merupakan masalah kemungkinan kehilangan wilayah seluas 55.000 kilometer persegi, melainkan juga, dari sudut politik, soal kehilangan beberapa kursi di parlemen. Dengan penduduk sekitar 1,2 juta, Aceh akan diwakili oleh empat orang wakil dalam DPR dengan rasio satu anggota untuk setiap 300.000 penduduk. Makna angka ini bagi Sumatera Utara tampak jelas dalam pemilihan umum tahun 1955. Dalam pemilihan umum ini, propinsi itu barangkali akan kehilangan 542.565 pemilih dari 2.458.729 penduduk yang berhak memilih,⁵ sekiranya Aceh telah berpisah pada waktu itu. Oleh karena merupakan simpatisan sejati Masyumi, maka Aceh sangat penting bagi partai itu, sebab akan mempunyai dampak atas pengaruh partai tersebut di DPRD. Masyumi akan kehilangan sekurang-kurangnya setengah dari 789.910 suara yang diperoleh untuk parlemen, walaupun tidak ada angka yang pasti tentang pemilihan umum 1955 itu di Aceh. Ini juga berarti adanya suatu perubahan proporsi dalam dewan perwakilan daerah, di mana jumlah suara dan kursi Masyumi akan selisih kecil dengan PNI (329.657) atau Parkindo (291.319).⁶ Partai politik lain tidak memandang kehadiran Propinsi Aceh dari sudut ini. Barangkali mereka menentangnya, sebab mereka tidak suka melihat Aceh muncul sebagai propinsi yang didominasi oleh Masyumi.⁷ Kekhawatiran ini mempunyai dasar dalam kenyataan bahwa kecuali satu anggota, semua anggota DPRD Aceh adalah anggota Masyumi.⁸

5. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* (The Hague: W. van Hoeve, 1969), hal. 374.

6. Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1955* (Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, Interim Report Series, 1957), hal. 69. Menurut Alfian, lima puluh lima persen dari suara yang diperoleh Masyumi di Sumatera Utara berasal dari Aceh. Lihat Alfian, "Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (D.P.R.)" (Jakarta: Leknas, 1971), hal. 29.

7. Suara PNI Sumatera Utara cukup diwakili oleh tajuk rencana *Waspada*, 2 Februari 1950. Konferensi PNI seluruh Sumatera yang diselenggarakan di Palembang juga menentang kehadiran Propinsi Aceh, dan mendesak agar Sumatera dibagi hanya atas tiga propinsi saja. Lihat *Waspada*, 24 November 1950.

8. *Ibid.*, 27 Februari 1950.

Orang Sumatera Utara barangkali juga berpikir bahwa pemisahan Aceh akan menyebabkan orang Aceh bertingkah seperti pada masa lalu, yakni akan memiliki status khusus, yang bagaimanapun akan bertentangan dengan kepentingan Sumatera Utara. Sudah jelas sejak awal revolusi nasional bahwa Aceh tetap bersatu dalam menentang setiap campur tangan dari luar. Rasa keagamaan yang kuat di kalangan penduduk, perlakuan khusus yang diterapkan Belanda dalam bidang pemerintahan yang memisahkan daerah itu dari bagian Sumatera Utara lainnya, dan kurangnya hubungan dengan daerah-daerah lain di Sumatera, secara khusus memperkuat perasaan Aceh sebagai satu identitas tersendiri. Agama telah menjadi simbol yang mendorong rakyat Aceh ke dalam revolusi. Kepala Jawatan Agama mereka, Daud Beureueh, adalah pemegang panji revolusi nasional yang dihormati di daerah itu setelah dijatuhkannya kepemimpinan "nasional" di bawah Arif. Keterlibatan kaum ulama dan kepemimpinan politik mereka dalam revolusi sangat dirasakan oleh para pengikut mereka, dan gambaran tunggal ini telah memberikan warna keagamaan pada revolusi mereka.

Rasa identitas rakyat Aceh yang menonjol ini tidak pula berhenti ketika revolusi usai. Lima tahun terlibat dalam kegiatan revolusioner tidak menyebabkan warna identitas Aceh itu memudar, malah sebaliknya, revolusi telah menguatkannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa sekalipun ada tantangan kuat dari Sumatera Utara, para ulama terkenal Aceh yang dipimpin oleh ulama tua yang sangat dihormati, Hasballah Indrapuri, mendirikan Majelis Ifta Daerah Aceh dalam suatu konferensi di Kutaraja pada tanggal 15 Februari 1950. Majelis itu berfungsi sementara untuk "menasihati" pemerintah daerah dalam masalah-masalah keagamaan.⁹ Di Medan gerakan ini agaknya telah diinterpretasikan sebagai langkah lebih jauh ke arah suatu kesatuan Aceh yang tersendiri.

Bila masalah ini ditinjau dari sudut ekonomi, pemisahan Aceh dari Sumatera Utara juga akan memberikan dampak tertentu kepada Suma-

9. Menyadari bahwa "keadaan negeri kita sekarang masih dalam suatu bentuk negara yang belum memenuhi cita-cita kita" dan bahwa karena "negara kita belum lagi didasarkan pada (prinsip-prinsip) Darul Islam yang sesungguhnya", Majelis Ifta tidak akan berfungsi sebagai suatu Dewan Legislatif melainkan sebagai Dewan Penasihat. Lihat "Pidato Pembukaan Sidang 1 Madjelis Ifta Daerah Atjeh", disampaikan oleh Teungku Hasballah Indrapuri di Kutaraja pada tanggal 15 Februari 1950. Sebelumnya Hasballah Indrapuri telah diangkat sebagai Ketua Majelis itu.

tera Utara. Kendatipun tidak terdapat angka-angka tentang produksi minyak di Aceh, daerah ini memang kaya akan mineral. Penyulingan dan pelabuhan minyak Pangkalan Brandan di Sumatera Utara memang tergantung pada minyak mentah dari tambang minyak yang terletak di seberang perbatasan antara kedua propinsi, yaitu di Aceh Timur. Jika orang Aceh menguasai sendiri hasil minyak itu, maka Sumatera Utara sudah pasti akan mengalami kerugian. Juga dalam bidang perkebunan, ekspor melalui Medan mungkin akan terpengaruh bilamana Aceh mengalihkan eksportnya ke Langsa atau pelabuhan lain di Aceh. Angka-angka menunjukkan bahwa hanya ada tiga puluh perkebunan asing di Aceh Timur, Barat, dan Tengah, namun tidak berarti bahwa perkebunan-perkebunan itu tidak penting bagi ekonomi Sumatera Utara.¹⁰ Begitu pula, pemisahan Aceh akan cukup banyak mengurangi pendapatan Sumatera Utara dalam perdagangan impor dan ekspor. Umpamanya, pajak impor dan ekspor di Kuala Langsa, pelabuhan Aceh Timur, selama bulan Juli 1951 mencapai Rp 6.237.902,38 dan pada bulan berikutnya meningkat menjadi Rp 9.035.428,92.¹¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa oposisi orang Sumatera Utara terhadap pembentukan Propinsi Aceh didasarkan pada kemungkinan bahwa kepentingan daerah mereka akan dirugikan.

Sementara itu orang Aceh melihat masalahnya dari sudut yang berbeda. Karena mereka sangat sadar akan warisan sejarah dan uniknya kebudayaan mereka, saya berpendapat bahwa sikap mereka telah didasarkan pada pendirian psikologis yang diperkuat oleh kepentingan ekonomi dan politik. Menurut hemat saya, rakyat Aceh barangkali memandang masalah itu secara sederhana saja, yaitu "siapa memerintah siapa". Terbukti dalam sejarah sejak tahun 1500, jauh sebelum pasifikasi Sumatera oleh Belanda, Aceh telah berjalan sebagai bangsa yang berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke bagian-bagian lain Pulau Sumatera. Tetapi kedatangan Belanda dan revolusi telah membalikkan situasi itu. Kini rakyat Aceh bukan saja tidak menguasai wilayah-wilayah lain sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu mereka, malah sebaliknya, daerah mereka telah didominasi oleh Sumatera Timur, suatu

10. *Waspada*, 2 Mei 1951.

11. *Waspada*, 10 September 1951. Angka-angka ini mewakili situasi pada masa perdagangan barter.

daerah yang pernah ditaklukkan oleh pendahulu mereka. Tentu saja secara psikologis orang Aceh sulit menerima hal ini. Oleh sebab itu, konferensi para ulama di Kutaraja menolak tuduhan bahwa Propinsi Aceh hanya dikehendaki oleh segelintir pemimpin saja.¹²

Akan tetapi, walaupun ada kontroversi, secara diam-diam berkembanglah suatu kondisi yang bersifat akomodatif. Orang Aceh terus menjalankan pemerintahan propinsi secara *de facto*, sementara pemerintah Republik di Yogyakarta tetap diam saja terhadap aspek *de jure* propinsi itu. Dan karena Aceh merupakan bagian dari negara bahagian Republik Indonesia (RI), maka Pemerintah Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta tidak pula ikut campur dalam masalah intern pemerintahan Republik. Demikianlah, para pemimpin Republik di Yogyakarta agaknya telah menahan diri dan menerima *status quo* itu. Lagi pula, mereka masih mempunyai masalah lain yang lebih mendesak untuk diatasi.

Di balik kesediaan Yogyakarta untuk menerima *status quo* jelas terdapat masalah keefektifan kendalinya terhadap daerah-daerah di Sumatera. Akibatnya, pemerintah Halim di Yogyakarta dan Hatta di Jakarta berusaha menghindarkan adanya penolakan terhadap tuntutan rakyat Aceh, sebab tindakan semacam itu pasti akan menempatkan mereka pada konfrontasi langsung dengan rakyat Aceh. Dalam hal ini para pemimpin di Yogyakarta harus mempertimbangkan kenyataan bahwa walaupun mereka telah menguasai kegiatan militer di Sumatera Utara sesudah penyerahan kekuasaan oleh Belanda,¹³ sejumlah besar senjata masih ada di tangan orang Aceh. Kedua, para pemimpin itu tampaknya berusaha mengulur-ngulur waktu dalam menghadapi Aceh sampai beberapa pemimpin di daerah-daerah lain bergerak ke arah pembentukan negara kesatuan dan adanya reorganisasi pemerintahan daerah. Para pemimpin Republik percaya bahwa orang Aceh tidak akan menentang adanya suatu perubahan dalam status daerah mereka jikalau itu merupakan kepentingan seluruh bangsa.

Oleh sebab itu Pemerintah Halim di Yogyakarta tidak mengeluarkan

12. Lihat resolusi yang ditandatangani oleh Hasballah Indrapuri, bertanggal Kutaraja, 16 Februari 1950.

13. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara* (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1953), hal. 278. Selanjutnya sumber ini akan dikutip sebagai *Propinsi Sumatera Utara* saja.

suatu pernyataan terbuka sampai dikirimkannya suatu misi pencari fakta di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo ke Aceh pada pertengahan Maret 1950. Malah pada tahap ini sekali pun Susanto sangat membatasi diri. Dengan hati-hati ia hanya mengatakan bahwa para pemimpin di Yogyakarta belum menetapkan suatu keputusan tentang kehadiran Propinsi Aceh, dan bahwa diperlukan lebih banyak lagi informasi sebelum Yogyakarta dapat mengambil keputusan.¹⁴ Sebab itu situasi tetap tidak berubah selama bulan-bulan sesudah kunjungan Susanto ke Aceh.

Namun demikian, persetujuan yang dicapai RIS dan RI tentang pembentukan sebuah negara kesatuan pada pertengahan Mei telah mengubah *status quo* itu. Pada awal Agustus, Pemerintah Pusat mulai campur tangan dalam masalah yang kontroversial tersebut, yaitu ketika Pemerintah Pusat memutuskan untuk membubarkan Propinsi Aceh dan menggabungkannya ke dalam Propinsi Sumatera Utara yang baru. Persiapan-persiapan telah dilakukan dengan membentuk Panitia Penyelenggaraan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU) pada tanggal 1 Agustus, seminggu sesudah Pemerintah Pusat memutuskan membagi negara ini atas sepuluh propinsi.¹⁵ Menyadari sifat heterogen Propinsi Sumatera Utara yang baru itu, Jakarta mengangkat seorang Jawa (Raden Sarimin Reksodihardjo) untuk mengepalai P4SU, serta seorang Aceh (Teuku Daudsjah), seorang Batak Toba (Radja Kaliamsah Sinaga), dan seorang Mandailing (Binanga Siregar) sebagai anggota-anggotanya.

Perkembangan ini tidak hanya menarik pihak ketiga, unsur *ulebalang*, ke dalam arena, seperti akan kita lihat nanti, tetapi juga mengakibatkan Kabinet Hatta berkonfrontasi langsung dengan rakyat Aceh. Frustrasi mulai menyebar di Aceh dan ungkapan "habis manis sepah dibuang", yang mengkritik Pemerintah Pusat dan para pemimpin, menjadi populer dalam masyarakat Aceh. Jika diingat bahwa Hatta adalah seseorang yang sangat bersimpati terhadap Masyumi, timbul pertanyaan mengapa ia mengizinkan pemerintahannya menentang rakyat Aceh dengan membentuk Propinsi Sumatera Utara, yang akan memasukkan

14. Amin, *op. cit.*, hal. 29.

15. *Propinsi Sumatera Utara*, hal. 385 dan 398. Lihat juga *Waspada*, 28 Agustus 1950. Kesepuluh propinsi itu adalah Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan, Jawa Barat, Tengah, dan Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Aceh ke dalamnya? Atau, adakah Hatta, sebagaimana halnya para pemimpin nasional lainnya, percaya bahwa keputusan itu tidak akan menimbulkan amarah orang Aceh dan bahwa mereka akan tetap setia kepada Pemerintah Pusat?

Kabinet memang sedang menghadapi situasi kritis menyangkut masalah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, dan Hatta barangkali merasa bahwa tidak ada alternatif lain. Ketika itu langkah ke arah suatu negara kesatuan sangat menonjol dan Kabinet pun terdorong mengikuti air pasang.¹⁶ Bagi Hatta sendiri reorganisasi propinsi-propinsi itu memang diperlukan bukan hanya karena hal ini merupakan konsekuensi logis dari langkah kesatuan, tetapi juga didorong oleh pertimbangan efisiensi yang telah menjadi kebanggaan kabinetnya.¹⁷ Dalam hal ini perlu diingat bahwa Konferensi Meja Bundar mengakibatkan Kabinet Hatta mewarisi utang sebesar hampir US\$ 1.130 juta dari pemerintah Hindia Timur.¹⁸ Mengingat utang yang harus dibayar itu dan sekaligus untuk mengurangi beban keuangan pemerintah, maka pemerintahan haruslah efisien. Dan hal ini antara lain akan dapat dicapai melalui pengurangan jumlah propinsi, yang juga berarti memotong pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang besar.

Di lain pihak, masyarakat Aceh tidak melihat masalah tersebut dengan kacamata yang sama. Bagi mereka, kepentingan daerah tidak harus selalu ditundukkan oleh kepentingan nasional. Oleh karena itu reaksi mereka muncul segera setelah Pemerintah Pusat mengumumkan rencana untuk mereorganisasikan propinsi-propinsi. Pada tanggal 12 Agustus, empat hari setelah pemerintah memutuskan untuk membentuk sepuluh propinsi itu, DPRD Aceh mengeluarkan sebuah mosi yang menuntut dipertahankannya Propinsi Aceh. Agar kita dapat memahami pandangan masyarakat Aceh (dan ini akan memungkinkan kita untuk menghargai gagasan kesatuan Aceh itu), ada manfaatnya meninjau beberapa alasan mengapa masyarakat Aceh menuntut sebuah propinsi sendiri, seperti yang dikemukakan oleh DPRD. Alasan-alasan pokoknya adalah bahwa dalam bidang sosial-ekonomi rakyat Aceh merasa telah tertinggal jauh

16. Feith, *The Decline*, hal. 76.

17. Pendapat tentang efisiensi Kabinet Hatta dapat dilihat dalam Feith, *ibid.*, hal. 77-78.

18. George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970), hal. 443.

dari rekan-rekan mereka dalam Propinsi Sumatera Utara yang baru dan bahwa justru dalam bidang inilah kepentingan Aceh berbeda dari kepentingan daerah-daerah lain.¹⁹

Dalam hubungan ini DPRD mengemukakan bahwa propinsi baru itu tidak akan mampu mengatur daerah-daerah tersebut secara efisien. Karena beberapa perbedaan intensitas pembangunan dan pengalaman rakyat pada masa lampau, rakyat Aceh percaya bahwa propinsi baru itu tidak akan mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul di daerah-daerah tersebut sehingga propinsi baru itu tidak dapat diterima rakyat Aceh. Sebagai akibat perasaan anti-kolonial yang sangat fanatik rakyat Aceh merasa sangat ketinggalan dalam hal teknologi dasar (pendidikan), infrastruktur pertanian, dan komunikasi. Mereka yakin bahwa pemerintah propinsi yang baru tidak akan dapat memberikan perhatian yang penuh kepada Aceh, sebab masalah pembangunan di sana haruslah dibedakan dari Sumatera Timur dan Tapanuli. Hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh tidak akan menjadi kebutuhan bagi bagian-bagian lain dari propinsi baru itu, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, kata DPRD, perbedaan-perbedaan sistem sosio-kultural, seperti adat mengenai tanah, perkawinan, dan lain-lain, akan menyulitkan pemerintah propinsi berhubungan dengan masyarakat Aceh. Sementara DPRD mengakui adanya persamaan agama antara orang-orang Aceh, Sumatera Timur, dan Mandailing, tetapi pada saat yang sama dikatakan bahwa persamaan ini saja belum cukup. Dikemukakan pula bahwa Islam telah terjalin dalam setiap bagian kehidupan sosio-kultural rakyat Aceh, sehingga menciptakan dampak-dampak psikologis terhadap rakyat Aceh, dan hal ini membedakan mereka dari rakyat Sumatera Timur dan Mandailing. Tambahan lagi, dari sudut politik, Aceh telah menjadi satu kesatuan sejak dahulu. Karena itu DPRD berpendapat bahwa kesatuan ini hendaknya jangan dipecah dengan memindahkan kiblatnya dari Kutaraja ke Medan. Apabila kiblat ini dipindahkan, begitu ditegaskan oleh DPRD, rakyat Aceh tidak akan memperoleh apa pun kecuali dominasi Sumatera Timur dan Tapanuli. Kekhawatiran akan dominasi ini, seperti telah saya katakan sebelumnya, merupakan beban psikologis bagi rakyat Aceh, sebab hal itu akan mengganggu rasa kesatuan mereka.

Untuk mendukung tuntutan mereka, para anggota DPRD dengan

19. *Tegas*, 27-29 September 1950; dan juga, *Propinsi Sumatera Utara*, hal. 400-408.

tegas menyatakan bahwa mereka, bersama pejabat pemerintahan lain di daerah itu, akan meletakkan jabatan jika Pemerintah Pusat menolak tuntutan mereka. Oposisi rakyat Aceh yang mencolok ini menyebabkan P4SU tidak dapat berjalan di Aceh, padahal Jakarta telah mengangkat Daud Beureueh sebagai koordinator panitia itu untuk Aceh, selain juga menyebabkan tingginya frekuensi hubungan antara Jakarta dan Kutaraja. Pengiriman delegasi antara kedua belah pihak silih berganti selama jangka waktu yang pendek antara bulan Agustus 1950 sampai Januari 1951. Aceh mengirimkan delegasi yang terdiri atas dua orang, yaitu Abdul Wahab Seulimeum, Ketua PUSA dan DPRD, dan Abdul Gani (yang terkenal dengan panggilan Ayah Gani), seorang anggota DPRD, ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat.²⁰

Delegasi ini meninggalkan Aceh dengan optimis dan tanpa menghubungi P4SU yang baru dibentuk di Medan. Sesungguhnya, perubahan yang terjadi dalam situasi politik pada tingkat nasional sehubungan dengan digantikannya Kabinet Hatta oleh Kabinet Masyumi di bawah pimpinan Muhammad Natsir pada pertengahan Agustus²¹ dipandang sebagai suatu harapan baru di Aceh. Masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa suatu pemerintahan Masyumi tentu akan bersedia meninjau kembali kebijaksanaan Kabinet yang lalu tentang Aceh, dan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang menguntungkan mereka. Mereka percaya bahwa Masyumi akan melindungi kepentingan para pemimpin lokalnya, yang sekaligus berarti memelihara kepentingan sendiri di daerah itu. Namun optimisme mereka memudar setelah delegasi mereka berkonsultasi dengan para pemimpin partai itu, baik dalam pemerintahan maupun parlemen. Delegasi itu gagal meyakinkan pimpinan partai dan pemerintah yang baru untuk berbuat sesuatu. Mr. Assaat, bekas pejabat presiden dari pemerintah Republik di Yogyakarta dan kini menteri dalam negeri yang baru dalam Kabinet Natsir, yang ditemui delegasi sehari setelah ia menduduki jabatannya, hanya menjanjikan akan berkunjung ke Aceh dan mengatakan bahwa ia lebih suka

20. *Mimbar Umum*, 5 September 1950.

21. Kabinet Hatta mengembalikan mandatnya pada tanggal 15 Agustus dan demisioner sampai 6 September 1950 ketika kabinet penggantinya dilantik. Lihat Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945-1970* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hal. 11 dan 13. Selanjutnya sumber ini akan dikutip sebagai *Susunan Kabinet*.

meninjau sendiri situasinya sebelum dapat mempertimbangkan suatu penyimpangan dari persetujuan RIS-RI.²²

Mengapa PUSA gagal meyakinkan suatu pemerintahan Masyumi sekalipun? Dalam penolakan terhadap tuntutan Aceh, sedikitnya terdapat lima faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Masyumi. Pertama, Pemerintah Natsir, sebagaimana halnya Kabinet Hatta, juga menginginkan reorganisasi propinsi-propinsi. Menurut Feith, seperti Hatta, Natsir pun memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu pemerintah yang bersatu dan efisien.²³ Penyederhanaan aparatur pemerintahan pada tingkat daerah, yang antara lain meliputi reorganisasi propinsi, tentu merupakan unsur penting dalam kebijaksanaan yang mengarah pada efisiensi pemerintahan. Kedua, suatu penyimpangan dari perjanjian RIS-RI tidak saja akan membahayakan pemerintah baru, sebab Masyumi mungkin akan menghadapi serangan hebat dari partai-partai lain yang menginginkan penyederhanaan propinsi, tetapi juga akan mendorong daerah-daerah lain untuk memperoleh perlakuan yang sama. Oleh karena itu, dalam pengumumannya Kabinet Natsir mengakui pentingnya butir yang terakhir itu, dan memperkirakan perlunya suatu pengaturan integral jika kepada Aceh hendak diberikan status propinsi.²⁴

Ketiga, memperhatikan kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat selama revolusi, para pemimpin Masyumi di Jakarta mungkin berpendapat bahwa rakyat Aceh pada akhirnya akan dapat menerima pembubaran propinsi mereka. Kesetiaan Aceh pada masa lalu mungkin telah menyedatkan Natsir sehingga berpikiran bahwa rakyat Aceh tidak akan menolak Propinsi Sumatera Utara yang baru itu; dan bahkan sulit baginya untuk membayangkan kemungkinan adanya dendam di kalangan pemimpin Aceh terhadap Pemerintah Pusat.²⁵ Keempat, perbedaan antara kelompok-kelompok Natsir dan Sukiman²⁶ dalam partai itu agaknya telah merasuk pula ke dalam masalah ini. Kelompok Natsir agaknya

22. Lihat pidato Assaat sebagaimana dikutip oleh Meuraxa, *Atjeh 1000 Tahun*, hal. 60.

23. Feith, *The Decline*, hal. 303.

24. Wawancara dengan bekas Perdana Menteri Muhammad Natsir, Jakarta, 2 Februari 1974.

25. Wawancara dengan Nur el-Ibrahiny, bekas wakil Aceh di Parlemen, Jakarta, 18 Oktober 1975.

26. Salah seorang pemimpin Masyumi, Mr. Muhammad Roem, mengakui adanya kelompok-kelompok ini dalam partai tersebut. Lihat *Waspada*, 24 Agustus 1951.

dipercayai tidak mempunyai suatu keberatan untuk memberikan kembali status propinsi kepada Aceh, atau, setidaknya, bersedia memberikan konsensi politik kepada rakyat Aceh. Barangkali, dengan harapan dapat mempertahankan dukungan rakyat Aceh kepada partainya dalam pemilihan umum yang ketika itu sedang direncanakan, Natsir menghendaki daerah tersebut tetap berada dalam tangan para pemimpin PUSA. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Natsir mempunyai gagasan untuk mengangkat Daud Beureueh sebagai wakil gubernur Sumatera Utara untuk Aceh.²⁷ Di lain pihak, kelompok Sukiman sangat menentang kecenderungan yang ada di dalam partai untuk memberikan status propinsi kepada Aceh,²⁸ barangkali karena ia ingin membina hubungan yang lebih dekat lagi dengan PNI, suatu kekuatan yang paling menentang pembentukan kembali Propinsi Aceh.

Akhirnya, ketika delegasi Aceh tiba di Jakarta, unsur *ulebalang* telah berhasil memindahkan medan pertempuran dari Aceh ke Jakarta; bagaimanapun juga hal ini tentu berpengaruh terhadap para pemimpin di ibu kota. Tak perlu diragukan bahwa sikap Pemerintah Pusat sangat dipengaruhi oleh tanggapan kelompok *ulebalang* yang antusias, yang menyetujui rencana pemerintah menghapuskan Propinsi Aceh yang didominasi kaum ulama. Dalam serangkaian tulisan di harian *Indonesia Raya* pada bulan Agustus 1950, kelompok ini berkampanye menentang kaum ulama PUSA dan menuduh bahwa hanya segelintir pemimpin Aceh saja yang menuntut status propinsi, dan itu pun dilakukan demi mempertahankan kepentingan mereka sendiri.²⁹ Berkenaan dengan tuduhan ini, saya melihat kunjungan Assaat ke Aceh, yang dijanjikannya kepada Abdul Wahab dan Ayah Gani, sebagai suatu indikasi bahwa Pemerintah Pusat setidaknya telah dipengaruhi oleh kaum *ulebalang*.

Kesan ini secara tidak sadar telah diungkapkan sendiri oleh Assaat

27. Wawancara dengan Muhammad Natsir, Jakarta, 2 Februari 1974.

28. Wawancara dengan Nur el-Ibrahimi, Jakarta, 18 Oktober 1975.

29. Surat terbuka yang ditujukan kepada T.T. Hanafiah dalam *Indonesia Raya*, 11 Agustus 1950. *Indonesia Raya* juga menerbitkan surat-surat terbuka yang panjang lainnya dari T.T. Hanafiah dan Ibrahim masing-masing pada tanggal 22 dan 30 Agustus, yang mengkritik peranan kaum ulama pada masa kolonial dan revolusi. Ali Hasjmy menulis sebuah surat terbuka yang membela PUSA, muncul dalam *Indonesia Raya*, 23 Agustus 1950.

pada saat ia dan rombongannya, yang antara lain terdiri atas Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara dan Ketua P4SU, tiba di Kutaraaja pada tanggal 26 September 1950. Pada hari itu, sementara Gubernur Daud Beureueh menjemput rombongan tersebut di lapangan terbang, para pemimpin Aceh, semua bupati, wedana, dan kepala jawatan agama seluruh Aceh, serta ulama-ulama lain menunggu di kediaman resmi Daud Beureueh dalam suasana yang sangat panas. Dalam pertemuan dengan mereka, sesudah mengemukakan kebijaksanaan pemerintah tentang reorganisasi propinsi-propinsi dan mendengarkan argumentasi para pemimpin Aceh baik dari kalangan pemerintahan maupun keagamaan, Assaat mengutarakan kesangsiaannya apakah keinginan yang telah dikemukakan tentang propinsi sendiri itu benar-benar merupakan suara rakyat atau hanya keinginan beberapa pemimpin saja.³⁰ Ucapan Assaat ini mau tidak mau menimbulkan ketegangan dalam pertemuan itu. Menyadari situasi ini, Assaat kemudian melakukan pembicaraan tidak resmi dengan Daud Beureueh pada hari berikutnya. Dalam pembicaraan tersebut ia antara lain meminta Daud Beureueh untuk menenangkan keadaan jika nanti Jakarta akhirnya menolak tuntutan Aceh.³¹

Tentu saja para pemimpin Aceh tidak puas dengan kunjungan Assaat. Namun, mempertimbangkan bahwa Jakarta tidak akan segera membubarkan propinsi mereka, meskipun P4SU telah dibentuk, para pemimpin Aceh masih mengharapkan agar Pemerintah Pusat mengabulkan tuntutan mereka. Oleh sebab itu P4SU tidak dapat menjalankan tugasnya di Aceh walaupun koordinatornya untuk daerah itu adalah Daud Beureueh sendiri. Dalam hal ini Daud Beureueh mengatakan bahwa oleh karena Pemerintah Pusat belum memberi instruksi yang pasti tentang Propinsi Aceh, maka propinsi itu masih tetap ada.³² Pada bulan September, sebelum kedatangan Assaat, Daud Beureueh memang telah melarang Jawatan Penerangan daerah menyebarkan pamflet yang mem-

30. Tajuk rencana *Tegas*, 27 September 1950. Mungkin Assaat tidak mengatakannya secara tajam seperti dilaporkan *Tegas*, akan tetapi suatu sumber lain membenarkan tafsiran redaksi surat kabar tersebut. Menurut Dada Meuraxa, Assaat mengatakan, "dari semua ucapan saya fahami bahwa keinginan rakyat adalah lebih kurang 100 persen. Keinginan rakyat adalah bahwa Aceh menjadi otonom sebagai satu propinsi. Saya dapat menerima itu, tetapi ia menjadi suatu keinginan setelah rakyat dihasut". Lihat Meuraxa, *Atjeh 1000 Tahun*, hal. 77-78.

31. *Tegas*, tajuk rencana, 27 September 1950.

32. *Waspada*, 30 Oktober 1950.

beritahukan masyarakat tentang berdirinya Propinsi Sumatera Utara.³³ Pada akhir Oktober, dengan harapan yang semakin menipis, Daud Beureueh meninggalkan Aceh menuju Jakarta untuk membujuk pemerintah untuk yang terakhir kalinya. Ia mungkin berpikir, Jakarta setidak-tidaknya akan menghormatinya karena peranannya dalam revolusi dan, oleh sebab itu, ia berharap misinya akan menghasilkan sesuatu. Namun ia segera menyadari bahwa harapannya terlalu tinggi, sehingga ia benar-benar kecewa. Pertemuan-pertemuannya dengan pimpinan nasional tidak membuahkan hasil atau menjanjikan sesuatu. Perdana Menteri Natsir sekali lagi meminta dia agar bersabar, sedangkan Presiden Soekarno mengatakan bahwa zaman telah berubah dan ia tidak dapat berbuat apa-apa.³⁴

Kini pembubaran Propinsi Aceh telah ditetapkan dengan pasti. Satu-satunya soal yang dipikirkan Natsir adalah apakah ia sudah siap untuk mempermalukan para pemimpin Aceh dengan menghapuskan status propinsi itu tanpa persetujuan mereka, terutama setelah Daud Beureueh kembali ke Aceh dengan penuh kecewa. Dalam hal ini dapatlah diperkirakan bahwa suatu tindakan sepihak dari pemerintah pasti akan mengganggu situasi politik setempat, padahal selama ini daerah itu selalu menguntungkan partainya. Akan tetapi, walaupun ia berpendapat bahwa rakyat Aceh tidak akan mempertimbangkan suatu tindakan kekerasan terhadap Pemerintah Pusat, kegiatan beberapa pemimpin Aceh untuk memobilisasi rakyat tidak lepas dari perhatiannya. Sementara itu Daud Beureueh sendiri sama sekali tidak mencegah kegiatan teman-temannya. Dia malah mengakui adanya pengerahan pemuda oleh para pemimpin PUSA, meskipun hal itu dikomentarnya sebagai persiapan bagi kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Daud Beureueh bahkan menjamin bahwa tidak akan ada reaksi atas penolakan tuntutan Aceh oleh Jakarta, sebab Aceh tidak sama dengan Maluku Selatan.³⁵ Namun demikian, pada tanggal 31 Desember 1950, Natsir kaget menerima telegram dari Daud Beureueh yang memberitahukan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur Aceh. Pengun-

33. *Mimbar Umum*, 26 September 1950.

34. Wawancara dengan Muhammad Natsir, Jakarta, 2 Februari 1974, dan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Beureunuen, 10 Juli 1973.

35. *Waspada*, 20 Oktober 1950.

duran diri Daud Beureueh secara mendadak seperti itu sama sekali tidak diharapkan oleh Jakarta. Natsir sendiri lebih suka memilih untuk menjelaskan persoalannya daripada hanya membiarkan Daud Beureueh mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh sebab itu Perdana Menteri segera mengawatkan Daud Beureueh agar tidak mengundurkan diri sebelum ia tiba di Kutaraja pada awal Januari 1951.³⁶ Daud Beureueh tampaknya sudah memutuskan untuk mundur segera setelah ia tiba kembali di Aceh dari Jakarta, dan niatnya itu telah disampaikannya kepada para ulama ketika melaporkan hasil kunjungannya ke Jakarta kepada mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa misinya telah gagal, oleh sebab itu ia akan mengundurkan diri dari jabatan gubernur. Tetapi ia tidak menyarankan kepada kawan-kawannya untuk mengikutinya, karena hal itu ia serahkan kepada mereka.³⁷

Sampai tahap ini memang para pemimpin Aceh tidak dapat berbuat sesuatu apa pun selain menunggu keputusan Jakarta membubarkan propinsi mereka. Agaknya mereka mengerti bahwa tidaklah bermanfaat bagi mereka untuk mendorong rakyat Aceh mengambil tindakan keras terhadap Jakarta sebagai suatu pernyataan protes. Kendatipun beberapa pemimpin PUSA sudah berusaha mengerahkan rakyat, mereka sadar bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengorganisasikan massa. Para pemimpin PUSA ini sangat menyadari fakta bahwa rakyat Aceh pada dasarnya pro-Republik, dan bahwa pembubaran propinsi itu saja tidak akan cukup untuk membentuk perasaan rakyat. Mereka masih memerlukan beberapa waktu lagi untuk membuktikan kepada rakyat bahwa tuntutan mereka benar. Akibatnya, ketika Kabinet Natsir membubarkan Propinsi Aceh pada akhir Januari 1951, Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin lain terpaksa menerima kenyataan dan "janji-janji" Pemerintah Pusat.

Jakarta dan Pertarungan Kekuasaan Lokal

RENCANA PEMERINTAH Pusat untuk membubarkan Propinsi Aceh berikut realisasinya telah menumbuhkan dendam dan frustrasi di kalang-

36. Wawancara dengan Muhammad Natsir, Jakarta, 2 Februari 1974. Natsir tidak jadi berangkat ke Kutaraja pada awal Januari 1951. Ia menelegram Daud Beureueh dan menyatakan bahwa ia tidak akan ke sana sampai akhir bulan itu.

37. *Mimbar Umum*, 23 Oktober 1950.

an para pemimpin PUSA dan pengikut-pengikut mereka. Pembubaran itu malah telah berjaln dengan aneka macam kepentingan yang terbentuk berdasarkan pembelahan yang ada dalam masyarakat Aceh. Pembelahan antara ulama-ulama reformis dari PUSA di satu pihak, dan kelompok *ulebalang* yang didukung oleh beberapa ulama terkenal dari kubu tradisional di lain pihak, telah dipertegas oleh rencana Pemerintah Pusat untuk membubarkan Propinsi Aceh. Sementara kaum ulama reformis menyimpan dendam terhadap Pemerintah Pusat, kaum *ulebalang* dan pemimpin ulama non-PUSA memandang Jakarta sebagai sekutu mereka dalam upaya untuk membalas dendam terhadap pemimpin PUSA.

Pimpinan nasional di Jakarta agaknya menyadari adanya kemungkinan peningkatan pembelahan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa munculnya kembali pembelahan demikian dalam kehidupan politik Aceh memang dipandang perlu oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memelihara kekuasaan atas daerah itu. Tidak mustahil pula bahwa dalam melaksanakan kekuasaan di daerah-daerah di Indonesia, Jakarta sebenarnya telah meniru taktik kolonial Belanda di Jawa. Padahal politik Belanda di Aceh, sampai titik tertentu, berbeda dari taktik Jakarta. Seperti telah kita lihat dalam Bab terdahulu, di Aceh Belanda berusaha keras menyeimbangkan kekuatan kaum ulama dan *ulebalang*, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar; kebijaksanaan ini berbeda dengan kebijaksanaan Jepang yang berhasil mempertentangkan mereka satu sama lain. Dalam berhubungan dengan Aceh, Jakarta tidak mengambil taktik Jepang itu, melainkan sebaliknya, meniru kebijaksanaan administratif yang diterapkan Belanda di Jawa. Seperti yang dilakukan Belanda terhadap Kerajaan Mataram,³⁸ Jakarta lebih suka mengalahkan kekuatan politik yang lebih kuat di Aceh, PUSA, dengan langsung atau tidak langsung mendukung kelompok *ulebalang* yang lemah. Akan tetapi, berbeda halnya dengan Belanda di Jawa, Pemerintah Pusat tidak menempatkan kelompok *ulebalang* yang lemah itu pada kekuasaan di Kutaraja, melainkan mengambil kekuasaan itu untuk dirinya sendiri.

Tampaknya Pemerintah Pusat tidak saja muak terhadap para pemimpin PUSA, tetapi juga khawatir akan dukungan kuat yang mereka terima dari penduduk setempat. Pemerintah Pusat agaknya tidak menyukai para

38. Anwar Sanusi, *Sedjarah Indonesia* (Bandung dan Jakarta: Pustaka Pakuan, 1960), hal. 62-63.

pemimpin PUSA karena konsep kesadaran sosial mereka, yang telah memungkinkan mereka memenangkan dukungan rakyat, di samping karena prestasi mereka dalam revolusi nasional telah menutupi pengaruh Jakarta di daerah itu. Dukungan kuat yang diberikan rakyat Aceh kepada PUSA memang telah mendorong para pemimpinnya untuk menentang secara tegas rencana Jakarta membentuk Propinsi Sumatera Utara yang baru. Pada gilirannya, oposisi ini telah mempermalukan Pemerintah Pusat karena mengakibatkan pemerintah menunda pelaksanaan rencana itu selama hampir enam bulan. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat mendukung kritik yang dilancarkan oleh lawan-lawan PUSA, yakni kelompok *ulebalang* dan sekutu mereka dalam kubu ulama tradisional, padahal mereka merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat Aceh. Akibatnya, sebagaimana yang akan kita lihat, terjadilah suatu krisis politik, sebab apabila "suatu mayoritas dihina, maka para pemimpin memiliki kekecewaan yang memadai untuk menimbulkan krisis".³⁹

Rencana Pemerintah Pusat untuk menghapus Propinsi Aceh memunculkan gejala pertama dari krisis dalam kepolitikan Aceh. Beberapa individu yang cenderung kepada kubu *ulebalang* melihat rencana itu sebagai durian runtuh, sebab dapat dimanfaatkan sebagai titik balik untuk mengurangi posisi para pemimpin PUSA dalam politik. Didalangi oleh individu-individu ini, yang umumnya berdiam di Jakarta, sisa-sisa kekuatan *ulebalang* muncul kembali sebagai kelompok yang menantang para pemimpin PUSA berkenaan dengan peranan mereka pada masa lampau. Berbeda dari tantangan mereka pada masa revolusi, tantangan-tantangan yang dilancarkan pada masa sesudah revolusi justru berpunca atau berawal pada pusat kekuasaan nasional, Jakarta, kemudian mengalir turun ke Aceh, dan di daerah itu tantangan muncul dalam bentuk formal sebagai "Badan Keinsyafan Rakyat di Aceh." (BKR). Tujuan kelompok ini cukup jelas, yaitu mengurangi kekuatan PUSA secara serentak dengan menggunakan taktik kakaktua: menyerang PUSA di basisnya dan mempermalukannya pada tingkat nasional.

Kegiatan sejumlah individu di tingkat nasional ini diperlihatkan secara terbuka melalui penerbitan beberapa surat pembaca dalam surat kabar

39. Robert C. Angell, "The Sociology of Human Conflict", dalam, Elton B. McNeil (ed), *The Nature of Conflict*, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1965), hal. 81.

Indonesia Raya, di samping melalui intrik-intrik di kalangan pimpinan nasional. Selain itu, untuk dapat mempengaruhi masyarakat dan pejabat pemerintahan, mereka juga menerbitkan buletin, umumnya dalam bahasa Aceh, dan menyebarkan pamflet-pamflet, terutama di Medan. Segera setelah rencana pemerintah untuk membubarkan Propinsi Aceh diumumkan kepada masyarakat, T.T. (Teuku Teungoh) Hanafiah, putra seorang *ulebalang* di Aceh Timur dan kemenakan almarhum Residen Arif, melalui sebuah tulisan dalam *Indonesia Raya* terbitan 11 Agustus 1950, menuduh PUSA dan para pemimpinnya telah bekerja sama dengan Belanda pada masa sebelum perang dalam rangka menghancurkan unsur-unsur nasional seperti Arif. Dalam surat terbuka yang sama, ia juga mengkritik sekitar lima belas orang pemimpin organisasi itu sebagai telah terlibat dalam pembantaian terhadap kaum *ulebalang* pada masa revolusi dan merampas harta benda mereka. Ia menggugat bahwa tuntutan status propinsi dibuat oleh para pemimpin PUSA hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka pada masa lalu.

Hanafiah tidak berhenti sampai di situ. Tidak sampai dua minggu setelah munculnya surat terbukanya yang pertama, menyusul pula sebuah serangan yang lebih serius. Kali ini para ulama PUSA dituduh telah membentuk suatu *Comite van Ontvangst* (Panitia Penyambutan Belanda) sebelum penyerahan Jepang demi mendapatkan simpati Belanda. Dengan mencap para ulama itu sebagai "bandit-bandit", dia menggugat mereka atas kematian Arif pada bulan April 1946, dan mendesak Pemerintah Pusat agar membawa mereka ke pengadilan. Ia juga menyebutkan tujuh nama pemimpin muda PUSA sebagai penanggung jawab organisasi Banteng Hitam yang melakukan penculikan dan perampokan selama revolusi.⁴⁰

Tentu saja tuduhan-tuduhan terbuka ini sudah cukup memadai sebagai pemantik api bagi dahan-dahan kering. Menyusul sebuah surat pendek Ali Hasjmy yang diterbitkan *Indonesia Raya* pada tanggal 23 Agustus 1950, datanglah jawaban dari PUSA dalam bentuk sehelai pamflet, sehingga terciptalah "perang pamflet" di antara kedua golongan itu. Pada mulanya kalangan anggota PUSA tidak bermaksud untuk

40. *Indonesia Raya*, 22 Agustus 1950; yang menjadi sumber Hanafiah adalah Said Ali, dan nama-nama yang disebutkannya itu sebenarnya telah lebih dahulu diberitakan oleh surat kabar kiri yang terbit di Medan, *Harian Rakyat* pada tanggal 9 Februari 1950.

menolak tuduhan tersebut. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin muda mendesak agar organisasi itu melawan dan mengutuk Hanafiah.⁴¹ Oleh sebab itu, pada awal September 1950, PUSA dan Pemuda PUSA menyebarkan pamflet bersama yang bukan hanya mengutuk Hanafiah, melainkan juga anasir-anasir *ulebalang* pada umumnya.

Menolak semua tuduhan, PUSA dan Pemuda PUSA dengan jelas memperlihatkan dendam mereka terhadap unsur-unsur *ulebalang*. Pernyataan tersebut mengemukakan bahwa dengan tuduhan itu kaum *ulebalang* telah menanam "utang baru" yang tidak akan mudah dilunasi kepada PUSA dan Pemuda PUSA. Pernyataan itu membantah bahwa para pemimpin PUSA telah membentuk *Comite van Onvangst*, malah menggugat bahwa Hanafiah telah "mencuci mukanya dengan kencingnya" sebab dia sendirilah yang menjadi Sekretaris Jenderal panitia itu di Kutaraja. Pemimpin-pemimpin PUSA dan Pemuda PUSA menyerukan kepada para ulama dan rakyat pada umumnya untuk bersatu, sambil mengingatkan anasir-anasir *ulebalang* akan "utang" mereka,⁴² yaitu bahwa hinaan *ulebalang* terhadap para ulama akan dikembalikan dalam bentuk hinaan pula.

Akan tetapi, ancaman ini tidak memancing balasan Hanafiah. Sebagai gantinya, suatu Sub-Komite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Aceh, yang baru saja dibentuk di Medan, menanggapi dengan menyebarkan serangkaian pamflet. Menyadari bahwa PUSA mempunyai hubungan yang sangat erat dengan rakyat, maka Tarmuli (Teuku Abdurrahman Muli), tokoh di belakang organisasi itu, putra seorang *Ulebalang* yang terbunuh di Aceh Utara, berusaha memisahkan pemimpin PUSA dari rakyat. Karena itu Sub-komite menuduh para pemimpin PUSA sebagai manipulator agama, dan bahwa merekalah, dan bukan rakyat, yang menjadi pembunuh dan perampok harta *ulebalang*.⁴³ Puncak dari antagonisme ini muncul dalam bentuk polemik, yang di dalamnya kedua

41. Lihat pamflet pertama yang dikeluarkan oleh Putra Ulama, "Ulama-ulama Dituduh Oleh T.T. Hanafiah Mendjual Atjeh Kepada Belanda" (t.t., [akhir Agustus 1950?]).

42. "Pengumuman P.U.S.A./Pemuda P.U.S.A." (t.t., [awal September 1950?]).

43. "Mengapa Rakjat Disalahkan", dan "Rakjat Atjeh Dituduh Pembunuh dan Perampok Oleh P.B. PUSA/Pemuda PUSA", dua pamflet yang diedarkan oleh Sub-Komite Menuntut Keadilan dan Pembangunan, masing-masing bertanggal Medan, 12 dan 14 September 1950.

pihak memanfaatkan kegemaran rakyat Aceh akan hikayat.⁴⁴ Menyadari pentingnya hikayat sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat Aceh, anasir *ulebalang* di Jakarta menerbitkan jilid pertama hikayat *Suasana Atjeh* dalam huruf latin, yang membukukan semua tuduhan mereka terhadap PUSA. Penerbitan ini segera disusul oleh munculnya *Seruan Putra Ulama*, yang kemudian ditanggapi oleh kaum *ulebalang* dengan terbitnya *Suasana Atjeh* jilid dua.⁴⁵

Sudah pasti di balik antagonisme ini terdapat pertikaian atas kekuasaan, harta, dan kedudukan. Bila kita perhatikan hasil-hasil revolusi, kita dapat melihat bahwa seusai revolusi unsur-unsur *ulebalang* berada dalam suatu situasi di mana mereka telah kehilangan kekuasaan, harta, dan kedudukan (*gadeoh keurajeun*, dalam bahasa Aceh). Di lain pihak, para pemimpin PUSA memandang revolusi sebagai titik balik yang mengubah posisi mereka dari *seumeubeut* (mengajarkan agama) ke politik melalui proses revolusi sosial yang berdarah. Transformasi ini telah memaksa sejumlah anasir *ulebalang* pada akhir tahun 1949, mengadakan intrik dengan para pemimpin di tingkat nasional yang pernah menjadi kawan-sekolah beberapa anak *Ulebalang* pada masa kolonial.⁴⁶ Akan tetapi intrik ini tidak menantang PUSA dalam hal penyitaan kekuasaan dan status para *Ulebalang*, melainkan dalam hal kekayaan. Dengan demikian,

44. Hikayat adalah suatu bentuk cerita yang lazim terdapat di dunia Melayu. Ditulis tangan dalam bentuk puitis, di Aceh hikayat itu aslinya ditulis tangan dalam bahasa Aceh dengan menggunakan huruf Arab (Jawi). Pembacaan hikayat biasanya berlangsung pada malam hari setelah waktu sembahyang Isya sampai menjelang Subuh, baik di *meunasab* maupun di rumah. Dalam pembacaan ini, seorang atau lebih pembaca secara bergantian membacakan hikayat kepada para pendengar yang berkerumun di sekelilingnya. Sejauh yang saya ketahui, pembacaan hikayat masih tetap populer di kalangan penduduk desa di Aceh sampai kini (tahun 1970-an).

45. Tusny Sjah (nama samaran Teuku Husin Sjah), *Suasana Atjeh* (Jakarta: Teesyala, 1950) jilid 1; dan jilid 2 (Jakarta: Tusny Sjah, 1951); dan Abdullah Arif, *Seruan Putra Ulama*, yang merupakan jilid 11 dari seri hikayatnya, *Seumangat Atjeh* (Kutaraja: Abdullah Arif, 1950).

46. Intrik ini telah diberitahukan kepada pemimpin-pemimpin PUSA oleh Sjafruddin Prawiranegara. Untuk menghentikan intrik itu, karena dinilainya sebagai fitnah, Sjafruddin mendesak dikeluarkannya buku *Revolusi Desember '45* yang dipersiapkan oleh salah seorang anggota stafnya, Hasan Muhammad Tiro, sebagai buku putih yang akan menjelaskan peristiwa revolusi sosial kepada Pemerintah Pusat. Lihat surat Daud Beureueh kepada Majelis Penimbang di Kabupaten Aceh Pidie, bertanggal Kutaraja 19 November 1949.

kaum *ulebalang* memberi cap kriminal pada pemimpin PUSA, sehingga mereka dapat meminta Pemerintah Pusat agar mengambil tindakan hukum. Dalam hubungan ini, beberapa gugatan telah diajukan kepada Jaksa Agung Suprpto pada masa 1951-1952. Umpamanya, pada bulan Januari 1952, dengan mengatasnamakan dua puluh keluarga *ulebalang* di Kabupaten Aceh Pidie, Tarmuli, dalam surat kepada Jaksa Agung tertanggal 15 Januari, menggugat bahwa PUSA telah merampas harta mereka senilai tiga puluh juta rupiah lebih.

Pemerintah Pusat tidak berusaha mendinginkan kedua golongan, walaupun telah melihat munculnya suatu krisis. Sementara tidak tepat jika kita mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dengan sengaja mendukung kaum *ulebalang*, tetapi pada hemat saya, sekurang-kurangnya, tidak pula salah bila dikatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah telah menciptakan situasi yang menguntungkan kaum *ulebalang* di Aceh. Adalah jelas bahwa sejak awal tahun 1950 Jakarta telah bergerak untuk mengurangi pengaruh PUSA dalam bidang pemerintahan. Padahal Pemerintah Pusat sangat sadar tidak akan mampu mengambil alih setiap posisi penting dalam pemerintahan itu dari tangan orang Aceh. Oleh sebab itulah semacam pemerintahan tidak langsung sekali lagi diterapkan di Aceh, tapi kali ini oleh suatu pemerintah nasional. Pemerintah Pusat hanya memegang posisi puncak dan jawatan-jawatan teknis dalam pemerintahan daerah, sedangkan kendali pada tingkat kabupaten dan tingkat yang lebih rendah lagi diserahkan kepada PUSA. Mungkin sudah diperhitungkan bahwa pemerintahan tidak akan dapat dikendalikan tanpa mempertahankan beberapa tokoh PUSA di dalamnya. Atau dengan perkataan lain, tokoh-tokoh PUSA terpaksa dipertahankan agar kekuasaan pemerintah dapat diamankan. Pada gilirannya, sistem seperti itu akan memberikan keuntungan tidak langsung kepada Pemerintah Pusat, sebab Pemerintah akan mudah melepaskan diri dari kritik yang mungkin muncul berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah, dan menimpakan semua kesalahan kepada PUSA.

Demi alasan inilah agaknya Pemerintah Pusat melanjutkan sistem pemerintahan tidak langsung di Aceh. Untuk melindungi kepentingnya, pemerintah mengangkat para pejabat Jawa atau bukan Aceh lainnya dalam kedudukan-kedudukan yang tidak berhubungan langsung dengan penduduk setempat, dan meninggalkan posisi-posisi lain kepada orang Aceh, atau agar lebih tepat, kepada pemimpin-pemimpin PUSA. Demi-

kianlah, sementara Pemerintah Pusat mengamankan kekuasaannya dengan mengangkat R.M. Danubroto sebagai koordinator pemerintahan dengan pangkat residen, bahkan sebelum Daud Beureueh mengundurkan diri sebagai gubernur Aceh, para pemimpin PUSA tetap menguasai posisi-posisi seperti bupati, wedana, dan camat sampai ke tingkat kepala desa.

Namun begitu, PUSA jelas sangat terpukul oleh tindakan Pemerintah Pusat. Pada awal tahun 1951, salah seorang pemimpin muda yang menonjol, Ali Hasjmy, dimutasikan ke Medan, dan banyak lagi lainnya, meski tetap berada di Aceh, disubordinasikan kepada pejabat-pejabat Muslim-abangan atau Kristen yang didatangkan dari Jawa atau Medan. Bahkan keadaannya semakin buruk lagi bagi para pemimpin PUSA ketika sebuah Kabinet Masyumi yang lain di bawah pimpinan Sukiman terbentuk pada akhir April 1951. Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukiman ini, Iskak Tjokroadisurjo dari PNI, mengambil garis yang lebih tegas lagi terhadap Aceh dibandingkan dengan pendahulunya. Dalam keputusan tertanggal 2 Februari 1952, Iskak memutasikan dua orang patih Aceh ke Sumatera Timur dan Tapanuli, dan memasukkan lima patih bukan-Aceh dari kedua daerah itu untuk memimpin kantor-kantor bupati di Aceh. Suatu tindakan yang lebih drastis dan mempermalukan telah dilakukan ketika pada bulan Maret 1952 Iskak memberhentikan Daud Beureueh sebagai gubernur, dan memperbantukan dia di departemennya sendiri. Hingga bulan April 1952, dari berbagai jawatan teknis seperti pekerjaan umum, listrik, pertanian, kehewanan, kehutanan, kereta api, dan industri, hanya dinas industri saja yang dikepalai orang Aceh. Sisanya berada di tangan orang Jawa atau Batak yang beragama Kristen.

Situasi yang sama juga berkembang dalam bidang kemiliteran. Program rasionalisasi yang diusulkan Kabinet Hatta tidak hanya memukul elite militer Aceh, melainkan juga para bawahan. Berbeda dari keadaan di Jawa dan tempat-tempat lain, program rasionalisasi di Aceh ternyata menghantam TNI sendiri. Ini disebabkan karena TNI merupakan satu-satunya organisasi militer yang ada di Aceh sesudah pertengahan tahun 1948, yakni pada saat Daud Beureueh berhasil menggabungkan TRI dan pasukan-pasukan rakyat ke dalamnya.⁴⁷ Jika di tempat-tempat lain

47. Kodam-1/Iskandar Muda, *Dua Windbu Kodam-1/Iskandar Muda* (Kutaraja: Sejarah Militer Kodam-1/Iskandar Muda, 1972), hal. 142.

Pemerintah Pusat mempertahankan TNI dan hanya mendemobilisasikan pasukan-pasukan rakyat, di Aceh justru TNI yang terkena program rasionalisasi itu. Di Aceh, Divisi X dibubarkan dan kekuatannya dikurangi menjadi brigade, sehingga menyebabkan terlantarnya ribuan prajurit.⁴⁸

Kemudian, untuk menguasai kekuatan militer daerah, Pemerintah Pusat menarik unit-unit militer Aceh ke luar daerah itu dan menggantikannya dengan unit-unit bukan-Aceh. Pada bulan November 1950, Batalion 110 di bawah pimpinan Kapten Hasan Saleh dikirim ke Sulawesi Selatan untuk bergabung dalam operasi penumpasan pemberontakan di sana, dan satu batalion lain yang dipimpin oleh Kapten Alamsjah ditempatkan di Maluku. Tindakan ini diikuti oleh pemberangkatan Batalion Kapten Abdul Manaf ke Maluku pada pertengahan tahun 1951, sehingga di daerah itu terdapat dua batalion dari Aceh. Lebih jauh lagi, pada pertengahan Januari 1951, satu brigade lengkap (dua batalion) di bawah pimpinan Mayor Hasballah Hadji meninggalkan basisnya di Kutaraja menuju Tapanuli, dan kemudian diikuti oleh pengiriman Kompi 5136 Brimob ke Jawa. Untuk menggantikan pasukan-pasukan ini, didatangkanlah unit-unit dari Tapanuli.

Perkembangan ini tentu saja disambut baik oleh kaum *ulebalang*. Sebaliknya, dendam terhadap Pemerintah Pusat berkembang pesat di kalangan ulama PUSA dan, sudah pasti, di kalangan para prajurit yang terkena rasionalisasi. Sesudah Divisi X dibubarkan pada akhir tahun 1950, Aceh hanya memiliki satu brigade yang kecil, Brigade AA, yang berada di bawah TT-I (Tentara dan Territorium I) yang berkedudukan di Medan. Pada pertengahan Januari 1951, untuk menambah kemarahan rakyat Aceh, Komandan Brigade itu, Mayor Hasballah Hadji yang mendukung PUSA, dipindahkan ke Tapanuli bersama pasukannya. Ini terjadi hanya dua minggu sesudah partisipasinya dalam acara pembukaan konferensi PUSA yang kedua di Kutaraja. Komandan brigade yang baru juga seorang perwira Aceh, yaitu Mayor Nazier. Namun para pemimpin

48. Lihat surat Husin Jusuf kepada S.M. Amin, gubernur Sumatera Utara, bertanggal "Fi-Sabilillah", awal Juli 1954; dan serangkaian tulisannya, "Keadaan Atjeh Dewasa Ini" dalam *Tegas*, 13 dan 17 Maret 1953. Kutipan dari terbitan tanggal 17 Maret. Suatu versi lengkap dari surat Husin Jusuf ini diterbitkan oleh A.H. Gelanggang dalam *Rabasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin* (Kutaraja: Pustaka Murni Hati, 1956), hal. 132-146.

PUSA tidak menyukai mutasi ini, bukan hanya karena pasukan yang menggantikannya bukan-Aceh, tetapi juga karena orientasi politik Nazier yang mengarah ke kiri. Sebelumnya, pada awal April 1950, Kolonel Husin Jusuf, bekas komandan Divisi X yang dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, mengundurkan diri karena konflik pribadi dengan Kolonel Alex Kawilarang yang direncanakan menjadi komandan TT-I di Medan. Langkah ini juga diikuti oleh Letnan Kolonel Tjek Mat Rahmany, kepala staf Divisi X.

Pada waktu itulah PUSA menyelenggarakan konferensi yang kedua di Kutaraja pada tanggal 23 Desember 1950, sepuluh tahun lebih setelah konferensi pertama. Bagi orang luar, konferensi itu tampak tidak lebih daripada suatu pameran kekuatan PUSA; acara pembukaannya dihadiri oleh seribu ulama dan pejabat-pejabat sipil. Kira-kira dua puluh lima ribu orang berpartisipasi dalam berbagai atraksi yang diadakan oleh konferensi. Biaya konferensi tidak kurang dari Rp 150.000,00,⁴⁹ Rp 10.000,00 di antaranya berasal dari keuangan pemerintah daerah.⁵⁰ Dengan penyelenggaraan yang sama seperti konferensinya yang pertama, partisipasi rakyat dalam acara pembukaannya menunjukkan bahwa PUSA sebenarnya merupakan sebuah organisasi massa, meskipun hanya menerima ulama sebagai anggotanya.

Sekalipun resolusi pokoknya berkaitan dengan rencana Pemerintah Pusat untuk membubarkan Propinsi Aceh, penyelenggaraan konferensi tersebut pada saat ini mengandung makna lain, -- yaitu reevaluasi perjuangan dan kekuatan-kekuatan kaum ulama. Walaupun dalam konferensi ini para ulama sekali lagi menuntut status propinsi, tuntutan tersebut bukanlah merupakan butir konferensi yang paling penting. Apakah konferensi para ulama perlu mengutarakan penentangan yang kuat terhadap rencana untuk menghapuskan status propinsi? Atau, apakah karena Jakarta telah lebih dahulu menolak tuntutan yang diajukan oleh DPRD sehingga konferensi itu diperlukan untuk mendukung tuntutan tersebut? Tidak perlukah konferensi itu dilihat sebagai konsolidasi kekuatan para ulama?

Saya yakin bahwa pertanyaan terakhir itu lebih mengena. Adalah jelas bahwa, sebagai akibat dari keterlibatan masal para ulama dalam revolusi,

49. *Waspada*, 29 Desember 1950.

50. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 27.

secara keseluruhan PUSA telah diabaikan oleh pimpinannya terutama sejak dibentuknya Masyumi pada bulan Maret 1946. Semangat kemerdekaan, dan terutama adanya keperluan akan suatu organisasi massa yang jelas di mana ulama dan pendukung yang bukan-ulama dapat secara langsung berkaitan atau bersatu, telah menyebabkan para pemimpin PUSA mendirikan cabang Masyumi di Aceh. Sejak itu PUSA sebagai organisasi sudah betul-betul diabaikan. Peranan politiknya telah diambil alih oleh Masyumi, sementara semangat militannya disalurkan baik ke dalam formasi-formasi militer resmi maupun pasukan rakyat. Bahkan setelah revolusi selesai, organisasi itu tetap lumpuh karena pemimpin-pemimpinnya terus mempertahankan posisi mereka dalam Masyumi, sementara kekuatan militannya tetap berada dalam dinas militer.

Namun demikian, se usai revolusi sangat dirasakan perlunya suatu organisasi militan. Para pemimpin PUSA segera menyadari bahwa hubungan mereka dengan pimpinan nasional melalui Masyumi mungkin akan merugikan kepentingan mereka sendiri. Para pemimpin Masyumi di tingkat nasional tidak akan bersedia menolak rencana Kabinet Hatta untuk mengurangi jumlah propinsi, bahkan tidak akan mau pula menetralisasi kritik kelompok *ulebalang* terhadap pimpinan cabang partai mereka. Kurangnya solidaritas di dalam partai itu diperlihatkan dengan jelas oleh cabang-cabang Masyumi di Sumatera Timur dan Tapanuli yang menolak tuntutan Aceh untuk dapat menjadi satu propinsi sendiri.

Dihadapkan pada situasi yang menyebabkan mereka tidak bisa mengharapkan perlindungan dari partai, para ulama PUSA sangat sadar bahwa mereka masih memerlukan kendali yang kuat terhadap basis massa yang militan. Dengan alasan inilah mereka menilai keberadaan PUSA sebagai suatu kebutuhan. Jadi, dalam konferensi kedua itu, PUSA dihidupkan kembali dan direorganisasikan. Dalam reorganisasi tersebut, Abdul Wahab Seulimeum diangkat menjadi ketua baru menggantikan Daud Beureueh. Penggantian ini tampaknya diperlukan karena Daud Beureueh telah memegang jabatan itu untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sejak organisasi itu didirikan pada tahun 1939. Selain itu, diangkat pula Ali Hasjmy sebagai Sekretaris Umum menggantikan Teuku Muhammad Amin.

Konsolidasi PUSA memberikan semangat baru bagi para anggotanya, di samping meningkatkan keyakinan pemimpin-pemimpinnya. Walaupun

dalam kenyataannya organisasi itu sangat terpukul oleh kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang menarik keluar unit-unit militer Aceh, sementara kehilangan banyak posisi penting dalam pemerintahan, hal ini tidak berarti bahwa para pemimpinnya telah kehilangan pengaruh atas rakyat. Sebab, para pemimpin PUSA tidak memperoleh pengaruh mereka melalui revolusi nasional. Di pihak lain, para pendukung PUSA yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan daerah, seperti bupati, wedana, dan camat, yang merasa tidak aman sejak Jakarta mereorganisasi pemerintahan, kini kembali memperoleh keyakinan sebab mereka dapat mengharapkan lagi perlindungan dan dukungan PUSA. Situasi ini sangat menyakitkan bagi pihak lain, yaitu unsur *ulebalang*, yang menuduh mereka sebagai korup karena telah menciptakan keadaan di mana "terlalu banyak bijak-sini bukan bijaksana atau pun bijak-sana", dan menghubungkan mereka dengan pepatah yang sangat populer pada waktu itu: *pancuri manok duk lam peunjara, pancuri intan duk ateu keurusi* (pencuri ayam masuk penjara, pencuri intan memperoleh kekuasaan).⁵¹

Namun begitu, bukanlah "situasi bijak-sini" itu yang telah mendorong lawan-lawan PUSA untuk mendirikan Badan Keinsyafan Rakyat di Aceh. Tampaknya kelompok *ulebalang* tidak memiliki cukup keberanian untuk membangun tahap kedua dari taktik kakaktua mereka sampai Jakarta melancarkan pukulan lain terhadap PUSA. Sebab itu, pembubaran Propinsi Aceh oleh Kabinet Natsir pada bulan Januari 1951 oleh unsur *ulebalang* dilihat sebagai dorongan positif, sebab tindakan ini menghantam benteng terakhir para pemimpin PUSA, terutama setelah sebagian besar kekuatan militer mereka ditarik ke luar daerah itu. Untuk memberi pukulan akhir terhadap PUSA, dan dengan memperhitungkan kenyataan bahwa organisasi itu sudah kehilangan kekuatan militernya, maka pada tanggal 8 April 1951 gabungan unsur-unsur *ulebalang* dan ulama tradisional mendirikan BKR di Kutaraja.

Memasuki bulan Juli, kedua kelompok sudah terorganisasi dengan baik, sehingga ketegangan pun tidak terhindarkan lagi. Para pemimpin BKR melancarkan serangan besar mereka yang pertama ketika Presiden Soekarno mengunjungi Aceh pada tanggal 30 Juli; ini merupakan kunjungan Soekarno yang pertama sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia

51. Wawancara dengan Teuku Ali Lamlagang, Kutaraja, 29 November 1975.

oleh Belanda. Ketika berparade di depan Presiden, kedua golongan itu memperlihatkan corak hubungan antara PUSA, BKR, dan Pemerintah Pusat. Para pemimpin PUSA memperlihatkan garis penuh dendam terhadap Jakarta, sementara BKR menuntut perlindungan dengan memberi dukungan kepada Pemerintah Pusat. Jika para pemimpin PUSA menerima Soekarno secara dingin, pelajar-pelajar pendukung mereka memperlihatkan dendam dalam parade itu dengan membawa poster-poster yang berbunyi, "Kami mencintai Presiden, tetapi lebih mencintai agama", dan "Jangan perlakukan Aceh sebagai anak tiri".⁵² Dalam pada itu, para perwira yang marah akibat program rasionalisasi, sudah mempersiapkan suatu komplotan untuk membunuh Presiden. Dalam hubungan ini, pensiunan Kolonel Husin Jusuf memberitahukan kepada Daud Beureueh bahwa anak buahnya telah siap untuk menghancurkan rombongan Presiden dan mendesak Daud Beureueh agar merestuiinya, sebab gerakan itu akan membebaskan Aceh dari Jakarta. Tetapi Daud Beureueh menolak merestui tindakan kekerasan demikian.⁵³

Walaupun bentrokan fisik tidak sampai terjadi, suasana menjadi kritis tatkala pendukung-pendukung BKR bergabung dalam parade itu. Bekerja sama dengan orang-orang setempat yang berorientasi kiri, pendukung-pendukung BKR muncul dalam parade di bawah panji Komite Rakyat, dan memperlihatkan dukungan penuh mereka terhadap Jakarta. Mereka membawa plakat-plakat seperti "Hukuman setimpal bagi koruptor", "Daud Beureueh menghisap darah rakyat" dan "Rakyat belum berpeperintah",⁵⁴ yang jelas menggemakan suara anti-PUSA dari BKR dan sikap anti-elite orang-orang kiri. Pada akhir parade, sebuah delegasi dari Komite Rakyat yang dipimpin oleh Teuku Ali Lamlagang telah diizinkan oleh penguasa militer untuk menemui Presiden Soekarno dan menyerahkan sebuah petisi yang mengutuk "rezim" PUSA.⁵⁵

Apakah benar BKR itu sebuah gerakan kiri? Jawaban untuk pertanyaan ini mestilah negatif, sebab sebagaimana halnya dengan Gerakan Said Ali, BKR juga berusaha untuk mengumpulkan dukungan dari

52. *Tegas*, 1-2 Agustus 1951, dan *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 29.

53. Wawancara dengan Husin Jusuf, Kutaraja, 29 November 1975.

54. *Tegas*, 2 Agustus 1951.

55. Wawancara dengan Teuku Ali Lamlagang, 29 November 1975. Salah seorang dari pemimpin kiri itu adalah Jusuf Walad yang kemudian terbunuh setelah gagalnya kudeta PKI pada tahun 1965.

semua musuh PUSA tanpa memandang warna politiknya. Dengan menoleh pada cita-cita dan karakter fisiknya, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya BKR merupakan kelanjutan dari Gerakan Said Ali yang telah dihancurkan PUSA pada akhir tahun 1948. Dari gambaran fisiknya juga agak sukar bagi kita untuk mengatakan bahwa, seperti Gerakan Said Ali, BKR merupakan organisasi yang berorientasi pada *ulebalang*. Kepemimpinannya terdiri atas empat ulama terkenal, yakni Hasan Krueng Kalee, Habib Muda Wali dari Aceh Selatan, Teungku Makam Gampong Blang, dan Teungku Abdussalam Meuraksa, dan dua orang bangsawan. Sisanya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kelompok Said Ali. Selain Abdussalam, yang mendasarkan perasaan anti-PUSANYA pada orientasi Muhammadiyah, ketiga ulama lainnya berasal dari kubu tradisional. Barangkali, untuk memberi kesan bahwa BKR bukan organisasi *ulebalang* melainkan organisasi semua rakyat yang "sadar", maka diangkatlah Abdussalam sebagai ketua umum, sedangkan Ali Lamlagang, seorang aristokrat, duduk sebagai ketua I. Akan tetapi, memang ketua yang lebih aktif adalah Teuku Ali Lamlagang, yang membiayai semua kegiatan organisasi itu. Pada kenyataannya, para pemikirnya juga terdiri atas kaum bangsawan.

Seperti Gerakan Said Ali, tujuan umum BKR adalah "membantu pemerintah di mana perlu", "membantu masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan pemerintah" dan "mendorong persahabatan antara golongan-golongan, rakyat dan pemerintah".⁵⁶ Tindakan pertamanya dilancarkan seminggu sesudah pembentukannya, yaitu berupa penyebaran pamflet di Kutaraja dan pengeluaran sebuah resolusi yang mendesak pemerintah untuk memecat semua pejabat (PUSA) yang tidak disiplin dan tidak mampu, serta membawa mereka yang terlibat korupsi ke pengadilan. Sebagai tambahan atas saran agar pemerintah sipil daerah diganti dengan pemerintahan militer, BKR juga mendesak Jakarta supaya menangani Majelis Penimbang, yang dibentuk pada pertengahan tahun 1946 oleh Residen Teuku Daudsah dan berwenang dengan kekuasaan penuh untuk menaruh semua kekayaan kaum *ulebalang* di bawah kontrol pemerintah. Selain itu BKR menuntut agar pemerintah mengambil tindakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama revolusi.⁵⁷

56. Anggaran Dasar BKR, dikeluarkan pada tanggal 24 April 1951.

57. Lihat resolusi BKR, bertanggal Kutaraja, 15 April 1951.

Mengapa BKR sangat menginginkan suatu pemerintahan militer bagi Aceh? Jawaban atas pertanyaan ini mengarahkan kita kepada pertanyaan berikut: Apakah peranan atau makna BKR dalam politik trilateral yang dimainkan oleh PUSA, unsur-unsur *ulebalang*, dan Pemerintah Pusat? Secara implisit sudah saya kemukakan di atas bahwa kelompok *ulebalang* tidak puas terhadap pembagian kerja antara Jakarta dengan pemimpin-pemimpin PUSA dalam semacam sistem pemerintahan tidak langsung. Pengangkatan pemimpin-pemimpin PUSA sebagai bupati, wedana, dan camat dipandang sebagai tanda bahwa Pemerintah Pusat telah melembagakan pengalihan hak memerintah dari *ulebalang* kepada PUSA. Di pihak lain, mereka yakin bahwa Danubroto, koordinator pemerintahan, tidak didorong memaksakan wewenangnya terhadap bawahan Acehnya, terutama sejauh menyangkut masalah harta kaum *ulebalang*. Karena itulah mereka lebih menyukai pemerintahan militer yang tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan sebagai alat sah di dalam menegakkan otoritasnya.

Pemerintah Pusat memang gagal memaksakan wewenangnya di Aceh terutama pada periode 1951-1952 sekalipun penyalahgunaan kekuasaan sangat sering terjadi. Dengan meminjam peristilahan Lasswell dan Kaplan, periode itu merupakan suatu situasi "formalisme" di mana terdapat perbedaan antara kekuasaan formal dan efektif yang dimiliki pemerintah,⁵⁸ situasi setempat menyebabkan pemerintah tidak mampu menjalankan keputusan-keputusannya sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus kekayaan kaum *ulebalang*, pemerintah tidak mampu memaksakan Majelis Penimbang agar menghentikan pelelangan harta-harta itu lebih lanjut, meskipun Jakarta sudah menetapkan bahwa pelelangan itu tidak sah. Umpamanya dalam hal gugatan yang diajukan oleh dua puluh keluarga aristokrat kepada Jaksa Agung, tidak kurang dari enam kali Koordinator Pemerintahan gagal memperoleh informasi dari Ketua Majelis Penimbang di Kabupaten Aceh Pidie, yang tidak lain adalah bupati kepala daerah itu sendiri.⁵⁹

Kegagalan ini menyebabkan unsur-unsur *ulebalang* lebih condong kepada para penguasa militer daerah, yang juga membutuhkan mereka

58. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven dan London: Yale University Press, 1950), hal. 138.

59. Lihat surat Koordinator Pemerintahan kepada Majelis Penimbang di Sigli, bertanggal Kutaraja, 8 Maret, 7 April, 15 Mei, 9 Juni, 9 Agustus dan 2 Oktober, 1952.

untuk mengawasi berbagai kegiatan PUSA. Dalam kaitan ini, pengeledahan yang dilakukan oleh penguasa militer di Kutaraja pada akhir Agustus 1951, yang diteruskan di kabupaten-kabupaten lain sampai akhir tahun itu, menjadi sangat penting bagi para pendukung BKR. Bulan Agustus 1951 memang merupakan bulan razia dan penangkapan di banyak propinsi di Indonesia. Pada bulan ini Kabinet Sukiman melancarkan penangkapan masal terhadap lebih kurang 2.000 orang komunis dan unsur-unsur kiri lainnya di seluruh Indonesia,⁶⁰ di dalamnya termasuk para anggota parlemen dan tokoh-tokoh lain, sebagai akibat dari sejumlah kerusuhan yang diilhami PKI (Partai Komunis Indonesia) di Jakarta dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur saja, penguasa militer setempat menahan tidak kurang dari 500 orang, termasuk pemimpin-pemimpin kiri Karim M.S., Jusuf Adjitorop, Samikidin, dan masih banyak lagi.⁶¹

Namun demikian, pengeledahan di Aceh adalah berbeda walaupun dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan dengan di tempat-tempat lain, sebab pengeledahan itu nyaris menjadi tindakan balas dendam kekuatan kiri terhadap musuh-musuh mereka, yakni para pemimpin PUSA. Sebagai orang kiri, Nazier, komandan militer setempat, memandang rangkaian razia ini sebagai kesempatan baik untuk melakukan balas dendam terhadap pemimpin-pemimpin PUSA atas sikap anti-komunis mereka pada masa revolusi.⁶² Kepentingan politik Nazier sendiri sama dengan kepentingan penasihat politiknya, Tarmuli; dan dalam kenyataannya memang Tarmulilah yang bertanggung jawab atas pengeledahan itu. Tarmuli dikirim ke Kutaraja sebagai penasihat politik pada Brigade AA, sesudah sikap anti-PUSAny mendapat dukungan Panglima TT-I yang baru, Kolonel Maludin Simbolon; ia ditempatkan pada seksi keamanan di bawah pimpinan Kapten Leiko Silangit, seorang

60. Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1966), hal. 53.

61. *Waspada*, 14 dan 15 Agustus 1951, Samikidin kemudian menjadi Sekretaris I PKI cabang Aceh, dan terbunuh setelah terjadinya kudeta PKI pada tahun 1965.

62. Kecondongannya ke kiri sebagai akibat dari hubungan yang dilakukannya dengan beberapa pemimpin kiri selama masa revolusi. Dia kemudian menjadi salah seorang perwira militer kiri yang utama yang dibina PKI di Sumatera. Sehubungan dengan terjadinya percobaan kudeta PKI pada tahun 1965, ia dihukum mati oleh pengadilan militer di Medan.

Batak Toba. Kemudian Tarmuli menetapkan sasaran razia: pemimpin-pemimpin PUSA.⁶³ Tujuan penggeledahan ini tidak ditolak oleh Simbolon yang hanya berminat pada usaha memelihara keamanan dan ketertiban saja.

Dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan ini, sekarang kita dapat memahami hasil yang dicapai oleh razia itu. Penguasa militer berpendapat bahwa razia tersebut diperlukan karena "banyak orang" tidak memenuhi seruan menyerahkan senjata dan amunisi kepada polisi, dan telah banyak terjadi penyelundupan barang-barang terlarang yang merugikan ekonomi daerah.⁶⁴ Jadi, penggeledahan itu mempunyai alasan ekonomi dan politik. Namun begitu, razia di Kutaraja, misalnya, tampaknya tidak dilakukan karena alasan-alasan tersebut, sebab sifatnya murni politis. Kendati banyak rumah dan toko yang digeledah, tidak ada seorang pedagang Aceh atau Cinapun yang ditangkap. Surat kabar setempat melaporkan, hanya ada tiga orang Indonesia yang ditahan karena menyimpan senjata secara tidak sah.⁶⁵ Salah seorang di antaranya adalah Daud Tangse, seorang tokoh Pemuda PUSA dan bekas komandan pasukan rakyat yang menyerang kaum *ulebalang* di Kabupaten Aceh Pidie pada tahun 1946. Sampai akhir November 1951, dilaporkan ada enam belas anggota PUSA yang ditangkap di seluruh Aceh, dan kebanyakan dari mereka kemudian dipenjarakan di Medan. Di antara mereka yang ditahan di Medan itu adalah Sjech Marhaban, Wedana Kutaraja, Husin Sab dan Peutua Husin, keduanya terlibat dalam kampanye anti-*ulebalang* di Kabupaten Aceh Pidie pada tahun 1946, dan Teungku Itam Peureulak, seorang ulama dan bendahara Majelis Penimbang Kabupaten Aceh Pidie.

Sifat anti-PUSA dari penggeledahan itu juga tercermin pada penggeledahan rumah Daud Beureueh di Kutaraja. Dalam razia yang dipimpin sendiri oleh Tarmuli itu, tentara mengepung rumah tersebut semalaman, dan menggeledahnya pada keesokan harinya sambil meneriakkan kata-kata "kepala pembunuh dan perampok" pada Daud Beureueh.⁶⁶ Semen-

63. Wawancara dengan Tarmuli, Jakarta, 26 April 1976.

64. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Komandan Brigade AA, bertanggal Kutaraja, 29 Agustus 1951.

65. *Tegas*, 1 September 1951.

66. Lihat surat Said Abubakar kepada Gubernur S.M. Amin, bertanggal Penang (Malaya), 18 Februari 1954; sebagian isi surat ini juga muncul dalam Amin, *op. cit.*, hal. 205.

tara rumahnya digeledah, Daud Beureueh diusir ke halaman belakang, dan beberapa tentara mengancam akan menembaknya. Namun, ancaman tidak dilaksanakan, sebab hal itu akan menjadi terlalu provokatif terhadap PUSA.⁶⁷ Selain itu tentara juga menggeledah kediaman Hasballah Indrapuri.

Jelas bahwa penggeledahan tersebut sengaja ditujukan kepada para pemimpin PUSA atas pengarahannya unsur-unsur *ulebalang* tertentu. Dalam hal ini, penguasa militer setempat mendapat dukungan luas dari anggota BKR, yang dalam banyak kasus menyamar dengan seragam militer. Sejumlah penangkapan juga menunjukkan pada kita bahwa penguasa militer dan rekan aristokratnya sangat selektif dalam menentukan target mereka. Mereka membagi para pemimpin PUSA atas dua kategori yang didasarkan pada keterlibatan mereka dalam kampanye anti-*ulebalang* pada masa revolusi. Pemimpin-pemimpin yang tidak menyerang kaum *ulebalang* secara fisik dibebaskan dari penahanan, sedangkan mereka yang terlibat secara langsung dengan cara apa pun, mengalami pemenjaraan. Oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka yang ditahan adalah para pemimpin yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan atau perampasan terhadap kaum *ulebalang* pada tahun 1946, atau terlibat dalam komplotan politik terhadapnya pada masa selanjutnya selama revolusi. Sama halnya dengan di Sumatera Timur dan Jawa,⁶⁸ tidak seorang pun dari mereka yang ditahan itu dibawa ke pengadilan.

Dengan demikian, hasil razia tersebut tidaklah konklusif. Di satu pihak, penggeledahan itu berhasil melemahkan kekuatan PUSA, sebab memang banyak senjata yang disita dari para pendukungnya. Dilaporkan bahwa senjata dan amunisi, yang dipergunakan selama revolusi, ditemukan tidak saja di rumah-rumah melainkan juga di mesjid-mesjid.⁶⁹ Di pihak lain, penggeledahan itu juga menciptakan perselisihan lebih lanjut di antara kedua kelompok yang bertikai itu. Sementara unsur-unsur *ulebalang* menyambut baik razia tersebut, pemimpin-pemimpin PUSA sebaliknya, merasa dihina hingga menghimpun dendam yang lebih

67. Wawancara dengan Tarmuli, Jakarta, 24 April 1976. Tarmuli mengakui bahwa tindakan sewenang-wenang dan perampasan merupakan hal yang biasa dalam penggeledahan ini.

68. Hindley, *op. cit.*, hal. 53.

69. *Tjerman Masyarakat*, 18 Oktober 1951.

besar lagi terhadap saingan mereka. Perasaan ini kemudian disalurkan kepada rakyat melalui dakwah-dakwah mereka. Tampaknya Pemerintah Pusat kemudian menyadari hal ini, sehingga memindahkan Mayor Nazier ke Sulawesi Selatan pada akhir Maret 1952, untuk menenangkan para pemimpin PUSA. Untuk menggantikannya, diangkatlah Mayor Prijatna, seorang perwira suku Sunda.

Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa kebijaksanaan Pemerintah Pusat di Aceh pada tahun 1951 secara langsung atau tidak langsung mendukung cita-cita kelompok *ulebalang* dan sebaliknya, memancing kemarahan para ulama PUSA. Suasana ini membentuk semacam politik trilateral, di mana Jakarta memihak kepada *ulebalang* dalam usaha untuk mengalahkan pemimpin-pemimpin PUSA. Jakarta mendorong PUSA agar bersikap defensif, sementara unsur-unsur *ulebalang* tidak memaksakan serangan-serangan fisik terhadap organisasi tersebut. Pada gilirannya nanti, suasana ini melahirkan krisis umum dalam masyarakat Aceh melalui penciptaan ketegangan.

Dampak Sosial Ekonomis Pembubaran Propinsi

KENYATAAN BAHWA Aceh terisolasi dari daerah-daerah lain di Indonesia dan bahwa rakyatnya sangat tergantung pada pemimpin agama mungkin merupakan suatu alasan bagi Pemerintah Pusat untuk memisahkan rakyat Aceh dari pemimpin mereka sehingga dapat dikendalikan lagi oleh pemerintah. Hal ini dicapai dengan merendahkan kepemimpinan Aceh dan menggantikannya dengan struktur kepemimpinan birokratis bukan-Aceh. Dalam hubungan ini, banyak contoh dapat dikemukakan tentang ketetapan hati Pemerintah Pusat untuk mengisi posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan lokal, sebagaimana telah kita lihat, dengan tenaga-tenaga bukan-Aceh yang terlatih dan terampil pada awal tahun 1950 dan sesudahnya. Proses pemisahan ini juga berlangsung di tempat-tempat lain di Indonesia, dan menunjukkan ketidakpedulian akan kondisi sosio-psikologis lokal yang umum sehingga menimbulkan perasaan kedaerahan.

Perkembangan di bidang-bidang sosial dan ekonomi setelah penghapusan Propinsi Aceh lebih kurang sama dengan apa yang terjadi di bidang politik. Seperti yang telah kita lihat, yang paling terpukul oleh aneka macam kebijaksanaan Pemerintah Pusat adalah para pemuda dan golongan elite Aceh. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa lapisan

masyarakat biasa di Aceh tidak tersentuh oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dengan kata lain, tentu saja menyesatkan bila diasumsikan bahwa rakyat biasa hanya terpengaruh oleh dampak sosio-ekonomi kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Pada tahap ini, ada baiknya kita percaya begitu saja bahwa hubungan rakyat dan golongan elite di Aceh sangat baik, sampai kita membahasnya nanti dalam bagian yang memperbincangkan keterlibatan rakyat dalam pemberontakan. Di sana kita akan melihat bahwa rakyat biasa pun tidak puas dan merasa tersinggung oleh perlakuan Pemerintah Pusat terhadap para pemimpin PUSA. Juga sudah jelas bagaimana perasaan masyarakat non-elite ini terhadap program rasionalisasi dalam ketentaraan, yang mengakibatkan putra-putra mereka terkena demobilisasi.

Perasaan ini diperkuat oleh kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam bidang sosial dan ekonomi yang melahirkan frustrasi dan alienasi di tengah masyarakat pada umumnya. Berlainan dengan dampak politik dari kebijaksanaan pemerintah, dampak sosio-ekonomi mempengaruhi baik rakyat biasa maupun lapisan elite. Maksud Pemerintah Pusat membebaskan daerah itu dari pengaruh para pemimpin PUSA telah menimbulkan kekacauan dalam sistem nilai rakyat Aceh. Kebijaksanaan ekonominya pun oleh rakyat Aceh dipandang membahayakan kepentingan mereka. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ini mendorong sentimen kedaerahan di kalangan masyarakat bukan-elite sehingga mereka lebih bersimpati kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sudah lebih dahulu mengalami pukulan Jakarta. Mengapa Pemerintah Pusat membiarkan situasi ini berkembang? Tidakkah para pemimpin di tingkat nasional menyadari bahwa rakyat Aceh menaruh dendam terhadap kebijaksanaan mereka? Dan, bila memang demikian, mengapa tidak disadari? Inilah beberapa pertanyaan pokok yang akan dikaji dalam bagian ini, di samping keadaan frustrasi, alienasi, dan dendam itu.

Adalah jelas bahwa sistem nilai masyarakat Aceh didasarkan pada ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap kontradiksi terhadap nilai-nilai keagamaan pasti ditentang oleh rakyat. Tambahan pula, seperti diakui oleh seorang tokoh yang bukan-Aceh, orang Aceh sangat terikat kepada masyarakatnya. Setiap unsur asing yang memasuki dunia Aceh akan ditolak, kecuali jika unsur itu bersedia untuk memutuskan hubungan dengan lingkungan aslinya dan secara penuh menyesuaikan diri dengan

cara hidup masyarakat Aceh.⁷⁰ Dalam sistem nilai inilah masyarakat Aceh sangat sensitif dan, sayangnya, juga paling mudah tersinggung. Beberapa di antara kebijaksanaan Pemerintah Pusat, seperti membanjirnya pejabat-pejabat non-Aceh serta pola-pola tingkah laku dan nilai yang mereka bawa, mempunyai dampak yang sangat mengganggu nilai-nilai setempat. Dalam hubungan ini, kita dapat melihat bahwa selama tahun 1950-1953 terdapat dua gaya hidup yang sangat ekstrem di Kutaraja, tempat kebanyakan pejabat bukan-Aceh terpusat. Di satu pihak, masyarakat Aceh tidak mau mengambil dan tidak toleran terhadap nilai orang-orang bukan-Aceh, dan resah karena diperkenalkannya pola-pola tingkah laku yang asing. Di pihak lain, masyarakat non-Aceh mengabaikan nilai dan kepercayaan setempat, dan secara mencolok mempertahankan kebudayaan metropolitan mereka dengan minum minuman keras, berjudi, dan terlibat dalam praktek-praktek lain yang oleh tuan-rumah dipandang sebagai kelemahan moral.

Penduduk setempat sangat mengecam tingkah laku para pejabat pendatang itu, terutama dalam hal hubungan pria-wanita, dan tingkah laku ini dirasakan sebagai provokasi terhadap standar kehidupan yang lazim di sana. Dalam hubungan ini, surat kabar Kutaraja yang paling berpengaruh, *Tegas*, mengawasi secara dekat gerak-gerik para pejabat bukan-Aceh. Surat kabar itu memberitakan, bahwa banyak pejabat yang terlibat dalam prostitusi, yang oleh masyarakat Aceh dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum agama. Keterlibatan ini mengakibatkan adanya pelembagaan prostitusi di Kutaraja. Dalam terbitan tanggal 21 Februari 1952, *Tegas* melaporkan bahwa sampai awal Februari di kota itu terdapat lima puluh pelacur, yang pada umumnya datang dari Sumatera Timur. Yang paling menghebohkan publik Aceh adalah suatu berita skandal seks yang tersebar dalam masyarakat pada awal Februari 1953 dan melibatkan pejabat tinggi pemerintahan daerah.⁷¹ Sebagai akibatnya, protes-protes keras dilancarkan terhadap pejabat tersebut

70. Insider, *op.cit.*, hal.59.

71. *Tegas*, 3 Maret 1953. Berita ini disiarkan pertama kali oleh *Pendorong* (Medan), 1 Maret 1953. Skandal ini dikenal secara populer sebagai *affair* "Raja Farouk Kutaraja". Kedua surat kabar itu tidak menyebutkan sesuatu nama, melainkan hanya menunjuknya sebagai "seorang pejabat yang dibawa dari Jawa". Tetapi suatu sumber yang saya wawancarai di Jakarta pada bulan April 1976 menginformasikan bahwa yang dimaksudkan itu adalah seorang pejabat tinggi di daerah.

sehingga memaksa Pemerintah Pusat memindahkannya dari Aceh dua bulan kemudian. Sebagai penggantinya kemudian pemerintah mengangkat seorang pejabat Aceh yang berorientasi pada PUSA. Hal-hal baru lain yang dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai lokal adalah usaha penyelenggaraan kontes kecantikan, yang tentu saja dipandang sangat provokatif. Selain itu juga, penampilan putri-putri para pejabat dalam pakaian olahraga yang bersifat membuka aurat, dan penyelenggaraan serangkaian pasar malam di seluruh daerah yang di dalamnya perjudian merupakan atraksi utama.

Ketidakpedulian terhadap nilai-nilai setempat memberi dampak terhadap otoritas Pemerintah Pusat di daerah itu, tidak saja karena masyarakat Aceh menolak menghormati para pejabat ini, melainkan juga karena sikap-sikap yang asing itu dipandang mewakili citra dan standar-standar yang diperjuangkan oleh Pemerintah Pusat. Latar belakang dari ketidakhormatan ini akan dapat lebih dipahami bilamana kita perhatikan konsep kepemimpinan yang dianut oleh masyarakat Aceh. Di pedesaan Aceh terdapat empat kualitas dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin (*tuha*). Keempat kualitas itu adalah *tuho*, pengetahuan dasar tentang adat dan prinsip-prinsip agama; *turidro*, kepribadian yang baik; *peupro*, kemampuan untuk bertindak sebagai pendamai; dan *gaseh keu agama ngon keu nanggro*, mencintai negeri dan agama.⁷² Masuknya standar tingkah laku yang baru dan bertentangan itu oleh masyarakat Aceh ditafsirkan sebagai suatu kontradiksi terhadap konsep kepemimpinan mereka, sehingga para birokrat tidak perlu dipatuhi. Logika ini menuntun ketidakpatuhan mereka terhadap Pemerintah Pusat, sebab mereka menganggap citranya sama dengan citra pejabatnya-pejabatnya. Berdasarkan alasan ini, mereka tidak dapat menghargai kehadiran wakil Pemerintah Pusat. Yang mereka pandang sebagai pemerintah sesungguhnya adalah pamong praja yang terdiri atas orang-orang Aceh,⁷³ yang memiliki nilai yang mereka hormati.

Suasana ini dengan jelas menggambarkan posisi serta pengaruh Pemerintah Pusat dan para pemimpin PUSA dalam masyarakat Aceh. Walaupun Pemerintah Pusat berusaha untuk memperkecil pengaruh

72. Machdar Somadisastra, "Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Aceh Besar", ringkasan penelitian (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1974), hal. 2.

73. *Harian Rakjat* (Medan), 12 Juni 1950.

pemimpin-pemimpin PUSA, rakyat Aceh ternyata tetap berada di pihak mereka. Penolakan rakyat Aceh untuk melegitimasi Pemerintah Pusat terlihat dalam kenyataan di mana badan-badan judisial tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sudah pasti bukan hanya gaya hidup para pejabat saja yang menyebabkan Pemerintah Pusat tidak populer di mata rakyat Aceh. Kebijakan-kebijaksanaan di bidang sosial-ekonomi harus pula diperhitungkan. Kebijakan-kebijaksanaan yang dianggap tidak adil dalam bidang-bidang tersebut sangat dirasakan oleh golongan elite atau rakyat biasa. Umumnya, rakyat tidak puas akan kuota haji yang dipersiapkan oleh Kementerian Agama. Dalam kasus ini, dari 400 jemaah yang diizinkan berangkat ke Mekah dari Sumatera Utara pada tahun 1951, masing-masing 100 orang berasal dari Aceh dan Sumatera Timur, dan 200 sisanya dari Tapanuli.⁷⁴ Ketidakpuasan ini tidak saja berpunca pada fakta bahwa kuota Aceh telah dipotong menjadi setengah dari jumlah calon haji yang berangkat pada tahun sebelumnya, meski terdapat 500 pelamar,⁷⁵ tetapi juga karena Jakarta memberi terlalu banyak jatah untuk Tapanuli. Unsur diskriminasi terletak dalam kenyataan bahwa jumlah penduduk Muslim di Tapanuli lebih kecil bila dibandingkan dengan penduduk Aceh.⁷⁶

Pembagian kuota yang tidak wajar ini dinilai rakyat Aceh sebagai konsekuensi yang merugikan akibat penggabungan daerah itu ke dalam Propinsi Sumatera Utara. Fakta bahwa tidak ada pejabat Aceh yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat propinsi telah menciptakan semacam pembangunan yang tidak berimbang seperti dikhawatirkan oleh pemimpin-pemimpin Aceh. Keadaan di bidang-bidang lain juga memperkuat kekhawatiran ini. Misalnya, dalam bidang pendidikan, dari dua puluh delapan SMP (Sekolah Menengah Pertama) negeri yang terdapat di Sumatera Utara, tiga belas di antaranya ada di Tapanuli, sembilan di Sumatera Timur, dan hanya enam di Aceh.⁷⁷ Dari

74. *Agenda Kementerian Agama 1951* (Jakarta: Kementerian Agama, 1951), hal. 185.

75. *Harian Rakjat* (Medan), 12 Juni 1950.

76. Pada tahun 1971, dua puluh tahun kemudian, hanya ada lebih kurang 600.000 orang Islam di Tapanuli Utara dan Selatan. Lihat *Population Sensus of 1971 in North Sumatra* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1971), hal. 47.

77. *Prop. Sumatera Utara*, hal. 750.

tiga belas SMP di Tapanuli itu, delapan terletak di Tapanuli Utara, yang berarti lebih banyak daripada yang ada di Aceh, padahal penduduk Tapanuli Utara hanya sekitar separuh dari penduduk Aceh.⁷⁸ Situasi yang sama juga terdapat dalam bidang kesehatan. Pada tahun 1950, sebelum Aceh dimasukkan ke dalam Propinsi Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli masing-masing memiliki enam orang dokter, tetapi dua tahun kemudian, pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengiriskan sembilan dokter asing ke Tapanuli, dan hanya lima (empat di antaranya orang asing) ke Aceh.⁷⁹

Tampaknya baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah propinsi di Medan memiliki kebijaksanaan yang sama tentang pengembangan pendidikan di Aceh, yaitu untuk memecah isolasi masyarakat Aceh. Apabila memang demikian halnya, kebijaksanaan pemerintah harus diartikan bertujuan untuk memberikan rakyat Aceh suatu perasaan nasional dengan cara menarik pelajar-pelajar Aceh ke luar dari daerah mereka. Namun, pada kenyataannya pemerintah tidak pernah membicarakan masalah ini secara terbuka. Dalam hubungan ini, pemerintah agaknya telah memutuskan untuk menjadikan SMP sebagai tingkat pendidikan sekular paling tinggi di Aceh, dan memindahkan guru-guru sekolah menengah tingkat atas satu demi satu dari Aceh. Pada pertengahan tahun 1951 pemerintah menutup satu-satunya SMA (Sekolah Menengah Atas) yang ada di Kutaraja, dan memberikan subsidi kepada dua puluh enam siswanya untuk belajar di Medan. Ada kesan seakan-akan kebijaksanaan ini mulai memberikan hasil pada pertengahan tahun 1952, pada waktu kira-kira 250 pelajar Aceh bersekolah di berbagai sekolah menengah di Yogyakarta,⁸⁰ kota pelajar yang populer bagi masyarakat Aceh ketika itu. Akan tetapi, implikasi kebijaksanaan tersebut sangatlah tidak memuaskan bagi rakyat Aceh.

Meskipun demikian, faktor itu saja tidaklah memadai untuk dapat melepaskan rakyat Aceh dari isolasinya. Oleh sebab itu, pemerintah juga menyebarkan pengaruh dalam pendidikan agama di Aceh, yaitu jantung identitas mereka. Dengan kebijaksanaan ini pemerintah mencoba untuk menyeimbangkan pengaruh pendidikan agama dan sekular dengan

78. *Tegas*, 24 Mei 1952.

79. *Propinsi Sumatera Utara*, hal. 701-702.

80. *Tegas*, 9 Juli 1952.

jalan memperlambat perkembangan lembaga-lembaga agama serta mendorong murid-murid memasuki sekolah-sekolah sekular. Walaupun kebijaksanaan itu tidak fungsional, karena pemerintah tidak menyediakan sekolah-sekolah sekular dalam jumlah yang cukup banyak di daerah itu baik pada tingkat dasar maupun menengah, pemerintah membatalkan subsidi bagi beberapa Sekolah Menengah Islam (SMI) di seluruh daerah itu pada pertengahan tahun 1951,⁸¹ dan bagi Sekolah Rendah Islam (SRI) pada bulan Januari 1952.⁸² Penarikan kembali dukungan keuangan ini oleh Jakarta dikritik secara pedas, sebab sekolah-sekolah agama tersebut pada mulanya justru didirikan oleh organisasi-organisasi swasta, yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah Pusat sebagai pengabdian terhadap permohonan masyarakat Aceh sebelumnya.

Oleh sebab itu, kebijaksanaan tersebut mendapat protes keras dari rakyat Aceh. Sejumlah enam puluh ulama yang tergabung dalam Lembaga Islam dan Pendidikan Aceh menyerukan kepada Pemerintah Pusat supaya menghentikan penutupan sekolah dan pemindahan guru ke luar Aceh. Malah mereka menuntut agar pemerintah mengirimkan guru lebih banyak lagi ke daerah tersebut. Setelah setahun menunggu tanggapan dari Jakarta terhadap resolusi-resolusi yang dikirimkan ke sana tanpa hasil, PUSA pun turun tangan dan mendesak pemerintah agar mengubah kebijaksanaan dengan membuka kembali SMA di Kutaraja.⁸³ Namun demikian protes bukanlah satu-satunya cara yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat. Para pemimpin Aceh sadar sepenuhnya bahwa Pemerintah Pusat tidak bermaksud mengabdikan permintaan mereka, meskipun sejak tahun 1951 Presiden dan Menteri Pendidikan berulang kali berjanji akan memperhatikan masalah itu. Didorong oleh frustrasi akan janji-janji yang tidak pernah ditepati dan oleh kemarahan yang semakin meningkat di kalangan para orang-tua yang tidak mampu mengirimkan anak-anak mereka belajar ke luar daerah, PUSA pun mendirikan sebuah Sekolah Guru Atas (SGA) di Kutaraja, dan dua buah SMP masing-masing di Bireuen dan Idi pada tahun 1952. Dengan cara ini para pemimpin PUSA kembali menenangkan hati rakyat justru ketika

81. *Ibid.*, 16 Juni 1951.

82. *Laporan Tahun 1960 Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh* (Kutaraja: Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh, 1961), hal. 152. Selanjutnya, sumber ini akan dikutip sebagai *Laporan Tahun 1960*.

83. *Tegas*, 2 Agustus 1951, dan 31 Juli 1952.

Pemerintah Pusat gagal berbuat demikian.

Kelihatannya rakyat dan para ulama lebih mengkhawatirkan penutupan SMA daripada terjadinya proses sekularisasi di kalangan anak-anak mereka melalui sistem pendidikan yang ada di luar Aceh. Pada suatu masa pemimpin-pemimpin Aceh memang telah mengusahakan agar mata pelajaran agama diwajibkan di sekolah-sekolah bukan-agama,⁸⁴ tetapi adalah para ulama PUSA juga yang memodernisasi sekolah-sekolah agama di Aceh dengan memperkenalkan mata pelajaran sekular ke dalamnya pada akhir dekade 1920-an. Sudah jelas pada waktu itu bahwa kaum ulama PUSA tidak menghambat pengembangan sekolah sekular di Aceh sepanjang murid-muridnya diberi pengetahuan dasar keagamaan. Justru para pemimpin PUSA-lah yang mendirikan beberapa sekolah bukan-agama, meski diberikan juga pelajaran dasar keagamaan, ketika pemerintah tidak bersedia berbuat demikian. Fakta bahwa pendidikan akan menjadi lebih mahal bagi rakyat bukanlah satu-satunya penyebab kekecewaan yang meluas. Kekecewaan itu lebih banyak diperdalam oleh adanya harapan rakyat bahwa pendidikan akan lebih meningkat dalam suatu negara merdeka. Hal ini khususnya terjadi karena fakta bahwa rakyat Aceh telah merindukan "masa kemajuan" yang dikampanyekan para pemimpin PUSA sejak akhir dasawarsa 1920-an. Dalam suasana demikian, pemunduran perkembangan pendidikan tentu saja menyebabkan kekecewaan di kalangan rakyat dan menimbulkan kemarahan yang luas.

Dalam pada itu, keadaan aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi lainnya juga tidak memuaskan. Dalam menghadapi kenyataan ini, rakyat Aceh menyadari bahwa situasi sesudah kemerdekaan malah lebih buruk daripada pada masa akhir kekuasaan kolonial Belanda. Karena kehidupan tidak bertambah baik, kendati perjuangan bersenjata sudah lama berakhir, sebagian masyarakat bahkan meragukan apakah kemerdekaan sungguh ada di Aceh. Fasilitas-fasilitas umum tidak berkembang secara memadai, atau bahkan terhenti. Di Kutaraja, umpamanya, layanan kesehatan sangat buruk dan tidak sanggup menampung jumlah pasien yang semakin membengkak. Keterbelakangan fasilitas ini dapat

84. Lihat surat Daud Beureueh kepada Ketua Panitia Kerja KNIP di Yogyakarta, bertanggal Yogyakarta, 16 Oktober 1949, dalam *Dasar Pendidikan dan Pengajaran* (Jakarta: Kementerian P.P. dan K., 1954), hal. 123-127. Lihat juga resolusi Lembaga Islam dan Pendidikan Atjeh, dalam *Tegas*, 2 Agustus 1951.'

diutarakan dengan perbandingan satu orang bidan untuk 170.000 penduduk, dibandingkan dengan satu banding 50.000 untuk Indonesia.⁸⁵ Penjatahan beberapa bahan makanan di Aceh juga berbeda dari daerah-daerah lain. Rakyat Sumatera Timur menerima pencatuan gula dan rokok hampir setiap bulan dengan subsidi pemerintah, sedangkan rakyat Aceh praktis tidak mendapat apa-apa.⁸⁶

Perasaan rakyat Aceh akan diskriminasi oleh Pemerintah Pusat mencapai puncaknya ketika pemerintah mengabaikan pembangunan sarana pokok yang dibutuhkan masyarakat di daerah itu. Pengabaian ini mengakibatkan pembatasan mobilisasi ekonomi rakyat, yang pada gilirannya membantu proses pemiskinan penduduk. Untuk mengatasi dendam rakyat, Pemerintah Pusat selalu mengatakan bahwa pemerintah telah mencadangkan dana untuk membiayai proyek-proyek irigasi dan jalan, tetapi apa yang sesungguhnya terjadi tidak lebih daripada pengiriman tim peninjau yang susul-menyusul dari beberapa kementerian. Suatu rencana pengeluaran sebesar lima juta rupiah untuk rehabilitasi sistem irigasi yang dijanjikan pada tahun 1952 tidak pernah diwujudkan, apa lagi lima belas juta rupiah yang dijanjikan untuk proyek jalan.

Apa artinya semua ini bagi ekonomi rakyat Aceh? Seperti disifatkan oleh slogan mereka, *pang ule hareukat meugo* (nafkah paling utama adalah pertanian), kehidupan rakyat Aceh memang sangat tergantung pada pertanian. Di Aceh, berbeda dari bagian Sumatera lainnya, sawah lebih banyak ditemukan daripada ladang, dan biasanya terdapat di lahan-lahan yang beririgasi dan berpaya. Lahan-lahan sawah dan ladang berkembang dengan pesat pada masa kolonial, begitu pula produksi padinya. Pada tahun 1937, dengan sawah seluas 140.000 hektar dan ladang 6.000 hektar, Aceh mempunyai surplus 2.000 ton beras dari produksi total sebesar 216.000 ton.⁸⁷ Hanya tiga tahun kemudian, karena besarnya peningkatan lahan sawah yang beririgasi di Aceh Utara dan Timur, surplus ini melonjak menjadi 24.000 ton, dan pada tahun 1941 tercatat rekor surplus sebanyak 36.000 ton.⁸⁸ Loncatan produksi beras ini

85. Lihat laporan yang disiapkan oleh Dr. I Made Bagiastra, kepala kantor Kesehatan di Aceh, seperti diberitakan *Tegas*, 4 Juni 1951.

86. *Waspada*, 26 Mei 1951.

87. J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh, vroeger en nu* (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), hal. 137.

88. A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* ('sGravenhage dan Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1949), hal. 24-25.

terputus oleh kedatangan Jepang dan pecahnya revolusi nasional, sebab banyak sawah dan sistem irigasi menjadi terlantar. Pengabaian yang berlangsung terus pada tahun-tahun 1951-1952 mengakibatkan hilangnya produksi sampai sebesar empat puluh persen, dan pada tahun 1952 rakyat Aceh dapat mengirimkan beras ke Sumatera Timur tidak lebih dari 10.000 ton.⁸⁹

Kegagalan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki sistem irigasi di Aceh telah lebih memukul para petani di Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Pidie, Utara, dan Timur bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, dan keadaan ini memperkuat dendam mereka terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan sawah di Aceh terpusat di kabupaten-kabupaten tersebut, di mana penanaman padi adalah demikian pentingnya dan, di samping kelapa, tidak ada makanan pengganti lainnya. Di Kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Selatan, berbeda dari kabupaten lainnya, bilamana sawah sudah tidak lagi menguntungkan atau kondisi yang lebih menguntungkan ada di luar sawah, para petani dapat meninggalkan sawah mereka dan melibatkan diri dalam produksi minyak nilam. Begitu pula halnya dengan para petani di Aceh Timur yang dengan mudah dapat memperoleh pekerjaan sebagai penyadap di kebun-kebun karet.⁹⁰ Setidak-tidaknya dapat dikatakan, kurangnya irigasi yang memadai telah mengurangi pendapatan para petani di Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Pidie, Utara, dan Timur (bagian timur laut) karena menurunnya produksi beras. Berkurangnya produksi beras ini memang bertepatan dengan naiknya harga beras di Aceh dari Rp 1,75 per liter pada bulan Juli 1951 menjadi Rp 1,90 pada bulan September, dan Rp 2,00 dalam bulan Januari 1952.⁹¹ Akan tetapi ini tidak berarti bahwa pendapatan para petani tetap meningkat (walaupun jumlah produksi menurun); mereka harus membayar lebih mahal untuk barang-barang lain, sebab mekanisme harga pada waktu itu sangat ditentukan oleh harga beras.

Tentu saja kurangnya irigasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menimbulkan dendam rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Infrastruktur perhubungan tidak kalah pentingnya daripada sarana per-

89. Dilaporkan oleh Sumardi, kepala Kantor Pertanian di Aceh, *Tegas*, 9 April 1952.

90. *Waspada*, 18 April 1951.

91. Data dari Biro Pusat Statistik, 1951-1952.

tanian, sebab infrastruktur ini juga mempengaruhi kegiatan ekonomi rakyat Aceh. Buruknya keadaan jalan di Aceh diakui pula oleh seorang pejabat aristokrat, Teuku Muhammad Ali Panglima Polem. Ia pun menggugat bahwa pemeliharaan jalan telah diabaikan sejak revolusi dan bahwa sembilan puluh persen jembatan ada dalam keadaan parah. Bahkan sebagai orang yang dikenal anti-kolonial, tanpa malu-malu ia mengakui bahwa keadaan pada masa sebelum kemerdekaan adalah jauh lebih baik.⁹² Walaupun demikian, Pemerintah Pusat tetap tidak menyediakan dana untuk memperbaiki jalan di Aceh, dan ini menyebabkan rakyat Aceh lebih kecewa lagi terhadap janji-janji pemerintah itu. Ternyata dana memang sama sekali tidak pernah dialokasikan untuk Aceh, sebab Pemerintah Pusat sangat tergantung pada informasi para pejabat propinsi di Medan yang selalu mengatakan bahwa jalan-jalan daerah lain di propinsi itu bahkan lebih buruk lagi.

Apa yang paling memukul rakyat Aceh di bidang ekonomi adalah dikeluarkannya kebijaksanaan baru mengenai prosedur umum perdagangan ekspor dan penghapusan sistem perdagangan barter pada tahun 1952. Pertama-tama, pembubaran Propinsi Aceh bagi para pedagang Aceh mempunyai arti bahwa kendali atas kegiatan-kegiatan mereka berada di tangan para pejabat bukan-Aceh di Medan. Hal ini berarti bahwa prosedur untuk memperoleh lisensi ekspor tidak semudah ketika mereka hanya perlu berhubungan dengan badan-badan pemerintahan di Kutaraja. Adalah fakta bahwa pengurusan suatu lisensi dengan aparat pemerintah di Medan bukan hanya meminta waktu yang lebih panjang karena hambatan birokratis dan komunikasi yang buruk, akan tetapi juga dipersulit oleh praktek-praktek diskriminatif pejabat setempat terhadap para pedagang Aceh.⁹³

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mengenai prosedur impor pada tahun 1951 juga lebih menyukarkan para pedagang Aceh untuk memperoleh devisa. Menurut peraturan ini, devisa hanya dapat diberikan kepada pengusaha yang mengajukan lamaran, tapi pada prakteknya, peraturan ini melahirkan kompetisi yang hebat di antara pengusaha-pengusaha eksportir.⁹⁴ Di Sumatera Utara, peraturan ini

92. *Tegas*, 27 September 1952.

93. Wawancara dengan Teuku Ali Keurukon, bekas sekretaris Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA), Kutaraja, 28 November 1975.

94. *Propinsi Sumatera Utara*, hal. 623.

menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pedagang Aceh, terutama karena mereka harus berkompetisi, bukan hanya dengan pengusaha Cina dan Belanda, melainkan juga dengan pengusaha Sumatera Timur dan Tapanuli yang memiliki koneksi dengan Kantor Gubernur. Namun keadaan tersebut sebenarnya tidak terlalu menimbulkan masalah bagi rakyat Aceh sampai setahun kemudian, ketika Jakarta mengakhiri sistem perdagangan barter di Aceh. Sampai saat itu perusahaan-perusahaan impor Aceh masih dapat melibatkan diri dalam kegiatan ekspor melalui perdagangan barter.

Pada waktu itu memang terasa seakan-akan ada semacam komplotan antara Jakarta dan Medan untuk menghentikan sistem barter. Bagi Pemerintah Pusat, perdagangan barter yang terjadi di Aceh hanya berarti hilangnya tiga puluh persen dari devisa dalam perdagangan antara Aceh dan Penang. Di lain pihak, akibat perdagangan barter ini jauh lebih berarti bagi ekonomi Sumatera Timur dan Tapanuli. Pertama, karena sebagian impor itu dilemparkan ke Medan; ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Aceh dengan penduduknya yang sedikit merupakan pasar yang terlalu kecil untuk menampung semua barang yang diimpor.⁹⁵ Ini berarti eksportir Aceh yang berjumlah kira-kira dua puluh orang itu menekan dengan sangat kepentingan tiga puluh delapan importir pribumi dari Sumatera Timur dan Tapanuli,⁹⁶ di samping mempengaruhi kepentingan pedagang Cina. Kedua, kegiatan ekspor di Sumatera Timur dan Tapanuli ikut juga terpengaruh karena perdagangan barter telah menghisap sebagian barang ekspor yang dihasilkan Sumatera Timur dan Tapanuli ke pelabuhan-pelabuhan di Aceh, dengan akibat berkurangnya kegiatan ekspor melalui pelabuhan Medan, Belawan. Misalnya, dari 5.000 ton karet yang diekspor melalui pelabuhan Kuala Langsa di Aceh Timur pada tahun 1951, menurut laporan, enam puluh persen di antaranya berasal dari Sumatera Timur. Transportasi karet secara tidak sah dari Sumatera Timur ini menimbulkan kerugian pemerintah lebih dari satu juta dolar Singapura setiap bulannya. Oleh karena itulah pada pertengahan tahun 1951 pihak bea cukai menyerukan kepada Pemerintah Pusat supaya menghentikan barter tersebut.⁹⁷

95. Lihat "Kumpulan dari pokok2 pikiran dalam Konprensi Gasida ke III", stensilan (Kutaraja: 1957), hal. 11.

96. *Propinsi Sumatera Utara*, hal. 624, 627-628.

97. *Waspada*, 30 Agustus 1951.

Namun rakyat Aceh memandang perdagangan barter itu dengan cara yang berbeda, sebab bukan hanya pedagang yang diuntungkan, melainkan juga para petani, baik sebagai penghasil komoditas ekspor maupun sebagai konsumen. Tidak sama halnya dengan para petani di Jawa atau bahkan dengan sebagian Sumatera Timur, petani-petani Aceh tidak semata-mata tergantung pada produksi beras. Kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa setiap petani di daerah pesisir Aceh memiliki sepetak kebun kelapa sehingga produksi kelapa melebihi kebutuhan mereka. Makna daripada sistem barter bagi rakyat Aceh terletak pada kenyataan bahwa kopra merupakan salah satu barang ekspor utama Aceh dan, berbeda dari Sumatera Timur di mana kebun kelapa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta, para petani di Aceh menguasai produksi kopra itu. Prosedur impor dan ekspor yang praktis dari sistem barter juga menguntungkan para pedagang Aceh sebab di sana tidak terdapat banyak importir dan eksportir yang terampil dan mempunyai lisensi. Sebagai tambahan, kurangnya fasilitas perbankan di Kutaraja juga menghambat usaha mereka untuk ikut mengambil bagian dalam prosedur impor dan ekspor yang biasa. Oleh karena itu, sistem perdagangan barter mempunyai arti yang sangat besar, baik bagi para saudagar maupun petani Aceh.

Karena itulah keputusan Pemerintah Pusat untuk mengakhiri sistem barter pada bulan Februari 1952 sangat memukul para pedagang tersebut, sekaligus mempengaruhi petani dan ekonomi daerah pada umumnya. Setelah itu terjadilah penurunan volume impor dan ekspor secara terus-menerus ke dan dari Penang, yang merupakan sebuah pelabuhan dagang tradisional bagi rakyat Aceh. Impor Indonesia dari Penang pada tahun 1951 bernilai 3,3 juta rupiah, suatu peningkatan tajam dari hanya 1 juta rupiah pada tahun 1950, tetapi nilai tersebut turun menjadi 2,1 juta pada tahun 1952, dan 0,5 juta rupiah pada tahun 1953. Suatu kecenderungan yang sama terjadi pula dalam volume ekspor ke pelabuhan tersebut, yang setelah meningkat drastis dari 67,8 juta rupiah pada tahun 1950 menjadi 245,9 juta rupiah pada tahun 1951, jatuh menjadi 141 juta rupiah pada tahun 1952 dan 123,9 juta rupiah pada tahun 1953.⁹⁸ Kecenderungan ini memberikan dampak yang serius kepada para

98. Untuk angka-angka ini, lihat *Statistical Pocket Book 1957* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1957), hal. 100-101. Sayangnya, sumber ini tidak memperinci pelabuhan

petani, sebab diikuti oleh merosotnya harga kelapa di pasar setempat.⁹⁹ Dengan demikian, berakhirnya sistem perdagangan barter membawa akibat yang sangat jauh bagi para pedagang Aceh pada umumnya sebab menghancurkan modal mereka. Hal ini pada gilirannya mengganggu keseimbangan antara eksportir Aceh dan Cina karena sembilan puluh lima persen eksportir yang beroperasi di Aceh sekarang adalah keturunan Cina, padahal pada masa barter jumlahnya adalah sama.¹⁰⁰ Jadi, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ini sangat menguntungkan pedagang Cina dan merugikan rakyat Aceh.

Memang, bukan para petani dan pedagang saja yang terpengaruh oleh penghapusan sistem barter, sebab akibatnya juga terasa dalam aspek-aspek lain dari kehidupan rakyat Aceh. Merosotnya volume ekspor dan impor menyebabkan kehidupan buruh-buruh pelabuhan juga terancam. Hal ini bukan hanya mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, tetapi juga mengurangi pendapatan masyarakat secara luas. Umpamanya, sebanyak empat ratus buruh menganggur di pelabuhan Kuala Langsa sebab sekarang pelabuhan itu hanya sanggup mempekerjakan lima puluh orang, dengan pendapatan rata-rata per bulan lebih kurang sama dengan dua hari kerja pada masa berlakunya barter.¹⁰¹ Dengan demikian proses

tujuan dan pelabuhan asal barang, sehingga di sini kita tidak akan menyimpulkan bahwa angka-angka ini semata-mata menunjuk pada perdagangan antara Aceh dan Penang. Akan tetapi, mengingat bahwa Penang merupakan pelabuhan asing yang paling dekat, di samping sebagai rekan dagang tradisional dalam perdagangan dengan Aceh, dan fakta bahwa hanya Nias, sebuah pulau di lepas pantai barat Sumatera Utara, yang mungkin juga berdagang dengan Penang melalui sistem perdagangan barter sampai pertengahan 1951, kiranya tidak akan terlalu salah bila dikatakan bahwa angka-angka tersebut juga mencerminkan tingkat perdagangan antara Aceh dan Penang.

99. Harga ekspor kopra adalah Rp 144,00 per 100 kilogram pada tahun 1950, kemudian melonjak menjadi Rp 189,00 pada tahun 1951, dan jatuh menjadi Rp 169,00 pada tahun 1952 ketika perdagangan barter dihentikan. Namun demikian, harganya naik lagi menjadi Rp 219,00 pada tahun 1953; *Statistical Pocket Book 1957*, hal. 206. Akan tetapi angka-angka ini tidak menyebutkan harga yang sesungguhnya di pasar setempat, karena larangan terhadap barter menyebabkan lumpuhnya Copra Fonds di Aceh dan tidak menggairahkan eksportir setempat, yang memperhitungkan ongkos transportasi, yang ketika itu sangat tinggi di Aceh karena kondisi jalan yang buruk, ke dalam komponen harga.

100. "Kesimpulan dari pokok2 pikiran dalam Konprensi Gasida III", hal. 12.

101. Selama masa barter, pendapatan harian rata-rata dari seorang buruh antara Rp 75,00 dan Rp 100,00; *Tegas*, 21 April 1952.

pemiskinan tidaklah terhindarkan. Para buruh terpaksa meninggalkan kehidupan mereka yang relatif cukup baik, dan kini hanya mampu bertahan hidup dengan menjual harta benda mereka atau pergi ke pegadaian milik pemerintah, atau, paling-paling, pergi melaut. Banyak wanita yang semula dipekerjakan dalam usaha kopra dan pinang, sekarang terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka, dan banyak pula yang terjerumus dalam prostitusi. Berbagai kecenderungan ini bisa lebih dipahami jika kita melihat bagaimana dalamnya efek penghapusan perdagangan barter terhadap kegiatan di pelabuhan. Di pelabuhan Kutaraja hampir tidak ada kegiatan pada bulan Februari dan Maret 1952, ketika pelabuhan itu hanya mengeksport dua puluh satu ton dan lima ton, padahal volumenya mencapai 392,5 ton pada bulan Januari tahun yang sama.¹⁰²

Dengan demikian, ada juga sumber dendam yang kuat terhadap Pemerintah Pusat dalam bidang ekonomi, yang asalnya bukan hanya dari keputusan yang menghentikan perdagangan barter, tetapi juga dari ketidakpedulian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi setempat. Dalamnya kekecewaan, sebagaimana yang dirasakan rakyat Aceh, dapat diperkirakan dengan jalan meringkaskan dampak kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap daerah itu. Pertama, kegagalan pemerintah untuk menyediakan sistem irigasi yang memadai telah sangat merugikan para petani di Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Pidie, Utara, dan Timur (bagian timur laut), karena petani-petani tersebut sangat tergantung pada penanaman padi. Para petani ini juga sangat terpukul ketika Jakarta memutuskan untuk mengakhiri perdagangan barter yang menjatuhkan harga kelapa di pasar lokal. Petani-petani lain dari Kabupaten-kabupaten Aceh Timur (selain bagian timur laut), Barat, dan Selatan, di mana terdapat karet, tidak begitu terpengaruh oleh kurangnya infrastruktur pertanian dan jatuhnya harga kelapa, sebab daerah-daerah ini tidak terlalu tergantung pada kedua hal ini.

Dengan alasan-alasan demikian, dapatlah saya katakan bahwa bagaimanapun juga Pemerintah Pusat akan menemui kegagalan dalam ikhtiarnya untuk melepaskan rakyat Aceh dari pengaruh para pemimpin PUSA. Jauh dari berhasil, Pemerintah Pusat malah sebaliknya mendorong rakyat Aceh lebih dekat lagi kepada pemimpin-pemimpin

102. *Tegas*, 21 dan 29 Maret 1952.

mereka. Dalam bidang sosial, kegagalan para pejabat bukan-Aceh untuk menghargai nilai-nilai agama dan lokal, membuka kesempatan bagi ulama-ulama PUSA untuk membuktikan bahwa Pemerintah Pusat tidak mendukung nilai-nilai keagamaan rakyat Aceh. Begitu pula tiadanya perhatian pemerintah terhadap ekonomi daerah itu, terutama dalam hal sistem jalan dan irigasi, telah meyakinkan rakyat bahwa daerah mereka memang diperlakukan sebagai anak tiri. Semua kenyataan ini membantu meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin mereka yang telah lebih dahulu meramalkan bahwa hal-hal tersebut akan terjadi bila otonomi daerah itu dihapuskan. Oleh karena itu, rakyat menjadi semakin terpercail sebab mereka semakin didorong untuk merasakan kekecewaan para pemimpin PUSA. Alienasi dan dendam yang bertumpuk-tumpuk itu selanjutnya melahirkan parokialisme.

Mengapa Pemerintah Pusat membiarkan situasi demikian berkembang terus? Sebuah jawaban sederhana atas pertanyaan ini adalah bahwa Pemerintah Pusat sendiri sedang terjebak dalam kompleksitas politik nasional, baik di dalam maupun di luar parlemen, pada tahun 1951-1952, yang memaksa Pemerintah Pusat mengabaikan berbagai masalah yang muncul di banyak daerah, termasuk Aceh. Hal ini memaksa Pemerintah Pusat untuk membujuk daerah-daerah itu dengan janji-janji kosong, dengan harapan bahwa masalah tersebut akan menghilang secara perlahan-perlahan.

Suasana setempat juga membantu memperkuat sentimen kesukuan dan kedaerahan. Dalam hubungan ini, Pemerintah Pusat sebenarnya terperangkap oleh situasi di propinsi-propinsi yang multi-etnis, seperti Sumatera Utara, sehingga menyebabkan Pemerintah Pusat gagal melayani semua kepentingan etnis dalam pendistribusian sumber-sumbernya. Terbukti di Sumatera Utara bahwa sebagian besar posisi penting di Kantor Gubernur di Medan berada dalam tangan orang-orang Sumatera Timur, Batak, dan Mandailing, yang cenderung untuk melayani kepentingan daerah mereka masing-masing terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka berusaha keras agar semua proyek pembangunan propinsi ditempatkan di Sumatera Timur atau Tapanuli. Dihadapkan pada situasi ini, rakyat Aceh tidak dapat berbuat lain kecuali meratapi hal-hal yang sedang terjadi itu, sebab mereka tidak punya pengaruh di Medan atau pun koneksi di Jakarta.

Bab III

Pemberontakan

PADA TANGGAL 21 September, sehari setelah Presiden Soekarno membuka Pekan Olahraga Nasional di Medan, Daud Beureueh mengumumkan dimulainya "sejarah baru"¹ daerahnya dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh. Tetapi untuk menandai lahirnya sejarah baru itu tidak diadakan suatu rapat umum atau upacara yang meriah. Sebagai gantinya, hanya naskah proklamasi dan sebuah Keterangan Politik yang dibacakan dan disebarakan di Indrapuri, sebuah kampung di sebelah selatan Kutaraja. Namun demikian, naskah-naskah ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu tanda pembukaan lembaran baru sejarah Aceh, sebab pemberontakan itu telah dimulai sehari sebelum proklamasinya sendiri. Sementara kebanyakan pejabat tinggi daerah itu, baik yang Aceh maupun bukan-Aceh, sedang berada di Medan untuk menghadiri Pekan Olahraga Nasional, sejak senja hari 19 September komunikasi antara Aceh dan Medan telah terputus, dan tindakan-tindakan fisik berlangsung di berbagai tempat. Kerumunan-kerumunan rakyat dengan bendera Tentara Islam Indonesia (TII), yang dilengkapi senjata tajam serta satu atau dua pucuk senjata api, terlihat di kampung-kampung sepanjang jalan raya dan jalan kereta api. Mereka sedang bersiap-siap menyerang kota-kota di sekitarnya.

1. "Keterangan Politik", suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh gerakan Darul Islam di Aceh, bertanggal 21 September 1953. Naskah lengkap pernyataan ini antara lain terdapat dalam A.H. Gelanggang, *Rabasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin* (Kutaraja: Pustaka Murni Hati, 1956), hal. 44-51. Untuk versi bahasa Inggris, lihat Herbert Feith dan Lance Castles, ed., *Indonesian Political Thinking, 1944-1965* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970), hal. 211-215.

Pecahnya Pemberontakan

SUASANA DI SELURUH daerah itu terasa sangat revolusioner, seakan-akan rakyat Aceh tengah menyusun suatu *prang sabil* (perang sabil) yang lain terhadap *kaphee* (kafir). Sewaktu mereka menyerang dan mengepung pemusatan militer di kota-kota, "tentara" Darul Islam itu memandang tentara nasional, TNI, sebagai *teuntra kaphee* (tentara kafir) dan memekikkan "Allahu Akbar". Betapa revolusionernya suasana bagi rakyat Aceh dan bagaimana menyeramkannya bagi musuh-musuh mereka, tercermin pada konfigurasi ribuan penduduk kampung yang berbaris menuju kota-kota di sekitarnya sambil terus-menerus menyerukan "Allahu Akbar" dan kata-kata suci lainnya. Semangat revolusioner barisan itu tambah semarak dengan adanya bendera Darul Islam, yang bergambar bintang dan bulan sabit putih di atas dasar merah. Di banyak kampung dan kota sekitarnya, setiap barisan dilengkapi dengan bendera merah yang menandakan bahwa mereka sedang berada dalam keadaan perang.²

Barisan yang terdiri atas para pemuda, pelajar, guru, dan penduduk kampung itu memulai serangan terhadap pasukan pemerintah di Aceh Timur dan Utara pada senja hari tanggal 19 September, dan serangan menjalar ke kabupaten-kabupaten lain pada hari-hari berikutnya. Sebuah pos polisi di Peureulak, sebuah kota kewedanaan kira-kira seratus kilometer di sebelah utara Langsa, diserang dan dilucuti oleh para pemberontak. Di Lhokseumawe, ibu kota Kabupaten Aceh Utara, ribuan rakyat terlibat di dalam suatu pertempuran sengit dengan pasukan polisi dan tentara selama empat setengah jam pada hari pertama pemberontakan. Upaya untuk menguasai kota itu diulangi beberapa jam setiap hari selama hampir satu minggu, sehingga memaksa anggota keluarga pasukan pemerintah dievakuasikan dari sana. Di Aceh Besar, sesudah kegagalan di Kutaraja karena pasukan pemerintah berhasil mendahului dengan langkah-langkah preventif, para pemberontak mengarahkan serangan mereka ke beberapa kota kecil dengan hasil dilucutinya satu regu polisi dan satu regu tentara, serta rusaknya jembatan dan kawat

2. Bendera Darul Islam adalah bulan sabit dan bintang yang mempunyai tiga warna dasar yaitu merah, hijau, dan putih. Pemerintah dan tentaranya menggunakan warna hijau yang melambangkan keadaan perang, sedangkan warna merah dan putih dipakai dalam keadaan normal atau damai. Tentang bendera ini, lihat Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo* (Jakarta: Aryaguna, 1964), hal. 85 dan 102.

telepon. Semua komunikasi dengan Aceh praktis putus pada tanggal 21 September. Untuk meringankan beban pasukan di darat, pada tanggal 23 dan 24 September Angkatan Udara menembak dan membom para pemberontak di Bireuen, karena mereka terus menekan daerah itu, serta Lhokseumawe dan Sigli. Hari berikutnya, Takengon di Aceh Tengah jatuh ke tangan pemberontak setelah pasukan pemerintah terpaksa mundur ke Bireuen. Dua kota kecil lain, Blangkejren dan Meureudu, masing-masing di Kabupaten Aceh Tengah dan Pidie, dikuasai pemberontak pada awal Oktober.³

Kendatipun hanya satu dari tujuh kota kabupaten dan dua dari dua puluh satu kota kewedanaan yang berhasil diduduki oleh kekuatan-kekuatan Darul Islam, tidak berarti bahwa pasukan pemerintah masih sepenuhnya menguasai kota-kota lain. Di banyak kota, kecuali Kutaraja, pasukan pemerintah terpaksa bertahan di sekitar tangsi mereka dan hanya dapat melakukan operasi-operasi militer yang terbatas. Beberapa kota seperti Bireuen, Calang, Meulaboh, dan Tapaktuan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya sampai pertengahan Oktober, walaupun sejak awal pemberontakan pemerintah telah memasukkan ke daerah itu sekurang-kurangnya dua batalion tentara dari daerah-daerah lain di Sumatera. Dengan tibanya pasukan-pasukan ini sekalipun, pemerintah tetap belum dapat menguasai kembali Meureudu dan Blangkejren sampai akhir Oktober, sedangkan Takengon tetap berada di tangan pemberontak sampai November.⁴ Namun demikian, sesudah pasukan pemerintah merebut kembali Takengon, mulailah muncul suatu pola pengaruh *de facto* di antara dua kekuatan tersebut: pemerintah hanya menguasai pusat-pusat perkotaan dan melepaskan bagian lain dari daerah itu kepada Darul Islam. Di lain pihak, kurangnya dukungan dari rakyat di Aceh Barat dan Selatan, setelah mereka gagal menguasai kota-kota, menyebabkan Darul Islam secara berangsur-angsur memusatkan kegiatan di Kabupaten-kabupaten Aceh Timur, Utara, Tengah, Besar, dan Pidie. Kelak kita akan melihat bahwa dalam pemusatan ini, basis kekuatan Darul Islam terutama berada di empat kabupaten, yakni Aceh Besar, Pidie, Utara, dan Tengah.

Terganggunya kehidupan sehari-hari merupakan dampak utama pem-

3. Antara, 28 September 1953; lihat juga, *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 8-18.

4. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 16-18.

berontakan tersebut terhadap rakyat, sebab kebanyakan penduduk setempat terlibat di dalamnya. Sistem pemerintahan daerah menjadi lumpuh karena banyak pegawai yang asli Aceh bergabung dengan pemberontak, atau mendukungnya secara tidak langsung. Di Kutaraja, hanya satu orang bupati yang berada di kantornya,⁵ sedang sisanya bergabung dengan pemberontak secara terbuka atau "menghilang" tanpa berita. Akting Koordinator Pemerintahan Teungku Sulaiman Daud,⁶ dan Kepala Inspeksi Sekolah-sekolah Islam Ismail Yakub menghilang dari Kutaraja dan bersekutu dengan para pemberontak. Sebelumnya, pada pertengahan September, Sulaiman Daud sengaja menghindari undangan Gubernur Abdul Hakim untuk menghadiri rapat di Medan bersama para bupati Aceh. Dengan demikian ia dapat berada di Kutaraja sampai pemberontakan itu meletus. Para bupati yang menghadiri rapat dengan Gubernur itu kemudian menghilang dari Medan dan berhimpun dalam pemberontakan, atau menolak kembali ke pos mereka agar dapat menghindari dari keterlibatan yang lebih jauh dalam apa yang sekarang mereka anggap sebagai suatu gerakan yang gagal.

Oleh karena di mana-mana keadaan begitu kacau, dan jam malam diberlakukan di kota-kota, pemerintah berusaha membujuk rakyat Aceh agar menjauhkan diri dari Darul Islam dan tetap setia kepada pemerintah yang sah. Sebagai bagian dari upaya itu, komandan militer setempat menyebarkan beribu-ribu edaran ke seluruh daerah pada tanggal 21 September. Dalam desakan terhadap rakyat agar kembali bekerja, komandan militer mengemukakan bahwa tindakan-tindakan Darul Islam adalah ilegal⁷ dan gerakan itu memperalat agama.⁸ Seruan yang sama juga datang dari Gubernur Sumatera Utara.⁹ Untuk memperkuat himbuan mereka, penguasa militer setempat juga mengeluarkan pamflet atas nama Kantor Urusan Agama, dengan harapan rakyat akan menghar-

5. *Indonesia Raya*, 26 September 1953.

6. Sulaiman Daud diangkat menjadi **akting koordinator pemerintahan** menggantikan Danubroto yang dipindahkan dari Aceh pada bulan April 1953.

7. Lihat pamflet berjudul "Saudara seluruh Rakyat Atjeh", yang disebarkan oleh penguasa militer di Kutaraja. Pamflet ini merupakan selebaran yang pertama dan tidak bertanggal, tetapi disebarkan di Kutaraja pada pagi hari tanggal 21 September 1953.

8. Pamflet berjudul "Segenap penduduk diseluruh Atjeh", bertanggal Kutaraja, 22 September 1953.

9. Pamflet berjudul "Petunjuk dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara", bertanggal Medan, 23 September 1953.

gainya sebagai suatu seruan agama.

Namun demikian, seruan tersebut tidak membantu pemerintahan daerah yang lumpuh itu, sebab kelumpuhan tersebut tidak ditimbulkan oleh kenyataan bahwa Darul Islam memiliki pengaruh terhadap bagian-bagian dari mesin pemerintahan, melainkan karena keamanan belum dipulihkan. Faktanya adalah bahwa karena Darul Islam telah gagal merebut daerah perkotaan pada minggu-minggu pertama pemberontakan tersebut, banyak di antara para pendukungnya di kalangan pemerintahan yang kembali ke jawatan mereka semula, walaupun tetap setia kepada teman-teman mereka di daerah pedesaan. Hanya tiga bupati, tujuh dari dua puluh satu wedana, dan empat belas dari seratus enam camat yang tidak melapor kembali sampai awal tahun 1954 dan, karena itu, dipecat oleh Kementerian Dalam Negeri.¹⁰ Walaupun ini merupakan suatu jumlah yang relatif kecil, pada kenyataannya pemerintahan daerah memang tidak dapat berjalan. Hal ini karena kontrol *de facto* Darul Islam atas daerah pedalaman telah mencegah kebanyakan camat pada khususnya untuk kembali ke pos mereka.

Dengan demikian, pemerintah menghadapi dua masalah dalam bidang pemerintahan. Pertama, daerah pedalaman yang dikuasai pemberontak, dan terpaksa dilepas oleh penguasa, menciptakan suatu kekosongan dalam sistem pemerintahan daerah. Di bawah tingkat kewedanaan, mutasi dan pengangkatan baru yang dilakukan untuk mengisi pos-pos yang ditinggalkan para pejabat yang bergabung dengan pemberontak, tidak membantu mengaktifkan kembali fungsi-fungsi pemerintahan. Pejabat-pejabat tersebut menolak menduduki jabatan mereka di daerah pedalaman tanpa pengawalan yang memadai bagi keselamatan mereka, padahal pemerintah tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi pegawainya. Oleh karena itu pemerintah terpaksa menerima kenyataan bahwa pemerintahan atas daerah-daerah pedalaman dilakukan dari kota-kota, meski dalam banyak hal sistem ini pun tidak berjalan. Kedua, hilangnya Akting Koordinator Pemerintahan Sulaiman Daud, menimbulkan kekosongan pada tampuk pemerintahan daerah. Sebenarnya keadaan ini memberi kesempatan yang

10. Pemerintah juga memecat Daud Beureueh, Sulaiman Daud, seorang patih, serta dua puluh lima pejabat pemerintahan lainnya; lihat, "Mutasi Pegawai Didaerah Atjeh (Prop. Sumatera Utara) sedjak pemberontakan Tgk. Moh. Daud Beureueh c.s. pada tanggal 20 September 1953", stensilan.

memang telah diidamkan Pemerintah Pusat sejak penggabungan Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara, yakni menghapuskan lembaga itu. Namun Pemerintah Pusat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut sebab kini pemerintah justru lebih memerlukan lembaga tersebut daripada masa sebelumnya agar dapat mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan setempat dan upaya pemulihan keamanan. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga tidak ingin membenarkan fakta bahwa Aceh telah ditempatkan di bawah pemerintahan militer, sebab hal ini akan mudah diartikan bahwa daerah itu berada dalam suatu situasi kritis. Oleh sebab itu pemerintah hanya membentuk Staf Keamanan Sipil.

Keterlibatan rakyat dalam pemberontakan menunjukkan bahwa perlawanan tersebut bukan merupakan suatu luapan spontan yang hanya berdasarkan kemarahan dan kekecewaan yang menumpuk saja. Dukungan masal seperti itu memerlukan masa persiapan yang lama sebelum dapat berkembang begitu rupa. Rencana pemberontakan itu memang telah dipikirkan dan dipersiapkan jauh sebelum peletusannya, tetapi dirahasiakan oleh para pemimpin inti PUSA. Barangkali rencana itu sudah ada dalam benak beberapa pemimpin PUSA sejak awal tahun 1951 ketika mereka secara bersyarat menyetujui pembubaran Propinsi Aceh, namun pada waktu itu mereka belum melakukan persiapan yang serius. Pada tahap itu pemberontakan masih dianggap terlalu dini, bukan hanya karena mereka ingin memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan tuntutan otonomi mereka, tetapi juga karena mereka sadar bahwa saat itu belum tiba waktunya untuk melancarkan pemberontakan. Mereka sadar bawah rakyat masih terpukau oleh semangat kemerdekaan dan bosan akan kekerasan setelah terlibat dalam revolusi. Para pemimpin PUSA mungkin berpikir, sekalipun unit-unit militer Aceh sedang ditarik ke luar, mereka tidak akan pernah terlambat bertindak sepanjang mereka masih memiliki senjata dan tenaga. Akan tetapi mereka tetap prihatin atas aspek keuangan dari pemberontakan yang potensial itu. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bilamana Majelis Penimbang, terutama di Kabupaten Pidie, terus melanjutkan pevelangan harta-harta *ulebalang* dan menolak memberikan laporan, di samping tidak menaati seruan pemerintah daerah supaya menghentikan kegiatan pevelangan tersebut.

Sudah jelas sejak pertengahan tahun 1951 bahwa Pemerintah Pusat tidak sudi mengembalikan otonomi Aceh, bahkan sebaliknya, melan-

carkan serangkaian pukulan terhadap PUSA. Dan karena semakin banyak rakyat yang mengalami akibat daripada kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi selama akhir tahun 1951 sampai awal tahun 1952, maka para pemimpin PUSA pun memutuskan untuk mencetuskan pemberontakan. Sekalipun kenyataannya mereka telah kehilangan sebagian besar senjata dalam razia pada tahun 1951, tidak ada alternatif lain bagi mereka selain daripada bergerak untuk mempersiapkan pemberontakan itu. Suatu panitia *ad hoc* dibentuk menjelang akhir 1951, walaupun struktur dan tujuan pemberontakan yang potensial itu belum lagi dipikirkan secara mendalam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam komite ini termasuk Daud Beureueh sendiri dan Hasan Ali, Kepala Kejaksaan Daerah di Kutaraja.¹¹ Ketua PUSA Abdul Wahab, juga mendukung rencana itu sepenuh hati, meskipun dengan jelas dikemukakannya bahwa ia tidak akan terlibat secara fisik karena akan berangkat ke Mekah.¹² Tetapi, tokoh-tokoh ini pun tidak tahu pasti kapan pemberontakan itu akan diletuskan.

Agaknya pada waktu itulah kekecewaan rakyat Aceh sampai ke telinga Imam NII Kartosuwirjo, yang segera mengirim seorang utusan, Abdul Fatah, alias Mustafa, untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952. Melalui Abdul Fatah, Kartosuwirjo mengirimkan sebuah salinan dakwahnya tentang gerakan Darul Islam, dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung. Ajakan ini mendapat sambutan baik di Aceh. Pendekatan lebih lanjut terjadi ketika Daud Beureueh mengirim seorang utusan, Jahja Sulaiman, seorang pemimpin pemuda dari Meureudu, kepada Kartosuwirjo di Jawa Barat, bersama Abdul Fatah yang kembali ke sana. Daud Beureueh dan pemimpin PUSA lainnya merasa kecewa terhadap dakwah Kartosuwirjo yang hanya berisi pembenaran ideologis atas gerakan Darul Islam di Indonesia tanpa memberikan informasi mengenai struktur gerakan itu. Oleh sebab itulah utusan Aceh tersebut diberi wewenang untuk membahas secara mendalam susunan pemerintahan dan militer NII dengan Kartosuwirjo.¹³

11. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

12. Wawancara dengan Muhammad Diah Hadji, seorang menantu Daud Beureueh, Jakarta, 3 Juli 1975.

13. Lihat surat Daud Beureueh kepada Kartosuwirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956. Dalam suratnya, Daud Beureueh juga membicarakan hubungan awal di antara kedua pemimpin itu.

Akan tetapi utusan tersebut tidak pernah bertemu muka dengan Kartosuwirjo melainkan dengan sejumlah pemimpin Darul Islam lainnya. Ia juga tidak memperoleh informasi yang dikehendaki oleh para pemimpin Aceh, malah disuruh kembali ke Aceh bersama Abdul Fatah. Kali ini Abdul Fatah diangkat sebagai kuasa usaha NII di Sumatera dengan tugas membina gerakan Darul Islam di pulau itu.¹⁴ Abdul Fatah tampak tidak sabar melihat pemimpin-pemimpin Aceh yang bergerak sangat lambat walaupun ia diyakinkan bahwa mereka sedang menuju ke arah pemberontakan. Dia tidak meninggalkan Aceh sampai awal tahun 1953 ketika Daud Beureueh setuju mendukung Darul Islam dan membawahkan Aceh pada NII.

Namun yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana melaksanakan persiapan-persiapan, terutama secara fisik, tanpa menimbulkan kecurigaan penguasa setempat. Hal ini memang lebih menjadi masalah bagi Daud Beureueh daripada bagi Kartosuwirjo atau Kahar Muzakkar ketika mereka memutuskan untuk menantang Pemerintah Pusat. Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar pada waktu itu mampu melawan pemerintah karena mereka memiliki kekuatan militer. Dalam hal Jawa Barat, Kartosuwirjo tidak saja mempunyai 4000 laskar dan dukungan petani, tetapi ia juga melancarkan gerakannya pada waktu pemerintah nasional tengah berjuang melawan Belanda dan, sesuai dengan Perjanjian Renville antara pemerintah Belanda dan Indonesia pada tahun 1948, tentara nasional sedang hijrah dari Jawa Barat. Sama juga halnya dengan Kahar Muzakkar di Sulawesi, yang ketika memutuskan untuk melawan Jakarta pada tahun 1951, sedang memimpin pasukan yang terorganisasi baik, siap tempur, dan memiliki dendam yang kuat terhadap Pemerintah Pusat.¹⁵

Berbeda dari Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar, Daud Beureueh menghadapi suatu keadaan yang sangat sukar. Persiapan-persiapan untuk melancarkan pemberontakan lebih sulit dilakukan di Aceh karena PUSA telah dihalangi untuk memiliki pengaruh militer dalam bentuk apa pun. Dendam yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Aceh, yaitu petani, pedagang, pemuda, tentara yang didemobilisasi, dan kalangan ulama terhadap Pemerintah Pusat memang merupakan faktor yang

14. *Ibid.*

15. Mengenai Kahar Muzakkar, lihat Bahar Mattalioe, *Kabar Muzakkar dan Petualangannya* (Jakarta: C.V. Delegasi, 1965), hal. 36.

menguntungkan bagi para penganjur pemberontakan itu. Akan tetapi ada sejumlah ketidakberuntungan lain dalam kekuatan mereka, umpamanya, pemindahan unit-unit militer Aceh ke luar daerah dan penyitaan perlengkapan militer di seluruh Aceh dalam razia bulan Agustus 1951. Barangkali keadaan ini pulalah yang telah memaksa pemimpin-pemimpin Aceh untuk mengikatkan diri pada suatu bentuk perjuangan rakyat yang bersifat "perang total" seperti yang pernah dilaksanakan oleh para pendahulu mereka pada akhir abad sembilan belas. Dengan demikian, karena tidak dapat menekankan aspek-aspek militer dalam persiapan-persiapan itu, mereka pun memperhatikan intensifikasi dendam rakyat terhadap Pemerintah Pusat melalui ideologisasi agama.

Dukungan moral memang secara relatif mudah diperoleh dengan mengindoktrinasi penduduk melalui saluran agama tradisional: tablig dan khotbah. Kebanyakan dakwah yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin PUSA di seluruh Aceh pada periode 1952-1953 secara politis diarahkan pada pematangan situasi. Banyak di antara pidato Daud Beureueh, umpamanya, tidak saja mengkhawatirkan "nilai-nilai asing" yang mengancam nilai-nilai Aceh, tetapi juga mengingatkan para pendengarnya akan hubungan antara agama, nasionalisme, dan negara. Pada suatu waktu dalam pertengahan tahun 1953 ia bahkan menyinggung kemungkinan terjadinya suatu "perang akbar" yang akan menentukan nasib kaum muslimin di Indonesia, dan mendesak pendengarnya supaya bersiap menghadapi perang ini.¹⁶ Ideologisasi agama ditingkatkan lebih jauh dalam Konferensi Ulama Seluruh Indonesia di Medan pada tanggal 15 April 1953, di mana Daud Beureueh bertindak sebagai ketua, dan di situlah konsep negara Islam dirumuskan.¹⁷

Konferensi ulama ini telah berfungsi sebagai dorongan positif lainnya bagi PUSA untuk memberontak. Pertama-tama, pengangkatan Daud Beureueh sebagai ketua konferensi telah memperkuat pengaruh dan kepemimpinannya di Aceh, sebab kini rakyat Aceh menganggap bahwa ia mendapat penghormatan dari konferensi para ulama tingkat nasional. Kedua, keputusan-keputusan ideologis konferensi itu memberi bukti kepada para pemimpin PUSA untuk diperlihatkan kepada pengikut-

16. *Tegas*, 11 dan 30 April 1953.

17. Boyd R. Compton, "The Medan Ulama Conference", *Newsletter of the Institute of Current World Affairs* (New York), 20 Agustus 1953.

pengikut mereka di Aceh bahwa kampanye agama yang mereka lakukan juga mendapat sambutan secara nasional. Ketiga, konferensi itu mendorong pemimpin-pemimpin PUSA untuk melangsungkan konferensi ketiga organisasi mereka, hanya dalam waktu sepuluh hari setelah berakhirnya konferensi di Medan itu. Ini memang merupakan suatu kesempatan emas bagi para pemimpin organisasi tersebut, sebab mereka mungkin tidak akan berani menyelenggarakan konferensi PUSA kurang dari tiga tahun sesudah konferensi yang kedua. Usaha untuk menyelenggarakan konferensi PUSA pada waktu itu tanpa alasan yang memadai barangkali akan membahayakan persiapan-persiapan pemberontakan, sebab hal itu akan menarik perhatian para penguasa. Tetapi dengan alasan adanya kebutuhan untuk membahas hasil-hasil konferensi ulama di Medan itu, maka suatu konferensi ulama, pemuda, dan wanita PUSA diadakan di Langsa pada tanggal 25-29 April 1953, tanpa menimbulkan kecurigaan penguasa.

Akan tetapi tentu saja konferensi yang besar ini sama sekali tidak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kemungkinan adanya pemberontakan.¹⁸ Namun dari keputusan-keputusannya jelas terlihat bahwa bagaimanapun konferensi telah diarahkan pada persiapan fisik bagi pemberontakan. Konferensi itu memutuskan mengorganisasikan kembali Pemuda PUSA, walaupun Husin Al-Mudjahid tetap ditunjuk sebagai pemimpinnya. Di samping itu dibentuk pula dua organisasi lain. Yang pertama, Persatuan Bekas Pejuang Aceh yang diletakkan di bawah kepemimpinan bekas Komandan Divisi X, Husin Jusuf. Dalam hal ini dikatakan bahwa organisasi "veteran" ini bertujuan untuk mendaftarkan semua serdadu yang terdemobilisasi di daerah tersebut dalam rangka mempekerjakan mereka di dalam beberapa proyek pembangunan¹⁹ yang akan dibangun oleh organisasi itu. Organisasi kedua adalah Pandu Islam yang dimaksudkan untuk mengorganisasikan semua pemuda dan sebagai samaran bagi latihan militer yang diberikan kepada Pemuda PUSA. Pemimpin gerakan kepanduan ini adalah Abdul Gani Mutyara, pemimpin redaksi harian *Tegas* yang terbit di Kutaraja, dan bekas perwira dari Divisi X.

Penutupan konferensi ketiga PUSA tidak saja menandai suatu

18. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

19. *Tegas*, 18 Mei 1953.

langkah lebih jauh ke arah persiapan pemberontakan, tetapi lebih penting lagi, juga memperkuat perasaan separatis di kalangan para pemimpin puncak organisasi tersebut. Menguatnya perasaan ini disebabkan oleh keyakinan bahwa kini mereka telah mendapat dukungan moral dari konferensi yang mengindikasikan tiadanya keberatan atas mobilisasi kekuatan atau terhadap fakta bahwa ada dua organisasi yang menyalurkan dukungan fisik bagi pemberontakan. Pada waktu itu Daud Beureueh bukan hanya meneguhkan niatnya untuk memberontak, melainkan juga menetapkan pikirannya tentang struktur negara yang diinginkannya. Sesudah penutupan konferensi, Daud Beureueh mengatakan pada Hasan Ali, organisator utamanya, bahwa ia telah memutuskan bahwa Aceh akan bergabung dalam gerakan Darul Islam Kartosuwirjo dan ia siap mengakui Kartosuwirjo sebagai pemimpin NII. Daud Beureueh juga mengirimkan sepucuk surat dan seorang kurir -- Ijas Leube, salah seorang muridnya dari Aceh Tengah, yang berangkat ke Jawa Barat bersama utusan Kartosuwirjo, Abdul Fatah. Dalam suratnya, Daud Beureueh memberikan jaminan pada Kartosuwirjo akan dukungan rakyat Aceh terhadap Darul Islam.²⁰

Konferensi tersebut dan kegiatan para pemimpin pada masa berikutnya juga mengungkapkan struktur panitia pelaksana. Adalah jelas dari hasil konferensi tersebut bahwa Husin Jusuf dan Abdul Gani Mutyara telah diberi tanggung jawab mengerahkan rakyat melalui Persatuan Bekas Pejuang Aceh dan Pandu Islam. Kedua organisasi ini bertanggung jawab atas penyiapan dan pembentukan TII. Untuk melaksanakan tugas ini, Pandu Islam mengerahkan para pemuda di seluruh daerah dan memberikan latihan militer kepada mereka. Latihan itu dilakukan di banyak desa, dan beberapa ribu pemuda telah mengikutinya sampai pertengahan tahun 1953. Di pihak lain, Persatuan Bekas Pejuang Aceh mengerahkan para veteran TNI dan memberikan mereka latihan penyegaran yang terbatas, terutama di "proyek pembangunan" yang dipimpin oleh Husin Jusuf di pedalaman Aceh, sebelah selatan Bireuen.

Daud Beureueh sendiri bertugas memobilisasi dukungan moral rakyat Aceh. Ia dibantu Husin Al-Mudjahid dan Ismail Yakub, dua pembicara muda yang berbakat. Tentu saja tugas mereka pada tahap ini tidak sesulit tugas yang bertalian dengan persiapan fisik, sebab suasana telah cukup

20. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

matang. Meskipun demikian, mereka tidak pernah menghentikan proses pematangan itu, karena memang diperlukan untuk mempertahankan antusiasme dan dukungan moral. Kegiatan-kegiatan mereka agaknya dipandang sebagai sentuhan akhir. Oleh sebab itu, pada pertengahan tahun 1953 beberapa ulama meningkatkan kegiatan memberi tablig dan khotbah. Di Kutaraja, segera setelah berakhirnya konferensi PUSA, diadakan rapat umum di mesjid raya di mana Daud Beureueh dan kedua asistennya berbicara. Kemungkinan meletusnya pemberontakan sudah pasti tidak disinggung, tetapi karena para pembicara membahas keputusan-keputusan konferensi ulama di Medan, mau tidak mau hadirin terarah pula pada pengertian Islam sebagai suatu ideologi.²¹

Walaupun begitu, persiapan-persiapan ini dirasakan belum memadai. Para organisator memang telah merasa puas akan persiapan yang menyangkut dukungan moral rakyat. Dalam hubungan ini para ulama memang telah mengerjakan segalanya, sementara rakyat telah pula memberi tanda siap membantu perang ideologi yang potensial itu demi mempertahankan agama mereka. Akan tetapi, persiapan-persiapan fisik masih jauh dari memuaskan, bukan karena kurangnya tanggapan rakyat terhadap Persatuan Bekas Pejuang Aceh dan Pandu Islam, melainkan karena kurangnya fasilitas latihan. Selain masalah ini, kenyataan bahwa latihan harus tertutup dari unsur-unsur yang bermusuhan dengan sendirinya pula menimbulkan keterbatasan-keterbatasan. Dalam latihan, Pandu Islam hanya dapat menggunakan pisau, pedang, dan senapan kayu peninggalan Jepang, sementara Persatuan Bekas Pejuang Aceh tidak memberikan latihan militer yang memadai kepada para anggotanya karena tidak memiliki senjata. Razia bulan Agustus 1951 betul-betul tidak menguntungkan seluruh persiapan fisik tersebut.

Faktor-faktor ini memaksa para pemimpin PUSA untuk tidak menetapkan tanggal yang pasti bagi pencetus pemberontakan, walaupun persiapan-persiapan tidak dihentikan. Untuk mengatasi masalah ini, para organisator membentuk suatu seksi rahasia dalam kepanitiaan mereka dengan tugas menghubungi semua perwira Aceh dalam unit-unit militer dan polisi, baik di dalam maupun luar Aceh. Salah seorang pelaksana dalam seksi ini adalah Hasan Ali sendiri. Karena menjabat kepala Kejaksaan Aceh, ia dapat bergerak menghubungi para perwira Aceh

21. *Tegas*, 8 Mei 1953.

tanpa menimbulkan kecurigaan para penguasa. Hasil perhubungan ini bukan hanya mendorong persiapan-persiapan lebih lanjut, tetapi juga memungkinkan para pemimpin PUSA, untuk pertama kalinya, menentukan hari mulainya pemberontakan. Di Aceh sendiri kebanyakan anggota polisi yang asli Aceh telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Begitu juga sisa-sisa prajurit Aceh yang jumlahnya sedikit itu.²² Kesediaan ini memang telah memudahkan rencana tersebut, sebab ternyata kemudian banyak anggota polisi yang membiarkan pos mereka jatuh ke tangan para pemberontak pada hari pertama pemberontakan, sehingga memungkinkan Darul Islam menyebarkan dan menggepung pemusatan militer di beberapa kota.

Barangkali keberhasilan Konferensi Ulama Seluruh Indonesia di Medan itu telah pula mengilhami perluasan tugas seksi rahasia, sebab seksi rahasia ini pun membujuk beberapa ulama Sumatera Timur untuk mendukung dakwah Kartosuwirjo tentang gerakan Darul Islam.²³ Dalam hubungan ini segera setelah berakhirnya konferensi PUSA, seorang utusan, Zainal Abidin Tiro, telah dikirimkan kepada beberapa ulama terkemuka di Sumatera Timur. Pada pertengahan tahun 1953 sekelompok ulama termasuk Zainul Arifin Abbas, Alim Hasan, dan Jahja Pinto didekati dan dibujuk agar melancarkan gerakan yang sama di Sumatera Timur, di Medan pada khususnya.²⁴ Memperhatikan hubungan-hubungan ini, tidak mustahil telah tercapai kesesuaian paham di antara beberapa ulama radikal yang menghadiri konferensi di Medan tersebut bahwa adanya perlawanan fisik terhadap suatu pemerintahan bukan-Islam di Jakarta pada akhirnya tidak akan terhindarkan, kendati konferensi itu sendiri hanya menganjurkan cara-cara parlementer saja.

Persiapan militer juga memperlihatkan kemajuan pada pertengahan tahun 1953. Hasan Ali mendekati perwira-perwira Aceh di Sumatera Timur dan Tapanuli, dan berhasil memperoleh dukungan kuat mereka atas rencana pemberontakan. Pada awal Agustus 1953, ia memimpin rapat dengan perwira-perwira Aceh ini di Binjai, kira-kira dua puluh

22. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

23. Dari surat Daud Beureuh kepada Kartosuwirjo dapat diketahui bahwa dakwah itu juga telah dikirimkan ke Sumatera Timur. Dakwah inilah yang barangkali terkenal sebagai *Pedoman Dharma Bakti* yang juga disebarkan di Sulawesi Selatan; lihat Matlloe, *op. cit.*, hal. 38.

24. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973.

kilometer dari Medan, untuk membahas strategi dan tanggal pemberontakan. Rapat yang berlangsung di rumah seorang patih dari Kabupaten Langkat A.R. Hadjat²⁵ yang berasal dari Aceh itu dihadiri oleh sejumlah perwira, termasuk Mayor Hasballah Hadji, pada waktu itu Komandan Komando Militer Medan, dan Letnan Ibrahim Saleh, seorang komandan kompi di Sidikalang, serta beberapa perwira lainnya. Rapat tersebut memutuskan bahwa para pemimpin Aceh akan mengumumkan pembentukan NII di Aceh pada tanggal 21 September 1953. Ditetapkan pula bahwa sehari sebelumnya perwira-perwira Aceh akan membantu gerakan ulama Sumatera Timur dengan menangkap sejumlah pemimpin nasional, termasuk Presiden Soekarno, yang dijangka akan menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional.²⁶ Juga diputuskan bahwa dua kompi tentara Aceh akan ditarik ke Aceh untuk membantu gerakan militer di sana.²⁷

Hasil pertemuan itu memang merupakan suatu strategi yang berbeda dari apa yang semula dipikirkan para pemimpin Aceh. Adalah jelas bahwa para perwira militer Aceh tersebut sedang merencanakan suatu kudeta melawan pimpinan nasional, sementara kaum ulama hanya merencanakan untuk memisahkan Aceh dari Jakarta dan menggabungkannya dengan NII. Untuk mencapai tujuan mereka, para ulama merencanakan untuk menguasai Aceh melalui mobilisasi kekuatan pedesaan melawan konsentrasi militer pemerintah di daerah perkotaan. Mereka percaya bahwa sukar untuk melancarkan pemberontakan dari Kutaraja sebab tidak mungkin mereka dapat menguasai kendali militer setempat tanpa memiliki senjata yang cukup. Dengan menyandarkan diri pada strategi tradisional untuk menguasai kota dengan kekuatan pedesaan, pemimpin-pemimpin Aceh mengharapkan bahwa Kutaraja akan segera jatuh setelah mereka dapat merebut senjata di kota-kota lainnya. Di lain pihak, para perwira itu bukannya menolak strategi ulama-ulama tersebut, melainkan agaknya lebih suka melancarkan pemberontakan dari tengah-tengah kota dengan harapan, jika tindakan itu berhasil, Aceh tidak akan terpisah dari Jakarta dan tidak pula bergabung dengan Darul Islam Kartosuwirjo. Dengan tindakan ini perwira-perwira tersebut mengharapkan

25. *Mestika*, 20 September 1953.

26. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973 dan 19 November 1975.

27. *Mestika*, 30 September 1953.

akan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebijaksanaan terhadap daerah, dan pemerintahan dapat dipegang oleh pemimpin-pemimpin Islam.

Namun apa yang terjadi adalah bahwa bukan hanya rencana Sumatera Timur itu gagal, malah para pemberontak itu pun tidak pula berhasil merebut kota-kota di Aceh. Karena para pemimpin PUSA tidak pernah membayangkan kegagalan demikian, timbul pertanyaan mengapa strategi itu gagal, dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Secara umum, pertama-tama dapat dikatakan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa sampai pecahnya pemberontakan itu mereka belum betul-betul siap dalam arti militer, meskipun daya juang mereka sangat tinggi. Para organisator sendiri mengalami pukulan keras pada tahap akhir, yaitu berupa keputusan yang diambil oleh para perwira Aceh untuk membatalkan keikutsertaan mereka hanya seminggu sebelum pemberontakan diletuskan. Pembatalan ini tidak hanya menggagalkan pelaksanaan rencana Sumatera Timur itu sendiri, melainkan juga menghambat gerakan Aceh untuk menguasai kekuatan militer nasional. Dalam hubungan ini, hanya Ibrahim Saleh bersama kompiunya saja yang kembali ke Aceh. Di samping itu, perlunya hubungan luar negeri belum pula dipikirkan, sehingga kaum pemberontak tidak dapat mengharap adanya pengiriman senjata dari negara lain.²⁸

Kedua, kerahasiaan gerakan menimbulkan kesulitan-kesulitan komunikasi dan pengkoordinasian pemberontakan itu sendiri. Kesukaran-kesukaran dalam komunikasi telah mempengaruhi koordinasi pada tahap akhir, sebelum pemberontakan itu dimulai, sehingga menimbulkan kegagalan untuk melancarkan pemberontakan secara serentak di seluruh daerah sebagaimana yang telah direncanakan. Kaum pemberontak di Aceh Timur telah memulai aksi mereka pada senja tanggal 19 September, dua hari sebelum Daud Beureueh akan merencanakan untuk memproklamasikan gerakan Darul Islam. Hal ini mempengaruhi unsur pemberontak di kabupaten terdekat, Aceh Utara, yang ketika mengetahui bahwa pemberontakan telah pecah di Aceh Timur, segera menyerang Lhokseumawe pada malam yang sama. Barangkali kembalinya Kapten Hasan Saleh, seorang perwira yang baru saja menyelesaikan tugas di Indonesia Timur, oleh para organisator pada

28. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

tingkat kabupaten dipahami sebagai tanda untuk mulai bergerak.²⁹ Inisiatif ini menimbulkan keragu-raguan di kalangan beberapa pemimpin pemberontak, yang sedang berada di Medan, sebab mereka telah lebih dahulu diberi tahu bahwa gerakan tersebut tidak akan dimulai sebelum tanggal 21 September.

Tentu saja ini merupakan suatu kesalahan yang fatal. Awal pemberontakan yang dilancarkan terlalu dini itu dengan sendirinya menyebabkan penguasa militer di Kutaraja waspada. Pada tanggal 20 September segera dilancarkan operasi militer di Kutaraja sehingga menyebabkan para pemimpin pemberontakan setempat meninggalkan kota itu, dan melupakan rencana mereka semula untuk menguasai bangunan-bangunan penting. Sebenarnya sudah direncanakan bahwa stasiun radio Kutaraja akan direbut, kemudian kaum pemberontak akan menyiarkan proklamasi NII, sementara cabang Bank Indonesia setempat telah siap pula menyerahkan hartanya kepada para pemberontak pada tanggal 21 September.³⁰ Memang, pelaksanaan pemberontakan yang lebih awal dari jadwal bukan hanya memungkinkan penguasa di Kutaraja untuk mencegah pembacaan proklamasi dan penguasaan Bank Indonesia oleh para pemberontak, tetapi juga untuk melawan usaha sisa-sisa prajurit Aceh dalam resimen setempat yang berniat memberikan senjata kepada kaum pemberontak. Oleh sebab itulah proklamasi tidak berlangsung di Kutaraja tetapi di kampung Indrapuri. Peristiwa di Indrapuri ini dihadiri oleh Daud Beureueh, Hasballah Indrapuri, Hasan Ali, Sulaiman Daud, Ismail Yakub, dan beberapa pemimpin lainnya. Di sinilah dibacakan teks proklamasi dan "Keterangan Politik".³¹

Faktor ketiga yang mungkin juga turut menyebabkan kaum pemberontak gagal menguasai Aceh sepenuhnya adalah kenyataan bahwa para organisator pemberontakan tersebut kekurangan waktu. Rencana mereka agaknya telah bocor ke tangan pemerintah pada bulan Mei 1953, sehingga mereka hanya punya waktu empat bulan untuk persiapan akhir. Dalam suatu razia di Jakarta, pemerintah berhasil menangkap Abdul Fatah yang baru saja tiba dari Aceh dalam perjalanannya kembali ke

29. Wawancara dengan Zaini Bakri, Kutaraja, 22 Oktober 1975.

30. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

31. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 6 November 1975. Menurut Hasan Ali, naskah "Keterangan Politik" ditulis oleh Ismail Jakub.

Jawa Barat. Melalui Abdul Fatah pemerintah memperoleh informasi mengenai hubungan antara Daud Beureueh dengan Kartosuwirjo. Utusan yang dikirim Daud Beureueh, Iljas Leube, berhasil menyelamatkan diri dalam operasi penangkapan itu. Akan tetapi dokumennya, termasuk surat Daud Beureueh kepada Kartosuwirjo yang memperkuat dukungannya bagi Darul Islam,³² berhasil disita pemerintah. Kemudian, dalam pengadilan, Abdul Fatah menceritakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di Aceh.³³

Pemerintah Pusat sangat terkejut akan rencana Aceh itu, namun tidak memiliki rencana untuk melakukan penangkapan besar-besaran di sana. Sebagai gantinya, Kabinet Wilopo berusaha membujuk para pemimpin Aceh agar melupakan rencana mereka. Percaya bahwa mereka mendekati Kartosuwirjo sebagai akibat dari kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Pusat, maka pemerintah sekali lagi mencoba mendekati Daud Beureueh dengan mengangkatnya kembali pada kedudukannya di Kementerian Dalam Negeri, yang semula telah dicabut oleh Kabinet Sukiman.³⁴ Di samping itu, pada akhir Juli, sebelum terbentuknya Kabinet Ali yang pertama, Wakil Presiden Hatta meninggalkan Jakarta menuju Aceh untuk berbicara dengan Daud Beureueh. Akan tetapi, setelah berbicara selama dua jam dalam pertemuan di Kutaraja itu, baik Hatta maupun Daud Beureueh tidak bersedia memberikan keterangan apa pun.³⁵ Menurut suatu sumber, pada pertemuan tersebut Daud Beureueh menyindir Hatta bahwa Pemerintah Pusat terdiri atas orang-orang Hindu. Daud Beureueh juga menanyakan Hatta tentang maksud-maksud pemerintah mengangkatnya kembali dalam kedudukan gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dan Hatta hanya menjawab, "Demi kebaikan kita bersama". Juga dilaporkan bahwa Daud Beureueh membantah bahwa ia akan memberontak.³⁶ Sebuah sumber lain malah mengatakan, Daud Beureueh berjanji kepada Hatta bahwa tindakan demikian tidak akan pernah dilakukan olehnya.³⁷

32. Wawancara dengan Muhammad Diah Hadji, Jakarta, 3 Juli 1975, dan dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

33. Dada Meuraxa, *Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Medan: Pustaka Sedar, 1956), hal. 32. Lihat juga, *Indonesia Raya*, 8 September 1953.

34. *Tegas*, 12 Juni 1953.

35. *Ibid.*, 4 Agustus 1953.

36. Meuraxa, *Atjeh 1000 Tabun*, hal. 107-108.

37. *Indonesia Raya*, 26 September 1953.

Memandang masalah ini dari perspektif lain, kita juga harus menanyakan mengapa Pemerintah Pusat tidak mengambil suatu tindakan terhadap para pemimpin PUSA? Tidakkah pada waktu itu Pemerintah percaya bahwa Aceh akan bergabung dengan gerakan Darul Islam? Apakah Pemerintah percaya bahwa pemimpin-pemimpin PUSA akan meninggalkan rencana mereka karena berharap bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mengambil sesuatu tindakan terhadap mereka? Tampaknya Kabinet Wilopo sama sekali tidak bermaksud untuk menindak para pemimpin Aceh. Bahkan untuk mempertimbangkan tindakan demikian saja mungkin akan mengandung risiko pecahnya kabinet yang terutama didukung oleh koalisi PNI-Masyumi, dan kini mendekati keruntuhannya itu. Barangkali Wilopo percaya bahwa apabila kabinetnya yang baru berumur setahun itu mengambil tindakan keras terhadap Aceh ketika kabinet sedang sibuk dengan masalah militer dan kedaerahan, dia akan menghadapi risiko kejatuhan kabinet. Tindakan seperti itu akan melibatkan dirinya dalam suatu benturan langsung dengan Masyumi. Masyumi tidak akan membiarkan dijatuhkannya hukuman terhadap para pemimpin Aceh oleh kabinet di mana ia menjadi bagiannya, apa lagi ketika pemilihan umum akan berlangsung, sebab hal itu akan membahayakan kepentingan partai di daerah tersebut.³⁸ Upaya maksimal yang dapat dilakukan kabinet adalah mengirim Hatta untuk berunding dengan para pemimpin Aceh sebelum terbentuknya sebuah kabinet lain.

Sekalipun ragu-ragu mengambil tindakan tegas, jelas bahwa kabinet melakukan beberapa tindakan pencegahan di daerah itu. Menjelang bulan Juni, penguasa militer di Kutaraja menghancurkan empat puluh tujuh ton bom tua peninggalan Jepang³⁹ agar tidak digunakan oleh unsur-unsur "yang telah diinfiltrasi Darul Islam". Polisi juga mengambil langkah-langkah kewaspadaan. Seakan-akan kehilangan kepercayaan terhadap bawahan-bawahan asli Aceh yang selalu melaporkan bahwa situasi pada umumnya aman, Kepala Kepolisian Sumatera Utara

38. Pemimpin-pemimpin tertentu Masyumi sudah mengetahui kegiatan para pemimpin Aceh bahkan sebelum Kabinet mengetahui sesuatu apapun mengenainya; wawancara dengan Nur el-Ibrahimi, Jakarta, 7 Oktober 1975. Pada kenyataannya, Kabinet Wilopo demisioner pada awal Juni 1953, namun tetap menjalankan kekuasaan sampai akhir Juli, yaitu beberapa minggu setelah gerakan Aceh ini bocor.

39. *Tegas*, 27 Juni 1953.

melakukan inspeksi ke Aceh pada akhir Juni.⁴⁰ Sekembali di Medan, ia segera mengirimkan tiga ratus anggota Brimob ke Aceh. Pada bulan-bulan berikutnya, pasukan Brimob mengadakan "latihan" di beberapa kota di Aceh. Tindakan kewaspadaan ini memang dapat dipahami, terutama setelah Pemerintah Pusat berhasil menyingkapkan rencana Aceh itu.

Untuk dapat lebih memahami langkah-langkah kewaspadaan yang telah dilakukan oleh penguasa setempat, di sini perlu agaknya diketengahkan bagaimana situasi menjelang pemberontakan. Secara singkat, situasi tersebut dapat digambarkan sebagai suatu "perang dingin". Keadaan sangat tegang, seakan-akan PUSA dan penguasa setempat sedang terlibat dalam "permainan kucing dan tikus". Sementara unsur-unsur yang pro-pemerintah terus sibuk dengan penyebaran pamflet-pamflet anti-PUSA, surat-surat kaleng kepada orang-orang tertentu, dan surat terbuka kepada pimpinan nasional, para pejabat pro-PUSA tetap mengatakan bahwa keadaan aman-aman saja. Di lain pihak, yang mengherankan adalah bahwa penguasa militer juga menegaskan bahwa situasi di daerah itu normal, meskipun diakui adanya infiltrasi unsur-unsur Darul Islam.⁴¹ Namun dalam kenyataannya, beberapa pemimpin PUSA sedang melakukan pengambilan sumpah terhadap penduduk agar tetap setia kepada Negara Islam yang akan muncul,⁴² dan pada akhir Agustus di Aceh tersebar naskah proklamasi Kahar Muzakkar yang telah menggabungkan gerakannya ke dalam NII pada awal Agustus 1953.⁴³ Tambahan lagi, di Takengon rakyat beramai-ramai membeli parang atau pisau, di samping mengumpulkan beras dan garam, yang dipandang sebagai persiapan bagi pemberontakan. Komandan Polisi di Aceh menggambarkan keadaan politik di Aceh Tengah, Utara, dan Pidie itu sebagai hampir liar.⁴⁴

Di Jakarta, pelantikan kabinet baru pada awal Agustus 1953 tidak memancarkan perubahan kebijaksanaan pemerintah terhadap Aceh. Seperti kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Pertama, yang didominasi PNI

40. *Gelora Massa*, 1 Juli 1953.

41. *Mestika*, 15 September 1953; dan *Tegas*, 15 September 1953.

42. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan N.V., 1956), hal. 8.

43. *Mestika*, 2 September 1953.

44. *Tegas*, 12 September 1953.

dan mengucilkan Masyumi, tidak mengambil mengambil suatu tindakan tegas terhadap para pemimpin PUSA pada tahap ini. Kebisuan kabinet atas rencana Aceh yang telah bocor itu tampaknya memberi petunjuk bahwa Pemerintah Pusat tidak yakin Aceh sedang mengarah ke pemberontakan. Akan tetapi secara diam-diam kabinet berusaha untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang gerakan itu. Selama bulan Juli dan Agustus, beberapa pejabat telah dikirim oleh Jaksa Agung untuk menyelidiki dan menilai situasi. Di pihak lain, dengan memperhatikan kenyataan bahwa pasukan polisi dan militer ada dalam keadaan waspada penuh selama bulan Agustus dan awal September, sikap demikian menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan pemerintah. Beberapa hari sebelum meletusnya pemberontakan, unit-unit militer di Kutaraja telah disiap-siagakan, sementara pasukan polisi di kota-kota lainnya juga dalam keadaan waspada.⁴⁵ Dari fakta ini mungkin dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak berhasrat mencegah pemberontakan itu meletus, dan lebih suka mempersiapkan diri untuk melancarkan suatu serangan akhir yang mematikan terhadap PUSA.⁴⁶ Bila memang demikian halnya, apakah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mendorong pemimpin-pemimpin PUSA untuk memberontak? Pertanyaan ini akan dijawab nanti.

Sebab dan Penjelasan

SALAH SATU kenyataan paling mencolok tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah nasional mereka adalah bahwa pemberontakan itu meletus kurang dari empat tahun sesudah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Dengan memperhatikan besarnya sumbangan yang diberikan rakyat Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan nasional, agaknya terasa mengherankan bahwa rakyat yang begitu setia kepada Pemerintah Pusat pada saat yang sangat kritis dalam masa revolusi, segera berbalik menentanginya setelah kemerdekaan tercapai. Kita mungkin begitu saja menarik kesimpulan bahwa akar perlawanan itu adalah kurangnya solidaritas nasional antara rakyat Aceh dan rakyat Indonesia lainnya sebagai akibat dari pengalaman sejarah mereka.⁴⁷ Pen-

45. *Ibid.*, 14 September 1953; dan *Mestika*, 14 September 1953.

46. Saya mempunyai pendapat yang sama dengan kolumnis *Indonesia Raya*, Hajsim Mahdan, dalam "Tinjauan Dalam Negeri", 29 September 1953.

47. M.A. Nawawi, "Regionalism and Regional Conflicts in Indonesia" (disertasi Doktor, Princeton University, 1968), hal. 342.

jelasan demikian tentu saja sangat tidak memuaskan, karena, seperti telah kita lihat, kurangnya identitas nasional tidak menjadi penghalang bagi rakyat Aceh dalam memberikan dukungan kepada revolusi nasional.

Isolasi Aceh dari bagian-bagian Indonesia lainnya selama masa kolonial sudah pasti menghambat mengalirnya proses "Indonesianisasi" ke daerah itu, dan kelak menyebabkan kurangnya solidaritas nasional antara rakyat Aceh dan orang Indonesia lainnya.⁴⁸ Akan tetapi, hal ini tidaklah berarti bahwa proses Indonesianisasi sama sekali tidak menyentuh Aceh. Seperti telah disinggung dalam Bab sebelumnya, meskipun kenyataannya Belanda telah menutup rakyat Aceh dari pengaruh luar demi politik *rust en orde* kolonial, sebuah jendela yang kecil ternyata dibiarkan tetap terbuka. Sejarah wilayah ini memperlihatkan bahwa proses Indonesianisasi terbatas yang dialami rakyat Aceh itu telah memungkinkan mereka menjadi salah satu lambang keberanian yang berhasil dalam revolusi nasional.

Sampai tahap tertentu, pengalaman rakyat Aceh sama dengan pengalaman rakyat Bali, yang nilai-nilai agama dan adatnya juga dipelihara oleh Belanda. Namun demikian, berlainan halnya dengan rakyat Aceh, rakyat Bali tidak menentang Pemerintah Pusat setelah revolusi. Dapatkah dengan demikian kita mengatakan bahwa pengalaman historis rakyat Bali tidak menghasilkan rasa identitas nasional, dan karena itu mereka tidak memiliki akar perlawanan yang sama? Tentu saja tidak demikian halnya. Adalah jelas bahwa dalam berurusan dengan rakyat Bali Pemerintah Pusat telah bertindak sebagai suatu "aximizer", meminjam terminologi David Apter, "yang mengirimkan arus kepuasan".⁴⁹ Dalam hal ini, selain memusatkan kegiatan Propinsi Nusa Tenggara di Bali, yang tentu saja memberi sejumlah keuntungan kepada rakyat Bali, pada tahun 1950-an Pemerintah Pusat terus melindungi agama dan tradisi Bali, terutama dari pengaruh Islam dan Kristen. Jadi, rakyat Bali relatif merasa puas.

Memang, perkembangan rasa kecewa -- yaitu, frustrasi, alienasi, perasaan terdesak, serta ketegangan -- berikut politisasinya, biasanya merupakan penyebab utama suatu perlawanan politik.⁵⁰

48. Insider, *Atjeh Sepintas Lalu* (Jakarta: Archapada, 1950), hal. 76.

49. David E. Apter, *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1968), hal. 23.

50. Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton, New Jersey: Princeton University

Namun kekecewaan semata-mata tidak akan mengarahkan seseorang kepada kekerasan politik, kecuali bila berkembang dalam lingkungan politik yang sejalan. Gurr mengemukakan bahwa kekecewaan akan mendorong orang pada tindakan politik "bilamana sikap dan kepercayaan mereka menjuruskan kekecewaan itu pada obyek-obyek politik, dan jika susunan kelembagaan cukup lemah, atau organisasi oposisi cukup kuat, untuk memberikan kekuatan kepada orang yang kecewa".⁵¹ Sangat sejalan dengan Gurr, Coser membedakan konflik atas dua bentuk: "realistik" dan "non-realistik". Menurut Coser, pertikaian yang realistik "tumbuh dari frustrasi akan tuntutan spesifik dalam hubungan yang ada dan dari keuntungan yang diperhitungkan oleh orang-orang yang terlibat, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan". Sedangkan konflik non-realistik "tidak disebabkan oleh tujuan yang bersaing dari para petikai, melainkan oleh kebutuhan akan pelampiasan ketegangan ... pilihan para petikai tergantung pada penentu-penentu yang tidak secara langsung berkaitan dengan masalah yang dipersengketakan dan tidak berorientasi pada pencapaian hasil yang jelas".⁵² Memperhatikan latar belakang konstelasi politik di Aceh, yang secara mencolok ditandai oleh konflik antara unsur-unsur ulama dan *ulebalang*, maka ada manfaatnya bagi kita untuk mengikuti pembedaan ini.

Dalam studinya tentang masyarakat Simalungun di Sumatera Utara, dalam hubungan dengan masalah pembelahan horisontal, Liddle menemukan bahwa meskipun penduduk setempat mengidentifikasi diri secara kuat dengan kesetiaan kelompok etnis, mereka sama sekali tidak terisolasi dari afiliasi supralokal. Sementara masyarakat ini dibelah oleh rasa kesukuan, akan tetapi kesetiaan-kesetiaan suku itu sendiri telah disilang oleh agama, pertentangan-pertentangan yang berdasarkan pada

Press, 1970), hal. 12-13. Di dalam mengembangkan modelnya, Gurr menyebut kedua proses kekerasan politik ini, kekecewaan dan politisasinya, sebagai "kekerasan kolektif potensial" dan "kekerasan politik potensial". Dia mendefinisikan kekerasan kolektif potensial sebagai "suatu fungsi dari jauh dan dalamnya kekecewaan yang dirasakan bersama oleh anggota suatu masyarakat" dan kekerasan politik potensial sebagai "suatu fungsi dari tingkat sejauh mana kekecewaan disalurkan pada sistem politik dan agen-agennya"; *ibid.*, hal. 8.

51. *Ibid.*, hal. 155.

52. Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1968), hal. 49.

sifat kedaerahan, dan identitas nasional.⁵³ Dengan demikian, penemuan Liddle memberikan bukti terhadap asumsi bahwa makna kesukuan sebagai sumber konflik telah digantikan oleh pembelahan-pembelahan lain, terutama pembelahan yang bersifat regional dan ideologis. Dalam cakupan yang lebih luas, semenjak sebelum perang, perpecahan ideologis terwujud dalam bentuk debat antara penganjur Islam sebagai basis negara Indonesia yang merdeka, dan penganjur negara sekular.⁵⁴ Sesungguhnya pembelahan ini membayangi konflik antara daerah-daerah yang umumnya muslim di luar Jawa dan masyarakat santri Jawa di satu pihak dengan masyarakat Jawa abangan dan kelompok-kelompok bukan-Islam lainnya di lain pihak. Pembelahan yang berdasarkan regionalisme umumnya mengambil bentuk permusuhan yang meluas antara Jawa dan luar Jawa, yang timbul dari suatu kombinasi rumit dari masalah-masalah sosial, kultural, politik, dan ekonomi.⁵⁵ Dalam pandangan Pemerintah Pusat, pembelahan regional ini dengan mudah disebut sebagai rasa kedaerahan atau propinsialisme, yang mengarah pada keterikatan rakyat di luar Jawa yang kuat terhadap daerah atau propinsi mereka.

Sementara tidak diragukan bahwa pembelahan regional dan ideologis memainkan peranan di dalam mengilhami rakyat Aceh untuk menentang Pemerintah Pusat, keadaan di sana tidaklah sebanding dengan situasi yang ditemukan Liddle di Simalungun. Di Aceh, kesukuan tetap sangat penting, sebab orang Aceh merupakan kelompok etnis yang dominan di daerah itu, selain karena daerah tersebut, sejauh masa yang dicakup oleh buku ini, hampir terisolasi secara total dari pengaruh luar sehingga men-

53. R. William Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration* (New Haven dan London: Yale University Press, 1970), hal. 59-64.

54. Untuk kajian yang cukup mendalam tentang perdebatan ini, lihat Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan: Dwipa, 1965), jilid I, hal. 119-135. Makna perdebatan ini diperlihatkan oleh perpecahan di dalam Sarekat Islam pada tahun 1921, ketika beberapa pemimpinnya yang lebih menyenangi sekularisme daripada Islam meninggalkan partai itu dan mendirikan Perserikatan Komunis Indonesia (PKI), yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia. Pada akhir tahun 1930-an sampai awal 1940-an, pembelahan ideologis ini lebih banyak terlihat dalam polemik antara Soekarno, yang menyukai sekularisme, dan Muhammad Natsir yang mempertahankan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

55. Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Ithaca, New York: Cornell University, 1966), hal. 3.

jadikan rakyat Aceh sangat propinsialis. Rasa kesukuan yang begitu kuat di kalangan rakyat Aceh tidak menjadikan Islam sebagai kaitan efektif yang menjembatani rakyat Aceh dengan kelompok etnis muslim lainnya di Indonesia. Solidaritas Islam memang menyentuh hati rakyat Aceh, namun solidaritas ini tetap ditundukkan pada kesetiaan kepada daerah, yang merupakan campuran dari kepentingan-kepentingan etnis dan agama. Oleh sebab itu, kendatipun rakyat Aceh merupakan pendukung kuat sejumlah partai Islam, kesetiaan mereka, sebagaimana telah kita lihat, tidak tertuju pada partai-partai tersebut melainkan pada daerah mereka sendiri.

Namun begitu, tidak ada jawaban sederhana bagi pertanyaan mengapa rakyat Aceh memberontak terhadap kekuasaan Pemerintah Pusat. Kedua kekuatan yang berlawanan itu, Pemerintah Pusat dan Darul Islam, mempunyai versi masing-masing tentang sebab pemberontakan tersebut. Tampak jelas dalam pernyataan pemerintah kepada Parlemen pada tanggal 28 Oktober 1953, sekitar sebulan sesudah pemberontakan tersebut meletus, bahwa Pemerintah Pusat menolak bertanggung jawab atas peristiwa itu. Pemerintah Pusat mengemukakan bahwa para pemimpin PUSALah yang menyebabkan berkembangnya konflik dengan Pemerintah Pusat karena mereka sedang terdesak dalam pertarungan yang berkepanjangan dengan kaum *ulebalang*, dan berputus asa atas penyelesaiannya.⁵⁶ Alasan ini sangat didukung oleh tuntutan kaum *ulebalang* bahwa para pemimpin PUSALah yang memperjuangkan otonomi Aceh demi melindungi diri mereka sendiri dari tuduhan pihak pertama sehubungan dengan perbuatan mereka selama revolusi. Jadi, dalam istilah Coser, Pemerintah Pusat memandang pemberontakan itu sebagai konflik non-realistis.

Bagi para pemimpin Darul Islam, sebaliknya, pemberontakan itu merupakan konflik yang realistis. Mereka menolak setiap alasan yang melihat perlawanan itu sebagai sesuatu transformasi sengketa antara mereka dan unsur-unsur *ulebalang*. Mereka mengemukakan bahwa konflik tersebut merupakan masalah antara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat. Keterangan Politik yang dikeluarkan gerakan itu pada awal pergolakan menegaskan bahwa pemberontakan tersebut menyalurkan aspirasi rakyat Aceh untuk mendirikan sebuah Negara Islam. Dalam

56. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 18-31.

kaitan ini, sekalipun ternyata penuh dengan argumentasi keagamaan, pernyataan ini jelas juga menampung perasaan kedaerahan berkenaan dengan pengabdian Aceh dalam hal perkembangan ekonomi, sosial, dan politik.⁵⁷

Untuk mengetahui apakah perlawanan tersebut merupakan suatu konflik langsung atau tidak langsung antara kekuatan-kekuatan lokal dan Pemerintah Pusat atau, dalam istilah Coser, realistik atau non-realistik, maka perlu ditentukan lebih dahulu faktor-faktor internal dan eksternal yang mungkin penting untuk menentukan sebab-sebab utama pemberontakan. Berbeda dari situasi di beberapa daerah lainnya, perkembangan politik di Aceh sesuai revolusi nasional, jika dilihat dalam konfigurasi politik setempat, tampaknya merupakan proses berlanjut yang tidak dapat dipisahkan dari transformasi konfigurasi politik yang terjadi selama revolusi dan bahkan sebelumnya. Tiga perkembangan pokok secara dramatis menguasai arena politik segera sesudah revolusi usai. Pertama, walaupun PUSA berhasil mengendalikan daerah itu sesudah penggulingan kaum *ulebalang* beserta pendukung mereka dalam Gerakan Said Ali, keadaan politik pada masa sesudah revolusi menyingkapkan bahwa PUSA bukan tidak mempunyai penentang. Meskipun rezim PUSA bisa bertahan, perlawanan dari unsur-unsur *ulebalang* dan sekutu mereka dalam masyarakat Aceh bukannya tidak penting.

Kedua, keadaan selepas revolusi sebenarnya hanya mentransformasikan bipolarisme ulama-*ulebalang* menjadi suatu pengelompokan politik segi tiga. Berakhirnya revolusi bukan hanya menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan anti-PUSA di kalangan kekuatan pro-*ulebalang*, melainkan juga mendorong ulama tradisional non-PUSA ke dalam kegiatan-kegiatan politik formal; mereka bergabung dalam partai Islam yang berpusat di Sumatera Barat, Perti. Langkah ini memang merupakan suatu perkembangan yang sangat penting, sebab memancing ambisi ulama-ulama non-PUSA untuk menentang kepemimpinan politik PUSA. Dipelopori oleh dua ulama terkenal, Hasan Krueng Kalee dari Kutaraja dan Habib Muda Wali dari Aceh Selatan, Perti berkembang dengan pesat di daerah itu pada awal dasawarsa 1950-an. Kendatipun gagal memecah dominasi PUSA (atau Masyumi) dalam berbagai kegiatan keagamaan dan politik di sana, partai ini memiliki pendukung cukup

57. Lihat "Keterangan Politik" Darul Islam.

besar, terutama di kabupaten-kabupaten di pantai barat. Kegiatan-kegiatannya seusai revolusi dapat dilihat dengan jelas. Meskipun dalam banyak hal Perti tidak menentang PUSA secara langsung seperti diperlihatkan dalam gerakan Said Ali dan BKR pada tahun 1948 dan 1951, pada tahun 1950 ulama-ulama tradisional ini menentang PUSA secara terbuka.⁵⁸

Yang ketiga, dan merupakan faktor yang paling penting, adalah pengalihan dukungan pemerintah dari para pemimpin PUSA kepada lawan-lawan mereka, terutama kepada sisa-sisa *ulebalang*. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat lebih menyukai kaum *ulebalang* daripada pemimpin-pemimpin PUSA. Pada kenyataannya, kabinet-kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo pada periode 1950-1953 hanya berhasrat pada pelemahan peranan politik PUSA. Kita sudah melihat dalam bab sebelumnya bahwa segera sesudah perlawanan fisik terhadap Belanda berhenti, PUSA mengalami beberapa pukulan dari Pemerintah Pusat, yakni dalam bentuk pengeluaran para pemimpinnya dari posisi-posisi pemerintahan, dan penarikan semua unit militer Aceh dari daerah itu. Kita juga telah menyaksikan bahwa Pemerintah Pusat tidak bermaksud untuk mengganti para pejabat yang berorientasi pada PUSA dengan mereka yang berasal dari fraksi *ulebalang*.

Perubahan sikap Pemerintah Pusat pada awalnya barangkali didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar ketidaksukaan terhadap para pemimpin PUSA belaka. Ketika itu Pemerintah Pusat sedang memusatkan perhatian pada masalah konsolidasi pemerintahan di seluruh Nusantara, khususnya yang menyangkut struktur pemerintahan lokal. Sayangnya, salah satu sekutu-lokal yang setia selama revolusi telah menghalangi secara tegas. Karena rakyat Aceh menentang konsolidasi ini, para pemimpin nasional pun merasa dipermalukan dan, sebagai akibatnya, berusaha mengurangi pengaruh politik PUSA di daerah itu. Dengan tindakan yang demikian, Jakarta tidak hanya mengeluarkan beberapa pemimpin inti PUSA dari jabatan-jabatan pemerintahan, tetapi juga berkawan dengan lawan-lawan PUSA.

Sama sekali tidak sulit bagi Pemerintah Pusat untuk menggunakan

58. Suatu waktu pada pertengahan tahun 1950, dua pemimpin Perti, Teungku Makam dan Teungku Abdussalam Meuraksa, pergi ke Jakarta dan mendesak Pemerintah Pusat agar tidak memperkuat keberadaan Propinsi Aceh. Lihat *Waspada*, 7 Oktober 1950.

kekuatan-kekuatan setempat guna menentang PUSA, sebab usaha-usaha seperti ini memang sejalan dengan cita-cita kaum *ulebalang* yang juga sedang mencari sekutu pada tingkat nasional. Sebagaimana yang telah kita lihat, unsur-unsur *ulebalang* ini telah meneruskan kegiatan anti-PUSA sejak bulan-bulan terakhir tahun 1949 dengan menghubungi beberapa politisi nasional di Jakarta. Kenyataan bahwa para politisi ini telah memberikan tanggapan positif kepada kaum bangsawan bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan. PNI dan unsur-unsur nasionalis lainnya dalam lingkungan pemerintahan di Jakarta tentu saja memahami, baik melalui hubungan mereka dengan rakyat Aceh pada masa revolusi maupun suara-suara para pemimpin Aceh sendiri yang begitu jelas, bahwa PUSA merupakan kekuatan daerah yang kuat, yang menginginkan layanan istimewa bagi Aceh sebagai balasan atas perannya dalam revolusi. Oleh sebab itu, merupakan suatu hal yang jelas bagi para pemimpin nasionalis ini bahwa PUSA mungkin sekali menjadi oposisi yang kuat terhadap cita-cita Pemerintah Pusat untuk menegakkan kewibawaannya di daerah-daerah. Bila ditinjau dari sudut ini, maka kelangsungan kegiatan kaum *ulebalang* itu merupakan durian runtuh bagi para pemimpin pusat, sebab kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasionalis untuk menjadi Kuda Troya dalam pertikaian ulama-*ulebalang*.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para bangsawan telah menciptakan intrik antara mereka dan beberapa unsur nasionalis dalam Pemerintah Pusat. Intrik ini relatif mudah berkembang, bukan hanya karena adanya kepentingan bersama untuk menghancurkan hegemoni PUSA di daerah itu, tetapi juga karena hubungan pribadi yang baik di antara kedua unsur itu telah terjalin dan tumbuh sejak zaman kolonial. Umpamanya, Jaksa Agung Suprpto, pemimpin Partai Buruh, adalah salah seorang pemimpin nasionalis yang memberi tanggapan positif terhadap kaum *ulebalang*. Ia dihubungi oleh, dan kemudian berhubungan dengan, Teuku Ali Lamlagang, pemimpin BKR, yang telah dikenalnya sejak awal dekade 1920-an melalui Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada waktu itu Suprpto tinggal serumah dengan Muhammad Hasan dan beberapa mahasiswa hukum lainnya di Batavia. Meskipun pada waktu itu Ali Lamlagang sendiri bukan mahasiswa, secara teratur ia mengunjungi Batavia dan tinggal bersama Muhammad Hasan, yang memperkenalkannya kepada seorang mahasiswa hukum lainnya, Hazairin. Hazairin

kemudian menjadi pemimpin partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan menteri dalam negeri dalam Kabinet Ali yang pertama pada tahun 1953.

Bentuk kerja sama antara kaum *ulebalang* dan pemimpin-pemimpin nasionalis ini dipengaruhi oleh sifat kegiatan kaum *ulebalang*. Gambaran kegiatan kaum *ulebalang* sesuai revolusi ditandai oleh gejala bahwa para bangsawan tersebut tidak menampakkan kegetiran terhadap runtuhnya pengaruh mereka dalam sistem pemerintahan daerah. Mereka memusatkan kampanye anti-PUSA pada penyingkapan keterlibatan PUSA dalam pembunuhan dan perampasan kekayaan mereka selama revolusi. Barangkali unsur-unsur *ulebalang* ini telah memperkirakan bahwa bilamana mereka mengajukan gugatan mengenai status dan posisi mereka sendiri, maka mereka akan berhadapan dengan Pemerintah Pusat, atau setidaknya Jakarta akan menolak memperhatikan tuntutan mereka. Sudah jelas bahwa Pemerintah Pusat tidak mempunyai niat untuk menyusun sistem pemerintahan lokal dengan mengakui kekuasaan kaum bangsawan di dalamnya, kecuali di Yogyakarta. Hal ini telah diperlihatkan dalam kasus Sumatera Timur, di mana Pemerintah Pusat bersedia menyelesaikan persoalan harta benda kaum bangsawan, tetapi menolak menempatkan mereka kembali dalam pemerintahan setempat.

Oleh sebab itu, kaum bangsawan berusaha mencegah para pemimpin PUSA memperoleh dukungan lebih jauh dari pemerintah dalam konflik dengan kaum *ulebalang*, seperti yang terjadi pada masa revolusi. Usaha ini menyebabkan unsur-unsur *ulebalang* memusatkan tuduhan mereka pada aspek kriminal rezim PUSA, tentu saja dengan maksud untuk menjatuhkannya. Sementara mereka menuduh bahwa banyak pemimpin PUSA terlibat dalam kejahatan pada masa revolusi, yakni membunuh para bangsawan dan merampas harta benda mereka, unsur-unsur *ulebalang* menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak pemimpin pada tingkat nasional telah menerima manfaat dari harta itu. Dalam hal ini yang menjadi paradoks ialah bahwa salah seorang pengacara yang mengurus gugatan kaum bangsawan tersebut pada awal dasawarsa 1950-an adalah Mr. Kasman Singodimedjo, yang tidak lain merupakan tokoh penting Masyumi.

Unsur-unsur *ulebalang* bukannya menggugat Pemerintah Pusat, melainkan mencoba mempengaruhi hubungan pemerintah dan para pemimpin PUSA. Mereka menuntut agar Pemerintah Pusat mengambil

tindakan hukum terhadap pemimpin-pemimpin PUSA. Dengan demikian mereka mengharapkan terciptanya suatu konfrontasi terbuka antara organisasi tersebut dengan pemerintah, di samping akan merendahkan kedudukan para pemimpin tersebut dalam pandangan rakyat Aceh. Dalam hubungan ini, kendatipun mereka mengumumkan dalam surat-surat kabar nama-nama para pemimpin PUSA yang mereka anggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, tidak seorang pun di antara bangsawan itu mengajukan para pemimpin PUSA yang mereka tuduh itu ke pengadilan perdata. Misalnya, surat Kasman kepada Jaksa Agung pada pertengahan tahun 1950 jelas memperlihatkan bahwa kaum bangsawan lebih menyukai proses pidana daripada perdata. Hal ini karena, menurut mereka, perampasan harta itu dilakukan oleh badan pemerintahan, yaitu Majelis Penimbang.⁵⁹

Sekalipun tak dapat memenuhi tuntutan kaum *ulebalang* untuk mengambil tindakan atas dasar tindak kriminal, Pemerintah Pusat tetap turunkan tangan. Menteri Dalam Negeri (orang PNI) dari pemerintah negara bagian di Yogyakarta Susanto Tirtoprodjo, memperingatkan Daud Beureueh bahwa ia harus menyelesaikan masalah itu secara wajar. Alasan yang dianut pada tingkat nasional adalah bahwa Majelis Penimbang tidak berwenang menangani masalah harta benda itu, sebab kekuasaan yang demikian hanya ada pada Pengadilan Negeri. Pemerintah Pusat memang tidak pernah mengakui eksistensi Majelis Penimbang, dan menganggapnya sebagai badan ilegal. Sementara sikap pemerintah menimbulkan masalah keabsahan peraturan daerah yang dibuat pada masa revolusi, para ulama dan pemimpin Aceh berpendapat bahwa Majelis Penimbang mempunyai dasar hukum sebab dibentuk oleh pemerintah daerah pada tahun 1946. Oleh sebab itu Daud Beureueh mendesak Pemerintah Pusat agar lepas tangan. Ia memperingatkan bahwa tidaklah mudah untuk menyelesaikan masalah itu sebab persoalannya bukan hanya menyangkut Majelis Penimbang dan keluarga *ulebalang* saja, melainkan juga ribuan rakyat. Ia percaya bahwa pertumpahan darah tidak akan terhindarkan bila hal itu dicampuri oleh Pemerintah Pusat.⁶⁰

59. Lihat surat Mr. Kasmani Singodimedjo kepada Jaksa Agung, bertanggal Jakarta, 28 Agustus 1950.

60. Lihat surat Gubernur Daud Beureueh kepada Menteri Dalam Negeri, bertanggal Kutaraja, 5 September 1950.

Tampaknya yang menjadi masalah pokok dalam soal harta kekayaan *ulebalang* itu adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara milik pribadi dan lembaga. Sebagaimana halnya dengan sistem kerajaan yang lain, sistem Aceh juga berdasarkan prinsip *l'état c'est moi* ("negara adalah saya"), sehingga seorang *Ulebalang* menganggap semua harta benda yang ada dalam wilayahnya, termasuk rakyat, sebagai milik pribadinya. Sebenarnya milik ini terdiri atas tiga unsur: harta lembaga 'kerajaan', milik pribadi *Ulebalang*, dan berbagai harta keagamaan yang ditempatkan di bawah pengawasan *Ulebalang*. Oleh karena itu, ketika sistem *ulebalang* runtuh pada tahun 1946, semua sumber ini begitu saja diambil alih dan dilelang oleh Majelis Penimbang. Dalam hal inilah keluarga-keluarga *ulebalang* mencurigai adanya penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa pemimpin PUSA yang duduk dalam Majelis Penimbang dan pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu unsur-unsur *ulebalang* beranggapan bahwa pembentukan Propinsi Aceh pada bulan Desember 1949 dan tuntutan otonomi para pemimpin PUSA merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan penyelewengan itu, selain untuk menyelamatkan status dan kedudukan mereka. Kaum *ulebalang* percaya bahwa rakyat sama sekali tidak mempersoalkan status propinsi bagi daerah itu. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya hanya beberapa pemimpin PUSA saja yang menghendaki hal tersebut sebagai perisai terhadap kemungkinan adanya tuntutan pengadilan.⁶¹ Dengan argumentasi ini, unsur-unsur *ulebalang* menyalahkan bahwa status propinsi merupakan penyebab utama bagi para pemimpin PUSA untuk berontak. Oleh karena itu mereka percaya bahwa pemberontakan merupakan satu-satunya jalan keluar bagi pemimpin-pemimpin PUSA untuk menghindari dari tuntutan hukum.⁶²

Akan tetapi alasan tersebut tidak tepat. Bahkan jika sekiranya Propinsi Aceh tidak dibubarkan dan tidak disatukan ke dalam propinsi Sumatera Utara pada bulan Januari 1951, pemimpin-pemimpin PUSA sama sekali tidak akan dapat memanfaatkan status ini sebagai "perisai" terhadap suatu tindakan hukum. Jika dikehendaki, Pemerintah Pusat jelas dapat memecat para pejabat rezim PUSA yang dituduh itu, dan

61. Lihat surat terbuka T.T. Hanafiah dalam *Indonesia Raya*, 11 Agustus 1950; dan surat terbuka lainnya oleh Aidil Osman (nama samaran) dalam *Waspada*, 18 Desember 1950.

62. Wawancara dengan Tarmuli, Jakarta, 26 April 1976.

kemudian mengadili mereka. Di lain pihak, tidaklah diragukan bahwa para pemimpin PUSA sepenuhnya sadar akan posisi mereka. Oleh karena dalam keputusannya Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara telah menetapkan bahwa Propinsi Aceh hanya mempunyai hak untuk mengatur masalah-masalah kesehatan, sosial, perburuhan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan keuangan daerah,⁶³ menjadi jelas bahwa masalah peradilan tetap merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Jadi, sejauh menyangkut tuntutan hukum, maka otonomi tidak akan berfungsi sebagai mekanisme yang bisa melindungi para pemimpin PUSA. Tambahan lagi, jauh dari mengkhawatirkan kegiatan unsur-unsur *ulebalang*, ulama-ulama tersebut malah melanjutkan pelelangan harta benda *ulebalang* itu sampai tahun 1952.

Oleh sebab itu, dalam pengujian terhadap faktor-faktor yang mungkin telah menyebabkan pemberontakan, perlu dikemukakan bahwa hubungan PUSA dengan Pemerintah Pusat adalah jauh lebih penting daripada hubungan PUSA dengan kaum *ulebalang*. Sesudah revolusi, hubungan PUSA-*ulebalang* hanyalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan PUSA dengan Pemerintah Pusat. Tidak ada alasan bagi para pemimpin PUSA untuk menganjurkan suatu pemberontakan melawan Pemerintah Pusat hanya karena pertikaian mereka dengan kaum *ulebalang*. Mereka juga tidak perlu berontak karena pembunuhan dan perampasan yang terjadi selama revolusi. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin PUSA juga sangat sadar akan posisi mereka. Mereka percaya pada hukum tidak tertulis mengenai revolusi -- bahwa sesuatu yang terjadi dalam revolusi berada di luar jangkauan proses peradilan.⁶⁴ Kasus Sumatera Timur, di mana campur tangan pemerintah hanya dalam bentuk pengembalian harta kaum bangsawan dan pengabaian semua pembunuhan, merupakan bukti bahwa hukum revolusi dianggap berlaku di sini. Malah posisi Aceh lebih kuat daripada Sumatera Timur, sebab pada akhir Desember 1949 Sjafruddin telah mengeluarkan amnesti umum bagi seluruh rakyat Aceh yang terlibat dalam revolusi.⁶⁵

63. Lihat surat terbuka oleh M. Amin (Teuku Muhammad Amin?) dalam *Waspada*, 10-11 Oktober 1950. Kutipan dari *Waspada*, 11 Oktober 1950.

64. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973.

65. Lihat surat Gubernur Daud Beureueh kepada Menteri Dalam Negeri di Yogyakarta, bertanggal Kutaraja, 5 September 1950. Lihat juga surat Kepala Kejaksaan Aceh Hasan Ali, kepada Wakil Jaksa Agung untuk Sumatera di Bukittinggi, bertanggal Kutaraja, 5 Juli 1950.

Di lain pihak, meskipun Pemerintah Pusat hampir mendorong PUSA ke luar dari kekuasaan, para pemimpin organisasi itu agaknya tidak khawatir akan kemungkinan balas dendam dari unsur-unsur *ulebalang*, sebab Jakarta tidak mengembalikan kaum *ulebalang* ke dalam pemerintahan daerah. Tentu saja para ulama merasa dipermalukan oleh kegiatan-kegiatan kaum *ulebalang* itu, terutama hubungan kaum *ulebalang* dengan beberapa pemimpin pada tingkat nasional, tetapi mereka tetap yakin bahwa penguasa pusat tidak akan mengambil langkah-langkah keras terhadap mereka, sebab Jakarta juga berada pada posisi yang sulit. Bukan rahasia lagi jika Pemerintah Pusat juga bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh selama masa revolusi. Pemerintah Pusat tidak akan dapat menanyakan pemimpin-pemimpin PUSA mengenai harta benda kaum *ulebalang*, sebab Pemerintah Pusat tahu bahwa sebagian besar dari kekayaan itu telah disumbangkan pada revolusi, di samping sebagai hadiah bagi para pemimpin nasional yang berkunjung ke daerah itu.

Daripada memusatkan perhatian pada hubungan ulama-*ulebalang*, sekarang lebih perlu bagi kita untuk mempertimbangkan hubungan antara PUSA dan Pemerintah Pusat. Saya kira gambaran hubungan ini akan dapat mengarahkan kita pada penyebab utama pemberontakan itu yang sebenarnya. Seperti telah kita lihat, gambaran hubungan antara PUSA dan Pemerintah Pusat ditandai oleh kekecewaan yang semakin mendalam di kalangan pemimpin organisasi tersebut. Berbagai kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi pemimpin-pemimpin PUSA. Sementara kebijaksanaan-kebijaksanaan ini menimbulkan frustrasi, kenyataan bahwa tidak adanya harapan bagi mereka untuk memperbaiki posisi pun telah menyebabkan timbulnya alienasi. Karena situasi ini terus memburuk selama tahun-tahun selanjutnya, maka para pemimpin PUSA mempolitikkan dendam rakyat terhadap Pemerintah Pusat sehingga akhirnya menimbulkan pemberontakan. Oleh sebab itu, pengaruh kebijaksanaan pemerintah dan perasaan para pemimpin PUSA terhadap Pemerintah Pusat akan dipandang sebagai faktor-faktor yang menentukan dalam hubungan di antara keduanya. Hal ini karena, seperti dikemukakan dengan tepat oleh Crozier, "apa yang ada dalam pikiran pemimpin pemberontak yang potensial adalah lebih penting daripada apa yang ada di

sekelilingnya”⁶⁶ dan untuk memahami posisi para pemimpin PUSA, maka kondisi organisasi PUSA itu sendiri perlu diperhitungkan.

Secara umum, sebagaimana telah kita lihat dalam “Pendahuluan”, anggota PUSA dapat dibagi atas dua unsur, yakni ulama dan zuama. Tidak tergantung pada usia, para pemimpin dalam kubu ulama senantiasa, atau setidaknya-tidaknya dalam sebagian besar waktu mereka, terlibat dalam penyebaran dan pengajaran agama. Para pemimpin zuama, meskipun dalam banyak kasus memperoleh pendidikan agama yang baik, sangat sedikit, walaupun ada, yang mempunyai hubungan dengan urusan keagamaan. Pemimpin-pemimpin utama kubu ulama adalah Daud Beureueh, Hasballah Indrapuri, dan Ketua PUSA Abdul Wahab Seulimeum. Para pemimpin seperti Ali Hasjmy, Teuku Muhammad Amin, dan Sjah Marhaban lebih sesuai dengan gambaran kita tentang zuama.

Bukan kebetulan jika pandangan politik para pemimpin ulama dan zuama PUSA berbeda. Mengaitkan diri dengan Masyumi, dan bukan dengan partai politik Islam lainnya, kaum ulama sangat mengindahkan upaya mempertahankan dominasi Islam di daerah itu. Cita-cita utama mereka adalah melaksanakan hukum Islam sebanyak mungkin dalam masyarakat Aceh. Karena itu revolusi nasional dipandang oleh kaum ulama ini sebagai suatu kesempatan untuk memberlakukan kembali hukum Islam di daerah itu. Sebagai manifestasi pengindahan itu, maka bersama ulama-ulama tradisional non-PUSA mereka mensponsori pembentukan Mahkamah Syariah di seluruh daerah ini pada tahun 1946,⁶⁷ dan dua tahun kemudian mereka mendesak Presiden Soekarno agar menyatakan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pengindahan ini juga menyebabkan kebanyakan ulama tetap menguasai bidang agama dalam pemerintahan daerah pada masa sebelum pemberontakan. Selain Daud Beureueh, yang merintis karier dalam pemerintahan melalui Kantor Urusan Agama, dan satu atau dua fungsionaris PUSA lainnya, hampir tidak mungkin ditemukan pemimpin PUSA dengan latar belakang ulama yang terlibat dalam posisi-posisi administratif non-keagamaan pada tingkat tinggi.

66. Brian Crozier, *A Theory of Conflict* (London: Hamish Hamilton, 1974), hal. 14.

67. Lihat pernyataan yang menuntut status hukum bagi Majelis tersebut yang dikeluarkan oleh beberapa ulama di Kutaraja, bertanggal 25 Januari 1956.

Di pihak lain, kaum zuama tidak menggabungkan diri hanya dalam satu partai Islam tertentu saja, sebab mereka dapat memilih untuk masuk Masyumi atau PSII. Partai mana yang dipilih oleh para zuama itu tergantung pada seberapa dekat hubungan mereka dengan kaum ulama, meskipun di Aceh umumnya PSII dianggap sebagai partai kaum zuama. Di bawah perlindungan ulama, kaum zuama menguasai sisi sekular pemerintahan daerah. Mereka memperoleh keuntungan dari penggulingan kaum *ulebalang* dari pemerintahan daerah pada tahun 1946, sehingga muncul sebagai penguasa daerah. Apa yang dinamakan rezim PUSA itu sebenarnya berada di tangan kaum zuama, selain daripada posisi puncak yang dipegang Daud Beureueh, dan satu atau dua jabatan lain. Kaitan mereka dengan Pesindo dan PSII selama masa revolusi bukan hanya mencerminkan upaya mereka untuk melepaskan diri dari kaum ulama, melainkan juga menggambarkan perbedaan pandangan antara mereka dan para pemimpin agama itu. Bila kaum ulama terutama mengindahkan aspek-aspek ideologis kehidupan politik, maka para zuama lebih memperhatikan aspek pragmatis daripadanya. Mereka terlibat dalam setiap aspek administrasi daerah, kecuali dalam bidang-bidang yang menghendaki keahlian khusus seperti dinas kesehatan dan kehewanan.

Oleh sebab itu membanjirnya pejabat non-Aceh pada masa sesudah revolusi, yang diikuti oleh pembubaran Propinsi Aceh, telah mengancam dominasi para zuama dalam pemerintahan daerah, di samping juga menjengkelkan kaum ulama dan rakyat pada umumnya. Dalam pandangan para pemimpin zuama, keteguhan Pemerintah Pusat untuk menghapuskan Propinsi Aceh dan memasukkannya ke dalam Propinsi Sumatera Utara yang baru itu merupakan ikhtiar untuk mengeluarkan mereka dari panggung politik lokal. Orang-orang ini mengartikan pendepakan mereka dari kekuasaan sebagai suatu pembalikan sikap Pemerintah Pusat terhadap mereka. Mereka menjadi frustrasi sebab bukannya menghargai peranan yang mereka mainkan dalam revolusi pada masa lalu, Pemerintah Pusat kini malah tampak tidak mempedulikan dan bahkan menghina mereka dengan menempatkan mereka di bawah pejabat-pejabat yang baru datang dan masih muda. Sebagai tambahan atas kepahitan yang mereka rasakan, para pejabat non-Aceh itu bahkan sering pula mencap mereka sebagai "orang-orang bodoh dari partai madrasah",⁶⁸ dalam pengertian bahwa pemimpin-pemimpin Aceh yang

68. Lihat surat Husin Jusuf kepada Gubernur S.M. Amin, bertanggal awal Juli 1954.

tamatan madrasah itu tidak ada gunanya.

Tantangan yang dihadapi kaum zuama tidak hanya dalam bidang politik. Tampaknya bahwa dalam upaya mengurangi pengaruh kaum zuama, Pemerintah Pusat tidak puas hanya dengan memindahkan Ali Hasjmy, Sjah Marhaban, dan beberapa pemimpin lain ke Sumatera Timur, melainkan juga ingin mengurangi kekuasaan mereka dalam setiap bidang. Pemerintah Pusat amat mengetahui pengaruh yang dimiliki para zuama dalam perekonomian daerah. Adalah benar bahwa untuk memperkuat genggamannya dalam politik, para zuama, juga kaum ulama, telah mendirikan berbagai perusahaan dagang pada masa awal revolusi. Ali Hasjmy dan Pesindonya memiliki Petraco (Pesindo Trading Company), sementara Teuku Muhammad Amin menguasai Indolco, dan PUSA menjalankan sebuah perusahaan besar lainnya, PUSA Trading Company. Beberapa perusahaan penting lainnya, seperti Permai dan Indocolim, juga tercatat berada di bawah pengawasan unsur-unsur PUSA.⁶⁹

Oleh karena itu, ketika Pemerintah Pusat melarang sistem perdagangan barter antara Aceh dan Malaya pada awal tahun 1952, para pemimpin PUSA sangat terpengaruh. Memang penghentian perdagangan barter itu hampir menghancurkan sama sekali kekuasaan ekonomi para elite PUSA. Semua perusahaan mereka terpaksa menghentikan kegiatan ekspor dan impor, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tetap terlibat dalam usaha dagang lokal. Copra Fonds, yang berada di bawah Teuku Ahmad Hasan, Bupati Pidie, juga runtuh. Kebijakan Pemerintah Pusat ini membuat berang baik para elite PUSA maupun massa, sebab kebijaksanaan itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sosial yang tidak diinginkan.

Bagi para ulama, pembatasan kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut berarti kehilangan dana yang terutama dibutuhkan untuk membiayai pengembangan sekolah-sekolah agama. Pembatasan ini sangat berarti ketika Pemerintah Pusat menghentikan subsidi atas ratusan sekolah agama pada tahun 1952. Oleh sebab itu bagi para ulama runtuhnya pengaruh kaum zuama, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, berarti hilangnya sumber bantuan untuk pengembangan agama. Pada saat yang sama, ancaman yang lebih serius terhadap prinsip-prinsip

69. Lihat laporan militer, bertanggal Medan, 22 Oktober 1953.

agama juga dilancarkan oleh para pejabat non-Aceh. Hal-hal yang diharamkan oleh Islam, seperti minuman keras, judi, dan perbuatan maksiat lainnya, dibawa masuk ke daerah itu. Sudah tentu para ulama pada umumnya tidak dapat menerima gejala ini. Pembakaran pasar malam di Kutaraja pada bulan Agustus 1952 merupakan salah satu contoh penolakan aktif mereka.

Konflik kepentingan antara para pemimpin PUSA dan Pemerintah Pusat menumbuhkan ketegangan dalam masyarakat setempat, sementara pemimpin-pemimpin PUSA menjadi semakin kecewa. Kebijakan Pemerintah Pusat, yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh PUSA di daerah itu, telah diikuti oleh intensifikasi kampanye anti-PUSA dari unsur-unsur *ulebalang*. Tuntutan PUSA bagi rehabilitasi jalan, irigasi, dan pendidikan telah diabaikan pemerintah, sementara tingkat kehidupan menjadi semakin buruk karena penduduk terkena akibat pelarangan barter. Situasi ini, di satu pihak, memang dapat mengarahkan kekecewaan masyarakat terhadap PUSA. Akan tetapi, selain kampanye yang dilancarkan oleh kaum *ulebalang*, tidak ada perlawanan sosial yang timbul untuk menentang pemimpin-pemimpin PUSA sebab mereka tetap menguasai massa. Hal ini tidak saja disebabkan oleh adanya ikatan keagamaan antara elite dan massa, melainkan juga karena kemampuan para pemimpin PUSA untuk menyingkapkan bahwa Pemerintah Pusatlah yang menjadi biang keladi yang sesungguhnya. Dalam hal ini rasionalisasi tentara, penghentian perdagangan barter, dan berkurangnya fasilitas pendidikan telah menjadi hal-hal yang sangat berguna bagi para pemimpin PUSA dalam upaya mereka untuk mengarahkan kekecewaan massa kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, karena Jakarta terus menekan mereka, langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin PUSA memang telah menguatkan keyakinan mereka pada prinsip bahwa pada suatu saat setiap politisi akan menempuh tindakan politik yang tidak dapat dihindarkan.

Tentu saja peranan massa tidak kalah pentingnya daripada peranan elite politik dan agama dalam menentukan sebab-sebab meletusnya pemberontakan. Pentingnya massa Aceh dalam hal ini disebabkan oleh pengalaman hidup mereka sehari-hari serta oleh ikatan-ikatan politik dan keagamaan tradisional mereka dengan para elite agama; ikatan-ikatan tersebut menjadi semakin kuat pada waktu mereka menghadapi keadaan

yang rumit dan kritis.⁷⁰ Di satu pihak, rakyat dendam pada Pemerintah Pusat karena akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan ekonomi terhadap kehidupan mereka. Atau, dengan lain perkataan, keadaan perekonomian yang membaik pada tahun 1920-an dan 1930-an (yang diindikasikan oleh sistem perkapalan, transportasi, serta ekspor hasil bumi yang lebih baik, dan lain-lain) kini mengalami kemunduran. Sudah kita lihat dalam bab sebelumnya bahwa larangan perdagangan barter telah memiskinkan sebagian besar masyarakat Aceh, terutama petani dan buruh pelabuhan. Penolakan pemerintah untuk merehabilitasi sistem irigasi merupakan pukulan yang lain terhadap para petani sehingga memaksa mereka mengabaikan sebagian sawah mereka. Kerusakan jalan juga menghambat perdagangan dan pertanian. Faktor-faktor ini mengurangi kemampuan mereka mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan tercampaknya ribuan pemuda karena program reorganisasi militer, serta penutupan sekolah umum dan agama karena penghentian subsidi. Semakin menumpuknya tekanan-tekanan ini, menyebabkan rakyat semakin frustrasi. Perasaan mereka terhadap Jakarta agaknya tercermin dalam pengertian mereka yang sinis terhadap "merdeka" sebagai *matee kah*, yang artinya "matilah engkau".

Di lain pihak, pembubaran Propinsi Aceh bukan pula tidak bermakna bagi rakyat biasa di Aceh. Pembubaran tersebut juga merupakan suatu sumber kemarahan rakyat. Adalah jelas bahwa rakyat, atau sekurang-kurangnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan, mengartikan penghapusan status propinsi sebagai indikasi bahwa nasib mereka tidak lagi ditentukan di Aceh. Berdasarkan pengalaman pada masa revolusi, ketika kehidupan mereka banyak dicampuri oleh orang-orang bukan-Aceh,⁷¹ mereka dapat membayangkan bahwa akan lebih banyak lagi campur tangan luar pada masa mendatang setelah Aceh tidak lagi mempunyai status propinsi. Mengingat bahwa, dari segi psikologis, Aceh pernah merupakan kerajaan merdeka sebelum dikuasai Belanda, dan kemudian menjadi propinsi sendiri dalam administrasi kolonial Belanda,

70. T.B. Bottomore, *Elites and Society* (Middlesex: Penguin Books, 1971), hal. 93.

71. Umpamanya, ketegangan politik yang ditimbulkan oleh unsur-unsur kiri di Aceh Timur pada tahun 1949 janganlah dilihat hanya sebagai sesuatu yang menyangkut para pemimpin PUSA saja, sebab ketegangan itu juga mencerminkan konflik nilai antara orang Aceh dan bukan-Aceh.

maka penghapusan status propinsi dipandang rakyat Aceh sebagai suatu kemunduran dan bahkan penghinaan. Oleh sebab itu, seperti halnya dengan pemimpin-pemimpin mereka, rakyat memandang langkah Pemerintah Pusat untuk menghapuskan propinsi mereka sebagai kegagalan pemerintah menghargai sumbangan yang telah mereka berikan kepada revolusi. Dengan perasaan ini, seruan ulama mudah sekali membangkitkan tanggapan rakyat untuk menentang Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu meskipun sumber kekecewaan mereka berbeda, jelas bahwa baik elite PUSA maupun massa rakyat merasa frustrasi terhadap Pemerintah Pusat. Kekecewaan ini dirasakan secara luas dan melahirkan dendam terhadap Jakarta yang, pada hemat saya, merupakan penyebab utama pemberontakan. Sementara kebanyakan rakyat secara langsung terpengaruh oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, terutama dalam bidang sosial-ekonomi, pemimpin-pemimpin PUSA merasakan dampaknya dalam cara lain. Telah kita lihat bahwa kedua fraksi dalam kepemimpinan PUSA memiliki kepentingan sendiri-sendiri di daerah itu. Kepentingan kaum zuama adalah menguasai setiap aspek kehidupan politik daerah, sementara para ulama tertarik pada pelestarian nilai-nilai keagamaan rakyat Aceh. Tampaknya, dalam mengejar kepentingan mereka, kedua fraksi itu saling tergantung. Seperti pemerintahan daerah pada masa revolusi, pada masa setelah revolusi usai pun para zuama senantiasa membutuhkan dukungan kaum ulama agar dapat mempertahankan pengaruh mereka, sementara kaum ulama bersedia memberi perlindungan karena keyakinan bahwa para zuama akan selalu melindungi nilai-nilai agama. Melemahnya pengaruh zuama karena pembubaran Propinsi Aceh dan masuknya pejabat bukan-Aceh bukan hanya mengganggu nilai-nilai agama tetapi juga mengancam koordinasi urusan-urusan keagamaan di Aceh. Oleh karena itu, sementara pemimpin-pemimpin zuama tidak akan memberontak tanpa dukungan kaum ulama yang menguasai massa, para ulama sendiri terdorong untuk menentang Pemerintah Pusat karena ketidakpuasan mereka dalam hal keagamaan.

Sebegitu jauh kita telah memusatkan perhatian pada dampak langsung kebijaksanaan pemerintah terhadap Aceh. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa sejumlah peristiwa lain, seperti pengucilan Masyumi dari Kabinet Ali I, masalah pemilihan umum, dan sikap Soekarno terhadap Islam, tidak berpengaruh langsung terhadap rakyat Aceh atau tidak berkaitan dengan pemberontakan itu. Sangatlah ber-

makna bahwa pemberontakan itu meletus hanya sebulan sesudah Kabinet Ali I dilantik, dan delapan bulan setelah pidato bersejarah Soekarno di Amuntai pada tanggal 23 Januari 1953, ketika dengan tajam ia mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara nasional dan bukan negara Islam.⁷² Pernyataan Presiden ini memang mendapat reaksi keras di Aceh. Para ulama Aceh tidak mengharapkan Soekarno, yang pada masa revolusi pernah berjanji kepada mereka untuk mendasarkan Indonesia pada prinsip-prinsip Islam, atau setidaknya tidaknya menjadikan Aceh daerah Islam, mengeluarkan pernyataan demikian secara terbuka. Akibatnya, ketika mengunjungi Aceh pada bulan Maret 1953 ia disambut dengan panji-panji "Kami menyesalkan pidato Presiden di Amuntai" dan "Kami menuju negara Islam".

Reaksi rakyat Aceh ini dapat dikaitkan dengan argumentasi yang mengatakan bahwa pemberontakan itu ditimbulkan oleh faktor-faktor agama. Pelantikan Kabinet Ali I, yang mengucilkan Masyumi, dan penundaan pemilihan umum saat Masyumi diharapkan akan menang, juga bergerak ke arah yang sama -- yaitu, kehidupan politik negeri ini sedang melemahkan pengaruh Islam. Beberapa pemimpin pemberontak berpendapat bahwa pemerintah tidak akan menyelenggarakan pemilihan umum sampai partai-partai Islam cukup lemah untuk dikalahkan.⁷³ Dalam hubungan ini muncul pertanyaan tentang bagaimana kaitan antara meletusnya pemberontakan dan Konferensi Ulama di Medan pada bulan April 1953, yang merekomendasikan suatu perjuangan parlementer. Tambahan lagi, mengapa pemberontakan tersebut meletus setelah Kabinet Ali berkuasa dan tidak selama pemerintahan Wilopo? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini diberikan oleh Boland, yang percaya bahwa pemberontakan tidak pecah ketika itu karena Daud Beureueh akan tetap "mengambil sikap moderat" sejauh Indonesia masih diperintah oleh seorang muslim atau pemerintahan Masyumi.⁷⁴ Akan tetapi jawaban ini tidaklah memadai. Sementara tidaklah diragukan bahwa pembentukan Kabinet Ali I merupakan suatu pukulan terhadap Masyumi, sangatlah sukar dipercayai bahwa para pemimpin PUSA berontak sebagai protes terhadap pengucilan Masyumi dari kabi-

72. Feith, *The Decline*, hal. 281.

73. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973.

74. B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hal. 73.

net itu, terutama setelah partai tersebut mengecewakan mereka dalam banyak hal.

Pada hemat saya, agaknya lebih mungkin bila dikatakan bahwa berbagai peristiwa ini tidak mempunyai sangkut-paut apa pun dengan sebab-sebab, melainkan dengan waktu meletusnya pemberontakan. Sudah kita lihat dalam bab sebelumnya bahwa para pemimpin PUSA telah merencanakan akan memberontak setidak-tidaknya sejak awal tahun 1951. Akan tetapi niat ini tidak dapat diwujudkan karena situasi daerah yang belum matang. Setiap usaha untuk memulai pemberontakan pada waktu itu tidak akan berhasil oleh karena dua alasan. Pertama, rakyat belum lagi cukup frustrasi dan marah terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Kedua, razia bulan Agustus 1951 telah melumpuhkan persiapan militer PUSA, sebab penguasa militer menyita kebanyakan senjata PUSA di seluruh daerah itu. Dalam kaitan ini, rakyat Aceh memandang pelantikan Kabinet Ali I dan pengucilan Masyumi darinya sebagai tanda bahwa pemerintah akan bersikap keras terhadap setiap tantangan militer. Hal ini menggugah pemimpin-pemimpin PUSA, terutama ketika Soekarno dalam pidato Hari Kemerdekaan menyerukan kepada pemerintah supaya mengambil tindakan tegas terhadap Darul Islam.⁷⁵

Dalam hal bocornya hubungan mereka dengan Kartosuwirjo pada bulan Mei 1953, para pemimpin Aceh percaya bahwa Ali Sastroamidjojo, berbeda dari Wilopo, tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Kekhawatiran ini mendorong mereka untuk melaksanakan rencana pemberontakan dan mendahului kemungkinan adanya tindakan pemerintah. Bila kita perhatikan intrik antara unsur-unsur *ulebalang* dan pemerintah, ketakutan para pemimpin PUSA bukanlah tidak beralasan. Beberapa waktu sebelum meletusnya pemberontakan, Jaksa Agung Suprpto secara *incognito* mengadakan kunjungan ke Kutaraja di mana ia bertemu dan mendiskusikan situasi politik dengan Ali Lamlagang. Pada pertemuan ini Ali Lamlagang menyarankan agar Suprpto menangkap tujuh puluh enam orang pemimpin PUSA, termasuk Daud Beureueh. Akan tetapi Suprpto menolak gagasan ini sebab hal itu akan menciptakan keresahan yang lebih luas lagi.⁷⁶

75. Ir. Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965), hal. 178.

76. Wawancara dengan Teuku Ali Lamlagang, Kutaraja, 29 November 1975.

Sebagai tambahan, pada awal September 1953 Said Ali merekomendasikan kepada pemerintah agar menahan sekitar 160 orang di Aceh, Medan, dan Jakarta, termasuk Daud Beureueh, 'Abdul Wahab Seulimeum, Husin Jusuf, Hasan Ali, Teuku Daudsjah (bekas residen Aceh), Ali Hasjmy, Mayor Hasballah Hadji (ketika itu komandan militer Kotabesar Medan), dan Amelz, serta Nur el-Ibrahimi (kedua yang terakhir adalah anggota Parlemen di Jakarta).⁷⁷ Barangkali berdasarkan daftar yang disusun oleh Said Ali itu maka pada suatu waktu Suprpto memerintahkan bawahannya di Aceh untuk menangkap beberapa pemimpin PUSA. Namun perintah ini tidak pernah dilaksanakan karena sudah lebih dahulu diketahui para pemimpin Aceh melalui Hasan Ali, bekas kepala Kejaksaan Aceh, dan kini menjadi organisator pemberontakan.⁷⁸ Oleh karena itu, fakta bahwa Pemerintah Pusat bermaksud untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemimpin-pemimpin Aceh telah dikonfirmasi oleh laporan intel Angkatan Darat.⁷⁹

Sebagai kesimpulan, sudah jelaslah bahwa penyebab utama pemberontakan ini adalah frustrasi yang meluas terhadap Pemerintah Pusat. Pengabaian atas perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, serta program rasionalisasi militer pada kenyataannya merupakan akibat dari penghapusan otonomi Aceh. Pembubaran Propinsi Aceh merupakan masalah pokok yang membentuk frustrasi kaum zuama, sementara para ulama tergerak berontak sebab mereka tidak puas akan perkembangan dalam bidang keagamaan. Dalam hubungan ini, otonomi atau status propinsi bukan hanya merupakan sumber kekuasaan pemimpin-pemimpin politik tertentu, akan tetapi juga merupakan sumber proteksi bagi nilai-nilai agama rakyat Aceh.

77. Lihat daftar yang disusun dan ditandatangani oleh Said Ali Assegaf bertanggal Kutaraja, 1 September 1953. Bandingkan dengan Boland yang menyebutkan angka itu adalah 190; *op. cit.*, hal. 73.

78. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973.

79. Wawancara dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Jakarta, 5 Mei 1976.

Bab IV

Jawaban Jakarta

PEMBENTUKAN KABINET Ali I pada tanggal 1 Agustus 1953 dapat dipandang sebagai salah satu ungkapan pokok dan resmi tentang maksud PNI untuk mengakhiri perlawanan politik berdarah di beberapa daerah. Bila dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Ali memperlihatkan keistimewaan tersendiri. Dalam perbandingannya dengan kabinet-kabinet yang digantikannya, di mana baik PNI maupun Masyumi selalu menentukan, Kabinet Ali meletakkan prioritas programnya pada pemulihan keamanan dan ketertiban. Berbeda dari Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo yang menekankan "hukum" dan "kebijaksanaan" sebagai alat utama dalam menghadapi tantangan-tantangan fisik, Kabinet Ali secara jelas mengungkapkan pilihannya pada tindakan tegas.¹ Secara luas dipercayai bahwa tujuan utama Kabinet Ali adalah menghancurkan gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Di lain pihak, keengganan pemimpin Masyumi untuk mengutuk secara terbuka memberi kesan bahwa gerakan itu mendapat dukungan partai tersebut secara diam-diam. Setidak-tidaknya PNI percaya bahwa suatu kabinet yang di dalamnya Masyumi ikut serta tidak akan pernah mampu mengatasi pemberontakan kaum muslimin. Dengan perhitungan ini PNI secara tegas menentang setiap usaha memasukkan Masyumi dalam Kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari PNI.²

Kebijaksanaan yang Konfrontatif

BUKAN tidak mungkin bahwa keteguhan PNI untuk menghancurkan

1. Lihat program Kabinet-kabinet Sukiman, Wilopo, dan Ali dalam *Susunan Kabinet*, hal. 14-18.

2. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku* (Jakarta: PT Kinta, 1974), hal. 163.

Darul Islam didasarkan pada kekhawatiran akan akibat dari keputusan Parlemen untuk menyelenggarakan pemilihan umum pertama di negeri ini. Undang-undang pemilihan umum telah diusulkan oleh Kabinet Wilopo yang juga dipimpin oleh seorang PNI, namun PNI, PKI, dan beberapa partai nasional kecil lainnya tidak menyukai dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu cepat, karena takut terhadap kemungkinan bahwa mereka akan dikalahkan oleh partai-partai Islam. PNI kurang percaya diri sebab masyarakat pada umumnya yakin bahwa partai-partai Islam akan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum itu.³ Kehadiran Darul Islam di daerah-daerah yang padat penduduknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga tidak menguntungkan PNI jika pemilihan umum diselenggarakan. Pimpinan partai-partai non-Islam barangkali khawatir bahwa Darul Islam akan mengganggu pemilihan umum itu dengan jalan mencegah para pemilih untuk memilih partai-partai selain Islam.

Dengan demikian menghancurkan gerakan Darul Islam barangkali dapat dikatakan sebagai taktik untuk mengamankan posisi partai-partai non-Islam, terutama PNI, di dalam pemilihan umum. Barangkali diharapkan pula bahwa jika Kabinet Ali dapat melaksanakan program keamanannya yang tegas itu, maka partai-partai pemerintah akan dapat memenangkan pemilihan umum. Keberhasilan pemerintah di dalam mengalahkan Darul Islam dengan sendirinya akan memperbaiki citra partai-partai pemerintah di mata rakyat. Dalam hal demikian, maka pemerintah dapat berharap memenangkan pemilihan umum. Kekalahan Darul Islam juga akan mencegah kelompok pembangkang ini mempengaruhi pemilihan umum dengan cara yang menguntungkan Masyumi.

Justru ketika sedang prihatin berkenaan dengan usaha untuk memperkuat posisi mereka dalam pemilihan umum, partai-partai nasionalis diganggu oleh perkembangan politik di Aceh. Kecuali dengan merusak pengaruh kuat para pemimpin PUSA terhadap masyarakat pemilih di Aceh, maka tidak akan dapat dicegah kemungkinan Masyumi dapat menguasai lima kursi perwakilan Aceh di Parlemen. Di lain pihak, karena Aceh merupakan bagian dari Sumatera Utara, kehilangan daerah itu juga akan mengancam peranan PNI dalam kepolitikan di propinsi ini.

3. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968), hal. 274, 278-279.

Dengan perhitungan ini PNI khususnya sangat berkepentingan untuk menghancurkan dominasi PUSA di Aceh. Oleh sebab itu PNI mencoba mengambil keuntungan dari keresahan politik di Aceh. Usaha pertama dilakukan dengan membuat rencana menangkap lebih dari seratus tokoh PUSA, sebagaimana yang telah kita lihat, segera setelah jatuhnya kabinet koalisi PNI-Masyumi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo. Setelah gagal menjalankan rencana tersebut, PNI kemudian mendapat kesempatan lain ketika para pemimpin PUSA memutuskan untuk menentang Pemerintah Pusat secara fisik. Dipenuhi harapan akan mampu mengendalikan situasi, kabinet bertekad untuk menerapkan program keamanan yang tegas segera setelah pemberontakan itu meletus.

Untuk menghancurkan pemberontakan itu, maka pemerintah terpaksa mengerahkan kekuatan militernya secara penuh. Akan tetapi hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pasukan pemerintah. Perlawanan ketat yang dilancarkan oleh pemberontak dan keterlibatan kekuatan militer di daerah-daerah bergolak lainnya menyebabkan jumlah pasukan yang dapat dikirimkan ke Aceh jadi terbatas. Ketiga batalion dari Resimen I dan satu atau dua kompi brimob yang ada di Aceh sebelum Darul Islam diproklamasikan tidak cukup untuk memelihara kontrol atas kota-kota pesisir yang penting. Untuk membantu unit-unit ini, maka pada awal Oktober pemerintah mengirimkan dua batalion tentara dan satu unit panser dari Sumatera Utara, di samping dua batalion dari Sumatera Barat yang tiba di sana pada awal tahun 1954. Sebagai tambahan dimasukkan pula beberapa kompi brimob. Pada tahun 1955, ada dua belas kompi brimob di daerah itu. Untuk mempertahankan operasi-operasi militer, Angkatan Udara juga ikut mengambil bagian; pengintaian serta serangan udara dilancarkan dari dua lapangan terbang peninggalan Jepang di Bireuen dan Kutaraja yang kini diaktifkan kembali.

Pasukan-pasukan ini menghadapi perlawanan keras dari pasukan pemberontak yang tidak lengkap persenjataannya. Setelah Darul Islam menyerang sebuah konvoi yang terdiri atas dua batalion pasukan pemerintah dan satu unit panser di bawah pimpinan Kapten Manaf Lubis, yang mendekati Langsa dalam perjalanan dari Medan pada hari-hari pertama pemberontakan, pemerintah mulai menyadari bahwa Darul Islam tidak lemah. Pertempuran yang tidak ada hentinya dan kenyataan bahwa jalan raya sepenuhnya dikuasai oleh para pemberontak menye-

babkan pasukan pemerintah di mana mungkin menghindari pengangkutan pasukan dari darat. Hanya dengan perlindungan Angkatan Udara, satu batalion dari Medan pada akhirnya berhasil didaratkan di pantai Bireuen pada bulan Oktober setelah bertempur selama dua puluh empat jam. Di daerah Pidie, penguasaan terhadap Markas Besar Daud Beureueh di Geumpang pada akhir November⁴ melibatkan lebih dari satu batalion tentara yang berpangkalan di Sigli dan Meulaboh di Aceh Barat. Untuk menguasai Takengon, diperlukan dua batalion, masing-masing dipimpin oleh Kapten Sitorus dan Mayor Ibrahim Adjie, dalam sebuah operasi yang secara simultan dilancarkan dari Bireuen dan Blangkejren pada akhir November 1953.

Bila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan di mana pemerintah mempunyai sembilan belas batalion pasukan hingga akhir tahun 1952,⁵ maka jumlah pasukan yang dikirimkan ke Aceh ini terhitung sedikit. Akan tetapi, bila diingat bahwa Sulawesi Selatan lebih besar daripada Aceh, dalam arti wilayah dan penduduk, jumlah pasukan yang dikirimkan ke Aceh itu memang besar. Jumlah pasukan yang besar itu pada akhirnya memungkinkan pemerintah menguasai kota-kota di Aceh, meski terpaksa melepaskan wilayah selebihnya kepada Darul Islam. Setiap gerakan militer di luar daerah perkotaan selalu berada di bawah ancaman serangan pemberontak yang menguasai wilayah pada radius dua sampai tiga kilometer dari kota mana pun. Dengan posisi yang demikian, para pemberontak tidak saja mampu menyerang dan menembaki konsentrasi-konsentrasi militer, melainkan juga memutuskan semua bentuk komunikasi baik dengan Kutaraja maupun Medan. Transportasi umum benar-benar hancur, dan hanya kendaraan-kendaraan yang dikawal secara penuh masih tetap beroperasi di jalan-jalan. Oleh sebab itu, salah satu tugas pasukan pemerintah adalah mempertahankan komunikasi darat yang menghubungkan pos-pos militer yang terpencar-pencar.⁶ Akan tetapi, dengan keterlibatannya dalam sejumlah pemberontakan lain di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya, pemerintah menyadari bahwa kemampuannya untuk mendukung operasi-operasi militer di Aceh adalah terbatas.

4. *Mestika*, 4 Desember 1953.

5. Barbara Sillars Harvey, "Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965" (disertasi Doktor, Cornell University, 1974), hal. 261.

6. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 32.

Kurangnya pasukan dan serangan pemberontak yang bertubi-tubi itu menyebabkan unit-unit militer bertindak secara keras terhadap pemberontakan tersebut. Setiap serangan dibalas dengan pembakaran rumah, penangkapan yang dilakukan secara sembarangan, serta pembunuhan di tempat. Umpamanya, serangan terhadap sebuah konvoi brimob di Cot Tuphah, sebuah kampung dekat Bireuen, pada awal September 1954 telah mengakibatkan ditahannya delapan puluh lima penduduk⁷ dan pembakaran seluruh desa itu. Mungkin penguasa militer percaya bahwa tindakan keras seperti itu akan menyebabkan Darul Islam menjauhkan diri dari pedesaan. Di lain pihak, tindakan itu juga dimaksudkan untuk mencegah penduduk bergabung dengan atau membantu kaum pemberontak, sebab pasukan pemerintah akan selalu berbalik kepada mereka untuk membalas dendam. Akibatnya, antara masa pecahnya pemberontakan hingga tanggal 22 Oktober 1953 pemerintah telah menangkap 2004 orang.⁸ Jumlah ini meningkat menjadi 4046 pada bulan Januari 1954. Sifat sembarangan penangkapan ini terbukti kemudian ketika pemerintah melepas kembali separuh dari jumlah itu pada tahun 1955.⁹ Penangkapan-penangkapan ini bukan hanya dilakukan di Aceh melainkan juga di Jakarta, Medan, dan Palembang. Di antara pemimpin inti PUSA yang ditahan di Medan terdapat Ali Hasjmy, Sjah Marhaban, dan Njak Neh, karena keterlibatan mereka dalam persiapan pemberontakan. Selain itu Pemerintah Pusat juga menindak perwira-perwira Aceh yang berhubungan dengan organisasi pemberontak. Mayor Hasballah Hadji, Komandan Militer Kota Besar Medan, dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, dan seorang perwira asal Karo, Mayor Djamin Gintings, mengambil alih posisinya pada tanggal 8 Oktober 1953.¹⁰

Di samping tindakan militer yang tegas, Kabinet juga berusaha memisahkan para pemimpin yang berontak dari pengikut mereka dalam masyarakat Aceh. Di satu pihak, kabinet mencoba memperbaiki citranya di Aceh dengan memperlihatkan kesiapan memahami persoalan Aceh dan memberikan perhatian kepada daerah itu. Di lain pihak, kabinet pun cenderung untuk memanfaatkan air yang keruh itu dengan berusaha

7. *Mimbar Umum*, 14 September 1954.

8. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 57.

9. *Kronik 14*, hal. 71-72.

10. *Mestika*, 26 September dan 9 Oktober 1953.

menarik dukungan dari semua lawan PUSA, yaitu kaum ulama tradisional dan unsur-unsur *ulebalang*, untuk menentang pemberontakan. Pengangkatan S.M. Amin sebagai gubernur baru Sumatera Utara pada awal Oktober 1953 merupakan salah satu langkah pertama pemerintah. Dalam hubungan ini dengan mudah agaknya kita dapat mengatakan bahwa pengangkatan S.M. Amin untuk menggantikan Gubernur Abdul Hakim yang berorientasi pada Masyumi itu diilhami oleh hubungan pribadi antara S.M. Amin dengan Aceh. Pengangkatan ini jelas dimaksudkan untuk mengisyaratkan kepada rakyat Aceh akan adanya pengertian pemerintah terhadap persoalan mereka. Pada waktu ini pemerintah ingin memperlihatkan bahwa sikapnya terhadap Aceh mulai berubah ke arah yang menguntungkan rakyat Aceh.

Tentu saja rakyat Aceh tidak mungkin mengharapkan pemerintah untuk mengangkat seorang Aceh sebagai gubernur. Seorang tokoh seperti Teuku Muhammad Hasan, bekas gubernur Sumatera pada masa revolusi dan seorang bangsawan yang pada masa lalu mempunyai hubungan dekat dengan Daud Beureueh, akan dapat diterima oleh rakyat Aceh. Akan tetapi waktu itu Kabinet tidak mempertimbangkan orang Aceh seperti ini untuk jabatan tersebut. Hal ini bukan hanya karena penasihat-penasihat informalnya, para bangsawan Aceh, tidak menyukai Muhammad Hasan, melainkan juga karena pengangkatan seperti itu mungkin memberi kesan bahwa pemerintah telah mundur dari tekad untuk melawan para pemberontak, di samping sudah jelas bahwa Sumatera Utara bukan hanya Aceh. Dengan kata lain, dengan mengangkat seorang gubernur yang memiliki pengertian yang baik terhadap keadaan Aceh tetapi bukan putra Aceh, pemerintah ingin mengisyaratkan kesiapan untuk menanggapi keinginan rakyat untuk membangun, meskipun pemerintah tidak mau memberi konsesi politik kepada para pemberontak. Untuk mendukung isyarat ini, Kabinet segera mengumumkan bahwa pemerintah telah mencadangkan dana sebesar dua puluh juta rupiah untuk proyek-proyek pembangunan di daerah itu.

Di lain pihak, ada pula kemungkinan bahwa pengangkatan Gubernur Amin sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap Aceh. Barangkali akan sama tepatnya bila disarankan bahwa pemberontakan itu merupakan suatu rahmat bagi pemerintah yang didominasi PNI, sebab memberi kesempatan kepada Kabinet untuk mengganti seorang gubernur dari Masyumi. PNI dan PKI telah menuntut

pengunduran diri Gubernur Hakim sejak terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa pada bulan Maret 1953 di mana lima petani terbunuh ketika polisi dengan keras mencoba menguasai tanah yang digarap para petani itu secara ilegal.¹¹ Akan tetapi Abdul Hakim menolak tuntutan itu, dan Kabinet Wilopo pun tidak memintanya untuk mengundurkan diri. Dalam hubungan ini dipercayai bahwa Abdul Hakim hanya sekadar menjalankan kebijaksanaan Kabinet di Sumatera Utara.¹² Walaupun Kabinet Ali segera menangani masalah tanah di Tanjung Morawa itu,¹³ tidak ada maksud Kabinet yang jelas untuk memberhentikan Abdul Hakim dan mengangkat seorang tokoh PNI sebagai gubernur propinsi yang kaya itu, setidaknya-tidaknya sampai saat itu. Hal ini mungkin untuk menghindari serangan Masyumi di dalam Parlemen. Padahal di beberapa daerah di luar Sumatera Utara, PNI sebenarnya sedang menyalurkan atau memperkuat pengaruhnya melalui Kabinet, terutama menjelang pemilihan umum yang telah direncanakan itu. Dalam hal ini, dua gubernur PNI telah diangkat di Jawa Tengah dan Kalimantan pada paruh pertama tahun 1954.¹⁴

Bagi PNI, keadaan di Sumatera Utara itu berbeda. Karena banyak orang di Sumatera Utara percaya bahwa sebenarnya Gubernur Abdul Hakim sudah mengetahui rencana pemberontakan PUSA tetapi tidak mengambil tindakan atau melaporkannya ke Jakarta, maka akan cukup mudah bagi Kabinet untuk memindahkannya dari propinsi itu. Jadi, di satu pihak, pemberontakan itu membuka kesempatan bagi Kabinet untuk mengganti Abdul Hakim, tetapi di lain pihak, keadaan lebih menyulitkan Kabinet ini untuk mengangkat seorang gubernur PNI untuk Sumatera Utara. Tentu saja Kabinet dapat memberikan posisi itu kepada partai lain, seperti PIR, partai yang menguasai *portfolio* Kementerian Dalam Negeri di dalam Kabinet, atau bahkan kepada NU atau Perti. Namun para pemimpin PNI yang sedang mencari pegangan yang lebih kuat di daerah-daerah itu tidak bersedia melepaskan suatu daerah, bahkan kepada kawan dalam pemerintahan koalisi sekalipun. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi Kabinet selain mengangkat seorang non-partai seperti S.M. Amin yang mengenal keadaan Aceh dengan baik.

11. Feith, *The Decline*, hal. 1.293-295.

12. *Indonesia Raya*, 10 Oktober 1953.

13. Feith, *The Decline*, hal. 410.

14. *Star Weekly*, 442 (19 Juni 1954), hal. 1.

in Seperti yang diharapkan, memang banyak anggota masyarakat Aceh yang menyambut baik Gubernur Amin¹⁵ ketika ia mulai bekerja di Medan pada akhir Oktober, lebih kurang sebulan sesudah pecahnya pemberontakan. Pada mulanya beberapa pemimpin pemberontakan juga turut bergembira. Kabinet tidak pula kurang puasny dengan pengangkatan ini, sebab merasa telah memilih orang yang benar pada tempat yang tepat. Di lain pihak, gubernur sendiri pun bekerja keras untuk menyenangkan rakyat Aceh dan atasannya. Ia tiba di Kutaraja tiga hari setelah pelantikannya di Medan, dan menjadi gubernur pertama yang mengunjungi Aceh sejak meletusnya pemberontakan. Kunjungan ini memang menyenangkan rakyat Aceh yang merasa bahwa daerah mereka sudah terlalu lama diabaikan oleh pemerintah. Bagi rakyat Aceh kunjungan ini mengisyaratkan perhatian gubernur terhadap persoalan mereka. Akan tetapi, demi memuaskan Kabinet, dalam pidato pertamanya di Kutaraja gubernur mengecam langkah yang diambil para pemberontak dan berjanji akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka.¹⁶

Namun kebijaksanaan lunak Kabinet dengan mengangkat Gubernur Amin dalam rangka merebut hati rakyat diimbangi pemerintah dengan tindakan keras untuk memobilisasi semua kekuatan lokal guna menentang Darul Islam. Unsur-unsur *ulebalang* dan BKR lainnya secara tidak resmi dimasukkan ke dalam dinas militer dan dipekerjakan sebagai penasihat atau penunjuk jalan. Mengenakan pakaian seragam, penunjuk-penunjuk jalan ini diikutsertakan dalam operasi militer. Mereka sering menunjuk rakyat untuk ditahan, dibunuh, atau rumah-rumah untuk dibakar. Pelepasan separuh dari jumlah tahanan pada tahun 1955 merupakan suatu pengakuan atas terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu. Di pihak lain, dengan dukungan Komando Militer Sumatera Utara,¹⁷ para ulama Perti telah dimanfaatkan untuk memisahkan rakyat Aceh dari pemimpin-pemimpin PUSA yang memberontak, sekaligus memperlihatkan kepada rakyat di luar Aceh bahwa pemberontakan itu bukan merupakan perlawanan seluruh ulama Aceh terhadap pemerintah.

15. *Indonesia Raya*, 10 Oktober 1953.

16. Tentang pidato Gubernur Amin, lihat Meuraxa, *Atjeh 1000 Tabun*, hal. 124-126; juga Tk. Alibasjah Talsya, *Sedjarab dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Atjeh* (Jakarta: Penerbit Kesuma, t.t.), hal. 77-79.

17. Lihat laporan militer, bertanggal Medan, 22 Oktober 1953, hal. 27.

Tentu saja pemerintah mengharapkan bahwa jikalau para ulama Perti berhasil mempengaruhi rakyat, maka sekurang-kurangnya rakyat akan bersikap netral, jika tidak berbalik menentang kaum pemberontak. Untuk maksud ini pemerintah mendekati pemimpin-pemimpin Perti seperti Hasan Krueng Kalee, Saleh Meuseugit Raya, Abdussalam Meuraksa, dan Makam,¹⁸ yang pernah mengutuk Daud Beureueh dan gerakannya.¹⁹ Tetapi bagi pemerintah taktik ini bukanlah tanpa beban, sebab sudah diketahui umum bahwa kelompok ulama ini telah berusaha memperoleh pengaruh politik sejak masa revolusi. Namun Kabinet telah siap untuk memberi dukungan mereka dan, karena itu, memberi mereka kedudukan dalam jawatan yang berkenaan dengan urusan keagamaan di daerah itu, dan berbagai jabatan dalam pemerintahan daerah yang telah ditinggalkan oleh para ulama PUSA.

Sebagai hasil dari pendekatan ini, selama pertengahan Oktober sampai akhir November 1953, ratusan ulama Perti mengumumkan dukungan mereka terhadap pemerintah dan mengutuk Darul Islam. Dalam suatu pertemuan dengan Staf Keamanan Sipil Kabupaten Pidie di Sigli, para ulama Perti tidak hanya menyatakan dukungan kepada pemerintah, tetapi juga menyatakan bahwa Daud Beureueh telah menyimpang dari hukum Islam,²⁰ sementara di Aceh Utara mereka mendesak pemerintah untuk "mengambil tindakan cepat dan tegas"²¹ dalam menghancurkan para pemberontak. Di Aceh Selatan, pemimpin utama Perti, Habib Muda Wali, menyelenggarakan rapat umum di Jeuram pada pertengahan November di mana ia menganjurkan agar dibentuk pagar desa untuk melawan Darul Islam.²² Mungkin nilai tertinggi yang ingin dicapai pemerintah telah diperoleh ketika para pemimpin Perti mengeluarkan sebuah edaran panjang yang ditandatangani oleh Hasan Krueng Kalee pada tanggal 30 November; edaran tersebut menyatakan bahwa para ulama pemberontak adalah penipu dan hanya mengaku-aku ulama.

18. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 39.

19. Lihat pamflet "Pernyataan Ulama2 Besar di Atjeh", bertanggal Kutaraja, 28 September 1953, yang ditandatangani oleh Hasan Krueng Kalee, Haji Makam Gampong Blang, Muhammad Ali Lampisang, dan Haji Muhammad Said.

20. *Antara*, 4 November 1953.

21. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan N.V., 1956), hal. 107.

22. *Ibid.*

Edaran tersebut juga menyerukan agar rakyat menjauhkan diri dari kaum pemberontak.²³

Namun demikian, di luar lingkungan Perti, pengaruh para pemimpin PUSA tetap terpelihara sehingga merupakan suatu hal yang luar biasa bila terdengar ada ulama atau rakyat yang mengutuk Darul Islam secara terbuka. Rasa hormat terhadap Daud Beureueh di kalangan banyak ulama di Kutaraja bahkan mencegah mereka menyebutkan atau mengaitkan namanya dengan pemberontakan.²⁴ Reaksi organisasi-organisasi induk Islam seperti Muhammadiyah dan PSII bahkan lebih lunak lagi. Muhammadiyah cabang Aceh tidak mau mengeluarkan pernyataan tertulis apa pun tentang sikapnya terhadap Darul Islam, dan dukungannya terhadap pemerintah hanya diberikan secara lisan. Sementara itu PSII berpendapat bahwa pemerintah harus menghadapi para pemberontak dengan semangat kebijaksanaan.²⁵

Perpecahan antara Perti dan ulama-ulama lain mengenai sikap terhadap Darul Islam sebenarnya mengungkapkan ketidakmampuan para ulama Perti untuk mempengaruhi rakyat Aceh. Akibatnya, sebagian besar rakyat tetap setia pada para pemimpin yang sedang memberontak. Dikecewakan oleh situasi ini, pemerintah berusaha mengundang para ulama di luar Aceh guna mengutuk kaum pemberontak dalam suatu konferensi ulama tingkat nasional. Pemerintah berpendapat bahwa sekali suatu konferensi ulama yang berpengaruh menghukum Darul Islam dengan tuduhan memanipulasi hukum agama, maka akan sukar bagi Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya untuk mempertahankan legitimasi keagamaan gerakan mereka. Dalam hubungan ini, Kabinet yakin bahwa dengan pengaruh Nahdatul Ulama (NU), konferensi itu tidak akan ragu-ragu berbuat demikian. Oleh sebab itu, dengan pengarahannya dari Menteri Agama (yang berasal dari NU), diselenggarakanlah konferensi itu pada awal Maret 1954 di Bogor. Meskipun para pemimpin NU membantah bahwa konferensi tersebut dimaksudkan untuk menentang gerakan Darul Islam di Aceh,²⁶ Masyumi dengan tegas mengkritiknya. Pemimpin Masyumi, Natsir, menyatakan bahwa "soal Aceh haruslah dilihat sebagai

23. Meuraxa, *Atjeh 1000 Tabun*, hal. 118-120.

24. Asa Bafagih, "Dari Serambi Mekkah Meninjau Atjeh", *Pemandangan*, 24 Desember 1953.

25. Amin, *op. cit.*, hal. 106.

26. *Aneta*, 11 November 1953, seperti dikutip dalam *Kronik* 14, hal. 335.

suatu masalah politik dan jangan dijadikan sebagai suatu persoalan hukum agama sebab dapat memperluas perpecahan".²⁷ Tentang konferensi itu sendiri, tidak ada laporan mengenai siapa yang berhak menghadiri sidang-sidangnya. Akan tetapi dari Aceh pemerintah hanya mengundang tokoh-tokoh Perti yang mendukung kebijaksanaannya di Aceh, seperti Hasan Krueng Kalée, Habib Muda Wali, dan Abdusalam.²⁸ Jadi, maksud untuk mengarahkan konferensi pada kaum pemberontak Aceh tidak disembunyikan. Namun demikian, konferensi itu tidak menghasilkan keputusan luar biasa seperti yang diharapkan pemerintah, sebab tidak mengutuk para pemberontak.

Pendekatan lain yang dipergunakan oleh pemerintah dalam upaya merebut simpati rakyat adalah dengan mengakui bahwa kabinet sebelumnya memang telah mengabaikan pembangunan ekonomi Aceh. Maka segera setelah pecahnya pemberontakan, Pemerintah Pusat berjanji bahwa bantuan sebesar dua puluh juta rupiah akan dialokasikan untuk daerah itu, selain dana yang telah dianggarkan oleh beberapa kementerian lainnya. Wakil Perdana Menteri I Wongsonegoro (dari PIR), bahkan menjamin rakyat Aceh bahwa pemerintah akan membangun ekonomi daerah tersebut dalam waktu enam bulan setelah pemulihan keamanan.²⁹ Rencana-rencana pembangunan jalan, irigasi, listrik, dan pendidikan telah disampaikan kepada Parlemen oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo selang sebulan setelah Daud Beureueh memproklamasikan gerakan Darul Islamnya. Beberapa kementerian yang mempersiapkan rencana-rencana untuk tahun anggaran 1953/1954 telah melipat-tigakan pengeluaran pemerintah di daerah itu dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Umpamanya, Kabinet merencanakan untuk menghabiskan 15 juta rupiah untuk jalan pada tahun 1953, padahal untuk tahun 1952 jumlahnya hanya 4,5 juta rupiah. Sebagai tambahan, pemerintah menyediakan beasiswa bagi para pelajar Aceh yang belajar di Jawa dan tempat-tempat lain di Sumatera.³⁰ Dengan demikian terlihat seakan-akan Kabinet sungguh-sungguh bermaksud

27. *Antara*, 27 November 1953, seperti dikutip dalam *Kronik* 14, hal. 344.

28. Indonesia, *Laporan Tahunan 1954* (Jakarta: Kementerian Agama, 1955), jilid II, hal. 803.

29. *Indonesia Raya*, 20 November 1953.

30. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah*, hal. 68-69.

untuk menghapuskan kekecewaan rakyat Aceh, sebab keinginan untuk menyenangkan mereka diperluas juga dalam bidang perdagangan. Dendam rakyat atas pelarangan perdagangan barter pada tahun 1952, kini diperlunak dengan keputusan Kabinet yang memberlakukan prosedur impor dan ekspor khusus untuk Aceh. Meskipun prosedur baru ini bukan merupakan sistem perdagangan barter yang penuh dan hanya berlaku enam bulan sejak diberlakukan pada bulan Oktober 1953, dengan prosedur ini saudagar-saudagar Aceh diizinkan untuk mengimpor barang sebanyak tujuh puluh persen dari nilai ekspor mereka.³¹ Selain itu Kabinet yang namanya sudah terkenal akan penyalahgunaan lisensi perdagangan itu,³² dengan bangga pula mengumumkan bahwa lisensi-lisensi juga akan diberikan kepada para pedagang Aceh.

Walaupun begitu, pemerintah tidak berhasil mendapat dukungan penuh dari rakyat Aceh. Sebaliknya, mereka malah berpendapat bahwa dengan sejumlah kebijaksanaan tersebut Kabinet mengakui telah mengabaikan Aceh selama ini, sehingga tuduhan yang dilancarkan oleh para pemimpin PUSA pada masa lalu adalah benar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila terdengar komentar bahwa tidak akan ada pembangunan tanpa pemberontakan. Faktor lain yang mencegah rakyat mempercayai pemerintah adalah kurangnya kredibilitas pemerintah pada masa lampau, ketika pemerintah terlalu mudah memberi janji. Jangankan hendak merehabilitasi Aceh, untuk mendukung operasi militer di daerah itu saja pemerintah sendiri sedang kekurangan dana.³³ Dari 20 juta yang dijanjikan, pemerintah hanya memberi tidak lebih dari 5 juta rupiah³⁴ sampai akhir tahun 1954. Lebih buruk lagi, pada akhir tahun itu Kabinet malah meminta Gubernur Amin mengembalikan uang yang belum dipergunakan, sebab pemerintah akan menggunakan dana itu untuk keperluan lain. Di lain pihak, para saudagar Aceh tetap kecewa

31. *Ibid.*, hal. 64.

32. Lihat misalnya, *Star Weekly* 458 (9 Oktober 1954), hal. 2. Penyalahgunaan lisensi dagang ini oleh pemerintah telah menjadi topik pembicaraan sehari-hari dan dijadikan tema pokok oleh Mochtar Lubis dalam novelnya, *Twilight in Jakarta* (London: Hutchinson, 1963).

33. Wawancara dengan Mohammad Said, pemimpin redaksi *Waspada*, Jakarta, 31 Agustus 1975; lihat juga notulen rapat antara Staf Keamanan Sipil dengan pejabat-pejabat daerah, bertanggal Kutaraja, Februari 1954.

34. Lihat pidato Z.A. Ahmad dalam suatu sidang parlemen pada tanggal 24 Februari 1954, seperti muncul dalam *kronik* 14, hal. 150.

karena situasi perdagangan pada dasarnya belum berubah. Prosedur ekspor mensyaratkan adanya lisensi, akan tetapi pejabat-pejabat pemerintah lebih suka memberikan lisensi-lisensi itu kepada "pengusaha" yang berorientasi pada PNI, yang kemudian menjualnya lagi kepada eksportir yang sesungguhnya.³⁵ Jadi, para pedagang Aceh kembali dihambat dalam memanfaatkan prosedur impor-ekspor yang baru itu.

Dalam usaha untuk mereorganisasi dan menghidupkan kembali pemerintahan daerah, Gubernur Amin menerapkan secara penuh kebijaksanaan pemerintah yang tegas terhadap para pemberontak. Dengan memperlihatkan bahwa ia adalah seorang konservatif yang mempercayai bahwa hanya keluarga-keluarga *ulebalang* sajalah yang mempunyai keahlian administratif yang cukup memadai, maka ia melakukan pengangkatan-pengangkatan baru yang menguntungkan kaum *ulebalang*. Namun begitu keahlian bukan satu-satunya prasyarat yang terpenting bagi gubernur, melainkan persahabatanlah yang didahulukannya. Jabatan-jabatan bupati dicadangkan Gubernur bagi para sahabat yang dapat dipercayainya. Oleh karena itu, dalam waktu relatif singkat, orang-orang Aceh yang bukan pegawai negeri tetapi berlatar belakang bangsawan atau Perti, telah mengisi posisi-posisi dari tingkat bupati sampai camat, sehingga mempertajam kesenjangan politik dalam masyarakat Aceh. Hanya beberapa hari setelah tiba di Kutaraja, Gubernur memanggil Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, bekas asisten residen pada masa revolusi, dan mengangkatnya menjadi bupati Kabupaten Pidie,³⁶ untuk menggantikan Teuku A. Hasan yang kini menjadi menteri kesehatan dalam Kabinet Daud Beureueh. Teuku Muhammad, kawan dekat Gubernur yang lain, diangkat menjadi bupati Aceh Utara untuk menggantikan Usman Azis yang berorientasi pada PUSA. Untuk menggantikan Bupati Husin dan Bupati Zaini Bakri, masing-masing dari Aceh Tengah dan Aceh Timur, Gubernur Amin mengangkat

35. Dilaporkan bahwa seorang eksportir Aceh yang ingin mengekspor 2000 ton kopra ke Penang tidak dilayani secara wajar oleh Kementerian Perdagangan di Jakarta. Untuk mendapatkan lisensi, kementerian itu meminta agar ia membayar US\$ 480 untuk setiap ton kopra yang diekspornya, padahal seorang "pengusaha" telah menawarkan lisensi yang sama kepadanya hanya senilai US\$ 430 per ton. Lihat pidato Nur el-Ibrahimi dalam sidang parlemen pada tanggal 23 Februari 1954, dalam *Kronik* 14, hal. 95-96.

36. Panglima Polim, *Memoir*, hal. 44-46.

seorang wedana anggota PNI yang sangat anti-PUSA, Muda Sedang, dan Munar Hamidjojo, seorang pejabat di Kantor Gubernur di Medan.

Sudah jelas bahwa reorganisasi ini merupakan suatu pembersihan terhadap semua pamong praja Aceh yang berorientasi pada PUSA, walaupun satu atau dua pejabat suku Batak juga dimutasikan oleh Gubernur. Kebanyakan bupati, wedana, dan camat yang pada masa lalu cenderung pada PUSA tetapi tetap berada dalam kedudukan masing-masing selama pemberontakan, kini diberhentikan dari jabatan mereka dan diberi fungsi administratif yang tidak berarti. Selain Bupati Usman Azis dari Aceh Utara, yang dipindahkan ke Kantor Residen di Kutaraja dan digantikan oleh Teuku Muhammad yang bukan pegawai negeri itu, Bupati Sahim Hasjimi juga dipindahkan dari Aceh Barat ke Kantor Gubernur di Medan. Untuk menggantikannya, seorang bupati dari Langkat (Sumatera Timur) ditempatkan di Aceh Barat. Hanya Bupati Abdul Wahab dan Bupati Kamarusid, masing-masing dari Aceh Besar dan Aceh Selatan, yang tetap pada posisi mereka sampai tahun 1955. Pada tingkat yang lebih rendah, tiga wedana dari Aceh Timur, Tengah, dan Selatan, dan sekurang-kurangnya delapan camat telah dimutasikan ke posisi bukan kepala daerah, baik di Aceh maupun di tempat-tempat lain di Sumatera Utara.³⁷

Dengan sendirinya muncul reaksi yang luas terhadap reorganisasi ini, dan kritik-kritik keras disampaikan ke Kantor Gubernur. Sementara itu tidak mengherankan jika Darul Islam sangat menentang reorganisasi itu. Dalam hubungan ini, kaum pemberontak memberikan reaksi yang lebih keras lagi terhadap pejabat-pejabat pemerintahan setempat. Banyak kantor pemerintah, terutama kantor-kantor kecamatan, yang dibakar pada tahun 1954 dan para camat diancam serta dipaksa meninggalkan pos mereka, sementara pasukan pemerintah tidak mampu memberikan pengawalan. Camat-camat yang cukup berani membuka kantor dan menolak bekerja sama dengan Darul Islam diculik atau dibunuh. Keuchik Hamzah, camat Teunom di Aceh Barat, misalnya, ditembak mati pada awal tahun 1955.³⁸ Barangkali tidak akan salah jika dikatakan bahwa meningkatnya kegiatan Darul Islam di seluruh daerah itu pada tahun 1954 merupakan manifestasi penentangannya terhadap

37. Lihat "Mutasi Pegawai di Daerah Atjeh".

38. *Peristiwa*, 10 Februari 1955.

reorganisasi pemerintahan ini.

Arus protes juga datang dari rakyat setempat yang memandang kebijaksanaan Gubernur Amin sebagai langkah untuk mengembalikan *ulebalang* pada kekuasaan. Protes juga datang dari mereka yang menginginkan agar calon-calon mereka sendiri yang diangkat. Suatu delegasi dari Gabungan Partai-partai dan Organisasi (GPO), tokoh-tokoh agama dan pejabat-pejabat pemerintahan di Aceh Barat menolak pengangkatan OKH Salamuddin dari Sumatera Timur, dan mereka menginginkan agar orang Acehlah yang diangkat menjadi bupati di sana.³⁹ Oposisi kelompok ini cukup kuat dan hanyalah berkat pengaruh Muda Wali oposisi tersebut dapat dinetralisasikan oleh Gubernur.⁴⁰ Sementara itu orang-orang yang khawatir akan pembalasan dari penguasa militer atau unsur-unsur *ulebalang*, mengirimkan keluhan mereka terhadap kebijaksanaan Gubernur itu melalui pos. Dalam sepucuk surat kepada Gubernur Amin, "wakil rakyat" dari dua kampung di Pidie mengancam keselamatan para pejabat *ulebalang* manakala keamanan telah dipulihkan dan perlindungan militer ditarik. Penulis surat lain lagi bahkan berdoa kepada Tuhan agar memusnahkan kaum *ulebalang* atau memperkuat kaum pemberontak sehingga mereka dapat menghancurkan unsur-unsur bangsawan itu.⁴¹

Oposisi terhadap tindakan tegas Kabinet dan Gubernur juga muncul di luar Aceh. Di Parlemen, partai-partai oposisi, terutama Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan wakil-wakil Aceh menyerang Kabinet mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaannya di Aceh. Kegagalan Kabinet untuk mengendalikan keadaan sampai akhir tahun 1953, yaitu sasaran yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, dan tindakan kejam serta semena-mena yang dilakukan terhadap rakyat oleh unit-unit militer, merupakan hal utama yang dikritik. Kelompok oposisi mendesak Kabinet agar mencari penyelesaian politik dan tidak hanya bersandar pada kekuatan militer saja. "Komando terakhir" Kabinet untuk menghancurkan kaum pemberontak menjadi sumber olok-olok, tidak hanya di dalam melainkan juga di luar Parlemen. Natsir, pemimpin Masyumi itu, secara terbuka mengatakan bahwa hanya kebijaksanaan

39. *Tangkas*, 22 Januari 1954, sebagaimana dikutip dalam *Kronik* 14, hal. 351.

40. Amin, *op. cit.*, hal. 124.

41. *Ibid.*

dan bukan "komando terakhir" itu yang akan menyelesaikan masalah.⁴²

Sementara itu, beberapa surat kabar yang terbit di Medan dan Jakarta mengkritik kebijaksanaan pemerintah yang mengembalikan pengaruh *ulebalang* dalam pemerintahan setempat. *Waspada*, surat kabar Medan yang berorientasi pada PNI misalnya, menyesalkan kebijaksanaan pemerintah itu, yang dipercayainya akan memperkuat perpecahan dalam masyarakat Aceh. Redaktur surat kabar itu, Mohammad Said, yang telah mengamati masalah Aceh sejak sebelum perang, berpendapat bahwa kebijaksanaan yang demikian mengancam pertumbuhan prinsip-prinsip demokrasi, sebab itu menghambat munculnya kekuatan sosial di luar pengelompokan ulama-*ulebalang*.⁴³ Kritik-kritik semacam ini mendapat dukungan yang cukup besar dalam Parlemen dan kemudian memaksa fraksi pemerintah untuk menyetujui pengiriman misi parlemen ke Aceh pada awal Januari 1954 guna mempelajari seluruh aspek pemberontakan itu. Dalam laporannya kepada Parlemen, misi tersebut merekomendasikan bahwa dalam usaha untuk mereorganisasikan pemerintahan daerah di Aceh, pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor setempat dan tidak memberikan prioritas kepada unsur-unsur *ulebalang*.⁴⁴

Barangkali dalam ikhtiar untuk memperkecil oposisi dalam Parlemen, Kabinet telah dengan sengaja menganggap enteng kekuatan kaum pemberontak. Dengan menganggap kaum pemberontak sebagai penjahat yang tidak mempunyai dukungan massa, Kabinet cenderung untuk mendelegasikan semua upaya pemulihan keamanan dan ketertiban kepada bawahannya di tingkat propinsi. Malahan Kabinet menolak untuk menganggap pemberontakan itu sebagai suatu peristiwa nasional dan sama sekali tidak mau mempertimbangkan pemberlakuan keadaan darurat perang (*SOB, Staat van Oorlog en Beleg*) di Aceh, meskipun kenyataannya pemerintah telah mengerahkan kekuatan militer yang besar. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan prosedur *militaire bijstand* (perbantuan militer), yakni untuk pertama kalinya sejak prosedur ini diperkenalkan oleh Pemerintah Wilopo pada tahun 1952. Dengan prosedur ini, kekuasaan tertinggi, terutama dalam hal pemulihan

42. M. Natsir, *Capita Selecta* (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957), jilid II, hal. 246-249 dan 283-287.

43. *Waspada*, 15 Desember 1953.

44. *Kronik* 14, hal. 73.

keamanan, tetap berada pada penguasa sipil. Keterlibatan kekuatan militer dalam hal ini hanya dianggap sebagai bantuan bagi kekuasaan sipil (dan polisi) di dalam menjalankan pemerintahan yang normal tak kala kekuatan polisi kurang memadai.⁴⁵ Oleh sebab itu di Aceh dibentuklah Staf Keamanan Sipil, sebagaimana telah kita lihat dalam Bab sebelumnya, di bawah pimpinan Kepala Pengadilan Negeri Kutaraja Sutikno Padmosumarto.⁴⁶ Untuk memperlihatkan bahwa kedudukan badan ini lebih tinggi daripada Komandan Resimen Mayor Prijatna, maka pemerintah memberikan pangkat letnan kolonel tituler kepada Sutikno. Dengan demikian, pemerintah ingin memberi kesan bahwa situasi Aceh tidak seburuk yang dikemukakan oleh partai-partai oposisi.

Akan tetapi karena pemerintahan setempat benar-benar lumpuh dan karena adanya unit militer dalam jumlah yang besar di daerah itu, prosedur "perbantuan militer" itu tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kenyataannya, seperti dikatakan oleh Kolonel Nasution, ketika itu bekas kepala staf Angkatan Darat, yang berlaku sama sekali bukan prosedur perbantuan militer, sebab operasi-operasi militer yang dilancarkan bukan dalam skala terbatas, dan polisi pun tidak berada pada posisi yang mengkoordinasikan.⁴⁷ Dalam keadaan yang demikian kacaunya, tidak dapat dihindarkan bahwa pengaruh penguasa militer menjadi lebih besar daripada penguasa sipil. Dalam hal ini, para penguasa militer sering turut campur dalam bidang pemerintahan, sekalipun Staf Keamanan Sipil mengatakan bahwa ia merupakan badan tertinggi dalam pemulihan keamanan di daerah itu.⁴⁸

Sementara itu kendati Gubernur Amin menerapkan kebijaksanaan yang tegas dalam pemerintahan daerah, pendekatannya tidaklah sepenuhnya sama dengan kebijaksanaan Kabinet. Pada awal November 1953, ketika Darul Islam memasuki bulan berikud dari perlawanannya,

45. Lihat "Penjelasan Procedure Militaire Bijstand" yang dikeluarkan oleh Staf Keamanan Sipil, bertanggal Kutaraja, 30 Desember 1953.

46. Ketua Staf Keamanan Sipil sebenarnya adalah Bupati Abdul Wahab, akan tetapi dalam kegiatan sehari-hari lembaga ini praktis dikuasai oleh Sutikno yang hampir selalu memimpin setiap sidangnya.

47. *Pedoman*, 26 Oktober 1954, sebagaimana dikutip oleh Amelz dalam pidatonya di depan Parlemen pada tanggal 14 Desember 1954; *Kronik* 20, hal. 88.

48. Lihat pidato Sutikno dalam pertemuan antara Staf Keamanan Sipil dengan

terlihat tanda-tanda adanya perbedaan pendapat antara para penguasa pusat dan daerah mengenai cara untuk menyelesaikan pemberontakan dengan cepat. Sementara Kabinet tetap yakin bahwa kebijaksanaannya akan segera membawa hasil, para penguasa daerah bahkan mendesak atasan mereka supaya tidak terlalu menggantungkan diri pada tindakan kemiliteran. Panglima TT-I, Kolonel Maludin Simbolon, berusaha keras meyakinkan Kabinet bahwa pemerintah tidak akan pernah dapat menamatkan pemberontakan itu bila pemerintah tidak mengombinasikan tindakan kemiliteran dengan langkah-langkah politik.⁴⁹ Apa yang dimaksudkan oleh Simbolon sebenarnya adalah bahwa pemerintah harus mencapai penyelesaian politik dengan Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin yang memberontak lainnya serta memenuhi sebagian tuntutan mereka. Maksud Kolonel Simbolon menjadi jelas ketika kemudian ia mengatakan bahwa penyelesaian pemberontakan memerlukan sumbangan dari seluruh "putra Aceh", dan bahwa rakyat Aceh lebih membutuhkan perbuatan daripada hanya janji-janji pemerintah,⁵⁰ yaitu "otonomi" dan "pembangunan" yang merupakan tuntutan utama PUSA.

Saran Simbolon ini sejalan dengan kebijaksanaan Gubernur Amin. Meskipun tetap kukuh pada pengangkatan-pengangkatan pejabat daerah dengan memberikan keuntungan terhadap lawan-lawan PUSA, Gubernur menanggapi secara positif suatu rencana untuk membentuk Badan Kontak Pribadi Peristiwa Aceh. Pembentukan badan ini disarankan beberapa tokoh yang mempunyai hubungan dekat dengan para pemimpin PUSA pada masa lampau. Dipimpin oleh Muhammad Djuned dan Muhammad Z.Z., masing-masing anggota Masyumi dan PSI setempat, Badan Kontak Pribadi ini didirikan pada tanggal 5 November. Kemudian, dengan seizin Gubernur, badan ini merencanakan untuk membina hubungan dengan para pemberontak dan berusaha menemukan syarat-syarat bagi penyelesaian pemberontakan. Akan tetapi Kabinet tidak menyetujui pemberian konsesi politik dalam bentuk apa pun kepada kaum pemberontak, walaupun tidak menghalangi Gubernur untuk men-

pejabat-pejabat sipil dan militer di Kutaraja.

49. Hasjim Mahdan, "Dari Gangguan Keamanan Sampai ke Komprensi (*sic.*) Bermuda", *Indonesia Raya*, 23 November 1953.

50. *Aneta*, 19 Juni 1955, sebagaimana dikutip dalam *Kronik* 20, hal. 233.

jalankan rencana-rencananya. Sikap yang tegas diperlihatkan oleh Menteri Agama yang melarang pejabat-pejabatnya di daerah itu melibatkan diri dalam Badan Kontak Pribadi. Kegagalan untuk memperoleh persetujuan Kabinet itu akhirnya menyebabkan Gubernur membubarkan Badan Kontak Pribadi pada awal Januari 1954,⁵¹ sebelum badan tersebut sempat menjalankan programnya.

Penentangan Kabinet yang keras terhadap kemungkinan penyelesaian politik tentu saja sejalan dengan kebijaksanaannya yang tegas terhadap pemberontakan bersenjata. Ketidaksetujuan Kabinet terhadap Badan Kontak Pribadi terutama disebabkan oleh keyakinan bahwa pemberontakan akan segera berakhir. Prestasi militer yang berhasil menguasai kembali dua benteng terakhir Darul Islam, yaitu Takengon dan Tangse, meyakinkan Kabinet bahwa penyerahan kaum pemberontak tinggal soal waktu saja. Penghapusan perbantuan militer di Kabupaten Aceh Timur pada awal Desember 1953 serta di Aceh Barat dan Selatan dua minggu kemudian, serta rencana pengurangannya di sebagian Aceh Utara dan Tengah,⁵² semakin memperteguh pendirian Kabinet. Kabinet juga mengharapkan agar keberhasilan pemerintah memperoleh dukungan para ulama Perti pada gilirannya akan menjadi katalisator yang tidak memberikan pilihan lain kepada para pemberontak selain daripada menghentikan perlawanan mereka.

Sementara itu, di tingkat propinsi, Gubernur Amin dan Kolonel Simbolon tetap pada pendirian mereka bahwa perlawanan Darul Islam akan berlangsung terus untuk beberapa lama. Oleh sebab itu, sesudah membubarkan Badan Kontak Pribadi, Gubernur terus berusaha membina hubungan langsung secara pribadi dengan para pemberontak. Dengan harapan bahwa sikap Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo akhirnya akan berubah bilamana upaya ini berhasil kelak, maka pada tanggal 5 Desember Gubernur mengirimkan sepucuk surat kepada Daud Beureueh, Hasan Ali, Husin al-Mudjahid, serta beberapa pemimpin teras lainnya. Dalam surat tersebut ia meminta pandangan mereka mengenai kemungkinan penyelesaian secara damai.⁵³ Satu-satunya jawaban yang

51. Lihat surat Gubernur Amin kepada Badan Kontak Pribadi, bertanggal Kutaraja, 5 Januari 1954.

52. Amin, *op. cit.*, hal. 126.

53. Lihat surat Gubernur Amin, bertanggal Medan, 5 Desember 1953.

diterima Gubernur adalah dari Said Abubakar, yang tinggal di Penang dan merupakan orang kepercayaan Daud Beureueh. Abubakar hanya mengatakan bahwa suatu penyelesaian damai menghendaki pengakuan pemerintah atas perlakuannya terhadap Aceh.⁵⁴ Dua pucuk surat lainnya dikirimkan kepada para pemberontak pada bulan Maret dan April 1954 melalui dua orang kurir, tetapi tidak sampai ke tangan mereka sampai akhir Mei 1954.

Sekalipun menerima tanggapan positif dari Said Abubakar, Gubernur gagal meyakinkan Pemerintah Pusat untuk mengubah kebijaksanaannya terhadap Aceh. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kembali memperjelas sikapnya bahwa ia tidak melarang Gubernur meneruskan hubungan dengan kaum pemberontak, akan tetapi pemerintah tidak akan mengikatkan diri pada persetujuan yang mungkin dicapainya. Selain itu jawaban para pemimpin puncak Darul Islam di Aceh juga tidak memuaskan Gubernur Amin. Dalam surat mereka kepada Gubernur, tertanggal 1 Juni 1954, Daud Beureueh dan Hasan Ali, seperti para pemimpin pemberontak lainnya, sepakat bahwa sekalipun ada kemungkinan bagi penyelesaian damai, mereka mensyaratkan pengakuan pemerintah akan fakta bahwa Aceh sekarang merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia.⁵⁵ Dengan jawaban ini mungkin Gubernur Amin berpikir bahwa para pemberontak tidak menghargai ikhtiarnya, sehingga ia pun merasa terhina. Akibatnya, ia menulis surat lain yang meminta mereka supaya menyerah, dengan amnesti sebagai syarat yang paling mungkin.⁵⁶ Ketika kemudian para pemimpin Darul Islam menolaknya secara emosional dan bersikeras pada syarat-syarat mereka,⁵⁷ maka korespondensi itu pun berhenti pada akhir tahun 1954.

54. Surat Said Abubakar kepada Gubernur Amin, bertanggal Penang, 18 Februari 1954.

55. Surat Daud Beureueh dan Hasan Ali kepada Gubernur Amin, bertanggal 1 Juni 1954; teks surat ini juga terdapat dalam A.H. Gelanggang, *Rabasia Pemberontakan Atjeh*, hal. 156.

56. Surat Gubernur Amin kepada Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya, bertanggal Medan, 23 Agustus 1954; juga dapat dilihat dalam Gelanggang, *op. cit.*, hal. 157-159.

57. Lihat surat Daud Beureueh dan Hasan Ali kepada Gubernur Amin tanggal 5 Oktober 1954; lihat juga Gelanggang, *op. cit.*, hal. 162-163.

Kebijaksanaan yang Akomodatif

SUATU PERTEMUAN antara Hatta, yang bertindak sebagai Penjabat Presiden selama Presiden Soekarno berada di luar negeri, dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis, yang berlangsung segera setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo meletakkan jabatan pada bulan Juli 1955, telah memberikan warna baru terhadap kehidupan politik pada tingkat nasional. Pertemuan itu juga memberi dampak terhadap kebijaksanaan umum Kabinet yang akan datang dalam hal pemulihan keamanan. Meskipun pimpinan Angkatan Darat secara resmi membantahnya, banyak kalangan percaya bahwa pertemuan tersebut telah membahas susunan kabinet baru yang akan mampu mengatasi masalah keamanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Feith, baik susunan maupun program kerja kabinet, yang memenuhi keinginan pimpinan Angkatan Darat, dapat dikaitkan dengan fakta bahwa setelah menjatuhkan Kabinet Ali, pimpinan Angkatan Darat mempunyai kewajiban moral untuk mendukung kelompok yang paling tidak senang pada kabinet itu.⁵⁸ Sesungguhnya bahwa pimpinan Angkatan Darat telah kehilangan kesabaran terhadap Kabinet Ali yang terus-menerus mencampuri urusan intern mereka. Mereka juga tidak menyukai Kabinet itu berkenaan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang tidak kenal kompromi sehingga menarik sebagian besar kekuatan militer ke dalam upaya melawan Darul Islam. Tindakan-tindakan penyelesaian yang dijalankan Kabinet bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah mendorong tumbuhnya keresahan di beberapa daerah yang kemudian lebih melelahkan lagi bagi Angkatan Darat.

Di Aceh, kebuntuan yang hampir terlupakan dalam adu kekuatan antara pasukan pemerintah dan Darul Islam kembali menarik perhatian dunia luar ketika sebuah surat kabar setempat, *Peristiwa*, menulis kepala berita "Darah Membanjiri Tanah Rencong" pada awal Maret. Surat kabar itu memberitakan bahwa hampir seratus orang penduduk desa di Kabupaten Aceh Besar dibantai oleh tentara dalam dua insiden pada akhir Februari; kejadian ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa Pulot-Cot Jeumpa. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 26 Februari ketika sebuah peleton yang kalap dari Batalion 142 (dari Sumatera Barat) secara semena-mena menembak mati dua puluh lima petani di Cot

58. Feith, *The Decline*, hal. 415.

Jeumpa, sebuah kampung dekat Kutaraja. Kejadian ini diikuti oleh kekejaman lain dua hari kemudian di sebuah kampung yang berdekatan, Pulot, di mana anggota batalion yang sama membantai enam puluh empat nelayan, yang berusia antara sebelas sampai seratus tahun, dan melukai lima orang lainnya.⁵⁹ Surat kabar ini juga memberitakan bahwa dalam kedua peristiwa tersebut tentara memasuki kedua kampung itu dan mengumpulkan semua pria dari rumah-rumah atau tempat kerja mereka dan menembak mereka tanpa selidik, sementara jalan raya ditutup bagi lalu lintas. Mereka yang luka-luka atau tidak berada di desa ketika pembantaian itu berlangsung menyembunyikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada surat kabar tersebut, sekalipun ada ancaman dari tentara.

Berita itu dikutip secara luas oleh surat-surat kabar nasional maupun daerah di seluruh tanah air. Hal ini menempatkan Kabinet Ali yang telah lemah itu dalam situasi yang sulit, sebab berita tersebut tidak hanya menggemparkan Aceh, melainkan juga menimbulkan protes keras terhadap Pemerintah Pusat dari daerah-daerah lain. Peristiwa itu juga memperkuat rasa kesukuan Aceh sehingga menggerakkan rakyat untuk bersatu, dan melemahkan posisi unsur-unsur *ulebalang* yang ekstrem. Front Pemuda Aceh yang menguasai harian *Peristiwa* dan baru berusia satu bulan, mengancam akan mengajukan masalah ini kepada Persekutuan Bangsa-bangsa apabila pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap batalion yang terlibat dalam pembunuhan masal itu.⁶⁰ Beberapa hari kemudian, lima belas organisasi dan partai besar setempat, kecuali Perti dan PKI, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk pembantaian itu, dan mendesak Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan melalui jalan politis.⁶¹ Sementara itu, suatu konferensi mahasiswa dan pelajar Aceh seluruh Indonesia segera diadakan di Jakarta sebagai reaksi terhadap pembantaian tersebut. Lebih dari 350 peserta konferensi itu menyatakan dukungan mereka terhadap resolusi Front Pemuda Aceh. Mereka menuntut agar Kabinet mengubah kebijaksanaananya terhadap Aceh dan mengirimkan suatu misi parlemen untuk

59. *Peristiwa*, 3 dan 5 Maret 1955.

60. Lihat pernyataan Front Pemuda Aceh, bertanggal Kutaraja, 4 Maret 1955; dan juga *Peristiwa*, 5 Maret 1955.

61. *Peristiwa*, 8 Maret 1955.

memeriksa peristiwa itu.⁶²

Sementara rakyat Aceh menerima simpati dari seluruh penjuru tanah air, posisi pemerintah menjadi serba salah. Ribuan umat Islam menghadiri sembahyang *ghaib* untuk para korban yang diadakan di banyak mesjid di Jakarta,⁶³ sedangkan beberapa organisasi pemuda, termasuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), mengajukan protes dan menuntut agar Kabinet mengambil tindakan yang tepat. Seruan-seruan ini mendapat dukungan luas dari surat-surat kabar, baik yang netral, oposisi, maupun yang berorientasi pada pemerintah.⁶⁴ *Harian Indonesia Raya* yang berpengaruh itu bahkan menamakannya "Westerling", menyamakan pembantaian itu dengan pembunuhan 40.000 rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Raymond Westerling pada masa revolusi.⁶⁵ Di dalam Parlemen, partai-partai oposisi, terutama Masyumi dan PSI, mengusulkan sebuah petisi yang menghendaki pengiriman suatu misi penyelidikan ke Aceh.

Pemerintah juga tidak beruntung sehubungan dengan timbulnya ketegangan hubungan antara penguasa sipil dan militer di Aceh. Pemerintah daerah, karena dendam terhadap penguasa militer yang sangat berpengaruh itu, ingin melaporkan soal pembantaian itu ke Jakarta, sedangkan Mayor Suib, komandan resimen yang baru saja ditempatkan di Kutaraja, tidak bersedia mengeluarkan suatu pernyataan apa pun. Persaingan di antara kedua penguasa ini terbongkar ketika Mayor Suib berusaha mencegah *Peristiwa* mencetak berita lanjutan mengenai kejadian itu, sementara pejabat sipil sibuk mencari keterangan yang lebih terperinci mengenai hal tersebut. Seorang perwira setempat mendekati redaktur *Peristiwa*, Acha, dan menawarkan dia untuk memilih uang Rp 10.000,00 atau jiwanya. Ketika Acha menolak sogokan itu, kejaksaan setempat melindunginya sehingga usaha pihak tentara untuk menculik atau membunuhnya dapat digagalkan. Sebagai bayaran atas perlindungan yang diterimanya, Acha setuju memberi semua bukti pem-

62. Talsya, *Sedjarah*, hal. 140-141.

63. *Antara*, 11 Maret 1955, dikutip dari *Kronik* 20, hal. 289.

64. *Sulub Indonesia*, suara resmi PNI, dalam editorialnya mendesak pemerintah agar menyelesaikan masalah pembantaian ini untuk menghindari banjir darah; *Sulub Indonesia*, sebagaimana dikutip dalam *Kronik* 20, hal. 350.

65. *Indonesia Raya*, 8 Maret 1955.

bantaian itu kepada kejaksaan, dalam bentuk interogasi.⁶⁶ Pagi berikutnya, *Peristiwa* memberitakan bahwa editornya telah diinterogasi oleh jaksa, yang kemudian terbang ke Jakarta untuk melapor kepada Pemerintah Pusat.⁶⁷

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi penguasa militer setempat selain daripada mengeluarkan versi mereka sendiri tentang pembantaian itu melalui Kolonel Simbolon. Simbolon membantah bahwa anak buahnya telah bertindak seperti Westerling di Aceh, juga menolak menilai peristiwa itu sebagai suatu banjir darah. Ia mengemukakan bahwa para korban adalah pasukan teritorial Darul Islam yang terbunuh dalam pertempuran, yaitu ketika mereka menyerang pasukan pemerintah yang sedang beroperasi di kedua kampung itu.⁶⁸ Namun pernyataan ini tidak dapat diterima masyarakat. Sadar bahwa ia mempunyai cukup bukti, Front Pemuda Aceh kemudian menantang pemerintah untuk membawa harian *Peristiwa* ke pengadilan,⁶⁹ namun tantangan ini tidak disambut pemerintah. Sebuah surat kabar independen yang terbit di Medan, *Mimbar Umum*, juga menyangsikan pernyataan Simbolon dan mempertanyakan apakah yang dibunuh oleh tentara itu rakyat biasa atau pemberontak. Surat kabar ini selanjutnya mempertanyakan bahwa bila pernyataan militer itu hendak dipercayai, ada berapa banyak penduduk yang terlibat dalam penyerangan itu sehingga lebih dari sembilan puluh yang terbunuh dan tidak ada seorang pun yang luka-luka? *Mimbar Umum* sangat skeptis terhadap pernyataan Simbolon, sebab kenyataannya tidak ada seorang tentara pun yang terluka dalam pertempuran itu.⁷⁰ Keragu-raguan ini juga dirasakan harian *Waspada* yang berorientasi pada PNI itu.⁷¹

Kenyataannya adalah bahwa pembantaian itu merupakan tindakan balas dendam atas serangan Darul Islam terhadap suatu unit tentara dari Batalion 142 beberapa hari sebelumnya di dekat kedua kampung tersebut. Dalam serangan itu lima belas tentara yang berasal dari Sumatera

66. Wawancara dengan Acha, Kutaraja, 11 November 1975.

67. *Peristiwa*, 8 Maret 1955.

68. Lihat pernyataan resmi komando militer tersebut dalam sebuah pamflet; juga dikutip oleh *Kronik* 20, hal. 376-378.

69. Lihat pernyataan Front Pemuda Aceh, bertanggal Kutaraja, 18 April 1955.

70. *Mimbar Umum*, sebagaimana dikutip oleh *Peristiwa*, 15 Maret 1955.

71. *Waspada*, 12 Maret 1955.

Barat telah terbunuh. Dendam terhadap serangan itu menyebabkan sebuah unit lain dari batalion tersebut, di bawah pimpinan Letnan Munir Zain,⁷² mengumpulkan semua pria yang ada di dalam kedua kampung itu dan membunuh mereka. Mengingat kekejaman pasukan dari Sumatera Barat dan Tapanuli dalam operasi-operasi mereka di Aceh, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan terjadinya pembantaian itu. Banyak anggota dari unit-unit Sumatera Barat terlibat dalam segala macam bentuk kekejaman, mulai dari perkosaan, ancaman, perampasan, judi, penyiksaan, sampai pembunuhan.⁷³ Seakan-akan untuk menonjolkan superioritas etnis mereka, dalam setiap kesempatan anggota-anggota pasukan tersebut membanggakan diri kepada penduduk desa: "Ini anak Padang". Agaknya hal ini mengungkapkan adanya antagonisme antaretnis di antara suku Minangkabau dan Aceh, di mana rakyat Aceh, sebagai akibat pengalaman sejarah, merasa diri lebih unggul atas suku Minangkabau yang pernah takluk kepada mereka pada abad-abad sebelumnya.

Dalam menghadapi masalah Aceh pada tahun 1955 itu, terutama menyangkut persoalan pembantaian, terlihat bahwa Kabinet telah ditinggalkan sendirian. Di satu pihak Kabinet kini tidak dapat lagi memanfaatkan sumber-sumber politik yang ada di Aceh untuk melawan kritik-kritik keras yang dilancarkan terhadapnya, sementara di pihak lain, partai-partai pemerintah pun terpecah dalam menghadapi masalah ini. Walaupun kemudian cabang PNI setempat terpaksa menarik kembali dukungannya terhadap pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh lima belas organisasi kemasyarakatan dan partai di Kutaraja, PNI tetap dipermalukan dalam masalah pembantaian ini. Hal itu karena harian *Bidjak-*

72. Dia kemudian bergabung dalam pemberontakan PRRI dan ditembak mati oleh seorang tentara PRRI yang berasal dari Aceh; wawancara dengan Acha, Kutaraja, 12 November 1975.

73. Misalnya di Samalanga, dekat Bireuen, beberapa penduduk desa ditangkap dan sumbu-sumbu berminyak dimasukkan ke dalam lubang telinga, hidung, mulut, serta anus mereka kemudian dibakar, sementara tentara dari Sumatera Barat itu menyaksikan dan menikmati pertunjukan gratis. Pada waktu yang berbeda, di sebuah kampung dekat Kutaraja, satu regu tentara yang terdiri atas orang-orang Minangkabau memaksa wanita untuk menyaksikan mereka telanjang, dan bertanya: "Punya siapa yang lebih baik, orang Aceh atau Padang?". Lihat Gelanggang, *op. cit.*, hal. 102-103. Dalam pengalaman sendiri, saya pernah menyaksikan seorang tentara dari Sumatera Barat yang kalah berjudi, menyita dengan paksa semua uang yang ada di atas meja per-

sana, surat kabar lokal yang berorientasi pada partai itu, ikut memberitakan pembunuhan masal itu secara luas dan mengkritik penguasa militer di sana. Begitu pula, pemerintah tidak dapat mengharapkan bantuan dari sekutunya yang paling dekat di daerah itu, Perti, untuk menenangkan rakyat Aceh, sebab Perti sendiri sedang goyah oleh kampanye Darul Islam yang intensif. Perti sangat terpengaruh oleh menggiatnya kembali kegiatan-kegiatan Darul Islam, terutama di Aceh Barat dan Selatan selama bulan Januari dan Februari 1955, dan banyak anggotanya di daerah pedesaan yang melarikan diri ke kota-kota. Meskipun agitasi untuk melawan Darul Islam juga meningkat di kalangan anggota Perti, dan Muda Wali dilaporkan sedang mendesak Pemerintah Pusat agar menyediakan senjata bagi mereka,⁷⁴ persatuan di dalam partai tersebut biar bagaimanapun terancam juga. Banyak ranting Perti di kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Selatan yang bubar pada masa ini.

Pertarungan dalam Kabinet juga lebih menyulitkan pemerintah. Sementara NU tetap bersikap moderat, sekalipun ada saran dari surat kabarnya untuk membentuk sebuah komite guna menyelidiki pembantaian itu,⁷⁵ PSII dan PIR cenderung berbeda pendapat. Pemimpin PSII Arudji Kartawinata tampil secara terbuka untuk memimpin delegasi partainya dalam suatu diskusi dengan Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin (dari NU), dan mendesak pemerintah agar mengambil suatu tindakan.⁷⁶ Barangkali hal ini dilakukan dengan harapan bahwa rakyat Aceh akan mendukung partainya dalam pemilihan umum yang akan datang. Di dalam Parlemen wakil PIR mengemukakan, sulit bagi pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan di Aceh bila pemerintah tidak mengubah kebijaksanaannya. Dalam sebuah usul yang diajukan di depan Parlemen, Sutardjo Kartohadikusumo menyarankan agar penyelesaian pemberontakan itu diserahkan saja kepada rakyat Aceh sendiri dengan memberi status propinsi kepada daerah tersebut dan amnesti bagi para pemberon-

judian; pada lain kesempatan, banyak di antara mereka yang mengatur dan melindungi perjudian, kemudian "memungut pajak" terhadap para penjudi yang menang.

74. *Peristiwa*, 28 Januari 1955.

75. *Duta Masyarakat*, 12 Maret 1955. Dua hari kemudian surat kabar ini menyerukan agar para politisi tidak mempolitisasikan masalah itu. Lihat *Duta Masyarakat*, 10 Maret 1955.

76. *Ibid.*, 8 Maret 1956.

tak.⁷⁷

Namun demikian pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Meskipun siap untuk mengabdikan sebagian dari tuntutan rakyat Aceh, pemerintah tetap menolak berkompromi dengan Darul Islam. Ketegasan Perdana Menteri diperlihatkan dalam keputusannya untuk menarik Batalion Sumatera Barat dari Aceh dan mengirinkan Menteri Dalam Negeri Sunarjo ke Pulot dan Cot Jeumpa pada pertengahan Maret,⁷⁸ yang diimbangi dengan penolakannya untuk melihat daerah itu sendiri. Adalah menarik untuk dicatat bahwa Perdana Menteri Ali hanya pernah berkunjung sampai di Medan saja sejak pecahnya pemberontakan. Tambahan lagi, walaupun memenuhi tuntutan rakyat Aceh untuk memberi keterangan tentang pembantaian itu kepada Parlemen sebelum ultimatum empat puluh empat hari Front Pemuda Aceh berakhir pada tanggal 15 April, Perdana Menteri menegaskan bahwa kebijaksanaannya tidak akan berubah.⁷⁹ Pemerintah juga menolak secara tegas dan, dengan mayoritas kursi yang dimilikinya di Parlemen, mengalahkan usul golongan oposisi untuk mengirimkan sebuah misi Parlemen ke Pulot dan Cot Jeumpa.

Sikap pemerintah ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Aceh. Lebih dari itu, sikap pemerintah bahkan mendorong mereka kepada propinsialisme yang lebih mendalam lagi, sehingga lebih memperkuat perasaan kesukuan mereka. Situasi ini dapat dilihat dengan jelas pada perhatian mereka yang besar terhadap pembentukan Front Pemuda Aceh (lihat hal. 145) yang pada tahun 1955 cabang-cabangnya telah menyebar di seluruh daerah itu bagai jamur di musim hujan. Dukungan luas kepada sebuah organisasi etnis dan kedaerahan seperti Front Pemuda Aceh itu, dengan sendirinya semakin memperbesar jurang pemisah antara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat. Situasi ini oleh pimpinan Angkatan Darat dipandang merugikan, bahkan lebih mempersulit usaha untuk mengatasi kegagalan operasi militer, sebab rakyat senantiasa menolak memberikan dukungan kepada pasukan pemerintah. Ditambah dengan kegagalan operasi-operasi militer di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, Angkatan Darat tidak mampu mengakhiri perjuangan yang berlarut-larut itu.

77. *Kronik* 20, hal. 362-363.

78. *Waspada*, 18 Maret 1955, dan *Peristiwa*, 19 Maret 1955.

79. *Kronik* 20, hal. 366.

Di lain pihak, bukan pula tidak mungkin bahwa para pemimpin Angkatan Darat sudah mencurigai maksud-maksud pemerintah dengan kebijaksanaannya yang tegas itu. Dalam upaya melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, Angkatan Darat telah bertempur hampir dua tahun di Aceh saja, namun hasilnya adalah suatu kebuntuan. Dengan keterlibatan yang sama di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, pimpinan Angkatan Darat tentu saja tidak dapat mendukung kebijaksanaan Kabinet yang tidak kenal kompromi itu dalam hal pemulihan keamanan. Apakah Kabinet tidak memahami keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Angkatan Darat untuk memenangkan pertempuran? Atau, apakah pemerintah sungguh-sungguh mempunyai maksud untuk menghancurkan Darul Islam dengan kebijaksanaan yang tidak kenal kompromi itu, atau semata-mata hanya untuk menyibukkan Angkatan Darat saja? Usaha-usaha para politisi untuk mengendalikan Angkatan Darat dan kecurigaan yang ada di kalangan pimpinan tertinggi Angkatan Darat terhadap para politisi⁸⁰ tiga tahun sebelumnya, tidak membantu menciptakan simpati pimpinan Angkatan Darat terhadap kebijaksanaan pemerintah. Tidak dapat dihindari bahwa sejumlah perwira mungkin beranggapan bahwa kesibukan Angkatan Darat dalam soal keamanan hanya menguntungkan para politisi saja. Barangkali kejenuhan terhadap kebijaksanaan tegas Kabinet telah menyebabkan Kolonel Lubis kemudian menghubungi Hatta pada saat memuncaknya krisis Kabinet. Pada kesempatan itu Lubis mengemukakan rencananya untuk berunding dengan gerakan Darul Islam.

Hatta mendukung rencana tersebut. Sebagai seorang demokrat dia tidak pernah percaya pada penggunaan kekerasan.⁸¹ Sebelumnya dia sendiri pernah berusaha membujuk Daud Beureueh agar melupakan rencana untuk memberontak justru setelah hubungan antara para pemimpin Aceh dan Kartosuwirjo bocor pada pertengahan tahun 1953. Namun usaha Hatta ini gagal karena Kabinet Ali yang baru dibentuk itu merencanakan untuk menangkap Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin Aceh lainnya. Pandangan Hatta kemudian diperkuat oleh ekses-ekses seperti yang terjadi di Pulot dan Cot Jeumpa. Sejak itu dia

80. T.B. Simatupang, *Pemerintah, Masyarakat, Angkatan Perang* (Jakarta: Indira, 1960), hal. 57-58, dan 92.

81. Mohammad Hatta, *Portrait of a Patriot: Selected Writings* (The Hague: Mouton Publishers, 1972), hal. 10.

percaya, tidak ada cara lain bagi penyelesaian masalah Aceh selain daripada memberikan status propinsi dan membiarkan rakyat Aceh menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Oleh sebab itu dia tidak hanya mendukung usul Lubis, melainkan juga mendengarkan pendapat sejumlah perwira Aceh, termasuk Mayor Sjammaun Gaharu.⁸²

Untuk menjalankan rencananya, Kolonel Lubis tidak menunggu sampai Kabinet Ali jatuh. Pada awal Juli, dia mengirim beberapa kurir untuk menghubungi Daud Beureueh, Kartosuwirjo, dan Kahar Muzakkar; rencana ini kemudian diambil oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Akan tetapi utusan-utusan itu gagal berhubungan dengan pemimpin-pemimpin pemberontak di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan karena penguasa militer setempat menangkap semua kurir yang dikirim ke sana.⁸³ Memang kenyataan ini merupakan suatu keadaan yang luar biasa. Mengapa kurir-kurir tersebut ditangkap, padahal para penguasa militer daerah sejak lama tidak menyetujui garis keras yang ditempuh oleh Kabinet Ali? Hal ini mungkin bukan disebabkan oleh pengangkatan Kolonel Abdul Haris Nasution menjadi KSAD yang baru, sehingga mengatasi pengaruh Kolonel Lubis, melainkan karena situasi di daerah-daerah yang bersangkutan. Di Sulawesi Selatan, seperti di Jawa Barat, kegagalan panglima setempat untuk menguasai jaringan komando telah menyebabkan bawahannya menjalankan fungsi dengan bebas.⁸⁴ Situasi inilah yang agaknya menjadi penyebab utama penangkapan terhadap kurir-kurir rahasia pemerintah. Argumentasi ini diperkuat oleh keadaan yang berbeda di Aceh, di mana utusan-utusan tersebut dapat bergerak dengan leluasa.

Dua orang kurir, Hasballah Daud dan Abdullah Arif, tiba di Kutaraja pada awal Juli, dan menghabiskan waktu kira-kira dua minggu sebelum mereka berhasil menemui pimpinan utama Darul Islam. Kedua kurir ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan terlibat dalam pembicaraan yang bersahabat dengan para pemimpin pemberontakan, karena mereka dapat diterima oleh Daud Beureueh. Hasballah adalah seorang pengusaha swasta di Jakarta dan dia justru anak Daud Beureueh

82. Lihat, "Pidato Ketua Penguasa Perang Dimuka Sidang DPRDP/Propinsi Atjeh", stensilan (13 Maret 1958), hal. 2.

83. *Waktu* 8 (25 Februari 1956), hal. 28.

84. Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Sedjarah TNI Angkatan Darat 1945-1965* (Bandung: Pussemad, 1965), hal. 122.

sendiri. Abdullah adalah seorang pegawai Kementerian Penerangan di Jakarta dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemimpin-pemimpin PUSA pada masa lalu. Dia juga seorang penulis dan pernah menjadi kepala seksi penerangan Masyumi cabang Aceh pada tahun 1950. Tetapi yang lebih penting ialah bahwa dia merupakan salah seorang penganjur yang menonjol dari serangan terhadap kaum *ulebalang* di Cumbok pada tahun 1946. Dengan latar belakang tersebut serta perlindungan yang diberikan oleh Gubernur Amin dan Kolonel Simbolon, kedua kurir tadi tidak menemui suatu kesulitan apa pun dari kedua belah pihak. Lebih penting lagi, mereka juga mengumumkan kehadiran mereka secara terbuka kepada pers, meskipun latar belakang dan hasil misi itu tidak mereka ungkapkan.

Ada dua hal yang dilaporkan mengenai pembicaraan antara kedua kurir dan pimpinan pemberontak itu. Pertama, Daud Beureueh menegaskan kepada kedua kurir tersebut bahwa penggantian Kabinet Ali dengan sebuah kabinet dari Masyumi tidak otomatis akan mengubah seluruh situasi, kendati kabinet itu menawarkan amnesti umum. Kedua, Darul Islam akan membantu partai-partai Islam untuk menang dalam pemilihan umum yang akan datang. Dalam hal ini para pemimpin Darul Islam akan memerintahkan pengikut mereka supaya tidak mengganggu pemilihan umum, tetapi mendorong para pemilih untuk memilih kontestan Islam.⁸⁵ Untuk mendukung hal yang pertama, Darul Islam menembaki beberapa kota pada pagi hari tanggal 17 Agustus, sementara di pedesaan rakyat dilarang menghadiri upacara Hari Kemerdekaan. Namun demikian pembicaraan itu cukup memberikan harapan, dan pada akhir September, sebulan setelah kurir-kurir tersebut kembali berada di Jakarta, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap secara resmi memberitahukan Gubernur Amin dan Kolonel Simbolon akan maksud pemerintah untuk berunding dengan Daud Beureueh.⁸⁶

Gubernur Amin cepat memberikan tanggapan. Dia segera menyambung kembali korespondensi yang terputus dengan pemimpin-pemimpin Darul Islam dan menawarkan kepada Daud Beureueh suatu pembicaraan informal guna membahas prosedur perundingan selanjutnya.

85. *Tangkas*, 25 Agustus 1955; dan *Peristiwa*, 27 Agustus 1955.

86. Hal ini terlihat dalam salah satu surat Simbolon kepada Gubernur Amin, bertanggal Medan, 28 September 1955.

Berbeda dari surat sebelumnya, dalam surat kali ini Gubernur Amin menggambarkan dengan jelas bahwa tawarannya sudah disetujui sepenuhnya oleh Perdana Menteri.⁸⁷ Akan tetapi kesulitan komunikasi menyebabkan surat ini tidak mencapai struktur tertinggi kepemimpinan Darul Islam sampai pertengahan November. Sementara itu Perdana Menteri pun kembali mengirimkan Abdullah Arif untuk berbicara dengan Daud Beureueh pada akhir Oktober. Dari pembicaraan yang berlangsung mulai tanggal 28 Oktober hingga 1 November ini dapat kita ketahui apa yang ditawarkan pemerintah dan apa yang menjadi tuntutan utama Darul Islam. Kedua pihak setuju bahwa konflik harus diselesaikan melalui perundingan yang akan didahului oleh suatu gencatan senjata. Akan tetapi para pemimpin Darul Islam menolak untuk menerima status perundingan yang bersifat informal dan menuntut agar Perdana Menteri mengumumkan keinginannya untuk berunding itu secara terbuka.⁸⁸

Tampaknya Perdana Menteri tidak dapat menyetujui syarat perundingan seperti yang dituntut oleh Daud Beureueh, sebab hal itu akan berarti pengakuan *de facto* Perdana Menteri terhadap Darul Islam. Di lain pihak, tidaklah diragukan bahwa dia juga menginginkan agar pemilihan umum dapat berlangsung dengan lancar di Aceh, terutama karena daerah itu merupakan daerah pemilihan yang paling aman bagi partainya sendiri, Masyumi. Oleh sebab itu fakta bahwa pemilihan umum di beberapa tempat di Aceh telah ditunda dari September menjadi Oktober-November, karena alasan-alasan keamanan, sangat mengkhawatirkan Perdana Menteri. Barangkali inilah salah satu alasan mengapa ia mengutus Abdullah Arif kembali ke Aceh pada akhir Oktober.

Oleh sebab itu tampak bahwa pemerintah seakan-akan sedang bergerak secara sangat berhati-hati. Kehati-hatian itu memberi kesan bahwa pemerintah sedang mencoba untuk menunda langkah-langkah selanjutnya sampai pemilihan umum selesai. Para pemimpin Darul Islam mestinya sangat tidak senang akan hal ini. Oleh karena itu ketika Kabinet tidak memberikan jawaban atas syarat-syarat yang mereka ajukan,

87. Lihat suratnya, bertanggal Medan, 30 September 1955.

88. Hasil pembicaraan antara Abdullah Arif dengan pemimpin-pemimpin Darul Islam ini terdapat dalam surat Hasan Ali kepada Gubernur Amin, bertanggal 14 November 1955; surat tersebut merupakan jawabannya terhadap surat Gubernur Amin tanggal 30 September 1955.

mereka berusaha untuk menarik pemerintah ke meja perundingan dengan menekannya, sehingga menghilangkan kesan bahwa mereka telah mengendurkan perlawanan terhadap pemerintahan Masyumi. Tetapi bukannya mengendurkan perlawanan, mereka malah meningkatkan kampanye menentang Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, di samping melakukan serangan terhadap sasaran-sasaran non-militer, Darul Islam juga menghantam sekurang-kurangnya enam konvoi militer selama periode antara Agustus dan Desember 1955 yang mengambil korban dua puluh dua anggota brimob dan tentara gugur.⁸⁹ Darul Islam juga memperluas pengaruhnya di Sumatera Timur dengan membentuk resimen ketujuh di perbatasan Aceh-Sumatera Timur.

Peningkatan kegiatan Darul Islam ini tentu saja menyusahkan penguasa setempat. Kepala Polisi Sumatera Utara Darwin Karim, terpaksa mendesak Pemerintah Pusat agar menambah unit brimob yang beroperasi di Aceh dari dua belas menjadi dua puluh kompi, atau memberlakukan lagi "perbantuan militer" di Kabupaten-kabupaten Aceh Utara dan Tengah.⁹⁰ Posisi Kolonel Simbolon tidak pula lebih baik daripada Darwin Karim. Meskipun pada waktu itu terdapat lima batalion tentara di Aceh, di samping dua belas kompi brimob, Simbolon mengubah pandangannya terhadap pendekatan untuk memulihkan keamanan di daerah itu. Pada bulan Desember 1955 dia mengusulkan agar Pemerintah Pusat menghentikan sistem perbantuan militer dan memberlakukan keadaan darurat perang untuk seluruh Aceh.⁹¹

Akan tetapi Gubernur Amin tidak mendukung saran itu. Cukup jelas bahwa dia adalah penentangannya yang paling kuat, sehingga ia terpaksa mengulangi lagi ancamannya untuk berhenti apabila keadaan darurat itu diterapkan di Aceh. Berbeda dari Simbolon, Gubernur Amin tidak percaya bahwa keamanan dapat dipulihkan dengan pemberlakuan keadaan darurat perang. Sebaliknya ia berpendapat bahwa penerapan keadaan darurat bukanlah merupakan suatu cara penyelesaian yang tepat. Menurut Gubernur, situasi di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana

89. Lihat *Peristiwa*, 8 Agustus, 6, 17 September, 27 Oktober, 5 November 1955, dan 5 Januari 1956.

90. Lihat surat Darwin Karim kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, bertanggal Medan, 5 November 1955.

91. "Pendapat Plm. TT-I Mengenai Penyelesaian Keamanan di Daerah Atjeh", Medan, 12 Desember 1955.

pemerintah telah memberlakukan keadaan darurat sejak tahun 1950, tidak lebih baik daripada keadaan di Aceh. Dia percaya bahwa secara psikologis penerapan keadaan darurat perang di Aceh pada saat ini akan lebih merugikan, sebab akan memberi kesan bahwa situasi sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dengan alasan-alasan ini, dia menganjurkan agar pemerintah mengirim lebih banyak "tenaga kerja" dan "uang" daripada memberlakukan keadaan darurat.⁹² Oleh karena situasi kemudian semakin memburuk, maka pada bulan Februari 1956 dia mendesak Perdana Menteri Burhanuddin Harahap agar mencapai penyelesaian dengan "jalan lain".

Perdana Menteri memperhatikan rekomendasi ini dan kembali mengirim Abdullah Arif ke Aceh pada pertengahan Februari.⁹³ Akan tetapi kurir ini tidak berhasil mencapai persetujuan karena Perdana Menteri telah mengembalikan mandatnya pada tanggal 3 Maret. Mengapa justru baru saat itu Perdana Menteri melanjutkan perundingan dengan kaum pemberontak padahal ia telah mengetahui hasil perundingan yang terdahulu tiga bulan sebelumnya? Apakah Kabinet sungguh-sungguh bermaksud berunding dan menyelesaikan pemberontakan itu dengan segera? Dari satu sudut terlihat bahwa pendekatan Kabinet terhadap Darul Islam seakan-akan dihambat oleh masalah-masalah politik utama lainnya. Sesudah berhasil mengatasi krisis dalam kepemimpinan Angkatan Darat dengan mengangkat Kolonel (kemudian Mayor Jenderal) Nasution sebagai KSAD, Kabinet menghadapi topan lain baik dari kaum oposisi maupun anggota Kabinet yang lain mengenai masalah perundingan dengan Belanda berkenaan dengan Konferensi Meja Bundar. Keputusan sepihak Kabinet untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari menimbulkan konflik intra-Kabinet manakala anggota-anggota Parlemen dari partai-partai pemerintah, NU, dan PSII, bergabung dengan kaum oposisi dalam suatu mosi tidak percaya. Menurut Feith, situasi ini telah menyudutkan Kabinet sehingga Kabinet praktis kehilangan inisiatif.⁹⁴ Jadi mengherankan sekali jika

92. "Pendapat Gubernur Sumatera Utara Mengenai Usaha Pemulihan Keamanan di Atjeh", Medan, 13 Desember 1955.

93. Lihat suratnya kepada Perdana Menteri/Dewan Keamanan Nasional di Jakarta, bertanggal Medan, 6 Februari 1956

94. Feith, *The Decline*, hal. 456.

dalam keadaan yang sangat kritis ini, Perdana Menteri masih memutuskan untuk mengirim kurir kembali ke Aceh.

Namun tetap dipersoalkan bahwa jika Kabinet sungguh-sungguh berniat untuk mempercepat perundingan dengan Darul Islam, Kabinet masih dapat melakukannya selama bulan November dan bulan-bulan berikut sebelum kejatuhannya. Tampak jelas dalam suatu pertemuan pada tanggal 3 Desember 1955 bahwa Soekarno, Hatta, dan para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara akan mendukung rencana Kabinet untuk berunding dengan gerakan Darul Islam. Para pemimpin dan Kabinet ini telah menyetujui rancangan Nasution untuk berunding dengan Darul Islam atas dasar amnesti, otonomi, dan pembangunan ekonomi, di samping pengakuan pemerintah akan hak warga negara untuk mengejar cita-cita ideologis secara legal.⁹⁵

Kegagalan Kabinet untuk berunding secara resmi dengan Darul Islam menimbulkan spekulasi di dalam dan luar kalangan Masyumi di ibu kota bahwa Kabinet telah dengan sengaja menunda-menunda perundingan itu demi kepentingan partai. Ketidakmampuan Masyumi untuk memenangkan pemilihan umum, serta kecenderungan NU, dan PSII, untuk memperoleh peranan yang lebih besar dalam kepolitikan selepas pemilihan umum telah merisaukan pimpinan kedua partai tersebut. Kerisauan ini bukan tanpa alasan. Sesudah pemilihan umum itu NU mempunyai empat puluh lima wakil dalam Parlemen, padahal sebelumnya hanya delapan wakil, sementara PSII telah melipatgandakan jumlah kursinya dari empat menjadi delapan, sedang Masyumi hanya menguasai lima puluh tujuh kursi. NU dan PSII bahkan mulai menjauhkan diri dari aliansi Islam, dan menjadi lebih dekat lagi dengan PNI. Dalam hubungan ini ada kemungkinan bahwa para pemimpin Masyumi telah memperhitungkan bahwa Darul Islam akan terus berfungsi sebagai suatu organisasi oposisi bersenjata yang akan berhadapan dengan Kabinet hasil pemilihan umum apabila partai mereka sendiri tidak diikutsertakan di dalamnya. Tetapi keberadaan gerakan Darul Islam tampaknya menjadi lebih penting bagi Masyumi ketika tersebar desas-desus bahwa PKI memiliki beberapa batalion sukarelawan bersenjata. Namun, untuk menghindarkan diri dari kritik keras, terutama dari rakyat Aceh, para

95. Lihat "Politik Keamanan Setjara Integral" yang ditandatangani oleh Nasution, bertanggal Jakarta, 3 Desember 1955.

pemimpin Masyumi terpaksa memperlihatkan bahwa perundingan dengan Daud Beureueh sedang berlangsung.⁹⁶

Di lain pihak, pimpinan Masyumi mungkin juga khawatir, bahwa penyelesaian yang cepat akan memberi kesan adanya tekanan PSII terhadap Kabinet. Kesan yang demikian akan dapat meningkatkan citra PSII di Aceh, suatu hal yang tentu saja merugikan Masyumi. Walaupun Masyumilah yang sejak lama memperjuangkan penyelesaian pemberontakan Aceh secara damai di dalam Parlemen, akan tetapi, celakanya, hal itu dinilai semata-mata sebagai perjuangan partai oposisi. Kegagalan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap untuk menyelesaikan pemberontakan itu, dengan sendirinya tidak meningkatkan citra partainya dalam pandangan rakyat Aceh. Berbeda dari Masyumi, sebagaimana telah kita lihat, PSII muncul sebagai satu-satunya partai Islam yang secara terbuka mengambil langkah yang jelas untuk mengajak Kabinet Ali menyelesaikan peristiwa Pulot dan Cot Jeumpa. Kekhawatiran pemimpin-pemimpin Masyumi akan meningkatnya citra PSII di daerah itu bertambah lagi ketika rakyat Aceh, setelah adanya berita-berita di berbagai surat kabar tentang kemungkinan Aceh mendapat status propinsi, lebih menyukai Ali Hasjmy (PSII) daripada Osman Raliby (Masyumi), sebagaimana akan kita lihat nanti, sebagai calon gubernur daerah tersebut.

Oleh karena itu beberapa kalangan Aceh mengaitkan keengganan Kabinet untuk berunding itu dengan pemindahan Gubernur Amin dari Sumatera Utara. Akan tetapi kecurigaan ini sama sekali tidak berdasar. Pemindahan Gubernur Amin itu ternyata bersumber pada konflik yang mendalam antara Gubernur dengan Kepala Polisi mengenai meluasnya perjudian yang digerakkan oleh orang-orang Cina di Aceh dan Sumatera Timur. Gubernur Amin telah melarang kegiatan judi ini, tetapi ia segera mengetahui bahwa kegiatan itu dilindungi oleh pejabat-pejabat penting kepolisian. Gagal menghentikan perjudian itu, maka Gubernur bertenangan dengan Kepala Polisi, Darwin Karim. Akibatnya, pada bulan Desember 1954 ia mendesak Kabinet Ali agar memindahkan Darwin Karim dan beberapa perwira polisi lainnya dari Sumatera Utara, atau dia

96. Spekulasi ini dikumpulkan oleh Arahas, sekretaris jenderal Front Pemuda Aceh, dalam pertemuannya dengan berbagai kalangan politisi, termasuk Masyumi, di Jakarta. Dia dikirim ke Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Burhanuddin Harahap

sendiri yang akan mengundurkan diri.⁹⁷ Namun pemerintah tidak mau mempertimbangkan mutasi itu sampai terbentuknya kabinet yang dipimpin oleh Masyumi. Ketika Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) memprotes dengan keras keputusan itu dan Darwin Karim serta perwira lainnya menolak meninggalkan pos mereka, Perdana Menteri Burhanuddin memindahkan Gubernur Amin dari Medan. Seorang Mandailing lainnya, Sutan Komala Pontas, kemudian diangkat menjadi pejabat gubernur, dan jabatan kepala polisi diserahkan kepada seorang perwira asal Aceh, Muhammad Insja.

Dengan demikian kesangsian pemerintah untuk berunding dengan Darul Islam di Aceh perlahan-lahan menghilang pada tahun 1956-1957, yaitu pada masa Kabinet Ali II. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan situasi politik yang dihadapi kabinet ini. Seperti diketahui, masa sesudah Kabinet Ali dilantik pada bulan Maret 1956 ditandai oleh meningkatnya protes daerah terhadap cara Pemerintah Pusat menangani masalah-masalah ekonomi dan politik, di samping konflik politik di ibu kota. Kendatipun Perdana Menteri Ali bersikeras bahwa pendiriannya dalam hal keamanan tidak berubah, terbukti kemudian bahwa kedua faktor di atas telah memaksanya untuk melepaskan pendiriannya itu.

Kekecewaan politik yang berkembang di banyak daerah antara tahun 1949 dan 1955 telah mengambil bentuk baru selama masa Kabinet Ali II ini. Pertama, kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak daerah berasal dari kebijaksanaan pemerintah yang dirasakan telah mengabaikan kepentingan daerah, sehingga mendorong penguasa militer setempat melibatkan diri dalam kegiatan penyelundupan. Ketidakkampuan pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup untuk operasi-operasi militer di daerah-daerah yang bergolak, padahal pemerintah menuntut ditingkatkannya kampanye penumpasan kaum pemberontak, menjadikan pimpinan militer setempat sebagai "panglima perang" (*warlord*) yang didukung oleh penyelundupan. Keterlibatan tentara dalam kegiatan penyelundupan ini, yang hingga akhir tahun 1955 dianggap sebagai keadaan khas Indonesia Timur, pada tahun 1956 telah meluas sampai ke Sumatera Utara, dan Kolonel Simbolon sendiri menjadi pendorong

dan membahas kemungkinan penyelesaian pemberontakan Aceh. Lihat laporannya kepada Front Pemuda Aceh, bertanggal Medan, 29 Januari 1956.

97. *Patriot*, 17 Desember 1954.

utamanya.⁹⁸ Keadaan ini diimbangi pula oleh meningkatnya berbagai gerakan kedaerahan yang berdasarkan rasa kesukuan, seperti Pemuda Pasundan di Jawa Barat, yang mengungkapkan dendam atas dominasi politik oleh orang-orang Jawa Tengah, atau di Sumatera Timur, di mana kebencian terhadap Batak Toba memuncak.

Dalam pada itu, meskipun penguasa militer setempat kini dapat mengendalikan Aceh, kesetiaan rakyat terhadap daerah mereka sama seperti, jika tidak melebihi, masa sebelum pecahnya pemberontakan. Pemuda PUSA yang militan kini telah digantikan oleh Front Pemuda Aceh yang mendapat dukungan luas dari rakyat Aceh. Dipimpin oleh Acha, pemimpin redaksi harian *Peristiwa*, organisasi yang didirikan pada awal tahun 1955 ini berhasil melebarkan sayapnya ke seluruh Aceh dan bahkan menyebar di kalangan masyarakat Aceh di luar daerah itu. Anggotanya adalah orang-orang Aceh yang berorientasi pada Masyumi yang sangat menentang Perti, unsur-unsur *ulebalang*, PNI, dan PKI. Dengan latar belakang yang demikian, organisasi ini berhasil meneduhi organisasi politik lainnya dalam kepolitikan setempat. Laporan-laporan yang ditampilkan surat kabarnya, *Peristiwa*, tentang pembantaian di Pulot dan Cot Jeumpa dan ketidakmampuan penguasa militer setempat untuk menindaknya, membuat organisasi ini bahkan lebih populer lagi.

Hubungan dengan Masyumi telah menjadikan Front Pemuda Aceh sebagai penentang kebijaksanaan tegas Kabinet Ali I. Organisasi ini sangat suka menyelidiki kekejaman kaum militer, dan memberitakannya dalam *Peristiwa*, di samping menjadi sumber informasi bagi wakil-wakil Aceh di Parlemen. Akan tetapi, sekalipun dekat dengan Masyumi, Front Pemuda Aceh pun sangat mandiri, dalam arti bahwa loyalitasnya kepada daerah menomorduakan prioritasnya pada kepentingan partai. Misalnya, Front Pemuda Aceh dan Masyumi berbeda pandangan dalam hal siapa yang sebaiknya ditunjuk menjadi calon gubernur jika nanti Aceh menjadi suatu propinsi. Dalam hubungan ini, ketika berita-berita mulai tersebar bahwa Kabinet Burhanuddin akan memberikan status propinsi kepada Aceh, Masyumi cabang Aceh mendukung calon-calon dari Masyumi, yaitu Osman Raliby dan Tjek Mat Rahmany. Akan tetapi kedua calon ini tidak dapat diterima oleh Front Pemuda Aceh yang menginginkan

98. Mengenai kegiatan penyelundupan di Sumatera Utara ini, lihat John R. Smail, "The Military Politics of North Sumatra: December 1956-October 1957", *Indonesia*, 6 Oktober 1968, hal. 136 dst.

seorang tokoh yang populer di mata rakyat Aceh; karena itu organisasi ini mendesak agar Kabinet mengangkat Ali Hasjmy, seorang anggota PSII dan pegawai Kementerian Sosial di Jakarta.⁹⁹ Pernah menjadi pemimpin Pesindo pada masa revolusi, Ali Hasjmy jauh lebih populer baik dari Osman Raliby, bekas kepala Jawatan Penerangan di Kutaraja pada masa revolusi, maupun Tjek Maf Rahmany, bekas kepala staf divisi.

Menguatnya rasa primordial rakyat Aceh pada waktu ini umumnya disebabkan oleh pemberontakan dan konsekuensi-konsekuensinya. Operasi militer di Aceh tidak hanya memberi dampak terhadap rakyat setempat melainkan juga mempertajam hubungan antaretnis di ibu kota Sumatera Utara, Medan, yang multietnis itu, khususnya antara orang Aceh dan Batak Toba. Orang Batak, umpamanya, memandang protes keras rakyat Aceh terhadap pembantaian di Pulot dan Cot Jeumpa sebagai suatu hal yang wajar, tetapi penolakan atas keterangan Kolonel Simbolon tentang masalah itu dipandang sebagai suatu serangan terhadap suku Batak secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, berbeda dari organisasi-organisasi lain, organisasi veteran Tapanuli menyatakan dukungan kepada Simbolon dan mendesak Pemerintah Pusat supaya mengabaikan protes-protes itu.¹⁰⁰ Sesuatu yang lebih penting lagi berkembang kemudian, pada akhir Januari 1956, dalam bentuk perkelahian di antara kedua suku itu yang menyebabkan lebih kurang seratus orang terbunuh atau terluka. Perkelahian yang dimulai dengan suatu insiden kecil antara dua orang pelajar Aceh dan Batak di Medan itu dimanfaatkan oleh beberapa politisi suku Batak tertentu untuk mencegah pelantikan Kepala Polisi yang baru, Muhammad Insja.¹⁰¹ Tampaknya orang Batak tidak puas dengan pengangkatan seorang Aceh pada salah satu jabatan puncak di propinsi itu, sebab hal ini akan meningkatkan pengaruh Aceh di Medan.

Faktor lain yang tidak kurang penting peranannya dalam perubahan kebijaksanaan Perdana Menteri Ali adalah meningkatnya pengaruh Nasution. Rumitnya permasalahan pada tingkat regional tampaknya

99. Hal ini terlihat dalam surat Front Pemuda Aceh kepada Menteri Dalam Negeri, bertanggal Kutaraja, 20 November 1955.

100. *Antara*, 19 Maret 1955, sebagaimana dikutip dalam *Kronik* 20, hal. 314.

101. Didasarkan pada suatu laporan yang disiapkan oleh Front Pemuda Aceh cabang Medan; tak bertanggal.

telah memaksa Kabinet ini selama masa jabatannya untuk menggantung diri pada Angkatan Darat. Bahkan sejak awal masa jabatannya yang kedua ini sudah jelas terlihat bahwa Perdana Menteri Ali akan sering tersudutkan. Agar dapat diterima sebagai Menteri Pertahanan oleh pimpinan Angkatan Darat, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo harus mengadakan tawar-menawar dengan KSAD Nasution dengan suatu janji bahwa Menteri Pertahanan tidak akan mencampuri urusan intern Angkatan Darat.¹⁰² Tawar-menawar ini melahirkan tanda-tanda positif bagi perubahan kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap Aceh khususnya, kendatipun Perdana Menteri tetap menyatakan bahwa tidak ada perubahan kebijaksanaan. Dan setelah memenangkan tawar-menawar itu, Nasution pun bergerak dengan cepat untuk melaksanakan rencana-rencananya. Sebagai langkah pertama, ia segera menyampaikan sikap baru Pemerintah Pusat itu kepada rakyat Aceh. Pengangkatan Muhammad Insyah sebagai Kepala Polisi Sumatera Utara oleh Kabinet terdahulu, segera disusul dengan penunjukan seorang perwira Aceh lainnya untuk mengambil alih pimpinan resimen di Kutaraja.

Tidak sulit bagi Nasution untuk memilih orangnya, sebab hanya ada satu atau dua perwira Aceh yang berpangkat mayor ketika itu. Salah seorang dari mereka adalah Mayor Hasballah Hadji, bekas Komandan Komando Militer Kota Besar Medan yang kini ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Agaknya Nasution sama sekali tidak mempertimbangkan Hasballah karena keterlibatannya di dalam persiapan pemberontakan. Oleh karena itu Nasution memilih Mayor Sjamman Gaharu, Komandan Komando Militer Kota Banjarmasin di Kalimantan, yang telah dikenalnya secara baik melalui korespondensi. Sebelum dia dipertimbangkan untuk jabatan itu, atas permintaan Wakil Presiden Hatta, Gaharu mempersiapkan dan memberi pandangan kepada Nasution tentang cara bagaimana pemberontakan Aceh harus ditangani. Akan tetapi perhatian Nasution terhadap rekomendasinya tentu saja bukan satu-satunya faktor yang mengembalikan Gaharu ke Aceh. Adalah wajar jika pimpinan Angkatan Darat sangat berhati-hati dalam mengangkat seorang perwira Aceh pada suatu pos penting dalam situasi yang demikian. Nasution menganggap bahwa dengan latar belakang rakyat biasa yang tidak terlibat dalam PUSA pada masa

102. Feith, *The Decline*, hal. 502.

revolusi dan tidak pula terlalu dekat dengan *ulebalang*, Gaharu tidak akan menimbulkan kesulitan bagi Markas Besar Angkatan Darat, atau merusak rencananya untuk menyelesaikan pemberontakan secara damai.

Namun demikian Kabinet juga sukar mengikuti langkah cepat Angkatan Darat ini. Tampaknya rencana Nasution terpaksa dikesampingkan, sementara keadaan setempat menyebabkan Nasution sulit pula mendesak Kabinet agar menjalankan kebijaksanaannya. Program Kabinet menunjukkan bahwa pemerintah lebih memusatkan perhatian pada masalah internasional daripada masalah keamanan dalam negeri. Kabinet lebih memusatkan diri pada hubungan Indonesia-Belanda dan pada usaha-usaha untuk membentuk propinsi Irian Barat, sedangkan tuntutan rakyat Aceh untuk mendapatkan status propinsi telah diabaikan. Di balik layar, ada konflik yang tajam di dalam Kabinet, yaitu antara Masyumi dan NU di satu pihak, dengan PNI di pihak lain. Dalam Parlemen, PNI yang bersekutu dengan PKI bersikeras agar Kabinet tidak berkompromi dengan Darul Islam, sementara Masyumi dan NU mendukung rencana Angkatan Darat.¹⁰³

Karena keadaan setempat, Nasution tidak dapat mendorong Gaharu lebih jauh selain daripada mengadakan pendekatan-pendekatan terbatas terhadap pimpinan rendahan dalam struktur kepemimpinan Darul Islam. Sebagai seorang bawahan langsung, Gaharu juga tidak dapat melangkahi Simbolon, yang kini lebih menyukai pemberlakuan keadaan darurat perang, sementara ketegangan hubungan antara Nasution dan Simbolon juga sama sekali tidak membantu. Sebelum pengangkatannya, Gaharu telah mengatakan kepada Nasution bahwa dia tidak akan dapat bekerja sama dengan Simbolon, dan bahwa rencana perundingan akan gagal sebab kaum pemberontak tidak dapat menerima kepemimpinan Simbolon. Para pemberontak sangat dendam terhadap Simbolon atas pemecatan yang dilakukannya terhadap prajurit-prajurit Aceh ketika reorganisasi militer di Sumatera Utara berlangsung. Untuk memberi kesempatan kepada Gaharu, Nasution berjanji akan memindahkan Simbolon,¹⁰⁴ tetapi tidak ada alasan untuk menekan Simbolon sampai keterlibatannya dalam penyelundupan terbongkar pada bulan Juli 1956. Namun, seperti akan kita lihat nanti, Simbolon berjuang keras memper-

103. *Peristiwa*, 19 April 1956.

104. Pidato Penguasa Perang, hal. 3.

tahankan kedudukannya sampai bulan Desember.

Walaupun begitu, hampir bersamaan dengan ini, terjadi perubahan yang cepat pada tingkat nasional, yaitu ketika Nasution berhasil mempengaruhi Kabinet dalam soal Aceh. Kelompok yang anti-kompromi dalam Kabinet meninggalkan pendiriannya ketika Kabinet menjadi semakin tergantung pada Angkatan Darat. Konflik internal dalam Angkatan Darat, yang secara bertahap berkembang menjadi ancaman terhadap kekuasaan Kabinet, mendorong Kabinet itu lebih dekat lagi kepada pimpinan Angkatan Darat dan akhirnya menerima rencana perdamaian Nasution. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengaruh Nasution dalam pertarungan kekuasaan di tingkat nasional, terutama sesudah ia berhasil mengatasi berbagai badai dalam tubuh Angkatan Darat. Kegagalan kelompok anti-Nasution menangkap Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani (dari PNI), dalam rangka kampanye anti-korupsi pada pertengahan Agustus, dan kegagalan usaha kudeta beberapa bulan kemudian, bukan hanya menggagalkan usaha untuk mendiskreditkan Kabinet, melainkan juga menyebabkan Perdana Menteri semakin bergantung pada Nasution.¹⁰⁵ Dalam suasana demikian, keengganan Kabinet dan fraksi PNI dalam Parlemen untuk berkompromi dengan Darul Islam pun menjadi hilang.

Dengan segera pada bulan Oktober 1956 Kabinet menginstruksikan Pejabat Gubernur Sumatera Utara Sutan Komala Pontas untuk meneruskan perundingan dengan Daud Beureueh. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa sekarang pemerintah telah siap untuk melakukan perundingan resmi dengan Daud Beureueh, meski pada tahap ini perundingan tersebut hanya diadakan pada tingkat daerah saja.

105. Mengenai usaha penangkapan dan kudeta itu, lihat Feith, *The Decline*, hal. 503-507.

Bab V

Latar Belakang Pemberontakan

BERDASARKAN PARTISIPASI mereka dalam pemberontakan, para pendukung gerakan Darul Islam di Aceh dapat dibagi ke dalam dua kategori. Kelompok pertama adalah mereka yang berpartisipasi secara langsung dengan menggabungkan diri dalam jajaran-jajaran militer atau sipil Darul Islam. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini tidak harus mereka yang bergabung sejak pecahnya pemberontakan, sebab banyak anak muda yang bergabung dengan Darul Islam kemudian. Kebanyakan dari mereka yang ikut berjuang pada hari-hari pertama pemberontakan telah mengundurkan diri ketika Darul Islam mempergunakan taktik gerilya. Karena perang gerilya tidak menghendaki serangan masal dan frontal, maka pada tahun 1954 Darul Islam mengembangkan organisasi-organisasi sipil dan militer yang baru. Ini berarti bahwa gerakan tersebut harus selektif dalam mengisi kesatuan-kesatuannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak sesuai, apakah karena terlalu tua atau terlalu muda, harus meninggalkan unitnya dan tidak dimasukkan ke dalam organisasi gerilya yang menghendaki ketegaran fisik para anggotanya. Namun begitu dukungan orang-orang seperti itu terhadap Darul Islam tidaklah terputus. Partisipasi tidak langsung dari orang-orang seperti ini menyebabkan kita memasukkan mereka ke dalam kategori kedua.

Rakyat dan Pemberontakan

WALAU PUN DALAM perjuangan awal Darul Islam ternyata kalah, dalam arti gagal mempertahankan daerah perkotaan, rakyat masih terus mengalir ke dalam kesatuan-kesatuannya selama bulan-bulan pertama pemberontakan. Ada banyak alasan mengapa rakyat ikut berperan, baik aktif maupun pasif, di dalam pemberontakan ini. Agama merupakan

salah satu alasan utama, akan tetapi faktor-faktor lain, seperti ikatan keluarga, juga memainkan peranan penting dalam mengarahkan rakyat untuk bergabung dengan para pemberontak.

Gambaran berikut tentang sebuah keluarga akan melukiskan bagaimana ikatan keluarga telah mendorong orang bergabung dalam pemberontakan. Keluarga ini cukup berada, di samping sangat taat beragama. Keluarga ini juga mudah mencapai kota, sebab desanya terpisah hanya tiga kilometer dari sebuah kota dan terletak pada suatu jalan raya penting yang menghubungkan kota itu dengan sebuah kota lainnya. Ada dua anak lelaki dalam keluarga ini, dan keduanya telah berkeluarga. Anak yang pertama telah bergabung dalam pemberontakan sejak permulaan dan berpangkat letnan dalam TII. Anak yang sulung menjadi pegawai pada suatu kantor pemerintah di kota itu. Anak ini juga mendukung pemberontakan, meski secara tidak langsung, sehingga ia dibiarkan oleh pemberontak tetap tinggal di desanya. Oleh karena ia adalah seorang pegawai rendahan, dengan sendirinya ia sangat tergantung pada bantuan keluarganya. Rumahnya dibangun oleh orang-tuanya di atas sebidang tanah milik keluarga, dan ia pun tergantung pada hasil sawah keluarganya.

Antara lain disebabkan oleh alasan-alasan keagamaan, di samping faktor-faktor ekonomi, ibunya terus-menerus mendesak anak sulungnya ini agar meninggalkan pekerjaannya di kota dan bergabung dengan pemberontak. Walaupun demikian, anak ini berhasil menolak kehendak ibunya selama beberapa tahun. Dia menilai dirinya sebagai pegawai yang baik dan pekerjaannya pun sesuai dengan dirinya. Selain itu ia sadar bahwa kondisi fisiknya akan menyebabkan dia tidak mampu hidup sebagai gerilyawan di hutan. Namun pendiriannya itu telah menyebabkan ia terlibat dalam konflik yang semakin dalam dengan orang-tuanya. Meskipun demikian orang-tuanya gagal mendesak dia lebih jauh, sampai gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak membawa adiknya pulang dari hutan dan membangun sebuah rumah baru di desa itu. Kenyataan ini mau tidak mau menghidupkan kembali pertikaian antara si anak sulung dan ibunya, sebab ibunya kini terus-menerus menyindir bahwa seorang pegawai negeri tidak akan mampu mempunyai rumah sendiri. Akibatnya, karena tekanan psikologis, anak yang pegawai negeri itu pun meninggalkan kantornya dan bergabung dengan pemberontak

ketika gencatan senjata dibatalkan pada awal tahun 1959.

Peranan keluarga dalam menyalurkan dukungan terhadap pemberontakan bukan hal yang unik untuk kasus Aceh saja. Barbara Harvey telah memperlihatkan bahwa di Sulawesi Selatan hampir setiap orang yang tinggal di kota mempunyai saudara yang berjuang untuk Darul Islam.¹ Dua kasus berikut ini memperlihatkan lebih jauh bagaimana pemberontakan itu telah diperkuat oleh ikatan-ikatan keluarga. Di desa yang disebutkan di atas itu, tetapi dalam sebuah keluarga yang berdiam di seberang jalan raya, baik ayah maupun salah seorang anaknya yang telah dewasa berperan aktif dalam pemberontakan. Hingga pecahnya pemberontakan, sang ayah adalah *keuchik* (kepala desa) desa itu, dan kini menjadi camat dalam struktur pemerintahan Darul Islam. Ia bergabung dengan pemberontak sejak meletusnya pemberontakan itu. Akan tetapi ia tidak menyuruh anaknya berpartisipasi di dalamnya sampai si anak menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah menengah swasta di kota pada tahun 1957. Ketika sang anak bergabung, ia menjadi anggota TII. Dalam kasus yang lain, seorang pegawai negeri mengetahui dengan pasti bahwa salah seorang saudaranya adalah pendukung Darul Islam yang aktif. Pegawai negeri ini terdidik secara sekular, dan ia mempunyai hubungan yang erat dengan kalangan *ulebalang* pada masa lampau. Oleh karena latar belakangnya itulah ia sama sekali tidak berminat pada gagasan Darul Islam, walaupun tidak menentanginya. Sebaliknya, saudaranya adalah orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan kalangan pemberontak, sebab ayah saudaranya itu adalah seorang ulama yang dihormati. Kendatipun ia mengetahui kegiatan-kegiatan saudaranya di kota, tidak pernah terpikirkan olehnya untuk melaporkan hal itu kepada yang berwajib. Malah ketika saudaranya itu ditangkap, ia mempergunakan pengaruhnya sebagai pejabat pemerintahan untuk meyakinkan penguasa militer agar membebaskannya.

Avonturisme dapat juga menjadi faktor yang menyebabkan Darul Islam menarik bagi anak-anak muda Aceh. Menjadi gerilya tidak membuat mereka merasa rendah diri, sebab taktik gerilya sungguh menyenangkan mereka.² Akan tetapi yang lebih penting adalah kenya-

1. Barbara Sillars Harvey, "Tradition, Islam and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965" (disertasi Doktor, Cornell University, 1974), hal. 263.

2. Dalam lebih dari satu kesempatan, kepada saya telah diceritakan bahwa mereka menikmati menjadi pejuang gerilya. Menurut mereka, saat-saat yang paling menggem-

taan bahwa anak-anak muda melihat TII sebagai satu-satunya jalan di daerah itu untuk menyalurkan naluri kemiliteran mereka. Dalam hubungan ini, TII mempunyai daya tarik terhadap dua kelompok anak muda. Kelompok yang pertama adalah mereka yang ditelantarkan oleh program rasionalisasi Angkatan Perang, dan kedua, mereka yang belum pernah terjun dalam pertempuran dalam masa revolusi, dan sekarang ingin menjadi tentara. Sampai akhir dasawarsa 1950-an, adalah kenyataan bahwa lembaga-lembaga pendidikan militer dan polisi Sumatera Utara yang hanya terdapat di Sumatera Timur dan Tapanuli itu menghambat masuknya anak-anak muda Aceh untuk menjadi anggota polisi atau tentara. Pemerintah tampaknya tidak bersedia menampung mereka, barangkali karena khawatir kelak mereka akan bergabung dengan Darul Islam. Tambahan lagi, karena lembaga-lembaga pendidikan militer di Sumatera Utara itu didominasi oleh suku Batak, maka terjadilah diskriminasi terhadap suku Aceh. Selain itu, TII juga sangat menarik bagi anak-anak muda karena memiliki organisasi yang baik. Walaupun perlengkapannya kurang baik bila dibandingkan dengan pasukan pemerintah, TII memberikan status sosial yang baik bagi para anggotanya. Hal ini terutama karena anggota TII diberi pakaian yang rapi dan mendapat gaji yang cukup baik.³ Malah yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa dengan bergabung ke dalam Darul Islam para gerilyawan itu tidak terpengaruh dari keluarga mereka yang tinggal di kampung-kampung.

Kelompok kedua, yang berpartisipasi secara tidak langsung, tidak hanya terdiri atas orang-orang desa, sebab penduduk kota pun ikut

birakan adalah ketika mereka menyergap pasukan pemerintah dengan beberapa tembakan dan menimbulkan kepanikan.

3. Dalam pasukan pemerintah, ketika itu hanya para perwira saja yang mempunyai seragam rapi, sedangkan prajurit rendahan memakai seragam yang telah memudar warnanya. Perwira polisi, umpamanya, terpaksa mengeluarkan uang ekstra untuk menyepuh strip dan bintang pada pangkat mereka dengan emas sehingga kelihatan indah di bahu mereka. Keadaan para prajurit pemerintah bahkan lebih buruk; ketika pemerintah memasukkan batalion-batalion Diponegoro dari Jawa Tengah, banyak di antara prajuritnya yang memakai seragam bertambal. Sebaliknya, seragam TII diganti secara teratur. Selain itu, banyak anggota pasukan pemberontak yang memiliki jam tangan, sedangkan prajurit rendahan dari pasukan pemerintah tidak mampu membelinya, padahal jam tangan merupakan salah satu simbol status di Aceh pada waktu itu.

membantu para pemberontak. Partisipasi tidak langsung ini mempunyai berbagai bentuk, termasuk kepatuhan membayar pajak yang ditetapkan Darul Islam, serta penyediaan kebutuhan dan informasi. Walaupun pada kenyataannya berada di tangan pasukan pemerintah, kota-kota tersebut sebenarnya tidak pernah terbebaskan dari pengaruh Darul Islam. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa baik kota maupun desa, pada kenyataannya, tetap menjadi sel-sel gerakan Darul Islam yang terpadu.

Akan tetapi, di luar semua itu, perkampungan merupakan benteng kekuatan yang paling penting bagi para pemberontak. Kecuali di sejumlah desa yang berada di bawah pengaruh kuat para pemimpin Perti, terutama di Aceh Barat dan Selatan, kebanyakan penduduk tidak pernah terlepas dari kaum pemberontak. Mereka membantu para pemberontak dengan berbagai cara. Tidak ada tanda-tanda apa pun dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa yang menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung atau tunduk kepada pemerintahan kaum pemberontak, kecuali saat datangnya pasukan pemerintah. Apabila mereka berbicara tentang "pemerintah", maka yang mereka maksudkan adalah pemerintahan Darul Islam. Rujukan terhadap pemerintah nasional adalah "Pancasila" atau "*Kaphee*", atau gabungan keduanya, "*Kaphee Pancasila*", yang semuanya diucapkan secara sinis. Mereka tentu saja mengenal sejumlah istilah, yang berasal dari para pejabat pemerintahan, yang menamakan Darul Islam "pemberontak" atau "gerombolan", namun mereka lebih suka menggunakan istilah-istilah Aceh yang sopan seperti "*ureung ateuh*" atau "*ureung glee*".⁴ Dengan orientasi desa yang pro-Darul Islam ini, maka merupakan hal yang biasa bila kita mendapatkan anggota gerakan Darul Islam yang berdiam di kampung-kampung, atau regu-regu pasukan pemberontak yang melintasi desa dengan sepeda sambil menyapa penduduk dengan "assalamu alaikum".

4. Istilah "gerombolan" sebenarnya merupakan bentuk singkat dari "gerombolan pengacau". Meskipun dalam pandangan pemerintah istilah "pemberontak" dan "gerombolan" mengandung arti negatif, tidak satu pun dari kedua kata itu yang tidak disukai oleh para pemberontak. Para pemimpin pemberontakan malah dengan bangga menyetujui bahwa mereka adalah pemberontak. Mereka menolak istilah "gerombolan pengacau", tetapi tidak berkeberatan pada bentuk singkatnya, "gerombolan", sebab kata itu hanya berarti sekelompok orang. Istilah Aceh *ureung ateuh* dan *ureung glee* hanya berarti "orang di gunung" atau "orang di hutan".

Jadi, rakyat desa sama sekali tidak mengkhawatirkan kehadiran para pemberontak di sekeliling mereka. Sebaliknya, mereka malah memandang pasukan pemerintah sebagai musuh. Apabila ada tanda-tanda patroli dari pasukan pemerintah, maka situasi di daerah pedesaan segera berubah, seakan-akan ada peperangan layaknya. Beduk dipukul bertalutalu untuk mengabarkan kepada penduduk dan para pemberontak bahwa pasukan pemerintah sedang mendekat. Beduk itu juga menyampaikan berita yang sama kepada kampung-kampung di sekitarnya, dan tidak akan berhenti sampai suaranya diperkirakan dapat terdengar oleh tentara pemerintah yang sedang berpatroli. Mendengar suara beduk, *keuchik* akan segera pergi ke *meunasah* (pusat kegiatan agama dan sosial di desa, mirip langgar) untuk menaikkan bendera Indonesia. Ia akan tetap berada di sana untuk menyambut kedatangan pasukan pemerintah, dan suasana kampung pun berubah menjadi lengang dan tegang sampai tentara-tentara itu pergi.

Dalam pada itu, sementara para pemberontak menyelusup ke luar desa, penduduk yang lain bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Anak laki-laki dan perempuan, serta wanita-wanita muda akan bersembunyi di lubang-lubang atau tempat persembunyian keluarga, sementara orang-orang lain dalam keluarga pergi menyembunyikan segala macam senjata tajam. Di kedai-kedai desa yang tetap buka sebagaimana biasanya, beberapa lelaki tetap duduk dan bercakap-cakap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mereka harus bersikap demikian supaya tidak menimbulkan kecurigaan tentara, dan kemarahan tentara akan berujung pada pembumihangusan kedai-kedai atau bahkan seluruh kampung tersebut. Biasanya tentara menanyakan kegiatan-kegiatan pemberontak di daerah sekitar itu. Pertanyaan sedemikian senantiasa menemui jawaban yang sama: "Tidak tahu, Tuan".

Reaksi tentara terhadap jawaban itu bermacam-macam, tergantung pada keadaan mereka. Bila mereka baru saja menghadapi cegatan pemberontak di dekat desa, sikap tidak bersahabat penduduk desa tentu akan melahirkan bentakan, pemukulan, bahkan pembunuhan, serta pembakaran rumah.

Segera setelah tentara meninggalkan desa, maka *keuchik* pun menurunkan bendera dan menyimpannya untuk dipakai kembali pada waktu yang akan datang. Kemudian beduk dibunyikan lagi untuk mengabarkan kepergian tentara kepada penduduk dan pemberontak. Kampung

itu segera normal kembali dan kehidupan pun berjalan seperti biasa lagi. Kemudian kedai kopi akan menjadi pusat perhatian, sebab di situlah penduduk desa saling menceritakan pengalaman mereka.

Hampir setiap orang di desa mengetahui apakah seseorang berperanan aktif atau sekadar ikut serta secara tidak langsung dalam pemberontakan. Tentu saja ada penduduk yang benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai Darul Islam, sekalipun mereka tetap membayar iuran. Akan tetapi, mereka yang mengetahui kegiatan Darul Islam tidak akan memberikan informasi apa pun kepada pasukan pemerintah yang sedang berpatroli. Jadi, mereka tidak memberitahukan sesuatu kepada pasukan pemerintah, bisa karena memang tidak mau mengatakan atau karena benar-benar tidak mengetahuinya. Pada kenyataannya, kebanyakan penduduk berusaha untuk membantu anggota Darul Islam dan keluarga mereka, bahkan dengan risiko yang membahayakan diri sendiri. Misalnya, seorang wanita di sebuah desa dekat Bireuen ditangkap oleh pasukan pemerintah yang mengira bahwa dia adalah istri Husin Jusuf, salah seorang pemimpin utama Darul Islam. Ia dipaksa mengaku bahwa ia adalah istri pemimpin itu, tetapi ia membantah, sebab ia memang bukan wanita yang sedang dicari pasukan itu. Beberapa wanita lain di kampung itu juga diperlakukan sama. Mereka semua membantah menjadi istri Husin Jusuf, sebab memang demikianlah adanya. Akan tetapi mereka tidak mengatakan kepada tentara itu bahwa mereka mengenal istri Husin Jusuf yang sedang bersembunyi di desa tersebut.⁵ Sebuah contoh lain menyangkut pengalaman seorang penduduk kampung dekat Sigli. Dia hampir mati dipukul tentara yang sedang patroli karena jawaban yang diberikannya tidak memuaskan mereka. Mereka menginginkan informasi tentang sepasukan TII yang melarikan diri setelah menyergap pasukan itu, akan tetapi orang tersebut tidak mengatakan apa pun sebab ia benar-benar tidak mengetahuinya.

Sementara penduduk kampung tidak bersedia membantu pasukan pemerintah, sebaliknya, bagi kaum pemberontak mereka adalah sumber penting dalam hal informasi dan perbekalan. Peranan ini tidak terbatas dalam batas-batas sesuatu desa saja. Kenyataan bahwa mereka dapat

5. Untuk cerita ini, saya berutang budi kepada Ummi Salamah, isteri Husin Jusuf, yang telah bersedia meminjamkan kepada saya catatan-catatan pribadinya yang tidak diterbitkan.

berhubungan dengan kota telah menjadikan mereka informan dan penghubung yang baik bagi para pemberontak. Sebagai informan, mereka diminta mengamati gerakan pasukan pemerintah dan berbagai kegiatan unsur-unsur anti-Darul Islam di kota-kota. Dilihat dari sudut kecerdasan, guru dan murid sekolah menengah yang bolak-balik ke kota setiap hari adalah sangat bermanfaat bagi para pemberontak dalam mengintai kegiatan militer. Di lain pihak, karena kemampuan menjelajah kota dari rumah ke rumah, para penjual kayu bakar⁶ dimanfaatkan pula untuk memperhatikan gerakan unsur-unsur anti-Darul Islam yang berdiam di kota di bawah lindungan pasukan pemerintah. Penduduk desa juga dipergunakan sebagai kurir yang menghubungkan Darul Islam dengan agen dan penyalur perbekalan di kota-kota.

Selain itu penduduk kota juga ikut membantu pemberontak dengan cara mereka sendiri. Oleh karena kota merupakan pusat konsentrasi pasukan pemerintah, maka wajarlah bila kota menjadi sasaran pengintaian bagi para pemberontak. Di samping itu, kota juga merupakan sumber pajak bagi Darul Islam. Orang-orang penting di kota biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan Darul Islam, sehingga mereka juga sangat berperan dalam membantu gerakan itu. Pejabat-pejabat sipil suku Aceh diajak bekerja sama oleh pimpinan pemberontak tanpa meninggalkan jabatan mereka,⁷ sehingga berbagai fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu para pengurus dan juru rawat di rumah-rumah sakit atau klinik pemerintah selalu membantu Darul Islam dengan memberi perawatan bagi para pemberontak yang terluka dan melindungi mereka dari pemerintah. Supir-supir bis dan truk pun ikut berpartisipasi dengan membunyikan klakson pada waktu melintasi desa atau pos-pos pemberontak di sepanjang jalan untuk mengingatkan akan adanya konvoi dan patroli pasukan pemerintah. Para pengemudi itu juga merahasiakan persiapan penghadangan yang dilakukan pemberontak di jalan raya. Dengan berbuat demikian berarti mereka juga melindungi diri sendiri dari cegatan yang ditujukan terhadap pasukan pemerintah, sebab para pemberontak telah memberitahukan hal itu kepada mereka

6. Pada waktu itu penduduk kota masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, bukan kompor minyak.

7. Hal ini, misalnya, terlihat dalam catatan yang ditulis tangan oleh Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, bertanggal Medan, 11 Oktober 1954.

sebelumnya.⁸

Namun ada satu perbedaan penting pada cara partisipasi penduduk kampung dan kota di dalam pemberontakan. Di pedesaan, dukungan diberikan secara terbuka. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kerukunan (solidaritas) di antara sesama penduduk kampung yang tumbuh dari pertalian keluarga dan hubungan tatap-muka, serta sebagian juga disebabkan oleh kenyataan bahwa kampung-kampung berada di bawah pengaruh Darul Islam. Sebaliknya di kota-kota, segala sesuatunya dilakukan secara rahasia, bukan hanya karena kota-kota dikuasai oleh pasukan pemerintah, melainkan juga karena kurangnya solidaritas di kalangan penduduk kota. Seorang pemungut pajak yang bekerja untuk kaum pemberontak, misalnya, lebih senang berhubungan dengan para pedagang Cina daripada berhubungan langsung dengan orang Aceh, sebab ia khawatir akan kemungkinan bahwa pribumi itu termasuk salah seorang yang menentang Darul Islam. Para pedagang Cina, biar bagaimanapun, tidak akan berkhianat dan melaporkannya kepada yang berwajib karena ketakutan mereka akan ancaman para pemberontak.⁹

Untuk peranan mereka dalam pemberontakan itu, tampaknya rakyat siap menerima segala risiko, bahkan atas jiwa mereka sekalipun. Sementara kaum pemberontak mengambil keuntungan dari situasi ini, pemerintah tidak mampu menarik rakyat ke pihaknya. Sebuah gambaran menarik tentang sikap rakyat tersebut diperlihatkan oleh peristiwa berikut. Peristiwa ini melibatkan pemberontak, tentara pemerintah beserta seorang penunjuk jalannya (yang orang Aceh), dan secara tidak langsung, rakyat setempat. Dalam kejadian ini, penunjuk jalan tersebut ditusuk mati oleh seorang anggota Darul Islam di tengah pasar di sebuah kota kecil.

8. Diberitakan bahwa sebelum Darul Islam menyergap sebuah truk yang mengangkut pasukan pemerintah di Cot Jeumpa pada tahun 1955, beberapa pengemudi truk telah mengetahui bahwa peristiwa itu akan terjadi, karena pemberontak sudah lebih dahulu memperingatkan mereka agar tidak menggunakan jalan tersebut. Tidak seorang pun di antara supir-supir ini yang menceritakannya kepada pihak pemerintah di Kutaraja, sehingga Darul Islam berhasil menghancurkan pasukan itu, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya. Lihat penjelasan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tentang kejadian di Cot Jeumpa itu kepada Parlemen pada tanggal 13 April 1955, dalam *Kronik* 20, hal. 369.

9. Wawancara dengan Teungku Haji Adjhari, salah seorang dari pemungut pajak itu, Medan, 3 Desember 1975.

Banyak orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau memberikan informasi kepada pasukan pemerintah, meski sebenarnya mereka tahu bahwa si penusuk itu masih bersembunyi dalam pasar.¹⁰ Dalam banyak kasus, ketidaksediaan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah mengakibatkan balas dendam pasukan pemerintah, yang biasanya akan membakar rumah dan bahkan membunuh secara sembarangan.¹¹

Mengapa pemberontak mendapat dukungan luar biasa seperti itu? Mengapa rakyat bersekutu dengan Darul Islam? Atau, singkatnya, apa yang menyebabkan rakyat berpihak pada pemberontak? Sementara kita telah melihat pentingnya peranan yang dimainkan oleh ikatan keluarga di dalam membentuk persepsi rakyat tentang pemberontakan, sebenarnya masih banyak lagi aspek lain yang perlu diperhatikan. Yang satu adalah agama, sedangkan lainnya adalah paksaan. Telah dikemukakan dalam Bab II bahwa pembubaran Propinsi Aceh dan perkembangan sosial yang mengancam nilai-nilai keagamaan rakyat Aceh merupakan dua faktor pokok yang menyebabkan pemimpin-pemimpin mereka memberontak. Dari kedua faktor ini, agama dipandang oleh para pemimpin Aceh sebagai faktor yang lebih penting daripada ekonomi atau lainnya di dalam menarik rakyat untuk mendukung pemberontakan.¹² Karena itulah komando pemberontakan berada di tangan para ulama.

Perkiraan demikian agaknya cukup menjelaskan sebab-sebab timbulnya pemberontakan, tetapi alasan-alasan itu sama sekali tidak menerangkan mengapa rakyat menggabungkan diri dan membantu tindakan ini. Penekanan kampanye anti-pemerintah, sebelum meletusnya pemberontakan, pada nilai-nilai keagamaan tentu saja dapat menumbuhkan sentimen keagamaan di kalangan para ulama yang tidak berpolitik, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk memberontak. Akan tetapi dengan meletakkan tekanan pada nilai-nilai keagamaan tidak

10. Catatan tulisan tangan dari Panglima Polim.

11. Umpamanya, dua buah pasar di pinggiran Sigli dibakar pasukan pemerintah pada bulan Maret 1955 sebagai pembalasan atas penusukan terhadap seorang tentara dan seorang penunjuk jalan oleh seorang anggota Darul Islam. Meskipun ada penembakan secara membabi buta, tidak ada seorang penduduk pun yang tewas, sebab mereka telah meninggalkan pasar itu sebelum pasukan pemerintah tiba di sana; lihat *Peristiwa*, 17 Maret 1955.

12. Lihat pernyataan Ismail Jakub, dalam S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan NV, 1956), hal. 230-232.

berarti bahwa rakyat jelata juga akan mendukung pemberontakan. Dalam suatu wawancara Daud Beureueh mengatakan, "Jika saya mengumumkan suatu pemberontakan lain sekarang, setengah Aceh akan mengikuti saya".¹³ Ini mengandung arti bahwa sekalipun dia memanipulasi sentimen keagamaan, dia hanya akan mampu memperoleh dukungan dari setengah rakyat Aceh. Bagaimana dengan setengah lainnya? Apakah mereka tidak setaat orang-orang yang akan memberi jawaban positif bagi perintah Daud Beureueh? Apabila kita percaya begitu saja bahwa semua rakyat Aceh fanatik, ada alasan untuk mengemukakan bahwa setengah rakyat Aceh lainnya tidak akan mengikuti Daud Beureueh karena mereka berada di bawah pengaruh ulama-ulama lain. Bila memang demikian halnya, harus ada faktor lain yang berperan di antara rakyat dan ulama, yang mengilhami mereka untuk mengikuti jejak pihak kedua itu.

Paksaan barangkali memainkan peranan dalam menentukan dukungan rakyat kepada pemberontak. Dikatakan bahwa hanya orang-orang yang menentang, menantang secara terbuka, serta tidak percaya pada Darul Islam saja yang diancam oleh kaum pemberontak. Memang banyak orang tidak mengalami sendiri ancaman langsung dari Darul Islam, akan tetapi rasa takut akan ancaman itu dapat membentuk tanggapan mereka terhadap kaum pemberontak. Penggunaan paksaan, atau ancaman untuk menggunakan ancaman oleh Darul Islam menyebabkan orang-orang ini pasif, dalam arti bahwa mereka tidak menentang dan tidak pula mendukungnya. Tetapi paksaan juga bisa menyebabkan banyak orang mendukung pemberontakan itu, meskipun mereka tidak benar-benar antusias terhadapnya. Pemungut pajak yang disebutkan di atas adalah salah satu contohnya. Ia adalah orang yang taat beragama. Hubungannya yang dekat dengan seorang *Ulebalang* pada masa lampau menyebabkan dia jauh dari teman-temannya yang kemudian memimpin Darul Islam di daerah itu. Namun begitu, dia juga diundang menghadiri sebuah rapat yang menyusun kepemimpinan pemberontakan setempat. Dalam hal ini, walaupun berpendapat bahwa Darul Islam sebagai suatu gerakan merupakan sesuatu yang baik, ia tetap tidak mau mendukungnya. Alasannya ialah bahwa dia tidak menyukai

13. Wawancara dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Beureunen 10 Juli 1973.

kawan-kawannya dan bahwa "dengan orang-orang semacam ini, kita tidak akan mencapai suatu negara Islam". Meskipun demikian, karena khawatir akan berbahaya bila menolak untuk bekerja sama, maka ia merasa wajib untuk mengambil bagian di dalam pemberontakan itu. Memang kedekatannya dengan *Ulebalang* pada masa lalu merupakan alasan yang baik bagi para pemberontak untuk mencurigainya.

Dengan mempertimbangkan contoh ini, maka mereka yang menentang atau tidak membantu Darul Islam mengemukakan bahwa dukungan rakyat bagi gerakan itu jangan dilihat sebagai tanda dari partisipasi ikhlas rakyat. Menurut mereka, rakyat lebih takut kepada para pemberontak daripada kepada pemerintah. Oleh sebab itu rakyat tidak mempunyai pilihan lain selain daripada mendukung Darul Islam dan menolak berpihak pada pemerintah. Jika seseorang mendukung pemerintah, maka pemberontak pasti membunuh dia, membakar rumahnya, dan merampas hartanya. Di lain pihak, bila ia memihak Darul Islam, paling berat ia hanya ditangkap oleh pemerintah.¹⁴

Pendapat seperti ini dibantah oleh mereka yang memang dengan ikhlas berpartisipasi dalam pemberontakan, secara langsung atau tidak. Mereka malah melihat pemberontak sebagai pelindung. Mereka mengakui bahwa unsur-unsur Darul Islam mau tidak mau harus terlibat dalam teror. Tetapi, menurut mereka, kasus-kasus teror hanya ditujukan terhadap "unsur-unsur jahat" yang berkaitan dengan BKR dan bekerja untuk pemerintah. "Darul Islam tidak akan menyentuhmu, kecuali bila engkau membencinya", demikian dikatakan oleh seorang wanita kepada saya di suatu kampung dekat Kutaraja. Seorang wanita lain mengatakan bahwa para pemberontak tidak pernah datang ke desa untuk memperkosa wanita atau membakar rumah, sekolah, dan mesjid, tapi sebaliknya, semua ini dilakukan oleh pasukan pemerintah. Bahkan pejabat-pejabat suku Aceh yang pro-pemerintah, seperti Panglima Polim sekalipun mengakui, bahwa tentara pemerintah beserta penunjuk jalan mereka terlibat dalam praktek-praktek tercela yang menyebabkan rakyat takut kepada mereka.¹⁵

14. Argumen ini muncul dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Presiden Soekarno oleh para pemimpin Perti, Teungku Hasan Krueng Kalee dan Teungku Habib Muda Wali, bertanggal 29 November 1954. Lihat juga catatan tulisan tangan Panglima Polim.

15. Panglima Polim, *op. cit.*

Ketakutan terhadap agen-agen Darul Islam atau pemerintah, tampaknya bukan merupakan jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan mengapa kebanyakan rakyat Aceh untuk memberi dukungan kepada pemberontakan itu. Kalau kita mempertahankan pendapat bahwa ancaman Darul Islam memaksa rakyat Aceh memberi dukungan mereka terhadap pemberontak, mengapa ancaman dari agen-agen pemerintah tidak menyebabkan penduduk berpihak kepada pemerintah? Demikian pula jika kita mengatakan bahwa ancaman pemerintah telah menyebabkan rakyat Aceh menjauhi pemerintah, maka mengapa ancaman kaum pemberontak tidak membuahkan hasil yang sama? Di beberapa tempat di Aceh Barat dan Selatan, Darul Islam sama sekali gagal memperoleh dukungan rakyat setempat, padahal anggota-anggotanya di sana telah bertindak dengan keras. Dalam hubungan ini, ancaman terhadap penduduk desa telah menyebabkan mereka lari ke kota dan bukan sebaliknya bekerja sama dengan Darul Islam. Lebih jauh lagi, tindakan keras pasukan pemerintah di tempat-tempat lain di Aceh tidak menghambat hubungan penduduk dengan Darul Islam.

Dengan demikian dapatkah dikatakan bahwa dukungan masal telah dinikmati oleh pemberontak karena rakyat lebih takut kepada mereka daripada kepada pasukan pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh unsur-unsur pro-pemerintah? Pasti tidak demikian, sebab bukan saja terdapat banyak bukti tentang kebrutalan pihak pemerintah, akan tetapi juga karena, seperti dikatakan Buss, hukuman tingkat rendah sekalipun tidak merintangangi tingkah laku agresif¹⁶ rakyat terhadap pemerintah. Buss juga berpendapat bahwa "hukuman tingkat tinggi juga menimbulkan ketakutan dan pelarian".¹⁷ Dengan mempertimbangkan hipotesa psikologis ini, marilah kita kembali pada pertanyaan yang telah diajukan di atas. Sekalipun ada ancaman keras dari Darul Islam di kampung-kampung tertentu di Aceh Barat dan Selatan, mengapa rakyat di sana tetap menentang kaum pemberontak? Dan, sesudah melakukan tekanan berat terhadap rakyat di bagian-bagian Aceh lainnya, mengapa pemerintah gagal memisahkan rakyat dari para pemberontak?

16. Arnold H. Buss, *The Psychology of Aggression* (New York: Wiley, 1961), hal. 58, sebagaimana dikutip oleh Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970), hal. 241.

17. Buss, seperti dikutip Gurr, *op. cit.*

Kedua pertanyaan ini membawa kita kembali pada pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya -- bahwa ada sesuatu yang mengaitkan rakyat dengan pemimpin mereka, yakni sesuatu yang menimbulkan dorongan untuk mendukung. Dalam suatu studi tentang gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Jackson dan Moeliono menemukan bahwa konsep kekuasaan tradisional memainkan peranan besar di dalam membentuk persepsi rakyat tentang pemberontakan itu. Ikatan pribadi antara para pemimpin dan pengikut mereka merupakan motivasi utama yang mengarahkan rakyat pada tindakan politik.¹⁸ Sumber kekuasaan tradisional dalam masyarakat Aceh lebih kurang sama dengan di Jawa Barat. Tetapi ada suatu faktor yang membedakan keduanya. Di Aceh, berbeda dari kasus Sunda, hubungan pribadi antara pemimpin dan pengikut mereka bebas dari pengaruh sumber-sumber material, yang dalam masyarakat Sunda menciptakan utang budi atau kewajiban moral para pengikut terhadap pemimpin mereka.¹⁹ Hal ini disebabkan karena di Aceh tanah tidak merupakan suatu sumber yang langka seperti di Jawa. Manakala seorang petani mengalami kesulitan keuangan, ia dapat menjual atau menggadaikan tanah atau ternaknya. Atau, karena ikatan-ikatan keluarga yang kuat, ia boleh kembali kepada keluarganya untuk mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, konsep kewajiban moral dalam masyarakat Aceh lebih banyak didasarkan pada bantuan non-materi. Hubungan *patron-client*, seperti dikemukakan oleh Scott,²⁰ juga tidak dapat diterapkan, sebab jelas tidak ada bantuan materi yang menciptakan keterkaitan

18. Lihat Karl D. Jackson dan Johannes Moeliono, "Participation in Rebellion: The Dar'ul Islam in West Java", dalam *Political Participation in Modern Indonesia*, diedit oleh R. William Liddle (Monograph Series no.19 Southeast Asian Studies, Yale University, 1973), hal. 12-57. Pemahaman saya terhadap wibawa tradisional sama dengan Jackson dan Moeliono, yang mendefinisikannya sebagai "pelaksanaan kekuasaan pribadi yang terkumpul melalui peranan seorang yang berpengaruh pada masa lampau dan sekarang sebagai pemberi, pelindung, pendidik, dan mempunyai status yang lebih tinggi terhadap orang-orang yang membangun hubungan ketergantungan dengannya. Sekali wibawa tradisional itu telah terbina, maka pemimpin tidak perlu mengancam, menawarkan ganjaran materi atau simbolis, membujuk, atau menunjuk pada aturan yang mengatur peranan; perintahnya diterima semata-mata atas dasar siapa dia dan atas dasar hubungan pribadi yang khusus, yang ia tumbuhkan dengan setiap pengikutnya". *Ibid.*, hal. 15.

19. *Ibid.*, hal. 35-36.

20. Lihat James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", dalam *American Political Science Review*, 66 (1972), hal. 91-113.

antara pengikut dengan pemimpin mereka. Alinea-alinea berikut ini juga mendukung pendapat Jackson dan Moeliono bahwa "tindakan politik orang desa lebih banyak ditentukan oleh kekuasaan tradisional daripada oleh perkara ekonomi dan ideologi".²¹

Sebelum membicarakan tingkat kedalaman kekuasaan tradisional dalam masyarakat Aceh, terlebih dahulu kita harus menjelaskan siapa yang kita maksud dengan "pemimpin". Dua bentuk pemimpin telah dikemukakan sebelumnya: ulama dan zuama. Dalam buku ini kita berbicara mengenai suatu masa ketika masyarakat Aceh sangat didominasi oleh para ulama; oleh karena itu mereka merupakan unsur yang paling penting dalam konsep kepemimpinan kita. Namun dengan mengatakan demikian sama sekali tidak dimaksudkan bahwa para zuama adalah pengikut. Mereka juga pemimpin tetapi beberapa faktor telah mengakibatkan pengaruh mereka terhadap massa menjadi terbatas. Berbeda dari kaum ulama, para zuama baru muncul selama masa revolusi dan, karena itu, tidak memiliki dasar dukungan yang kuat dalam masyarakat Aceh. Satu-satunya dasar dukungan bagi mereka adalah Pesindo dan organisasi-organisasi militer reguler, di mana mereka tentu mempunyai pengaruh. Akan tetapi, karena banyak anggota dari organisasi-organisasi ini juga berada di bawah pengaruh para ulama, maka kaum zuama pun terpaksa membagi basis pengaruh ini dengan mereka.

Sementara masyarakat Aceh masih bersifat pedesaan, zuama pada dasarnya merupakan suatu kepemimpinan yang berasaskan kekotaan. Namun juga sulit bagi para zuama untuk mendominasi perkotaan karena pengaruh kaum ulama pun sangat kuat di kalangan penduduk kota. Dalam pada itu, zuama juga tidak dapat mempengaruhi penduduk kota yang tidak berorientasi pada ulama, yang sedikit jumlahnya itu, sebab kebanyakan dari mereka adalah unsur-unsur *ulebalang*. Dengan demikian, menyangkut soal pengikut, para pemimpin zuama menjadi tidak penting. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menantang Pemerintah Pusat tanpa dukungan kaum ulama.

Untuk dapat mempertimbangkan bagaimana mendalamnya akar kekuasaan tradisional dalam kehidupan rakyat Aceh, marilah pertamanya kita tinjau lingkungan perkampungan Aceh. Sebuah desa atau *gampong* dikepalai oleh *keuchik*. Dilihat dari fungsi dan posisinya, seorang

21. Jackson dan Moeliono, *op. cit.*, hal. 52.

keuchik merupakan "bapak" dari sebuah kampung. Hal ini karena dialah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban di dalam wilayahnya, di samping karena dia dipandang sebagai satu-satunya orang yang paling mengetahui adat dalam desa itu. Sebagai "bapak" desa, kedudukannya sangat dihormati.²² Oleh sebab itu, secara internal, ia tampil dalam semua peristiwa yang terjadi di kampungnya, dan secara eksternal, ia merupakan juru bicara desa itu. *Keuchik* tidak mendapat gaji, tapi ia memperoleh uang dari biaya jasa yang ia berikan pada rakyatnya, misalnya biaya mengurus pernikahan dan penyelesaian pertikaian, yang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan seluruh penghasilannya. Seperti penduduk desa, ia sangat tergantung pada tanahnya sendiri. Kenyataan bahwa ia tidak menerima gaji dari lembaga mana pun di luar kampungnya menjadikannya bebas mewakili kepentingan desanya, di samping sangat dihormati oleh rakyatnya. Penghargaan tinggi yang diberikan kepada seorang *keuchik* juga berpunca pada kenyataan bahwa, pada umumnya, kedudukan kepala desa bersifat turun-temurun.²³

Namun begitu, kekuasaan *keuchik* bukan tidak terbatas. Sekalipun rakyat Aceh percaya bahwa adat dan agama tidak dapat dipisahkan,²⁴ pada prakteknya pengaturan kedua aliran kehidupan itu tidak terpusat hanya dalam tangan kepala desa. Oleh sebab itu, "bapak" desa atau *keuchik* harus membagi kekuasaannya dengan "ibu" desa, *teungku meunasah*, yaitu seorang ulama yang bertugas mengawasi *meunasah*. Jadi, sementara *keuchik* menjalankan kekuasaannya dalam bidang adat,

22. C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, diterjemahkan oleh A.W.S. O'Sullivan (Leyden: E.J. Brill, 1906), jilid I, hal. 66.

23. Pemerintahan desa telah menjadi suatu hal yang turun-temurun bagi sebuah keluarga *keuchik*. Seorang *keuchik* menerima kedudukan itu dari tetuanya -- ayah, paman, atau bahkan abangnya -- karena dia dianggap sama bijaksananya dengan keluarga besarnya. Oleh karena itu, pada waktu mengundurkan diri, dia akan menyerahkan posisinya kepada seorang arif lainnya yang ada dalam keluarganya, dengan demikian reputasi keluarganya dapat dipelihara. Akan tetapi gambaran ini hanya berlaku sampai periode yang tercakup oleh buku ini. Sejak tahun 1960-an, pengangkatan *keuchik* sudah lebih demokratis, terutama di kampung-kampung yang berdekatan dengan kota di mana *keuchik* pada umumnya dipilih oleh rakyat.

24. Sebuah pepatah Aceh mengatakan, *bukom ngon adat hanjeut cree, lage zat ngon sipbeut*, yang berarti "hukum adat dan agama tidak boleh dipisahkan, seperti benda dengan sifatnya".

teungku meunasah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap urusan keagamaan. Sebagaimana halnya dengan *keuchik*, kedudukan *teungku meunasah* juga sangat dihormati. Sebagai pemimpin *meunasah*, pekerjaannya yang paling utama adalah memimpin sembahyang di *meunasah*, terutama salat magrib dan isya, selain ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, termasuk perhelatan. Seperti *keuchik* pula, sumber utama pendapatan *teungku meunasah* adalah tanahnya sendiri, meskipun ia juga menerima sejumlah uang dari penduduk desa sebagai imbalan atas jasa-jasa yang diberikannya.

Tidak jarang *teungku meunasah* lebih berpengaruh daripada *keuchik*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa selain menjadi pemimpin *meunasah*, *teungku meunasah* juga bertanggung jawab atas penyebaran ajaran Islam dan pendidikan rakyat di wilayahnya. Oleh sebab itu, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, ia mengajarkan agama kepada penduduk desa, terutama anak-anak muda. Melalui kegiatan pengajian inilah ia membina hubungan khusus dengan rakyat desa. Di satu pihak terdapat ikatan kuat antara guru dan murid yang senantiasa diperlihatkan oleh murid-muridnya dalam kepatuhan yang hampir bersifat total. Di lain pihak, ia juga dihormati oleh para orang-tua murid-muridnya itu. Rasa hormat kaum wanita di kampung itu terhadap *teungku meunasah* diperkuat oleh kenyataan bahwa istrinya juga menjadi guru mereka.

Dalam suasana yang demikian, *keuchik* harus bekerja sama dengan *teungku meunasah*. Meskipun membayangkan *keuchik*, *teungku meunasah* tidak dapat melangkahi *keuchik*, terutama karena kekuasaan *keuchik* dilindungi oleh adat. Keduanya menguasai bidang masing-masing, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka dapat bertindak sewenang-wenang. Ada pembatasan terhadap keduanya.²⁵ Bagi *keuchik*, adatlah yang menjadi petunjuk di dalam mengatur kampung, sementara *teungku meunasah* diarahkan oleh hukum agama. Selain itu, untuk menjamin semua keputusan atau kebijaksanaan dapat dijalankan, diadakanlah musyawarah yang bukan hanya melibatkan kedua pemimpin itu,

25. Bandingkan dengan Weber yang mengemukakan bahwa legitimasi para penguasa tradisional berasal dari tradisi. Di satu pihak tradisi "menentukan isi perintah serta sasaran dan batas kekuasaan". Di lain pihak, tradisi meninggalkan suatu bidang tertentu bagi "keputusan bebas yang bersifat pribadi" para penguasa. Lihat Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan oleh A.M. Hender-son dan Talcott Parsons (New York: The Free Press, 1964), hal. 341.

melainkan juga *tuha peuet*. *Tuha Peuet* ini merupakan sekelompok elite yang oleh penduduk desa dianggap sebagai *ureung leubeh*, yaitu orang-orang yang memiliki lebih banyak pengetahuan atau kekayaan dibandingkan dengan warga lainnya.²⁶ Jika ada seorang ulama lain yang tinggal di kampung itu, ia juga akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sebagai seorang anggota *tuha peuet*.

Jadi, para ulama menduduki tempat istimewa dalam masyarakat Aceh. Ulama-ulama yang jujur dan disegani bahkan dianggap *warasatul anbiya*, atau orang yang mengikuti jejak Nabi. Dengan demikian pengaruh para ulama ini sering membayangi kekuasaan *keuchik* dan *teungku meunasah*. Sementara rakyat sering meminta nasihat kepada para ulama,²⁷ yang jelas juga berfungsi sebagai semacam undangan bagi para ulama untuk melibatkan diri dalam *tuha peuet*, *keuchik* dan *teungku meunasah* pun selalu mengagumi para ulama karena pengetahuannya. Jelas bahwa hal ini terjadi karena kedua penguasa kampung itu berada pada posisi yang tidak memungkinkan mereka untuk menolak mengakui pengaruh para ulama. Alasan pertama adalah bahwa para ulama sendiri pun tidak pernah menolak untuk mengakui dan menghormati kekuasaan *keuchik* dan *teungku meunasah*. Pada kenyataannya, para ulama senantiasa melakukan kegiatan pengajaran mereka dalam lingkungan mereka sendiri, yang disebut *dayah* atau pesantren. Murid-murid mereka berada pada peringkat menengah dan lanjutan, sehingga *teungku meunasah*, yang murid-muridnya biasanya berada pada tingkat dasar, tidak perlu khawatir akan disaingi oleh para ulama. Lagi pula, dengan bersem-

26. Machdar Somadisastra, "Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Aceh Besar" (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1974), hal. 2. Meskipun *tuba peuet* secara harfiah berarti "empat tetua", banyak kasus memperlihatkan bahwa jumlah anggota kelompok elite ini lebih dari empat. Mereka tidak dipilih secara resmi oleh rakyat atau oleh kepemimpinan desa. Setiap orang yang mengaku mempunyai lebih banyak pengetahuan atau kekayaan dibandingkan dengan kebanyakan penduduk kampung dianggap memenuhi syarat untuk duduk dalam *tuba peuet*. Akan tetapi pada prakteknya, mereka biasanya malu untuk menghadiri rapat-rapat desa. Mereka takut apabila penduduk lainnya menolak mengakui kepantasan mereka dalam hal ini.

27. Bahkan sekarang di Aceh Besar, misalnya, penduduk desa tidak saja lebih suka berkonsultasi dengan ulama daripada dengan wakil-wakil pemerintahan mengenai zakat mereka, tetapi juga membawa masalah pribadi mereka kepada ulama; lihat T. Bachtiar Effendi Panglima Polem, "Pengendalian Sosial di Aceh Besar" (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1974), hal. 7.

bahyang di lingkungan sendiri bersama murid-murid mereka juga mencegah para ulama mengambil alih kepemimpinan *teungku meunasah* di *meunasahnya*. Di lain pihak, *keuchik* dan *teungku meunasah* juga menaruh hormat kepada para ulama, tidak saja karena mereka mungkin pernah menjadi murid seorang ulama tertentu atau kawan-kawannya, tetapi juga karena mereka memerlukan kerja sama para ulama dalam mengatur desa mereka.

Sementara itu para ulama yang disegani mempunyai berpengaruh yang besar terhadap rakyat, dan pengaruh ini sering menembusi batas-batas desa tempat mereka tinggal atau mengajar. Penghargaan kepada ulama-ulama ini biasanya terlihat dalam kepatuhan rakyat terhadap mereka.²⁸ Keseganan terhadap para ulama disimbolkan dalam sikap rakyat yang tidak pernah menyebutkan nama seorang ulama yang disegani, melainkan menamakannya dengan nama kampung kelahirannya atau tempat ia mengajar. Jadi, Teungku Haji Hasballah dari desa Indrapuri dikenal sebagai Teungku Indrapuri, dan Teungku Muhammad Daud dari kampung Beureueh disapa sebagai Teungku Beureueh, dan sebagainya. Malahan penyebutan nama seorang ulama yang sangat dihormati, yang di Aceh ditunjukkan oleh gelar *teungku chik*, yang secara harfiah berarti "ulama besar", dianggap sebagai suatu dosa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila rakyat sama sekali tidak mengetahui nama sebenarnya dari, misalnya, Teungku Chik Di Tiro yang terkenal itu.²⁹

Ada beberapa unsur yang membentuk rasa hormat terhadap seorang ulama. Pertama, ketundukan *keuchik* dan *teungku meunasah* kepada seorang ulama merupakan basis bagi rasa hormat rakyat, karena hal ini mengisyaratkan penghargaan kedua penguasa kampung itu terhadap kualifikasi ulama tersebut. Keseganan terhadap pengetahuannya terlihat dalam sejumlah permintaan pengurus mesjid kepada ulama tersebut

28. Ismuha memperlihatkan bahwa para ulama telah berhasil mempengaruhi sikap rakyat terhadap kekuatan kolonial demi tujuan mereka sendiri. Selama penjajahan Belanda, rakyat Aceh menolak untuk bekerja pada Belanda, terutama dalam bidang militer. Akan tetapi begitu Jepang masuk, dengan pengarahan para ulama, rakyat bersedia bekerja di kantor-kantor pemerintahan dan sektor militer; lihat Ismuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Leknas-LIPI, 1976), hal. 61-62.

29. Baihaqi A.K., *Ulama dan Madrasah di Aceh* (Jakarta: Leknas-LIPI, 1976) hal. 26-28.

untuk memberikan khotbah pada sembahyang Jumat, atau memberi tabligh (dakwah) di desa-desa. Dan, dalam membentuk reputasinya, yang tidak kurang penting artinya adalah peranan murid-muridnya yang akan senantiasa mengagumi serta menyebarkan ajaran-ajarannya di kampung-kampung lain, sementara mereka tetap patuh dan setia kepadanya.³⁰

Bagi penduduk desa, di atas segalanya, memiliki seorang ulama dan *dayah*nya dianggap sebagai suatu kehormatan besar, sebab tidak semua kampung mempunyai kesempatan besar seperti itu. Kehadiran seorang ulama jelas menambah kesemarakan desa itu, karena akan menarik kedatangan orang luar, di samping mencegah anak-anak muda ke luar kampung untuk mencari pengetahuan. Akibatnya, seorang ulama yang baik sangat dihargai oleh masyarakat tempat kelahiran dan perkawinannya, serta oleh masyarakat kampung tempat ia belajar. Karena itu sering terdengar bahwa masyarakat-masyarakat tersebut menawarkan dan memberi seorang ulama segala sesuatu yang dibutuhkannya, sebagai bujukan agar ia mau tinggal di desa mereka. Pada gilirannya, kebutuhan yang demikian besar akan seorang ulama memberi ulama itu suatu penghormatan yang tinggi, yang menciptakan kesetiaan luar biasa. Dengan demikian, apa pun yang terjadi atas diri seorang ulama, pasti menjadi titik perhatian semua penduduk desa. Suatu contoh yang baik tentang hal ini diperlihatkan oleh sebuah kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada awal tahun 1953 di Kutaraja. Dalam kecelakaan ini Hasballah Indrapuri yang terkenal itu ditabrak sebuah truk militer. Kejadian itu menggoncangkan penduduk kampung, sehingga situasi di daerah pedesaan Aceh Besar menjadi tegang. Penguasa militer khawatir bahwa insiden itu akan menimbulkan protes dalam bentuk huru-hara. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, penguasa militer secara khusus meminta maaf kepada sang ulama, serta secara terbuka mengumumkan bahwa kejadian itu tidak disengaja dan supir truk tersebut telah dihukum.³¹ Kepatuhan kepada seorang ulama juga diperluas sampai kepada keluarganya, yang terlihat tidak hanya dalam bentuk mencium tangan anak-

30. Walaupun seorang bekas murid telah menjadi ulama terkenal dan mempunyai *dayah* sendiri, dia senantiasa tunduk pada perintah gurunya. Lihat Baihaqi, *ibid.*, hal. 29-30.

31. *Tegas*, 27 Februari 1953.

anak para ulama, tetapi juga sampai kepada melindungi mereka.³²

Kesetiaan seperti itulah yang menentukan partisipasi langsung dan tidak langsung penduduk kampung dalam pemberontakan atau pun penentangan mereka terhadapnya. Sudah dikemukakan dalam Bab II bahwa dendam terhadap Pemerintah Pusat lebih banyak dirasakan oleh rakyat di pedesaan Aceh Besar, Pidie, Utara, Timur, dan Tengah daripada mereka yang berdiam di Aceh Barat dan Selatan. Mengaitkan dendam ini dengan pemberontakan, fakta cenderung menunjukkan bahwa perlawanan terhadap pemerintah lebih ketat di kabupaten-kabupaten yang penduduknya menderita akibat kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Akan tetapi, kecuali bila kondisi ekonomi mencapai titik yang tidak dapat ditanggung lagi oleh para petani, dendam terhadap pemerintah saja tidak cukup memotivasi rakyat untuk memberontak. Sekalipun kenyataannya orang-orang desa di Aceh tidak puas akan kecenderungan ekonomi, mereka tidak menghadapi ancaman kehilangan kendali atas tanah mereka yang, menurut Wolf, telah menjadi suatu tema sentral pemberontakan petani.³³ Petani Aceh juga tidak mengalami tekanan luar biasa dari tuan-tuan tanah dan badan-badan pemerintahan sebagaimana yang dialami oleh petani Filipina, yang mengakibatkan pecahnya pemberontakan Huk.³⁴

Menurut Wolf, bahkan apabila petani sadar akan adanya ketidakadilan, rasa tidak adil ini tidak dapat diarahkan kepada tindakan politik sampai adanya suatu organisasi.³⁵ Dalam hal ini, seperti keterlibatan petani Aljazair dalam pemberontakan menentang pemerintah kolonial Perancis pada tahun 1954,³⁶ ulamalah yang mengerahkan petani Aceh ke dalam aksi politik. Dan, seperti petani Jawa Barat,

32. Umpamanya, pernah terjadi seorang anak ulama yang bekerja pada sebuah kantor pemerintah di kota dipukul oleh kawan sekantornya karena perselisihan pribadi. Keesokan harinya, ketika berita itu sampai di desa, sekelompok penduduk desa datang ke kota untuk membalas dendam terhadap si pegawai yang telah memukul anak ulama mereka.

33. Eric R. Wolf, *Peasant Wars of the Twentieth Century* (London: Faber and Faber, 1971).

34. Benedict J. Kerkvliet, *The Huk Rebellion, A Study of Peasant Revolt in the Philippines* (Berkeley, Los Angeles, dan London: University of California Press, 1977), hal. 143-155.

35. Wolf, *op. cit.*, hal. xvii.

36. *Ibid.*, hal. 226-230.

hubungan pribadi antara pemimpin dan para pengikut, melebihi ikatan-ikatan ekonomi dan ideologis, yang mengilhami para petani untuk bertindak. Di satu pihak, agama dan sifat kesalehan rakyat yang mendalam merupakan dua saluran yang menghubungkan rakyat dengan para pemimpin mereka. Di pihak lain, pandangan-pandangan pribadi ulama-lah yang mengarahkan rakyat untuk bergabung dalam atau menentang Darul Islam. Sekali ulama memiliki kendali yang kuat terhadap pengikutnya, maka berbagai ancaman dari pihak pemberontak atau pemerintah tidak akan dapat mempengaruhi pengikutnya untuk bergabung dengan pihak lain. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut.

Kampung-kampung di sekitar Labuhan Haji, sebuah kota kecamatan di Aceh Selatan, berada di bawah pengaruh Teungku Habib Muda Wali, seorang pemimpin Perti yang sangat terkenal. Sebagai seorang ulama yang tersohor, Muda Wali berhasil menyebarkan pengaruhnya tidak saja di beberapa wilayah Aceh Selatan, tetapi juga sampai ke desa-desa di Kabupaten Aceh Barat. Perekonomian kedua kabupaten ini juga terpengaruh oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Akan tetapi akibatnya terhadap para petani di sana, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, tidak separah keadaan di kabupaten-kabupaten lain di Aceh. Kedua kabupaten ini, khususnya Aceh Selatan, dikenal sebagai tempat berpijak Perti di Aceh. Oleh sebab itu Muda Wali menentang Darul Islam secara terbuka. Sebagai konsekuensi dari tentangan ini, dengan sendirinya Darul Islam melakukan tindakan-tindakan keras untuk menarik rakyat ke pihaknya. Namun, semakin banyak ancaman yang diterapkan oleh kaum pemberontak, maka semakin dekat lagi rakyat dengan pemimpin mereka. Akhirnya, ketika ancaman itu sudah tidak dapat ditanggung lagi, maka di bawah pimpinan Muda Wali rakyat membentuk satuan-satuan bersenjata untuk melawan gerakan Darul Islam secara fisik.

Di bagian lain Aceh, pengaruh Perti tidaklah sekuat di Aceh Selatan, sekalipun kenyataannya beberapa ulama terkenal juga mendukung partai itu. Hasan Krueng Kalee adalah salah seorang ulama yang disegani di Kabupaten Aceh Besar. Ia adalah orang nomor satu dalam organisasi Perti cabang Aceh dan pernah menjadi guru Muda Wali. Bersama Teungku Makam Gampong Blang, Teungku Ali Lampisang, dan Teungku Abdussalam Meuraksa (semua dari kampung-kampung sekitar Kutaraja), ia mengkritik pemberontakan secara terbuka dan berpihak

kepada pemerintah.³⁷ Dengan sendirinya pendukung-pendukungnya mengikuti mereka, dan tidak berpartisipasi dalam pemberontakan secara langsung. Akan tetapi para ulama ini tidak mengerahkan pengikut mereka untuk melakukan oposisi fisik terhadap Darul Islam, meskipun banyak anggota Perti di daerah-daerah ini diancam oleh Darul Islam. Alasannya adalah sederhana saja, yaitu berbeda dari Aceh Selatan, Aceh Besar, dan kabupaten-kabupaten lain di sepanjang pantai timur, serta Aceh Tengah merupakan wilayah pengaruh PUSA yang kuat. Dominasi PUSA telah mengakibatkan desa-desa Perti menjadi wilayah-wilayah kecil yang dikepong oleh kampung-kampung yang pro-PUSA. Dalam keadaan demikian, tantangan yang dilancarkan oleh Perti mungkin saja akan menimbulkan pertumpahan darah, yang pada akhirnya akan menyebabkan pembinasaaan para pengikut partai itu.

Sebaliknya, penduduk Indrapuri, sebuah kampung lebih kurang lima belas kilometer di sebelah selatan Kutaraja, merupakan contoh yang baik tentang rakyat yang pro-Darul Islam. Wilayah-wilayah di sekitar desa ini berada di bawah pengaruh kuat Hasballah Indrapuri, seorang ulama tua yang disegani dan salah seorang pilar utama PUSA. Akan tetapi, berbeda dari banyak ulama PUSA yang terkenal lainnya, Hasballah meninggalkan kampungnya ketika pemberontakan meletus dan ikut serta secara aktif di dalamnya sebagai ketua Mahkamah. Oleh karena itu para pengikutnya memberikan dukungan penuh kepada Darul Islam. Ketika para pemberontak gagal menguasai Kutaraja pada awal pemberontakan, kebanyakan pemimpin puncaknya mundur ke Indrapuri, di mana proklamasi Darul Islam dibacakan dalam suatu upacara.

Hubungan antara tanggapan rakyat terhadap pemberontakan dan orientasi ulama dapat ditelusuri lebih jauh dalam sebuah contoh lainnya. Lambaro adalah sebuah desa yang letaknya hanya beberapa kilometer di sebelah tenggara Kutaraja, dan sebelah utara Indrapuri. Kampung ini serta daerah-daerah di sekitarnya mengalami kekurangan sistem irigasi. Sangat mengherankan bahwa kampung ini tidak berada di bawah pengaruh seorang ulama pun, dan dengan demikian tidak memiliki *dayah* sendiri. Pada hari-hari pertama pemberontakan ada sejumlah kegiatan para pemberontak di dalam desa. Satu dua orang penduduknya memang

37. Lihat "Pernyataan Ulama2 Besar di Atjeh", pamflet yang bertanggal Kutaraja, 28 September 1953.

menggabungkan diri ke dalam Darul Islam. Akibatnya beberapa rumah dibakar oleh pasukan pemerintah. Sesudah itu, menurut penduduk, kampung tersebut berada dalam keadaan aman karena pasukan pemerintah atau pun Darul Islam tidak menggangukannya lagi. Sesekali wakil-wakil Darul Islam datang ke kampung itu untuk memungut pajak, akan tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berdiam di sana. Menurut para penduduk, mereka membayar pajak tersebut secara sukarela sebab mereka tidak membenci pemberontak. Para penduduk juga mengakui bahwa dasar mereka tidak ikut serta secara aktif dalam pemberontakan adalah karena tidak adanya *dayah* di kampung itu. Dengan kata lain, penduduk kurang dibina oleh para ulama yang pro-Darul Islam.

Sesudah mengemukakan semua ini, bagaimana kita dapat menearangkan kenyataan memudarnya dukungan bagi Darul Islam atau Daud Beureueh sendiri selama tahun 1958-1959? Sebagaimana yang akan kita lihat nanti, menurunnya gerakan Darul Islam di Aceh sebagai akibat dari pertikaian yang terus-menerus antara pemimpin-pemimpin kaum zuama dan ulama, menyingkapkan adanya krisis pengaruh pemimpin-pemimpin kaum ulama. Berkenaan dengan pengaruh ini, sejak tahun 1956 Darul Islam mengalami suatu kehilangan besar dengan meninggalnya beberapa ulamanya yang terkenal, karena sebab-sebab alamiah atau terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan pemerintah. Di antaranya adalah Hasballah Indrapuri yang meninggal secara wajar. Ulama lain, seperti Teungku Husin Pulo Panjo, tetap melanjutkan dukungan mereka kepada Darul Islam. Dukungan tetap diberikan walaupun mereka sadar bahwa sukar untuk meneruskan perlawanan sesudah gerakan itu kehilangan sebagian besar kekuatan militer sebagai akibat pembelokan kaum zuama pada tahun 1959, dan setelah Pemerintah Pusat menunjukkan keinginan untuk memenuhi tuntutan keagamaan rakyat Aceh. Oleh sebab itu mereka menganjurkan Daud Beureueh agar menerima penyelesaian politik yang ditawarkan Pemerintah Pusat. Akan tetapi Daud Beureueh mencoba menunda penyelesaian konflik itu sampai beberapa waktu kemudian.

Para Pemimpin dan Pemberontakan

BAGIAN INI meliputi gambaran beberapa pemimpin Aceh dan hubungan mereka dengan pemberontakan. Di sini saya tidak bermaksud memperlihatkan wilayah pengaruh mereka, melainkan sekadar memberi

tekanan pada latar belakang sosial serta posisi mereka dalam pemberontakan itu. Sebagaimana telah diperlihatkan di atas, penolakan terhadap dan dukungan rakyat bagi pemberontakan tersebut disalurkan melalui banyak ulama, yang hanya berpengaruh di kalangan rakyat di daerah atau kampung mereka masing-masing. Dan mengingat kenyataan bahwa tidak banyak ulama yang memiliki pengaruh di luar batas kampung mereka sendiri, setiap usaha untuk mempelajari pengaruh ulama secara mendalam harus meliputi tidak hanya sekitar selusin melainkan lebih dari seratus ulama. Ulama-ulama inilah yang "menghubungkan" pengikut mereka dengan para ulama politis, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam politik. Melalui cara demikianlah mereka mengarahkan rakyat untuk mendukung atau menentang pemberontakan.

Daud Beureueh adalah satu di antara para ulama politis itu dan pasti yang paling menonjol di dalam struktur pemberontak. Tanpa keterlibatannya agaknya sangat tidak mungkin muncul gerakan anti-Jakarta yang meluas di Aceh, sebab, sebagai pemimpin PUSA, ia mampu menggerakkan para ulama dan pengikut organisasi itu untuk menempuh jalan pemberontakan. Pengaruhnya terhadap para ulama di Aceh terlihat pada pembentukan PUSA pada tahun 1939, di mana dia diangkat sebagai ketuanya, sedangkan Teungku Abdurrahman Glumpangdua, pengambil inisiatif bagi pembentukan organisasi itu, hanya menjadi wakil ketua. Apa yang telah membawa Daud Beureueh ke posisi puncak organisasi ulama itu agaknya tidak lain daripada popularitasnya. Kendatipun ia baru merupakan seorang ulama muda ketika itu, popularitasnya telah melebihi kebanyakan ulama yang lebih tua dan lebih terkenal. Popularitasnya ditumbuhkan tidak saja oleh kepintarannya dalam bidang agama,³⁸ melainkan juga karena ia adalah seorang orator yang baik, yang mungkin setara dengan Soekarno.

Sejak pembentukan PUSA sampai dengan masa revolusi nasional, Daud Beureueh sangat erat berhubungan dengan Teungku Abdurrahman Glumpangdua. Kedua pemimpin PUSA ini muncul sebagai dwitunggal rakyat Aceh selama masa revolusi itu. Ketika Daud Beureueh diangkat menjadi kepala Kantor Urusan Agama di Kutaraja pada tahun

38. Menurut Baihaqi, Daud Beureueh adalah seorang ulama yang sangat pintar, sebab ia menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang relatif lebih singkat (lebih kurang lima tahun) daripada ulama-ulama lain; lihat Baihaqi, *op. cit.*, hal. 48.

1945, Abdurrahman menjadi wakilnya. Dan pada waktu Daud Beureueh meninggalkan jabatan itu pada tahun 1947 untuk menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, ia memberikan posisi lamanya kepada Abdurrahman. Namun ada perbedaan besar di antara kedua pemimpin ini. Daud Beureueh pada dasarnya adalah seorang ahli strategi politik, sedangkan Abdurrahman adalah seorang penggerak massa. Oleh sebab itu, Daud Beureueh tidak mengambil peranan aktif dalam pertempuran atau dalam masalah kemiliteran pada umumnya. Umumnya, dalam perang melawan *ulebalang* kelompok Cumbok pada tahun 1946, Daud Beureueh berjuang menentang para *ulebalang* hanya dalam Komite Nasional Daerah, sementara Abdurrahman memimpin kekuatan Mujahidin di medan pertempuran. Kedua pemimpin ini saling melengkapi, sehingga meninggalnya Abdurrahman pada bulan Maret 1949 merupakan suatu kehilangan besar bagi Daud Beureueh. Sesudah itu ia menjadi dekat kepada Teungku Abdul Wahab Seulimeum, yang kemudian menggantikannya sebagai Ketua PUSA.

Daud Beureueh dilahirkan kira-kira pada tahun 1898 di Beureueh, sebuah kampung dekat Sigli. Jalan ke kepemimpinan PUSA terbuka baginya sesudah ia mendirikan madrasah di Sigli pada tahun 1928, yang merupakan salah satu sekolah agama kaum reformis tertua di Aceh. Tetapi ini bukan awal dari popularitasnya. Jauh sebelum mendirikan sekolah di Sigli itu, dia telah berkeliling ke Aceh Utara dan Selatan sebagai guru agama yang dinamis, yang menyebabkan ia terkenal di kedua *afdelingen* (kemudian, kabupaten) tersebut. Selama tinggal di Aceh Selatan itulah ia memperluas pengaruhnya di seluruh pantai barat Aceh, terutama melalui dua orang muridnya, Teungku Hasan Hanafiah dan Teungku Jahja Zamzami, yang masing-masing terkenal di Kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Selatan. Memperhatikan kenyataan bahwa kemudian kedua kabupaten ini, terutama Aceh Selatan, menjadi tempat berpijak partai tradisional Perti, maka pengaruh kedua murid Daud Beureueh di kedua kabupaten itu merupakan sumbangan besar bagi kegiatan Darul Islam di sana sesudah tahun 1953.

Seperti ulama Aceh lainnya, Daud Beureueh sangat anti-Belanda, suatu sikap yang berpunca pada kebencian rakyat Aceh akan *kaphee* (kafir). Dalam dunia ulama, dibandingkan dengan dunia luar, perasaan anti-Belanda ini lebih kuat. Sebab, para ulama telah mewarisi perasaan ini di *dayah*, yakni dari guru-guru mereka yang kebanyakan

merupakan sisa pejuang Aceh yang melawan Belanda dalam Perang Aceh. Melalui guru-guru inilah Daud Beureueh dan sejumlah ulama lain menerima rasa anti-*kaphee* yang kuat dari era Perang Aceh. Perasaan anti-*kaphee* ini memang sengaja diciptakan oleh para ulama yang berperang itu sebagai bagian dari ajaran keimanan. Dengan mengetahui bahwa Daud Beureueh dan ulama lain dari generasinya adalah lulusan pertama dari *dayah-dayah* se usai Perang Aceh, maka kuatnya perasaan anti-Belanda di kalangan mereka itu dapatlah dipahami.

Oleh sebab itu kenyataan bahwa para *Ulebalang* telah bekerja sama dengan Belanda tentu saja sangat mengusarkan Daud Beureueh dan ulama-ulama lainnya. Apa yang menyebabkan para ulama bahkan lebih marah lagi adalah kenyataan bahwa se usai Perang Aceh banyak *Ulebalang* dan keluarga mereka cenderung mengabaikan agama, dan hal ini oleh para ulama dicurigai sebagai akibat pendidikan Belanda. Bagi Daud Beureueh sendiri, baik buruknya kaum bangsawan dinilai dari sumbangan mereka bagi pengembangan agama, di samping dari cara mereka memperlakukan rakyat. Oleh karena itu Daud Beureueh mempunyai hubungan baik dengan Teuku Bentara Pineung, seorang *Ulebalang* dari sebuah *nanggro* di Pidie, ayah Mr. Teuku Muhammad Hasan, gubernur Sumatera pada masa revolusi. Teuku Bentara Pineung adalah salah seorang dari sedikit *Ulebalang* yang selamat dalam kampanye anti-*ulebalang* pada tahun 1946. Tetapi kemudian, pada tahun 1953, ia dibunuh karena kegiatan-kegiatannya yang anti-Darul Islam.

Kaum *ulebalang* mengaitkan sikap Daud Beureueh yang anti-*ulebalang* itu dengan kehidupan pribadinya. Menurut suatu sumber, ayah Daud Beureueh adalah seorang kepala desa di Keumangan (Pidie) yang dibunuh para gerilya atas perintah seorang bangsawan, dan bangsawan ini adalah saudara dekat Teuku Umar, *Ulebalang* Keumangan. Oleh karena itu, kaum *ulebalang* percaya bahwa Daud Beureueh ingin melakukan balas dendam atas kematian ayahnya.³⁹ Tetapi tidak dapat dipastikan apakah ini merupakan sebuah fakta atau hanya cerita yang dibuat-buat untuk merusak reputasinya. Seorang penulis yang netral menegaskan bahwa memang ada konflik pribadi antara Daud Beureueh dengan *Ulebalang* Keumangan yang menyebabkan sang *Ulebalang* men-

39. Laporan T. Sabi tentang latar belakang gerakan Darul Islam di Aceh, bertanggal 2 Oktober 1953. Lihat juga Amin, *op. cit.*, hal. 22.

cegah Daud Beureueh mendirikan sekolah agama di Keumangan.⁴⁰

Watak pribadi Daud Beureueh sendiri tercermin pada keterlibatannya dalam kepolitikan daerah. Dia adalah seorang khas Aceh dengan watak yang keras, langsung, dan mendesak. Ia senantiasa menghadapi lawan-lawannya dengan sikap tegas, namun sering gagal menerapkan ketegasannya itu terhadap orang-orangnya sendiri. Ini mungkin disebabkan karena dia adalah seorang pemimpin dengan tipe "solidaritas" yang menghargai tinggi kesetiaan. Dia adalah seorang pemimpin yang bersifat menguasai, tetapi juga cenderung tidak dapat mengatasi kelakuan buruk orang-orangnya. Namun demikian dia bukanlah seorang pemimpin yang korup, sehingga unsur-unsur *ulebalang* tidak menyentuhnya dalam kritik-kritik mereka terhadap para pemimpin Aceh pada awal tahun 1950-an. Dia setia kepada orang-orangnya dan selalu siap melindungi mereka. Apa yang menjadikan dia seorang pemimpin dan ahli strategi politik yang baik ialah kemampuannya mengkombinasikan keterikatannya yang kuat dan liat kepada tujuan-tujuan dasar dengan kesabaran dan pandangan yang jauh ke depan.

Kemenangan PUSA dalam pertarungan kekuasaan membawa ketuanya pada posisi paling puncak di daerah itu setelah penghancuran kaum *ulebalang*. Tetapi kemenangan tersebut dicapai berkat keahlian politik dan kepemimpinan Daud Beureueh. Sebagai pemimpin organisasi yang berpengaruh di daerah itu, seyogianya dia sangat sabar dan penerima ketika ditunjuk memimpin Kantor Urusan Agama, sementara Teuku Njak Arif, yang popularitasnya dalam masyarakat Aceh hanya terasa di Aceh Besar, diangkat menjadi residen. Secara berani Daud Beureueh menjalankan pengaruhnya dalam Komite Nasional Daerah yang menyebabkan ia berhasil memperoleh dukungan pemerintah daerah dalam konflik antara kaum ulama dan *ulebalang* di Pidie pada akhir Desember 1945. Sekali pertikaian itu berhasil diubah menjadi pertikaian antara kekuatan-kekuatan pro dan anti-Republik, maka kaum ulama dapat dengan mudah mengirimkan pasukan mereka dari seluruh Aceh ke Kabupaten Pidie untuk menghancurkan kaum *ulebalang*. Pada pertengahan tahun 1947, Pemerintah Pusat pun mengakui pengaruh Daud Beureueh sehingga mengangkatnya menjadi gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat mayor jenderal.

40. Meuraxa, *Atjeh 1000 Tahun*, hal. 101.

Namun penghargaan yang demikian tinggi segera disusul oleh penghinaan. Sebagaimana yang telah kita lihat, Kabinet Hatta memasukkan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Aceh yang dibentuk pada awal tahun 1950 dibubarkan. Kemudian Pemerintah Natsir memindahkan Daud Beureueh ke Jakarta sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dan anggota parlemen. Daud Beureueh merasa dihina sehingga tidak mau menerima pengangkatan ini dan kembali ke kampungnya. Ia lebih kecewa lagi ketika seorang Menteri Dalam Negeri (dari PNI) menghentikan pangkat gubernurnya pada tahun 1952. Bahkan dalam keadaan begitu pun Daud Beureueh tetap tidak menyuarakan protes.

Pada pertengahan tahun 1951, setelah menyarankan agar bersabar, Daud Beureueh menolak usul Husin Jusuf untuk menangkap Presiden Soekarno yang sedang berkunjung di Kutaraja. Kemudian, setelah lebih banyak lagi ulama, pemimpin-pemimpin non-ulama, serta rakyat yang terkena akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, Daud Beureueh tidak dapat lagi mengabaikan meningkatnya keresahan di kalangan orang-orangnya dalam PUSA sehingga ia memutuskan untuk melancarkan pemberontakan.

Daud Beureueh terutama sekali memberikan perhatian pada dakwah, yaitu pada penguatan agama sebagai dasar kehidupan yang baik, dan padaendorongan, pengilhaman, dan pendidikan rakyat.⁴¹ Melalui dakwah ia naik ke tampuk kekuasaan dan mendesak rakyat agar menentang Pemerintah Pusat. Dia juga mempergunakan metode ini dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dalam kepemimpinan pemberontak. Dia kehilangan sebagian pengaruhnya ketika pemberontakan melemah karena bangkitnya kepemimpinan baru di bawah Sjammaun Gaharu dan Ali Hasjmy pada awal tahun 1957. Akan tetapi dakwah yang ekstensif telah mengembalikan sebagian besar pengaruhnya pada tahun 1960-an, dan ia berhasil mengerahkan rakyat untuk bergotong-royong membangun saluran irigasi, padahal sebelumnya pekerjaan tersebut tidak mampu dikerjakan oleh orang lain.

Dua orang ulama lain, Teungku Hasballah Indrapuri dan Teungku Hasan Krueng Kalee, harus dikemukakan dalam pembahasan tentang

41. James T. Siegel, *The Rope of God* (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969), hal. 64-67.

kepolitikan Aceh kontemporer, khususnya menyangkut pemberontakan. Mereka mewakili wajah generasi pertama ulama Aceh pada masa setelah Perang Aceh usai, sebab orientasi keagamaan mereka sangat berbeda. Hasballah Indrapuri adalah seorang ulama reformis, sedangkan Hasan Krueng Kalee condong ke kubu tradisional. Berusia beberapa tahun lebih tua dari Daud Beureueh, keduanya sama-sama terkenal di seluruh Aceh. Menyangkut pengetahuan keagamaan, bersama beberapa ulama tua lainnya mereka merupakan ulama-ulama Aceh kelas satu. Akan tetapi pengaruh politik mereka tidak pernah sebesar pengaruh Daud Beureueh. Sebab, Daud Beureueh adalah seorang ulama muda yang dinamis dan sangat ahli dalam berpolitik, di samping karena kedua ulama ini, seperti banyak ulama lainnya, lebih memusatkan perhatian pada agama daripada politik. Dalam dakwah-dakwah mereka sepanjang tahun 1930-an, mereka sangat tertarik pada interpretasi-interpretasi keagamaan dan terlibat dalam debat tradisional-reformis yang tidak ada akhirnya.

Hasballah mengajar di Indrapuri dan sangat dikenal karena pendirian reformisnya; pada kenyataannya ia merupakan salah seorang ulama tertua dalam kubu reformis. Karena orientasi reformisnya itulah Hasballah menjadi sekutu dekat Daud Beureueh, di samping menjadi sumber kekuatan yang besar. Dalam konferensi pertama PUSA di Sigli pada tahun 1940 Hasballah diangkat menjadi penasihat organisasi itu dan jadilah ia sebagai salah satu pilarnya. Ketika para ulama Aceh membentuk Majelis Ifta Daerah Aceh di Kutaraja pada awal tahun 1950, ia diangkat menjadi ketuanya. Pidato yang ia sampaikan pada pembukaan sidang pertama majelis itu mengungkapkan ketidakpuasan para ulama akan kenyataan bahwa Indonesia belum dinyatakan sebagai sebuah negara Islam. Akibatnya, tanpa keraguan sedikit pun, ia berperan aktif ketika pemberontakan meletus pada tahun 1953. Pengaruhnya sangat terasa dalam kepemimpinan kaum pemberontak, di mana ia menjadi Ketua Majelis Ifta yang mengawasi pelaksanaan hukum Islam didalam gerakan Darul Islam. Kematianya pada tahun 1956 merupakan suatu kehilangan besar bagi Darul Islam, terutama bagi Daud Beureueh sendiri.

Di lain pihak, Hasan Krueng Kalee adalah seorang ulama tradisional yang menentang PUSA sejak tahun 1947, yakni setelah organisasi ini memiliki pengaruh politik yang dominan melalui pengangkatan Daud

Beureueh sebagai gubernur militer. Dalam menentang PUSA, ia bekerja sama dengan Gerakan Said Ali pada tahun 1948, bahkan dengan mengambil risiko jiwa anaknya sendiri, Sjech Marhaban, yang direncanakan akan dibunuh oleh gerakan tersebut.⁴² Pengaruhnya terutama sekali dirasakan di kampungnya, Krueng Kalee, dekat Kutaraja, dan di daerah sekitarnya sampai ke pantai barat Aceh. Sebagai seorang ulama tradisional, dia tidak masuk Masyumi tetapi bergabung dengan Perti yang berpusat di Sumatera Barat itu. Ketika pecah pemberontakan, ia beserta seorang muridnya yang terkenal, Muda Wali, muncul sebagai penentangannya yang menonjol.

Meski menentang Darul Islam dan mendukung pemerintah, ia bukan seorang ulama oportunistis, sebab sikapnya hanya dimotivasi oleh prinsip-prinsip keagamaannya. Sebelum pemberontakan meletus, ia dan para ulama tradisional lainnya didekati oleh Daud Beureueh agar mendukung pemberontakan tersebut. Namun Hasan Krueng Kalee dengan tegas menolak karena yakin bahwa Islam melarang umatnya menentang pemerintahan nasional. Dalam hal ini ia tidak sependapat dengan para pemimpin PUSA yang menganggap Pemerintah Pusat sebagai pemerintah non-Islam atau *kaphee*. Barangkali hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan pribadinya ialah bahwa tidak ada seorang pun dari ketiga putranya yang mengikuti orientasi politiknya. Putra pertamanya, Sjech Marhaban, mengikuti PUSA, sementara dua yang lainnya bergabung dengan Front Pemuda Aceh, suatu organisasi yang bersimpati pada Masyumi dan Darul Islam.

Seorang ulama lain yang memegang salah satu posisi utama dalam kepemimpinan kaum pemberontak adalah Teungku Husin Mudjahid. Dilahirkan di Idi kira-kira pada tahun 1910, dia adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh di Aceh Timur. Kepribadiannya dengan baik dapat digambarkan dengan dua patah kata: arogan dan oportunistis. Ia memiliki penampilan lebih sebagai pemimpin laskar daripada ulama, meskipun ia mempunyai sebuah *dayah* dan murid yang banyak di Idi. Sesudah belajar agama di beberapa tempat di Aceh Timur dan Sumatera Timur, dia menjadi murid Daud Beureueh dan Abdurrahman Glumpangdua.⁴³ Dengan menjadi murid dua tokoh PUSA yang disegani,

42. Wawancara dengan Teungku Muhammad Asjik, Medan, 28 November 1973.

43. Wawancara dengan Teungku Husin Al-Mudjahid, Lhokseumawe, 2 Agustus 1973.

Mudjahid perlahan-lahan naik ke posisi penting dalam organisasi itu, yakni menjadi ketua Pemuda PUSA yang dibentuk pada tahun 1940. Pada waktu itulah ia menambahkan sendiri gelar "Al-Mudjahid" (yang berarti, pahlawan) pada namanya. Sikapnya yang arogan tercermin pada rapat pemilihan ketua Pemuda PUSA, tatkala ia merupakan satu-satunya orang yang berani menawarkan diri untuk posisi itu. Sikapnya yang arogan itu juga tergambar dalam kenyataan bahwa ia tetap mengunjungi Daud Beureueh kapan saja ia mempunyai kesempatan, padahal ia mengetahui bahwa Daud Beureueh tidak menyukainya sehubungan dengan pendiriannya dalam penyelesaian pemberontakan.

Berbeda dari Daud Beureueh, Al-Mudjahid tidak memiliki pengaruh yang besar di luar daerahnya sendiri, sehingga tidaklah mungkin baginya untuk menjadi seorang pemimpin besar. Apalagi ia tidak mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik, yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kekaguman rakyat. Di samping berperawakan kecil, cara ia berpakaian dan berbicara tidak menarik seperti Daud Beureueh, yang senantiasa berbicara serius dan berpakaian rapi. Yang juga membuatnya kurang dihormati ialah kenyataan bahwa bila tidak sedang berada di kampungnya, dia tentu menghabiskan kebanyakan waktunya di kedai kopi.

Pada bulan Februari 1946 ia melancarkan gerakan TPR yang sangat anti-*ulebalang*, yang menyebabkannya hampir menguasai seluruh komando militer di Aceh. Melalui gerakan ini ia berpengaruh dalam urusan kemiliteran, yaitu setelah ia berhasil memaksa Residen Njak Arif supaya melepaskan kedudukannya sebagai pembina tentara di Aceh. Dia kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi mayor jenderal dan membentuk Divisi Payabakong di Aceh Timur. Selanjutnya dia terlibat dalam konflik dengan Daud Beureueh yang sedang berusaha menggabungkan divisi itu ke dalam TNI pada tahun 1948. Hal ini menyebabkan Al-Mudjahid memasuki PSII dan menjadi lebih dekat dengan para pemimpin zuama. Akan tetapi konflik dengan Daud Beureueh ini tidak menghalanginya untuk mendukung pemberontakan pada tahun 1953, di mana ia akhirnya menjabat ketua Majelis Syura. Kendati merupakan pemimpin yang bertipe ulama, ia berpihak pada para zuama ketika pemimpin-pemimpin ulama dan zuama memperdebatkan sikap terhadap penyelesaian pemberontakan seperti yang ditawarkan pemerintah pada tahun 1957. Karena dekat dengan para zuama, ia mendukung pemberon-

takan bukan dengan alasan keagamaan, melainkan karena dibubarkannya Propinsi Aceh. Oleh karena itu begitu pemerintah bersedia mengembalikan otonomi Aceh, dia dan para pemimpin zuama pun mau menerima penyelesaian politis yang ditawarkan oleh pemerintah.

Banyak orang di Aceh menilai Al-Mudjahid sebagai seorang pemimpin yang oportunis, dan itu pun bukan tanpa alasan. Sekalipun kenyataan menunjukkan bahwa ia sangat rajin berkampanye di seluruh Aceh pada awal tahun 1950-an, dalam rangka persiapan pemberontakan, pada tahun 1970-an ia mengatakan bahwa ia bergabung dalam pemberontakan itu bukan karena kemauannya sendiri melainkan karena dipaksa oleh kawan-kawannya.⁴⁴ Meskipun pernyataan ini datang darinya, kita dapat meragukan kebenarannya, sebab di daerah itu dia dikenal sebagai orang yang memperhatikan keuntungan pribadi. Umpamanya, pada tahun 1970 ketika masyarakat Aceh menentang usaha PNI mendirikan kembali cabangnya di Aceh, yang dibekukan pada tahun 1966, Al-Mudjahid justru berpihak pada pemimpin-pemimpin PNI. Sebenarnya dia mendukung PNI bukan karena bersimpati pada partai itu tetapi karena mengharapkan suatu balas jasa. Al-Mudjahid mempunyai hubungan baik dengan T.D. Pardede, seorang pengusaha dari Medan yang berorientasi pada PNI, yang ketika itu sedang merencanakan untuk membangun sebuah perusahaan pendinginan udang di Lhokseumawe. Sebagaimana halnya PNI, *cold storage* ini pun sebenarnya ditolak oleh masyarakat setempat. Penolakan ini disebabkan karena Pardede adalah seorang Batak yang beragama Kristen, di samping karena kekhawatiran mereka bahwa usaha itu akan memancing lebih banyak lagi orang Batak datang ke daerah tersebut. Sekali lagi Al-Mudjahid memberikan dukungannya kepada Pardede dan melindungi perusahaan ini. Untuk itu ia memperoleh penghasilan sebesar lima puluh ribu rupiah setiap bulan pada tahun 1973.⁴⁵ Semua ini tentu merusak reputasinya di daerah itu sekaligus menutup kesempatan baginya untuk tampil sebagai seorang pemimpin yang dihormati.

Agaknya Al-Mudjahid telah membina hubungan yang baik dengan Husin Jusuf pada masa revolusi. Pada waktu itu Husin Jusuf menjadi ajudan jenderal TRI di Kutaraja dengan pangkat mayor. Bila diban-

44. *Ibid.*

45. *Ibid.*

dingkan dengan perwira-perwira TRI lain yang berkualifikasi sama dengannya, tampaknya Husin Jusuf kurang dihargai oleh pimpinan Angkatan Darat pada tahun 1950-an, sehingga mengecewakannya. Husin Jusuf dilahirkan pada tahun 1912 di Blang Bladeh, dekat Bireuen. Ia adalah seorang lulusan Volksonderwijs School di Lhokseumawe. Setelah tamat, ia mengajar di beberapa tempat di Aceh Utara dari tahun 1930 sampai 1940. Pada waktu yang sama ia juga menjadi reporter untuk beberapa surat kabar dan majalah yang terbit di Medan, suatu pengalaman yang kemudian menariknya kembali ke dunia jurnalistik pada tahun 1960-an.⁴⁶ Ketika Pemuda PUSA didirikan, ia menjadi sekretaris organisasi ini di Bireuen.

Walaupun kenyataannya dia merupakan seorang perwira Aceh yang paling senior dalam Gyugun, dengan pangkat letnan satu, dia tidak memperoleh posisi yang lebih tinggi daripada ajudan jenderal TRI. Agaknya ia telah dihambat untuk memegang jabatan yang lebih penting di TRI oleh para perwira yang berorientasi pada *ulebalang* karena kedekatannya dengan PUSA. Oleh sebab itu, ketika dihubungi Al-Mudjahid pada awal tahun 1946,⁴⁷ tanpa ragu-ragu Husin Jusuf mendukung TPR. Ini membawanya kepada kepemimpinan TRI di Aceh, dan ia pun menjadi kolonel yang menggantikan kedudukan Sjammaun Gaharu. Pada tahun 1948 ia "mengambil cuti" dari Angkatan Darat setelah bertikai dengan Alex Kawilarang, yang direncanakan menjadi panglima militer Sumatera Utara di Medan. Husin Jusuf dipindahkan ke Kementerian Pertahanan di Jakarta pada tahun 1950.

Karena marah akan pemindahan ini, Husin Jusuf mengundurkan diri dari Angkatan Darat pada tahun itu juga. Dendam terhadap pimpinan Angkatan Darat menyebabkan ia mendesak Daud Beureueh agar melancarkan pemberontakan dengan menangkap Presiden Soekarno ketika yang terakhir ini mengunjungi Aceh pada tahun 1951. Akan tetapi desakan ini ditolak oleh Daud Beureueh. Pada pertengahan tahun 1953, Husin Jusuf diangkat menjadi ketua Persatuan Bekas Pejuang Aceh yang didirikan sebagai persiapan pembentukan TII di Aceh. Pada waktu pemberontakan meletus, pada mulanya ia menjadi panglima divisi TII, dan kemudian menteri pertahanan dalam Kabinet Darul Islam di Aceh.

46. Riwayat Hidup Husin Jusuf.

47. Wawancara dengan Sjammaun Gaharu, Kutaraja, 5 Juli 1973.

Husin Jusuf bukan seorang ulama. Dalam konflik antara para pemimpin ulama dan zuama mengenai masalah penyelesaian pemberontakan, dia berpihak pada kaum zuama. Sudah sejak akhir tahun 1956 ia berpendirian bahwa pemberontakan harus diakhiri, sebab Pemerintah Pusat memang sedang mencari penyelesaian politik. Oleh karena itu, dengan sepengetahuan banyak pemimpin pemberontak lainnya, ia memberi tanggapan positif terhadap seruan Pejabat Gubernur Sumatera Utara Sutan Komala Pontas, agar mereka mengadakan perundingan informal dengan utusan pemerintah. Tetapi protes keras dari para pemimpin ulama telah menyebabkan Husin Jusuf menghentikan komunikasi dengan pejabat gubernur itu.

Di sisi yang lain, Hasan Saleh adalah salah seorang pemimpin yang paling muda dalam struktur puncak kepemimpinan Darul Islam di Aceh. Hasan Saleh dilahirkan kira-kira pada tahun 1920 di sebuah kampung dekat Sigli. Ia juga seorang lulusan sekolah agama. Tidak banyak diketahui mengenai keadaan dirinya selama masa revolusi, barangkali karena ia merupakan perwira militer yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam politik. Pada tahun 1950 dia menjadi komandan batalion di Aceh dengan pangkat kapten. Batalionnya merupakan salah satu kesatuan Aceh yang pertama-tama dikirim ke luar daerah itu sesudah penciptaan komando militer Aceh dari divisi menjadi resimen pada tahun 1950. Pada tahun itu Hasan Saleh dan anak buahnya dikirim ke Sulawesi Selatan untuk menghadapi pemberontakan Kahar Muzakkar. Menurut dia, kebijaksanaannya yang telah menghasilkan gencatan senjata dengan Kahar Muzakkar pada tahun 1951, tetapi campur tangan Panglima Militer Sulawesi menyebabkan Kahar Muzakkar kemudian membatalkan gencatan senjata itu.⁴⁸ Dari Sulawesi Selatan batalionnya dikirim ke Maluku, tetapi Hasan Saleh tidak lama di sana sebab dia harus mengikuti pendidikan militer di Jawa. Sesudah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1953, dia tidak kembali ke batalionnya, melainkan diangkat ke posisi non-tempur di sekolah militer di Pematang Siantar, Sumatera Timur. Mutasi ini sangat mengecewakannya dan mendorongnya untuk bergabung ke dalam pemberontakan.

Ia juga seorang pemimpin yang keras kepala, yang benar-benar tidak

48. Hasan Saleh, *Revolusi Islam di Indonesia* (Darussalam [Sigli?]: Pustaka Djihad, 1956), hal. 52-53.

berada di bawah pengaruh Daud Beureueh. Namun demikian, ia menaruh hormat pada tokoh tua itu. Sementara dia tidak mempunyai pengaruh pribadi terhadap anggota-anggota Darul Islam, tetapi dia merupakan otak dari konflik antara para pemimpin zuama dan ulama menyangkut penyelesaian politik dengan pemerintah. Oleh karena itu, di bidang militer dia bertumpu pada pengaruh abangnya, seorang komandan resimen TII, dan demi pengaruh di luar hierarki militer, dia bersahabat dengan Al-Mudjahid dan Ayah Gani. Bersama mereka itulah pada tahun 1959 ia berhasil "membawa turun" sebagian besar kekuatan militer Darul Islam.

Pada tahun 1970, ia mencoba memasuki dunia kaum ulama di Aceh, yaitu ketika dia ditunjuk untuk memimpin *dayah* modern yang disponsori oleh pemerintah daerah di kampus universitas di Kutaraja. Pada waktu itu dia disapa sebagai "Teungku Haji Hasan Saleh", perlakuan yang lazim untuk seorang ulama. Akan tetapi akhirnya dia menyadari bahwa dia dilahirkan untuk menjadi seorang zuama, bukan ulama. Oleh sebab itu dia meninggalkan Aceh dan kembali ke perkebunan teh di Sukabumi, Jawa Barat, yang pada awal tahun 1960-an diberikan pemerintah kepada tokoh-tokoh Darul Islam sebagai hadiah untuk melepaskan diri dari Daud Beureueh.

Latar belakang kehidupan Ali Hasjmy adalah yang paling menarik di antara semua pemimpin Aceh. Di satu pihak, dia merupakan pusat konflik antara pemimpin-pemimpin ulama dan zuama pada masa revolusi, tetapi di pihak lain, pada dasarnya ia adalah seorang pendukung pemberontakan. Sebagaimana yang akan kita lihat, pertikaian dengan Daud Beureueh di sepanjang masa revolusi itu tidak menyebabkan dia jauh dari jalan pemberontakan. Hasjmy dilahirkan pada tahun 1914 di Montasi, dekat Kutaraja. Ia terlibat dalam persiapan pemberontakan ketika ia menjabat sebagai wakil kepala Kantor Urusan Sosial Sumatera Utara di Medan. Dia dihubungi oleh seorang perencana pemberontakan dan sepakat untuk mendukungnya.⁴⁹ Keterlibatannya dalam persiapan pemberontakan itu agaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ia sangat dikecewakan oleh keputusan pemerintah yang membubarkan propinsi Aceh pada tahun 1950 yang menyebabkannya dipindahkan dari Kutaraja, sedang pada waktu itu ia menjadi kepala

49. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

Kantor Urusan Sosial Propinsi Aceh.⁵⁰ Kedua, ia juga sangat terpengaruh oleh keputusan pemerintah yang menghentikan perdagangan barter antara Aceh dan Malaya, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaannya, Pesindo Trading Company. Ketiga, berbagi rasa dengan para pejabat Aceh lainnya, ia sangat dendam terhadap membanjirnya pejabat-pejabat non-Aceh ke daerah itu, terutama pada tahap akhir masa revolusi. Akhirnya, ia adalah salah seorang sasaran utama kritik-kritik kaum *ulebalang*.

Namun demikian, meskipun mendukung pemberontakan, Hasjmy tidak meninggalkan Medan untuk memimpin gerakan itu di Aceh. Tampaknya ada perhitungan pribadi di sini. Pada pertengahan tahun 1953, seminggu sebelum pemberontakan meletus di Aceh, pemerintah memutuskan untuk mempromosikan Hasjmy menjadi kepala Kantor Urusan Sosial Sumatera Utara yang akan berlaku mulai akhir bulan itu.⁵¹ Promosi ini merupakan sebuah dorongan bagi karier Hasjmy dalam pemerintahan, dan ia tidak ingin mengorbankannya dengan menggabungkan diri ke dalam pemberontakan. Promosi ini jelas merupakan petunjuk bahwa pemerintah sudah mempercayainya, sekalipun ia menjadi sasaran kritik unsur-unsur *ulebalang*. Dengan sendirinya adalah paling menguntungkan bagi dirinya untuk menerima jabatan baru itu dan melupakan perserikatannya dengan para pemimpin PUSA. Akan tetapi, ketika pemerintah mengetahui hubungan Hasjmy dengan para pemberontak, pemerintah tidak hanya membatalkan promosi itu melainkan juga memenjarakannya selama beberapa bulan di Sumatera Timur. Setelah dibebaskan, dia dipindahkan ke Kementerian Sosial di Jakarta, di mana dia juga aktif dalam PSII. Situasi saat ia diangkat sebagai gubernur ketika Aceh mendapatkan kembali status propinsi pada tahun 1957 akan dikemukakan nanti dalam Bab VII.

Mengingat pengalaman pada masa revolusi, kenyataan bahwa Ali Hasjmy, sebagaimana halnya Sjammaun Gaharu, berhasil memainkan peranan pada pertengahan 1950-an dapat dikaitkan dengan hubungan mereka dengan pemimpin-pemimpin ulama. Selama masa revolusi Ali Hasjmy dan para pemimpin lain dalam kubu zuama telah berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh ulama-ulama mereka, tetapi usaha itu

50. Riwayat Hidup Ali Hasjmy.

51. *Tegas*, 16 September 1953.

gagal sebab berbagai peristiwa politik senantiasa memaksa mereka untuk mencari perlindungan kepada para pemimpin ulama PUSA yang dominan. Dominasi ini sirna begitu saja ketika ulama-ulama PUSA itu melancarkan pemberontakan. Oleh karena itu, selama masa ini Ali Hasjmy dapat mengembangkan kepemimpinannya sendiri meskipun kekuasaannya tergantung pada Pemerintah Pusat. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah Hasjmy akan dapat memainkan peranan yang menonjol dalam kepolitikan Aceh apabila ia tidak diangkat menjadi gubernur oleh Pemerintah Pusat? Barangkali jawaban terhadap pertanyaan ini negatif, sebab, baik para ulama tradisional yang berorientasi pada Perti maupun ulama-ulama reformis PUSA tidak menaruh hormat kepadanya sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukannya pada masa revolusi.

Sjammaun Gaharu menduduki posisi yang berbeda dalam hubungannya dengan pemberontakan, karena dialah komandan resimen Aceh pertama yang merumuskan langkah-langkah penyelesaian politik; kebijaksanaan keamanan yang ditempuhnya kemudian adalah berdasarkan pada rumusan tersebut. Seperti telah dikemukakan terdahulu, sebelum dikirim kembali ke Aceh, dia menjadi komandan Komando Militer Kota Besar Banjarmasin dengan pangkat mayor. Sebelum dipindahkan ke Kalimantan pada tahun 1950, ia menjabat sebagai wakil gubernur militer untuk Sumatera Selatan. Tampaknya ia telah membina hubungan yang baik dengan Kolonel Nasution, yang ketika itu hanya seorang perwira non-aktif dan penulis masalah-masalah kemiliteran, melalui korespondensi. Pada waktu diangkat kembali menjadi kepala staf Angkatan Darat, Nasution meminta pendapat Gaharu tentang cara untuk mengatasi pemberontakan Aceh. Tidak lama kemudian Gaharu diangkat menjadi komandan resimen di Aceh.

Akan tetapi minat Nasution terhadap saran-saran Gaharu bukan satu-satunya alasan mengapa Gaharu dipulangkan dan diizinkan untuk memegang posisi militer paling tinggi di Aceh. Selain strategi yang diusulkannya itu, latar belakang pribadinya juga dapat diterima oleh pimpinan militer di Jakarta, sebab, walaupun tidak memiliki hubungan dengan para pemimpin PUSA, ia bukan orang yang tidak dapat diterima oleh mereka. Dilahirkan di Teupin Raya, dekat Sigli, sejarah kehidupan Gaharu dalam banyak hal bertentangan dengan pimpinan PUSA. Dia

adalah perwira modern lulusan Normal School di Pematang Siantar.⁵² Sekalipun bukan berasal dari keluarga *ulebalang*, keluarganya mempunyai hubungan yang dekat dengan *Ulebalang* di daerahnya, dan faktor inilah yang memungkinkan Gaharu untuk memasuki sekolah Belanda. Hubungannya yang dekat dengan kelompok *ulebalang* pada masa pendudukan Jepang telah membawanya pada posisi puncak militer di Aceh pada tahun 1945-1946, dan sebaliknya, kedekatan hubungan dengan *ulebalang* itu pulalah yang menyebabkan dia menyerahkan jabatan tersebut kepada Husin Jusuf ketika Al-Mudjahid melancarkan gerakan TPR. Ia ditangkap oleh Al-Mudjahid, tetapi kemudian dapat melarikan diri ke Sumatera Timur berkat bantuan seorang perwira yang pro-PUSA. Karena dianggap sebagai "musuh" PUSA pada masa revolusi, banyak orang yang menduga bahwa ia akan mengambil tindakan keras terhadap pemberontakan itu. Tetapi, mengherankan sekali, Gaharu terbukti lebih banyak bersikap lembut kepada para pemimpin pemberontak daripada kepada kelompok anti-PUSA, termasuk unsur-unsur *ulebalang*.

52. Riwayat Hidup Sjammaun Gaharu.

Bab VI

Kalangan Darul Islam

SUATU KARAKTER penting dari pemberontakan di Aceh ialah bahwa sejak semula para pemimpinnya tidak mempunyai niat untuk memisahkan daerah itu dari negara Indonesia. Daud Beureueh sama sekali tidak memisahkan Aceh dari bagian-bagian lain Indonesia dan menjadikannya sebuah negara merdeka, melainkan hanya memproklamasikan daerah itu dan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwirjo. Pada waktunya nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa demikian halnya, di samping menelaah perjuangan rakyat Aceh itu sendiri dan bagaimana hubungannya dengan gerakan Darul Islam secara keseluruhan.

Pemerintahan Negara Bagian Aceh

MENJELANG AKHIR tahun 1955 para pemimpin pemberontakan di Aceh mulai menyimpang dari Kartosuwirjo dan menganggap Negara Islam Indonesia sebagai suatu negara federal. Mereka meresmikan daerah mereka sebagai "Negara Bagian Aceh" (NBA). Sampai waktu itu, daerah ini hanya diperkenalkan sebagai propinsi yang otonom NII. Akan tetapi jauh sebelum pecahnya pemberontakan, sebenarnya telah ada pemikiran tentang bagaimana nanti pemerintahan akan dijalankan. Namun, kebanyakan pemimpin pemberontak di Aceh tampaknya tidak memikirkan hal itu secara mendalam, karena mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk berbuat demikian. Pada tahap itu mereka tidak memandang status daerah mereka atau struktur pemerintahannya sebagai sasaran utama perjuangan. Ketika itu adalah lebih penting bagi mereka untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek fisik dan mental persiapan-persiapan pemberontakan serta pengambilalihan kendali dari pasukan pemerintah. Mereka mengharapkan bahwa sekali

kendali itu telah berhasil dikuasai maka segalanya akan berjalan dengan sendirinya.

Kendatipun demikian, para pemimpin pemberontak telah menyiapkan sebuah pemerintahan sejak awal pemberontakan itu. Dalam praktiknya pemerintahan ini didasarkan pada pengalaman para pemimpin itu semasa revolusi nasional, terutama struktur tahun 1948, ketika Daud Beureueh menjadi penguasa tunggal. Sebagaimana yang telah kita saksikan, suasana beberapa bulan sebelum pemberontakan sama revolusionernya dengan masa revolusi, atau seperti suasana pada bulan Maret 1942, ketika rakyat Aceh bangkit menentang Belanda menjelang kedatangan Jepang. Seperti dalam dua peristiwa penting ini, massa rakyat Aceh kembali diilhami oleh perasaan keagamaan, di samping diperlengkapi dengan senjata. Tampaknya, untuk menambah semangat revolusi nasional itu pada gerakan baru mereka, maka para pemimpin pemberontakan mempergunakan, dengan sedikit perubahan, sistem pemerintahan daerah seperti yang diterapkan pada masa revolusi. Jabatan gubernur militer pada masa revolusi bahkan dijelmakan kembali dalam bentuk baru, yakni pemerintahan sipil dan militer. Orang kuat yang sama, Daud Beureueh, kini tampil sebagai gubernur militer dan sipil NII di daerah itu.

Para pemimpin Aceh sama sekali mengabaikan sistem pemerintahan militer yang digariskan oleh organisasi pusat NII di Jawa Barat, sebab mereka percaya bahwa keadaan darurat tidak akan berlangsung lama. Hal ini karena adanya anggapan luas bahwa keruntuhan kekuasaan nasional di daerah itu tidak akan terhindarkan. Oleh sebab itu Aceh lebih menyukai struktur pemerintahan yang normal daripada sistem komandemen yang dipraktekkan di Jawa Barat di mana para komandan militer menjalankan semua jenjang pemerintahan sipil. Sejalan dengan konstitusi NII, yaitu yang dikenal dengan sebutan "Kanun Azasi", di Aceh terdapat Majelis Syura (atau parlemen) dan Dewan Syura (dewan eksekutif) dalam Badan Pekerjaannya. Sementara Dewan Syura mempunyai tujuh anggota dan diketuai oleh Daud Beureueh sendiri,¹ Majelis Syura belum berdiri sampai akhir tahun 1955, ketika untuk pertama kalinya kaum pemberontak menyelenggarakan konferensi di Bate

1. A.H. Gelanggang, *Rabasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin* (Kutaraja: Pustaka Murni Hati, 1956), hal. 65.

Kureeng, sebuah desa di Aceh Utara. Konferensi yang diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun kedua gerakan mereka itu mengangkat enam puluh lima peserta dari seluruh Aceh menjadi anggota parlemen. Hasil penting lain dari konferensi itu adalah munculnya Teungku Husin Al-Mudjahid sebagai orang nomor dua di NBA, dan karena itu dia diangkat menjadi ketua Majelis Syura.

Akan tetapi struktur yang bersifat revolusioner itu tidak berlangsung lama. Kegagalan untuk merampas kekuasaan telah memaksa pemimpin pemberontak mempertimbangkan kembali seluruh suasana, dan menyatakan daerah itu berada dalam keadaan perang. Akibatnya, struktur pemerintahan mengalami perombakan total pada pertengahan tahun 1954. Para pemimpin Aceh ini kemudian memberlakukan model pemerintahan militer yang ketat seperti di Jawa Barat, yang mengakibatkan lumpuhnya lembaga-lembaga sipil, termasuk Dewan Syura. Di bawah perubahan ini, Aceh disebut Komandemen Wilayah Aceh atau KW V NII.² Oleh sebab itu jabatan gubernur militer dan sipil dihapuskan, dan Daud Beureueh dengan sendirinya menjadi panglima Komando Teritorial Aceh. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, perubahan ini mempunyai arti subordinasi bupati, wedana, dan camat kepada para komandan militer, sebab komandan-komandan unit militer di setiap tingkat pemerintahan itu kini menjadi penguasa paling tinggi dalam komandemen setempat. Sementara itu para pejabat sipil menjadi pimpinan kedua dan juga diberikan pangkat militer.

Sebegitu jauh kita telah melihat struktur organisasi pemerintahan NBA secara terinci. Yang menjadi pertanyaan di sini ialah apakah NBA mempunyai kekuasaan efektif di dalam dan di luar struktur ini? Faktor-faktor apa yang memelihara keefektifannya, dan bagaimana? Sebelum pertanyaan pertama itu dijawab, baiklah lebih dahulu kita melihat bagaimana NBA menjamin keefektifan kekuasaan di dalam dan di luar strukturnya. Jelas bahwa sejak semula gerakan itu terlalu menyandarkan diri pada pengaruh kaum ulama, khususnya Daud Beureueh. Ketergantungan ini bukan hanya dimaksudkan untuk menciptakan citra gerakan

2. NII terdiri atas lima Komandemen Wilayah: yang pertama adalah markas Kartosuwirjo, yang kedua dan ketiga juga berada di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan adalah komandemen keempat. Dalam pada itu, sama sekali tidak ada pedoman tentang posisi struktural gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan.

tersebut di luar anggotanya sendiri atau dalam massa rakyat Aceh, melainkan juga sebagai pengamanan integritas struktur itu sendiri. Untuk dapat mempengaruhi massa, kaum pemberontak perlu sekali mengakui kepemimpinan para ulama dalam pemberontakan itu. Dengan alasan ini, pemberontakan itu pantas disebut gerakan ulama, sebab para pemimpin non-ulama hanya menjadi pemimpin lapisan kedua.

Untuk daya tarik bagi massa, maka ulama harus terlihat jelas sebagai ujung tombak gerakan itu. Hal ini sangat penting dalam meyakinkan rakyat bahwa Darul Islam betul-betul berarti "wilayah Islam" dan berdasarkan hukum Islam. Oleh sebab itu, sebagai tokoh politik Islam yang menonjol, maka Daud Beureueh menjadi pusat kekuasaan, karena dia adalah panglima Komandemen Wilayah, di samping panglima Divisi TII. Walaupun seorang yang bukan ulama, Hasan Ali, diangkat pula menjadi kepala staf Komandemen itu, suatu jabatan yang setara dengan perdana menteri dalam sistem non-militer, dan bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari, Daud Beureueh sama sekali tidak sekedar menjadi simbol. Hal ini karena Kepala Staf Hasan Ali adalah tangan kanannya yang sangat tergantung pada pengaruh sang Panglima. Begitu pula dalam struktur militer, kepemimpinan Daud Beureueh tidak hanya bersifat simbolis. Seperti dalam situasi revolusioner tahun 1948, tatkala menjadi gubernur militer, sekarang Daud Beureueh juga menjabat panglima Divisi Teungku Chik Ditiro, satu-satunya Divisi TII di daerah itu. Husin Jusuf, bekas kolonel dan panglima Divisi Aceh pada masa revolusi, memang bertugas mengawasi kegiatan sehari-hari divisi itu sebagai kepala stafnya, akan tetapi tidak ada keragu-raguan akan pengaruh Daud Beureueh dalam bidang militer, setidaknya pada tahap awal. Pemusatan kekuasaan di tangan Daud Beureueh ini diperkuat dengan terbentuknya Dewan Militer pada awal tahun 1954. Dewan Militer ini berfungsi sebagai dewan penasihat militer Panglima Komandemen, dan diketuai oleh Daud Beureueh sendiri, sementara Husin Jusuf dan Al-Mudjahid menjadi anggotanya.³

Namun demikian konsentrasi kekuasaan di tangan Daud Beureueh dan ketatnya pemerintahan militer kemudian terbukti tidak memadai sebagai alat konsolidasi kepemimpinan gerakan itu. Ketika suatu kemungkinan penyelesaian pemberontakan melalui perundingan muncul

3. Gelanggang, *op. cit.*, hal. 65.

pada tahun 1955, sementara Jakarta dikabarkan sedang mempertimbangkan status propinsi untuk Aceh, Daud Beureueh dan pemimpin lain yang dekat dengannya pun yakin bahwa hal itu akhirnya akan memberi dampak terhadap gerakan mereka. Oleh sebab itu, segera sesudah pembicaraan pertama dengan utusan pemerintah, mereka memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi para pemimpin, yang pelaksanaannya bertepatan dengan ulang tahun kedua gerakan itu. Barangkali adanya keterkaitan dengan kesediaan Kabinet Burhanuddin untuk berunding dengan mereka itulah maka konferensi ini menjadi sangat menarik bagi para anggota Darul Islam setempat. Banyak ulama dari seluruh Aceh, termasuk mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam pemberontakan, datang ke Bate Kureeng untuk menghadirinya, sehingga konferensi yang semula direncanakan sebagai forum anggota Darul Islam berubah menjadi semacam konferensi rakyat. Ketika membahas tawaran Perintah Pusat untuk berunding, konferensi digelisahkan oleh beberapa peserta yang menanyakan masa depan perjuangan mereka apabila Jakarta memberikan status propinsi kepada Aceh. Tampaknya kelompok zuama dalam kepemimpinan puncak pemberontak tergiur oleh kemungkinan ini. Para pemimpin kelompok ini memang telah bergabung ke dalam pemberontakan karena kekecewaan mereka atas pembubaran Propinsi Aceh pada tahun 1951. Pemimpin-pemimpin dalam kelompok lain, yaitu kaum ulama, percaya bahwa tawaran Jakarta dapat mengurangi kesetiaan kelompok pertama terhadap perjuangan, sehingga berusaha sekuat daya untuk mencegah desersi mereka.⁴ Demi alasan itu, para pemimpin pemberontakan memperjelas kepada para peserta konferensi bahwa mereka tidak lagi mengejar suatu negara kesatuan dan status propinsi untuk Aceh, melainkan sebuah negara yang berdasarkan federalisme.

Dengan demikian konferensi itu memproklamasikan pembentukan Negara Bagian Aceh⁵ dan meresmikan Daud Beureueh sebagai wali negaranya.⁶ Sebagai ganti Komandemen Wilayah, maka konferensi mem-

4. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973.

5. Lihat "Piagam Bate Kureeng", stensilan bertanggal 23 September 1955.

6. Istilah "wali" dan penggunaannya dalam politik berasal dari sistem pemerintahan Arab dahulu dan tidak dipergunakan di bagian-bagian lain NII. Wali, atau gubernur, adalah kepala suatu wilayah; lihat Z.A. Ahmad, *Republik Islam Demokratis* (Tebing Tinggi: Pustaka Madju, 1950 [?]), hal. 61.

bentuk sebuah kabinet dengan Hasan Ali sebagai perdana menteri. Oleh pihak luar perkembangan ini mungkin dinilai menunjukkan penurunan peranan Daud Beureueh dalam pemerintahan NBA. Tetapi tidak demikian halnya bila dilihat dari dalam, sebab kabinet itu tidak lebih daripada sekadar perubahan dari sistem komandemen ke sistem yang lain, sementara posisi Daud Beureueh sebagai kepala negara tetap sekuat sebelumnya. Hal ini akan diuraikan dalam bagian berikut yang membicarakan masalah konflik internal dalam NBA.

Sekalipun pengaruhnya begitu kuat, Daud Beureueh tidak melindungi dirinya sendiri dengan suatu kultus pribadi. Untuk menyatukan kekuatannya dia terus-menerus menginspeksi pasukan-pasukan TII, berbicara kepada mereka, dan menyampaikan dakwah di kampung-kampung, terutama di kabupaten-kabupaten yang dikendalikan Darul Islam, yaitu di pantai timur dan Aceh Tengah.⁷ Akan tetapi letak markas besar gerakannya tetap tidak diketahui. Sementara pemerintah percaya bahwa markas tersebut berada di suatu daerah di Kabupaten Pidie atau Aceh Utara, di mana rapat-rapat memang selalu diadakan,⁸ kaum pemberontak hanya menyebut markas mereka sebagai "Fisabilillah" (medan perang Allah), dan kemudian "Aceh Darussalam" (Aceh negeri damai). Walaupun demikian, keberadaan Daud Beureueh dan staf dekatnya selalu diberitahukan kepada para pemimpin puncak dan resimen sehingga komunikasi di antara mereka tidak terganggu.

Apa pun faktor yang menyebabkan rakyat Aceh mendukung pemberontakan, kenyataan menunjukkan bahwa kekuasaan efektif NBA memang secara mendalam merasuki masyarakat Aceh, baik di dalam maupun di luar daerahnya. Dinas-dinas pemerintahan dan sektor swasta pun tidak ada yang tidak disentuhnya. Sekalipun ada pembersihan yang dilakukan oleh Gubernur Amin terhadap pengaruh PUSA dalam pemerintahan setempat, sampai batas-batas tertentu NBA tetap berpengaruh terhadapnya. Para pegawai negeri suku Aceh tetap mempertahankan hubungan mereka dengan NBA dan memberi bantuan di mana mungkin. Pengurus rumah-rumah sakit di kota-kota selalu menyediakan obat-obatan bagi dinas kesehatan NBA dan memberikan prioritas

7. Lihat, misalnya, Hasan Saleh, *Revolusi Islam di Indonesia* (Darussalam [Sigli?]: Pustaka Djihad, 1956), hal. 47.

8. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan N.V., 1956), hal. 71.

perawatan kepada anggota TII yang terluka, sementara pejabat senior pemerintahan setempat memiliki "surat jalan" yang dikeluarkan oleh Bupati NBA guna menghindari kesulitan dengan TII.⁹ Bahkan di Jakarta pun terjadi penetrasi terhadap dinas-dinas pemerintahan. Umpamanya, ketika NBA membuka perwakilan di Jawa, yaitu untuk memudahkan hubungan dengan unsur-unsur Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar di sini, yang bertanggung jawab adalah seorang pejabat suku Aceh dari salah satu kementerian.¹⁰

Tentu saja tidak semua keefektifan dan legitimasi pemerintahan NBA tergantung pada Daud Beureueh sendiri. Sampai batas-batas tertentu hal itu sangat tergantung pada cara penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat rendahan, dan pada pengaruh pemimpin-pemimpin daerah. Tanpa mengabaikan peranan yang dimainkan pejabat dan aparat pemerintahan daerah, kita perlu membahas masalah organisasi dan peranan Divisi Teungku Chik Ditiro. Pentingnya peranan divisi ini bukan hanya karena merupakan tulang punggung NBA tetapi juga karena hubungannya dengan para pemimpin di daerah-daerah. Selanjutnya, hubungan ini terkait dengan dukungan rakyat terhadap NBA. Kita telah melihat bahwa setelah Darul Islam tidak berhasil mengambil alih kekuasaan, TII meninggalkan serangan-serangan frontalnya terhadap pasukan pemerintah dan, sebagai gantinya, menjalankan strategi perang gerilya. Penggunaan strategi gerilya ini menghendaki adanya desentralisasi dalam sistem pengendalian militer, yaitu pelimpahan wewenang kepada unit-unit yang lebih kecil, sehingga mereka relatif dapat bergerak dan bertindak secara mandiri. Struktur ini tetap dipertahankan, meskipun kemudian, sesudah konferensi Bate Kureeng, dilakukan beberapa perubahan pada tingkat puncak struktur militer tersebut. Pengangkatan Husin Jusuf menjadi menteri pertahanan dalam Kabinet NBA menyebabkan posisi kepala staf kini diberikan kepada Hasan Saleh, yang sebelumnya adalah wakil kepala staf TII dan bekas kapten dalam tentara Indonesia. Namun kekuasaan tertinggi atas divisi itu tetap berada dalam tangan panglimanya, Daud Beureueh.

9. Wawancara dengan seorang pensiunan pegawai negeri yang tidak mau disebut namanya, Bireuen, 10 Agustus 1973.

10. Untuk keselamatan pribadi pejabat tersebut, saya lebih suka untuk tidak menyebutkan nama dan kementerian.

Desentralisasi kekuasaan militer kepada unit-unit yang lebih kecil, terutama kepada resimen-resimen, dan subordinasi pemerintahan sipil kepada militer, telah memperkuat posisi kaum ulama dalam perjuangan itu. Mungkin sekali hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dukungan rakyat. Lima dari tujuh komandan resimen yang ada dalam divisi itu adalah ulama-ulama yang memiliki pengalaman militer; perjalanan tersebut memadai; pengalaman tersebut mereka peroleh dalam pasukan Mujahidin pada masa revolusi. Kesemua mereka adalah ulama-ulama yang populer di kabupaten atau kewedanaan mereka sendiri. Haji Ibrahim adalah seorang ulama terkenal dan pernah menjadi jaksa di Lhoksukon; kini ia berpangkat mayor dan memegang pimpinan Resimen II di Aceh Utara. Resimen III di Aceh Timur di bawah pimpinan Mayor Abdurrahman Hanafi, seorang bekas kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten di Langsa. Setelah wafat, ia kemudian digantikan oleh Gazali Idris, seorang perwira Mujahidin yang sangat populer pada masa revolusi. Komando Resimen V, yang berkedudukan di Aceh Tengah, dipegang oleh Letnan Kolonel Iljas Leube, seorang ulama muda tapi sangat berpengaruh di sana. Seorang ulama lain, Mayor Abdul Wahab Ibrahim, yang pernah bekerja di Dinas Kehewanan di Kutaraja pada masa sebelum pemberontakan, menguasai Resimen VI yang berkedudukan di Aceh Besar. Resimen VII yang beroperasi di Sumatera Timur berada di bawah seorang ulama setempat yang terkenal, Mayor Haji Sori Siregar, yang secara populer dikenal sebagai Haji Hasanuddin. Hanya ada dua resimen di tangan komandan yang tidak berlatar belakang ulama. Pertama, Letnan Kolonel Ibrahim Saleh dari Resimen I di Kabupaten Pidie, yang tidak lain abang Hasan Saleh; ia adalah bekas letnan dan komandan kompi dalam ketentaraan Indonesia. Yang kedua adalah Mayor Teuku Raja Idris dari Resimen IV yang berkedudukan di Kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Selatan; pada masa sebelum pemberontakan ia adalah seorang camat.

Sekalipun dalam resimen-resimen ada pengaruh yang besar dari para ulama, kekuatan divisi yang sesungguhnya tergantung pada organisasi, pasukan, dan peralatannya. Dalam hal ini, kekuatan sebenarnya dari setiap resimen itu adalah berbeda-beda. Resimen I terdiri atas empat batalion, sementara resimen yang berada di Aceh Barat dan Selatan hanya memiliki dua batalion, dan resimen lain masing-masing mempunyai tiga batalion. Ada empat kompi dalam satu batalion, tetapi

ukuran kompi ini pun tergantung pada keadaan di setiap resimen, walaupun peraturan TII telah menetapkan adanya empat peleton, yang terdiri atas empat puluh prajurit, dalam setiap kompi. Akan tetapi kekuatan resimen di Aceh Besar berkisar antara 1000 sampai 1400 orang, dan dalam hal pasukan, resimen ini hanya sedikit lebih besar dari batalion di daerah-daerah lain. Biasanya ukuran kompi tergantung pada sumber-sumber yang ada di dalam suatu kecamatan. Pendapatan dari infak dan sumber-sumber lain dipergunakan oleh camat untuk membiayai kompi-kompi TII setempat. Di Aceh Besar, para camat hanya mampu mendukung separuh dari seluruh kebutuhan resimen, sehingga resimen itu harus memperkecil ukurannya.¹¹ Namun demikian kekuatan sebenarnya tidak tergantung pada kekuatan manusianya saja melainkan juga pada keadaan persenjataan. Dalam hal ini, dengan pengecualian resimen Aceh Besar yang memiliki satu senjata untuk setiap dua prajurit, umumnya satu senjata ringan diperuntukkan bagi empat orang. Anggota-anggota pasukan memegang senjata secara bergiliran, dan hanya mereka yang sedang mengawal atau terlibat dalam operasi militerlah yang boleh memegang senjata. Ini berarti bahwa kekuatan efektif suatu unit kira-kira setengah sampai seperempat dari jumlah prajuritnya. Dalam arti yang demikian, pasukan yang paling kuat adalah pasukan yang terdapat di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar, sedangkan yang paling lemah adalah pasukan di Aceh Barat dan Selatan di mana rasio antara prajurit dan senjatanya adalah satu berbanding empat.¹²

Di atas semua itu, meskipun kekurangan senjata, para anggota TII tidaklah hidup dalam kesengsaraan. Pimpinan NBA memberi perhatian yang besar pada kehidupan pasukan untuk mencegah mereka meninggalkan perjuangan hanya karena alasan-alasan ekonomi, atau

11. Wawancara dengan Sulaiman Gading, bekas letnan TNI yang kemudian menjadi komandan batalion resimen TII di Aceh Besar dengan pangkat mayor, Kutaraja, 14 November 1975. Bandingkan dengan wawancara dengan Saleh Kafa, bekas komandan batalion pasukan Mujahidin pada masa revolusi, dan kemudian menjadi kepala urusan politik pada Kantor Bupati Aceh Selatan. Ia adalah seorang mayor dan komandan batalion resimen TII di Aceh Selatan. Wawancara ini dilakukan di Kutaraja, 27 November 1975.

12. Evaluasi ini terutama didasarkan pada distribusi senjata di antara ketujuh resimen yang dimiliki NBA sebagaimana diputuskan dalam konferensi militer yang diselenggarakan pada bulan Mei 1957, di samping wawancara dengan Muhammad Saleh Kafa.

karena tindakan-tindakan tidak disiplin yang dapat merugikan seluruh gerakan. Selain menerima makanan, anggota TII senantiasa mempunyai dua seragam lengkap, selembar selimut, kelambu, jas hujan, handuk, ransel, dan berbagai keperluan lainnya. Setiap regu, yang terdiri atas sebelas anggota, memiliki sebuah tenda terbuka yang besar. NBA tidak memberikan gaji kepada para anggotanya melainkan "hadiah". Ini jelas merupakan suatu cara yang dipakai oleh para pemimpin NBA untuk membedakan pasukan mereka dari tentara Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa anggota TII berperang demi kepentingan sendiri dan bukan tentara profesional yang bertempur hanya karena digaji. Besarnya hadiah bulanan pada tahun 1955 lima puluh rupiah bagi setiap prajurit tanpa memandang apa pun pangkat mereka. Akan tetapi ini tidak berarti pimpinan NBA percaya pada kesamarataan, sebab selain hadiah tersebut para perwira juga setiap bulan menerima uang jabatan yang berkisar antara Rp 100,00 untuk seorang komandan kompi atau camat, sampai Rp 150,00 untuk komandan batalion atau wedana. Di samping itu, seorang prajurit yang telah berkeluarga juga menerima dua puluh liter beras setiap bulan untuk keluarganya di desa. Jatah beras dan hadiah setiap prajurit diberikan terus, bahkan setelah prajurit yang bersangkutan tertawan atau tewas dalam pertempuran. Sebagai tambahan, semua anggota Darul Islam menerima bonus lain pada setiap hari raya Islam, kelahiran anak, atau pun kematian dalam keluarganya, dan lain-lain.¹³

Dalam pemerintahan pada tingkat daerah, para komandan resimen merupakan penguasa tertinggi. Sebagai komandan komandemen, kedudukan mereka lebih tinggi daripada bupati Darul Islam. Namun demikian ada fungsi yang jelas bagi para pejabat sipil. Para komandan militer membiarkan pegawai-pegawai pemerintahan sipil berfungsi dan bahkan sering meminta nasihat mereka, sebab mereka pun merupakan anggota komandemen. Komandan resimen biasanya memberitahukan kegiatan pasukannya dalam suatu kabupaten kepada bupati yang bersangkutan. Oleh karena itu para bupati selalu mengetahui sabotase atau kegiatan lain yang dilakukan oleh pasukan TII. Dalam kaitan ini, seorang bupati mungkin saja mencegah resimen membakar atau merusak

13. Informasi ini didasarkan pada keputusan konferensi Bate Kureeng, September 1955, dan keputusan konferensi militer tanggal 4 Juni 1957.

sasaran-sasaran non-militer, seperti sekolah, yang berada di luar kepentingan strategi militer.¹⁴ Biasanya kedua unsur ini bekerja sama dengan baik. Para pejabat sipil menggunakan pasukan TII bila diperlukan dalam pelaksanaan tugas mereka, sementara komandan-komandan militer memanfaatkan camat setempat untuk membina dan mengawasi gerak-gerik anggota pasukan. Para Camat memberitahukan pimpinan TII apakah anggotanya berpuasa dan salat secara teratur atau tidak.¹⁵ Pengawasan demikian dengan sendirinya mencegah anggota TII terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak disiplin di perkampungan. Namun begitu kadang-kadang konflik antara penguasa militer dan sipil tidak pula terhindarkan. Hanya dalam keadaan demikianlah penguasa yang lebih tinggi ikut campur tangan.¹⁶

Untuk mengatur aspek-aspek non-militer gerakannya, maka NBA menyusun pemerintahan sipilnya sejajar dengan garis pemerintahan Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke kewedanaan, dan sedapat mungkin mempertahankan struktur pemerintahan desa. Tentu saja sulit bagi NBA untuk mengawasi kegiatan para camat, wedana, dan bupati pemerintah, sebab kebanyakan dari mereka tinggal di kota dalam perlindungan pasukan pemerintah. Akan tetapi di tempat yang tidak ada pasukan pemerintah, terutama pada tingkat kecamatan, NBA dapat mengganggu garis pemerintahan Indonesia dengan mencegah para pejabatnya berfungsi, dan sebagai gantinya ditempatkanlah camat NBA. Gangguan ini menguntungkan NBA dalam keadaan di mana pamong praja pemerintah -- yakni unsur-unsur *ulebalang* dan Perti yang diangkat oleh Gubernur Amin pada permulaan pemberontakan -- tidak bersedia bekerja sama dengan para pemberontak.

Penguasaan terhadap penduduk desa sangat penting, sebab mereka-lah yang menjadi sumber tenaga, makanan, dan informasi. Namun demikian NBA tidak merasa perlu mengangkat pejabatnya sendiri untuk mengatur desa, melainkan lebih suka membiarkan penguasa desa yang telah ada, yaitu *keuchik*, menjalankan tugas mereka asalkan mau bekerja

14. Wawancara dengan Ishak Amin, bupati Aceh Selatan sebelum pemberontakan meletus, dan kemudian menjadi bupati NBA untuk Aceh Besar, pada tanggal 22 November 1975 di Kutaraja.

15. Wawancara dengan Sulaiman Gading, Kutaraja, 14 November 1975.

16. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 22 November 1975.

sama dengannya. Keefektifan pemerintahan NBA di kampung-kampung antara lain telah dimungkinkan oleh kenyataan bahwa pada umumnya hubungan desa-desa terputus dari pejabat pemerintahan di kota dan bahwa pemerintah tidak mampu mengawasinya secara militer. Di pihak lain, kenyataan bahwa para *keuchik* tidak digaji pemerintah memberikan keuntungan yang lain kepada NBA, sebab penguasa-penguasa desa ini tidak mempunyai kewajiban moral untuk mematuhi pemerintah. Bahkan pada tingkat ini pemerintahan NBA menjadi lebih efektif kemudian, yaitu ketika dapat memastikan loyalitas para penguasa kampung ini dengan mengangkat mereka sebagai pejabatnya sehingga berhak pula mendapat "hadiah" bulanan. Namun, meski mempercayai para pejabat pedesaan ini untuk mengumpulkan infak atau pajak, NBA tetap membiarkan mereka bebas.

Sekalipun ada pengawasan yang kuat terhadap pedesaan, NBA tidak pernah mencoba menjadikan pedesaan sebagai basis pasukannya. Tentara NBA mungkin saja pulang ke desa selama masa cuti dan para pejabatnya mungkin pula tinggal di sana, akan tetapi desa hanya berfungsi sebagai penyangga antara NBA dan pasukan pemerintah. Markas NBA setempat biasanya terletak di kejauhan, antara tiga sampai lima kilometer dari suatu kampung, dan tidak banyak penduduk, termasuk *keuchik* sekali pun, yang mengetahui letaknya. Orang kampung dengan sendirinya dicegah mendekat, bahkan sebelum dapat mencapainya, mereka harus melalui sebuah pos terdepan TII yang sering hanya berjarak satu atau dua kilometer dari desa. Walaupun begitu, ada satu rantai informasi antara desa dan markas itu. Informasi yang dikumpulkan oleh *keuchik* dari penduduk kampung dengan segera disalurkan ke pos terdepan melalui unsur-unsur NBA yang berdiam di kampung tersebut.¹⁷

Upaya untuk menjamin dukungan rakyat terhadap pemberontakan tidak selalu dalam bentuk eksploitasi terhadap popularitas para ulama setempat. Di samping pendekatan itu, NBA juga memanfaatkan sepenuhnya cara-cara lain, seperti propaganda dan teror. Propaganda pada dasarnya dimaksudkan untuk memelihara dukungan yang telah didapat sebelumnya oleh gerakan itu dari rakyat. Untuk maksud ini, NBA memanfaatkan sejumlah kelemahan yang ada pada pihak pemerin-

17. Wawancara dengan seorang anggota TII yang sekarang menjadi anggota TNI, Kutaraja, 24 Oktober 1975; ia tidak mau disebutkan namanya.

tah dan penguasa militer. Sikap anti-Islam pejabat pemerintahan, seperti perlindungan pejabat kepolisian terhadap judi di Sumatera Utara, dan siksaan-siksaan yang dilakukan tentara, diungkapkan secara ekstensif dalam propaganda. Dalam hal ini, kemampuan mesin propaganda NBA tidak perlu diragukan. Selain kegiatan-kegiatan biro informasi di tingkat resimen atau di tingkat yang lebih rendah, NBA juga menyebarkan propaganda langsung dari markas besarnya. Propaganda sentral ini ditangani oleh Menteri Penerangan Mayor Abdul Gani Mutyara, seorang bekas kapten TNI, perwira pers divisi, dan pemimpin redaksi surat kabar *Tegas*. Propaganda ini biasanya dimuat dalam buletin resmi NBA yang terbit secara teratur, *Gerilja Muslimin Rimba Raja*, dan pamflet-pamflet yang beredar luas di kota dan desa-desa. Selain itu juga telah diterbitkan dua buah buku pada tahun 1956.¹⁸

Dalam pada itu, teror dipergunakan terhadap "pengkhianat", yaitu mereka yang "menentang pembentukan Negara Islam dan Syariat Islam."¹⁹ Yang termasuk dalam kategori ini ialah kaum bangsawan yang lebih suka meninggalkan desa dan mencari perlindungan kepada pasukan pemerintah di kota-kota daripada menawarkan kerja sama kepada Darul Islam. Selain kaum bangsawan, unsur-unsur Perti, PNI, dan PKI yang aktif membantu pemerintah untuk menghancurkan kaum pemberontak dimasukkan juga dalam kelompok ini.²⁰ Untuk menghadapi kelompok masyarakat ini, Darul Islam membentuk regu penculikan dan pembunuhan dalam setiap kompi TII.

Kegiatan regu-regu tersebut pernah menimbulkan kekecewaan di kalangan banyak ulama yang mendukung Darul Islam, meskipun mereka menyadari perlunya tindakan demikian bila dilihat dari sudut taktik. Bagi para ulama, membiarkan pembunuhan itu terus berlangsung berarti

18. Kedua buku itu adalah *Rabasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, oleh A.H. Gelanggang, nama samaran Teuku A. Hasan, menteri keuangan dan kesehatan NBA, dan bekas bupati Aceh Pidie, dan *Revolusi Islam di Indonesia*, oleh Hasan Saleh, kepala staf Divisi NBA.

19. Hal ini terlihat dalam salah satu keputusan yang diambil oleh konferensi Bate Kureeng; ketikan, tak bertanggal (1955).

20. Lihat, umpamanya, surat terbuka dari seorang wanita, Pocut Khadidjah, yang ditangkap, diinterogasi, dan diancam akan dibunuh oleh TII di Kabupaten Pidie karena hubungannya dengan unsur-unsur anti PUSA, dalam *Penyedar* 4 (30 Desember 1953), hal. 21-23.

merusak hukum agama. Mereka berpendapat bahwa orang Islam tidak boleh dibunuh oleh saudaranya seagama. Jelas bagi mereka bahwa Islam menentang pembunuhan, sekalipun terhadap orang yang murtad. Oleh sebab itu mereka bersikeras bahwa Darul Islam tidak boleh membunuh seseorang sampai yang bersangkutan diberi waktu tiga hari untuk mengoreksi diri. Hanya setelah itu barulah hakim, dan bukan tentara, boleh menentukan nasibnya.²¹ Para ulama ini sangat resah terhadap kenyataan bahwa sistem peradilan kaum pemberontak, yang terdiri atas Mahkamah Negeri Luar Biasa dan Mahkamah Tinggi Luar Biasa, tidak berfungsi dengan baik.²² Sebagai akibat dari kritik-kritik mereka, maka muncullah suatu langkah untuk menyusun kembali sistem peradilan dan memberikan peranan yang lebih besar kepada para ulama non-tempur dalam struktur pemerintahan. Hal ini tercapai dalam konferensi Bate Kureng pada tahun 1955, ketika Majelis Ifta' (Dewan Penasihat) yang dipimpin oleh Hasballah Indrapuri dibentuk. Dewan ini bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah Darul Islam dalam pelaksanaan hukum Islam. Sejak itu, sebelum suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang, penguasa militer terlebih dahulu harus membahasnya dengan pejabat-pejabat kehakiman yang terdiri atas ulama-ulama ternama.²³

Kekuasaan efektif NBA juga sangat terasa di daerah perkotaan. Sekalipun memusatkan perhatian di daerah pedesaan, NBA tiada henti-hentinya pula untuk berusaha mengendalikan kota-kota. Para wedana dan bupati NBA, yang diberi tugas mengawasi urusan sosial, ekonomi, dan politik dalam wilayah masing-masing, sering mencoba memperluas kekuasaan mereka terhadap penduduk kota. Begitu juga, agen-agensya selalu memasuki kota, termasuk Kutaraja, untuk mengamati gerak-gerakan militer dan membuka mata terhadap berbagai kegiatan kelom-

21. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ulama yang pro-Darul Islam kepada Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, ketika itu adalah bupati Aceh Pidie, pada tahun 1954, dan saya kutip dari catatan tulisan tangan Panglima Polim, bertanggal Medan, 11 Oktober 1954.

22. Untuk menggantikan sistem peradilan sebelumnya, pada tahun 1954 gerakan Darul Islam di Aceh membentuk Mahkamah Negeri Luar Biasa dengan tugas menangani urusan hukum pada tingkat kabupaten, sementara Mahkamah Tinggi Luar Biasa dimaksudkan sebagai Pengadilan Tinggi. Lihat Gelanggang, *op. cit.*, hal. 70-71.

23. Wawancara dengan Haji Affan, bekas bupati NBA di Aceh Utara, Bireuen, 29 Desember 1975.

pok anti-Darul Islam. Mereka sering mengganggu sasaran militer dan non-militer di kota. Mereka juga mendapat tugas untuk mengumpulkan pajak dari penduduk kota. Untuk maksud ini, kadang-kadang bupati atau wedana sendiri yang ke kota. Pajak berkala ditarik dari para pedagang, baik Aceh maupun non-Aceh, bahkan dari pejabat pemerintahan. Penarikan pajak ini dilakukan secara sukarela atau paksaan. Mereka yang bersimpati pada gerakan Darul Islam menyerahkan pajak mereka secara sukarela, dan paksaan atau ancaman hanya diterapkan terhadap mereka yang menentang. Di kalangan masyarakat Cina di Kutaraja, orang Cina Kuomintang membayar pajak secara sukarela, sementara warganegara Republik Rakyat Cina menyerahkan pajak mereka karena terpaksa.²⁴

Sejauh menyangkut pengumpulan pajak, para petugas NBA pada umumnya tidak mengalami kesukaran di dalam menarik pajak terhadap penduduk kota yang tidak mau bekerja sama. Jika seseorang menolak untuk membayar pajak, maka NBA segera mengintimidasinya dengan memanfaatkan ketakutan penduduk terhadap penguasa militer. Dalam hal demikian, maka seorang bupati NBA akan mengirimkan sepucuk surat kepada yang bersangkutan, melalui seorang kurir, yang menyatakan penghargaan atas "sumbangan" yang telah diberikannya kepada Darul Islam. Tentu saja surat itu tidak benar-benar diserahkan kepada penduduk kota yang tidak kooperatif itu, melainkan kepada penguasa militer. Dalam menjalankan misi ini, kurir tersebut akan membiarkan dirinya tertangkap oleh tentara yang akan menyita surat itu darinya. Sementara kurir itu akan dapat melepaskan diri secara mudah, dengan mengaku bahwa ia hanya seorang desa yang telah dipaksa oleh Darul Islam untuk menyampaikan surat tersebut, penguasa militer biasanya segera berurusan dengan orang yang dimaksudkan. Dalam banyak hal, orang-orang seperti itu -- yaitu yang menolak kerja sama dengan Darul Islam -- mendapat pukulan dari tentara.²⁵

Yang lebih sederhana lagi ialah cara pengumpulan pajak di daerah pedesaan; hal ini dapat dijadikan sebagai patokan di dalam mengukur bagaimana efektifnya kekuasaan NBA. Berbeda dari kasus di daerah perkotaan, di kampung-kampung para camat pemberontak atau agen-

24. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

25. *Ibid.*

agen mereka tidak perlu mengunjungi setiap rumah untuk menarik pajak. Biasanya camat mengumpulkan pajak dari *keuchik* yang bertanggung jawab atas penarikan pajak di kampungnya. Camat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap keluarga, yang besarnya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, tergantung pada situasi keuangan pemerintahan NBA setempat. Di Aceh Timur, umumnya, pajak tahunan yang ditarik dari setiap keluarga pada pertengahan tahun 1955 adalah sebesar Rp 80,00 ditambah dua puluh liter beras.²⁶ Dengan menugaskan *keuchik* untuk menarik pajak, maka para pejabat NBA dapat menghindari hubungan yang kerap dan tidak perlu dengan penduduk desa, di samping mencegah timbulnya situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Dapatlah dipahami, dalam hal ini, bahwa kerapnya kehadiran para petugas itu di kampung-kampung dapat menimbulkan rasa keterancaman di kalangan penduduk. Ini merupakan hal yang ingin dihindari oleh pimpinan NBA. Akan tetapi, berkenaan dengan pajak atas harta kekayaan para bekas *ulebalang* atau keluarga mereka, NBA berhubungan secara langsung dengan penduduk desa yang dipercayai mengurus harta tersebut oleh pemiliknya, yang kini hidup di kota dan oleh para pemberontak dipandang sebagai pengkhianat. Untuk melindungi penduduk tersebut dari sang bangsawan, petugas NBA biasanya mengeluarkan bukti penarikan pajak.²⁷

Infak yang dibayarkan oleh penduduk tersebut tentu saja bukan satu-satunya sumber pendapatan NBA. Dalam kenyataannya NBA memungut pajak terhadap hampir semua hal yang dapat dikenakan pajak: perusahaan, bus, perkebunan, serta segala macam transaksi dagang.²⁸ Para pengusaha yang bukan pendukung Darul Islam sangat sadar bahwa biar bagaimanapun mereka tidak dapat mengharapakan perlindungan dari

26. *Peristiwa*, 27 Agustus 1955. Untuk melihat makna dari jumlah yang dibayarkan oleh sebuah rumah tangga, kita perlu mengaitkannya dengan harga seliter beras, yang di Langsa pada tahun 1955 adalah Rp 2,25 (Biro Pusat Statistik). Jadi, setiap rumah tangga memberikan 35 liter beras ditambah 20 liter setiap tahunnya.

27. Wawancara dengan Teuku Ali Keureukon, bekas *Ulebalang* Keureukon di Aceh Besar, Kutaraja, 28 November 1975.

28. Kemudian pada tahun 1955, dalam konferensi Bate Kureeng, pemberontak membuat perincian peraturan mengenai sistem pajak untuk memajaki segala sesuatu yang dapat dikenai pajak. Lihat keputusan seksi keuangan konferensi Bate Kureeng; ketikan, tak bertanggal (1955).

pasukan pemerintah, oleh karena itu mereka tidak mempunyai pilihan selain daripada siap membayar pajak kepada NBA. Demikian pula, pimpinan perkebunan asing di Aceh Timur dan Barat memilih untuk mematuhi NBA agar kegiatan mereka tidak terganggu, tetapi mereka tidak pernah melaporkan hal ini kepada pemerintah. Dalam hal ini, NBA selalu melindungi pimpinan perkebunan tersebut dengan berbuat seakan-akan pajak tersebut dipungut di bawah todongan senjata.²⁹ Selain pajak-pajak ini, NBA juga mengutip biaya atas pernikahan, talak, dan rujuk. Untuk tujuan ini, maka NBA mengangkat kadi di setiap kecamatan dan mengarahkan rakyat agar berhubungan dengan kadi-kadi ini, dan bukan dengan petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia.³⁰

Akan tetapi penghasilan utama kaum pemberontak berasal dari kegiatan penyelundupan dan perdagangan legal serta tidak legal lainnya yang mereka lakukan dengan Penang dan Singapura. Dari Aceh, NBA menyelundupkan komoditas ekspor seperti biji kopi, karet, minyak nilam, serta tembaga, dan kuningan. Kuningan biasanya dalam bentuk kawat telepon yang disita NBA di seluruh daerah itu pada permulaan pemberontakan. Tembaga, juga kuningan, berasal dari barang-barang rumah tangga tradisional yang dibeli dari penduduk kampung, selain alat-alat perlengkapan militer yang sudah tua dan rusak peninggalan Jepang. Barang-barang ini diangkut dengan kapal-kapal motor yang ber tenaga tinggi dan mampu mengungguli kecepatan kapal patroli Angkatan Laut Indonesia. Di samping mengorganisasi rantai penyelundupannya sendiri, NBA juga mengambil keuntungan dari sistem perdagangan barter yang legal. Dalam kaitan ini, NBA memanfaatkan perdagangan barter tersebut melalui kerja sama dengan eksportir resmi³¹ yang tentu saja bersedia mengirimkan barang-barang NBA demi

29. Pada awal Maret 1956, pimpinan perkebunan Socfindo milik Inggris di Meulaboh diberitakan telah dirampok oleh pasukan TII setempat dan kehilangan Rp 336.000,00, lihat *Peristiwa*, 28 Maret 1956. Menurut Hasan Ali, pasukan TII tersebut tidak menyerang perkebunan itu, sebab telah ada perjanjian antara pimpinan perkebunan dengan pejabat NBA bahwa pihak yang pertama itu akan membayar pajaknya secara sukarela jikalau pasukan TII menyelubunginya sebagai suatu perampokan; wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

30. *Peristiwa*, 11 Oktober 1955.

31. Abdul Murat Bin Mat Jan, "Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959" (skripsi, Universitas Gajah Mada, 1976), hal. 110.

laba yang besar. Dalam perjalanan kembali ke Aceh, NBA menyelundupkan senjata ringan, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya, di samping barang-barang konsumsi untuk pasaran Aceh dan Sumatera Utara. Penyelundupan barang-barang konsumsi ini memberi keuntungan besar bagi NBA.

Oleh sebab itu, bagi NBA, penyelundupan mempunyai tujuan ekonomi dan politik. Penyelundupan merupakan tujuan ekonomi dalam arti bahwa kegiatan dagang merupakan sumber keuangan yang besar bagi NBA untuk mendukung tindakan-tindakannya. Secara politis, kegiatan dagang itu digabungkan dengan usaha untuk menyelundupkan perlengkapan militer ke Aceh dan, tatkala ketegangan politik mencapai puncaknya di Indonesia kemudian, dijadikan saluran komunikasi dengan pimpinan pemberontakan-pemberontakan lainnya. NBA menjadikan Penang sebagai pusat kegiatan dagangnya, tetapi memusatkan kegiatan politiknya di Singapura. Melalui kantornya di Singapura, NBA membeli senjata-senjata ringan dan keperluan militer lainnya di pasar gelap setempat, memalsukan dokumen perdagangan bagi barang-barang yang diselundupkan ke Pelabuhan Penang, di samping memalsukan paspor Indonesia untuk perjalanan agen-agennya.³² Melalui Singapura juga dilakukan kontak dengan dutanya di PBB.

Walaupun bisa menanggung laba besar dari penyelundupan dan kebebasan yang diberikan oleh penguasa Singapura dan Malaya, NBA tetap saja kekurangan senjata, padahal sudah memasukkan banyak senjata dan kebutuhan lain untuk pasukannya. Dari Februari sampai Juni 1955 dilaporkan adanya empat kegiatan penyelundupan untuk memasukkan senjata ke Aceh.³³ Selama bulan Juni saja diberitakan bahwa NBA menerima sejumlah senjata ringan, 2500 seragam, sepatu, kaos kaki, tanda pangkat, amunisi, obat-obatan, dan rokok.³⁴ Dengan demikian, organisasi militer NBA dan keadaan pasukannya pada tahun 1955 jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, namun kekurangan senjata belum dapat diatasi sepenuhnya. Keadaan ini, pertama, disebabkan oleh sulit-

32. Wawancara dengan Teungku Jahja, Penang, 20 Juni 1973.

33. *Antara*, 13 Juni 1955, dikutip dari *Kronik* 20, hal. 148.

34. *Merdeka*, 29 Agustus dan 29 September 1955.

nya memperoleh senjata di pasar gelap Singapura.³⁵ Kedua, NBA memang telah mencoba membeli senjata dari negara lain, akan tetapi usaha ini pun gagal, sebab NBA tidak mampu membayar harganya yang begitu tinggi. Memang terjadi satu atau dua kali pengiriman dengan pesawat terbang sewaan,³⁶ namun ini pun harus segera dihentikan sebab biayanya mahal sekali.³⁷

Jadi jelaslah bahwa sebenarnya NBA bukan kelompok bandit di hutan rimba Aceh. NBA mempunyai organisasi yang berfungsi dan secara efektif berpengaruh, terutama di daerah-daerah pedesaan. Bila kita lihat dari sudut pandang organisasi pemerintahan, jelas bahwa NBA lebih daripada sekadar gerakan gerilya. NBA sungguh-sungguh merupakan pemerintahan tandingan, sebab tidak hanya memiliki kekuatan yang terorganisasi dan mampu mendukung penegakan hukum, melainkan juga mempunyai sumber-sumber penghasilan untuk mendukung penyelenggaraan organisasi itu. Malah ada sejumlah besar penduduk yang mematuhi kekuasaan NBA dan menganggap organisasi itu sebagai kekuasaan yang sah. Malahan pertikaian-pertikaian yang terjadi dalam kepemimpinan pemberontakan sejak akhir tahun 1955, seperti akan kita lihat nanti, tidak mengganggu wibawa NBA. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa, pada tahap ini, konflik-konflik tersebut hanya terbatas dalam struktur puncak kepemimpinannya. Namun wibawa NBA mulai surut pada periode 1958-1959, ketika konflik intern itu akhirnya memecah-belah gerakan tersebut.

Konflik dalam NBA

ACEH ADALAH sebuah daerah yang lebih heterogen daripada yang terlihat sekilas; dalam hal itu daerah tersebut merupakan suatu daerah yang rawan konflik. Agama tampaknya merupakan satu-satunya ikatan yang mengikat daerah itu dengan seluruh penduduknya. Sementara kaum elite secara politis terbagi atas dua orientasi utama, yaitu ulama

35. Wawancara dengan salah seorang penyelundup yang tidak mau disebutkan namanya; Bireuen, 30 Desember 1975.

36. *Antara*, 16 April dan 11 Mei 1955, dikutip dari *Kronik* 20, hal. 133 dan 139.

37. Untuk pengiriman melalui udara dengan jumlah dan jenis senjata yang terbatas, NBA membayar sebanyak US\$ 50.000,- lihat surat Hasan Muhammad Tiro kepada salah seorang pemimpin NBA, bertanggal New York, 13 Juni 1960.

dan zuama, di samping secara keagamaan berkelompok dalam aliran tradisional dan reformis, massa pun jauh dari sifat homogen. Secara geografis, Aceh dapat dibagi atas tiga wilayah: daerah pesisir timur yang landai, pegunungan di pedalaman, dan pantai barat yang umumnya terjal. Dari sudut pandang antropologi, Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Pidie, Utara, dan Timur di sepanjang pantai timur dan utara yang landai itu didiami oleh etnik Aceh yang lebih kurang merupakan tujuh puluh persen dari keseluruhan penduduk daerah itu. Kabupaten Aceh Tengah di pedalaman didiami oleh kelompok etnik Gayo dan Alas yang merupakan sekitar sepuluh persen dari seluruh penduduk. Rakyat di Kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Selatan di daerah pantai barat yang berbukit-bukit itu sebagian besar berasal dari campuran suku Aceh dan Minangkabau; jumlah mereka kira-kira dua puluh persen dari seluruh penduduk Aceh.³⁸ Secara demografis, geografis, dan ekonomis, pantai timur dan barat Aceh dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan pantai utara dan selatan Jawa. Seperti pantai utara Jawa, maka pantai timur Aceh cukup padat di samping memiliki sarana komunikasi dan perdagangan yang lebih baik. Pantai barat Aceh di lain pihak adalah sama dengan pantai selatan Jawa dalam hal isolasi dan stagnasi ekonomi dibandingkan dengan pantai utara dan timur, tetapi kedua daerah itu berbeda dalam hal intensitas penyebaran Islam.

Namun demikian konflik yang terjadi dalam kepemimpinan NBA praktis tidak ada kaitannya dengan perbedaan-perbedaan latar belakang masyarakat Aceh ini. Homogenitas agama dari para pemimpin serta keterikatan mereka yang begitu kuat terhadap daerah itu memang merupakan dua tiang penyangga kesatuan kepemimpinan tersebut. Di samping itu, pengaruh Daud Beureueh dan pemusatan kekuasaan di tangannya turut pula memelihara solidaritas di antara para pemimpin. Meski demikian, kepemimpinan itu pun sebenarnya cukup rapuh. Kendatipun rasa keagamaan dan kedaerahan yang mencolok dan kepemimpinan Daud Beureueh yang menonjol itu dapat mengatasi makna perbedaan-perbedaan geografis dan etnis di kalangan para pemimpin, timbulnya konflik dalam kepemimpinan NBA tidak dapat dihindari sama sekali.

Diberitakan bahwa pertikaian dalam kepemimpinan pemberontakan

38. Angka-angka ini hanya perkiraan yang didasarkan atas sensus 1971.

mulai terjadi pada awal tahun 1954. Laporan-laporan pers tentang konflik ini simpang-siur, sehingga kita beralasan untuk bersikap skeptis terhadapnya, terutama yang menyangkut ketepatan latar belakang konflik yang diberitakan itu. Menurut laporan-laporan ini, pertikaian pada umumnya berkisar di sekitar Daud Beureueh dan Husin Al-Mudjahid, Daud Beureueh dan Hasan Saleh, serta antara Hasan Saleh dan Husin Jusuf. Pada pertengahan Februari 1954 harian *Waspada* memberitakan bahwa Al-Mudjahid ditahan oleh Daud Beureueh sehubungan dengan usahanya untuk menyerahkan diri kepada pemerintah. Menurut *Waspada*, ada perselisihan di antara kedua pemimpin itu.³⁹ Hal yang sama juga dilaporkan terjadi antara Daud Beureueh dan Hasan Saleh. Kantor berita *Antara* memberitakan bahwa Daud Beureueh bertikai dengan Hasan Saleh mengenai keinginannya sendiri untuk mengakhiri perjuangan. Laporan *Antara* itu mengatakan bahwa Hasan Saleh yang mengetahui maksud Daud Beureueh untuk menyerah, telah memaksa Daud Beureueh agar melepaskan rencananya, kalau tidak maka keluarganya akan dimusnahkan. Alasannya ialah bahwa karena ia adalah seseorang yang melakukan desersi dari Angkatan Darat, maka tidak mungkin bagi Hasan Saleh untuk menyerah tanpa harus menghadapi mahkamah militer. Oleh sebab itu dia mencoba sekuat daya untuk terus berjuang.⁴⁰ Di pihak lain, sebuah surat kabar Medan lainnya, *Pendorong*, memberitakan bahwa keinginan Daud Beureueh untuk menyerahkan diri itu telah menimbulkan persaingan antara Hasan Saleh dan Husin Jusuf, di mana keduanya berusaha memperoleh posisi yang paling tinggi dalam kepemimpinan pemberontak.⁴¹ Selain itu juga ada berita-berita tentang maksud Husin Jusuf untuk meninggalkan pemberontakan.⁴²

Berdasarkan semua laporan ini, kita memperoleh beberapa petunjuk untuk menganalisa konflik tersebut. Terlihat dalam informasi yang dapat kita susun dari laporan-laporan tersebut bahwa Daud Beureueh, Al-Mudjahid, dan Husin Jusuf berkaitan dengan suatu kelompok yang dapat saja kita namakan "kelompok penyerah", yang bertentangan dengan Hasan Saleh dan bekas-bekas anggota tentara lainnya, yang diberitakan

39. *Waspada*, 12 Februari 1954.

40. *Antara*, 17 Januari 1955, dikutip dari *Kronik* 20, hal. 102-103.

41. *Pendorong*, seperti dikutip *Antara*, 9 April 1955, dalam *Kronik* 20, hal. 132.

42. *Mimbar Umum*, 29 Desember 1955, dalam *Kronik* 14, hal. 370-371.

ingin meneruskan perjuangan. Ke dalam kelompok pertama itu kita dapat menambahkan beberapa pemimpin oportunistis seperti Teuku Ahmad Hasan, bekas bupati Pidie.⁴³ Yang lebih jelas lagi adalah fakta bahwa kelompok itu mewakili unsur-unsur yang ada di dalam kepemimpinan kaum pemberontak, yaitu sipil dan militer. Selain Husin Jusuf, seorang pensiunan perwira Angkatan Darat, semua pemimpin dalam "kelompok penyerah" adalah orang-orang sipil. Kelompok militer didominasi dan dikendalikan oleh Hasan Saleh dan abangnya, Ibrahim Saleh, seorang bekas letnan Angkatan Darat. Kelompok kedua ini diberitakan lebih kuat daripada yang pertama, sebab Hasan Saleh dapat mengawasinya dengan memanfaatkan pengaruh militernya. Kekhawatiran bahwa Hasan Saleh akan memusnahkan keluarganya telah mencegah Daud Beureueh untuk melaksanakan rencana penyerahan dirinya, di samping menghalangi para pemimpin lain untuk memisahkan diri. Akan tetapi adakah Hasan Saleh begitu kuat sehingga mampu mencegah "kelompok penyerah" itu meninggalkan perjuangan? Atau, apakah mungkin gabungan Daud Beureueh dan Husin Al-Mudjahid, keduanya menguasai anggota PUSA yang pemberontak, dengan Husin Jusuf, yang sangat berpengaruh di kalangan bekas pejuang pada masa revolusi, terlalu lemah dalam menghadapi Hasan Saleh yang pada waktu itu hanya seorang komandan resimen TII saja?

Kita tidak mempunyai bukti apa pun mengenai kemampuan Hasan Saleh untuk berhadapan dengan Daud Beureueh, Al-Mudjahid, dan Husin Jusuf. Walaupun begitu, agaknya dapat dipastikan bahwa situasi tidaklah demikian rupa sehingga memungkinkan dia menghancurkan mereka berikut keluarga mereka. Lagi pula sangat tidak mungkin, terutama pada masa awal itu, bahwa Hasan Saleh lebih kuat daripada ketiga pemimpin tersebut. Sebab, pertama, sebagai seorang bekas kapten Angkatan Darat, Hasan Saleh adalah perwira *junior* yang tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap rakyat Aceh. Kedua, dia tidak membawa pasukan atau anak buah untuk bergabung dalam pemberontakan. Sebelum mengambil bagian dalam pemberontakan, Hasan Saleh men-

43. Teuku Ahmad Hasan memang mengisyaratkan kepada Gubernur S.M. Amin bahwa ia bersedia meninggalkan perjuangannya dengan syarat diberi suatu posisi di Kantor Gubernur. Lihat surat rahasianya kepada Gubernur Amin, bertanggal Sigli, 15 Mei 1954.

dapat tugas belajar di kursus perwira di Jawa, dan karena itu dia meninggalkan batalionnya di Indonesia Timur. Di NBA ia memang merupakan perwira yang paling tinggi pangkatnya di antara para perwira Angkatan Darat yang melakukan desersi, akan tetapi dia kurang berpengaruh. Oleh sebab itu dia kurang dihargai oleh para pemimpin NBA selama bulan-bulan pertama pemberontakan. Dia diangkat hanya sebagai wakil kepala staf TII, di bawah Husin Jusuf, seorang pensiunan perwira Angkatan Darat yang lebih senior. Tentu saja, dalam posisi demikian, bukan tidak mungkin jika ia mempunyai pengaruh terhadap kompi abangnya yang juga melakukan desersi dari Angkatan Darat. Oleh karena itu ada kemungkinan, meskipun sedikit, bahwa dia berada pada posisi untuk mewujudkan ancaman menghabisi keluarga Daud Beureueh. Tetapi apa akibatnya jika ia melakukan hal itu? Tidaklah diragukan bahwa apabila Daud Beureueh dan Al-Mudjahid menyerah, pemberontakan itu jelas akan kehilangan "suasana" keagamaan yang akan menyebabkan rakyat menarik kembali dukungan mereka terhadap pemberontakan itu. Secara logis, kekurangan dukungan rakyat akan memaksa kaum pemberontak untuk meninggalkan kampung dan selanjutnya menjadi gerombolan bandit di hutan rimba.

Suatu penyelidikan yang lebih teliti atas latar belakang pemberontakan tidak memberi petunjuk apa pun tentang adanya konflik-konflik seperti yang diberitakan itu. Barangkali laporan-laporan yang simpang-siur tersebut tidak lain daripada berita sensasi atau hasil mesin propaganda pemerintah. Akan tetapi, dengan mengatakan ini bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada pertikaian dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Konflik-konflik yang nyata memang terdapat di kalangan pemimpinnya, tetapi bukan antara "kelompok penyerah" atau kelompok sipil yang dipimpin oleh Daud Beureueh, Al-Mudjahid, dan Husin Jusuf, dengan kelompok militer yang berada dibawah pimpinan Hasan Saleh. Kenyataannya ialah Daud Beureueh sendiri berselisih dengan Al-Mudjahid, Husin Jusuf, dan Hasan Saleh dalam beberapa masalah.

Namun begitu heterogenitas daerah agaknya tidak memainkan suatu peranan dalam konflik ini, sebab semuanya tidak berdasarkan pada latar belakang etnis, geografis, ataupun pendidikan. Pertikaian-pertikaian itu pun tidak diilhami oleh perbedaan antargenerasi.⁴⁴ Kalau kita berbicara

44. Abdul Murat Bin Mat Jan percaya bahwa generasi yang lebih muda memilih

secara umum, mungkin saja ada ketidaksesuaian atau ketidaksukaan antara Daud Beureueh, yang berasal dari Kabupaten Pidie, dengan Al-Mudjahid dan Husin Jusuf, yang masing-masing dilahirkan di Kabupaten-kabupaten Aceh Timur dan Utara. Akan tetapi faktor geografis semata-mata tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perselisihan antara Daud Beureueh dan Hasan Saleh, sebab keduanya berasal dari kabupaten yang sama. Lagi pula, faktor geografis menjadi kurang penting karena keempat pemimpin itu semua berasal dari etnis Aceh yang berbicara dalam bahasa yang sama dan bertindak dalam tradisi dan batas-batas kebudayaan yang sama pula. Tidak pentingnya latar belakang geografis ini dalam konflik tersebut digambarkan lebih jauh oleh setiap pengikut dari para pemimpin itu. Umpamanya, walaupun Zamzami Jahja dan Muhammad Saleh Kafa berasal dari Aceh Selatan dan dilahirkan dalam lingkungan etnis yang sama, mereka masing-masing mendukung kelompok yang berbeda. Zamzami Jahja, bekas kepala Kantor Urusan Agama setempat, adalah seorang pendukung Daud Beureueh yang terkemuka, sementara Saleh Kafa, bekas kepala Urusan Politik pada Kantor Kabupaten Aceh Selatan, berpihak kepada Hasan Saleh, Husin Jusuf, dan Al-Mudjahid. Begitu juga, Ijas Leube berdiri tegak di belakang Daud Beureueh, dan Saleh Adry, bekas kepala Urusan Politik di kabupaten Aceh Tengah, berada pada pihak Hasan Saleh, kendatipun keduanya adalah etnik Gayo dari Aceh Tengah. Pendidikan tidak pula berpengaruh terhadap pengelompokan tersebut. Saleh Kafa dan Ijas Leube, misalnya, adalah tamatan Institut Islam Normal milik PUSA di Bireuen, dan dalam konflik itu mereka tidak bersatu, melainkan mendukung kelompok yang berbeda.

Oleh karena itu konflik tersebut tampaknya merupakan perselisihan antara para pemimpin yang berlatar belakang pamong praja dan jabatan non-agama lainnya dengan bekas pejabat Kantor Urusan Agama. Atau, untuk lebih tepatnya, ini merupakan konflik antara para pemimpin dalam kelompok ulama, yang terdiri atas ulama-politisi, dengan zuama atau pemimpin-pemimpin politik yang bukan ulama. Pertikaian ini berpunca pada berbagai alasan yang menyebabkan para pemimpin tersebut berpartisipasi dalam pemberontakan. Kita telah melihat sebelumnya

menghentikan pemberontakan, sementara yang lebih tua memutuskan untuk melanjutkannya. Lihat skripsinya, *op. cit.*, hal. 185.

bahwa para pemimpin dalam kelompok ulama, seperti Daud Beureueh dan Hasballah Indrapuri, melibatkan diri dalam perlawanan itu karena kepentingan-kepentingan agama. Mereka yang berada dalam kelompok zuama, seperti Ali Hasjmy dan Teuku Muhammad Amin, telah terdorong untuk mendukung pemberontakan oleh kepentingan politik mereka. Untuk mencapai tujuan kita, maka kedua kelompok ini dapat diperluas dengan memasukkan ke dalamnya pemimpin-pemimpin yang lebih muda tetapi memainkan peranan penting dalam kepolitikan NBA pada tahap ini dan masa kemudian. Berdasarkan latar belakang profesi masing-masing, para pemimpin muda seperti Abdurrahman Hasjim, Zainul Abidin Tiro, dan Iljas Leube dapat dimasukkan dalam kelompok ulama, sedangkan Abdul Gani Mutyara, Teuku Ahmad Hasan, dan Hasan Saleh tergolong ke dalam kelompok zuama. Tentu saja ada sejumlah pemimpin dari kedua golongan ini yang lebih senang berada di antara keduanya. Hasan Ali yang pada dasarnya dapat dianggap seorang zuama, dan Ayah Gani yang jelas mempunyai tipe ulama, adalah sebagian dari mereka yang berjalan di tengah-tengah. Alasan-alasan pribadi telah menyebabkan mereka tersingkir dari kaitan asli mereka.

Kita juga telah melihat bahwa selain profesi dan minat mereka, sangat sulit memperkirakan perbedaan-perbedaan pokok yang ada di antara pemimpin-pemimpin dalam kelompok ulama dan zuama. Pada umumnya kedua kelompok ini terdiri atas pribadi-pribadi yang alim. Para pemimpin dari kedua kelompok itu berkaitan erat dengan perkembangan kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan pada masa sebelumnya. Pemimpin-pemimpin yang senior telah berfungsi sebagai ujung tombak pembaharuan pendidikan dan agama pada akhir tahun 1920-an, sementara para zuama tidak hanya telah membantu kaum ulama, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh arus reformisme. Kedua kelompok itu telah pula memainkan peranan yang sangat penting di dalam revolusi nasional di Aceh, akan tetapi ikatan kuat mereka terhadap daerah menyebabkan tidak satu pun di antara kelompok itu merasa lebih nasionalis daripada yang lainnya. Di lain pihak, kelompok zuama yang asli terdiri atas para pemimpin yang lebih muda bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kelompok ulama. Namun begitu, usia para pemimpin dalam kelompok ulama yang telah kita perluas sebanding dengan mereka yang ada dalam kelompok zuama.

Adanya perbedaan kepentingan di antara para pemimpin kedua kubu

itu menjadi penting suatu faktor yang menentukan konflik, ketika Pemerintah Burhanuddin di Jakarta mempertimbangkan penyelesaian politis dengan para pemberontak pada tahun 1955-1956. Berita-berita bahwa Pemerintah Pusat bersedia menawarkan status propinsi bagi Aceh sebagai langkah untuk mengakhiri pemberontakan, menyadarkan para ulama bahwa tawaran demikian akan menciptakan perpecahan dalam kepemimpinan NBA. Dalam pandangan para pemimpin ulama, pefundingan-perundingan informal dengan pihak pemerintah yang diberitakan secara luas itu dan kemungkinan Aceh memperoleh kembali status propinsinya akan menyebabkan para pemimpin zuama puas. Kelompok ulama sangat yakin bahwa pada akhirnya para zuama akan menerima tawaran itu dan meninggalkan perjuangan mereka. Keyakinan ini memang didukung oleh kenyataan bahwa pemimpin-pemimpin zuama telah mendesak agar diadakan rapat pimpinan untuk membahas tawaran Jakarta, dan ini merupakan suatu langkah yang tidak dapat ditolak begitu saja oleh kelompok ulama.

Pemimpin-pemimpin ulama mengizinkan diadakannya rapat itu di Bate Kureeng pada bulan September 1955. Akan tetapi, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, mereka mengubahnya menjadi suatu konferensi besar dengan mengundang banyak ulama terkenal dari seluruh Aceh yang bersimpati kepada pemberontakan. Dengan cara itu para pemimpin ulama dapat menguasai konferensi tersebut. Merasa yakin akan kemenangan mereka, maka dua anggota dari kelompok ulama, yaitu Abdurrahman Hasjim dan Abdul Djalil Amin, bersama Hasan Ali, merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai Piagam Bate Kureeng. Naskah ini menegaskan kembali warna keagamaan pemberontakan tersebut, di samping secara jelas, walaupun tidak langsung, menolak setiap ide untuk menghentikan perlawanan hanya karena diberikannya status propinsi.⁴⁵ Dengan menghambat usul kaum zuama untuk menerima status propinsi yang ditawarkan Pemerintah Pusat, naskah tersebut mengusulkan agar dibentuk sebuah kabinet, dan Aceh diproklamasikan sebagai negara bagian dari "federasi" Negara Islam Indonesia. Di samping itu ia juga merekomendasikan pembentukan lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. Tampaknya penegasan kembali warna keagamaan dari gerakan ini bertujuan untuk mendorong ulama-ulama

45. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

lebih berminat lagi pada pemberontakan, sehingga tidak sukar bagi para pemimpin kelompok ulama untuk mempertahankan dukungan mereka. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin zuama tidak banyak mempunyai pilihan daripada menerima saja piagam tersebut. Dalam suatu konferensi besar seperti itu, mereka menjelma menjadi suatu kelompok minoritas, sebab jumlah mereka paling banyak hanya sepertiga dari jumlah seluruh peserta.⁴⁶ Dalam keadaan demikian, tentu saja kaum zuama tidak berada pada posisi untuk menentang para ulama dari daerah-daerah yang memang mempunyai dukungan dari rakyat di kabupaten mereka.

Kendatipun berhasil mengalahkan kelompok zuama dalam konferensi tersebut, para ulama tidak mau mendesak kelompok zuama lebih jauh lagi, sebab akan membahayakan kesatuan dalam kepemimpinan. Dengan perhitungan ini, maka jauh dari menekan pemimpin-pemimpin zuama, kelompok ulama malah berusaha merangkul mereka. Taktik ini jelas terlihat dalam pembentukan Kabinet NBA, di mana para zuama memegang lebih banyak kementerian daripada kaum ulama. Empat pemimpin zuama menguasai lima kursi kabinet. Husin Jusuf diangkat menjadi menteri pertahanan, sehingga ia menyerahkan kedudukannya sebagai kepala staf kepada Hasan Saleh. Menteri urusan ekonomi adalah Teuku Muhammad Amin, bekas Sekretaris PUSA dan merupakan salah seorang pemimpin paling berpengaruh dalam pemerintahan daerah pada masa revolusi. Teuku Ahmad Hasan, bekas bupati Pidie, memegang dua kementerian, yaitu keuangan dan kesehatan, sementara Abdul Gani Mutyara ditempatkan sebagai menteri penerangan. Hanya ada dua pemimpin ulama dalam kabinet itu, yaitu Zainul Abidin Tiro sebagai menteri kehakiman, dan Muhammad Ali Kasim, menteri pendidikan. Jabatan perdana menteri ada dalam tangan Hasan Ali, seorang penengah tetapi lebih dekat kepada kubu ulama.⁴⁷

Namun demikian ini tidak berarti bahwa kabinet negara bagian itu telah benar-benar dikuasai oleh kelompok zuama, hal ini tidak pula berarti bahwa para pemimpin ulama telah menyerahkan seluruh perjuangan ke tangan pihak pertama. Kenyataannya adalah bahwa sekalipun

46. Angka ini diperoleh dari perbandingan daftar para peserta yang menandatangani Piagam itu, bertanggal 23 September 1955, dengan daftar nama pemimpin yang meninggalkan pemberontakan pada tahun 1959.

47. Tentang komposisi kabinet, lihat Gelanggang, *op. cit.*, hal. 203-204.

ada kabinet ini, kekuasaan tertinggi tetap di tangan Daud Beureueh, sebagai pilar kaum ulama. Sebagai wali negara, Daud Beureueh menjadikan semua menteri anggota stafnya. Apalagi, demi memperkuat penguasaan mereka, pemimpin-pemimpin ulama telah mengalahkan kaum zuama dalam Majelis Syura dengan menguasai enam puluh persen dari jumlah kursinya.

Walaupun begitu, para pemimpin zuama tidak menyerah juga. Malah sebaliknya, mereka berpendapat bahwa mereka adalah pihak yang menang. Mereka percaya bahwa pembentukan kabinet akan memperkuat posisi mereka dalam kepemimpinan, sebab hal ini akan membatasi kekuasaan kelompok ulama. Mereka berharap bahwa kekuasaan akan beralih dari ulama kepada mereka, sebab kabinet akan mampu menjalankan fungsi eksekutif dan menjadikan wali negara sebagai suatu simbol belaka.⁴⁸ Harapan ini membuat mereka puas akan hasil konferensi Bate Kureeng, terutama dalam hal komposisi kabinet di mana mereka memegang kementerian-kementerian paling penting. Walaupun tidak menguasai kursi perdana menteri, mereka berharap akan dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Hasan Ali, sebab ia bukanlah anggota kelompok ulama yang sesungguhnya. Dalam hal ini, sekalipun Hasan Ali sangat dekat dengan Daud Beureueh, para pemimpin zuama agaknya percaya bahwa mereka akan dapat berkompromi dengan dia karena latar belakangnya yang bukan ulama itu. Lebih dari itu, ada sebuah kemenangan lain yang juga diakui oleh kelompok zuama, yakni mereka berhasil menjadikan kemungkinan penyelesaian secara damai dengan Jakarta sebagai salah satu program kabinet yang disetujui oleh Majelis Syura. Apakah ini berarti bahwa pemimpin-pemimpin ulama secara sukarela menyetujui keinginan zuama untuk mengakhiri pemberontakan bilamana Pemerintah Pusat mengembalikan status propinsi kepada Aceh?

Jawaban terhadap pertanyaan itu pasti negatif. Sebenarnya, yang menjadi persoalan pokok di sini adalah interpretasi terhadap program kabinet yang menyangkut kemungkinan penyelesaian politis itu. Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin ulama lainnya, baik dalam Kabinet maupun Majelis Syura, memang menyetujui program yang menganjurkan suatu penyelesaian "konflik bersenjata dengan pemerintah Pancasila

48. *Ibid.*, hal. 207.

melalui cara-cara bersenjata dan politik",⁴⁹ tetapi pemahaman mereka terhadap hal itu berbeda dari pengertian kelompok zuama. Berbeda dari ulama, para pemimpin zuama meletakkan tekanan mereka pada cara-cara "politik", dan bukan pada cara-cara "bersenjata". Barangkali untuk menghindari konflik terbuka dan debat yang panas di antara kedua kelompok itu, maka Kabinet sengaja tidak memerinci prakondisi yang dikehendaki bagi suatu penyelesaian damai. Kesamaran yang demikian tentu saja memberikan peluang yang cukup besar bagi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan suatu pertikaian.

Itu pula yang terjadi kemudian ketika diskusi yang terbuka tidak dapat berlangsung lagi. Tidak sampai setahun setelah terbentuknya kabinet, demi memperjelas pemikiran mereka, maka kedua kelompok mengajukan dua pandangan yang berbeda. Kedua pandangan ini kemudian dikenal sebagai Konsepsi Hasan Ali dan Konsepsi Hasan Saleh. Konsepsi Hasan Ali, yang mewakili kepentingan kaum ulama, mengemukakan dengan jelas bahwa penyelesaian dengan cara-cara politik harus meliputi tawaran Pemerintah Pusat mengenai perlakuan istimewa dalam bidang agama dan pemerintahan. Dalam hubungan dengan hal yang terakhir itu, para pemimpin ulama telah melepaskan tuntutan mereka yang berupa hak-hak federal. Sebagai gantinya, mereka menuntut status propinsi dengan otonomi yang luas. Di pihak lain, Konsepsi Hasan Saleh merekomendasikan sikap praktis kepada pimpinan pemberontakan dan menyarankan agar memanfaatkan apa yang ditawarkan Jakarta sekarang ini, yaitu pengembalian status propinsi kepada Aceh, dan memperjuangkan hal-hal lainnya pada tahap berikutnya.⁵⁰

Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk membahas kedua konsepsi tersebut dalam suatu sidang istimewa kabinet pada pertengahan tahun 1956.⁵¹ Rapat tersebut kemudian diselenggarakan di desa Cubo di Kabupaten Pidie dan dihadiri oleh para anggota kabinet serta pemimpin-pemimpin di luar kabinet seperti Daud Beureueh, Abdurrahman Hasjim,

49. Lihat keputusan Majelis Syura yang bertanggal Aceh Darussalam, 27 September 1955.

50. Wawancara dengan Ishak Amin, 3 November 1975; Hasan Ali, 6 November 1975; dan Sulaiman Gading, 14 November 1975; semua wawancara berlangsung di Kutaraja.

51. Wawancara dengan Muhammad Saleh Kafa, Kutaraja, 27 November 1975.

dan Hasan Saleh yang merumuskan konsep kaum zuama. Sebagaimana halnya dengan konferensi Bate Kureeng, kelompok ulama juga berhasil mendominasi rapat ini. Dengan dukungan penuh kelompoknya, Daud Beureueh secara pedas mengkritik pemimpin-pemimpin zuama dan konsep mereka. Ia bersikeras bahwa tidak ada penyelesaian apa pun sampai Pemerintah Pusat mengakui hak rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam di daerah itu. Untuk mendukung pendapatnya, Daud Beureueh menegaskan bahwa Islamlah yang mendorong para ulama berjuang dalam pemberontakan itu, dan karena Islam pula mereka mendesak rakyat supaya berpartisipasi. Para ulama pula yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah dan atas setiap korban yang jatuh di kalangan pejuang dan keluarga mereka. Daud Beureueh mengatakan bahwa prajurit-prajurit telah tertarik untuk berpartisipasi dalam perjuangan itu sebagai tanggapan terhadap seruan yang dikumandangkan oleh para ulama. Oleh sebab itu para ulama tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan di hari kiamat nanti semua korban yang telah jatuh, kecuali bila penyelesaian damai yang diinginkan itu mencakup pengakuan terhadap syariah Islam.⁵²

Di balik pendapat Daud Beureueh itu memang tersembul keyakinan pemimpin-pemimpin kaum ulama mengenai adanya peluang untuk mendesak Pemerintah Pusat supaya memenuhi tuntutan mereka. Mereka percaya bahwa walaupun PNI dan PKI sangat menentang setiap rencana untuk memberikan status propinsi kepada Aceh, pada akhirnya daerah itu akan memperolehnya juga sekalipun mereka tidak mengakhiri pemberontakan. Keyakinan ini tentu saja didasarkan pada adanya tekanan yang kuat ke arah itu dari luar Kabinet. Sudah kita lihat sebelumnya bahwa sejumlah besar unsur dalam Parlemen dan Angkatan Darat di Jakarta berpendapat bahwa Pemerintah Pusat tidak akan pernah dapat mengendalikan pemberontakan itu jika tidak membentuk kembali propinsi Aceh. Adanya kecenderungan yang sama di Aceh, yang tidak pernah menyenangi Jakarta, juga ikut memperbesar keyakinan tersebut. Di sana rakyat telah berulang kali mendesak Pemerintah Pusat agar berunding dengan kaum pemberontak, sementara kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah, seperti pembunuhan masal di dua

52. Wawancara dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Beureunuen, 10 Juli 1973.

kampung dekat Kutaraja, telah mencegah rakyat berpihak pada pemerintah. Sebagai tambahan, pemimpin-pemimpin ulama juga sangat menyadari adanya suatu perubahan di dalam kebijaksanaan nasional, yaitu dari menganut aliran keras menjadi lunak. Perubahan ini ditegaskan dan diperlihatkan oleh fakta bahwa naiknya kembali pemerintahan Ali Sastroamidjojo, sebagai hasil pemilihan umum, tidak mengubah garis lunak yang selama ini ditempuh oleh kabinet sebelumnya. Bahkan pengangkatan dua perwira Aceh, Komisaris Polisi Muhammad Insja yang mengepalai Kepolisian Sumatera Utara di Medan, dan Mayor Sjammaun Gaharu sebagai Komandan Resimen yang baru di Aceh, dalam pandangan para pemimpin ulama merupakan tanda-tanda dari kemungkinan ditawarkannya suatu konsesi oleh Pemerintah Pusat.

Namun demikian pemimpin-pemimpin ulama tidak berhasil meyakinkan lawan mereka yang tidak melihat adanya kemungkinan bagi Pemerintah Pusat untuk memenuhi tuntutan kaum ulama itu. Para pemimpin zuama berpendapat bahwa Jakarta tidak akan pernah mengizinkan Aceh menjalankan hukum Islam, dan segala hal yang sejalan dengan ini bahkan dianggap "keterlaluan". Selain itu, secara pribadi mereka puas akan rencana pembentukan kembali propinsi Aceh, tentunya dengan harapan adanya rehabilitasi kekuasaan mereka di daerah itu. Akan tetapi, sekalipun tidak dapat menerima konsep kaum ulama, mereka tidak mampu menentang para ulama. Mereka malah gagal meyakinkan kelompok ulama untuk berkompromi dengan Pemerintah Pusat dan melupakan tuntutan yang keterlaluan itu, sekalipun Komandan Resimen yang baru, Gaharu, telah memperlihatkan kekuatan pemerintah dengan menyerang Desa Cubo sehingga membubarkan pertemuan tersebut.⁵³ Namun pada tahap ini, pemimpin-pemimpin zuama tidak berusaha untuk mengabaikan perjuangan. Jika sekiranya mereka mau mencoba untuk meninggalkan pemberontakan pada waktu itu, maka ada peluang bagi mereka untuk berbuat demikian, sebab Gaharu memang telah berusaha menghubungi para pemberontak sejak kedatangannya di Aceh.

Agaknya perbedaan pandangan semata-mata belumlah cukup menjadi alasan bagi kaum zuama untuk memecah kepemimpinan pemberontakan. Untuk dapat memisahkan diri dari kaum ulama, dengan

53. Wawancara dengan Husin Jusuf, Kutaraja, 29 November 1975.

sendirinya para pemimpin zuama juga tergantung pada langkah-langkah pemerintah. Tampaknya mereka tidak begitu optimis mengenai kebijaksanaan pemerintah tentang Aceh, walaupun pemerintah telah memulangkan para perwira Aceh untuk berurusan dengan para pemberontak. Berita-berita bahwa Aceh akan dijadikan sebuah propinsi sudah sering terdengar, namun sebegitu jauh belum ada indikasi mengenai bagaimana dan kapan Pemerintah Pusat akan mewujudkannya. Di samping itu, pimpinan pemberontak juga memikirkan kemungkinan terjadinya perubahan dalam pemerintahan setempat bila kelak Aceh memang mendapat status propinsi. Apabila hal itu terjadi dan jika mereka mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Pusat, bagaimana mereka akan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru? Bersediakah Jakarta mengembalikan kekuasaan mereka? Tetapi, di atas semua itu, usaha untuk meninggalkan perjuangan tanpa diikuti oleh sejumlah pendukung tentu saja akan memalukan, dan barangkali juga merupakan usaha bunuh diri. Dalam keadaan demikian, rakyat akan memandang mereka sebagai pengkhianat, sementara kelompok ulama akan menjadikan mereka dan keluarga mereka sebagai bulan-bulanan terorisme. Malahan, dalam keadaan seperti itu, pemerintah pun tidak akan menghargai penyerahan mereka.

Fakta bahwa pemimpin-pemimpin ulama sangat menguasai anak buah mereka amatlah menakutkan bagi para pemimpin zuama, sebab hal itu akan memungkinkan kelompok ulama untuk menindak setiap penyelewengan. Pengaruh Daud Bereueh atas TII adalah sangat besar. Dalam hal ini, pengangkatan Husin Jusuf sebagai menteri pertahanan dan penunjukan Hasan Saleh sebagai kepala staf sama sekali tidak mempengaruhi peranan Daud Beureueh sebagai Panglima Tertinggi. Gerakan-gerakan militer yang penting, pada tingkat resimen, semua dilakukan atas perintahnya,⁵⁴ sehingga menghasilkan struktur yang memperkecil peranan Husin Jusuf dan Hasan Saleh. Pengaruh kaum ulama dalam bidang militer disalurkan melalui Abdurrahman Hasjim, seorang bekas pegawai Kantor Urusan Agama di Kutaraja, yang sekarang menjadi letnan kolonel dan wakil kepala staf TII. Dalam kenyataannya, Abdurrahman Hasjim lebih berkuasa daripada atasannya, Hasan Saleh, terutama karena ia juga menjabat sebagai kepala polisi

54. Wawancara dengan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 November 1975.

NBA yang menguasai jaringan intelijen. Usianya lebih kurang sama dengan Hasan Saleh, dan ia sangat dekat dengan Daud Beureueh, baik disebabkan oleh latar belakang keulamaan maupun oleh kenyataan bahwa sebagai kepala polisi ia hanya bertanggung jawab kepada wali negara. Suatu hal yang mengecewakan para pemimpin zuama ialah bahwa Abdurrahman Hasjim merupakan salah seorang penentang utama perundingan dengan Pemerintah Pusat.⁵⁵

Adanya pengaruh atas dinas rahasia dan jaringan militer ini, di samping pengaruh pribadi, telah memungkinkan kelompok ulama untuk menguasai seluruh perangkat pemberontakan. Pemimpin-pemimpin zuama memahami kenyataan bahwa dengan kontrol yang demikian kaum ulama pasti mampu menghukum mereka jika mereka berusaha memisahkan diri. Kemampuan ulama untuk melakukan hal itu telah diperlihatkan, setidaknya-sedikitnya satu kali dalam peristiwa terbunuhnya Daud Tangse, seorang pemimpin dalam kampanye anti-*ulebalang* di Pidie pada tahun 1946 dan kemudian mempunyai peranan penting dalam pemberontakan, pada tahun 1956. Dalam kasus ini, sebagai hasil hubungannya dengan Sjammaun Gaharu, Daud Tangse menawarkan kepada Agam Manjak, seorang komandan batalion TII, uang sebanyak Rp 50.000,00 apabila ia mau menyerah bersama batalionnya. Namun, kesetiaan kepada Daud Beureueh dan para pemimpin lainnya menyebabkan Agam Manjak menolak tawaran itu, dan sebaliknya, membunuh Daud Tangse dengan sepengetahuan Daud Beureueh.⁵⁶ Tentu saja kejadian ini menimbulkan ketakutan di kalangan kelompok zuama. Dengan mempertimbangkan bahwa Daud Tangse bukanlah seorang anggota biasa dalam NBA, melainkan seorang yang selalu berhubungan baik dengan wali negara, peristiwa itu mengingatkan para zuama bahwa hal yang sama bisa pula menimpa siapa saja yang berusaha meninggalkan perjuangan.

Oleh sebab itu sebelum mampu menentang pemimpin-pemimpin

55. Dia dengan sangat mendesak Daud Beureueh agar membubarkan komite yang dibentuk kabinet dalam rangka menangani persiapan perundingan dengan delegasi pemerintah; lihat surat Abdurrahman Hasjim kepada Daud Beureueh, bertanggal 10 Februari 1956.

56. Wawancara dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Beureunuen, 8 Juli 1973. Tentang hubungan antara Daud Tangse dengan Sjammaun Gaharu, lihat *Peristiwa*, 19 Juli 1956.

ulama dan konsep mereka, maka para zuama harus terlebih dahulu memperoleh dukungan yang lebih banyak dari anggota, terutama sekali dari unit-unit militer. Namun bagaimana caranya agar mereka dapat meningkatkan pengaruh tanpa mengusik Daud Beureueh dan menyisagakan para pemimpin kelompok ulama lainnya? Dalam upaya untuk meningkatkan pengaruh atas unit-unit militer, para pemimpin zuama berhasil menghindari kecurigaan Daud Beureueh. Akan tetapi usaha itu telah menimbulkan konflik yang terbuka dan tanpa akhir antara Hasan Saleh dan wakilnya, Abdurrahman Hasjim, sehingga mengguncang kesatuan eselon puncak kepemimpinan NBA. Kendatipun di atas permukaan hanya tampak sebagai ketidaksepakatan antara Hasan Saleh dan Abdurrahman Hasjim, konflik itu sebenarnya melibatkan kedua komponen utama dalam kepemimpinan pemberontakan, yaitu kelompok zuama dan ulama. Dalam kenyataannya, konflik itu pun dapat dilihat sebagai awal dari suatu pertikaian antara kaum pragmatis dan ideolog. Kaum pragmatis berkeyakinan bahwa pemberontakan harus diakhiri ketika tawaran yang paling baik tercapai, sedangkan kaum ideolog percaya bahwa perlawanan itu tidak perlu berakhir kecuali bila sudah mencapai target utamanya: pemberlakuan hukum Islam. Tetapi, untuk sementara, pertikaian itu hanya menjalar di sekitar masalah-masalah teknik dan struktur dari organisasi dan kepemimpinan NBA.

Dengan memandang Abdurrahman Hasjim sebagai penghalang utama di tengah jalan menuju perundingan dengan Pemerintah Pusat, maka kaum zuama pun menjadikannya sebagai target pertama. Dalam rangka itu mereka berusaha untuk mengurangi pengaruhnya. Mereka berharap kalau langkah itu berhasil, maka dengan berbagai cara hal itu akan berpengaruh juga terhadap Daud Beureueh. Dengan harapan yang demikian, pada awal tahun 1956 para menteri zuama dalam kabinet melancarkan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengendalikan Abdurrahman dan memisahkannya dari Daud Beureueh. Langkah itu berupa sebuah usul yang menghendaki agar kabinet mereorganisasikan kepolisian dan meletakkannya di bawah Kementerian Pertahanan, dan bukan lagi di bawah Wali Negara. Dalam proposal ini, Abdurrahman Hasjim tidak akan lagi mempunyai kekuasaan atas dinas rahasia, sebab, berbeda dari Daud Beureueh, Husin Jusuf sebagai Menteri Pertahanan bermaksud untuk mengawasi kegiatan komandan polisi itu. Gerakan tersebut hanya berhasil sebagian karena kabinet, di bawah ancaman

pengunduran diri Husin Jusuf, terpaksa menerima usul tersebut demi mencegah terjadinya perdebatan yang panas.

Abdurrahman Hasjim tentu saja menentang usul tersebut dengan kuat. Dia sadar sepenuhnya bahwa usul itu bertujuan untuk memperlemah pengaruhnya, meskipun para pemimpin zuama selalu mengatakan bahwa perubahan tersebut hanya merupakan masalah teknik organisasi. Ia membicarakan masalah ini dengan Daud Beureueh, dan mencurigai usul itu sebagai tandingan zuama terhadap rekomendasinya kepada Wali Negara agar menghentikan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh beberapa pemimpin untuk berunding dengan Jakarta. Ia menghubungkan usul ini dengan ikhtiar para zuama untuk menentukan kebijaksanaan umum NBA, dan mencap usaha itu sebagai berlawanan dengan semangat Piagam Bate Kureeng yang menjamin kekuasaan Wali Negara. Oleh sebab itu ia menuduh pemimpin-pemimpin tertentu bermaksud untuk menjadikan Daud Beureueh sebagai simbol belaka.⁵⁷

Tuduhan Abdurrahman Hasjim dengan sendirinya menimbulkan ketegangan besar dalam kabinet serta menyudutkan pemimpin-pemimpin zuama. Daud Beureueh sendiri pun berada dalam suatu situasi yang sangat sulit. Sementara bimbang untuk bertindak, ia melihat adanya garis keretakan yang jelas di kalangan pembantunya. Perlukah ia mempertimbangkan tuduhan itu dengan serius dan melindungi Abdurrahman Hasjim serta dirinya sendiri? Pada suatu saat dia berpendapat bahwa akibat-akibat dari tuduhan itu akan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk menjauhkan diri dari persoalan tersebut, dan meminta kabinet supaya lepas tangan.⁵⁸ Akan tetapi kelompok ulama tidak puas terhadap cara Daud Beureueh menangani masalah ini. Mereka berusaha meyakinkan Daud Beureueh dan menteri-menteri mereka dalam kabinet bahwa kepolisian harus tetap berada di tangan Wali Negara. Mereka bersikeras bahwa Husin Jusuf tidak akan mampu mengatur militer dan polisi sekaligus.⁵⁹ Daud

57. Surat Abdurrahman Hasjim kepada Daud Beureueh, tanggal 10 Februari 1956 dan wawancara dengan Abdurrahman Hasjim, Sabang, 20 September 1973.

58. Lihat surat Daud Beureueh kepada semua menterinya, tanggal 17 Februari 1956.

59. Surat Abdurrahman Hasjim kepada Teungku Zainal Abidin Tiro, menteri kehakiman NBA, tanggal 19 Februari 1956.

Beureueh pun terbujuk, sehingga ia membatalkan keputusan kabinet, sementara pemimpin-pemimpin zuama terpaksa menerimanya.

Akan tetapi kemenangan Abdurrahman Hasjim sama sekali tidak menghentikan kaum zuama melancarkan pukulan besar lainnya terhadap para ulama. Jauh dari patah semangat, kaum zuama malah mempersiapkan suatu strategi besar untuk merebut kekuasaan. Tampaknya gelombang pukulan baru ini telah didorong oleh situasi di luar lingkaran pemberontak ketika rakyat pada umumnya sedang menyambut hangat kedatangan kembali Sjammaun Gaharu dan menerima baik seruannya untuk penyelesaian secara damai. Terlihat bahwa semakin lama Gaharu berkampanye bagi penyelesaian damai dan semakin besar hasrat rakyat, maka semakin cepat pula para zuama bergerak untuk merebut kendali atas TII. Hal ini dengan sendirinya mempertajam konflik, terutama antara Hasan Saleh dan Abdurrahman Hasjim. Sebagai seorang ahli strategi militer, Hasan Saleh bertindak selangkah demi selangkah. Akan tetapi semua gerakannya bertujuan untuk pertama, melemahkan Abdurrahman, dan kedua, melepaskan pengaruh Daud Beureueh terhadap pasukan. Langkah-langkah itu telah disusun dengan begitu baiknya, sehingga baru disadari oleh pemimpin-pemimpin kelompok ulama setelah terlambat. Mulanya, pada pertengahan tahun 1956, Hasan Saleh mengusulkan apa yang dinamakannya *eenheid commando* (kesatuan komando) yang mengubah formasi TII dari divisi menjadi suatu "komando tentara dan teritorium". Dengan kesatuan komando ini, Hasan Saleh bermaksud menyatukan semua aspek pemerintahan di bawah suatu pemerintahan militer.

Karena berpikiran bahwa komando militer tertinggi berada di tangan Daud Beureueh sebagai kepala negara, kaum ulama pun serta-merta menerima usul tersebut. Baru setelah mereka menerima usul itu Hasan Saleh menyingkapkan seluruh rencananya. Ke dalam proposal itu Hasan Saleh memasukkan seruan kepada Daud Beureueh agar memiliterisasi kesatuan polisi, supaya kesatuan komando itu dapat dijalankan.⁶⁰ Dalam mempertahankan pendapatnya, Hasan Saleh mengemukakan bahwa kepentingan dan kesatuan TII mengharuskan adanya transformasi kepolisian menjadi kesatuan polisi militer dalam TII. Dia juga

60. Mengenai usul tersebut, lihat tulisan Hasan Saleh, "Unsur2 Penting Dalam Usaha Pemerintah Utk Menggabungkan Tugas (Memiliteriseer) Kepolisian Negara Dengan Tentara T&T TGK Tjhik Ditiro", tanggal 20 Februari 1957.

menyarankan agar polisi militer yang baru itu jangan ditempatkan di bawah pimpinan wakil kepala staf. Usul ini mengakibatkan timbulnya saran untuk mengadakan konferensi militer di Krueng Pinang di Kabupaten Pidie pada akhir Mei 1957. Perdebatan yang seru antara Hasan Saleh dengan Abdurrahman Hasjim dan para pendukung mereka masing-masing tentu saja tidak terhindarkan dalam konferensi itu. Akan tetapi konferensi yang berlangsung selama satu minggu itu dapat menghasilkan kompromi di antara kedua kelompok tersebut, yakni dalam bentuk suatu kesepakatan untuk mengusulkan pembubaran kabinet dan pembentukan pemerintahan militer.⁶¹

Jadi, di satu pihak, konferensi tersebut berhasil meredam konflik antara Hasan Saleh dan Abdurrahman Hasjim. Tetapi di lain pihak, konferensi itu malah memperluas horison pertikaian dalam kepemimpinan yang kini dilengkapi pergesekan lain, yaitu antara unsur-unsur sipil dan militer. Banyak pemimpin sipil dari kelompok ulama maupun zuama yang kini menarik kembali dukungan mereka terhadap pimpinan militer. Akibatnya, Hasan Saleh dan Abdurrahman Hasjim menghadapi tuduhan serius dari mereka. Para menteri dan pejabat sipil lainnya menuduh bahwa pemimpin-pemimpin militer akan melancarkan suatu "kudeta".⁶² Karena itu sekali lagi Daud Beureueh menemukan dirinya berada dalam keadaan yang sulit. Bagi Wali Negara masalahnya kini bukan hanya bagaimana harus menyelamatkan kedudukannya sendiri, melainkan bagaimana menangani soal itu tanpa melukai pihak mana pun juga. Oleh karena ia dapat disebut sebagai salah seorang pemimpin yang bercorak "pembuat solidaritas" menurut konsep Feith,⁶³ juga karena pilihan yang

61. Lihat "Konsepsi Krueng Pinang", tanggal 29 Mei 1957.

62. Lihat pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin TII, Hasan Saleh, dan Abdurrahman Hasjim, tanggal 17 Januari 1958.

63 Feith membagi kepemimpinan politik di Indonesia atas *administrators* (administrator) dan *solidarity makers* (pembuat solidaritas). Ia mendefinisikan "administrator" sebagai "pemimpin-pemimpin dengan keahlian administratif, teknik, hukum, dan bahasa asing yang dibutuhkan dalam menjalankan aparatur modern dari suatu negara modern", dan "pembuat solidaritas" sebagai "perantara antara kelompok-kelompok pada tingkat modernitas dan efektifitas politik yang berbeda, seperti aktifis organisasi massa, dan manipulator simbol-simbol integratif". Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1968), hal. 113.

tersedia bukanlah antara pemimpin-pemimpin ulama dan zuama, maka Daud Beureueh berusaha untuk merangkul kedua belah pihak. Ia memilih untuk tidak mengambil suatu keputusan apa pun dan membiarkannya begitu saja.

Penerimaan Abdurrahman terhadap usul Hasan Saleh untuk membentuk pemerintahan militer sesungguhnya tidaklah menyelesaikan perselisihan di antara kedua pemimpin itu, walaupun konflik tersebut mereda untuk sementara. Kalau begitu, mengapa Abdurrahman Hasjim bersedia menerima usul membentuk sebuah rezim militer? Apakah ia telah jenuh akan konflik? Sebagaimana yang diperkirakan oleh kaum sipil, keputusan konferensi militer itu terlihat seakan-akan memberikan keuntungan pribadi bagi kedua pemimpin tersebut. Akan tetapi kompromi yang dicapai itu sama sekali tidak menyelesaikan pertikaian yang ada di antara mereka, sebab perselisihan tersebut tidak berlandaskan pada perbedaan pribadi. Baik Abdurrahman maupun Hasan Saleh percaya bahwa kompromi tersebut memenuhi kepentingan kelompok mereka masing-masing. Kedua pemimpin ini sebenarnya telah bosan akan kabinet lama meskipun masing-masing dengan alasan yang berbeda. Bagi Abdurrahman, Kabinet yang didominasi kaum zuama itu merupakan gangguan dan penghalang bagi kekuasaan Daud Beureueh, kendatipun dalam banyak hal sang Wali Negara selalu berhasil mengaturnya. Di lain pihak Hasan Saleh tidak puas akan kabinet, terutama karena kabinet itu tidak mampu menolak campur tangan Daud Beureueh. Oleh sebab itu keduanya lebih suka untuk melemahkan atau bahkan menghapuskan kabinet tersebut, dan berusaha meningkatkan pengaruh kelompok masing-masing dengan memperluas peranan mereka sendiri. Dalam hal ini Abdurrahman Hasjim yakin bahwa Hasan Saleh tidak akan dapat menarik keuntungan besar dari konsep-konsep militer, sebab konsep-konsep tersebut, berbeda dari proposal lain, telah memperinci segala sesuatunya. Menurut konsep tersebut, penggantian kabinet dengan pemerintahan militer tidak akan memberikan kekuasaan ekstra kepada Hasan Saleh, selaku kepala staf, sebab pemerintahan akan dijalankan oleh suatu presidium yang terdiri atas Daud Beureueh, Hasan Ali sebagai wakil panglima, serta Hasan Saleh, dan Abdurrahman Hasjim. Perubahan ini tidak diragukan akan menjamin posisi Daud Beureueh sebagai penguasa tertinggi, sementara Hasan Saleh dan Ab-

durrahan akan menangani urusan-urusan militer.⁶⁴

Sebenarnya seruan tersebut telah mendekatkan Hasan Saleh pada perwujudan ambisinya untuk memperoleh kekuasaan. Ketika Daud Beureueh menolak memberikan tanggapan positif, bersama Abdurrahman Hasjim ia pun mendesak Daud Beureueh agar membubarkan kabinet itu pada tahun 1958.⁶⁵ Daud Beureueh mengabulkannya, tetapi ia tidak mau membentuk presidium. Sebaliknya, untuk mencegah berlanjutnya perselisihan antara pemimpin-pemimpin militer dan sipil, dia memutuskan untuk membentuk sebuah kabinet baru. Untuk maksud tersebut, ia menunjuk Hasan Ali, Ayah Gani (seorang ulama yang berbalik menjadi pemimpin zuama), dan Abdurrahman Hasjim sebagai formatur kabinet. Kabinet baru itu antara lain terdiri atas Ayah Gani sebagai wakil perdana menteri dan Hasan Saleh sebagai menteri urusan perang menggantikan bekas Menteri Pertahanan Husin Jusuf. Hasan Ali tetap sebagai perdana menteri. Abdurrahman Hasjim tidak bersedia memegang sesuatu kementerian, barangkali karena ia telah melihat bahwa pada masa lampau kabinet tidak memiliki kekuasaan nyata, dan bahwa sejauh menyangkut dirinya sendiri lebih baik jika ia dapat mempertahankan pengaruhnya terhadap TII. Harapan ini bukanlah tidak beralasan, sebab dengan masuknya Hasan Saleh dalam kabinet terbukalah peluang bagi Abdurrahman untuk memperoleh jabatan kepala staf.

Akan tetapi segera ternyata bahwa Abdurrahman Hasjim telah salah perhitungan dan menganggap rendah Hasan Saleh. Segera setelah Hasan Saleh masuk dalam kabinet, ia pun menerapkan gagasan *eenheid commando*-nya. Kini Hasan Saleh menginterpretasikan gagasan itu sebagai penyatuan kekuatan militer, baik strategi maupun taktik, dalam satu tangan, yaitu menteri urusan perang. Oleh sebab itu dia mempertahankan kedudukannya sebagai kepala staf. Dengan memegang kedua posisi itu, Hasan Saleh kini dapat mencegah Daud Beureueh menguasai urusan militer, dan ia menjadikan dirinya sendiri sebagai satu-satunya perwira yang mengendalikan unit-unit militer. Menyadari adanya bahaya dalam tindakan Hasan Saleh ini, maka Abdurrahman pun memprotes sekeras-kerasnya. Secara tajam dia mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak

64. "Konsepsi Krueng Pinang".

65. Lihat pernyataan bersama Hasan Saleh dan Abdurrahman Hasjim.

layak karena sebelum Hasan Saleh diangkat menjadi menteri telah ada kesepakatan bahwa menteri urusan perang tidak akan merangkap jabatan kepala staf. Oleh karena itu ia menuduh bahwa makna *eenheid commando* yang sesungguhnya telah diselewengkan. Dia memperingatkan bahwa bilamana sistem itu tidak memberikan kekuasaan semata-mata kepada wali negara dan bukan kepada menteri urusan perang, maka kepemimpinan NBA akan terus mengalami masalah. Karenanya ia mendesak Daud Beureueh supaya mengembalikan organisasi TII ke bentuk semula seperti yang telah ditetapkan dalam konferensi Bate Kureeng. Selain itu, Abdurrahman Hasjim menuntut agar Hasan Saleh mengundurkan diri dari jabatan kepala staf, kalau tidak, ia akan meninggalkan TII.⁶⁶

Abdurrahman Hasjim jelas bermaksud untuk melindungi pengaruh Daud Beureueh dan kaum ulama terhadap jalannya pemberontakan. Tetapi, bukan tidak mungkin pula ada udang di balik batu. Lawannya, Hasan Saleh, curiga bahwa Abdurrahman sedang mencari kesempatan untuk menggantikannya sebagai kepala staf, dan oleh sebab itu ia menyetujui usul formatur dari kelompok zuama, yaitu Ayah Gani, untuk memasukkan Abdurrahman dalam kabinet. Dalam hubungan ini Hasan Saleh menyatakan kesediaannya untuk melepaskan jabatan kepala staf, meskipun sebelum meninggalkan posisi tersebut ia ingin memastikan agar jabatan ini tidak jatuh ke tangan Abdurrahman. Untuk mencapai maksudnya itu Hasan Saleh menyarankan Daud Beureueh agar hanya mengangkat perwira yang mempunyai keahlian militer saja sebagai penggantinya. Apa yang ia maksud sebenarnya adalah seorang perwira bekas TNI. Hal ini menjadi jelas tatkala Hasan Saleh merekomendasikan abangnya sendiri, bekas Letnan Ibrahim Saleh, untuk menduduki jabatan tersebut.⁶⁷

Sebagai kesimpulan, kita telah melihat ada dua jenis pertikaian dalam kalangan NBA. Yang pertama adalah konflik kepentingan yang sangat jelas, yaitu antara kelompok ulama dan zuama. Konflik ini berhulu pada perbedaan pekerjaan di antara para pemimpin tersebut pada masa sebelum pemberontakan. Perbedaan jabatan tersebut menciptakan perbedaan-perbedaan dalam alasan mereka untuk berpartisipasi dalam

66. Lihat surat Abdurrahman Hasjim kepada Daud Beureueh, tanggal 14 Mei 1958.

67. Lihat surat Hasan Saleh kepada Daud Beureueh, tanggal 20 Juli 1958.

pemberontakan. Perselisihan yang kedua, di atas permukaan, agaknya bersifat pribadi di antara para pemimpin yang berusaha memperoleh pengaruh lebih besar. Akan tetapi jauh di bawah permukaan, perselisihan ini pun sebenarnya lebih dari sekadar konflik pribadi. Konflik ini sebenarnya merupakan suatu kelanjutan dari pertikaian antara ulama dengan zuama yang muncul dalam bentuk dan lingkup yang berbeda. Konflik tersebut bersifat sangat fundamental sehingga sangat sulit untuk diselesaikan, bahkan bagi Daud Beureueh sekali pun. Daud Beureueh menyadari hal ini dan sebagaimana telah kita saksikan, dia sendiri terombang-ambing di antara kedua kekuatan yang bertikai itu. Keterlibatannya sendiri merupakan suatu faktor lain yang menandai kegagalannya dalam mengendalikan konflik tersebut. Di samping itu, adalah lebih sukar lagi bagi Daud Beureueh untuk mengatasinya dalam suasana ketika Pemerintah Pusat sedang menawarkan suatu penyelesaian politis dalam bentuknya yang paling menarik. Hal yang terakhir ini akan dikemukakan pada waktunya nanti.

Hubungan NBA-NII

CUKUP MENGHERANKAN jika hubungan antara NBA dan organisasi pusatnya, NII, di Jawa Barat tidak berjalan mulus. Ketegangan, dan bukan kerja sama, tampaknya telah mendominasi keseluruhan hubungan di antara kedua gerakan ini. Keterlibatan di dalam perjuangan bersama untuk menentang Pemerintah Pusat dan membentuk sebuah Negara Islam di Indonesia tidak mampu menghindarkan keduanya dari hubungan yang tidak lancar dan perbedaan tujuan. Kenyataan bahwa para pemberontak di Aceh dan Jawa Barat mempunyai kesulitan di dalam berkomunikasi tidak pula mencegah terjadinya konflik di antara keduanya. Secara sepintas konflik ini mungkin terlihat sebagai sesuatu yang ditimbulkan oleh masalah-masalah organisasi. Akan tetapi semakin teliti kita memerhatikan, akan semakin tampak bahwa konflik tersebut bukanlah semata-mata disebabkan oleh masalah organisasi. Di balik pertikaian ini terdapat perbedaan cita-cita antara Aceh dan Jawa Barat pada khususnya, selain perbedaan pandangan yang bersumber pada latar belakang para pemimpin serta kondisi-kondisi setempat. Walaupun pembicaraan dalam bagian ini terutama dipusatkan pada hubungan antara Aceh dan Jawa Barat, peserta lain dalam NII, yakni Sulawesi Selatan, juga akan diperhatikan di sana-sini. Dalam hal

demikian, gerakan Darul Islam akan dilihat terdiri atas Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan sering dikaitkan dengan Darul Islam, tetapi pada kenyataannya gerakan ini hampir tidak mempunyai suatu hubungan dengan ketiga gerakan lainnya. Oleh sebab itu, gerakan di Kalimantan itu tidak dimasukkan dalam pembahasan ini.

Sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, hubungan antara para pemberontak di Aceh dan NII telah dibina sejak awal tahun 1952 melalui kunjungan utusan Kartosuwirjo, Mustafa alias Abdul Fatah, ke Aceh. Abdul Fatah berkunjung lagi ke Aceh pada tahun 1953, beberapa waktu sebelum meletusnya pemberontakan. Sebaliknya, antara tahun 1952 dan 1953, Daud Beureueh telah mengirim dua orang utusan ke Jawa Barat bersamaan dengan kembalinya Abdul Fatah. Juga telah kita saksikan bahwa utusan pertama itu berhasil mencapai markas Kartosuwirjo, tetapi yang kedua gagal, karena tertangkapnya Abdul Fatah oleh penguasa militer di Jakarta pada bulan Mei 1953. Barulah pada tahun 1956 komunikasi antara Aceh dan Jawa Barat berlanjut kembali.

Untuk dapat menilai bagaimana sebenarnya hubungan antara NBA dan NII, sebelumnya kita perlu menempatkan gerakan Darul Islam dalam suatu perspektif sejarah. Telah disepakati secara umum bahwa gerakan Darul Islam berawal pada suatu perpecahan dalam PSII. Pada tahun 1936, setelah pendirinya, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, meninggal, maka partai itu mengangkat Wondoamiseno sebagai ketua dan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo sebagai wakil ketuanya. Segera setelah itu PSII terjun dalam suatu gelombang konflik menyangkut masalah apakah akan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda atau tidak.⁶⁸ Dalam perpecahan ini, Kartosuwirjo muncul sebagai salah seorang penganjur yang paling keras menolak kerja sama itu, dengan akibat ia dipecat dari partai pada tahun 1939. Kemudian ia membentuk apa yang dinamakannya Komite Pembela Kebenaran PSII. Dalam badan inilah gagasan untuk mendirikan gerakan Darul Islam berkembang pada tahun 1940-an.

Namun langkah yang lebih jelas ke arah pembentukan sebuah Negara Islam baru diambilnya segera setelah pemerintah Republik dan pemerin-

68. B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hal. 56.

tah kolonial Belanda menandatangani Perjanjian Renville pada awal tahun 1948. Dalam perjanjian ini, para pemimpin Republik setuju untuk menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda dan menarik mundur pasukan militernya dari wilayah tersebut. Kartosuwirjo menolak perjanjian ini; karena itu dia melarang pasukan Hizbullah dan Sabilillahnya untuk meninggalkan Jawa Barat. Dalam suasana inilah suatu konferensi pemimpin-pemimpin Islam diselenggarakan di sebuah desa di sebelah tenggara Jawa Barat pada pertengahan Februari 1948. Konferensi tersebut memutuskan untuk membentuk Majelis Islam dan mengubah laskar Hizbullah dan Sabilillah itu menjadi Tentara Islam Indonesia (TII), di samping membentuk pasukan kepolisian. Dua bulan kemudian, dalam konferensi lain yang diadakan pada bulan Mei, embrio negara ini dilengkapi dengan perlengkapan pemerintahan yang lebih baik. Majelis Islam itu dibubarkan dan diganti dengan Dewan Imamah (kabinet), serta dibentuk pula Dewan Fatwa (dewan penasihat). Peserta konferensi itu mengangkat Kartosuwirjo sebagai Imam, atau Ketua Dewan Imamah. Di samping itu, konferensi juga diberi tugas menyusun sebuah konstitusi yang diselesaikan pada akhir Agustus 1948. Akan tetapi NII tidak diumumkan sampai tanggal 7 Agustus 1949.

Sampai akhir Agustus 1948, kepemimpinan pusat masih dikuasai oleh para ulama. Hal ini tercermin dalam komposisi Dewan Imamah:⁶⁹

Imam	: S.M. Kartosuwirjo -- politisi
Pertahanan	: S.M. Kartosuwirjo
Dalam Negeri	: Sanusi Partawidjaja -- ulama
Kuangan	: Sanusi Partawidjaja
Kehakiman	: Kiai Haji Gozali Tusi -- ulama
Penerangan	: Thoha Arsjad -- ulama
Menteri tanpa	: Kamran -- ulama
Portofolio	: R. Oni Mandalatar -- ulama

Kemudian, Kartosuwirjo melepaskan kedudukannya sebagai menteri pertahanan dan mengangkat Kamran untuk menggantikannya. Oni juga dipromosikan menjadi wakil menteri pertahanan. Kelima pemimpin ini adalah teman-teman dekat Kartosuwirjo. Menurut Pinardi, Kiai Gozali

69. *Ibid.*, hal. 263.

Tusi dan Oni adalah dua dari beberapa ulama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap keagamaan Kartosuwirjo.⁷⁰

Pada bulan Agustus 1949, setelah Belanda melancarkan Aksi Militer Kedua pada akhir tahun 1948, struktur NII diubah sehingga sangat berbeda dari struktur yang terdapat dalam konstitusinya. Sistem pemerintah sipil ditinggalkan sama sekali dan dibentuklah sebuah organisasi militer. Akibatnya, Dewan Imamah dibubarkan pula dan diganti dengan Komandemen Tertinggi. Tetapi Kartosuwirjo tetap sebagai Imam, walaupun sekarang ia disebut sebagai Panglima Tertinggi. Komandemen Tertinggi ini terdiri atas seorang kepala staf umum dan beberapa anggota Komandemen Tertinggi. NII dibagi atas lima Komandemen Wilayah, tiga di antaranya berada di Jawa. Sulawesi Selatan adalah Komandemen Wilayah IV, dan Aceh menjadi Komandemen Wilayah V. Tiap Komandemen Wilayah dipimpin oleh seorang panglima. Agaknya penggunaan organisasi militer ini merupakan salah satu alasan mengapa lembaga-lembaga sipil seperti Majelis Syura tidak pernah dibentuk di Jawa Barat, walaupun tercantum di dalam konstitusi.

Perubahan struktural NII tersebut kemudian muncul menjadi salah satu faktor utama yang memantik konflik antara pemimpin-pemimpin gerakan Darul Islam di Aceh dan Jawa Barat. Alasan yang diberikan oleh para pemimpin pusat di Jawa Barat adalah bahwa penggunaan sistem militer tidak dapat dihindarkan sebab Darul Islam sedang berada dalam keadaan perang. Di pihak lain, para pemimpin Aceh merendahkan program perjuangan NII yang berlandaskan pada kebijaksanaan untuk mencapai tujuan Darul Islam hanya dengan perjuangan bersenjata. Para pemimpin Aceh berpendapat bahwa walaupun sedang berada dalam keadaan perang, NII tidak boleh mengabaikan penggunaan prinsip dan fungsi-fungsi yang sehat dari sebuah negara. Oleh karena pimpinan pusat tidak dapat menuruti nasihat ini, maka Daud Beureueh mencap sistem NII sebagai sangat "bobrok".⁷¹

Walaupun tidak menyukai sistem NII itu, para pemimpin Aceh menerapkannya juga di daerah mereka. Seperti sudah kita lihat, pemerintahan sipil di Aceh telah diganti dengan suatu pemerintahan militer pada pertengahan tahun 1954. Ketidaksenangan mereka terhadap

70. Pinaridi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo* (Jakarta: Aryaguna, 1964), hal. 28.

71. Pidato Daud Beureueh di depan Majelis Syura, 24 Juni 1960.

sistem itu tercermin pada kenyataan bahwa walaupun para komandan militer dominan dalam pemerintahan daerah, lembaga-lembaga sipil seperti Mahkamah Agama dan, sesudah konferensi Bate Kureeng pada bulan September 1955, Majelis Syura, memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan di Aceh. Dengan demikian sistem pemerintahan yang diterapkan di Aceh pada hakikatnya berbeda dari sistem yang berlaku di Jawa Barat. Apabila di Jawa Barat sangat berkuasa, di Aceh TII merupakan suatu unsur yang dominan tetapi, sampai batas tertentu, tetap dibatasi oleh Mahkamah Agama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin Aceh, secara organisatoris, telah menyimpang dari NII, dan itu dilakukan untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dalam gerakan Darul Islam.

Perselisihan antara pemimpin-pemimpin di Aceh dan Jawa Barat berkembang terus pada akhir tahun 1954 tatkala Daud Beureueh dan kawan-kawannya menolak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk NII pusat. Hal ini sebagian disebabkan oleh kesadaran para pemimpin Aceh bahwa Kartosuwirjo tidak akan mampu mengambil suatu tindakan terhadap mereka. Tampaknya modifikasi terhadap sistem seperti yang diterapkan di Aceh itu merupakan suatu batu ujian belaka. Dan ketika para pemimpin di Jawa Barat gagal memberikan tanggapan dalam waktu enam bulan, sampai akhir tahun 1954, maka pemimpin-pemimpin di Aceh pun terdorong untuk melangkah lebih jauh lagi. Kali ini sasaran mereka bukan lagi sistem pemerintahan daerah melainkan organisasi pusat Darul Islam itu sendiri. Mereka mencoba untuk menjalankan konstitusi Darul Islam, khususnya pasal-pasal yang menyangkut organisasi gerakan tersebut. Ini berarti bahwa mereka bergerak ke arah penghapusan sistem militer.

Pada awal Januari 1955 dibentuklah sebuah kabinet NII yang bersifat presidensial di Aceh. Komposisi kabinet ini adalah sebagai berikut:

Presiden	: Imam S.M. Kartosuwirjo
Wakil Presiden	: Daud Beureueh
Menteri Pertahanan	: Pak Oetji
Wakil Menteri Pertahanan I	: Abdul Kahar Muzakkar
Wakil Menteri Pertahanan II	: Al Murthala
Menteri Luar Negeri	: Hasan Ali
Menteri Dalam Negeri	: I. Huda

Menteri Keuangan	: Udin Kartasasmita
Menteri Pendidikan	: Teungku Njak Tjut
Menteri Kehakiman	: Chaeduddin
Menteri Penerangan	: Luqman
Menteri Sosial	: Sanusi Partawidjaja
Menteri Negara	: Ibnu Hadjar
Duta Besar untuk PBB	: Hasan Muhammad Tiro

Beberapa catatan perlu dibuat tentang kabinet ini. Pertama, Daud Beureueh diangkat sebagai orang nomor dua dalam gerakan Darul Islam secara keseluruhan. Kedua, tentang personalia dalam kabinet. Menteri Pertahanan Pak Oetji tidak lain daripada Sanusi Partawidjaja, yang juga menjadi menteri sosial. Dia adalah salah seorang tokoh utama dalam versi asli Dewan Imamah, di mana ia menjabat menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Abdul Kahar Muzakkar, wakil menteri pertahanan I, tentu saja pemimpin dari Sulawesi Selatan itu. Wakil Menteri Pertahanan II Al Murthala, adalah nama lain Hasan Ali, menteri luar negeri, yang kemudian juga menjadi perdana menteri Negara Bagian Aceh. (Dia jangan dikacaukan dengan Hasan Muhammad Tiro, duta besar untuk PBB.)⁷² Menteri Dalam Negeri I. Huda, adalah Ch. W. van Kleef alias Smith, seorang warganegara Belanda yang menggabungkan diri dengan Kartosuwirjo dan kabarnya telah masuk Islam.⁷³ Menteri Negara Ibnu Hadjar adalah pemimpin gerakan Darul Islam di Kalimantan. Selain Udin Kartasasmita, yang dari namanya dapat diketahui sebagai orang Sunda, dan Menteri Pendidikan Teungku Njak Tjut, orang Aceh yang tinggal di Penang, dua personalia lainnya tidak dikenal.

Fakta bahwa Daud Beureueh diangkat sebagai wakil presiden NII dan bahwa Aceh sangat berpengaruh dalam kabinet, yaitu menguasai lima dari empat belas portofolio kabinet, mengarahkan bahwa pembentukan kabinet tersebut merupakan inisiatif para pemimpin Aceh. Memang,

72. Boland mencapuradukkan kedua orang ini; lihat bukunya, *op. cit.*, hal. 67. Hasan Ali inilah yang dimaksudkan oleh Bahar Mattalioe dalam *Kabar Muzakkar dengan Petualangannya* (Jakarta: C.V. Delegasi, 1965), hal. 57-58.

73. Menurut Pinardi I. [darul] Huda adalah nama samaran Kartosuwirjo. Tetapi Hasan Ali, yang menjadi salah seorang pembentuk kabinet itu, percaya bahwa itu adalah nama samaran van Kleef. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 6 November 1975.

kabinet itu dibentuk di Aceh tanpa sepengetahuan Kartosuwirjo sebelumnya, dan para pemimpin Aceh tidak pula menghubungi orang-orang yang didudukkan dalam kabinet itu.⁷⁴ Tetapi berita-berita menyatakan bahwa kabinet tersebut merupakan hasil suatu konferensi yang diadakan di "Madinah Indonesia" dan diikuti oleh pemimpin-pemimpin gerakan Darul Islam.⁷⁵ Dengan menyebarkan berita ini, sebenarnya para pemimpin Aceh ingin memberi kesan kepada rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta bahwa pimpinan pemberontakan tidaklah terpecah-belah.

Di balik pembentukan kabinet ini agaknya terdapat harapan para pemimpin Aceh untuk memperoleh bantuan asing. Sejak pertengahan tahun 1954, pemimpin-pemimpin Aceh telah dapat mengatasi kekecewaan mereka atas kekalahan yang tidak pernah diduga sebelumnya dalam bidang militer, yakni bahwa pasukan pemerintah berhasil merebut kembali semua pusat perkotaan dari tangan pemberontak, termasuk markas Daud Beureueh di Kabupaten Pidie. Karena mereka terpaksa menggunakan taktik perang gerilya, maka bantuan asing kini lebih diperlukan daripada masa sebelumnya. Untuk maksud tersebut, dibukalah sebuah kantor di Singapura pada pertengahan tahun 1954. Kantor yang berada di bawah pimpinan Said Abubakar, bertugas mengorganisasikan penyelundupan dari Aceh, membeli peralatan militer, di samping berkampanye untuk memperoleh dukungan dari pemerintah-pemerintah asing yang anti-komunis. Ikhtiar untuk mendapat bantuan asing kemudian ditingkatkan, pada tahun yang sama, ketika Hasan Muhammad Tiro membuka sebuah kantor di PBB, New York.

Dalam hubungan ini para pemimpin Aceh telah diberitahukan oleh Hasan Muhammad Tiro bahwa Darul Islam akan sulit memperoleh bantuan dari kekuatan-kekuatan Barat jika perjuangan hanya didasarkan pada sikap anti-komunisme semata-mata. Mereka ia desak agar memperlihatkan kepada negara-negara Barat bahwa Darul Islam adalah

74. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 6 November 1975.

75. Madinah adalah sebuah kota di Saudi Arabia, tempat Nabi Muhammad hijrah pada masa awal Islam. "Madinah Indonesia" sering dimaksudkan sebagai markas Kartosuwirjo. Dipercayai oleh sebagian orang bahwa "Madinah Indonesia" adalah desa Leuwisari/Cigalontang, di sebelah selatan Tasikmalaya; lihat Kementerian Penerangan R.I., *Republik Indonesia Propinsi Djawa Barat* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hal. 217; seterusnya buku ini dikutip sebagai *Propinsi Djawa Barat*.

suatu gerakan yang demokratis serta bersatu, dan bukan suatu organisasi yang terpecah-belah atas beberapa gerakan seperti sekarang ini.⁷⁶ Untuk memperkuat peranannya di luar negeri, para pemimpin Aceh berpendapat bahwa Hasan Muhammad Tiro perlu diangkat sebagai duta resmi mereka.

, Namun tidak adanya komunikasi dengan Jawa Barat menghalangi Daud Beureueh berhubungan dengan Kartosuwirjo untuk memberitahukan dia tentang rencana pembentukan kabinet itu. Walaupun begitu pemimpin-pemimpin Aceh percaya bahwa Jawa Barat akan menerima kabinet yang mereka rencanakan pembentukannya itu. Sesungguhnya, keyakinan semacam itu bukanlah tanpa dasar. Daud Beureueh percaya bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan dengan membentuk kabinet tersebut, sebab ia yakin bahwa ia telah diberi mandat untuk itu oleh Kartosuwirjo. Menurutnya sebelum pemberontakan pecah di Aceh, Kartosuwirjo telah memberitahukan Daud Beureueh melalui utusannya bahwa dalam keadaan darurat para pemimpin Aceh dapat bertindak dengan mengatasnamakan pimpinan pusat di Jawa Barat, terutama dalam bidang hubungan internasional. Dalam hubungan ini pemimpin-pemimpin di Jawa Barat berpendapat bahwa adalah lebih mudah berkomunikasi dengan luar negeri dari Aceh, karena kedekatan daerah itu dengan Singapura dan Malaya.⁷⁷

Beberapa bulan telah lewat sejak pembentukan kabinet itu, tetapi tidak ada suatu tanda reaksi apa pun dari Jawa Barat. Sementara itu para pemimpin Aceh telah pula gagal menghubungi Kartosuwirjo. Namun mereka percaya bahwa berita mengenai kabinet tersebut mestinya sudah mencapai Jawa Barat setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun 1955, sebab hal itu telah diberitakan secara luas dalam surat-surat kabar Indonesia. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin Aceh menganggap diamnya pimpinan pusat sebagai persetujuan diam-diam terhadap pembentukan kabinet tersebut.

Kegagalan Kartosuwirjo untuk memberikan reaksi terhadap pembentukan kabinet agaknya mendorong rekan-rekannya di Aceh melangkah

76. Hal ini terlihat dalam laporan yang dipersiapkan untuk Kartosuwirjo oleh S. Pohan, utusan Daud Beureueh ke Jawa Barat; ketikan, tak bertanggal (13 Januari 1957?).

77. Lihat surat Daud Beureueh kepada Kartosuwirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956.

lebih jauh lagi. Sebab, tidak adanya tanggapan itu oleh pemimpin-pemimpin Aceh dianggap sebagai ketidakmampuan Jawa Barat untuk menghentikan apa pun yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, pada bulan September 1955, para pemimpin Aceh menyatakan daerah mereka menjadi negara bagian NII, suatu tindakan yang lebih dari sekadar penyimpangan terhadap NII. Pada kenyataannya, pembentukan NBA itu merupakan perubahan besar dalam kebijaksanaan para pemimpin Aceh, yang mencerminkan kesadaran mereka bahwa NII tidak dapat memberikan apa-apa kepada Aceh. Padahal Aceh sendiri memerlukan adanya kompromi dengan para zuama yang telah dikalahkan oleh kelompok ulama dalam konferensi Bate Kureeng sehubungan dengan tawaran status propinsi dari Pemerintah Pusat.

Keputusan Aceh ini menyentuh pertanyaan fundamental tentang konsep negara yang senantiasa menjadi topik kontroversial di Indonesia: apakah negara berdasarkan pada sistem kesatuan atau federal? Seperti yang telah kita ketahui, pada masa sebelum bulan Agustus 1950 Indonesia adalah sebuah negara federal yang di dalamnya Republik Indonesia (RI) hanya merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Di antara lima belas negara bagian yang lain adalah Pasundan (Jawa Barat), Jawa Tengah, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur, yang kesemuanya oleh rakyat Indonesia dianggap sebagai negara-negara boneka kolonial. Timbulnya gerakan ke arah negara kesatuan pada awal tahun 1950 telah membubarkan negara-negara bagian ini dan RIS menjadi RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Akan tetapi gagasan federalisme sesungguhnya tidak pernah sirna seluruhnya, melainkan tetap menjadi topik pembicaraan dalam masyarakat. Sesudah tahun 1950, masalah negara kesatuan versus federal ini berjalan sejajar dengan perbedaan Jawa dan luar Jawa. Dalam hal ini, karena ketergantungan ekonominya kepada luar Jawa, Jawa merupakan pendukung sistem kesatuan yang paling utama.

Dengan pembentukan NBA, Daud Beureueh kembali menjadikan pertentangan federal versus kesatuan sebagai masalah politik. Telah kita lihat di atas bahwa kelahiran NBA bukan disebabkan oleh konflik kepentingan antara pemerintah daerah Darul Islam dan pemerintah pusatnya, melainkan sebagai reaksi terhadap rencana Jakarta untuk memberikan status propinsi kepada Aceh. Terlihat dalam pembahasan sebelumnya bahwa para pemimpin Aceh lebih menghargai sistem federal daripada

sistem kesatuan. Keputusan untuk membentuk NBA diambil bukan oleh Daud Beureueh sendiri, melainkan oleh suatu konferensi pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Aceh. Kendati demikian, keputusan ini pasti menghantam kewibawaan para pemimpin pusat NII di Jawa Barat, sebab keputusan itu diambil tanpa konsultasi dengan mereka. Dengan berbuat demikian, pemimpin-pemimpin Aceh tentu sadar sepenuhnya bahwa mereka telah menyeleweng dari Jawa Barat dalam rangka menanggapi tekanan lokal. Tampaknya mereka telah mengambil keuntungan dari adanya sejumlah peluang dalam konstitusi NII yang, selain menyebutkan NII sebagai suatu Republik,⁷⁸ tidak menyatakan suatu apa pun tentang struktur negara.

Untuk menanggapi perkembangan ini, para pemimpin di Jawa Barat mengirimkan Kapten TII Affandi sebagai utusan mereka ke Aceh. Sesampai di markas Daud Beureueh pada bulan September 1956, lebih dari setahun setelah Daud Beureueh membentuk kabinet NII dan NBA, Affandi memberitahukan pemimpin-pemimpin Aceh bahwa tindakan mereka telah menyinggung Kartosuwirjo dan pimpinan lainnya di Jawa Barat. Daud Beureueh kemudian didesak untuk menjelaskan tindakan-tindakannya itu. Sebagai jawabannya, pada bulan Desember 1956 Daud Beureueh mengirim S. Pohan sebagai utusannya untuk membicarakan masalah tersebut dengan Kartosuwirjo. Utusan ini tiba di markas NII pada bulan Januari 1957 dan bertemu dengan beberapa pemimpin organisasi pusat, termasuk Kepala Staf Umum Komandemen Tertinggi. Dalam pertemuan tersebut, Pohan diminta menyerahkan semua surat dari Daud Beureueh untuk Kartosuwirjo dan, mengherankan sekali, ia dicegah bertemu langsung dengan sang Imam.⁷⁹ Jelas tidak ada suatu apa pun yang dihasilkan oleh pertemuan ini, selain janji para pemimpin

78. Pasal 1 konstitusi Darul Islam. Naskah lengkap konstitusi ini ada dalam Boland, *op. cit.*, hal. 256-263. Sementara para pemimpin Aceh memanfaatkan kelemahan konstitusi Darul Islam ini, kemudian tatkala bergabung dalam RPI, mereka berusaha keras memperjelas setiap pasal konstitusi RPI demi mencegah rekan-rekan mereka dari kelompok PRRI memanfaatkan sesuatu pasal yang kabur artinya.

79. Hal ini terdapat dalam laporan S. Pohan kepada Kartosuwirjo. Pohan adalah salah seorang komandan batalion di Sumatera Utara yang memihak kepada Kolonel Simbolon dalam gerakan militer pada akhir Desember 1956. Kemudian Pohan dilaporkan tinggal di Singapura dan bertindak sebagai penghubung Simbolon dan, kemudian, penghubung PRRI.

Jawa Barat bahwa mereka akan memberikan jawaban Kartosuwirjo kepada Pohan pada saat ia nanti kembali ke Aceh. Tetapi janji itu tidak pernah ditepati, dan Pohan meninggalkan Jawa Barat dengan tangan hampa.⁸⁰ Pada bulan Maret 1957, seorang utusan lain tiba di Aceh dari Jawa Barat. Utusan yang dikirim oleh seorang anggota Komandemen Tertinggi ini mempunyai tugas yang sama dengan Affandi.⁸¹

Langkah Aceh untuk membentuk kabinet dan menyatakan Aceh sebagai negara bagian dari NII menimbulkan ketegangan hubungan dengan para pemimpin di Jawa Barat. Tindakan tersebut juga menimbulkan polarisasi dalam kepemimpinan gerakan Darul Islam. Pertama, pemimpin-pemimpin Aceh percaya bahwa pencapaian cita-cita Darul Islam juga tergantung pada bagaimana gerakan itu diatur. Para pemimpin Aceh memandang gerakan mereka bukan semata-mata sebagai perjuangan bersenjata. Mereka menganggap penting bahwa untuk mencapai tujuannya, Darul Islam harus memiliki, secara internal, dukungan rakyat, dan, secara eksternal, simpati luar negeri. Dengan demikian, gerakan itu haruslah mempunyai organisasi yang meyakinkan rakyatnya dan simpatian asing. Pendirian Aceh ini didukung oleh Kahar Muzakkar dari Sulawesi Selatan.

Faktor kedua dalam polarisasi Darul Islam itu menyangkut kepemimpinan di Jawa Barat yang dengan kuatnya berpegang pada keyakinan bahwa tujuan-tujuan mereka harus dicapai dengan perjuangan bersenjata. Dalam memusatkan diri pada kekerasan ini, pimpinan pusat di Jawa Barat cenderung untuk mengabaikan hal-hal lain, termasuk prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Menurut mereka hal-hal semacam itu akan dapat diperhatikan nanti setelah kemenangan akhir diraih. Kekakuan pendirian pemimpin-pemimpin ini tergambar dengan baik dalam pernyataan mereka bahwa perjuangan mereka akan berlangsung terus bahkan andaikata Republik Indonesia telah menjadi sebuah negara Islam melalui ketetapan Parlemen.⁸² Sehubungan dengan prinsip ini, pimpinan

80. Lihat laporan Pohan kepada Daud Beureueh, tanggal 5 Mei 1957.

81. Utusan ini meninggalkan Jawa Barat pada akhir Agustus 1956, dan tiba di Aceh sekitar sembilan bulan kemudian, atau dua bulan setelah utusan Aceh tiba di markas NII.

82. Mereka mengatakan bahwa jika hal itu memang terjadi, maka menerima Keputusan Parlemen tersebut sama dengan menerima Quran dari setan. Lihat laporan Pohan kepada Daud Beureueh, tanggal 5 Mei 1957.

NII mengecam rekan-rekan mereka di Aceh karena telah membentuk kabinet dan NBA. Oleh karena itu kabinet yang dibentuk oleh Daud Beureueh tersebut ditolak, sementara pimpinan pusat tetap mempertahankan Komandemen Tertinggi sebagai kabinet NII dan Kepala Staf Umum sebagai Perdana Menterinya.⁸³ Memberi komentar tentang penerapan Trias Politika di Aceh, yaitu adanya kabinet negara bagian di samping Majelis Syura dan Mahkamah Agama, pemimpin-pemimpin Jawa Barat mendesak Aceh "untuk tidak mempraktekkan teori-teori demokrasi, karena kami menginginkan Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh lainnya di Aceh untuk memerintah secara diktatorial". Pimpinan pusat NII menyatakan bahwa kekuatan perjuangan mereka terletak pada cara-cara diktator yang absolut.⁸⁴

Tampaknya tidak ada jalan bagi kedua kepemimpinan itu untuk berdamai. Pemimpin-pemimpin Aceh mempertahankan kabinet NII yang telah mereka bentuk itu sekalipun tidak disetujui oleh rekan-rekan mereka di Jawa Barat. Daud Beureueh tetap bertahan pada posisi wakil presiden, dan terus menyebut Kartosuwirjo sebagai presiden. Protes-protes yang dilancarkan Jawa Barat juga tidak menyebabkan dibubarkannya NBA. Walaupun begitu Daud Beureueh, menyerukan kepada Kartosuwirjo supaya mengadakan konferensi pimpinan Darul Islam untuk membicarakan struktur NII. Tetapi seruan ini ditolak Kartosuwirjo dengan halus. Dalam suratnya kepada Daud Beureueh, sang Imam mengatakan, bahwa belum sampai waktunya untuk menyelenggarakan konferensi sedemikian, dan dia secara terus terang menolak berkoordinasi tentang masalah tersebut.⁸⁵ Ini sama sekali tidak berarti bahwa Kartosuwirjo tidak mempunyai konsep tentang struktur NII. Sudah merupakan aksioma bagi Kartosuwirjo bahwa NII tidak akan pernah menganut sistem federal, melainkan sistem kesatuan. Menamakannya sebagai "stelsel Kanton", Kartosuwirjo merencanakan bahwa Imam NII kelak akan digilir antara dirinya, Daud Beureueh, dan Kahar Muzakkar. Akan tetapi Daud Beureueh tidak menyukai gagasan ini sebab, katanya, rencana Kartosuwirjo itu tidak menjelaskan kekuasaan atau pun

83. *Ibid.*

84. "Trias Politica" adalah istilah yang dipergunakan para pemimpin Aceh di dalam menjelaskan sistem mereka. Komentar di atas dapat ditemukan dalam laporan Pohan kepada Daud Beureueh, 5 Mei 1957.

85. Dari surat Kartosuwirjo kepada Daud Beureueh, bertanggal 7 Maret 1957.

struktur negara.⁸⁶ Oleh karena itu Daud Beureueh tidak mau membubarkan kabinet NII dan NBA.

Setelah berselisih dengan Aceh, para pemimpin Jawa Barat mencari dukungan Kahar Muzakkar. Barangkali mereka percaya bahwa mereka akan dapat menekan Daud Beureueh dengan campur tangan Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar sudah lebih dahulu mengakui kehadiran kabinet NII itu secara terang-terangan, yaitu dengan menerima pengangkatannya sebagai wakil menteri pertahanan I. Dukungannya bagi Daud Beureueh juga tersingkap ketika ia membentuk apa yang dinamakannya Perwakilan Kabinet Presiden di Sulawesi, di mana dia sendiri bertindak selaku wakil menteri pertahanan I.⁸⁷ Oleh sebab itu, pada awal Februari 1957 seorang utusan telah dikirim dari Jawa Barat untuk mendesak Kahar Muzakkar agar menarik kembali dukungannya terhadap kabinet. Tatkala menerima utusan tersebut, Kahar Muzakkar memainkan perannya dengan cerdas. Dia mengatakan kepada utusan itu bahwa baginya NII adalah negara kesatuan dan bahwa kabinet yang dibentuk Daud Beureueh sebaiknya tidak diaktifkan sampai semua kesalahpahaman dapat diselesaikan serta masalahnya dibicarakan antara Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi.⁸⁸ Akan tetapi dalam kenyataannya Kahar Muzakkar tetap bersetia dengan Daud Beureueh dan tidak mematuhi Kartosuwirjo, sebab dia tetap menyebut dirinya sebagai wakil menteri pertahanan I NII.⁸⁹

Sikap Kahar Muzakkar dalam masalah ini dapat diterangkan dengan mudah. Sebagaimana halnya dengan pemimpin-pemimpin Aceh, ia mungkin juga khawatir akan masa depan daerahnya sendiri apabila nanti Darul Islam memenangkan perjuangan. Apakah nanti Kartosuwirjo dan pemimpin-pemimpin NII lainnya tidak akan memperlakukan Sulawesi Selatan seperti yang diperbuat oleh Jakarta pada tahun 1950, yang telah

86. Notulen pertemuan antara Daud Beureueh dan utusan Kartosuwirjo, Kapten TII M.A. Jusuf, pada tanggal 4 Maret 1957.

87. Abdul Qahhar Mudzakkar, "Kambing Hitam DI/TII di Sulawesi" (1960), hal. 36-37.

88. Laporan Pohan kepada Daud Beureueh, *op. cit.* Pada pertengahan Mei 1957, sebelum meninggalkan Jakarta menuju Aceh, Pohan bertemu dengan seorang agen dari Sulawesi Selatan yang menceritakan kepadanya mengenai isi pembicaraan antara Affandi dan Kahar Muzakkar.

89. Mudzakkar, *op. cit.*, hal. 48.

menyebabkan ia memberontak? Sebagai seorang tokoh daerah, Kahar Muzakkar mungkin menyadari bahwa banyak masalah yang akan timbul begitu Negara Islam itu menjadi kenyataan. Di antara masalah-masalah itu adalah hubungan klasik pusat-daerah yang pasti akan memberi dampak pada Sulawesi. Dalam hal ini tentu lebih baik bagi Kahar Muzakkar untuk bersekutu dengan Daud Beureueh yang telah mulai mempertanyakan persoalan itu. Apalagi ternyata bahwa selama pemberontakan berlangsung, para pemimpin dari Sulawesi Selatan telah menjadi lebih dekat kepada Aceh daripada Jawa Barat. Hal ini karena fakta bahwa sebagaimana halnya Daud Beureueh, Kahar Muzakkar juga percaya bahwa gerakan Darul Islam tidak akan dapat hidup hanya dengan kekerasan. Oleh sebab itu ia juga membuka sebuah kantor di Singapura untuk memudahkan komunikasi dengan unsur-unsur anti-Jakarta, baik asing maupun pribumi. Melalui kantor inilah dia menjalin hubungan baik dengan Aceh. Kerja sama antara Sulawesi Selatan dan Aceh tersingkap pada akhir tahun 1954 ketika Kahar Muzakkar bersepakat dengan Daud Beureueh untuk bersama-sama menanggung biaya kampanye anti-Jakarta di Amerika Serikat melalui Hasan Tiro.⁹⁰ Persekutuan ini diperlihatkan lagi kemudian tatkala ia meninggalkan Kartosuwirjo, dan bersama Daud Beureueh bergabung ke dalam RPI (Republik Persatuan Indonesia), sebagaimana yang akan kita lihat nanti.

Penentangan Kartosuwirjo terhadap langkah-langkah Aceh dapat dipahami dalam hubungan *realpolitik* dan latar belakang gerakan di kedua daerah tersebut. Sekalipun nyata bahwa para pemimpin di Jawa Barat memahami bahwa pembentukan kabinet NII mencerminkan pengakuan Daud Beureueh akan kepemimpinan Kartosuwirjo sebagai Imam atau Presiden NII, kabinet dan komposisi menteri-menterinya juga mengesankan ancaman Aceh terhadap peranan yang dimainkan Jawa Barat dalam Darul Islam. Hal ini, pertama, diperlihatkan oleh Daud Beureueh dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi wakil presiden, yakni orang nomor dua dalam seluruh gerakan Darul Islam. Kedua, kecurigaan pimpinan pusat NII juga diperkuat oleh kenyataan bahwa kabinet tersebut bersifat presidensial yang tidak mengenal jabatan perdana menteri. Ini

90. Hal ini diceritakan oleh Hasan Muhammad Tiro kepada redaktur *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis; lihat *Lembaga*, 18 Desember 1954, dikutip oleh *Kronik* 20, hal. 465.

berarti bahwa Aceh tidak mengakui Kepala Staf Umum Komandemen Tertinggi sebagai Perdana Menteri NII. Hal ini juga mengindikasikan gugatan Daud Beureueh bahwa dirinya lebih unggul daripada Kepala Staf Umum. Ketiga, pembentukan kabinet itu juga dilihat sebagai suatu serangan langsung terhadap Kartosuwirjo sendiri. Dalam kabinet Daud Beureueh itu Kartosuwirjo dilepas dari kementerian luar negeri, yang kini dipegang oleh Hasan Ali. Apakah I. Huda, menteri dalam negeri dalam kabinet Daud Beureueh, betul nama samaran Kartosuwirjo atau bukan, pengambilan portofolio luar negeri itu darinya tetap menyakitkan, sebab dilakukan tanpa konsultasi dengan dia. Akhirnya, pemimpin-pemimpin Aceh telah mengambil lebih dari sepertiga kursi dalam kabinet, lima dari empat belas, lebih banyak dari porsi mereka apabila jumlah itu dibagi rata di antara empat peserta: Aceh, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

Di atas segalanya, Daud Beureueh telah muncul sebagai ancaman potensial terhadap Kartosuwirjo dan pembantu-pembantunya yang selama ini memimpin gerakan Darul Islam. Bagi mereka pengangkatan diri sendiri oleh Daud Beureueh mengisyaratkan kekecewaan pribadi seorang pemimpin yang tidak ditempatkan secara wajar dalam organisasi pusat Darul Islam. Sebelum bergabung dalam Darul Islam, Daud Beureueh adalah seorang pemimpin yang populer dan seorang ulama yang disegani. Ia dihormati tidak saja di Aceh, akan tetapi juga di luar daerah tersebut. Pengakuan akan kepemimpinannya terlihat dalam Konferensi Ulama Seluruh Indonesia yang diadakan di Medan pada bulan April 1953 di mana ia telah diminta untuk mengetuainya. Dalam hal ini, bahkan Kartosuwirjo, yang lebih dianggap sebagai politisi daripada seorang ulama, tidak dapat disejajarkan dengan Daud Beureueh, apalagi anggota-anggota Komandemen Tertinggi seperti Agus Abdullah Sukunsari dan Setjoutomo yang tidak dikenal itu. Namun dalam Darul Islam, Daud Beureueh tidak mengenyam rasa hormat seperti yang diperolehnya di luar organisasi itu. Dalam versi organisasi Kartosuwirjo, Daud Beureueh diangkat sebagai panglima Komandemen Wilayah Aceh dengan pangkat kolonel. Pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada tahun 1960, padahal Aceh telah memutuskan hubungan dengan Jawa Barat karena bergabung ke dalam RPI. Dalam pangkat tersebut, kedudukan Daud Beureueh sejajar dengan Kahar Muzakkar, Agus Abdullah Sukunsari, dan Setjoutomo. Akan tetapi sebagai panglima Aceh,

dan dalam komunikasi dengan Kartosuwirjo, ia disubordinasikan kepada Kepala Staf Umum, yang oleh Kartosuwirjo dianggap sebagai Perdana Menteri NII.

Di lain pihak, perbedaan pendekatan antara Aceh dan Jawa Barat ada kaitannya dengan keadaan setempat. Keadaan di Jawa Barat telah memaksa pemimpin-pemimpin Darul Islam di sana untuk memusatkan diri pada kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, situasi di Aceh tidak memungkinkan penerapan cara seperti itu. Sebagaimana telah kita lihat dalam Bab sebelumnya, gerakan Darul Islam di Aceh sangat didukung oleh para ulama yang berfungsi sebagai penyalur dukungan rakyat. Wajar saja jika dalam keadaan demikian para ulama memberikan "warna" mereka pada gerakan tersebut, sehingga perlawanan mereka sering pula disebut sebagai pemberontakan ulama. Hal ini sedikit banyak ada kaitannya dengan pengajaran agama di Aceh yang pada umumnya terpusat pada fikih, sehingga para ulama lebih memperhatikan gagasan hukuman keagamaan daripada aspek-aspek keagamaan lainnya. Sejak kanak-kanak, orang Aceh telah diajarkan pahala, surga, dosa, dan neraka, serta korelasi di antara unsur-unsur tersebut. Konsep-konsep ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap gerakan Darul Islam di Aceh. Ajaran ini menyebabkan pimpinan Darul Islam menyusun organisasi mereka dan memerintah rakyat berdasarkan aturan-aturan Islam. Ajaran tersebut juga mempengaruhi tingkah laku para pemimpin serta pengikut mereka, dan mereka "dibimbing" untuk tidak bertindak sewenang-wenang agar dapat terlepas dari dosa dan neraka di hari kemudian. Dengan demikian gerakan Darul Islam dapat mempertahankan dukungan para ulama dan pengikut mereka, yaitu rakyat.

Keadaan di Aceh berbeda dari situasi di Sulawesi Selatan dan, terutama, Jawa Barat. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar menarik dukungan dengan memanipulasi adat atau tradisi lokal, yang pada gilirannya mengundang para ulama untuk melibatkan diri, selain karena perasaan kedaerahan mereka. Di sini Kahar Muzakkar memanfaatkan sistem solidaritas *sirik* (ikatan darah) dan *pesse* (kekerabatan), dengan mana orang Bugis secara tradisional menganggap suatu penghinaan terhadap seseorang sebagai nista bagi semua kerabatnya.⁹¹ Dengan meman-

91. Matulada, "Kahar Muzakkar, Profil Patriot Pemberontak", dalam Taufik Abdul-

faatkan tradisi ini Kahar Muzakkar berhasil memperoleh dukungan banyak ulama untuk gerakannya. Akan tetapi anggota-anggotanya kecewa terhadap sejumlah pemimpin yang gagal memberi teladan kepada para pengikut mereka. Keadaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak ulama tidak diberi posisi penting dalam organisasi, khususnya dalam struktur militer yang dikuasai para pejuang masa revolusi. Kahar Muzakkar sendiri bukanlah seorang ulama, dan ia, atau pemimpin-pemimpin inti lainnya, bukan pula muslim yang taat. Dalam keadaan serupa itu mudah saja bagi mereka untuk melanggar hukum agama sehingga mengurangi kredibilitas mereka di mata rakyat.⁹²

Bahkan di Jawa Barat, Kartosuwirjo gagal untuk menarik dukungan masal dari rakyat, sebab banyak ulama berpengaruh tidak mau mendukung gerakannya.⁹³ Jadi, masalah utama bagi para pemimpin Darul Islam tersebut bukanlah bagaimana memperoleh dukungan sukarela dari rakyat, melainkan bagaimana mempertahankan kehidupan gerakan mereka. Oleh karena itu penentangan terhadap kegiatan-kegiatan mereka harus dibasmi dengan segala risiko. Untuk maksud itu, senjata mereka yang paling utama adalah teror, dan sasaran mereka bukan hanya penduduk desa melainkan juga para ulama yang menentang mereka.⁹⁴ Akibat dari kebijaksanaan ini ialah, seperti dengan tepat dikatakan oleh seorang pengamat intern, "kecuali di beberapa desa kecil, rakyat di bagian tenggara Jawa Barat menjadi musuh Darul Islam".⁹⁵

Kartosuwirjo sendiri bukanlah seorang ulama dalam arti sebenarnya, dan pengetahuannya tentang Islam juga sangat terbatas. Pengaruhnya

lah, Aswab Mahasin, et al., *Manusia Dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 186-187.

92. Matalioe, *op. cit.*, *passim*, mengemukakan bahwa Kahar Muzakkar dan pembantu-pembantunya sering melanggar hukum Islam. Umpamanya, Kahar Muzakkar mempunyai sembilan istri, yang bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkan seorang laki-laki memiliki paling banyak empat istri, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

93. *Propinsi Djawa Barat*, hal. 215.

94. Karena menolak bergabung dengan Darul Islam, Kiai Jusuf Tauziri telah dijadikan sasaran utama dan, dalam masa 1949-1958, diserang lebih dari empat puluh kali oleh Darul Islam; lihat Hiroko Horikoshi, "The Dar Ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process", *Indonesia*, 20 (Oktober 1975), hal. 83.

95. Laporan Pohan kepada Daud Beureueh, *op. cit.*

hanya dirasakan oleh murid-muridnya sendiri di Institut Suffah. Di luar itu, ia terpaksa mengandalkan pengaruh ayah mertuanya, seorang ulama terkenal di daerah Tasikmalaya. Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa Darul Islam di Jawa Barat tidak mendapat dukungan ulama sama sekali. Dalam kenyataannya memang terdapat beberapa ulama yang memegang posisi penting dalam organisasi. Ada Menteri Kehakiman Dewan Imamah Kiai Gozali Tusi, Menteri Pertahanan Kamran, dan wakilnya, Oni Mandalatar, serta Menteri Dalam Negeri dan Keuangan Sanusi Partawidjaja. Selain mereka, hampir tidak ada seseorang yang menonjol yang pantas disebut ulama. Mereka mudah dikenali dari korespondensi baik dengan Daud Beureueh maupun Kahar Muzakkar. Dalam korespondensi itu mereka hanya mampu mengutip ayat-ayat Quran yang mudah, dan sering pula mengulang-ulang ayat yang sama. Dalam kelompok ini termasuk para pemimpin seperti Agus Abdullah Sukunsari, yang tergantung pada pengaruh ayahnya, Kiai Sukunsari dari Cirebon.

Kurangnya dukungan rakyat terhadap Darul Islam di Jawa Barat disebabkan oleh kenyataan bahwa para ulama dalam kepemimpinannya gagal memberikan warna keagamaan terhadap gerakan itu. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya hubungan yang tidak lancar di kalangan anggota NII, antara pemimpin-pemimpin yang ulama dan bukan ulama dengan para pengikut mereka. Berbeda dari pemimpin Aceh, para ulama yang ada dalam kepemimpinan Darul Islam di Jawa Barat pada umumnya adalah penganut Sufi. Di sana konsep-konsep pahala, surga, dosa, dan neraka, tidak dapat dimanfaatkan seintensif seperti dalam masyarakat yang didominasi ajaran fikih, sebab ajaran Sufi mendorong, sejauh menyangkut hubungan antara guru dan murid, kepatuhan kepada guru. Jadi, ketidakpatuhan kepada guru adalah dosa, dan akan menyebabkan seseorang gagal untuk mencapai tujuannya: menemukan jalan Allah. Hal ini karena, pertama, konsep-konsep fikih hampir sama sekali diabaikan, sehingga tidak terlalu terserap dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat. Dengan kata lain, konsep dosa dan neraka tidak berpengaruh dalam masyarakat Jawa Barat, kecuali Banten, sedalam pada masyarakat Aceh. Malah kenyataan bahwa anggota-anggota Darul Islam di Jawa Barat merupakan campuran dari para petani yang baik, pemimpin politik dan gerilya yang ambisius, dan bandit-bandit yang

profesional,⁹⁶ telah menghambat pelaksanaan konsep itu.

Namun demikian keputusan untuk berpegang pada kebijaksanaan yang mengabaikan cara-cara perjuangan lain selain kekerasan, tidak semua merupakan akibat dari kurangnya dukungan rakyat. Lebih dari itu, dipergunakannya kebijaksanaan seperti itu haruslah dilihat sebagai tanda perubahan dalam kepemimpinan Darul Islam di Jawa Barat. Perubahan itu agaknya berpunca pada perjuangan perebutan kekuasaan dalam gerakan tersebut. Kahin mencatat bahwa pada tahun 1949 kekuasaan Kartosuwirjo dan ulama-ulama dalam kepemimpinan awal Darul Islam telah direbut oleh "para pengikut yang alim dan tidak alim, tidak berperikemanusiaan, kadang-kadang fanatik". Sejak itu kepemimpinan didominasi oleh kelompok kedua, yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai latar belakang dan generasi yang lebih muda dari Kartosuwirjo. Mereka meliputi brandalan serta "pemimpin-pemimpin politik dan gerilya yang ambisius dengan perhatian terhadap Islam yang lebih kecil daripada kepentingan mereka sendiri".⁹⁷ Di antara mereka adalah Agus Abdullah Sukunsari, Setjoutomo, dan Muwahhid. Kemudian, ketika dua dari orang-orang kuatnya, Kamran dan Oni Mandalatar, tewas dalam pertempuran dengan pasukan pemerintah pada awal tahun 1950,⁹⁸ Kartosuwirjo benar-benar kehilangan kendali atas kepemimpinan itu.

Walaupun begitu, para pemimpin dari kelompok muda ini cukup cerdik untuk tidak menyingkirkan Kartosuwirjo dan para pemimpin yang saleh lainnya. Sebaliknya, Kartosuwirjo malah tetap dipertahankan sebagai Imam NII, namun kini kekuasaannya jauh berkurang. Mungkin sebagai suatu selubung, Dewan Imamah yang didirikan oleh Kartosuwirjo itu dibubarkan dan diganti dengan Komandemen Tertinggi, sementara kekuasaan Imam didelegasikan kepada Kepala Staf Umum dan anggota-anggota Komandemen Tertinggi. Dalam struktur yang demikian, Kartosuwirjo barangkali tidak lebih daripada seorang "tahanan" yang dikuasai oleh anggota Komandemen Tertinggi. Pemimpin-pemimpin lain di luar lingkaran ini agaknya tidak menyadari hal itu, antara lain karena

96. George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970), hal. 330.

97. *Ibid.*

98. *Propinsi Djawa Barat*, hal. 233.

Kartosuwirjo sendiri memang jarang menampilkan diri. Dalam hal ini, anggota-anggota Komandemen Tertinggi mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa sang Imam adalah seorang pemimpin yang menyukai mistik. Bawahan-bawahannya mereka cegah untuk menemuinya hanya dengan mengatakan bahwa Imam sedang bersemadi.

Interpretasi ini dapat menjelaskan beberapa misteri -- tidak hanya yang berkaitan dengan hubungan antara Jawa Barat dengan Aceh dan Sulawesi Selatan, melainkan juga rahasia Kartosuwirjo dan gerakan Darul Islamnya di Jawa Barat itu. Pertama, cerita-cerita mengenai Kartosuwirjo adalah sangat kontroversial. Kadang-kadang dia digambarkan sebagai seorang yang mau menang sendiri dan bertabiat keras. Dia juga dikatakan sebagai mempunyai bakat pemimpin dan, karena itu, selalu menghendaki posisi yang memimpin. Sebagai orang yang keras, maka ia ditakuti oleh para pengikutnya, dan kemauannya harus dituruti, bila tidak, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Akan tetapi dalam sidang pengadilannya dilaporkan bahwa ia mengaku telah gagal mengendalikan bawahannya dan mencegah mereka dari tindakan kejahatan.⁹⁹ Apabila kita sependapat bahwa Darul Islam di Jawa Barat sangat menggantungkan diri pada teror, logikanya adalah bahwa Kartosuwirjo sering gagal mengawasi para pengikutnya atau mereka tidak mematuhi. Hal ini menyingkapkan bahwa para pengikutnya sebenarnya tidak takut kepadanya. Atau, haruskah kita tafsirkan bahwa ia dengan sengaja membiarkan terjadinya teror, sekalipun ia sadar bahwa cara demikian tidak akan menghasilkan dukungan rakyat bagi gerakannya? Jika memang demikian halnya, maka ia tidak dapat dipandang sebagai politisi yang arif, atau pemimpin yang pantas memegang posisi penting dalam sebuah partai berskala nasional seperti PSII. Saya lebih senang untuk berpendapat bahwa ada suatu "mata rantai" yang hilang dalam cerita-cerita kontroversial tentang Kartosuwirjo, dan mata rantai itu tidak lain daripada kelompok perwira yang menguasai tokoh itu.

Misteri yang kedua adalah bahwa para anggota Komandemen Tertinggi dengan sengaja mencegah utusan-utusan Daud Beureueh dan Kahar Muzakkar untuk bertemu dengan Kartosuwirjo. Dengan berbuat demikian, mungkin mereka berharap bahwa pemimpin kedua daerah itu tidak akan mengetahui situasi yang sesungguhnya dalam organisasi pusat.

99. Pinardi, *op. cit.*, *passim*.

Para anggota Komandemen Tertinggi khawatir bahwa Aceh dan Sulawesi Selatan akan memisahkan diri apabila pimpinan di kedua daerah tersebut mengetahui bahwa adalah anggota Komandemen Tertinggi, dan bukan Kartosuwirjo, yang menguasai gerakan mereka. Di lain pihak, perlakuan buruk yang dialami utusan mereka di Jawa Barat memang membuat berang pemimpin-pemimpin daerah, setidaknya di Aceh. Kegagalan utusan mereka yang berulang-ulang untuk bertemu dengan Kartosuwirjo memang menimbulkan kecurigaan di Aceh tentang nasib sang Imam, apakah ia masih hidup atau sudah mati.¹⁰⁰ Namun kenyataannya adalah bahwa baik Aceh maupun Sulawesi Selatan tidak memutuskan hubungan dengan Jawa Barat. Bagi Daud Beureueh maupun Kahar Muzakkar, hubungan dengan Jawa Barat pada waktu itu adalah teramat penting. Mereka membutuhkan hubungan tersebut tidak hanya untuk menjamin dukungan asing tetapi juga untuk kepentingan di dalam negeri. Dalam hal yang terakhir ini, hubungan dengan Jawa Barat diperlukan untuk memberi kesan kepada para pengikut mereka bahwa di dalam melawan Jakarta mereka tidaklah sendirian, dan bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari suatu perlawanan yang lebih luas. Kendati demikian mereka tidak dapat mencegah tegangnya hubungan itu.

100. Laporan Pohan kepada Kartosuwirjo, *op. cit.*

Bab VII

Menuju Penyelesaian

PEMANDANGAN DI sebuah kampung sekitar dua puluh kilometer sebelah timur laut Bireuen sangat damai tatkala dua kesebelasan sepakbola setempat sedang bertanding. Waktu itu pertengahan tahun 1957, yakni tidak lama setelah diberlakukannya gencatan senjata. Di pintu masuk lapangan yang semula sawah itu, beberapa tentara Darul Islam bertugas menjaga keamanan, sementara di dalam lapangan tampak masih banyak lagi anggota TII yang bercakap-cakap dengan penonton lainnya, termasuk beberapa orang polisi pemerintah. Keadaan di sana tidak saja damai, melainkan juga riang gembira. Itulah untuk pertama kalinya sejak pemberontakan meletus pada bulan September 1953 penduduk desa dapat bergembira ria tanpa harus khawatir akan adanya operasi militer atau tembak-menembak. Perasaan sedemikian tidak hanya dialami orang kampung saja. Di banyak kota, Darul Islam telah membuka kantor-kantor perwakilannya, sementara para anggotanya yang tidak bersenjata kini dengan bebas dapat memasuki daerah perkotaan. Beberapa pemimpin puncak TII bahkan terlihat mondar-mandir dengan kendaraan militer pemerintah di Kutaraja. Sebagai tambahan atas keadaan yang damai ini, di beberapa tempat juga terlihat sejumlah anggota Darul Islam membantu pasukan zeni pemerintah yang sedang memperbaiki jalan.

"Konsep Prinsipil Bijaksana"

GENCATAN SENJATA itu sendiri sebenarnya merupakan hasil dari adu kepentingan politik kedua belah pihak. Gencatan senjata ini bukanlah hasil kesepakatan yang lahir berkat kerendahan hati pihak-pihak yang bertentangan itu sebagaimana yang mungkin dilihat oleh pengamat luar. Kenyataan bahwa gencatan senjata tersebut baru tercapai setahun

setelah Sjammaun Gaharu kembali ke Aceh -- yang merupakan suatu isyarat pertama yang jelas akan adanya perubahan kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap daerah ini -- menunjukkan bahwa konflik itu membutuhkan beberapa waktu untuk dapat meleraikan. Sekalipun sudah ada kecenderungan bahwa Pemerintah Pusat akan mengubah kebijaksanaan yang menyangkut keamanan dalam negeri begitu Kabinet Burhanuddin berkuasa, keadaan politik sama sekali tidak mendorong rakyat Aceh mengurangi rasa permusuhan mereka. Hal ini pertama-tama disebabkan oleh kekecewaan kaum pemberontak akan hasil pemilihan umum yang mengakibatkan turunnya Kabinet Burhanuddin, dan kembali berkuasanya Ali Sastroamidjojo. Di Aceh perubahan ini dipandang sebagai isyarat bahwa Pemerintah Pusat akan meninggalkan kebijaksanaan lunak yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Agaknya masih cukup segar dalam benak para pemimpin pemberontakan bahwa justru selama masa pemerintahannya yang pertama, Perdana Menteri Ali telah bersikap sangat keras terhadap mereka. Dari fakta ini mereka yakin bahwa pemerintah akan mengambil garis yang serupa lagi. Pengangkatan Gaharu sebagai komandan resimen di Kutaraja juga tidak membantu membangun citra baru pemerintah di Aceh, malah sebaliknya, memperkuat antipati di kalangan rakyat terhadap Kabinet Ali II. Kembalinya Gaharu justru menimbulkan kekawatiran besar di kalangan pemimpin NBA, sebab hal ini akan memberi kesempatan kepada Gaharu untuk melakukan balas dendam terhadap para pemimpin PUSA yang telah menghinanya dan menyebabkan dia meninggalkan Aceh pada tahun 1946.

Tetapi dalam kenyataannya, karena terikat pada "politik keamanan yang integral" Nasution, Gaharu tidak berbuat demikian,¹ kendatipun ia juga meningkatkan operasi-operasi militer di Kabupaten Aceh Besar demi mengamankan Kutaraja dari serangan Darul Islam. Namun sebagaimana halnya dengan perwira yang digantikannya, Gaharu segera menyadari bahwa situasi benar-benar buntu. Operasi-operasi militer di sekitar Kutaraja memang berhasil mengurangi tekanan NBA di kabupaten itu, tetapi situasi di kabupaten-kabupaten lain segera menjadi lebih buruk. Dalam menghadapi Gaharu, resimen TII di Aceh Besar telah diinstruksikan untuk menghindari pertempuran dengan pasukan

1: Wawancara dengan Sjammaun Gaharu, Medan, 28 Juni 1973.

pemerintah, sementara kegiatan dan tekanan NBA dipusatkan terutama di Aceh Timur dan Aceh Barat.² Serangan-serangan terhadap pasukan pemerintah dilaporkan terjadi di Kabupaten-kabupaten Aceh Utara, Timur, Barat dan Tengah selama lima bulan pertama kehadiran Gaharu. Akibatnya Kolonel Simbolon mendesak Jakarta supaya meningkatkan jumlah pasukan di Aceh dari lima menjadi sepuluh batalion.³ Selain itu NBA juga menggagalkan taktik Gaharu yang menghadapkan pasukan yang terdiri atas prajurit-prajurit Aceh dengan TII, karena pemberontak menghindari kontak senjata dengan mereka dan memusatkan pencegahan terhadap pasukan brimob yang tidak mempunyai anggota dari suku Aceh. Kebuntuan situasi itu juga disebabkan oleh fakta bahwa pasukan pemerintah juga enggan memerangi pemberontak, barangkali karena alasan-alasan keagamaan. Di Aceh Timur, umpamanya, resimen TII di sana membina hubungan baik dengan batalion Sriwijaya dari Sumatera Selatan untuk mencegah terjadinya pertempuran, dan kedua pasukan biasanya saling memberikan informasi mengenai gerakan mereka masing-masing.⁴ Keadaan demikian memang menyulitkan Gaharu untuk menggepung kaum pemberontak.

Memang pemerintah kurang beruntung. Sebelum mampu mengatasi pemberontakan di Aceh, pemerintah pun harus menghadapi front lain yang serius dan meluas di Sumatera Utara, di mana suhu politik berangsur-angsur bergerak mencapai titik didih. Kabut tegang yang telah menyelimuti Medan sejak paruh kedua tahun 1956 melibatkan Panglima TT-I Kolonel Simbolon. Sejak pengangkatannya kembali sebagai KSAD pada bulan Oktober 1955, Mayor Jenderal Nasution sudah merencanakan untuk memindahkan Simbolon dari Medan. Rencana Nasution ini berkaitan dengan programnya untuk mengatur kembali penempatan sebagian besar personalia tinggi Angkatan Darat, termasuk semua panglima daerah. Sekilas pandang hal ini dapat dibenarkan mengingat kebanyakan perwira yang bersangkutan telah berada pada pos mereka sejak tahun 1950. Akan tetapi tidak dapat dikatakan pula bahwa Nasution benar-benar jujur dalam menyusun rencana tersebut, khususnya

2. Wawancara dengan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973.

3. *Peristiwa*, 12, 19 Juni, 21, 30 Agustus, dan 8 Oktober 1956.

4. Wawancara dengan Haji Hasanuddin (Sorri Siregar), bekas Komandan Resimen NBA di Sumatera Timur, Kuala Simpang, 4 Desember 1975.

dalam kasus Simbolon. Simbolon agaknya telah menjadi saingan Nasution untuk jabatan kepala staf dan, selain itu, terdapat sejumlah ketidaksepakatan di antara kedua perwira ini. Oleh karenanya Nasution harus berpikir dua kali sebelum memindahkan Simbolon dari Sumatera Utara. Namun keinginannya untuk memperbaiki hubungannya dengan Soekarno, yang sangat tidak senang akan Simbolon, akhirnya mendorong Nasution untuk memutasikan saingannya itu.⁵

Di lain pihak, Simbolon sangat menentang rencana Nasution. Dia sepenuhnya sadar bahwa rencana tersebut akan mengurangi pengaruhnya dan, sebaliknya, memperkuat posisi Nasution. Oleh karena itu dia tidak akan meninggalkan Sumatera Utara kalau sekiranya hal itu dapat dihindarkannya. Ada tiga alasan mengapa ia bersikap demikian. Pertama, kepindahan itu akan menyebabkan dia terpisah dari sumber dukungannya. Kedua, karena kabarnya dia akan ditempatkan pada jabatan yang kurang penting di Markas Besar Angkatan Darat. Ketiga, ada kemungkinan bahwa kepala stafnya, Letnan Kolonel Djamin Gintings yang berasal dari suku Karo, akan diangkat untuk menggantikannya. Kemungkinan yang terakhir ini sangat tidak menyenangkan Simbolon, karena hubungan antara suku Batak dan Karo sangat tidak harmonis. Jadi, penggantian Simbolon dengan Gintings akan merugikan kepentingan orang-orang Batak di propinsi itu, padahal mereka adalah basis etnis pendukung Simbolon.

Adanya penentangan yang kuat dari Simbolon itu menyulitkan Nasution untuk memindahkannya. Tetapi kesulitan itu hanya bertahan sampai akhir tahun 1956 ketika surat kabar lokal, *Waspada*, menyingkapkan keterlibatan Simbolon dalam kegiatan penyelundupan besar-besaran. Diberitakan oleh harian itu bahwa melalui kerja sama dengan bawahannya dan sebuah perusahaan Cina, Simbolon menyelundupkan ribuan ton karet dan kopi, bernilai lebih dari Rp 90 juta, dari sebuah pelabuhan kecil Sumatera Timur, Teluk Nibung.⁶ Dikatakan bahwa penyelundupan itu dilakukan karena keprihatinan pimpinan militer setempat akan keadaan kesejahteraan anak buah yang disebabkan oleh tidak memadainya dana dari Jakarta. Karena itu keuntungan akan dibagi-bagikan kepada

5. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968), hal. 500.

6. *Merdeka*, 16 September 1956.

semua sub-komando di TT-I, termasuk Aceh dan Sumatera Tengah, untuk membiayai perbaikan asrama dan kesehatan.

Akan tetapi, tampaknya, penyelundupan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk perbaikan kesejahteraan prajurit. Dengan menilai penolakan Simbolon untuk dipindahkan, ada beberapa alasan yang meyakinkan bahwa penyelundupan tersebut hanya merupakan usaha terakhir sang panglima untuk memperoleh dukungan dari divisinya, dengan harapan bahwa hal ini akan menyulitkan Markas Besar Angkatan Darat untuk memindahkannya.⁷ Di lain pihak, dikatakan pula bahwa kegiatan penyelundupan itu telah menyusahkan Simbolon sendiri. Hal ini pertama-tama karena rusaknya reputasi Simbolon di luar lingkaran militer sebagai akibat dari kerja samanya dengan para pengusaha Cina. Kedua, pembagian keuntungan yang tidak merata menyebabkan hubungan Simbolon dengan bawahannya jadi tersendat. Hal ini khususnya terjadi pada hubungannya dengan Gaharu, yang memang tidak menyukai kebijaksanaan Simbolon di Aceh, dan karena itu diam-diam mendukung rencana Nasution untuk menarik Simbolon dari Sumatera Utara. Kedua faktor itu sudah tentu menjadi alasan pula bagi pimpinan Angkatan Darat untuk mengamankan wibawa mereka dengan mendesak Simbolon agar menyerahkan kedudukannya kepada Djamin Gintings.

Dengan meningkatnya tekanan dari Markas Besar pada akhir November, maka Simbolon, yang ketika itu sedang berada di Jakarta, segera menyatakan persetujuannya untuk meninggalkan komandonya. Akan tetapi dia sebenarnya sama sekali tidak mempunyai maksud untuk berbuat demikian. Karena diketahuinya cukup banyak perwira baik di tingkat nasional maupun daerah yang bermusuhan dengan Nasution,⁸ Simbolon sebaliknya malah bermaksud menantang Nasution. Dalam komandonya sendiri Simbolon merasa bahwa ia didukung oleh kebanyakan perwira, termasuk Letnan Kolonel Ahmad Husein, komandan resimen di Sumatera Tengah. Segera setelah tiba kembali dari Jakarta, Simbolon pun menyelenggarakan konferensi perwira-perwira tamatan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang ada dalam komandonya. Konferensi yang berlangsung di Medan pada tanggal 4 Desember itu bertujuan untuk "merumuskan gagasan tentang struktur negara",

7. Feith, *op. cit.*, hal. 500.

8. *Ibid.*, hal. 525.

yang kemudian terkenal sebagai "Idee 4 Desember". Perwira-perwira ini merekomendasikan suatu perubahan revolusioner dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah-daerah di lingkungan TT-I.⁹

Dalam pada itu Gaharu menemukan dirinya berada dalam keadaan serba sulit di Aceh. Di satu pihak dia mendukung rencana Nasution untuk memindahkan Simbolon, sebab itulah salah satu syarat yang diajukannya sebelum ia bersedia dipindahkan ke Kutaraja. Oleh karena itu adalah wajar baginya untuk tidak mendukung oposisi Simbolon terhadap Nasution. Akan tetapi di lain pihak, apakah tidak ada kemungkinan sama sekali bagi atasan langsungnya itu untuk menang melawan Nasution? Bila kemungkinan itu muncul, maka apa yang akan terjadi atas dirinya? Tentu saja Gaharu harus mempersiapkan dirinya terhadap kemungkinan seperti itu, sebab ia belum pernah mendukung Nasution atau pun menentang Simbolon secara terbuka. Di samping itu dia juga tertarik akan Idee 4 Desember, sebab gagasan tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk membangun ekonominya.¹⁰ Oleh karena itu dia memenuhi panggilan Simbolon untuk menghadiri rapat para perwira yang diadakan di Medan pada tanggal 16 Desember. Dalam rapat ini perwira-perwira tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap Idee 4 Desember dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Simbolon. Kepada Simbolon mereka juga menjanjikan "solidaritas" dan "semangat revolusioner". Karena mempercayai janji ini, maka pada tanggal 22 Desember Simbolon "melaksanakan" Idee 4 Desember itu dengan memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat. Namun para perwiranya hampir tidak memberikan solidaritas apa pun kepada Simbolon tatkala Nasution bereaksi secara cepat dengan memecatnya, dan memisahkan resimen-resimen di Aceh dan Sumatera Tengah dari pengaruh Medan.¹¹

9. *Waspada*, 16 dan 17 Januari 1957.

10. Cukup banyak bukti yang memperlihatkan bahwa Gaharu adalah salah seorang di antara perwira yang bersikeras mempertahankan hak daerah untuk memperoleh bagian yang wajar dari pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah dukungannya untuk melanjutkan perdagangan barter di Aceh sampai akhir tahun 1958, sekalipun ada instruksi dari Jakarta agar ia menghentikannya.

11. Untuk studi yang mendalam tentang politik militer di Sumatera Utara dalam masa ini, lihat John R.W. Smail, "The Military Politics of North Sumatra: December 1956-October 1957", *Indonesia* 6 (Oktober 1968), terutama hal. 141-156.

Sejauh menyangkut Aceh, tindakan Simbolon dan reaksi Jakarta ini telah menimbulkan berbagai perubahan dalam format politik secara menyeluruh. Ketegangan antara Jakarta dan Medan bukan hanya menyingkirkan setiap rintangan bagi rakyat Aceh untuk memperoleh kembali kepemimpinan militer dan sipil di daerah mereka, sesudah kehilangan keduanya pada tahun 1950, melainkan juga membuka jalan bagi penyelesaian pemberontakan yang telah berusia tiga tahun itu. Dengan munculnya ketidakpastian mengenai nasib TT-I menyebabkan Gaharu mengambil keuntungan dengan jalan memutuskan hubungan Kutaraja dengan Medan, serta mengamankan kedudukannya sendiri. Sekalipun merupakan salah seorang perwira yang menyatakan menerima Idee 4 Desember itu, sudah sejak lama ia memimpikan adanya keadaan di mana Aceh bebas dari Medan. Bersama beberapa perwira lainnya, ia membersihkan diri dengan menyatakan bahwa tindakan Simbolon tersebut merupakan penafsiran yang salah dari pernyataan para perwira. Untuk memutuskan hubungan dengan Medan, secara demonstratif ia melepaskan tanda kesatuan TT-I dari resimennya. Di lain pihak, kini Nasution berada pada posisi yang tidak memberinya pilihan lain selain daripada menerima kenyataan ini, kalau ia memang ingin mengamankan loyalitas Gaharu. Dengan alasan demikian, ia setuju membebaskan Aceh dari ikatan militer dengan Medan dan menempatkannya langsung di bawah komando Markas Besar Angkatan Darat. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember Nasution menyetujui pembentukan Komando Daerah Militer Aceh (KDMA).¹²

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pemerintah Pusat di Sumatera Utara serta gejala keresahan di bagian-bagian lain Sumatera dan Sulawesi memaksa pemerintah untuk berusaha keras memenangkan dukungan rakyat, terutama di daerah-daerah yang sedang bergolak. Dalam hal Aceh, dengan mulai meningkatnya suhu politik Sumatera Utara pada bulan Juli 1956, pemerintah segera membersihkan jalan bagi pembentukan kembali propinsi Aceh yang telah banyak dibicarakan selama ini. Hal ini sudah pasti merupakan tugas yang sukar untuk Perdana Menteri Ali, karena oposisi yang kuat justru datang dari partainya sendiri, PNI. Kita telah melihat sebelumnya bahwa partai ini, bersama PKI, menolak setiap langkah untuk memberikan status propinsi kepada

12. *Dua Windbu Kodam-1/Iskandar Muda*, hal. 181.

Aceh. Akan tetapi pada akhirnya Ali berhasil meyakinkan partainya agar mencabut penolakan itu, sehingga tinggalah PKI sendiri sebagai penentang. Oleh karena itu, pada akhir Oktober Parlemen menyetujui rencana kabinet untuk membentuk sebuah propinsi baru di ujung Sumatera, dan membagi Kalimantan ke dalam tiga propinsi. Namun Kabinet tidak dapat membentuk propinsi-propinsi tersebut sampai Presiden menandatangani keputusan Parlemen itu. Satu bulan itu telah lewat sejak Parlemen menyetujui rencana itu, akan tetapi Presiden belum juga memberikan persetujuannya. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember, barangkali didesak oleh peristiwa Simbolon, Presiden memberikan persetujuannya untuk membentuk propinsi Aceh.

Setelah itu masih ada satu persoalan penting lainnya untuk diputuskan kabinet: siapa yang harus diangkat menjadi gubernur propinsi Aceh yang baru? Dengan memberikan status propinsi kepada Aceh, pemerintah sebenarnya telah tunduk kepada tuntutan rakyat Aceh sebagai tukaran bagi kesetiaan mereka dalam krisis yang baru. Namun begitu, tindakan ini tentu akan kurang dihargai rakyat Aceh jika pemerintah tidak menempatkan seseorang yang disukai mereka pada kedudukan itu. Sesungguhnya ini merupakan tuntutan yang enggan dipenuhi oleh pimpinan nasional. Akan tetapi tidak ada alternatif lain bagi kabinet jika memang ingin memisahkan Aceh dari iklim politik yang sedang mendidih di bagian-bagian lain Sumatera.

Menghadapi situasi yang sukar itu, kabinet akhirnya menemukan tiga calon Aceh untuk jabatan tersebut: Ali Hasjmy, Zainal Abidin, dan Abdul Wahab Seulimeum. Ali Hasjmy ketika itu adalah anggota PSII dan pegawai senior Kementerian Sosial di Jakarta. Karena keterlibatannya dalam persiapan pemberontakan, Hasjmy ditahan beberapa lama di Sumatera Timur, sebelum dipindahkan ke Jakarta. Calon kedua, Zainal Abidin, adalah salah seorang dari sedikit dokter yang dimiliki Aceh. Waktu itu ia menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan di Kutaraja. Dia adalah seorang pemimpin PSII cabang Aceh dan mempunyai hubungan yang erat dengan Front Pemuda Aceh yang bersimpati pada pemberontak. Calon terakhir, Abdul Wahab, tidak lain daripada Ketua PUSA. Ia meninggalkan Aceh untuk pergi ke Mekah kira-kira tiga bulan sebelum pemberontakan meletus, sehingga tidak terlibat di dalamnya secara fisik. Tetapi tidak diragukan bahwa ia ikut mengambil bagian dalam persiapan pemberontakan, atau paling kurang sangat mengetahuinya. Kolonel Sim-

bolon ingin menangkapnya tatkala ia kembali dari Mekah pada tahun 1956, tetapi demi "politik keamanan", Nasution membelanya dan malah sebaliknya mengundang Abdul Wahab datang ke Jakarta. Di sini Abdul Wahab diangkat sebagai pegawai tinggi di Kementerian Agama.

Dengan latar belakang yang demikian, maka tampak bahwa baik kabinet maupun panglima komando militer setempat sama-sama tidak puas akan ketiga calon itu. Akan halnya Gaharu, ia menginginkan seorang gubernur yang cakap dalam pemerintahan daerah dan dapat bekerja sama dengannya. Baginya seorang *ulebalang* adalah calon yang paling tepat. Oleh karena itu ia menyarankan agar pemerintah mengangkat Teuku Idris sebagai gubernur. Teuku Idris memang seorang pamong praja kolonial yang berpengalaman dalam pemerintahan Belanda dan bekas wedana Bireuen pada masa Jepang. Namun Pemerintah Pusat tidak menyetujui usul itu, dan memberitahukan Gaharu bahwa Idris tidak dapat dipertimbangkan karena keterkaitannya dengan Nefis (dinas rahasia Angkatan Darat Belanda) di Medan pada masa revolusi.¹³ Setelah menolak calon Gaharu, Jakarta mau tidak mau harus mempercayai Ali Hasjmy, sekalipun tokoh ini pernah terlibat dalam persiapan pemberontakan. Agaknya pemerintah menghendaki seorang pemimpin yang populer, tetapi tidak terlalu dekat dengan pemberontak, dan harus mampu melindungi kepentingan Pemerintah Pusat.

Andaikata jauhnya hubungan dengan PUSA merupakan pertimbangan satu-satunya, mungkin calon untuk posisi itu yang paling baik bagi Jakarta adalah Zainal Abidin. Satu-satunya kekurangan yang dimiliki Zainal Abidin adalah bahwa ia tidak sepopuler Abdul Wahab atau Hasjmy. Di lain pihak Pemerintah Pusat sangat mencurigai Abdul Wahab, sebab ia adalah Ketua PUSA dan senantiasa dekat dengan Daud Beureueh. Seperti Abdul Wahab, sampai batas-batas tertentu Hasjmy juga terlibat dalam pemberontakan, tetapi, berbeda dari Abdul Wahab, Hasjmy tidak selalu berhubungan baik dengan Daud Beureueh. Konflik dengan Daud Beureueh pada masa revolusi dan ambisi pribadinya untuk menjadi salah seorang pemimpin utama di daerah itu, merupakan dua faktor yang menjauhkannya dari Masyumi, dan mendorongnya untuk mendirikan cabang PSII setempat sekaligus menjadi pemimpinnya.

13. Wawancara dengan Sjammaun Gaharu, Kutaraja, 5 Juli 1973.

Sudah pasti latar belakang ini sejalan dengan keinginan para pemimpin pusat yang yakin bahwa dengan latar belakang demikian Hasjmy akan menjadi gubernur yang baik untuk Aceh.¹⁴

Sebagai kelanjutan dari pembentukan Propinsi Aceh dan KDMA, di samping karena khawatir bahwa Simbolon, dalam upaya memperkuat dirinya, akan bekerja sama dengan Daud Beureueh, pada akhir Desember 1956 Sjammaun Gaharu mengambil langkah-langkah untuk membina hubungan pribadi dengan pimpinan pemberontak. Karena keadaan di Medan masih membingungkan, sebab Nasution belum dapat secara sekaligus membersihkan semua unsur pro-Simbolon, maka dalam pendekatan-pendekatan awalnya Gaharu mencoba untuk menimbulkan perasaan propinsialisme di kalangan pemimpin-pemimpin Aceh. Di mana-mana dia berbicara tentang masa depan yang baik bagi Aceh, dan memperteguh rasa kesukuan mereka. Dia menyingkapkan ambisinya untuk "menjadikan Resimen I sebagai suatu resimen kebanggaan Aceh", yang tidak lagi tergantung pada Medan. Dengan meminta mereka untuk menyimak langkah-langkahnya, dia mendesak agar mereka membantunya mewujudkan pembangunan kembali Aceh.¹⁵ Tetapi, pada tahap ini, ia tidak memberi gagasan yang jelas tentang bagaimana para pemberontak itu dapat membantunya. Barulah kemudian, ketika hubungan itu telah terbentuk dan Pemerintah Pusat sudah berhasil menguasai kembali komando militer di Sumatera Utara, gagasan Gaharu mulai mempunyai bentuk yang jelas. Pada bulan Februari 1957, ia mengumumkan rumusan untuk mengakhiri pemberontakan secara damai. Ia menamakan gagasannya: Konsepsi Prinsipil Bijaksana, yang berarti bahwa dengan "bijaksana" Gaharu menawarkan kesempatan kepada para pemberontak untuk "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi", seraya tetap mempertahankan "prinsip" pemerintah untuk menggunakan kekuatan di mana perlu.¹⁶

14. Dalam sidang kabinet diberitakan bahwa sepuluh orang menteri memberikan suara kepada Ali Hasjmy, sementara hanya enam mendukung Abdul Wahab Seulimeum, dan tiga menteri untuk Zainal Abidin; lihat *Peristiwa*, 3 Februari 1957.

15. Lihat surat tulisan tangan Sjammaun Gaharu kepada para pemimpin NBA, bertanggal Kutaraja, 30 Desember 1956.

16. Lihat "Penjelasan Peristiwa Pemberontakan Atjeh", sebuah penjelasan yang distensil tentang Konsepsi Prinsipil Bijaksana, dikeluarkan oleh Komandan KDMA, tak bertanggal (Februari 1957?). Dalam bahasa yang sederhana, Gaharu sering menggambarkan kebijaksanaannya sebagai "menawarkan tangan kanan pemerintah untuk

Konsepsi ini disetujui Nasution pada bulan Januari, dan Nasution pun mendukung langkah-langkah Gaharu untuk berunding secara resmi dengan pemimpin-pemimpin NBA.¹⁷

Akan tetapi konsepsi itu justru menimbulkan amarah Daud Beureueh. Di matanya konsepsi itu tidak menawarkan suatu apa pun kecuali penghentian pemberontakan. Ia tidak menyukai konsepsi itu sebab mengandung ancaman tersembunyi dalam arti bahwa Gaharu, bila perlu, akan menggunakan kekuatan agar konsepsi itu berhasil. Daud Beureueh menghendaki agar sebelum penyelesaian dapat dicapai, pemerintah lebih dahulu harus menerima kenyataan bahwa dia telah memproklamasikan Aceh sebagai suatu negara bagian -- yaitu dalam kerangka sistem federal -- dan bukan sebagai suatu propinsi.¹⁸ Sekalipun demikian, dia mengizinkan kabinetnya membahas konsepsi itu lebih lanjut serta meneruskan pembicaraan informal dengan Gaharu dan Gubernur Ali Hasjmy yang baru saja dilantik. Sikap Daud Beureueh ini menghasilkan Perjanjian Lam Teh, yang diadakan di kampung Lam Teh dekat Kutaraja, pada pertengahan April 1957. Dalam perjanjian tersebut, Gaharu, Hasjmy, dan Kepala Polisi Muhammad Insja, di pihak pemerintah, dan Hasan Ali, Hasan Saleh, serta Ishak Amin, mewakili NBA, mencapai kata sepakat mengenai tiga tujuan utama: (1) memajukan Islam; (2) membangun Aceh dalam arti luas; dan (3) berusaha sekuat tenaga untuk memberi kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat Aceh.¹⁹ Lebih penting lagi, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan gerakan militer dan permusuhan sementara perundingan ke arah penyelesaian yang menyeluruh berlangsung.

Daud Beureueh menerima gencatan senjata tersebut, walaupun pada tahun 1957 itu Pemerintah Pusat sedang terancam oleh keadaan politik yang panas di Sumatera dan Sulawesi, padahal situasi ini sebenarnya

menyalami mereka, sementara tangan kiri siap memukul bila mereka tidak memberikan jawaban positif'.

17. Dari surat KSAD Nasution kepada Komandan KDMA, bertanggal Jakarta, 24 Januari 1957, sebagaimana dikutip dalam Abdul Murat bin Mat Jan, "Gerakan Darul Islam di Aceh" (skripsi, Universitas Gadjah Mada, 1976), hal. 184.

18. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

19. Lihat "Pidato Radio Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Aceh Berkenaan Genap Dua Tahun Usianya Ikrar Lam Teh" (Kutaraja: Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh, 1959), hal. 2.

memberikan posisi yang lebih baik kepada para pemimpin NBA dalam tawar-menawar dengan Jakarta. Sikap Daud Beureueh dalam hal ini tentu saja merupakan suatu teka-teki. Perlu diingat bahwa jikalau pimpinan NBA menolak berurusan dengan Gaharu dan sebaliknya menawarkan kerja sama kepada Simbolon, maka posisi Jakarta tentu akan lebih buruk. Dengan demikian timbul pertanyaan, mengapa para pemimpin NBA memberi tanggapan positif terhadap seruan-seruan Gaharu, dan mengapa mereka tidak membentuk front-bersama dengan Simbolon untuk menghadapi Jakarta? Agaknya, alasan yang pertama adalah bahwa Daud Beureueh dan stafnya tidak bersedia bekerja sama dengan Simbolon, dan tidak pula mau menerima suatu tawaran darinya. Tampaknya jurang antara pemimpin-pemimpin Aceh dan Simbolon terlalu besar untuk dapat dijembatani. Mereka tidak akan pernah dapat berbaikan dengan Simbolon, bukan hanya karena Simbolon sangat anti-Darul Islam, sehingga ketika berkuasa ia lebih suka menerapkan hukum perang daripada penyelesaian damai dengan mereka, melainkan juga karena sikap kesukuannya yang menyebabkan terlantarnya ribuan pemuda Aceh dalam rasionalisasi tentara pada tahun 1950.²⁰ Alasan inilah yang mendorong para pemimpin NBA memutuskan untuk mengambil setiap kesempatan yang ditawarkan Gaharu, dan dengan gembira membiarkan Simbolon dihancurkan oleh pasukan pemerintah. Dendam yang demikian besar terhadap Simbolon ini bahkan telah meyakinkan sejumlah perwira di komando militer Sumatera Utara bahwa kalau pun Simbolon berhasil dalam gerakannya menentang Jakarta, pada akhirnya dia tetap harus pula berhadapan dengan Daud Beureueh.²¹

Lebih jauh lagi, pendekatan Gaharu memang menyentuh rasa kesukuan para pemimpin NBA. Pemimpin-pemimpin ini percaya bahwa Gaharu masih menjadi orang Aceh yang baik meskipun telah meninggalkan daerah itu cukup lama. Ikhtiar Gaharu untuk membawa pulang sebanyak mungkin batalion Aceh sangat mereka hargai, sebab hal ini akan mencegah berlanjutnya kesewenangan pasukan pemerintah terhadap rakyat di pedesaan. Oleh karena itu para pemimpin ini pun memuji usaha Gaharu untuk membentuk sebuah resimen Aceh yang terdiri atas prajurit-prajurit Aceh dan dipimpin oleh perwira Aceh sendiri,

20. Wawancara dengan Sjammaun Gaharu, Kutaraja, 5 Juli 1973.

21. *Waspada*, 16 Januari 1957.

serta tidak lagi berada dalam dominasi komando militer Sumatera Utara yang dikuasai suku Batak. Dengan segera mereka memberi isyarat kepada Gaharu akan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan dia dan melindungi programnya dari ancaman kelompok-kelompok etnis lain.

Tanggapan baik itu memang terbukti pada bulan Januari 1957, ketika Komandan Sektor Aceh Timur Kapten Jusuf yang berasal dari Sumatera Timur, menentang Gaharu dan KDMA atas pemisahan Aceh dari Sumatera Utara. Dalam peristiwa ini Jusuf menolak mengakui kepemimpinan Gaharu serta menganggap sektor militer dan batalionnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komando militer Sumatera Utara. Penolakannya terhadap Gaharu pada dasarnya berpunca pada kecemasannya bahwa Gaharu, sebagai seorang komandan, terlalu banyak melibatkan diri dalam politik sehingga mengabaikan faktor-faktor militer.²² Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi konflik antara Kutaraja dan Medan, karena Djamin Gintings, panglima baru di Medan, ingin memasukkan Aceh Timur ke dalam Sumatera Utara. Gaharu tidak mau mundur serta bersikeras bahwa sektor dan batalion tersebut milik KDMA, terutama karena kebanyakan anggotanya adalah suku Aceh, dan bahwa sektor itu pun berada di Propinsi Aceh. Gaharu menang, sebab pada tahun itu juga Markas Besar Angkatan Darat menyelesaikannya dengan memberikan kekuasaan atas sektor tersebut kepada KDMA, dan memindahkan Jusuf beserta orang-orangnya ke Medan. Tetapi, sebelum kejadian itu diselesaikan, pada awal Februari NBA telah menawarkan kepada Gaharu suatu operasi bersama untuk menghantam Jusuf, namun Gaharu menolaknya.²³

Para pemimpin NBA juga telah mempertimbangkan dua faktor lain yang teramat penting, yaitu rakyat dan kepemimpinan mereka sendiri. Bagi pimpinan NBA, seperti telah kita lihat dalam Bab V, jelas bahwa keberhasilan perjuangan mereka sangat tergantung pada dampak kepemimpinan mereka terhadap rakyat. Dengan demikian agar dapat memelihara dukungan rakyat, maka para pemimpin NBA harus memperhitungkan sikap rakyat itu. Sebuah contoh tentang hal ini dapat dilihat dalam kongres pemuda, pelajar, dan masyarakat Aceh yang di-

22. *Ibid.*, 29 Januari 1957.

23. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

selenggarakan di Medan pada pertengahan September 1956. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 600 peserta²⁴ dari seluruh Indonesia itu menyerukan kepada kedua pihak yang sedang bertikai agar menyelesaikan pemberontakan "melalui musyawarah sesuai dengan kehendak rakyat Aceh".²⁵ Dari satu sudut, seruan ini terlihat sebagai tekanan terhadap Pemerintah Pusat, akan tetapi sebenarnya desakan ini berlaku pula bagi kaum pemberontak. Memang, sementara pemerintah menyambut baik seruan itu, pemimpin-pemimpin NBA tetap berdiam diri. Namun demikian pimpinan NBA sama sekali tidak dapat mengabaikannya, sebab kebanyakan peserta kongres adalah orang-orang atau organisasi-organisasi, termasuk para pengusaha dan Front Pemuda Aceh, yang bersimpati pada -- dan bahkan mendukung -- pemberontakan.²⁶

Di lain pihak, pemimpin-pemimpin NBA sepenuhnya sadar akan dampak kecenderungan politik terhadap massa. Rakyat Aceh pada umumnya memang sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa pembentukan KDMA telah diikuti dengan segera oleh pembentukan Propinsi Aceh yang sudah lama diidam-idamkan itu pada awal Januari 1957.²⁷ Kedua keputusan Pemerintah Pusat ini tidak hanya menyentuh hati mereka tetapi juga menghidupkan kembali impian rakyat Aceh akan suatu masa jaya yang lain. Banyak orang melihat perkembangan ini sebagai suatu titik balik dari perjuangan selama enam tahun. Dalam benak mereka, status Aceh sudah kembali sama seperti tahun 1950 tatkala para pemimpin PUSA berkuasa. Mereka percaya bahwa kini Pemerintah Pusat telah menemukan jalan yang benar, dan melalui jalan itu rakyat Aceh akan dapat membangun kembali daerah mereka. Bukankah hal ini yang diper-

24. *Peristiwa*, 18 Oktober 1956.

25. Lihat keputusan konferensi tersebut yang menyangkut masalah keamanan, bertanggal Medan, 19 September 1956.

26. Sesungguhnya konferensi ini telah menjadi suatu arena politik baik bagi unsur-unsur pro maupun anti-PUSA. Pada mulanya, konferensi tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni oleh unsur-unsur anti-PUSA yang ada dalam panitia pelaksana, yaitu tokoh-tokoh *ulebalang*, PNI, dan PKI, untuk mengutuk kaum pemberontak. Akan tetapi dengan dukungan mayoritas pemimpin dan organisasi Aceh, kelompok pro-PUSA berhasil mengalahkan unsur-unsur anti-pemberontak itu, menunda konferensi sampai bulan September, dan menguasainya. Akibatnya, kelompok anti-pemberontak mendirikan Badan Koordinasi Rakyat Aceh, yang merupakan kelanjutan dari organisasi BKR.

27. Antara lain, lihat *Bidjaksana*, 29 Januari 1957.

juangkan oleh PUSA? Oleh sebab itu adalah wajar bila perasaan demikian mempengaruhi pemimpin-pemimpin pemberontakan, walaupun mereka sudah gencar mempropagandakan federalisme. Daud Beureueh pada khususnya, sangat sadar bahwa ia tidak boleh melawan arus pikiran rakyat, kalau tidak, maka ia akan bertentangan dengan rakyat itu sendiri.

Selain itu rakyat juga telah tersentuh oleh rencana perdamaian Gaharu yang didukung penuh oleh Gubernur Hasjmy. Tanpa kenal lelah kedua pemimpin ini berkampanye ke seluruh Aceh untuk memperoleh dukungan rakyat bagi Konsepsi Prinsipil Bijaksana. Seruan kepada Daud Beureueh dan para pengikutnya supaya "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi" dan membantu mereka "membangun Aceh kembali" mereka kumandangkan dari segenap penjuru daerah itu. Kampanye besar-besaran seperti itu memang penting sekali untuk mengukuhkan semangat rakyat dalam pembangunan daerah. Akan tetapi yang lebih penting lagi bagi rakyat adalah fakta bahwa perdamaian dan pembangunan kembali daerah itu tidak hanya dikampanyekan dan dijanjikan saja, melainkan juga dilaksanakan secara nyata. Dalam hubungannya dengan keamanan, segera setelah peristiwa Simbolon, Gaharu menjauhkan pasukannya dari kontak senjata dengan NBA. Dalam bidang ekonomi, ia mencoba merehabilitasi propinsi itu. Dalam hal ini di mata Pemerintah Pusat, ia bahkan sampai terkesan sebagai seorang panglima daerah yang berusaha keras untuk mendapatkan dana yang lebih besar bagi program-program rehabilitasi ekonomi. Segera setelah KDMA dibentuk, ia terus mengintensifkan perdagangan barter di daerahnya, sekalipun ada usaha Pemerintah Pusat untuk menghentikannya. Dia tidak puas dengan perdagangan barter yang berlaku atas dasar 30-70 persen, sehingga pada pertengahan tahun 1957, dengan dukungan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA), ia menuntut sistem barter seratus persen untuk Aceh,²⁸ suatu tuntutan yang tentu saja berujung pada kegagalan. Namun setahun kemudian, tatkala Nasution melarang semua panglima daerah melibatkan diri dalam perdagangan barter, Gaharu pun tidak mematuhinya.²⁹ Perdagangan barter tersebut memang sangat

28. Lihat "Pidato dan Usulan⁴ Pokok dari Komandan Daerah Militer Atjeh Selaku Penguasa Militer Daerah dalam Rapat Penguasa Perang Pusat tgl. 17 s/d 19 Djuni 1957", stensilan, hal. 12.

29. *Waspada*, 5 Februari 1958.

membantu memperbaiki ekonomi petani dan pedagang setempat, sementara hasil yang diperoleh KDMA dipergunakan untuk membiayai perbaikan jalan. Dengan langkah-langkah ini, Gaharu berhasil memenangkan dukungan rakyat bagi kepemimpinannya.

Jadi, tanggapan rakyat telah mendorong pemimpin-pemimpin pemberontak untuk menerima rencana perdamaian Gaharu itu. Akan tetapi dengan dukungan rakyat sekalipun tidaklah berarti bahwa gencatan senjata sama sekali tidak tertantang. Tantangan pertama, sebagaimana yang mungkin diharapkan, datang dari unsur-unsur Perti dan *ulebalang*. Mereka mengkritik habis-habisan segera setelah gencatan senjata itu diumumkan. Para pemimpin kelompok Perti dan *ulebalang* merasa tidak senang akan kenyataan bahwa KDMA mengadakan perundingan dengan kaum pemberontak, sehingga menghasilkan perbaikan hubungan di antara kedua kekuatan yang semula bertentangan tersebut. Kelompok Perti-*ulebalang* merasa diabaikan dan kecewa, sebab saingan mereka kini begitu dimanjakan oleh penguasa lokal dan pusat. Pemimpin-pemimpin NBA menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, padahal mereka tetap memaksakan hukum dan pajak Darul Islam di mana mungkin. Mereka tetap memungut infak, sementara penguasa setempat pun tidak melarangnya.³⁰ Kritik terbuka dari kelompok Perti-*ulebalang* ini memang menaikkan suhu politik, sehingga menghidupkan kembali suasana pertikaian antara mereka dan kelompok PUSA dalam arena masyarakat seperti pada masa sebelum pemberontakan. Para pemimpin NBA bereaksi keras terhadap kritik ini, yaitu dengan menyebarkan pamflet di Kutaraja yang isinya menyerang Hasan Krueng Kalee, ujung tombak kelompok Perti-*ulebalang*. Sementara itu, seperti diharapkan, Gaharu secara terbuka namun tidak langsung, membela kaum pemberontak. Ia juga menjauh dari pemimpin-pemimpin kelompok Perti-*ulebalang* dengan menuduh mereka sebagai "golongan yang tidak menginginkan pemulihan keamanan".³¹

Kritik bukanlah satu-satunya bentuk perlawanan yang dilancarkan oleh Perti terhadap Gaharu dan NBA. Di Aceh Selatan, daerah basis

30. Pada tahun 1957 NBA meminta Ali Hasjmy membayar Rp 15.000,00 sebagai tunggakan infaknya. Hasjmy menolak membayar jumlah yang diminta itu, akan tetapi kemudian ia mengakui telah membayar infak kepada NBA; *Mestika*, 25 Agustus 1958.

31. *Peristiwa*, 10 Juni 1957.

Perti di Aceh, Habib Muda Wali, orang kedua dalam kepemimpinan Perti cabang Aceh setelah Hasan Krueng Kalee, menolak membayar infak kepada NBA. Sebaliknya, ia mengorganisasikan para pengikutnya untuk menolak usaha penegakan aturan Darul Islam di Aceh Selatan. Akibatnya, perbenturan fisik tidak dapat dihindari. Dalam konflik ini beberapa orang dari kedua belah pihak telah terbunuh atau luka-luka selama bulan Juli dan Agustus,³² sehingga meningkatkan ketegangan di kalangan anggota Perti di seluruh Aceh. Hal ini menyebabkan Muda Wali meminta Pemerintah Pusat agar mengirimkan senjata guna "membantu rakyat yang setia" di Aceh Selatan untuk memerangi Darul Islam. Akan tetapi permintaan ini tidak pernah dikabulkan. Konflik selanjutnya, yang terjadi pada akhir Agustus, telah memaksa Gaharu untuk mengirimkan satu kompi pasukan Diponegoro ke daerah itu untuk menjadi penyangga antara kekuatan-kekuatan Perti dan NBA.³³

Sikap bermusuhan Perti terhadap pemulihan keamanan antara lain disebabkan oleh kecewaannya karena gagal memperoleh pengaruh politik yang lebih besar di daerah itu. Adalah jelas bahwa dengan menentang pemimpin-pemimpin PUSA yang berontak dan dengan kerja sama yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, para pemimpin Perti setempat berharap akan mendapat pengaruh yang lebih besar dalam bidang agama dan politik. Akan tetapi pengharapan mereka tetap menjadi suatu impian belaka, sebab Pemerintah Pusat tidak mau mengambil langkah apa pun ke arah itu. Pemerintah malah mengangkat Ali Hasjmy, juga tokoh PUSA meski bukan dari golongan Masyumi, sebagai gubernur Aceh. Mereka bahkan lebih kecewa lagi karena Gaharu, satu-satunya harapan mereka, dan yang pernah menjadi musuh PUSA itu, kini malah memihak kepada dan memanjakan pemimpin-pemimpin PUSA. Sungguh menyakitkan hati bagi para pemimpin Perti, sebab mereka yang selalu membantu pemerintah dalam usaha menentang Darul Islam kini justru diabaikan sama sekali. Kekecewaan para pemimpin Perti barangkali juga berakar pada pembagian kursi dalam lembaga perwakilan daerah, di mana Perti hanya

32. Lihat umpamanya, *Mestika*, 4 Agustus 1958.

33. Hal ini terungkap dalam notulen suatu pertemuan antara Wakil Kepala Staf KDMA Mayor A.M. Namploh dan Habib Muda Wali di Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada tanggal 6 September 1958; naskah ini dibuat oleh Perti cabang Aceh.

mempunyai pengaruh yang kecil. Dari tiga puluh wakil dalam DPRD di propinsi itu, Perti hanya mendapat empat kursi, sementara PNI, PKI, dan Parkindo masing-masing satu kursi, sedangkan lainnya dikuasai oleh Masyumi, termasuk jabatan ketua dan wakil ketua. Pada tingkat kabupaten, hanya DPRD di Aceh Barat dan Selatan saja Perti mempunyai kedudukan yang lebih baik, sebab di masing-masing lembaga itu Perti menguasai delapan dan sepuluh kursi, dari dua puluh kursi yang ada, tapi di luar kedua kabupaten ini Perti hanya memiliki satu kursi atau bahkan tidak terwakili.³⁴

Kecuali di Aceh Selatan, oposisi terhadap rencana pemulihan keamanan Gaharu berlangsung secara hati-hati. Di luar Aceh Selatan, oposisi lebih bersifat intelektual dan konseptual daripada fisik, sebab memang tidak mudah untuk mengerahkan dukungan penduduk setempat bagi perlawanan terhadap kegiatan-kegiatan NBA secara fisik. Oleh karena itu, unsur-unsur *ulebalang*, sebagai organisator utama oposisi ini, memusatkan perjuangan mereka pada inti persoalan. Dalam pandangan mereka, punca masalah yang mereka hadapi adalah Gaharu, yaitu sebagai perencana kebijaksanaan pemulihan keamanan. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk memindahkannya dari Aceh. Untuk maksud itu, di samping untuk mengembalikan kekuasaan *ulebalang*, unsur-unsur bangsawan ini menyusun rencana guna menggagalkan pelaksanaan Konsepsi Prinsipil Bijaksana. Menurut sebuah laporan yang didasarkan pada penyelidikan polisi setempat, mereka merencanakan untuk membatalkan gencatan senjata dengan jalan melancarkan sabotase terhadap sasaran-sasaran pemerintah, dan kemudian menyalahkan pihak pemberontak.³⁵ Untuk melaksanakan rencana ini, sejumlah rapat pun diselenggarakan di Sigli pada pertengahan tahun 1957, yakni sebulan sesudah KDMA dan NBA menyepakati gencatan senjata. Pada akhir Juli, mereka mendirikan organisasi bawah tanah yang diberi nama NURI (Nasional Ulebalang Republik Indonesia). Dengan sponsor Tuanku Husin, cucu *Ulebalang*

34. Daftar lengkap keanggotaan DPRD pada tingkat propinsi dan kabupaten dapat ditemui dalam *Almanak Umum 1959* (Kutaraja: Atjeh Press Service, 1959), hal. 94-104.

35. Lihat suatu edaran rahasia yang dikirim oleh Front Pemuda Aceh kepada cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, edaran tersebut bertanggal Kutaraja, 11 Oktober 1957; stensilan.

Keumangan yang dibunuh PUSA pada tahun 1946, NURI mendapat dukungan dari PNI dan PKI serta para penunjuk jalan yang kecewa karena telah didemobilisasi oleh Gaharu, di samping dari sejumlah anggota tentara yang bukan Aceh.³⁶

Gaharu sendiri sangat sensitif terhadap tanggapan-tanggapan yang negatif ini. Mungkin karena disadarinya bahwa pengaruh unsur-unsur *ulebalang* ini adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan Perti, maka Gaharu mengambil tindakan tegas terhadap *ulebalang* itu dengan melancarkan pukulan yang cepat terhadap NURI. Dengan menggunakan kekuasaan militernya, pada bulan Agustus Gaharu menahan Tuanku Husin, sehingga organisasi itu pun runtuh. Usaha-usaha kaum *ulebalang* selanjutnya untuk mendekati Pemerintah Pusat juga gagal ketika Nasution, atas permintaan Gaharu, menangkap Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, putra pahlawan Aceh tersohor, Panglima Polim, setahun kemudian.³⁷ Jadi, dalam berurusan dengan unsur-unsur *ulebalang* Gaharu bersikap sangat tegas. Tindakannya terhadap *ulebalang* sangat berbeda dari langkahnya yang hati-hati terhadap pemimpin-pemimpin Perti. Gaharu hanya mencap pemimpin-pemimpin Perti sebagai "avonturir", tanpa menangkap seorang pun di antara mereka.

Namun tantangan paling besar terhadap gencatan senjata itu datang dari pemberontakan PRRI pada bulan Februari 1958 dan Operasi Sabang Merauke (OSM) yang dilancarkan di Medan pada bulan Maret oleh Mayor Boyke Nainggolan dan perwira-perwira pro-Symbolon lainnya sebagai protes akan tindakan tegas pemerintah terhadap PRRI. Dalam hal ini, kerapuhan gencatan senjata itu bersumber pada kecugraan pemimpin-pemimpin NBA akan kejujuran pemerintah dalam menyelesaikan pertikaian dengan mereka. Pemimpin-pemimpin NBA percaya bahwa Pemerintah Pusat telah menyetujui gencatan senjata karena kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, terutama di Sumatera sejak akhir tahun 1956. Oleh sebab itu mereka memandang gencatan senjata

36. Laporan tentang NURI yang disusun oleh Front Pemuda Aceh berdasarkan data yang dikumpulkan oleh cabang-cabangnya di beberapa kabupaten, laporan itu bertanggal Kutaraja, 1 November 1957. Lihat juga sebuah laporan yang tidak dikenal sumbernya, bertanggal Sigli, 9 September 1957.

37. T.M.A. Panglima Polim, *Memoir (Tjataan) Panglima Polim* (Banda Aceh: 1972), hal. 52-53.

sebagai peluang yang baik untuk memperkuat kedudukan mereka sendiri,³⁸ sementara menunggu perkembangan selanjutnya.

Daud Beureueh dan ahli-ahli strateginya memang tidak perlu menunggu lama, karena pada akhir tahun 1957 mereka telah mendapat informasi tentang rencana PRRI. Dalam hubungan ini, bekas Perdana Menteri Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap telah mengunjungi Aceh dan meminta Daud Beureueh supaya bekerja sama dengan PRRI. Sebagai balasan atas janji bahwa Aceh akan menerima bantuan militer dari PRRI, maka Daud Beureueh pun menjamin dukungannya dengan mengirim seorang utusan ke Sumatera Barat untuk menemui Kolonel Ahmad Husein, pemimpin PRRI.³⁹ Pada tahap ini kabinet NBA masih sangat bersatu; semua menternya setuju untuk mendukung PRRI dan menghancurkan KDMA jika kaum pemberontak di Sumatera Barat itu dapat memenangkan perang melawan Jakarta. Walaupun demikian pemimpin-pemimpin NBA tetap lebih suka untuk bersikap seperti pucuk aru.⁴⁰

Seraya mempertahankan gencatan senjata dan hubungan baik dengan KDMA, NBA menyusun hubungan dengan unsur-unsur PRRI di Aceh yang dipimpin oleh Mayor Teuku Manjak, komandan batalion dan komandan sektor Aceh Besar yang pernah menjadi wakil kepala staf resimen Sumatera Tengah di Padang. Sekalipun ada panggilan bertubi-tubi dari Padang yang mendesak agar ia bergabung dengan PRRI, keterlibatan Manjak dalam PRRI tidak diketahui oleh KDMA sampai lama kemudian. Teuku Manjak mempunyai hubungan yang erat dengan pemimpin-pemimpin NBA. Ia dan pemberontak telah menggariskan rencana untuk melancarkan serangan terhadap Gaharu dan mengambil alih pimpinan KDMA. Menurut rencana itu, Mayor Manjak beserta batalionnya akan membiarkan 3000 tentara Darul Islam, dengan 1500 pucuk senjata, memasuki Kutaraja dan menangkap Gaharu bersama stafnya. Selanjutnya dengan bantuan TII, Manjak akan menggerakkan batalionnya ke Meureudu di perbatasan Kabupaten Pidie dan Aceh Utara untuk

38. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 28 Juli 1973, dan Teuku Muhammad Amin, Kutaraja, 15 Oktober 1973.

39. Wawancara dengan Teuku Muhammad Amin, dan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973.

40. *Waspada*, 29 Mei 1958.

menyerang batalion Diponegoro yang berada di sana.⁴¹ Manjak telah membahas rencana ini dengan Daud Beureueh tanpa sepengetahuan Gaharu. Untuk maksud itu pula ia membiarkan masuk ke dalam wilayahnya satu batalion perlengkapan militer yang dikirim PRRI kepada NBA pada akhir tahun 1957 atau awal 1958.⁴²

Akan tetapi mereka gagal melaksanakan rencana tersebut, karena dua alasan. Pertama, pemusatan kekuatan TII di sekitar Kutaraja telah dihambat oleh berbagai kesulitan logistik, yang agaknya diakibatkan oleh korupsi. Ini tidak berarti bahwa persiapan keuangan rencana tersebut tidak baik. Untuk membiayai persiapan operasi militer di Kutaraja, NBA sebenarnya telah menerima dana sebesar empat juta rupiah dari Mayor Nainggolan, tokoh OSM, tetapi dana ini agaknya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikatakan bahwa pimpinan TII telah menyalahgunakan uang tersebut, sehingga menimbulkan masalah logistik terhadap pasukannya.⁴³

Kedua, Gaharu berhasil menyingkapkan rencana itu dan melancarkan gerakan perlawanan dengan menangkap Mayor Manjak pada tanggal 26 April 1958.⁴⁴ Dalam hubungan ini, pengunduran pasukan OSM dari Medan ke perbatasan Aceh-Sumatera Timur menyebabkan Gaharu waspada. Ia sadar bahwa gerakan Nainggolan, yang didukung oleh beberapa perwira Aceh di Sumatera Utara, akan memberikan dampak terhadap KDMA. Oleh karena itu ia memperkirakan bahwa pasukan dalam komandonya yang akan terpengaruh adalah pasukan yang kembali dari Sumatera Barat, dan mempunyai hubungan tertentu dengan pemimpin-pemimpin PRRI. Kewaspadaan ini menyebabkan Gaharu, pada pertengahan Maret, menginspeksi pasukan Manjak yang baru kembali dari Padang. Pada kesempatan itu ia menyampaikan kepada mereka keterikatan KDMA pada pembangunan Aceh dan pada usaha menghindarkan daerah ini dari segala kekacauan. Kecurigannya terhadap Manjak diperkuat ketika pada tanggal 18 Maret malam, radio PRRI mengumumkan pengambilalihan KDMA oleh Manjak, yang kemudian meng-

41. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975; lihat juga laporan tentang peradilan Mayor Teuku Manjak, dalam *Warta*, 28 April 1960.

42. Lihat *Perintah Harian* Sjammaun Gaharu kepada seluruh bawahannya; bertanggal Kutaraja, 27 April 1958.

43. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

44. *Waspada*, 17 Maret 1958.

gabungkannya ke dalam PRRI.⁴⁵ Agaknya, dengan mengumumkan hubungan Manjak dengan PRRI, para pemimpin PRRI ingin memaksa Manyak agar segera melancarkan gerakannya. Walaupun begitu Gaharu tidak menahan Manjak sampai sebulan kemudian, ketika ia yakin bahwa Manjak belum menghentikan dukungannya kepada PRRI.

Tentu saja rencana bersama untuk menentang KDMA itu pun runtuh dengan ditangkanya Manjak. Namun demikian ada beberapa pertanyaan yang masih perlu dijawab. Mengapa Daud Beureueh memper-taruhkan hubungan baik NBA dengan KDMA, suatu hubungan yang paling mungkin menyelesaikan pemberontakan? Apakah pimpinan NBA memikirkan adanya kemungkinan bahwa mereka akan memperoleh tawaran yang lebih baik dari PRRI dibandingkan dengan tawaran Jakarta? Kemungkinan ini bisa saja menjadi salah satu alasan bagi para pemimpin NBA untuk berkomplot menentang KDMA, tetapi kejatuhan Padang yang begitu mudah ke tangan pemerintah pada pertengahan April, seharusnya mengakibatkan mereka melupakan rencana itu. Tanda-tanda bahwa PRRI akan kalah memang mewaspadaikan dan memperkuat kecurigaan bahwa Gaharu akan segera menindak mereka. Situasi demikian bagaimanapun juga tentu memaksa pimpinan NBA untuk melepaskan sikap yang ibarat pucuk aru itu.

Faktor yang sama pentingnya dalam masalah ini adalah kepentingan pribadi para pemimpin. Meskipun para pemimpin NBA telah mengikatkan diri dalam Ikrar Lam Teh untuk bekerja sama dengan Gaharu demi pembangunan Aceh dan Islam, sejumlah pertanyaan pokok seperti bagaimana hal itu akan dicapai dan siapa yang akan memimpin, belum diperinci dalam perjanjian itu. Kenyataan ini tidak berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan sedemikian berada di luar lingkup kepentingan para pemimpin NBA. Suatu hal yang sangat mendasar dalam seluruh permasalahan ini adalah fakta bahwa kepemimpinan lokal merupakan salah satu penyebab pecahnya pemberontakan, dan pemimpin-pemimpin NBA, terutama dari kubu zuama, semestinya sudah memikirkan peranan mereka sendiri dalam pengukuhan kembali status propinsi Aceh. Jika pemberontakan itu selesai, di mana kira-kira mereka akan ditempatkan dan peranan apa yang dapat mereka mainkan?

Dalam konteks kepemimpinan, Aceh telah berkembang pesat selama

45. Pidato radio Sjammaun Gaharu, Kutaraja, 19 Maret 1957.

empat tahun sejak meletusnya pemberontakan. Kepemimpinan formal kini sudah kembali berada dalam tangan pemimpin-pemimpin Aceh, dan pemberontakan telah menyebabkan mereka kembali berkuasa. Tetapi para pemimpin itu sendiri sekarang terdiri atas orang-orang yang sangat berbeda. Pengembalian status propinsi dan komando militer menghidupkan lagi harapan rakyat Aceh, dan membuat para pemimpin baru dipandang sebagai pahlawan sejati. Dari satu segi, penerimaan rakyat terhadap kepemimpinan Gaharu dan Hasjmy serta pendekatan mereka dalam penyelesaian pemberontakan secara damai, tampaknya telah mengurangi popularitas pemimpin-pemimpin pemberontakan. Gaharu dan Hasjmy merasa puas akan posisi mereka sendiri, sehingga tidak akan mengambil risiko dengan menantang Pemerintah Pusat, bahkan pada saat hampir seluruh Sumatera sedang bergolak.

Namun sekalipun mengetahui bahwa para pemimpin NBA telah berkomplot dengan Teuku Manjak, KDMA tidak berada pada posisi untuk menghukum mereka. Di satu pihak Gaharu memang mengambil tindakan tegas terhadap komplotan itu dengan menangkap Manjak beserta beberapa pemimpin sipil, termasuk Abduh Sjam, pemimpin Masyumi dan ketua DPRD, tetapi di lain pihak ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan gencatan senjata dengan NBA. Bagi Gaharu, kebijaksanaan demikian dapat dibenarkan, sebab ia percaya bahwa komplotan itu hanya didukung oleh unsur-unsur yang pro-PRRI dalam NBA.⁴⁶ Sebenarnya penjelasannya tidaklah demikian sederhana. Dari satu sudut, Gaharu tidak dapat membatalkan gencatan senjata, terutama dalam keadaan di mana kebanyakan pasukan pemerintah sedang terlibat dalam operasi-operasi militer di bagian-bagian lain negeri ini. Dari sudut lain, pembatalan gencatan senjata itu mungkin akan dinilai Jakarta sebagai kegagalan kebijaksanaannya sendiri, dengan kemungkinan bahwa ia akan dipindahkan dari daerah itu. Jadi, dalam pelaksanaannya, Konsepsi Prinsipil Bijaksana lebih banyak menawarkan "kebijaksanaan" kepada NBA daripada mempertahankan kekukuhan "prinsip" untuk menggunakan kekuatan terhadapnya.

Dewan Repolusi

KEGAGALAN Teuku Manjak untuk mengaitkan Aceh dengan gerakan

46. *Waspada*, 29 Mei 1958, dan *Mestika*, 21 Juni 1958.

PRRI tidak sampai mengakibatkan KDMA atau NBA membatalkan gencatan senjata, tetapi menimbulkan gejolak dalam kepemimpinan pemberontakan sepanjang tahun 1958 dan 1959. Penangkapan terhadap unsur-unsur PRRI di Aceh serta keberhasilan Gaharu dan Hasjmy mencegah Aceh terlibat dalam gerakan itu oleh pemimpin-pemimpin NBA dipandang sebagai tanda keruntuhan PRRI yang jelas. Akan tetapi, secara intern, hal ini menghidupkan kembali perbedaan pandangan dalam kepemimpinan kaum pemberontak. Padahal sebelumnya perbedaan itu telah dijembatani oleh harapan akan memperoleh keuntungan dari kekacauan politik yang dihadapi Pemerintah Pusat.

Tatkala hubungan Sumatera Barat dan Aceh terputus, dan diikuti penahanan Muhammad Insja di Medan pada pertengahan tahun 1958, para pemimpin NBA mulai mempertimbangkan lagi seluruh strategi mereka. Fakta bahwa Insja, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan PRRI, telah ditangkap, menimbulkan kegemparan di kalangan pimpinan NBA. Mereka lebih mempercayai Insja daripada Gaharu, sebab mereka yakin bahwa Kepala Polisi itu lebih jujur. Hadir dalam hampir setiap pembicaraan penting dengan para pemimpin NBA, Insja berprasangka bahwa baik KDMA maupun NBA tidak berusaha sepenuh hati untuk menciptakan perdamaian di Aceh, melainkan masing-masing mengambil keuntungan dari situasi politik. Secara tajam ia mengkritik Gaharu dan para pemimpin NBA bahwa sikap mereka akan mengancam Ikrar Lam Teh dan akhirnya menghancurkan Aceh.⁴⁷ Pandangan Insja ini dihargai oleh para pemimpin NBA yang menilai penangkapannya tidak hanya sebagai tanda bahwa benteng terakhir PRRI sedang jatuh satu demi satu, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi mereka supaya memperbaiki posisi dalam hubungan dengan Pemerintah Pusat.

Dalam suasana yang demikianlah, selama gencatan senjata, suatu perdebatan besar tentang sikap terhadap Konsepsi Prinsipil Bijaksana Gaharu kembali muncul pada tingkat tertinggi kepemimpinan NBA. Namun perdebatan kali ini bukanlah sepanjang garis sipil-versus-militer,

47. Kritik pedas Insja terhadap Gaharu menyebabkan Gaharu percaya bahwa Insja merupakan "seorang Darul Islam dalam Republik Indonesia"; wawancara dengan Sjammaun Gaharu, Medan, 2 Desember 1975. Di pihak lain para pemimpin NBA tidak sadar bahwa Insja berhubungan dengan PRRI, sehingga mereka berpikir bahwa penangkapannya merupakan akibat dari penentangannya terhadap kebijaksanaan Gaharu; wawancara dengan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973.

seperti yang melingkupi pimpinan pemberontakan di dalam dan sesudah konferensi militer yang diselenggarakan di Krueng Pinang pada tahun 1957, melainkan konflik yang lebih fundamental: antara zuama dan ulama. Perdebatan itu jelas merupakan pemunculan kembali perbedaan-perbedaan di antara kedua kelompok pemimpin ini, yang memang telah terlihat sejak Kabinet Burhanuddin Harahap menawarkan kemungkinan penyelesaian damai, pada tahun 1955, seperti yang telah kita lihat dalam Bab IV. Karena kini Jakarta telah memberi Aceh otonomi dalam bidang militer dan pemerintahan sipil, pada dasarnya dalam perdebatan itu kedua kelompok sepakat untuk mengakhiri perjuangan mereka. Tetapi mereka tidak sependapat mengenai prasyarat-prasyaratnya. Daud Beureueh beserta pemimpin lain dalam kelompok ulama menegaskan kembali penolakan mereka terhadap penyelesaian yang didasarkan pada Konsepsi Prinsipil Bijaksana Gaharu yang hanya menawarkan amnesti dan rencana rehabilitasi yang terbatas.

Akibatnya, kedua konsepsi yang dikemukakan Hasan Ali dan Hasan Saleh dalam konferensi di Cubo pada pertengahan tahun 1956 itu sekali lagi menjadi topik pembicaraan di kalangan pemimpin utama pemberontakan. Tetapi kini kaum ulama mengubah rumusan Konsepsi Hasan Ali tersebut. Dalam konferensi Cubo, seperti telah kita lihat, para ulama hanya menuntut keistimewaan dalam bidang agama dan otonomi yang luas bagi Aceh sebagai prasyarat penyelesaian pemberontakan. Sekarang, setelah Pemerintah Pusat mengembalikan status propinsi, para ulama bersikeras bahwa penyelesaian politik harus meliputi tidak hanya pemberlakuan hukum Islam di Aceh, tetapi juga pengakuan Aceh sebagai suatu negara bagian dari Republik Indonesia. Pendirian ini jelas mencerminkan dendam kaum ulama terhadap keterlibatan Pemerintah Pusat yang terlalu jauh dalam urusan-urusan setempat sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949. Pengalaman buruk dengan Pemerintah Pusat pada masa lampau itu meyakinkan pemimpin-pemimpin ulama bahwa kecuali Aceh diberikan status yang sama dengan negara bahagian dalam sistem federasi, Jakarta akan gagal lagi memperlakukan daerah itu beserta pemimpinnya secara wajar.

Meskipun tidak sependapat dengan para ulama, pemimpin-pemimpin zuama berulang kali mengemukakan pandangan kaum ulama ini baik kepada Gaharu maupun Hasjmy. Namun keduanya menolak tuntutan itu sesuai dengan instruksi Perdana Menteri Djuanda agar mereka tidak

menjanjikan sesuatu di luar batas konstitusi kepada pemberontak.⁴⁸ Penolakan ini menyebabkan Hasan Saleh menyarankan kepada para ulama agar membuang tuntutan yang mustahil dapat dikabulkan itu. Disarakannya pula agar ulama bersikap lebih realistik dengan menerima apa yang paling mungkin dapat dicapai pada saat ini dan kemudian mengejar tuntutan-tuntutan lainnya, termasuk yang bersifat keagamaan. Kelompok zuama yang lebih pragmatis ini mendesak kaum ideologis di kalangan ulama agar mencapai persetujuan dengan Jakarta secepat mungkin, sebelum PRRI runtuh seluruhnya. Akan tetapi kaum ideologis di kalangan ulama itu tetap berpegang teguh pada prinsip mereka. Dalam menolak saran kaum zuama itu Daud Beureueh mengatakan bahwa gerakannya tidak ada kaitannya dengan kekalahan PRRI.⁴⁹

Kendatipun demikian Daud Beureueh tidak mengharapkan keruntuhan PRRI. Oleh sebab itu, keberhasilan operasi-operasi militer yang dilancarkan Jakarta di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, yang memperkecil perlawanan PRRI menjadi gerakan gerilya, tidak menghentikan upaya Daud Beureueh untuk melanjutkan kerja sama dengan PRRI atas dasar yang lebih konkret. Langkah Daud Beureueh ini memang merupakan teka-teki karena justru dilakukan menjelang keruntuhan PRRI. Tetapi hal ini dapat dipahami, sebab kerja sama dengan PRRI merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan semangat anak buahnya ketika kelanjutan gerakannya sedang terancam oleh konflik antara kaum ulama dan zuama. Oleh karena itu pada bulan September 1958 ia mengutus Perdana Menteri Hasan Ali ke Jerman Barat untuk menghadiri suatu konferensi dengan pendukung-pendukung PRRI di luar negeri. Pertemuan yang diselenggarakan di Frankfurt dan dihadiri oleh sekitar tiga puluh peserta itu menyerukan agar semua musuh Soekarno bersatu. Konferensi tersebut untuk sepakat meningkatkan kerja sama antara PRRI dan Darul Islam melalui penyatuan kekuatan mereka dalam satu pimpinan. Untuk maksud itu, para peserta merekomendasikan federalisme sebagai basis persatuan, dan didasarkan atas prinsip-prinsip keagamaan.⁵⁰

48. Lihat naskah pidato Gubernur Hasjmy di depan DPRD pada tanggal 17 Maret 1958; stensilan, hal. 2.

49. Wawancara dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Beureunuen, 10 Juli 1973, dan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973.

50. Wawancara dengan Hasan Ali, Kutaraja, 19 November 1975.

Sayangnya bagi para pemberontak, sebelum kedua pimpinan gerakan mengambil langkah selanjutnya untuk mewujudkan kerja sama ini, Pemerintah Pusat telah bergerak dengan cepat untuk menggagalkannya. Tindakan pertama yang diambil pemerintah adalah menyebarkan kabar tentang "Negara Sumatera", yang bertepatan dengan tibanya Hasan Ali di Malaya pada bulan November. Diberitakan bahwa pemimpin-pemimpin PRRI dan NBA sedang merencanakan untuk memproklamasikan berdirinya Negara Sumatera pada pertengahan Desember, dan bahwa gerakan PRRI dan Darul Islam di Sumatera akan bersatu dalam gerakan baru ini. Tetapi jadwal yang diberitakan itu lewat begitu saja tanpa ada pengumuman tentang negara baru tersebut. Menurut kabar burung, hal ini berhubungan dengan kegagalan para pemberontak untuk memperoleh dukungan pemerintah Singapura dan Malaya, di samping penentangan yang kuat dari gerakan PRRI di Sulawesi Utara, Permesta.⁵¹ Meskipun kabar ini didukung oleh kehadiran dan kegiatan Hasan Ali dan beberapa unsur PRRI di Malaya dan Singapura, kesemua itu sesungguhnya merupakan hasil dari mesin intelijen Indonesia. Tampaknya Pemerintah Pusat mengambil kebijaksanaan untuk menghidupkan kembali perpecahan antara PRRI dan Permesta di satu pihak, dan perbedaan pandangan antara NBA dan organisasi induknya di Jawa Barat di lain pihak.

Kedua, perwujudan kesepakatan PRRI-Darul Islam juga digagalkan oleh langkah Pemerintah Pusat memisahkan para pemimpin zuama dari Daud Beureueh. Pada akhir tahun 1958 para zuama yakin bahwa perbedaan pandangan di antara mereka dengan kaum ulama tidak akan dapat dijabatani lagi. Akan tetapi di lain pihak mereka tidak dapat meninggalkan Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya begitu saja sebelum mereka betul-betul yakin akan tawaran pemerintah. Dalam hubungan ini, Ayah Gani dan Hasan Saleh tidak dapat bersandar pada Gaharu atau Hasjmy, karena mereka sadar bahwa kedua pemimpin daerah ini sepenuhnya tergantung pada Jakarta. Sementara itu Gaharu dan Hasjmy juga sadar akan posisi mereka. Keduanya yakin bahwa mereka tidak akan mampu membujuk para pemimpin zuama, kecuali bila Jakarta mendukung usaha mereka. Dengan alasan ini mereka minta

51. *Mestika*, 16 Desember 1958, yang mengutip sebuah laporan dari reporter surat kabar kiri terbitan Jakarta, *Pemuda*, di Singapura.

Nasution datang ke Aceh dan berbicara secara langsung dengan Ayah Gani dan Hasan Saleh.⁵² Oleh sebab itu Nasution terbang ke Kutaraja pada tanggal 20 Desember 1958 dan berhasil meyakinkan kedua pemimpin kelompok zuama itu bahwa Aceh akan memperoleh status istimewa jika mereka mengakhiri pemberontakan.⁵³

Sementara Nasution sangat yakin bahwa kesepakatan yang baru dicapainya dengan pemimpin-pemimpin NBA yang lebih pragmatis itu akan dapat menyelesaikan masalah Aceh pada tahun mendatang, konflik di kalangan pemimpin pemberontak pun meningkat pula. Pembicaraan antara Ayah Gani dan Hasan Saleh dengan Nasution itu telah menyebabkan Daud Beureueh panas, sebab pertemuan dilakukan tanpa sepengetahuannya. Amarahnya tercermin dalam sebutan yang ia berikan kepada menteri urusan perangnya, "Hasan Salah", yang berarti Hasan Saleh yang telah berbuat kesalahan. Kemudian, ketika Ayah Gani dan Hasan Saleh mendekatinya dengan mengirimkan sepucuk surat yang memohon supaya diberikan wewenang untuk mengadakan pembicaraan lanjutan dengan Pemerintah Pusat, Daud Beureueh menolaknya. Sebaliknya, ia minta agar mereka datang menghadapnya.⁵⁴ Ketika ternyata bahwa kedua pemimpin itu tidak mematuhi perintahnya, Daud Beureueh mengundang rapat para pemimpin sipil dan militer dari semua tingkatan untuk mengutuk mereka. Para peserta rapat tersebut terpecah atas dua kelompok pada waktu Daud Beureueh meminta mereka memecat serta mengutuk Ayah Gani dan Hasan Saleh sebagai pengkhianat. Pemimpin-pemimpin sipil yang pro-Hasan Saleh, seperti Husin Al-Mudjahid, Saleh Adri, serta sejumlah perwira TII, dengan jelas memperlihatkan ketidaksetujuan mereka. Dihadapkan pada realitas ini, Daud Beureueh pun mengancam akan mengundurkan diri. Kesempatan inilah yang memang dicari oleh Ketua Majelis Syura, Al-Mudjahid, yang selalu berhubungan dengan Ayah Gani dan Hasan Saleh. Al-Mudjahid bersama kedua pemimpin itu bermaksud membiarkan Daud Beureueh mundur sehingga Al-Mudjahid sendiri dapat menjadi wali negara. Akan tetapi mereka gagal untuk mewujudkannya, karena para pendukung

52. Wawancara dengan Ali Hasjmy, Kutaraja, 15 November 1973.

53. Wawancara dengan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973.

54. Lihat "Bekerja Sama Dengan Musjrik Untuk Menghanturkan Islam Adalah Musjrik", sebuah pidato Daud Beureueh, stensilan, tanpa tanggal.

Daud Beureueh berhasil mencegah pengunduran diri Daud Beureueh dengan mendesak semua peserta rapat agar menyatakan secara tertulis kesetiaan atau penentangan mereka terhadap Wali Negara. Dalam suasana demikian, tidak ada seorang pun berani menantang pemimpin tertinggi itu sehingga semua sepakat untuk mengutuk Ayah Gani dan Hasan Saleh.⁵⁵

Pengutukan ini sudah tentu tidak mengatasi perpecahan. Kedua "pengkhianat" tersebut terus menjaga jarak dengan Daud Beureueh demi mencegah kemungkinan penangkapan atau bahkan pembunuhan atas diri mereka. Keadaan yang tidak baik ini mengilhami Abdul Wahab Ibrahim dan pemimpin lain dari resimen TII di Aceh Besar untuk mencoba mendamaikan Daud Beureueh dengan kelompok Hasan Saleh. Untuk maksud itu mereka mengundang semua pemimpin utama NBA, termasuk Ayah Gani dan Hasan Saleh, untuk menghadiri konferensi militer di sebuah kampung dekat Kutaraja. Undangan ini diterima baik oleh kaum ideologis dan kelompok pragmatis militer. Mempercayai kenetralan resimen Abdul Wahab selama ini, Hasan Saleh dan teman-temannya tidak ragu-ragu menemui Daud Beureueh dalam konferensi itu. Mereka yakin bahwa dengan perlindungan Abdul Wahab, Daud Beureueh niscaya tidak akan dapat mengambil tindakan apa pun terhadap mereka. Akan tetapi kaum pragmatis ini ternyata salah perhitungan. Abdul Wahab dan kawan-kawannya sebenarnya bersimpati pada Daud Beureueh serta menganggap Hasan Saleh dan Ayah Gani tidak berdisiplin karena menolak menghadap Wali Negara. Abdul Wahab merencanakan untuk menangkap unsur-unsur yang anti-Daud Beureueh itu dan menyerahkan mereka kepadanya guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tetapi dia gagal menjalankan rencananya sebab rencana tersebut telah lebih dahulu dibocorkan kepada para pemimpin pragmatis oleh Teuku Raja Idris, seorang perwira yang pro-Hasan Saleh dalam resimen itu. Oleh karena itu unsur-unsur yang anti-Daud Beureueh dapat menyelamatkan diri.⁵⁶

Kejadian ini semakin mendorong kaum pragmatis untuk meningkatkan persiapan ke arah penyelesaian damai dengan Pemerintah Pusat. Ketidakhadiran Perdana Menteri Hasan Ali di Aceh memberi kesem-

55. Wawancara dengan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973.

56. Wawancara dengan Sulaiman Gading, Kutaraja, 14 Nopember 1975.

patan baik bagi mereka untuk memulainya. Dengan demikian mereka segera bergerak untuk membujuk pemimpin-pemimpin utama lainnya. Dalam waktu relatif singkat mereka telah memperoleh dukungan Husin Jusuf, Teuku Muhammad Amin, dan Abdul Gani Mutyara. Akibatnya kabinet praktis menjadi lumpuh, sebab empat dari tujuh menteri kini mengidentifikasi diri dengan garis pragmatis, sedangkan sisanya, termasuk Hasan Ali, tetap berpihak pada Daud Beureueh. Sampai awal Maret tahun 1959 kaum pragmatis telah mengumpulkan dukungan dari sebagian besar pasukan TII di daerah Pidie, yaitu resimen yang berada di bawah komando Ibrahim Saleh, abang Hasan Saleh. Selain itu mereka juga didukung oleh hampir semua perwira di Kabupaten-kabupaten Aceh Barat dan Selatan, serta dari orang kedua di Aceh Tengah, Saleh Adri. Kemudian, pada tanggal 15 Maret, Hasan Saleh, dalam kedudukannya sebagai menteri urusan perang, merebut kekuasaan dari tangan Daud Beureueh. Ketika memproklamasikan berdirinya Dewan Repolusi di hadapan 1000 anak buah dari pasukan abangnya di Kabupaten Pidie, Hasan Saleh mengumumkan pemberhentian Daud Beureueh dari jabatan wali negara dan panglima tertinggi TII, serta pembubaran Kabinet Hasan Ali.⁵⁷ Ayah Gani dan Hasan Saleh masing-masing diangkat sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Repolusi, sementara Al-Mudjahid menggantikan Daud Beureueh sebagai wali negara.⁵⁸

Penguasa daerah dengan cepat menyambut kelahiran Dewan Repolusi. Reaksi ini tidaklah mengherankan, sebab baik Gaharu maupun Hasjmy memang mempunyai peranan dalam pembentukannya. Barangkali karena menyadari bahwa masalah utama bagi Ayah Gani dan Hasan Saleh adalah legitimasi dan dukungan rakyat bagi gerakan mereka, maka Gaharu dan Hasjmy mengumumkan sendiri pembentukan Dewan Repolusi itu kepada masyarakat. Pada kesempatan itu mereka mendesak rakyat supaya memberi dukungan. Dalam hal ini Gaharu dan Hasjmy tidak hanya memuji pemimpin-pemimpin Dewan Repolusi sebagai telah bertindak dalam rangka semangat Ikrar Lam Teh dan Kon-

57. Lihat "Penetapan Menteri Urusan Perang N.B.A. tentang Pengambil Alihan Pimpinan N.B.A.", sebuah edaran yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Hasan Saleh, tanggal 15 Maret 1959.

58. Lihat "Dewan Repolusi, Komunike", nomor 1 dan 2; keduanya bertanggal 26 Maret 1959.

sepsi Prinsipil Bijaksana, tetapi juga menegaskan tekad mereka untuk menghukum setiap unsur yang merugikan.⁵⁹ Pada sore harinya di Kutaraja diadakan rapat umum di mana Gaharu, Hasjmy, serta Husin Jusuf, mewakili Dewan Repolusi, menyampaikan pidato-pidato yang panjang.⁶⁰ Namun demikian, sambutan baik itu tidaklah bersifat spontan. Para penguasa daerah telah mengetahui sebelumnya bahwa Dewan Repolusi akan lahir, dan bahwa mereka akan berdiri teguh di belakngnya. Akan halnya Hasjmy, justru ia yang menyarankan pemimpin-pemimpin pragmatis NBA untuk memberi nama kepada gerakan itu sehingga menarik perhatian Jakarta.⁶¹ Dan, dukungan kuat yang diberikan Gaharu dan Hasjmy ini telah mendorong pemimpin-pemimpin zuama untuk memisahkan diri dari Daud Beureueh, bahkan menyebabkan mereka berani menuduhnya sebagai seorang pemimpin yang menjadikan pemberontakan sebagai "suatu tujuan, bukan alat" untuk memaksa Pemerintah Pusat agar memperhatikan kepentingan daerah.⁶²

Reaksi Daud Beureueh sama sekali tidak menunjukkan kekerasan, walaupun ia sangat terpengaruh oleh perkembangan ini. Ia lebih suka untuk menghindarkan pertumpahan darah di kalangan kedua pasukan yang bersaing itu. Reaksi Daud Beureueh yang demikian dingin ini sesungguhnya disebabkan oleh keyakinannya yang berlebihan bahwa ia akan mampu mengucilkan Dewan Repolusi melalui desakan kepada para ulama dan seluruh rakyat untuk menentanginya. Dalam batas-batas tertentu upaya tersebut memang memberi hasil, sebab beberapa pemimpin, seperti Saleh Adri, dapat direbut kembali dan segera meninggalkan Dewan Repolusi. Tetapi beberapa anak buahnya kehilangan kesabaran mereka. Abdurrahman Hasjim, saingan utama Hasan Saleh, marah sekali sehingga membentuk Operasi Badak Hitam untuk menghancurkan Dewan Repolusi di sarangnya di Metareum, sebuah kampung di Kabupaten Pidie. Akan tetapi demi mengetahui persiapan-persiapan

59. Lihat "Seruan", pamflet yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sjammaun Gaharu pada tanggal 16 Maret 1959, serta naskah pidato Ali Hasjmy melalui radio Kutaraja, 16 Maret 1959.

60. *Mestika*, 23 Maret 1959.

61. Wawancara dengan Teuku Muhammad Amin, Kutaraja, 30 September 1973.

62. Lihat naskah pidato Ayah Gani yang panjang lebar pada peresmian Dewan Repolusi, 15 Maret 1959.

yang dilakukan Abdurrahman Hasjim, Daud Beureueh pun menggagalkan rencananya dengan menyita semua senjata.⁶³ Kemudian, barangkali karena sebagian besar pengikutnya di Kabupaten Pidie telah direbut oleh kelompok Hasan Saleh, Daud Beureueh memindahkan markasnya ke Kabupaten Aceh Utara dan Timur. Dalam pada itu Hasan Ali, yang baru saja kembali dari Jerman Barat, dengan sangat membujuk Ayah Gani dan Hasan Saleh agar membubarkan Dewan Repolusi, tetapi usaha ini tidak membawa hasil. Oleh karena itu pada akhir April 1959 dia pun merombak kabinetnya.⁶⁴

Bagi kedua kelompok, dua bulan berikutnya ditandai oleh suatu proses konsolidasi dan perjuangan memperluas pengaruh di dalam dan di luar lingkaran masing-masing, dalam usaha untuk mengalahkan saingan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, kedua belah pihak terpaksa bersandar pada kekuatan-kekuatan luar. Disebabkan oleh kurangnya dukungan rakyat, Dewan Repolusi harus menyandarkan diri pada popularitas kepemimpinan formal Gaharu dan Hasjmy. Dengan cara ini, dalam waktu relatif singkat Dewan Repolusi berhasil menguasai kekuatan-kekuatan sipil dan militer NBA di Kabupaten-Kabupaten Pidie, Aceh Barat, dan Selatan. Di samping kemenangan ini, sumber dukungan lain yang penting diperoleh Dewan Repolusi tatkala Abdul Wahab Ibrahim membawa resimen Aceh Besar bergabung dengan Dewan Repolusi. Dengan demikian, dalam arti wilayah, Dewan Repolusi telah menang di lebih dari separuh jumlah kabupaten Aceh, dan melepas tiga kabupaten, yaitu Aceh Utara, Timur dan Tengah, serta pendukung luar NBA di Sumatera Timur, kepada Daud Beureueh. Lebih penting lagi, dari segi kekuatan militer, Dewan Repolusi menguasai lebih kurang enam puluh persen dari seluruh pasukan dan senjata NBA, termasuk perlengkapan yang diterima dari PRRI.

Karena mengalami kehilangan yang demikian besar, Daud Beureueh pun terdorong untuk bekerja sama lebih dekat lagi dengan PRRI. Dalam hubungan ini dilaporkan bahwa beberapa pemimpin PRRI, termasuk

63. Wawancara dengan Hasan Saleh, Kutaraja, 20 Oktober 1973. Cerita ini dibenarkan oleh Abdurrahman Hasjim; wawancara dengannya, Sabang, 22 Oktober 1973.

64. Lihat "Susunan Kabinet Hasan Ali ke 2", pamflet yang dikeluarkan oleh NBA, tertanggal 1 Mei 1959.

Burhanuddin Harahap, Dahlan Djambek, dan mungkin pula Simbolon, telah datang ke Aceh segera sesudah Daud Beureueh memindahkan markasnya ke Aceh Timur pada bulan April. Menurut sebuah laporan intelijen lokal, Daud Beureueh memperoleh bantuan dari pasukan-pasukan PRRI dan OSM yang berkedudukan di sepanjang perbatasan Aceh-Sumatera Timur. Juga dilaporkan bahwa perombakan terhadap kabinet Hasan Ali dapat terlaksana berkat bantuan kekuatan-kekuatan luar ini. Kerja sama yang erat bukan hanya diperlihatkan oleh kenyataan hadirnya pemimpin-pemimpin PRRI waktu kabinet itu diresmikan, melainkan juga oleh pengangkatan beberapa tokoh PRRI-OSM sebagai penasihat politik dan militer NBA.⁶⁵ Dengan bantuan PRRI itu, pada awal Mei 1959 NBA berhasil mengkonsolidasikan diri dan siap bergerak untuk menghancurkan Dewan Repolusi.

Kemampuan NBA untuk memulihkan diri dalam waktu yang begitu singkat menimbulkan kesulitan besar bagi Dewan Repolusi. Karena kegiatan-kegiatan para pemimpin NBA, dalam bentuk kampanye anti-Dewan Repolusi dan propaganda terhadap para pemimpin tingkat rendah yang mendukung Hasan Saleh, berhasil merusak rencana Dewan Repolusi untuk merebut daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Daud Beureueh, maka oleh perwira-perwira KDMA gerakan ini dianggap telah kehilangan citra "revolusioner" dan sebaliknya, menjadi "dewan evolusi". Hasan Saleh dan para pengikutnya pertama-tama sangat terpengaruh oleh kampanye saingan mereka yang bertema "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah sama dengan menyerah". Kendatipun Gaharu dan Hasjmy telah membantu Dewan Repolusi untuk melawan saingan mereka dalam masalah ini, NBA cukup berhasil dengan pendekatan propagandanya. Sebagai akibatnya, resimen Dewan Repolusi di Aceh Besar, umpamanya, tetap setia kepada Daud Beureueh. Resimen tersebut menolak permintaan KDMA agar menangkap pemimpin-pemimpin NBA yang berkampanye menentang Dewan Repolusi di Aceh Besar, dan sebaliknya juga tidak mengizinkan KDMA mengambil tindakan terhadap mereka.⁶⁶ Contoh lainnya adalah penolakan resimen yang dipimpin oleh Ijas Leube terhadap perintah Dewan Repolusi agar

65. Hal ini muncul dalam suatu laporan militer yang dipersiapkan oleh dinas intelijen KDMA, bertanggal Kutaraja, 16 Mei 1959.

66. *Ibid.*

menghentikan pemungutan infak. Dalam kenyataannya resimen ini kemudian malah bergabung kembali dengan Daud Beureueh.

Selain memberikan bantuan keuangan dan melawan tuduhan-tuduhan terhadap Dewan Repolusi, Gaharu tidak dapat berbuat banyak, meskipun ia memerlukan Dewan Revolusi itu untuk menghadapi pengaruh Daud Beureueh yang sedang merambah. Di lain pihak Gaharu pun tidak mungkin melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menghancurkan kelompok Daud Beureueh yang keras kepala itu, sebab sangat mungkin tindakan keras seperti itu justru akan mengayunkan pendulum dukungan rakyat ke arah yang berlawanan. Walaupun sangat berharap bahwa pengakhiran pemberontakan akan menjadi suatu langkah untuk memulai kembali rehabilitasi ekonomi, rakyat masih menghargai Daud Beureueh serta pemimpin-pemimpin ideologis yang lain, dan menghargai apa yang telah mereka perbuat. Dalam hal demikian Gaharu tidak mau mengambil risiko, sehingga ia meneruskan kebijaksanaan damainya, kendatipun Daud Beureueh telah membatalkan gencatan senjata. Ia tentu saja sadar bahwa sebagian besar rakyat Aceh merasa berterima kasih kepada Daud Beureueh, sebab mereka berpendapat bahwa semua perbaikan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah itu adalah hasil perjuangan yang dipimpin oleh Daud Beureueh, dan bukanlah sesuatu yang diberikan secara sukarela. Jadi, dalam keadaan demikian, suatu pukulan besar yang dilancarkan KDMA terhadap Daud Beureueh mungkin akan membahayakan seluruh program perdamaian, karena rakyat akan bersimpati terhadap Daud Beureueh dan membantu pemberontak.

Kekhawatiran Gaharu akan nasib rencana perdamaannya bukan tidak beralasan. Penentangan terhadap Dewan Repolusi memang telah timbul segera setelah berita tentang kemungkinan perundingan resmi dengan Pemerintah Pusat diketahui umum. Akan tetapi oposisi kali ini tidak berasal dari kelompok anti-PUSA dalam lingkaran Perti-ulebalang. Ketika itu kelompok Perti-ulebalang ini tidak berada pada posisi untuk melancarkan aksi sedemikian, sebab kebanyakan dari pemimpinnya yang aktif dan penting telah ditahan atau dilarang tinggal di Aceh. Sekarang tantangan datang dari dalam badan pemerintahan sendiri, yaitu yang digerakkan oleh para simpatisan Darul Islam yang dekat dengan Masyumi dan Front Pemuda Aceh. Unsur-unsur yang menjadi anggota DPRD ini memanfaatkan lembaga perwakilan tersebut untuk melan-

carkan protes terhadap penguasa daerah. Kelompok ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kecaman-kecaman yang dilancarkan oleh NBA terhadap pengkhianatan Hasan Saleh dan kawan-kawannya. Mereka menolak menerima penyelesaian pemberontakan melalui perundingan dengan Dewan Revolusi, karena mereka berpendapat bahwa suatu perdamaian harus meliputi Daud Beureueh dan para pengikutnya. Pada hemat mereka, penyelesaian yang hanya melibatkan Dewan Revolusi tidak akan membawa perdamaian bagi rakyat, melainkan memperpanjang perpecahan. Para pemimpin kelompok ini berprasangka bahwa Gaharu sengaja tidak memasukkan Daud Beureueh ke dalam program perdamaannya sehingga ia dapat melakukan balas dendam atas kepahitan pribadi yang dialaminya pada masa revolusi.⁶⁷ Kritik-kritik ini oleh penguasa daerah dianggap sebagai suatu hal yang sangat serius dan dapat mengancam perundingan perdamaian. Akibatnya, dua belas orang tokoh yang dikenali sejalan dengan garis kritik ini ditangkap pada bulan Mei.⁶⁸

Oposisi lokal bukanlah satu-satunya hal yang mengkhawatirkan para penguasa daerah dan pimpinan Dewan Revolusi. Selain itu, jalan ke arah perdamaian pada prakteknya masih belum terlihat, walaupun kedua belah pihak telah berusaha keras untuk mencegah terjadinya konflik. Sebegitu jauh, Dewan Revolusi telah berunding secara tidak resmi dengan Nasution, dan perundingan yang akan datang agaknya tidak akan menghasilkan penyelesaian akhir, sebab pada pihak pemerintah masih ada Presiden dan kabinet yang perlu diperhitungkan. Sampai awal Mei 1959 Perdana Menteri Djuanda telah mengungkapkan dengan jelas kepada Dewan Revolusi, dalam pembicaraan tidak resmi dengan salah seorang pemimpinnya, Ishak Amin, bahwa pemerintah tidak mungkin memberi status daerah istimewa kepada Aceh, meskipun KSAD diketahui telah menjanjikannya. Djuanda berpendapat, negeri ini tidak

67. Wawancara dengan Acha, Kutaraja, 2 November 1975.

68. Di antara tokoh-tokoh yang ditahan itu adalah Wakil Ketua Masyumi cabang Aceh Latif Rusjdi dan Ketua Front Pemuda Aceh Acha, selain Menteri Penerangan Saleh Adri dari kabinet Daud Beureueh yang terakhir, yakni satu-satunya pemimpin NBA yang terlibat dalam gerakan ini. Lihat juga sebuah keputusan KDMA, bertanggal 29 Mei 1959. Orang-orang ini sebenarnya ditangkap pada awal bulan, dan keputusan yang dikutip di sini memerintahkan pemindahan mereka dari tahanan militer di Kutaraja ke Sabang.

akan memiliki daerah istimewa lain selain Yogyakarta. Tetapi tatkala Ishak Amin mengisyaratkan bahwa Dewan Revolusi akan segera melanjutkan perlawanannya, maka Perdana Menteri pun menjanjikan untuk membahas masalah ini dalam suatu sidang istimewa kabinet.⁶⁹ Gaharu dan Hasjmy diundang juga guna menyampaikan pendapat mereka kepada sidang kabinet, dan mereka menegaskan bahwa pemberontakan akan dapat diselesaikan atas dasar Ikrar Lam Teh. Ini berarti memberi status istimewa dalam bidang pembangunan agama dan daerah kepada Aceh. Didukung oleh Nasution, akhirnya kabinet setuju mengadakan perundingan resmi dengan Dewan Revolusi. Untuk maksud ini, kabinet merencanakan untuk mengirim suatu misi pemerintah di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Hardi (dari PNI) ke Aceh. Namun demikian, Djuanda meminta Gaharu dan Hasjmy agar terlebih dahulu memintakan persetujuan Presiden Soekarno.⁷⁰

Tampaknya Gaharu dan Hasjmy tidak sulit memperoleh persetujuan Presiden. Dalam pertemuan mereka dengan Soekarno, yang didampingi oleh KSAD, KSAL, dan KSAU, hanya KSAL Komodor Subijakto, yang sangat menentang perundingan dengan pemberontak. Nasution, sebagaimana yang diperkirakan, mendukung rencana perdamaian itu, sedangkan pendapat KSAU Surjadarma, tidak begitu jelas. Subijakto menegaskan bahwa Angkatan Laut cukup kuat untuk menghancurkan Darul Islam. Walaupun demikian Soekarno memberikan restunya bagi rencana perdamaian yang diusulkan oleh kabinet tersebut.⁷¹ Sesungguhnya secara prinsip Presiden sudah lebih dahulu menyetujui rencana perdamaian itu, bahkan sebelum kabinet membicarakannya. Tatkala mengetahui bahwa para pemimpin Dewan Revolusi sering berada di Jakarta untuk menemui Nasution dan Djuanda, maka Soekarno secara

69. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

70. A. Hasjmy, "Apa Dan Mengapa 26 Mei?", dalam Tk. Alibasjah Talsya, *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh* (Kutaraja: Pustaka Putroe Tjanden, 1969), hal. 16.

71. *Ibid.*, hal. 16. Nasution mengatakan bahwa baik KSAL maupun KSAU percaya pada prinsip-prinsip militer yang konvensional dalam arti bahwa pemberontakan harus diatasi dengan kekerasan; wawancara dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Jakarta, 5 Mei 1976. Seorang pemimpin Aceh berspekulasi bahwa oposisi Subijakto didasarkan pada dendam pribadinya terhadap para pemimpin Aceh yang telah memperlukannya pada masa revolusi; wawancara dengan Husin Jusuf, Kutaraja, 29 November 1975.

pribadi mengatur pertemuan dengan mereka. Agaknya ia telah bertemu dengan Ishak Amin tanpa sepengetahuan kabinet. Dalam suatu pertemuan di istana, mereka telah membahas kemungkinan untuk mengakhiri pemberontakan itu dengan jalan memberikan status istimewa kepada Aceh sehingga daerah itu dapat melaksanakan pembangunan ekonomi.⁷²

Bila kita simak seluruh perkembangan yang telah menyebabkan munculnya Dewan Repolusi, maka akan tampaklah dua faktor utama yang melatarbelakanginya. Pertama, kekalahan PRRI dan kemenangan Pemerintah Pusat dapat dipastikan mempunyai dampak terhadap hasrat Darul Islam untuk melanjutkan perlawanan, dan terhadap penilaian mereka tentang kekuatan Angkatan Darat. Kekalahan PRRI segera diikuti oleh suatu perubahan dalam perimbangan kekuatan di tingkat nasional. Sejak diperkenalkannya Undang-undang Darurat Perang pada bulan Maret 1957, secara berangsur-angsur Angkatan Darat memiliki kekuasaan yang cukup besar, sehingga menyebabkan partai-partai politik kehilangan sebagian besar peranan mereka. Kecenderungan ini berlangsung terus setelah kekalahan PRRI. Pada akhir tahun 1958, kekuasaan semakin terpusat pada Angkatan Darat dan Presiden. Masyumi, karena keterkaitannya dengan pemberontakan itu, dengan sendirinya kehilangan sebagian besar pengaruh politiknya ketika Angkatan Darat berhasil menhancurkan PRRI. Di lain pihak, partai-partai politik lain, kecuali PKI, juga merasakan dampak pergeseran kekuasaan kepada Soekarno dan pemimpin-pemimpin Angkatan Darat. PKI terhindar dari kecenderungan mundurnya peranan partai politik karena selalu berada di luar kabinet, dan malah dalam kenyataannya konsolidasi yang dilakukannya menyebabkan organisasi partai tersebut berkembang dengan pesat.⁷³ Kekalahan PRRI dan kemunduran partai-partai politik telah memungkinkan gabungan kekuatan Soekarno dan Angkatan Darat membentuk Pemerintah Pusat yang kuat, yang tidak mudah ditantang seperti sebelumnya.

Setelah memukul PRRI, posisi Jakarta baik dalam bidang militer maupun diplomasi menjadi sangat meningkat, sehingga kemungkinannya

72. Wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

73. Mengenai partai politik, lihat Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966), bab 3 dan 4.

untuk memenangkan tantangan bersenjata sekarang ini lebih besar daripada sebelumnya. Dari sudut pandang militer, kekalahan unsur-unsurnya yang memberontak itu telah menyebabkan Angkatan Darat lebih bersatu. Di lain pihak kemenangan atas PRRI memberikan kekuatan psikologis yang lebih besar kepada pasukan militer pemerintah guna menghadapi perlawanan bersenjata lainnya. Di samping itu, Jakarta juga telah memperoleh pengalaman militer yang sangat berharga, terutama dalam menyusun operasi-operasi militer berskala besar, selain bisa membangun kekuatan militer dengan senjata-senjata modern yang direbut dari PRRI.

Pengaruh kemenangan ini juga terasa dalam bidang diplomasi. Sebelumnya baik Singapura maupun Malaya telah memberikan bantuan kepada para pemberontak dengan berbagai cara. Kini kedua negara itu tidak mempunyai alternatif lain selain daripada meningkatkan hubungan dengan negara tetangga mereka yang besar itu. Dalam kaitan ini, Menteri Luar Negeri Malaya Datuk Ismail, berkunjung ke Jakarta pada pertengahan tahun 1958 untuk membahas hubungan yang tidak lancar antara kedua negara. Hasilnya, pada bulan Januari 1959 penguasa Malaya menyingkapkan kegiatan suatu organisasi setempat yang menyediakan dokumen perdagangan dan perjalanan kepada para pemberontak dari Indonesia. Kemudian, pada tahun yang sama, lebih kurang tiga puluh penyelundup PRRI ditangkap pula di sana.⁷⁴ Begitu juga, meski bertindak dengan enggan, pemerintah Singapura perlahan-lahan membatasi kegiatan kaum pemberontak Indonesia di negeri itu.

Kenyataan ini menyebabkan hubungan antara zuama dan ulama dalam kepemimpinan pemberontakan semakin meruncing dan terlihat sebagai pertikaian antara kaum ideologis dan militer pragmatis, yang pada akhirnya memecah-belah kaum pemberontak. Konflik seperti ini juga terdapat di Sulawesi Selatan, yakni antara kelompok Bahar Mattalioe yang pragmatis dengan Kahar Muzakkar yang ideologis, sehingga menyebabkan Bahar Mattalioe pada akhirnya mengkhianati Kahar Muzakkar pada bulan September 1959. Sebagaimana halnya Hasan Saleh di Aceh, pada masa awal pemberontakan Bahar Mattalioe sangat dekat dengan dan patuh kepada Kahar Muzakkar. Kepatuhannya diperlihatkan oleh fakta bahwa ia bahkan sanggup membakar rumah dan merampas

74. *Warta*, 26 Januari 1959 dan 8 Januari 1960.

harta ayahnya sendiri. Bahar Mattalioe hanyalah salah seorang dari dua panglima divisi TII di Sulawesi Selatan, tetapi ia merupakan tokoh kedua setelah Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar dengan sendirinya merasa terancam oleh dan waspada terhadap kenyataan ini, terutama karena ia banyak berbeda pendapat dengan Bahar Mattalioe. Karena khawatir terhadap saingannya, pada suatu waktu Kahar Muzakkar diyakini pernah memutuskan untuk membunuh teman seperjuangannya itu.⁷⁵

Tetapi Kahar Muzakkar mengubah pikirannya, dan kemudian mencoba mengendalikan saingannya dengan cara memperkuat posisinya sendiri. Untuk mengurangi pengaruh Bahar dalam bidang militer di samping menjaga diri dari percobaan pembunuhan, pada tahun 1957 Kahar Muzakkar membentuk satu unit komando khusus, satu pasukan elite yang mempunyai wewenang tidak terbatas, di bawah pimpinannya sendiri. Namun begitu, Kahar Muzakkar tidak mampu membendung saingannya, karena walaupun menyetujui pembentukannya, saingannya itu menghambat pengembangan pasukan baru tersebut dengan jalan menolak menggabungkan pasukannya sendiri ke dalamnya. Karena kecewa akan sikap Bahar Mattalioe, Kahar Muzakkar pun menyuruh Bahar meninggalkan kedudukannya dan pergi ke luar negeri untuk "sekolah".⁷⁶ Bahar terpaksa mematuhi perintah ini, sebab ia percaya bahwa ia pasti akan ditangkap bila membangkang,⁷⁷ tetapi segera setelah itu ia menerima tawaran Soekarno untuk menyerah. Namun, berlainan dari kasus Aceh, Bahar Mattalioe dan kawan-kawannya hanya menerima amnesti umum dari Pemerintah Pusat di samping bantuan keuangan.

Mengapa Pemerintah Pusat mau memberikan konsesi besar kepada para pemberontak Aceh, padahal kekuatan kelompok-kelompok pemberontak utama, khususnya PRRI, sedang menurun? Dalam hal ini perbaikan posisi Pemerintah Pusat tentu saja memberikan kesempatan dan kemungkinan yang lebih besar untuk mengatasi pemberontakan yang sedang memudar itu. Namun Pemerintah Pusat lebih suka untuk berunding dengan para pemberontak di Aceh daripada menghantam mereka. Dapatkah dengan demikian dikatakan bahwa Jakarta sedang memainkan

75. Bahar Mattalioe, *Kahar Muzakkar dengan Petualangannya* (Jakarta: C.V. Delegasi, 1965), hal. 58-59.

76. Abdul Qahhar Mudzakkar, "Kambing Hitam DI/TII di Sulawesi" (t.p., 1960).

77. Mattalioe, *op. cit.*, hal. 93-94.

politik bermurah hati? Banyak orang Aceh yang percaya bahwa alasannya ialah bahwa Kabinet khawatir Dewan Repolusi akan melanjutkan perlawanan dan bergabung kembali dengan Daud Beureueh bila tidak mendapat penyelesaian yang wajar. Mereka juga percaya bahwa kecintaan Soekarno yang begitu besar kepada Daud Beureueh merupakan faktor lain yang mempengaruhi kebijaksanaan Jakarta itu.⁷⁸ Pengaruh perasaan pribadi Presiden itu bahkan menjadi lebih penting lagi, sebab dilaporkan bahwa ia merasa yakin bahwa rakyat Aceh tidak menentang Soekarno pribadi, tetapi berontak karena frustrasi terhadap Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak memberi perhatian yang pantas kepada mereka, padahal sebelumnya pemerintah telah menjuluki daerah itu sebagai "daerah modal", yakni karena sumbangan yang diberikannya kepada revolusi nasional.⁷⁹

Meskipun perasaan pribadi seperti itu mungkin saja telah mempengaruhi pertimbangan Soekarno sehingga perlu diperhitungkan, jawaban yang lebih mungkin terhadap pertanyaan di atas berkisar pada konstelasi politik di tingkat nasional. Setelah partai-partai politik kehilangan peranan pada tahun 1957-1958, penyelesaian masalah pemberontakan sangat ditentukan oleh kepentingan kedua kekuatan utama yang bersaingan, Presiden dan pimpinan Angkatan Darat. Ketidakstabilan politik telah memberikan kekuasaan ekstra kepada Angkatan Darat dalam hampir semua aspek kehidupan di negeri ini. Keadaan darurat perang telah memungkinkan Angkatan Darat untuk memainkan peranan dalam bidang ekonomi melalui pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dan Cina. Di samping itu keadaan darurat perang juga membuka jalan bagi Angkatan Darat untuk melangkah ke dalam bidang kekuasaan sipil. Nasution kini menjadi Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dan, oleh karena itu, dia membayangi kekuasaan kabinet dan

78. Dalam suatu pertemuan dengan seorang pemimpin Dewan Repolusi di Jakarta Soekarno mengatakan bahwa seorang pemimpin besar seperti Daud Beureueh seharusnya tidak berjuang di hutan; wawancara dengan Ishak Amin, Kutaraja, 3 November 1975.

79. Daud Beureueh mengatakan bahwa sesungguhnya ia tidak menentang Soekarno melainkan Pemerintah Pusat. Meskipun marah dan sakit hati karena Soekarno gagal menepati janji untuk mengizinkan pelaksanaan hukum Islam di Aceh, Daud Beureueh menyadari sepenuhnya bahwa Soekarno tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk mewujudkan hal itu dalam sistem parlementer yang sedang berlaku; wawancara dengan Daud Beureueh, Beureunuen, 10 Juli 1973.

Presiden. Di tingkat daerah, para panglimanya mendominasi propinsi-propinsi sebagai Penguasa Perang Daerah (Peperda).

Berlainan dari langkah Nasution dalam menuju pusat kekuasaan, Soekarno tidak mampu untuk menentang pengaruh Angkatan Darat secara efektif, sebab ia tidak mempunyai partai sendiri atau pengaruh yang memadai atas unit-unit militer. Untuk dapat melindungi kekuasaannya, ia sendiri harus bersandar pada PKI, dan, dalam kadar yang lebih rendah, pada PNI serta NU.⁸⁰ Tetapi langkah tandingan Soekarno ini paling banyak hanya dapat menyeimbangkan neraca saja. Dalam keadaan begini, satu-satunya jalan bagi Presiden untuk mengurangi kekuasaan Angkatan Darat adalah mengamankan pengaruhnya sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini bisa dicapainya melalui penghapusan sumber utama kekuasaan saingannya, yakni keadaan darurat perang. Dalam hubungan ini sama sekali tidak akan ada kemungkinan baginya untuk melakukan hal itu bila keamanan dalam negeri masih belum dapat dipulihkan. Oleh karena itu, untuk memulihkan keamanan dalam negeri, Presiden yakin bahwa penyelesaian persoalan dengan rakyat Aceh akan menguntungkan dirinya. Harapan ini mungkin telah menyebabkannya menyetujui rencana Kabinet untuk berunding dengan Dewan Repolusi.

Masalahnya tidak jauh berbeda bagi Angkatan Darat sendiri. Para pemimpin Angkatan Darat telah berada dalam keadaan yang sulit sejak berakhirnya revolusi, sebab mereka harus menghadapi konflik internal yang berkepanjangan serta perlawanan bersenjata di semua pulau besar negeri ini. Paradoksnya, walaupun persoalan itu merupakan suatu rahmat, dalam arti bukan memperlemah tetapi malah memperkuat kekuasaan mereka di pusat dan daerah, pimpinan Angkatan Darat menginginkan agar gejolak-gejolak itu dapat diakhiri. Alasannya ialah bahwa sementara mereka sibuk dengan pergolakan-pergolakan tersebut, PKI terus berkembang pesat dan telah muncul sebagai suatu kekuatan politik yang besar. Yang lebih penting lagi di mata para pemimpin Angkatan Darat ialah fakta bahwa partai itu mulai berani menantang mereka

80. Untuk uraian yang lebih mendalam tentang hubungan Soekarno-Angkatan Darat dalam periode ini, lihat Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy", dalam *Indonesia*, diedit oleh Ruth T. McVey (New Haven: HRAF Press, 1967), hal. 325-338. Juga wawancara dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Jakarta, 5 Mei 1976.

secara langsung. Pada bulan November 1958, karena curiga akan peranan sipil yang dimainkan Angkatan Darat dan fakta bahwa Angkatan Darat anti-komunis, pemimpin-pemimpin PKI mengecam secara terbuka dan keras campur tangan Angkatan Darat dalam urusan non-militer.⁸¹ Tetapi pimpinan Angkatan Darat merasa yakin bahwa mereka akan dapat mengatasi PKI, terutama dengan Undang-undang Darurat Perang di tangan mereka. Walaupun begitu, berapa lama lagikah mereka sanggup menjaga agar PKI tidak menyentuh mereka, sementara mereka sendiri masih harus menghadapi berbagai pemberontakan daerah? Kekhawatiran Angkatan Darat terhadap PKI dengan sendirinya meningkat tatkala Presiden berhasil menarik partai itu ke pihaknya. Dalam keadaan demikian, penyelesaian terhadap pemberontakan Aceh juga merupakan kepentingan Angkatan Darat, sebab akan memungkinkan mereka untuk menghadapi kaum komunis secara lebih terkonsentrasi.

Tetapi, mengapa konsesi politik yang begitu besar ditawarkan kepada Aceh dan tidak kepada daerah-daerah lain? Barangkali salah satu alasannya terdapat dalam fakta bahwa Pemerintah Pusat telah mampu menghantam PRRI dan menguranginya menjadi gerakan gerilya dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa kehancurannya merupakan soal waktu saja. Salah satu faktor yang memungkinkan penghancuran itu ialah asumsi bahwa PRRI tidak memiliki semangat juang yang memadai untuk memelihara perlawanan militernya.⁸² Berbeda dari PRRI, atau suku Minangkabau dalam hal ini, para pemberontak Aceh memiliki semangat juang itu. Pertama, pemberontakan di Aceh itu, dari segi watak, merupakan suatu perlawanan ideologis yang diakibatkan oleh keberhasilan para ulama memberi warna agama pada pemberontak tersebut. Kedua, pemberontakan itu juga diperkuat oleh rasa kesukuan yang menyebabkan rakyat secara fanatik bangkit menentang setiap kekuatan luar yang mencoba mencampuri urusan intern mereka. Tidak kurang pentingnya adalah kenyataan bahwa fanatisme keagamaan dan rasa kedaerahan rakyat Aceh yang kuat telah

81. Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1966), hal. 271.

82. Seorang penulis dari Sumatera Barat mengakui bahwa orang-orang Minangkabau tidak mempunyai bakat militer; lihat Datuk Madjo Sati, *Aku Menggugat* (Jakarta: C.V. R. Hamzah: 1959), hal. 49.

mengikat erat mayoritas rakyat dengan pemimpin mereka, suatu fakta yang hampir tidak ditemukan di daerah-daerah bergolak lainnya. Tidak mustahil bahwa kondisi ini telah menghalangi Pemerintah Pusat dalam melancarkan operasi militer besar-besaran di Aceh, dan tindakan yang sebaliknya justru dapat membakar seluruh daerah itu serta meminta korban di kalangan militer sendiri.⁸³ Selain itu, yang menguntungkan kaum pemberontak adalah geografi Aceh yang sangat sesuai bagi perjuangan mereka. Medannya sangat tepat untuk perang gerilya,⁸⁴ sementara lokasi dan garis pantainya yang berawa-rawa di sepanjang Selat Malaka memudahkan orang Aceh menyelundupkan barang ke Semenanjung Melayu.

Sebagai tambahan, mungkin pula rencana perdamaian Pemerintah Pusat dimaksudkan sebagai suatu pancingan bagi gerakan-gerakan Darul Islam di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Telah dipercayai umum bahwa dari ketiga gerakan Darul Islam, pemberontakan di Aceh memiliki daya tarik keagamaan yang paling kuat terhadap penduduk setempat. Di Jawa Barat, meskipun dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama, gerakan Darul Islam berakar pada oposisi Kartosuwirjo terhadap Perjanjian Renville antara Belanda dan Indonesia. Kecuali dukungan terbatas terhadap seruan-seruannya, Kartosuwirjo tidak dapat mempertahankan citra keagamaan dari gerakannya, terutama karena kegagalan para pengikutnya untuk menghormati prinsip-prinsip Islam secara ketat. Kasus gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan juga serupa, yaitu pada dasarnya merupakan konflik kepentingan antara kaum militer pusat dan lokal.

Berbeda dari Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, gerakan Darul Islam di Aceh tidak saja dipimpin oleh seorang ulama sebagai pemimpin tertinggi, tetapi juga didukung oleh mayoritas ulama Aceh. Lebih penting lagi, kepemimpinan ini dihormati rakyat. Rakyat Aceh menghargai bimbingan keagamaan dari Darul Islam, sebab mereka tahu bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya diterapkan pada mereka saja melainkan juga pada

83. Dari surat KSAD kepada Sjammaun Gaharu, tanggal 24 Januari 1957, tampak dengan jelas bahwa para penguasa pusat lebih menyukai penyelesaian damai dengan kaum pemberontak Aceh demi menghindarkan korban materi dan jiwa yang lebih banyak.

84. A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Seruling Masa, 1968), Jilid 2, hal. 255.

lingkungan pemberontak sendiri. Daya tarik agama NBA yang demikian menonjol mungkin telah memberi harapan bagi Jakarta bahwa sekali ulama-ulama Aceh yang saleh itu menghentikan gerakan mereka, maka warna keagamaan gerakan yang kurang saleh di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan akan dapat ditelanjangi. Ini berarti bahwa pemerintah akan dapat memencilkan gerakan-gerakan tersebut dari rakyat sehingga akhirnya mengalahkan mereka.

Dalam pada itu, menyusul keputusan kabinet untuk menyelesaikan pemberontakan Aceh secara damai, Perdana Menteri Djuanda mengirim sebuah misi yang beranggota tiga puluh orang untuk berunding dengan Dewan Repolusi pada bulan Mei 1959. Misi yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Hardi itu tiba di Kutaraja pada tanggal 23 Mei, dua bulan lebih sesudah Hasan Saleh beserta kawan-kawannya membentuk Dewan Repolusi, atau empat hari setelah pemerintah sepakat untuk mengadakan perundingan resmi dengan para pemberontak. Susunan misi itu jelas mengisyaratkan kebijaksanaan lunak pemerintah terhadap Aceh. Jelas pula bahwa janji-janji pembangunan ekonomi telah dijadikan alat untuk memperlancar perundingan. Dengan demikian, selain dari Wakil KSAD Mayor Jenderal Gatot Subroto, dalam misinya Hardi juga menyertakan Menteri Negara Rehabilitasi Ekonomi Kolonel Suprajogi, serta pejabat-pejabat dari kementerian keuangan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, pendidikan, pelayaran, dalam negeri, dan agama. Untuk dapat meyakinkan rakyat bahwa misi besar ini bukanlah suatu rombongan pejabat pemerintah yang dengan mudah menjanjikan pembangunan ekonomi kepada rakyat setempat seperti sebelumnya, maka Hardi mengumumkan bahwa ia juga membawa uang sebanyak hampir Rp 90 juta sebagai tambahan bagi anggaran pembangunan daerah itu.⁸⁵

Keinginan Pemerintah Pusat untuk berunding secara resmi dengan Dewan Repolusi dan untuk mencapai suatu saling pengertian dalam berbagai pembicaraan informal sebelumnya merupakan petunjuk bahwa perundingan akan membawa hasil. Akan tetapi pembicaraan resmi di Kutaraja itu sama sekali bukan merupakan suatu formalitas, sebab pimpinan Dewan Repolusi, secara mengherankan, tetap berusaha memperoleh tawaran paling tinggi yang mungkin mereka capai. Untuk maksud itu mereka telah mempersiapkan diri. Tampaknya mereka sa-

85. Lihat lampiran *Tegas*, 26 Mei 1959.

ngat menyadari adanya kemungkinan, meskipun kecil, gagalnya perundingan, dan kegagalan ini dapat menyebabkan pemerintah memecah-belah Dewan Repolusi. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin Dewan Repolusi bersikap waspada. Pengawasan terhadap delegasi mereka amat ketat. Dari dua puluh lima anggota delegasi, hanya empat orang yang diizinkan berbicara -- yaitu Ayah Gani, Hasan Saleh, Teuku Muhammad Amin, dan Ishak Amin. Tidak satu pun dari mereka dibenarkan berbicara tentang perundingan, sebab untuk ini Dewan Repolusi telah mengangkat Abdul Gani Mutyara sebagai juru bicara. Di lain pihak, pemilihan orang-orang ini jelas mengisyaratkan bahwa Dewan Repolusi mencoba menghindari perdebatan panas dengan para pemimpin pusat, karena kelima tokoh ini dikenal sebagai orang-orang yang dapat berbicara lembut. Pemimpin-pemimpin seperti Husin Jusuf dan Al-Mudjahid, yang pada masa lalu sangat merasakan pahitnya kebijaksanaan Jakarta, ditempatkan di garis belakang.⁸⁶

Sidang pertama dan pembukaan perundingan pada pagi hari tanggal 25 Mei, walaupun terbuka untuk tokoh-tokoh di luar lingkaran pemberontak, mengisyaratkan bahaya sebab sidang itu telah berubah menjadi pembicaraan yang keras. Suasananya berbau konfrontasi, sebanding dengan keadaan dalam serangkaian pembicaraan antara misi Pemerintah Pusat, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Assaat, dengan Daud Beureueh dan kawan-kawannya di Kutaraja pada tahun 1950. Tentu ada penjelasan bagi kesamaan ini. Setidak-tidaknya dalam pandangan rakyat Aceh, perjuangan politik sekarang ini merupakan hasil dari masalah-masalah yang dihadapi Aceh sejak diakuinya kemerdekaan Indonesia, dan ini juga bukan kaitan satu-satunya antara peristiwa masa lampau itu dengan yang sekarang. Tokoh-tokoh Aceh yang mengambil bagian dalam perundingan dengan misi Hardi pun kebanyakan adalah orang-orang yang berperan dalam pembicaraan dengan Assaat pada tahun 1950 itu.

Dalam suasana yang demikian dapatlah diperkirakan bahwa para pemimpin Dewan Repolusi akan mengungkapkan kembali perasaan mereka terhadap Pemerintah Pusat. Sesudah Gubernur Hasjmy, yang bertindak sebagai tuan rumah, secara resmi membuka perundingan, maka Ketua Dewan Repolusi, Ayah Gani, menguraikan sejarah Aceh

86. Tentang susunan delegasi Dewan Repolusi, lihat Keputusan Dewan Repolusi no. 163/DR/1959, tanggal 24 Mei 1959.

sejak masa jayanya. Setelah memuji peranan Islam dan keunikan sejarah daerah itu, pidatonya memuncak pada sumbangan-sumbangan yang telah diberikan Aceh kepada revolusi dan kegagalan Pemerintah Pusat untuk menghargainya begitu kemerdekaan diperoleh. Ayah Gani mengatakan bahwa uraiannya itu tidak dimaksudkan sebagai ungkapan kepahitan Aceh melainkan sebagai pengingat bagi pemimpin-pemimpin pusat dalam merumuskan kebijaksanaan nasional.⁸⁷ Dalam jawabannya Hardi berusaha menghindari konfrontasi dengan Dewan Repolusi, karena tujuan misinya adalah untuk memperlunak rasa dendam rakyat Aceh. Ia sependapat bahwa Aceh telah diabaikan pada masa lalu, tetapi ia tidak mau mengatakan siapa yang bersalah. Ia hanya menyerukan kepada para pemimpin Dewan Repolusi supaya membantu memecahkan persoalan ini demi kebahagiaan rakyat.⁸⁸

Kendatipun sikap Hardi sangat lembut, suhu dalam ruangan konferensi itu meningkat segera setelah sidang tertutup dimulai. Saling pengertian yang telah dicapai dalam pembicaraan informal di Jakarta pada pertengahan Mei, ketika Pemerintah Pusat setuju memperlakukan Aceh sebagai suatu daerah istimewa, menyebabkan kebuntuan ketika pimpinan Dewan Repolusi mengajukan dua buah naskah tuntutan begitu sidang dilanjutkan setelah istirahat makan siang. Naskah pertama pada umumnya menyangkut status daerah, yang akan disebut Daerah Istimewa Aceh Darussalam, dan perincian isi otonominya. Naskah kedua memuat daftar dua belas tuntutan Dewan Repolusi. Kedua naskah itu mengungkapkan konsep Dewan Repolusi mengenai daerah istimewa, yang jelas merupakan garis besar dari suatu hubungan yang bersifat federalis. Para pemimpin Dewan Repolusi mengusulkan agar Aceh mempunyai semua kekuasaan, kecuali dalam urusan luar negeri, pertahanan, dan keuangan. Sebagai tambahan, mereka mengaitkan otonomi yang demikian luas itu dengan prinsip kebebasan beragama yang menegaskan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mereka juga menuntut, amnesti dan abolusi yang ditawarkan Pemerintah Pusat kepada Darul Islam harus dilengkapi dengan rehabilitasi kepada anak buah mereka. Ini berarti adanya integrasi

87. Lihat pidato Ayah Gani, disampaikan pada sidang pembukaan perundingan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Repolusi, 25 Mei 1959; stensilan. Pidato ini juga diterbitkan dalam Komunike no. 4/1959.

88. Pidato Wakil Perdana Menteri Hardi, 25 Mei 1959; stensilan, pasim.

para anggota sipil dan militer Darul Islam ke dalam struktur-struktur Indonesia. Dalam hal ini, Dewan Repolusi menghendaki agar pemerintah membentuk pasukan Teungku Chik Ditiro sebagai suatu resimen efektif KDMA.⁸⁹

Pendirian pemimpin Dewan Repolusi itu memang sungguh mengherankan. Rumusan daerah istimewa mereka pada kenyataannya sama dengan konsep yang dikemukakan kelompok Daud Beureueh selama pembicaraan tidak resmi dengan KDMA pada tahun 1958, kalau tidak hendak dikatakan sebagai salinannya. Pemimpin-pemimpin Dewan Repolusi agaknya telah mengambil alih konsep tersebut itu demi mencegah Jakarta ikut campur dalam urusan daerah itu pada masa depan. Di lain pihak, hal itu tampaknya juga dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dari tuduhan yang sedang dilancarkan Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya bahwa mereka telah beranjak mundur. Para pemimpin yang pro-Daud Beureueh telah mempropagandakan bahwa Ayah Gani dan Hasan Saleh sedang menjual Aceh kepada Jakarta. Karena khawatir akan tuduhan tersebut, maka pemimpin-pemimpin Dewan Repolusi pun menuntut agar jabatan gubernur Daerah Istimewa Aceh berada di tangan orang Aceh, dan Jakarta tidak boleh campur tangan dalam urusan peradilan setempat. Barangkali juga kekhawatiran mereka akan kemungkinan adanya pengingkaran oleh Pemerintah Pusat telah menyebabkan pimpinan Dewan Repolusi mempertahankan pengaruh dalam pemerintahan daerah, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Tentu saja, bagian yang paling penting dari tuntutan mereka adalah usaha untuk mempertahankan pengaruh atas 35.000 tentara mereka yang akan diintegrasikan ke dalam KDMA.

Delegasi pemerintah menolak dengan tegas setiap usul agar Aceh diberi otonomi yang luas. Dari sudut Pemerintah Pusat, Hardi tidak mungkin menerima pandangan Dewan Repolusi yang bersifat federalis itu, sebab hal ini bertentangan dengan konstitusi yang memperlakukan keseluruhan negeri ini sebagai suatu negara kesatuan. Misi Hardi mengatakan kepada Dewan Repolusi bahwa paling banyak ia hanya dapat memberikan otonomi khusus dalam bidang keagamaan dan kebudayaan

89. Lihat "Naskah Perdamain (sic.) Darussalam Tentang Penjelesaian Perseengketaan Bersendjata Antara Pihak NBA dengan RI di Atjeh" (t.t.); dan "Prinsip2 Naskah Perdamaian Darussalam", 10 Mei 1959; keduanya berupa stensilan.

kepada Aceh, selain tawaran amnesti dan rehabilitasi bagi seluruh anggotanya.⁹⁰ Akan tetapi pimpinan Dewan Repolusi tidak bersedia melepaskan tuntutan mereka. Pada titik ini perundingan menemui jalan buntu, dan beberapa pemimpin Dewan Repolusi bahkan percaya bahwa pembicaraan akan berakhir dengan kegagalan.

Kebuntuan ini memberikan kesempatan kepada para penguasa lokal untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam perundingan tersebut. Sejauh menyangkut para pemimpin setempat, perundingan itu merupakan suatu pembicaraan antara Dewan Repolusi dan Pemerintah Pusat. Kendatipun mereka dilibatkan dalam misi pemerintah, dalam prakteknya Gubernur dan Panglima KDMA hampir tidak memainkan suatu peranan di dalamnya. Gubernur Hasjmy hanya bertindak sebagai tuan rumah bagi kedua belah pihak. Gaharu bahkan tidak mengahadirinya, karena sedang berkonsultasi dengan atasannya di Jakarta, dan meninggalkan segala persoalan kepada kepala stafnya, Mayor Teuku Hamzah. Tampaknya para pemimpin lokal memang telah dengan sengaja mengambil peranan tidak aktif sehingga pimpinan Dewan Repolusi dapat menantang pemimpin-pemimpin pusat, jika itu yang mereka kehendaki.

Akan tetapi begitu perundingan menghadapi jalan buntu, maka arti peranan para pemimpin lokal menjadi semakin meningkat. Pada sore harinya Hardi semakin yakin bahwa perantara lokal diperlukan untuk menembus kebuntuan, sebab sudah sulit bagi orang luar untuk berbicara dengan pimpinan pemberontak. Pada saat itulah Hasjmy dan Hamzah campur tangan. Sepanjang malam, kedua pemimpin ini memanfaatkan pengaruh Bupati Aceh Besar Zaini Bakri, yang dikabarkan pernah menjadi salah seorang arsitek pemberontakan tersebut. Zaini Bakri menghabiskan malam itu untuk membujuk para pemimpin Dewan Repolusi. Ia mendesak mereka agar bersikap moderat dan menerima kompromi yang telah disetujui Hardi. Upayanya akhirnya memberikan hasil. Menjelang subuh tanggal 26 Mei,⁹¹ Dewan Repolusi setuju untuk berkompromi dalam pengertian bahwa kedua belah pihak "harus mencari kemungkinan untuk selanjutnya membicarakan masalah-masalah

90. Wawancara dengan Mr. Hardi, Jakarta, 11 Januari 1974.

91. Hasjmy, "Apa dan Mengapa", hal. 18.

yang belum diselesaikan".⁹²

Hasil perundingan tersebut dapat dilihat sebagai suatu kemenangan bagi pihak Aceh, walaupun Pemerintah Pusat tidak mengabdikan semua tuntutan Dewan Repolusi. Tetapi yang lebih penting bagi para pemimpin Dewan Repolusi adalah bahwa hasil perundingan itu sangat tidak mempermalukan mereka, sebab merupakan prestasi yang harus dihargai oleh rakyat. Meskipun misi Pemerintah Pusat menolak konsep otonomi luas mereka, pada kenyataannya mereka telah memperoleh sebagian besar dari apa yang mereka tuntut, baik secara tertutup maupun terbuka, termasuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan di Kutaraja pada akhir perundingan, Wakil Perdana Menteri Hardi mengakui bahwa misinya tidak dapat secara resmi memberikan suatu pasal yang memberlakukan syariat Islam bagi rakyat Aceh, sebab masalah hukum Islam ini sedang dibicarakan oleh Parlemen. Namun ia percaya bahwa status istimewa atau otonomi yang luas dalam bidang agama akan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur hal ini.⁹³ Dengan satu butir ini saja, para pemimpin Dewan Repolusi tidak akan dapat dinista oleh kelompok yang pro-Daud Beureueh, sebab inilah justru butir yang dituntut oleh kaum ideologis itu. Persetujuan itu juga memuaskan semua anggota Dewan Repolusi, terutama kekuatan-kekuatan militernya, karena mereka semua akan dimasukkan ke dalam organisasi sipil dan militer pemerintah.

Episode Akhir

KENDATI TIDAK segera hancur, NBA menjadi semakin lemah karena langkah Hasan Saleh untuk berunding dengan misi Hardi. Pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok zuama itu tidak memberikan pilihan lain kepada para pemimpin NBA selain daripada bekerja sama dengan PRRI. Hasil kerja sama itu ialah diumumkannya pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) pada tanggal 8 Februari 1960, yang mengakibatkan PRRI dan NBA dibubarkan. Sejak itu Aceh dikenal sebagai Republik Islam Aceh (RIA). Tetapi dengan adanya kerja

92. "Surat Pernyataan Dewan Repolusi, Gerakan Repolusioner Islam Atjeh", bertanggal Aceh Darussalam, 26 Mei 1959; stensilan. Pernyataan ini dibuat atas permintaan misi pemerintah.

93. "Pernyataan Misi Pemerintah Pusat", Kutaraja, 26 Mei 1959; stensilan.

sama yang erat antara NBA dan PRRI pada tahap ini janganlah dikira bahwa RPI adalah suatu fenomena yang muncul mendadak dalam waktu semalam. Dalam bagian ini kita akan mempelajari penyatuan NBA dengan PRRI itu dan membahas lebih jauh pendirian para pemimpin Aceh. Selain itu kita juga akan melihat bagaimana pengaruh pembentukan RPI terhadap politik lokal di Aceh, dan mengapa pula perlawanan itu pada akhirnya berhenti.

Sesungguhnya pembentukan RPI telah didorong oleh perkembangan politik di Jakarta selama tahun 1959-1960 yang ditandai oleh kecenderungan yang semakin meningkat ke arah otoriterisme. Kecenderungan ini tampak dengan jelas sejak pertengahan tahun 1958 ketika kekuasaan semakin terpusat di tangan Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat, sementara partai politik, Parlemen, dan Kabinet Djuanda, kehilangan sebagian besar pengaruh yang mereka miliki sebelumnya. Soekarno telah berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar sejak akhir tahun 1956. Ia tidak puas dengan peranannya di dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana ia hanya menjadi seorang tokoh tanpa kekuasaan atau, dalam kata-katanya sendiri, "tukang stempel" kabinet. Untuk mencapai cita-citanya itu, sepanjang tahun 1957-1959 Soekarno bergerak selangkah demi selangkah dengan dukungan pimpinan Angkatan Darat, ke arah pelaksanaan konsepnya yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Namun demikian, ia hanya memperoleh sedikit saja dukungan dalam Dewan Konstituante. Ketika itu Dewan Konstituante tengah membahas sebuah konstitusi tetap untuk menggantikan UUDS 1950 yang sedang berlaku. Kurangnya minat Dewan Konstituante terhadap konsepsi Soekarno antara lain karena sejak sidangnya pada bulan November 1956 lembaga itu terjebak dalam kekusutan masalah Islam dan Pancasila, di samping karena Soekarno sendiri bukan anggotanya. Soekarno berhasil membawa konsepsinya untuk dibahas dalam Dewan Nasional -- sebuah dewan penasihat yang ia bentuk secara inkonstitusional, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik dan berbagai golongan fungsional, di samping Presiden sendiri mempunyai peranan aktif di dalamnya -- akan tetapi pembahasan itu pun akhirnya mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1959 Dewan Nasional menyetujui usul Angkatan Darat supaya melaksanakan Demokrasi Terpimpin dengan kembali ke UUD 1945; dalam sistem ini Presiden merupakan pemimpin eksekutif yang kuat.

Tetapi tatkala dibahas dalam Dewan Konstituante pada bulan April 1959, usul ini tidak memperoleh dukungan yang mayoritas minimal dua pertiga itu. Dewan ini sendiri terpecah atas dua kubu yang konfrontatif, Islam dan non-Islam, terutama ketika perdebatan tentang usul tersebut menyentuh perkara Islam dan Pancasila. Dewan Konstituante menemui jalan buntu ketika penarikan suara diulang, dan pemerintah hanya memperoleh lima puluh lima persen dari seluruh suara.

Pemerintah menanggapi kebutuhan ini dengan tindakan keras dan inkonstitusional. KSAD Nasution melarang semua kegiatan politik dan menunda sidang-sidang Dewan Konstituante pada bulan Juni. Tindakan ini segera diikuti oleh serangkaian langkah Presiden yang lebih tegas lagi. Pada tanggal 5 Juli, Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan mendekralkan kembali ke UUD 1945. Kemudian, setelah memiliki kekuasaan eksekutif dalam tangannya, Soekarno mengurangi pengaruh partai politik dalam kabinet yang ia bentuk pada tanggal 10 Juli. Dalam hubungan ini, semua menteri diharuskan memutuskan hubungan dengan partai mereka, dan aturan yang sama juga diberlakukan untuk para pejabat tinggi pemerintahan.⁹⁴

Para pemimpin PRRI memperkirakan bahwa tindakan-tindakan inkonstitusional serta kemunduran partai politik ini akan memberikan dorongan baru bagi perjuangan mereka. Mereka berharap bahwa partai-partai tersebut pada akhirnya akan menentang Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat. Mereka juga mengharapkan bahwa setidaknya Masyumi, NU, dan PSII, serta partai-partai kecil seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), kedua partai Kristen dan kaum demokrat lainnya, akan melancarkan oposisi besar-besaran terhadap Soekarno. Dengan harapan ini, pimpinan PRRI segera bergerak untuk menarik perhatian partai-partai tersebut. Pada bulan Mei 1959, suatu rapat gabungan yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin PRRI dan Permesta telah membahas langkah-langkah yang akan diambil guna mewujudkan program penyatuan dengan gerakan Darul Islam sebagaimana yang diputuskan dalam konferensi Frankfurt pada akhir tahun 1958. Hasil pertemuan ini berupa

94. Untuk pandangan pihak pertama tentang episode ini, lihat Jenderal Dr. A. H. Nasution, "Sejarah Kembali ke UUD 1945", atensidan (1975?), hal. 10-13; dan untuk kajian yang mendalam, lihat J.D. Legge, *Sukarno, A Political Biography* (Penguin Books, 1973), hal. 299-300, dan Fritsch "Dynamics", hal. 359-362.

persetujuan untuk memproklamasikan sebuah negara federal, RPI, yang menurut rencana akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1959, yaitu bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Daud Beureueh didekati melalui radiogram pada bulan Juni. Tetapi pengambilalihan kekuasaan oleh Hasan Saleh menyebabkan Daud Beureueh tidak dapat menanggapinya sampai awal Agustus.⁹⁵

Pertimbangan para pemimpin NBA terhadap usul PRRI memperlihatkan bahwa tujuan dan nasib bersama bukan merupakan satu-satunya faktor penentu. Daud Beureueh percaya kepada beberapa pemimpin PRRI seperti Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap, akan tetapi ia tidak menerima usul PRRI begitu saja. Jauh dari bersikap demikian para pemimpin NBA malah mempelajarinya secara hati-hati dan, sebelum memutuskan untuk bekerja sama, mereka memastikan lebih dahulu apakah kepentingan mereka terlindungi dengan baik. Kehati-hatian seperti ini dapat dimengerti, sebab, berbeda dari gerakan Aceh, PRRI mewakili aneka ragam kepentingan politik yang melibatkan pembelahan ideologis pokok antara Islam dan Kristen.⁹⁶ Dengan adanya orang-orang Kristen Batak dan Minahasa yang mempunyai pengaruh kuat dalam kekuatan militer PRRI, maka pemimpin-pemimpin Aceh meragukan kemampuan para pemimpin sipil Islam untuk mengendalikan RPI secara keseluruhan pada masa mendatang.

Kuatnya pengaruh Kristen dalam PRRI menyebabkan para pemimpin NBA pada mulanya menuntut warna Islam yang kuat bagi RPI. Akan tetapi pemimpin-pemimpin Aceh itu terpaksa melepaskan tuntutan mereka dan, sebagai gantinya, mereka menganut garis yang lebih lunak dengan menyarankan agar nilai-nilai keagamaan baik dari Islam maupun Kristen dijadikan basis RPI. Namun begitu, mereka menuntut agar Aceh dan Sulawesi Selatan diberikan status sebagai Republik Islam dalam RPI. Kemudian mereka meminta agar RPI dijadikan sebagai sebuah negara agama dengan hak bagi setiap daerah untuk mengatur diri sendiri

95. Lihat pesan radio Daud Beureueh kepada Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri PRRI, tanggal 8 Agustus 1959.

96. Untuk kajian yang mendalam tentang perpecahan dalam PRRI, lihat Herbert Feith dan Daniel S. Lev, "The End of the Indonesian Rebellion", *Pacific Affairs* 32, no. 1 (Spring, 1963); hal. 37-39. Dari empat kelompok etnis dalam PRRI, suku Minangkabau dan Mandailing merupakan kelompok Islam, sedangkan Kristen diwakili oleh Batak Toba dan Minahasa (dalam Permesta).

sesuai dengan hukum Islam dan Kristen.⁹⁷ Khususnya tuntutan yang terakhir itu telah memperluas pembelahan ideologis di dalam kepemimpinan PRRI. Sebagai akibatnya, pembelahan Islam-Kristen menjadi kurang penting dan digantikan oleh perpecahan antara para penganjur sekularisme dengan teokrasi. Pemimpin-pemimpin PRRI yang saleh pada dasarnya tidak mempunyai suatu keberatan atas tuntutan Daud Beureueh, sementara mereka yang sekular, terutama yang berasal dari militer, lebih suka memilih Pancasila, dengan sedikit modifikasi, daripada hukum agama mana pun.⁹⁸

Perdebatan tentang konstitusi ini telah menunda pembentukan RPI, padahal dalam bidang militer PRRI sedang menghadapi tekanan yang semakin kuat dari pasukan pemerintah. Situasi ini memaksa para pemimpin yang saleh itu untuk berkompromi ketika kelompok sekular menyetujui negara didasarkan pada nilai-nilai keagamaan tetapi mempertahankan prinsip hak asasi manusia.⁹⁹ Kompromi ini menimbulkan amarah Daud Beureueh, sebab dalam pandangannya kompromi itu berarti pengakuan bahwa hukum Islam lebih rendah daripada hak asasi manusia yang universal. Oleh sebab itu dia mengancam bahwa Aceh akan berada di luar RPI kecuali bila para pemimpin PRRI memenuhi tuntutan¹⁰⁰ Para pemimpin sipil PRRI akhirnya tunduk pada kemauan Daud Beureueh,¹⁰¹ walaupun Simbolon dengan keras menentang penghapusan syarat tambahan itu, sehingga kelahiran RPI dapat diumumkan pada tanggal 8 Februari 1960.

Mengapa Daud Beureueh begitu kaku? Apakah hal itu disebabkan oleh keyakinan agamanya? Tidak perlu diragukan bahwa agama mem-

97. Pesan radio Daud Beureueh kepada Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri PRRI, tanggal 8 Agustus 1959; dan pesan radio Daud Beureueh kepada Perdana Menteri PRRI, tanggal 9 November 1959.

98. Hal ini terdapat dalam pesan radio dari Kolonel Dahlan Djambek, seorang pemimpin militer PRRI, kepada Daud Beureueh, tanggal 1 Desember 1959.

99. Pesan radio dari Perdana Menteri PRRI kepada Daud Beureueh, tanggal 9 Januari 1960.

100. Keputusan Daud Beureueh untuk berpegang pada tuntutan^{nya} dikawatirkan kepada Perdana Menteri PRRI pada tanggal 15 Januari 1960; tetapi ancamannya telah ia nyatakan dalam sebuah pesan yang lain, tanggal 9 November 1959.

101. Pesan radio dari Presiden RPI kepada Daud Beureueh, tanggal 8 Februari 1960.

punyai peranan penting dalam masalah ini. Tetapi tidak pula mustahil, seperti dikemukakan oleh beberapa sumber, bahwa kakunya sikap Daud Beureueh juga disebabkan oleh pertikaian dalam gerakan Darul Islam sendiri, terutama antara Daud Beureueh dan Kartosuwirjo. Meskipun tidak masuknya Kartosuwirjo ke dalam RPI oleh Daud Beureueh disalahkan kepada sukarnya komunikasi, kenyataan bahwa ia telah meninggalkan Negara Islam Indonesia merupakan suatu pengkhianatan terhadap Kartosuwirjo. Barangkali kekhawatiran bahwa ia sendiri tidak akan sanggup menghadapi Kartosuwirjo telah menyebabkan Daud Beureueh berusaha keras untuk menarik Kahar Muzakkar ke pihaknya.¹⁰² Walaupun demikian, tetap ada satu kesempatan bagi Kartosuwirjo untuk menyerang Daud Beureueh dengan berpropaganda bahwa Daud Beureueh telah menempatkan nilai-nilai Islam di bawah prinsip-prinsip yang sekular.

Untungnya bagi Daud Beureueh, situasi di Aceh telah membuatnya mampu menghilangkan kemungkinan adanya suatu serangan dari Kartosuwirjo dengan menekan para pemimpin PRRI agar memenuhi tuntutananya mengenai masalah keagamaan. Daud Beureueh mampu memperlihatkan kepada pemimpin-pemimpin PRRI bahwa mereka lebih memerlukan NBA daripada ia membutuhkan PRRI, dan dalam keadaan seperti itu tanpa PRRI pun ia akan sanggup menghadapi pasukan pemerintah di Aceh. Optimisme Daud Beureueh bukan tanpa alasan, sebab hampir di setiap tempat di Aceh, gencatan senjata telah dilanggar oleh NBA antara September dan Desember 1959, yakni pada saat perdebatan antara para pemimpin NBA dan PRRI itu sedang berlangsung. Para pemberontak mulai kembali merusak rel kereta api dan menyerang pos-pos pasukan pemerintah, terutama di Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Utara, Timur, dan Tengah. Kelompok-kelompok pasukan dalam

102. Seperti Aceh, Sulawesi Selatan menjadi sebuah Republik Islam dalam RPI, dan Daud Beureueh berhasil "membeli" Kahar Muzakkar dengan jabatan menteri pertahanan dalam Kabinet RPI, meskipun sebelumnya Kahar Muzakkar bersikeras bahwa pernyataan pembentukan RPI harus ditandatangani oleh Kartosuwirjo dan Ibnu Hadjar. Mengenai keinginan Kahar Muzakkar itu, lihat Barbara S. Harvey, "Tradition, Islam and Rebellion: Sulawesi Selatan 1950-1965" (disertasi Doktor, Cornell University, 1974), hal. 413. Pentingnya partisipasi Kahar Muzakkar bagi Daud Beureueh jelas terlihat dalam tawar-menawar yang dilakukan Daud Beureueh dengan para pemimpin PRRI yang ingin menempatkan Mr. Burhanuddin Harahap pada jabatan tersebut. Lihat pesan radio Daud Beureueh kepada Perdana Menteri PRRI, tanggal 16 Januari 1960.

jumlah yang besar meninggalkan Dewan Revolusi dan kembali kepada Daud Beureueh, sebagian karena tertundanya urusan pemasukan mereka ke dalam kesatuan pemerintah, di samping karena kurangnya bantuan keuangan dari Gaharu. Tatkala KDMA mengambil tindakan terhadap kegiatan pemberontak yang kian meningkat, terutama di sekitar Kutaraja, seorang komandan resimen Dewan Revolusi di Aceh Besar, Abdul Wahab Ibrahim, melancarkan perebutan kekuasaan terhadap Hasan Saleh, yaitu dengan mendirikan apa yang dinamakannya Pemerintah Pentadbiran Militer. Kemudian resimen ini pun bergabung kembali dengan Daud Beureueh. Kembalinya kelompok-kelompok ini tentu saja memperkuat posisi Daud Beureueh dalam tawar-menawar dengan PRRI, dan keadaan ini meyakinkannya bahwa ia akan mampu berjalan terus sekiranya PRRI menolak tuntutananya.

Pembentukan RPI mengagetkan pimpinan KDMA, sebab hal ini berarti upaya mereka untuk mencegah adanya hubungan antara Aceh dan gerakan-gerakan pemberontak di luar daerah itu telah gagal. Perkembangan baru ini bahkan akan semakin menyulitkan mereka untuk menundukkan Daud Beureueh. Dalam hal ini beberapa perwira, termasuk Kepala Staf KDMA Letnan Kolonel Teuku Hamzah, cenderung untuk menyalahkan Gaharu. Perwira-perwira ini berpendapat bahwa Gaharu bersikap terlalu lunak terhadap Daud Beureueh. Mereka percaya bahwa jikalau Gaharu mengambil langkah tegas terhadap Daud Beureueh, maka sekurang-kurangnya Aceh tidak akan terlibat dalam RPI. Pandangan ini menyebabkan Hamzah, ketika Gaharu sedang tidak berada di Kutaraja, melancarkan serangkaian operasi militer yang keras terhadap kaum pemberontak di sekitar Kutaraja pada bulan Februari 1960, sehingga tamatlah riwayat Konsepsi Prinsipil Bijaksana Gaharu.¹⁰³ Hamzah menyerang beberapa posisi yang dikuasai pemberontak dalam batas delapan kilometer dari Kutaraja, dan membersihkan pelabuhan udara dari jangkauan mereka. Banyak rumah yang dibakar selama operasi ini, sehingga kembali menciptakan suasana tegang di Aceh.

Akibatnya, ketika Gaharu tiba kembali dari Jakarta, konflik terbuka dengan kepala stafnya tidak dapat dihindarkan lagi. Meskipun tidak terdapat informasi yang jelas, dapat diketahui bahwa pertikaian ini telah membawa efek yang demikian jauh. Pukulan Hamzah terhadap kaum

103. *Peristiwa*, 5 dan 20 Februari 1960.

pemberontak menandai berakhirnya masa dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan Aceh seperti yang diperlihatkan oleh misi Hardi. Ia menyadarkan Pemerintah Pusat bahwa konsepsi Gaharu tidak akan bermanfaat lagi dan, sebagai akibatnya, sang panglima harus meninggalkan Aceh. Gaharu direncanakan akan mengikuti kursus bagi perwira senior di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung, sementara Hamzah tetap tinggal di Aceh sebagai pejabat panglima. Dengan sendirinya keputusan ini memberi kesan bahwa Pemerintah Pusat menyetujui tindakan Hamzah dan menyalahkan Gaharu akan kegagalan program perdamaianya. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila keputusan tersebut menimbulkan amarah Gaharu sehingga pada akhir Agustus ia mengenakan tahanan rumah terhadap Hamzah dengan alasan "melawan atasan".¹⁰⁴

Hamzah ditahan barangkali sebagian karena Gaharu mungkin telah melihatnya sebagai saingan yang berusaha menggagalkan Konsepsi Prinsipil Bijaksananya demi ambisi-ambisi pribadinya sendiri atau, menurut suatu sumber yang dekat dengan Hamzah ketika itu, mungkin juga karena Jakarta khawatir ia telah menjadi sangat populer di daerah itu.¹⁰⁵ Dikatakan bahwa kurang berhasilnya pemberontakan menyebabkan banyak orang di Aceh yang menaruh harapan pada Hamzah, bukan sebagai seorang pemimpin militer melainkan sebagai keturunan bangsawan yang banyak berbicara tentang pengembalian kejayaan Aceh seperti pada masa Sultan Iskandar Muda. Hamzah membangun popularitas pribadinya dengan memanfaatkan latar belakang kebangsawannya. Dalam hal ini, walaupun seorang aristokrat, ia tidak dibenci oleh para ulama. Hal ini karena ayah Hamzah, seorang *Ulebalang* Samalanga di Aceh Utara itu, merupakan salah seorang dari sedikit *Ulebalang* yang tidak tersentuh oleh kampanye anti-*ulebalang* pada tahun 1946 dan memainkan peranan aktif dalam kampanye menentang kaum *ulebalang* dari Kabupaten Pidie. Dalam membangun pengaruhnya, Ham-

104. Wawancara dengan Sjammaun Gaharu, Kutaraja, 5 Juli 1973. Kabar angin yang tersebar di Kutaraja menyatakan bahwa Hamzah telah merencanakan untuk menangkap Gaharu begitu menyerahkan komando kepadanya. Tetapi Hamzah sial, sebab rencana tersebut telah dibocorkan kepada Gaharu, yang dengan cepat bergerak menangkapnya. Wawancara dengan Acha, Kutaraja, 12 November 1975.

105. Tentang hal ini, saya berutang budi pada Ny. Elaine McKay yang mengumpulkan semua informasi tersebut selama berada di Aceh dan Medan pada masa itu.

zah juga dikatakan telah mencari dukungan dari daerah tempat kelahirannya. Dalam KDMA, ia sangat dekat dengan perwira-perwira yang berasal dari Samalanga, seperti Mayor A.M. Namploh, Wakil Kepala Staf, dan Kepala Intelijen Kapten Ismet Noor. Di luar struktur militer, Hamzah menyalurkan pengaruhnya melalui Teungku Muhammad Saleh, seorang pemimin Perti yang menonjol, yang juga berasal dari daerah Samalanga. Mau tidak mau hubungannya dengan Muhammad Saleh ini menarik Hamzah lebih dekat kepada Perti, suatu partai yang tidak dapat bekerja sama dengan Gaharu.

Berbeda dari Hamzah, Gaharu berasal dari keluarga biasa di Kabupaten Pidie. Namun demikian, hubungan keluarganya yang dekat dengan seorang *Ulebalang* memungkinkannya memperoleh pendidikan Belanda yang baik. Seperti Hamzah dan banyak perwira lainnya, ia memperoleh latihan dasar kemiliteran dari Jepang. Ia merupakan salah seorang yang memiliki pangkat tertinggi di kalangan perwira Indonesia dalam kesatuan Giyugun di Aceh, dan kemudian dipandang sebagai pendiri tentara nasional di daerah itu. Agaknya latar belakang ini, dan kenyataan bahwa Konsepsi Prinsipil Bijaksana telah memberinya popularitas, pada mulanya tidak menyebabkan Gaharu merasa terancam oleh Hamzah yang baru kembali ke Aceh pada bulan Maret 1957. Karena merasa begitu aman, maka Gaharu mengadakan semacam pembagian kerja antara dia dengan kepala stafnya. Oleh karena itu, setelah tercapainya gencatan senjata dengan NBA, Gaharu lebih banyak memusatkan perhatian pada urusan-urusan eksternal KDMA, seperti hubungan antara Kutaraja dan Jakarta, dan sedikit banyak dipercayakan urusan intern kepada Hamzah. Akan tetapi kenyataan bahwa Hamzah semakin dekat kepada perwira-perwira kelahiran Samalanga menyadarkan Gaharu bahwa hal ini akan dapat berkembang menjadi tantangan bagi dirinya dan para perwira lain yang berasal dari Kabupaten Pidie.¹⁰⁶ Barangkali karena merasa khawatir akan pengelompokan yang demikian, maka suatu waktu pada tahun 1959 Gaharu memindahkan Wakil Kepala Staf Mayor Namploh ke jabatan yang kurang penting dan menggantikannya dengan Letnan Kolonel Njak Adam Kamil, seorang perwira yang berasal dari Aceh Selatan.

106. Kendati enggan, Gaharu menguatkan adanya pengelompokan Samalanga dan Pidie itu; wawancara dengannya, Kutaraja, 5 Juli 1973.

Untuk mengganti Gaharu sebagai panglima KDMA, Markas Besar Angkatan Darat mengangkat Kolonel Muhammad Jasin, seorang instruktur dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Jasin lahir di Sabang dari sebuah keluarga campuran, ayahnya dari Jawa dan ibunya dari Tapanuli. Ia meninggalkan Aceh ketika masih kanak-kanak dan pada masa revolusi ia berjuang di Jawa Timur. Ia menikah dengan seorang wanita dari Jawa Tengah, dan merupakan seorang perwira yang saleh serta mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap Aceh. Kebijakan Jakarta yang lebih lunak terhadap Aceh pada masa ini juga terlihat pada pengangkatan Letnan Kolonel Njak Adam Kamil, yang sebelumnya telah diangkat menjadi wakil kepala staf oleh Gaharu, sebagai pengganti Hamzah.

Setelah menerima pimpinan komando dari Panglima Komando Antar Daerah Sumatera Brigadir Jenderal Suprpto pada awal November 1960, Jasin berjanji akan menyelesaikan pemberontakan itu dalam waktu dua atau tiga tahun. Berbeda dari Suprpto, Jasin agaknya tidak terpengaruh oleh kebijaksanaan Hamzah yang keras. Pendekatannya terhadap pemulihan keamanan sejalan dengan kebijaksanaan Gaharu, namun lebih lunak daripada perwira yang digantikannya itu. Sementara dalam bidang ekonomi ia meneruskan rencana pembangunan yang dibuat oleh Gaharu, ia mengambil alih Konsepsi Prinsipil Bijaksana, walaupun tidak pernah disebut-sebut lagi sejak kepergian Gaharu, sebab ia percaya bahwa kebijaksanaan ini tepat untuk Aceh.¹⁰⁷ Jasin juga memegang teguh pendekatan "bijaksana" dari kebijaksanaan Gaharu itu. Oleh karena itu pendekatan pribadi sekali lagi ditawarkan kepada para pemberontak, kendati operasi-operasi militer tetap dilakukan. Akan tetapi tampak bahwa Panglima baru ini tidak ingin memberi kesan bahwa ia datang ke Aceh untuk menaklukkannya dengan jalan kekerasan, sebab operasi-operasi militer itu tidak saja dalam skala kecil melainkan juga dipimpin oleh Njak Adam Kamil, kepala stafnya yang asli Aceh.

Jasin tidak percaya pada penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu, sebab baginya penyelesaian pemberontakan memiliki dua

107. Jasin memuji Konsepsi ini; lihat dua pidato Jasin, "Dari Darulharb Menjadi Darussalam" (Kutaraja: Kodam-1/Iskandar Muda, 1961), hal. 7, dan "Mentjiptakan Kerukunan Hidup Rakjat Atjeh" (1962), hal. 5.

segi: lahir dan batin.¹⁰⁸ Ia yakin bahwa jika diperlukan, pasukannya mampu menghancurkan kekuatan fisik Republik Islam Aceh, yang pada akhir tahun 1960 diperkirakan memiliki sekitar 2500 orang pasukan, 1500 senjata ringan, 52 senapan mesin, 12 bazoka, dan 5 mortir.¹⁰⁹ Namun ia percaya bahwa penghancuran musuh secara fisik hanya akan menghasilkan keamanan lahir, sementara daerah itu akan tetap resah karena keamanan batin tidak tercapai. Menurut Jasin, keadaan ini akan menciptakan masalah-masalah keamanan lainnya pada masa datang.¹¹⁰ Supaya suatu pemulihan spiritual tercapai, Jasin menginginkan agar para pemberontak kembali secara sukarela. Oleh karena itu sebulan setelah tiba, Jasin mulai menyerukan pemimpin-pemimpin RIA agar meninggalkan perjuangan mereka¹¹¹ dan menerima amnesti yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato Hari Kemerdekaan tahun 1960. Pada waktu yang sama ia memerintahkan dua batalion tentara untuk melancarkan operasi militer di Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Utara, dan Timur. Sebagai tambahan, ia mendesak rakyat agar membantunya dalam menyelesaikan pemberontakan dengan membujuk saudara-saudara mereka yang memberontak "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi". Dengan sendirinya seruan ini mengandung peringatan bahwa rakyat harus menghentikan segala jenis bantuan yang mereka berikan kepada kaum pemberontak, termasuk pembayaran infak.

Seruan Jasin menimbulkan tekanan besar terhadap rakyat supaya menghentikan pemberontakan. Tetapi hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan, sebab hanya sejumlah kecil TII di Aceh Besar dan Pidie yang melapor kembali sebelum bulan Maret 1961.¹¹² Alasan pokok bagi keadaan ini ialah kesetiaan pemberontak yang luar biasa terhadap Daud Beureueh. Sementara Daud Beureueh mengabaikan ancaman yang datang baik dari Jakarta maupun Kutaraja bahwa amnesti hanya berlaku

108. Pidato Jasin di depan DPRD-GR Daerah Istimewa Aceh, tanggal 26 Maret 1962, sebagaimana dikutip dalam "Pelaksanaan Unsur-unsur Sjariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh"; stensilan, hal. 3. Sumber ini selanjutnya akan dikutip sebagai "Pelaksanaan Unsur-unsur".

109. *Dua Windu Kodam-I/Iskandar Muda*, hal. 247-248. Kemudian ternyata bahwa pejabat-pejabat militer telah salah memperhitungkan kekuatan nyata RIA.

110. "Pelaksanaan Unsur-unsur", hal. 6.

111. *Siaran Penerangan Daerah*, no. 6 (2 Maret 1961).

112. *Ibid.*

bagi mereka yang menyerah sebelum tanggal 5 Oktober 1961, banyak di antara komandan wilayahnya yang tidak bersedia meninggalkan perjuangan.¹¹³ Beberapa perwiranya bahkan berani mengorbankan hubungan baik mereka dengan rakyat setempat.¹¹⁴ Tambahan lagi, bagi mereka yang telah meninggalkan Dewan Repolusi, kekecewaan atas kegagalan Hasan Saleh dan Ayah Gani untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik dari Jakarta menyebabkan mereka lebih terpaku pada Daud Beureueh.

Untuk menanggapi keadaan ini, Jasin pun meningkatkan pendekatan pribadinya. Selama bulan April sampai Juni 1961 ia telah mengunjungi hampir semua sudut Aceh, termasuk beberapa kecamatan yang terpencil. Hubungan dengan pemimpin-pemimpin pemberontakan juga ditingkatkan, dan kini bahkan menjangkau mereka yang berada di Kabupaten Aceh Utara dan Barat. Pada bulan Maret 1961, sang Panglima mengirimkan sepucuk surat yang sangat halus kepada Daud Beureueh, yang disapanya sebagai "ayahanda", dan ia menulis bahwa pemerintah "masih tetap mengharapkan kembalinya Ayahanda Teungku dengan cara yang layak demi kebahagiaan rakyat dan daerah kita yang sudah sekian lama menderita lahir dan batin". Karena mengharapkan jawaban yang baik, ia menawarkan kepada Daud Beureueh kesempatan naik haji ke Mekah, seraya secara implisit ia mengutarakan kesediaan pemerintah untuk membangun Aceh.¹¹⁵ Dengan surat ini Jasin berhasil membina komunikasi yang lancar dengan Daud Beureueh, walaupun jawaban dari Daud Beureueh tidak seramah nada surat Jasin. Dalam suratnya Daud Beureueh menyambut baik seruan sang Panglima, tetapi mengecam bahwa tindakan Jasin yang mencoba memotong pengikutnya di beberapa kabupaten sangat bertentangan dengan pernyataan kemauan baik Jasin.¹¹⁶

Namun demikian, pada akhir Juli mulai ada tanda-tanda yang jelas

113. Hal ini antara lain terdapat dalam surat Komandan resimen TII di Aceh Barat dan Aceh Selatan Teungku Hasan Hanafiah kepada Letnan Kolonel Njak Adam Kamil yang bertanggal 5 September 1961.

114. Lihat surat Abdurrahman Hasjim kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 11 September 1961.

115. Lihat surat Kolonel Jasin kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 7 Maret 1961.

116. Surat dari Daud Beureueh kepada Kolonel Jasin, bertanggal Aceh Darussalam, 27 April 1961.

bahwa pemberontakan sedang mencapai titik akhir. Banyak pemberontak yang telah menyatakan keinginan mereka untuk kembali, meskipun kesetiaan mereka yang begitu kuat terhadap Daud Beureueh masih tetap menjadi hambatan. Oleh sebab itu Jasir mengusahakan suatu pembicaraan informal dengan Daud Beureueh. Pada awal Agustus, Daud Beureueh mengirim Abdurrahman Hasjim ke Kutaraja dan menjelaskan syarat-syarat bagi penghentian perjuangannya. Akan tetapi tidak banyak yang diketahui tentang pembicaraan ini, selain keinginan Jasir untuk menemui Daud Beureueh secara pribadi dan memperteguh hubungan pribadi di antara keduanya; hubungan pribadi ini disimbolkan dengan pengiriman sebuah bingkisan dari sang Kolonel kepada Daud Beureueh dan keluarganya.¹¹⁷ Meski demikian ada alasan untuk berspekulasi bahwa pertemuan itu telah menghasilkan suatu saling pengertian guna mengakhiri pemberontakan dan bahwa secara prinsip Jasir telah menerima syarat-syarat Daud Beureueh. Oleh karena itu pada tanggal 17 Agustus Jasir mengumumkan tercapainya penyelesaian fisik, dan Aceh telah kembali dalam kehidupan yang normal.¹¹⁸

Mengapa perlawanan RIA akhirnya berhenti pada bulan Juli? Barangkali masalahnya dapat dibandingkan dengan PRRI. Feith dan Lev mengemukakan bahwa faktor-faktor utama yang mengakibatkan runtuhnya gerakan PRRI adalah konflik intern, masalah moral dalam PRRI, serta sejumlah operasi militer dan propaganda yang dilancarkan pemerintah.¹¹⁹ Tambahan lagi, oposisi terhadap Demokrasi Terpimpin tidak tumbuh seperti yang diharapkan oleh pemimpin-pemimpin PRRI atau RPI, sebab tidak muncul perlawanan yang meluas terhadap Soekarno. Oleh karena itu RPI gagal mendapatkan dukungan dari para pemimpin yang anti-Soekarno di Jakarta.¹²⁰ Kecuali satu, semua faktor ini

117. Hal ini muncul dalam surat Kolonel Jasir kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 5 Agustus 1961.

118. Jasir, "Dari Darulharb", hal. 3.

119. Feith dan Lev, *op. cit.*, hal. 37-42.

120. Sebuah oposisi yang terorganisir memang muncul dalam bentuk Liga Demokrasi. Lembaga ini didirikan pada awal tahun 1960 oleh Masyumi, PSI, dan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan dikucilkan oleh Soekarno dari Parlemen baru yang dibentuknya pada awal Maret. Meskipun juga didukung oleh beberapa pemimpin PNI, NU, dan partai-partai Kristen serta beberapa pemimpin Angkatan

dapat diterapkan dalam kasus Aceh. Berbeda dari PRRI, kepemimpinan pemberontak di Aceh tidak menghadapi konflik intern setelah pengkhianatan kaum zuama pada tahun 1959. Tetapi, seperti PRRI, operasi militer dan propaganda pemerintah memberi dampak yang luas terhadap para pemberontak, sebab mengucilkan mereka dan memutuskan jalur logistik. Di samping itu, para pemberontak Aceh juga telah kehilangan sebagian besar daya tarik mereka terhadap penduduk, terutama setelah Pemerintah Pusat secara bertahap mengembalikan simbol-simbol Aceh dalam bidang administratif, militer, dan keagamaan. Kurangnya dukungan rakyat menimbulkan masalah moral di kalangan pasukan pemberontak, yaitu tatkala mereka menyadari bahwa perjuangan mereka tidak lagi demi kepentingan rakyat.

Lebih penting lagi dibandingkan dengan hal-hal lain, beralihnya dukungan rakyat di seluruh Indonesia dari para pemberontak kepada Pemerintah Pusat merupakan penyebab pokok kehancuran gerakan-gerakan pemberontakan. Pada tingkat nasional, peralihan itu pada dasarnya didorong oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi setelah Soekarno mendekritkan kembalinya Indonesia kepada Undang-undang Dasar 1945. Sementara oposisi yang meluas terhadap Soekarno tidak mencapai tingkat seperti yang diharapkan oleh para pemimpin RPI, masyarakat sangat mengharapkan agar konsentrasi kekuasaan di tangan Soekarno dapat mengakhiri krisis politik yang kronis di negeri ini. Banyak orang yang tertarik pada pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945, dan pada kembalinya Soekarno sendiri dalam kekuasaan eksekutif dengan cara-cara yang menghidupkan kembali semangat revolusioner tahun 1945. Semangat baru ini diperkuat lagi dengan kesemaran Soekarno, penegasannya pada pembangunan bangsa, ideologi, dan pada konsep masyarakat adil makmur, serta simbol-simbol lain¹²¹ yang bergema di segenap penjuru sehingga memikat rakyat -- di

Darat, Liga Demokrasi ini tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menantang Soekarno. Karena menyandarkan diri pada Angkatan Darat, lembaga ini pun runtuh ketika para pemimpin Angkatan Darat menarik kembali dukungan mereka. Lihat Feith, "Dynamics", hal. 343-344, juga Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, diterjemahkan oleh P.S. Falla (London: Pall Mall Press, 1971), hal. 201-202.

121. Sekitar simbolisme Soekarno, lihat Feith, "Indonesia's Political Symbols and Their Wielders", dalam J.L. Finkle dan R.W. Gable, eds., *Political Development and Social Change* (New York, London, dan Sydney: Wiley & Sons, 1968), hal. 365-377.

samping karena partai-partai oposisi kini telah dibubarkan atau dibungkam. Sepanjang tahun-tahun 1960-1961 banyak orang percaya bahwa pemimpin mereka ini betul-betul berada di jalan yang benar dan akan dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi dan politik di tanah air. Tahun 1961 memang merupakan puncak kejayaan (dan reputasi) Soekarno dalam mengatasi problem-problem politik bahkan ekonomi Indonesia, sampai saat munculnya krisis beras pada akhir tahun itu dan meningkatnya kampanye pembebasan Irian Barat pada bulan Desember.¹²² Sebagai tambahan, tawaran amnesti Soekarno kepada para pemberontak telah menarik banyak simpati rakyat terhadap sang pemimpin dan dianggap sebagai penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak.

Pada tingkat daerah, kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat pun berkurang, khususnya karena pemimpin-pemimpin daerah praktis dibiarkan mengatur daerah mereka sendiri. Kendati pemeliharaan stabilitas melahirkan pemusatan kekuasaan secara berlebihan, yang pada gilirannya juga melahirkan dendam terhadap Pemerintah Pusat di beberapa propinsi luar Jawa, pada kenyataannya secara efektif kekuasaan tidak sangat terpusat. Menurut Feith hal ini karena sistem pemerintahan bersifat "federalisme de facto", sebab pemimpin-pemimpin daerah dapat dengan mudah mengabaikan formalitas legal.¹²³ Lebih dari itu rasa dendam berkurang di beberapa daerah yang diresapi demam "pembangunan daerah" meski dalam kenyataannya mereka tidak mempunyai uang untuk menjalankan rencana-rencana pembangunan.

Juga di Aceh, dukungan rakyat beralih dari RIA kepada pemerintah, karena kondisi sosial dan politik di sana sangat sesuai dengan slogan-slogan politik pemerintah. Peralihan ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, propaganda pemerintah yang meningkatkan harapan terhadap "masyarakat adil dan makmur" telah merasuki Aceh, terutama melalui sekolah-sekolah. Pemerintah praktis tidak menghadapi tantangan apa pun dalam bidang ini. Hal ini karena kelompok-kelompok oposisi telah dibungkam sebagaimana halnya di daerah-daerah lain. Masyumi dibubarkan pada bulan Agustus 1960, sementara Front Pemuda Aceh menjadi tidak aktif setelah beberapa pemimpinnya ditangkap oleh pe-

122. J.A.C. Mackie, *Problems of Indonesian Inflation* (Ithaca, New York: Cornell University, 1967), hal. 25-30.

123. Feith, "Dynamics", hal. 382.

nguasa militer daerah. DPRD juga kehilangan arti tatkala Masyumi kehilangan 23 kursi yang dimilikinya, sementara kelompok-kelompok yang pro-pemerintah atau anti-Darul Islam memperoleh pengaruh yang cukup besar.¹²⁴ Di lain pihak, para pemberontak tidak dapat melawan arus deras propaganda pemerintah. Agaknya, dalam hubungan ini, kurangnya dukungan finansial telah menyebabkan mesin propaganda RIA tidak mampu menandingi propaganda pemerintah, dan dalam kenyataannya mengakibatkan pasifnya propaganda mereka.¹²⁵

Kedua, rakyat Aceh juga tersentuh oleh slogan-slogan pembangunan daerah. Barangkali pengaruh slogan-slogan tersebut lebih positif di Aceh daripada di sebagian besar daerah lainnya di luar Jawa. Dalam hubungan ini, rakyat dapat menyaksikan bahwa sejumlah pembangunan memang sedang berlangsung meskipun dana pemerintah daerah terbatas. Sebagian orang malah berpendapat bahwa Aceh sedang mengalami suatu reformasi seperti yang terjadi pada akhir tahun 1920-an ketika para ulama memulai perombakan kondisi sosial dan politik. Perasaan demikian diperkuat oleh kembalinya beberapa intelektual muda Aceh dari Jawa dan tempat-tempat lain. Para intelektual ini juga terpengaruh oleh slogan-slogan pembangunan daerah, sehingga mereka pun berketetapan hati untuk membangun daerah mereka. Tambahan lagi, pendidikan, yang sejak awal tahun 1950-an telah dijadikan sebagai barometer pembangunan oleh rakyat Aceh, memang meningkat secara mencolok selama lima tahun terakhir dari dasawarsa 1950-an. Dalam hal ini, jumlah Sekolah Dasar Negeri meningkat tajam dari 423 sekolah dengan 79.863 murid pada tahun 1953 menjadi 607 sekolah dengan 111.536 murid pada tahun 1960. Laju pertumbuhan sekolah pemerintah meningkat lebih tinggi lagi pada jenjang pendidikan menengah. Sampai saat meletusnya pemberontakan hanya ada tujuh SMP (satu di setiap

124. Dari 30 kursi yang ada di DPRD-GR pada tahun 1961, hanya separuhnya saja yang dikuasai oleh partai politik, sementara Perti mempunyai enam kursi, dan PNI serta PKI masing-masing memiliki dua kursi. Dalam DPRD sebelumnya, perwakilan mereka masing-masing adalah empat, satu, dan satu. NU dan PSII yang sebelumnya tidak memiliki kursi, kini masing-masing memperoleh dua kursi, sementara Parkindo tetap mempunyai satu kursi. Wakil-wakil lainnya diangkat oleh pemerintah. Lihat *Laporan Tahun 1960*, hal. 61, dan Talsya, *10 Tahun*, hal. 87.

125. Daud Beureueh mengakui kelemahan pasukannya; lihat instruksinya kepada semua pimpinan resimen TII, bertanggal Aceh Darussalam, 20 Maret 1961; ketikan.

kabupaten) dan satu SMA di seluruh daerah itu, tetapi tujuh tahun kemudian di sana terdapat 28 SMP (satu di setiap kewedanaan) dan delapan SMA. Juga terdapat peningkatan yang mencolok dalam jumlah sekolah kejuruan milik pemerintah, dari 22 buah pada tahun 1953 menjadi 33 buah pada tahun 1960.¹²⁶ Yang paling penting dari segalanya itu adalah kenyataan bahwa sebuah universitas, sesuatu yang tidak berani diimpikan oleh rakyat Aceh pada awal tahun 1950-an, telah didirikan pada akhir 1959.

Bersama dengan pembentukan kembali propinsi Aceh, pembentukan komando militer, dan pemberian status daerah istimewa, pembangunan yang luar biasa dalam bidang pendidikan itu telah mengubah sikap rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat dan Darul Islam. Di satu pihak, karena sekolah telah menjadi saluran penting bagi propaganda pemerintah, pendidikan yang berkembang begitu cepat telah memudahkan rakyat di dalam menampung harapan yang besar dan propaganda pemerintah. Di lain pihak, sebagaimana halnya reformasi sosial politik pada tahun 1920-an, rakyat Aceh harus menerima kenyataan bahwa dalam arti pembangunan mereka telah tertinggal jauh dari daerah-daerah lain, dan bahwa kini ada kesempatan yang besar, sebagai hasil dari pemberontakan, untuk membangun diri mereka sendiri. Oleh sebab itu rakyat percaya bahwa pemberontakan harus diakhiri, karena telah mencapai tujuan utamanya: pengembalian status propinsi dan komando militer, serta pengakuan Pemerintah Pusat atas status istimewa Aceh dalam bidang-bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.

Di samping itu, dari segi militer, kaum pemberontak semakin lama semakin terisolir karena mereka gagal mengatasi operasi-operasi militer pemerintah yang bertujuan untuk memotong garis logistik mereka. Peningkatan kemampuan Angkatan Darat, baik dalam arti peralatan maupun organisasi, serta membesarnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara, menyebabkan pemerintah kini tidak saja mampu melancarkan operasi-operasi militer terhadap pemberontak secara lebih efektif, melainkan juga sanggup mencegah penyelundupan senjata dan amunisi

126. Angka-angka untuk tahun 1953 diperoleh dari *Keterangan dan Jawaban Pemerintah*, hal. 68-69, dan untuk 1960 dikutip dari *Laporan Tahun 1960*, hal. 287-292. Untuk memperlihatkan partisipasi pemerintah dalam pembangunan setempat, jumlah sekolah swasta tidak dimasukkan di sini.

ke daerah itu. Bahkan keadaan menjadi lebih berat lagi bagi para pemimpin pemberontakan karena kesulitan keuangan yang sangat mereka rasakan telah menghambat mobilisasi kekuatan militer mereka, terutama pada akhir tahun 1960. Dalam hal ini, kebijaksanaan tegas yang diambil oleh pemerintah Malaya dan Singapura terhadap semua pemberontak Indonesia yang beroperasi di sana, dan devaluasi rupiah pada bulan Agustus 1959 memberikan dampak yang besar terhadap RIA. Keputusan pemimpin-pemimpin RIA terhadap keadaan keuangan mereka tercermin dalam upaya Hasan Ali untuk mencari pinjaman dari Kahar Muzakkar serta memalsukan uang rupiah.¹²⁷

Kelumpuhan kekuatan RIA juga disebabkan oleh konsekuensi psikologis dari usaha Gaharu untuk meng-Aceh-kan komandonya. Kebijakan ini menyebabkan daerah tersebut dibanjiri oleh perwira dan pasukan Aceh, baik dalam barisan militer maupun polisi, setelah Gaharu kembali ke sana pada tahun 1956. Tiga tahun kemudian, ada sepuluh ribu tentara dalam KDMA, dan diperkirakan delapan puluh sampai sembilan puluh persen dari jumlah ini adalah orang Aceh.¹²⁸ Komposisi pasukan KDMA yang demikian tentu saja menimbulkan masalah psikologis bagi kaum pemberontak, sebab suatu serangan terhadap pasukan pemerintah kini bisa berarti serangan terhadap sesama orang Aceh yang mungkin menjadi saudara atau kawan mereka. Beban psikologis ini malah menjadi semakin berat lagi karena para pemimpin RIA kenal baik dengan sebagian besar pimpinan pasukan pemerintah, sebab mereka telah bertempur bahu-membahu melawan Belanda di front Sumatera Timur pada masa revolusi.

Jasin memanfaatkan sentimen psikologis di kalangan pimpinan pemberontak ini. Dia tidak memimpin sendiri operasi militer melainkan memberikan pimpinan komando kepada Adam Kamil, salah seorang komandan batalion dari divisi Aceh pada masa revolusi. Dan, karena tujuan operasi-operasi ini pada dasarnya bukan untuk membunuh melainkan memaksa para pemberontak agar meninggalkan perjuangan mereka, TII tidak mempunyai pilihan lain selain daripada menghindari pertempuran. Akibatnya banyak pemberontak yang diam-diam kembali

127. Lihat surat Abdurrahman Hasjim kepada Hasan Ali, tanggal 23 Januari 1961.

128. Angka ini diperoleh dari Elaine McKay. Barangkali dalam angka ini sudah termasuk pasukan yang ditarik dari Dewan Revolusi.

ke kampung mereka, dan mereka yang tetap tinggal dalam pasukan memindahkan pos mereka ke tempat-tempat yang terpencil dan kehilangan hubungan dengan markas besar. Sementara itu komunikasi antara Daud Beureueh dan komandan-komandan resimennya praktis terputus setelah bulan April 1961. Di markasnya, ia hanya memiliki beberapa perwira staf, termasuk Abdurrahman Hasjim dan Iljas Leube. Haji Hasanuddin juga bergabung dengan sang Wali Negara setelah resimen Sumatera Timurnya mendepaknya. Malah lebih parah, kini sudah tidak ada lagi hubungan antara Daud Beureueh dan Perdana Menteri, yang tertahan di Malaya, sejak Jasin menguasai seluruh pantai Aceh.

Namun begitu, meskipun pada tanggal 17 Agustus 1961 Jasin mengumumkan bahwa pemberontakan telah berakhir, pada kenyataannya banyak pemimpin pemberontak yang masih enggan menyerah. Mereka bertahan terutama sekali karena penolakan keras Daud Beureueh bagi pengakhiran pemberontakan kecuali bila Pemerintah Pusat menerima syaratnya: pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dalam hal ini, walaupun ia menyadari bahwa seluruh situasi telah berubah dan bahwa masa mendatang keadaan mungkin lebih berat lagi baginya karena rakyat telah menerima harapan besar akan pembangunan daerah sebagai pengganti semangat jihad, sang Wali Negara tetap tidak mau mengumumkan berakhirnya perjuangan. Setelah dibujuk oleh stafnya, ia kemudian mengizinkan komandan-komandan resimen untuk meninggalkannya.¹²⁹ Tambahan lagi, para pemimpin tersebut sangat khawatir akan keresahan yang sedang berkembang di kalangan Perti dan unsur-unsur *ulebalang* setelah Jasin mengumumkan "perdamaian fisik" pada bulan Agustus itu. Dengan mendapat dukungan dari cabang PNI dan PKI setempat, kedua unsur Perti dan *ulebalang* ini tidak menyukai kebijaksanaan perdamaian Jasin, dan karena itu mereka menentang rencana pemberian amnesti kepada para pemberontak. Di satu pihak pemimpin-pemimpin Perti percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh kaum pemberontak terhadap pengikut-pengikut mereka tidaklah dapat dimaafkan. Sementara itu sisa-sisa keluarga *ulebalang* juga sedang menunggu-menunggu kesempatan untuk berurusan dengan para pemberontak sehubungan dengan pembunuhan terhadap keluarga dan perampasan harta benda mereka pada

129. Lihat surat Abdurrahman Hasjim kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 12 September 1961.

tahun 1946.

Jasin bertindak cepat untuk menghapus rintangan ini. Yakin akan kesetiaan pimpinan pemberontak terhadap pemimpin tertinggi mereka, Jasin pun cenderung menjadi lebih lunak terhadap Daud Beureueh dan, pada saat yang sama, lebih menekan lawan-lawannya. Ia berusaha keras meyakinkan Daud Beureueh agar menghentikan perlawanan. Ketika pemimpin-pemimpin PRRI yang saleh menyerahkan diri pada akhir Agustus 1961, Jasin mencoba mendapatkan bantuan pribadi mereka untuk membujuk Daud Beureueh agar melakukan hal yang sama.¹³⁰ Agaknya karena tidak melihat hasil upaya ini, pada awal Oktober, sekalipun ada oposisi dari PNI dan PKI, Jasin mengutus sebuah delegasi yang terdiri atas 28 tokoh, termasuk beberapa orang bupati, ulama, serta wakil-wakil tentara dan polisi, untuk mengunjungi Daud Beureueh di Aceh Timur. Juru bicara delegasi, antara lain termasuk Muzakkir Walad, mohon kepada Daud Beureueh supaya kembali dan "memimpin mereka dan rakyat Aceh lagi".¹³¹ Di lain pihak, Jasin tidak menyembunyikan ancamannya terhadap unsur-unsur *ulebalang* dan Perti yang sedang gelisah itu. Pada tanggal 17 Oktober ia mengumumkan bahwa ia tidak akan segan-segan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap suatu usaha yang mengganggu penyelesaian damai.¹³²

Akibatnya banyak pemimpin pemberontakan yang melaporkan diri pada bulan Oktober, termasuk Abdurrahman Hasjim dan Hasan Ali yang telah diizinkan Jasin kembali ke Aceh dari Malaya. Akan tetapi

130. Pada pertengahan September, Jasin menyampaikan sepucuk surat dari bekas Kolonel Zulkifli Lubis kepada Daud Beureueh. Dalam suratnya sendiri, Jasin menjanjikan kepada Daud Beureueh untuk mengirimkan surat senada dari bekas Presiden RPI Sjafruddin Prawiranegara; lihat memorandum tulisan tangan Jasin kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 12 September 1961.

131. Hal ini terdapat dalam surat Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution, bertanggal "Mardlati'llah", 5 November 1961. Dengan sendirinya, delegasi ini tidak melibatkan unsur-unsur *ulebalang* dari Kabupaten Pidie dan ulama-ulama Perti, meskipun satu atau dua orang bangsawan, yang seorang dekat dengan Perti tetapi bertindak sebagai pejabat pemerintah, terdapat di dalamnya. Muzakkir Walad kelak pada tahun 1968 menjadi Gubernur Aceh.

132. *Dua Windbu Kodam-1/Iskandar Muda*, hal. 249. Dalam keputusannya, Jasin tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkannya, tetapi dalam pidato di depan DPRD-GR pada tanggal 23 Maret 1962 dengan jelas ia menunjuk pada sisa-sisa keluarga *ulebalang*, terutama yang tinggal di Jakarta; lihat "Pelaksanaan Unsur-unsur", hal. 6-7.

Daud Beureueh, yang ditemani Iljas Leube, Haji Hasanuddin, dan beberapa staf lainnya, lebih suka tinggal di hutan rimba Aceh Timur. Tentu saja Jasin tidak senang akan hal ini, meskipun lebih dari 12.000 tentara Darul Islam, yang membawa serta lebih dari seribu pucuk senjata, telah turun hingga bulan Desember 1961.¹³³ Oleh karena itu, pada tanggal 2 November Jasin mengunjungi Daud Beureueh dan berbicara dari hati ke hati dengannya selama dua setengah jam.¹³⁴ Tidak diperoleh informasi mengenai masalah yang dibicarakan kedua pemimpin itu, tetapi dari langkah-langkah Jasin selanjutnya kita ketahui bahwa ia menerima persyaratan Daud Beureueh. Pada tanggal 7 April 1962, dengan dukungan penuh dari DPRD dan beberapa jenderal di Jakarta,¹³⁵ Jasin menyatakan berlakunya syariat Islam di Aceh.

Sebulan kemudian, sebuah konvoi mobil dan bus membawa para pemimpin masyarakat dan pejabat pemerintahan untuk menemui Daud Beureueh di Aceh Timur dan membawanya kembali ke Kutaraja. Pada tanggal 8 Mei, setelah bersembahyang di mesjid raya Kutaraja, yang untuk pertama kali ia lakukan setelah meninggalkan kota itu pada awal tahun 1950-an, dengan singkat Daud Beureueh antara lain mengatakan, "Atas permintaan rakyat, saya kembali kepada rakyat ... Ini berarti juga bahwa tidak ada lagi permusuhan di antara sesama kita, sesama bangsa, yang telah berlangsung selama delapan tahun, sepuluh bulan dan 27 hari".¹³⁶ Dengan demikian, "penyelesaian spiritual" telah tercapai, dan bekas Wali Negara itu pun kembali ke kampungnya, setelah menolak tinggal di sebuah rumah yang diberikan oleh Jasin di Kutaraja.

133. Mereka yang "kembali" antara bulan Februari dan Oktober 1961 sudah dimasukkan dalam angka ini; lihat *Dua Windbu Kodam-I/Iskandar Muda*, hal. 249.

134. Surat dari Jasin kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 28 Desember 1961.

135. "Pelaksanaan Unsur-unsur", hal. 3. Jelas bahwa Nasution adalah salah seorang dari jenderal yang dimaksudkan Jasin.

136. *Dua Windbu Kodam-I/Iskandar Muda*, hal. 250.

Bab VIII

Kesimpulan

BERBAGAI KEKECEWAAN yang bersifat keagamaan dan kedaerahan terhadap keadaan seusai revolusi nasional ternyata merupakan dua penyebab utama pemberontakan di Aceh. Pembelahan ulama-zuama dalam kepemimpinan pemberontak menegaskan bahwa agama dan regionalisme mempunyai makna yang sama dalam membentuk motivasi pokok para pemimpin Aceh dalam oposisi mereka terhadap Pemerintah Pusat. Sejak revolusi nasional, para pemimpin ulama telah merasa sangat khawatir terhadap perkembangan dalam bidang keagamaan yang tidak memperlihatkan tanda-tanda terpenuhinya aspirasi politik mereka. Kita telah melihat bahwa di satu pihak mereka telah berjuang dalam revolusi atas nama agama mereka dan disertai harapan terbentuknya sebuah negara Islam. Pemimpin-pemimpin ini menjadi sangat kecewa ketika Indonesia tidak menjadi sebuah negara Islam, dan hak rakyat Aceh untuk memiliki satu propinsi sendiri pun ditolak begitu negeri ini memperoleh kemerdekaan secara nyata. Tambahan lagi, kekecewaan mereka menjadi berlipat ganda tatkala mereka dihadapkan pada pelanggaran nilai-nilai keagamaan mereka oleh orang-orang sebangsa. Sangatlah berat bagi para ulama untuk menerima kenyataan ini, sebab mereka telah terbiasa dengan situasi pada masa kolonial ketika Belanda menghargai rasa keagamaan mereka dan selalu mencegah timbulnya pelanggaran terhadapnya.

Di lain pihak, para pemimpin zuama lebih memperhatikan unsur daerah dari situasi itu. Dari sudut pengalaman politik, sebelumnya para zuama hampir tidak mempunyai suatu peranan. Mereka dikucilkan dari sistem pemerintahan Belanda, tetapi kemudian ditarik oleh Jepang, dan Jepanglah yang memberi mereka sedikit pengalaman dalam pemerintahan daerah. Peranan mereka yang menonjol selama masa revolusi

memberikan kendali politik di daerah itu kepada mereka. Namun kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang administrasi telah menyebabkan para zuama merasa terancam oleh kedatangan pejabat-pejabat non-Aceh ke daerah itu, yang memang sudah mulai berlangsung pada tahap akhir revolusi. Mereka bahkan menjadi lebih khawatir lagi akan masa depan pengaruh mereka ketika Pemerintah Pusat memutuskan untuk membubarkan Propinsi Aceh, yang didirikan pada awal tahun 1950, dan menggabungkan daerah itu ke dalam Propinsi Sumatera Utara.

Di sinilah kepentingan mereka bertemu dengan kepentingan pemimpin-pemimpin ulama, meski tidak sama sifatnya. Penghapusan Propinsi Aceh tidak akan memberikan dampak yang langsung kepada pengaruh dan kedudukan para ulama. Oleh karena pemimpin-pemimpin kaum ulama ini bertugas dalam urusan keagamaan dan mereka sangat bermutu dalam bidang ini, maka rencana pemerintah untuk membubarkan Propinsi Aceh tidak mengandung akibat apa pun terhadap para ulama tersebut. Kedatangan pejabat-pejabat non-Aceh juga tidak mengancam posisi mereka, sebab orang-orang itu hanya memegang jabatan-jabatan sekuler. Namun begitu, pemimpin-pemimpin ulama tetap khawatir terhadap para pejabat ini, karena mereka membawa suatu moralitas baru yang berlawanan dengan Islam. Oleh sebab itu para pemimpin ulama berketetapan hati untuk menghalangi berkembangnya moralitas baru ini dengan mencegah pejabat-pejabat yang mungkin akan melanggar nilai-nilai mereka itu memasuki Aceh. Dalam pandangan ulama-ulama ini, hal itu hanya mungkin dicapai jika rakyat Aceh diberikan hak untuk mengatur diri sendiri. Dengan alasan itu mereka dengan kuat mendukung Gerakan Otonomi yang dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin zuama pada tahun 1951.

Argumentasi semacam ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengapa ulama-ulama Perti tidak mendukung perlawanan tersebut. Apakah para ulama-ulama Perti tidak mengkhawatirkan masuknya moralitas baru yang menyerang nilai-nilai agama? Atau, apakah benar ulama-ulama Perti menolak mendukung Gerakan Otonomi karena percaya pada gugatan *ulebalang* bahwa otonomi diperlukan oleh para pemimpin PUSA untuk menghadapi tuduhan sehubungan dengan tindakan-tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh sebagian dari mereka selama

revolusi? Tidak perlu diragukan bahwa para ulama Perti juga marah terhadap pelanggaran-pelanggaran atas nilai agama. Mereka mungkin juga percaya bahwa tuntutan otonomi dapat berfungsi hanya sebagai selubung politik bagi para pemimpin PUSA, akan tetapi ini bukanlah pokok kekhawatiran mereka. Namun, walaupun kekhawatiran mereka terhadap kesalahan-kesalahan pemimpin PUSA kurang penting bila dibandingkan dengan ancaman terhadap akidah agama, para ulama Perti tetap tidak bergabung dengan pemimpin-pemimpin PUSA untuk membela agama mereka. Hal ini karena bagi ulama-ulama Perti masih ada kekhawatiran yang lebih besar lagi daripada ancaman terhadap nilai-nilai agama -- yaitu hidup matinya ajaran mereka sendiri. Para ulama tradisional ini sudah merasa terancam oleh pemimpin-pemimpin PUSA sejak akhir dasawarsa 1920-an. Oleh karena itu mereka tidak mempunyai kebingungan sedikit pun bahwa tahun-tahun mendatang akan lebih berat lagi bagi mereka jika para pemimpin PUSA masih tetap berkuasa. Sebab itu, demi kehidupan mereka sendiri, mereka harus menentang PUSA dan bekerja sama dengan lawan-lawannya.

Selain khawatir akan ancaman terhadap nilai-nilai agama, para ulama PUSA juga sangat gusar karena program reformasi mereka terhenti. Telah dikemukakan bahwa rencana mereka telah berjalan dengan baik selama tahap akhir kolonialisme Belanda, tetapi kedatangan Jepang telah menghentikan hampir seluruh pelaksanaannya. Rencana tersebut mencakup suatu program besar yang mendasar, dan pada kenyataannya bukan hanya merupakan program pembaharuan di bidang agama saja, melainkan lebih dari itu. Program tersebut menyangkut penyusunan kembali Aceh dalam arti ekonomi dan karakter sosial politiknya melalui pencapaian suatu "zaman kemajuan". Tetapi kemajuan untuk apa? Pertanyaan ini menunjuk pada inti pembaharuan PUSA yang gagal dilihat oleh banyak penulis. Di balik reformisme ini sesungguhnya ada suatu gebrakan untuk memaksa rakyat Aceh agar menerima kekalahan mereka dari Belanda, walaupun hanya untuk sementara. Rakyat Aceh juga didesak agar menyadari bahwa kalau ingin menuntut balas terhadap Belanda, yang mereka anggap musuh agama itu, mereka harus memodernisasi diri mereka. Hal yang terakhir ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Jadi, modernisasi hanyalah semata-mata suatu alat untuk memungkinkan rakyat Aceh menentang Belanda secara lebih efektif dalam jangka panjang.

Tanpa sungguh-sungguh menyadari tujuan ini, rakyat dengan penuh semangat menyambut program PUSA dan mengangkat harapan mereka tinggi-tinggi bersamanya. Harapan yang tinggi ini kemudian jatuh ke tingkat yang serendah-rendahnya dengan kedatangan Jepang yang menghentikan pelaksanaan rencana-rencana kaum ulama itu. Oleh sebab itu para pemimpin PUSA sangat kecewa dan menaruh dendam terhadap Jepang. Tetapi harapan mereka meninggi lagi dengan datangnya revolusi nasional, sebab para ulama PUSA itu percaya bahwa mereka akan mampu meneruskan program mereka di dalam sebuah negara Indonesia yang merdeka. Sekali lagi mereka dikecewakan oleh perkembangan politik yang ternyata tidak memenuhi harapan mereka setelah revolusi berakhir. Pemerintah Pusat menolak memberikan status propinsi kepada mereka, padahal status itu dapat mereka jadikan alat untuk melaksanakan program pembaharuan mereka. Jadi mereka melihat bahwa pemerintah tidak memiliki suatu rencana untuk membangun Aceh. Dalam pandangan mereka, tindakan ini berarti bahwa pemerintah telah dengan sengaja mencegah mereka untuk melaksanakan program-program mereka, yaitu dengan jalan menanggalkan kekuasaan mereka di daerah itu. Kemudian, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap nilai-nilai fundamental dari agama mereka menyebabkan mereka bahkan lebih tersinggung lagi, sehingga pada akhirnya mendorong mereka berontak pada tahun 1953.

Namun demikian perang tidaklah semata-mata disebabkan oleh ambisi, tetapi oleh kombinasi antara ambisi dan penilaian tentang kekuatan relatif.¹ Tanpa kepercayaan bahwa mereka memiliki kekuatan yang memadai untuk mencapai tujuan mereka, maka para pemimpin PUSA pasti tidak akan mencetuskan pemberontakan itu. Kelemahan Pemerintah Pusat selama dekade 1950-an merupakan faktor utama yang telah mendorong pemimpin-pemimpin Aceh untuk menantang secara bersenjata. Sekurang-kurangnya terdapat dua indikasi tentang kelemahan Pemerintah Pusat sebelum tahun 1953, waktu pemberontakan meletus di Aceh. Pertama, adanya perpecahan yang tajam di kalangan elite politik yang tampak pada jatuh dan banggunya lima kabinet dalam waktu singkat antara Desember 1949 sampai September 1953. Kedua, dalam

1. Geoffrey Blainey, *The Causes of War* (London dan Basingstoke: MacMillan, 1973), hal. 150-152.

bidang militer, Pemerintah Pusat telah gagal menundukkan pemberontakan-pemberontakan Darul Islam yang telah meletus lebih dahulu di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Jauh berbeda dari keadaan pada tingkat nasional itu, struktur politik Aceh terintegrasi sangat baik di bawah kepemimpinan PUSA. Sejak penggulingan kaum *ulebalang* dari kekuasaan pada masa revolusi nasional, Daud Beureueh telah menjadi fokus utama identitas Aceh, sementara organisasi PUSA-nya merupakan faktor politik yang paling berpengaruh di daerah itu. Dalam hal ini, oleh karena rakyat Aceh tidak mengalami pengaruh yang cukup berarti dari kaum intelektual sekular --yang tidak terjadi sampai sepuluh tahun kemudian, yaitu ketika intelektual muda yang terdidik dalam bidang non-agama kembali dari Jawa -- mereka benar-benar berada di bawah pengaruh kaum ulama. Kondisi ini menguntungkan para pemimpin PUSA yang kecewa dan terkucil di dalam memobilisasi rakyat untuk menentang Pemerintah Pusat yang lemah.

Di lain pihak, peningkatan wibawa dan keberhasilan Pemerintah Pusat di dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi di daerah-daerah lain pada dasawarsa 1950-an merupakan sebagian dari jawaban terhadap pertanyaan mengapa pemberontakan Aceh itu runtuh pada tahun 1959, walaupun tidak seluruhnya berakhir sampai awal tahun 1962. Sementara tidak ada keragu-raguan bahwa pemberontakan itu telah didukung oleh kebanyakan rakyat Aceh, yang menyebabkan sulit untuk dikalahkan, perkembangan politik di luar Aceh memang mempunyai pengaruh pula terhadapnya. Penghancuran pemberontakan PRRI pada tahun 1958 telah memperkuat kendali Pemerintah Pusat atas daerah-daerah baik dalam arti politik maupun militer, sementara organisasinya pun sudah sangat meningkat. Perkembangan ini mendorong terwujudnya perpecahan dalam kubu pemberontak antara kaum pragmatis (Hasan Saleh yang didukung oleh sejumlah pemimpin inti PUSA) dan kaum ideolog (Daud Beureueh dan kelompoknya). Perpecahan ini pada dasarnya merupakan suatu kelanjutan dari konflik antara pemimpin-pemimpin zuama dan ulama, yang menjadi demikian penting sejak pengembalian otonomi Aceh oleh Pemerintah Pusat pada awal tahun 1957.

Walaupun begitu, ancaman militer Pemerintah Pusat yang potensial janganlah dianggap sebagai faktor yang lebih menentukan daripada

usaha-usaha penyelesaian secara politis, yaitu dengan memberikan status propinsi kepada Aceh dan mengizinkan orang-orang Aceh memegang posisi penting di daerah itu. Jika Pemerintah Pusat menyandarkan diri semata-mata pada kekuatan militernya, barangkali para pemimpin zuama pun tidak akan mengusahakan pengambilalihan kepemimpinan dari kaum ulama, atau akan gagal berbuat seperti itu. Bila hal itu yang terjadi, pemimpin-pemimpin kaum ulama akan mendapat suatu kesempatan lagi untuk mengerahkan rakyat Aceh dengan mencap tindakan militer tersebut sebagai kolonialisme Jawa. Di pihak lain, rakyat Aceh memahami bahwa tujuan pemberontakan telah tercapai tatkala Pemerintah Pusat memberikan, atas tuntutan para pemimpin zuama yang pemberontak, status istimewa dalam bidang agama, adat-istiadat, dan pendidikan kepada propinsi itu. Itulah yang telah memungkinkan pemimpin-pemimpin zuama untuk menyerukan penghentian pemberontakan. Hal ini menyebabkan para zuama relatif populer, sementara pemimpin-pemimpin ulama perlahan-lahan kehilangan daya tarik dan peranan pentingnya.

Dalam kaitan dengan berakhirnya pemberontakan itu, ada dua faktor yang menentukan keberhasilan kebijaksanaan pemerintah. Faktor-faktor ini sangat membantu usaha memperbaiki citra Pemerintah Pusat dalam pandangan rakyat Aceh sehingga mendorong mereka untuk menerima penyelesaian politik pemberontakan tersebut. Dalam hal ini rakyat Aceh dapat menerima penyelesaian politik itu karena kini mereka telah yakin akan adanya kejujuran di dalam maksud Jakarta untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satu dari faktor-faktor tersebut ialah adanya perasaan mengenai "titik awal" baru yang dilahirkan oleh pemberlakuan kembali UUD 1945 pada pertengahan tahun 1959. Seperti halnya dengan rakyat di daerah-daerah lain, rakyat Aceh juga merasa tersentuh oleh "peremajaan" lingkungan politik yang diusahakan oleh pemerintah. Kembali ke UUD 1945 tidak hanya bermakna sebagai pengembalian sebagian perasaan yang menyangkut semangat revolusi, tetapi juga pengembalian harapan rakyat Aceh akan adanya perbaikan, jika bukan pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Indoktrinasi mengenai Manifesto Politik (Manipol) gagasan Presiden Soekarno dapat diterima oleh rakyat Aceh karena tidak dirasakan ofensif terhadap kepercayaan agama rakyat Aceh. Dalam setiap pembicaraan mengenai Kembali ke UUD 1945 di suatu daerah yang kuat Islamnya seperti Aceh, wakil-wakil

Pemerintah Pusat senantiasa menekankan bahwa konstitusi itu dijiwai oleh Piagam Jakarta yang diwarnai oleh karakter Islam yang khas. Apalagi rakyat Aceh merasa semakin aman, dengan adanya gagasan anti-komunis dalam program-program indoktrinasi pemerintah.

Sementara kembali ke UUD 1945 memberi harapan kepada mereka, simbolisme dalam bentuk slogan-slogan seperti "masyarakat adil dan makmur" dan "pembangunan daerah" telah menyentuh rakyat Aceh lebih dalam lagi. Jikalau hal ini kita kaitkan dengan kenyataan bahwa Aceh telah menjadi sebuah propinsi pada tahun 1957, kita dapat melihat bahwa rakyat Aceh agaknya menganggap slogan-slogan "masyarakat adil dan makmur" dan "pembangunan daerah" bukan sebagai simbol-simbol kosong belaka, melainkan sebagai janji-janji yang penuh arti. Jumlah sekolah pada semua jenjang meningkat tajam selama kurang dari sepuluh tahun setelah meletusnya pemberontakan. Keyakinan rakyat ini semakin diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa kini sudah terdapat sebuah universitas di Kutaraja. Barangkali suatu faktor penting lainnya adalah kembalinya beberapa intelektual sekular dari Jawa, yaitu mereka yang tertarik pada slogan-slogan yang menyangkut pembangunan daerah. Para intelektual sekular Aceh ini, yang terdidik dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang sosial lainnya di berbagai universitas di Jawa dan tempat-tempat lain, segera dipandang sebagai kelompok pemimpin baru di Aceh. Dan gagasan mereka mengenai bagaimana kemajuan dapat dicapai, segera dianggap sebagai langkah untuk maju -- suatu persamaan praktis dari jalan ke arah kemajuan, seperti yang diimpikan oleh pemimpin-pemimpin PUSA tiga puluh tahun sebelumnya.

Faktor yang kedua adalah perubahan penting yang terjadi dalam sikap pemerintah terhadap konflik ulama-*ulebalang*. Perubahan ini oleh rakyat Aceh dianggap sebagai koreksi pemerintah terhadap kesalahan dalam kebijaksanaannya pada masa lampau. Sebelum tahun 1953 dan segera setelah tahun itu, di Aceh Pemerintah Pusat dipahami sebagai telah memanipulasi pertikaian yang ada di antara unsur-unsur PUSA dan *ulebalang* demi kepentingannya sendiri. Dalam hubungan ini pemerintah dipercayai telah memandang munculnya kembali konflik antara kelompok-kelompok *ulebalang* dan ulama pada awal tahun 1950 sebagai durian runtuh, justru pada saat pemerintah sangat berhasrat untuk mendepak pemimpin-pemimpin PUSA ke luar dari panggung politik setempat dan memasukkan pengaruhnya sendiri di daerah itu. Setelah gagal menekan

pemimpin-pemimpin PUSA, Pemerintah Pusat agaknya mengharapkan bahwa protes dan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh kaum *ulebalang* terhadap ulama akan memperbesar konflik di antara kedua kelompok itu, dan ini akan membuka jalan bagi Jakarta untuk mencampurinya. Bila hal ini yang terjadi, maka tidaklah dapat diharapkan Jakarta akan mengakhiri pertikaian itu, melainkan sebaliknya, Jakarta mempunyai kepentingan untuk membiarkannya berlangsung terus. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa demi kepentingannya sendiri Pemerintah Pusat memiringkan timbangan kepada unsur-unsur *ulebalang*, yaitu pihak yang terlemah dalam konflik itu. Hal ini dilakukan dengan jalan mendukung perjuangan mereka, meskipun dengan cara-cara yang sangat rahasia. Tentu saja maksud pemerintah ini tidak dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen, akan tetapi fakta bahwa kelak pada tahun 1963 Pemerintah Pusat telah mencegah timbulnya kembali pertikaian antara ulama dan *ulebalang* menyulitkan kita untuk menarik kesimpulan lain.

Kerja sama antara unsur-unsur pemerintah dan *ulebalang*, baik disengaja ataupun tidak, terlukis pada bulan-bulan pertama pemberontakan ketika pemerintah menempatkan banyak bangsawan pada pos-pos pemerintahan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin PUSA. Akan tetapi kerja sama itu tidak berlangsung lama, selain karena pemerintah gagal mengatasi pemberontakan, juga karena perkembangan politik pada tingkat nasional mulai memberi peranan penting dalam bidang politik kepada tentara. Oleh sebab itu, pendulum pun berayun ke arah yang berlawanan. Secara perlahan-lahan pemerintah mulai menyadari bahwa kaum *ulebalang* tidak mempunyai kekuatan nyata dalam masyarakat Aceh, dan bahwa dengan mendukung mereka maka pemerintah tidak akan mampu mengakhiri pemberontakan. Oleh karena itu pemerintah berusaha menyeberang ke pihak pemimpin PUSA dengan menawarkan konsesi-konsesi politik kepada mereka. Dalam pada itu, pemerintah tidak hanya memutuskan kerja sama dengan kaum *ulebalang*, melainkan juga melancarkan beberapa tindakan terhadap sebahagian dari mereka. Demi penyelesaian damai, Panglima KDMA Sjammaun Gaharu menangkap beberapa pemimpin kelompok *ulebalang* pada tahun 1957-1958. Kemudian, pada akhir tahun 1961, penggantinya, Kolonel Jasim, mengancam akan menerapkan hukuman mati terhadap siapa saja yang menentang penyelesaian damai itu, termasuk kaum *ulebalang*.

Pukulan terakhir terhadap kaum *ulebalang* datang dari Pemerintah Pusat ketika ternyata beberapa unsur *ulebalang* tidak bersedia melupakan konflik mereka dengan PUSA. Bangsawan-bangsawan ini barangkali berpandangan bahwa mereka telah disudutkan oleh para pemimpin militer lokal yang hanya berminat pada tercapainya suatu penyelesaian dengan kaum pemberontak. Mereka berpikir bahwa mereka masih mempunyai pengaruh besar dalam lingkungan politisi sipil di Jakarta, yaitu di kalangan pemimpin-pemimpin yang tidak menyukai pemuka-pemuka PUSA. Barangkali unsur-unsur *ulebalang* ini percaya bahwa mereka tidak akan disisihkan jika pemimpin-pemimpin militer tidak memiliki kekuasaan yang demikian besar dalam politik. Oleh karena itu, begitu perimbangan kekuasaan di pusat beralih dari pemimpin militer kepada Soekarno pada pertengahan tahun 1962, mereka pun berusaha untuk menghidupkan kembali perjuangan mereka. Pandangan bahwa kedudukan Soekarno bertambah kuat bukan tidak berdasar, sebab ternyata ia memang berhasil memasukkan pengaruhnya dalam Angkatan Darat dengan memindahkan Nasution dari kedudukan yang penting sebagai KSAD ke posisi yang kurang berpengaruh sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) pada tahun itu. Pada masa inilah beberapa gugatan mengenai harta benda, yang menjadi salah satu topik utama dalam konflik dengan kaum ulama, diajukan ke pengadilan setempat. Sementara tuntutan ini dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung di Jakarta campur tangan dan menginstruksikan pengadilan agar mengabaikan gugatan-gugatan tersebut.² Tindakan ini menandai akhir konflik ulama-*ulebalang* dari arena politik lokal.

Kendatipun betul bahwa perubahan sikap Pemerintah Pusat terhadap konflik ulama-*ulebalang* merupakan salah satu dari dua faktor yang mengubah persepsi rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat, ini tidak berarti bahwa akar utama pemberontakan itu terletak pada pertikaian tersebut. Konflik ulama-*ulebalang* hanyalah merupakan perkara sekunder, sebab tidak akan menjadi penting bilamana Pemerintah Pusat tidak ikut campur. Dengan perkataan lain, pemberontakan itu pada dasarnya merupakan konflik antara pemimpin-pemimpin PUSA dan

2. Lihat surat Mahkamah Agung kepada semua Pengadilan Negeri di seluruh Aceh, bertanggal Jakarta, 21 Oktober 1963.

Pemerintah Pusat, dan pihak pertama tidak akan menentang kekuasaan pihak kedua hanya karena adanya pertikaian mereka dengan unsur-unsur *ulebalang* pada masa lampau. Apa yang lebih penting bagi para pemimpin PUSA ketika itu adalah peranan pemerintah di dalam konflik tersebut, di mana pemerintah tidak hanya di membiarkan adanya kritik-kritik anti-PUSA melainkan juga cenderung berpihak kepada lawan mereka. Pada hemat saya, sikap pemerintah terhadap konflik ini agaknya telah dipandang rakyat sebagai barometer untuk menilai kewajaran kebijaksanaan pemerintah terhadap kaum ulama.

Tindakan pemerintah terhadap unsur-unsur anti-PUSA juga mempengaruhi para ulama Perti. Tetapi, dampak pukulan itu terhadap pemimpin-pemimpin Perti tidak seburuk dampak yang dirasakan oleh kaum *ulebalang*. Bagi pemimpin-pemimpin Perti, satu-satunya akibat dari kebijaksanaan pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan secara damai adalah bahwa mereka harus menghentikan oposisi mereka terhadap para pemimpin pemberontakan. Penghentian oposisi demikian tentu saja berarti bahwa, sebagaimana halnya kaum *ulebalang*, Perti adalah pihak yang kalah dalam konflik dengan PUSA. Akan tetapi kekalahan ini bukanlah kekalahan total bagi para ulama Perti, tidak seperti halnya kaum *ulebalang*. Sekalipun anggota-anggotanya berada di bawah ancaman Darul Islam, kenyataan menunjukkan bahwa pengaruh Perti telah cukup menyebar di beberapa kabupaten, terutama menjelang akhir pemberontakan. Pada awal tahun 1950, pengaruh Perti sangat besar di kabupaten-kabupaten di pantai barat saja, tetapi menjelang berakhirnya pemberontakan partai itu telah memiliki dukungan yang cukup besar di kalangan penduduk di pantai timur.

Meningkatnya pengaruh Perti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, beberapa dari pembaharuan keagamaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PUSA agaknya telah menimbulkan akibat seperti senjata makan tuan bagi kaum reformis itu sendiri.³ Gerakan pembaharuan itu pada umumnya telah menimbulkan transformasi pendidikan agama dari sistem tradisional, yang ditandai oleh adanya *dayah*, ke sistem yang lebih modern yang bersandar pada madrasah. Terutama pada tahun-tahun 1950-1952 para ulama PUSA telah mendirikan banyak

3. A.K. Baihaqi, *Ulama dan Madrasah di Aceh* (Jakarta: Leknas-LIPI, 1976), hal. 36-37, dan 43.

sekolah agama, baik pada jenjang dasar maupun menengah, untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah, yaitu ketika Pemerintah Pusat menolok menyediakan sekolah-sekolah baru. Perkembangan ini, secara paradoks, memberi keuntungan yang tidak ternilai kepada ulama Perti, karena dengan semakin banyaknya ulama PUSA yang terlibat dalam program pembaharuan, maka semakin terbuka pula peluang bagi ulama Perti untuk menguasai *dayah-dayah*. Pembaharuan ini menyebabkan para ulama reformis, terutama yang muda-muda, kehilangan pengaruh tradisional mereka, sebab sistem madrasah cenderung memperkecil kesetiaan dan rasa hormat yang luar biasa yang diberikan oleh para murid kepada guru-guru mereka sebelumnya. Hanyalah mereka yang mempertahankan *dayah* mereka atau yang memang telah terkenal dan berpengaruh dapat memelihara pengaruh di kalangan rakyat.

Jadi, dengan mempertahankan dan mendirikan *dayah* baru di sekitar kota yang bebas dari pengaruh Darul Islam, para ulama Perti mampu mengembangkan pengikut mereka. Kedua, keterlibatan pemimpin PUSA secara penuh dalam pemberontakan ternyata juga memberi keuntungan lain kepada ulama-ulama Perti. Hal ini karena keterlibatan yang demikian rupa dalam pemberontakan menyebabkan para ulama PUSA terhambat di dalam membina kembali pengaruh mereka dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan mereka sebagai guru, meskipun hubungan mereka dengan rakyat tidak terputus sama sekali. Di samping itu, ulama-ulama PUSA juga terpengaruh oleh membanjirnya sekolah-sekolah umum yang merugikan madrasah. Berbeda dari *dayah*, madrasah kurang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum karena ketidakpastian lapangan pekerjaan yang ditawarkannya, selain dari masalah identitas. Akibatnya murid-murid yang berminat pada pendidikan umum lebih suka memasuki sekolah umum daripada madrasah, sementara mereka yang ingin memperoleh kualifikasi keagamaan akan memilih *dayah*. Gejala ini pada akhirnya mengakibatkan mundurnya madrasah.

Dengan cara demikianlah pemberontakan secara perlahan-lahan tetapi mendasar mulai menyusun kembali lembaga-lembaga penting dalam masyarakat Aceh. Kita telah melihat bagaimana periode 1945-1953 didominasi oleh para ulama PUSA, sementara Daud Beureueh menjadi fokus utama identitas Aceh. Di luar lingkaran ini adalah daerah pengaruh para ulama Perti. Secara perlahan-lahan pemberontakan mengubah lingkaran-lingkaran ini. Daud Beureueh tidak lagi menjadi fokus

utama masyarakat Aceh, karena pengaruhnya yang dominan itu kini telah digantikan oleh beberapa pusat kekuasaan yang lebih kecil. Salah satu pusat kekuasaan tersebut ada di sekitar Gubernur, yang kepemimpinan formalnya diakui oleh rakyat Aceh sejak dikembalikannya status propinsi kepada Aceh pada tahun 1957. Pusat kekuasaan yang kedua adalah kelompok intelektual sekular. Dalam hubungan ini rakyat semakin dapat menerima peranan yang dimainkan oleh kaum intelektual sekular disebabkan oleh pengembangan pendidikan sekular secara luar biasa di daerah itu. Kedua pusat kekuasaan ini berbagi pengaruh dalam masyarakat Aceh pada masa sesudah pemberontakan dengan pusat kekuasaan yang ketiga. Pusat ketiga ini terdiri atas suatu kelompok besar ulama, yang kini sering disebut "pemimpin informal", yang masih tetap mempunyai pengaruh besar.

Masih ada sesuatu yang harus dikatakan tentang pusat ketiga ini. Cukup jelas bahwa pusat ini terdiri atas ulama-ulama reformis eks-PUSA dan ulama-ulama tradisional. Oleh karena wataknya yang reformis itu, maka ulama-ulama PUSA atau eks-PUSA ini bukannya tidak siap untuk menerima perubahan-perubahan yang dibawa oleh arus pendidikan sekular, sejauh hal itu dapat ditoleransi dari sudut keagamaan. Akan tetapi hal ini mengakibatkan mereka kehilangan pengaruh, sehingga menguntungkan kaum tradisional. Para ulama eks-PUSA ini pada akhirnya akan terus kehilangan pengaruh, kecuali jika mereka beralih kembali kepada garis tradisional, atau barangkali ke dunia ortodoks. Jika itu yang terjadi, maka para ulama Perti pun akan menjadi unsur paling berpengaruh dalam pusat kekuasaan ketiga ini. Hal ini dapat berarti bahwa pada masa mendatang mereka akan muncul sebagai pemimpin yang potensial dalam perlawanan terhadap setiap pelanggaran atas akidah agama.

Di atas segala itu, apakah yang telah dihasilkan oleh pemberontakan tersebut? Dapatkah dikatakan bahwa para ulama PUSA pada akhirnya gagal mencapai cita-cita mereka? Memang sangat paradoks bahwa kemunduran PUSA mungkin merupakan suatu akibat dari pembaharuan masyarakat Aceh yang telah berlangsung sejak pengembalian otonomi Aceh pada tahun 1957, padahal pembaharuan itu justru menjadi cita-cita PUSA. Di lain pihak adalah jelas bahwa PUSA telah gagal melaksanakan program reformasinya pada masa lampau. Akan tetapi Gubernur Hasjmy, salah seorang pemimpin penting PUSA, tampaknya telah

mengambil alih program pembaharuan PUSA dengan memusatkan pembangunan Aceh pada pembinaan semua tingkat lembaga pendidikan, baik yang bersifat keagamaan maupun yang sekular. Dalam arti yang demikianlah sesungguhnya dapat dikatakan bahwa cita-cita para pemimpin PUSA telah tercapai, dan dalam arti itu pulalah mereka telah memperoleh kepuasan. Kalau kita berbicara secara umum, sebenarnya dapat dikatakan bahwa para pemberontak Aceh telah mencapai lebih dari apa yang mereka inginkan semula. Pada tahun 1951 pemimpin-pemimpin PUSA hanya menuntut otonomi bagi daerah mereka, akan tetapi pada akhir perjuangan mereka, kepada Aceh telah diberikan, selain status propinsi dan komando militer sendiri, suatu bentuk otonomi yang lebih luas daripada propinsi-propinsi lain yaitu dalam bidang agama, pendidikan, dan adat-istiadat. Barangkali hasil yang dicapai oleh pemberontakan di Aceh ini lebih besar dari apa yang didapat oleh pemberontakan-pemberontakan daerah lainnya.⁴ Sebagaimana halnya kasus pemberontakan PRRI/Permesta di Sulawesi Utara, banyak bekas pemberontak Aceh yang telah ditampung dalam unit-unit militer setempat, sementara banyak pula pegawai sipilnya yang telah kembali ke dalam dinas-dinas pemerintahan. Menurut suatu perkiraan, lebih dari lima puluh persen anggota komando militer Aceh pada tahun 1970-an adalah mereka yang pernah berjuang sebagai tentara Darul Islam.

Setelah berbicara tentang hasil pemberontakan, masih ada beberapa kata akhir yang perlu diungkapkan menyangkut makna gerakan itu dalam hubungannya dengan masalah integrasi nasional di Indonesia. Pemberontakan Aceh menunjukkan bahwa kepentingan etnis, agama, dan daerah tetap penting dalam memahami masalah-masalah integrasi nasional di negeri ini. Mengingat peranan mereka dalam membela kekuasaan pusat melalui kesetiaan tunggal kepada Republik pada tahap paling sulit dalam revolusi, rakyat Aceh yakin bahwa mereka berhak mendapat pelayanan yang layak dari Pemerintah Pusat. Dan dukungan luas yang mereka berikan kepada kekuatan-kekuatan pemberontak jelas mencerminkan pandangan mereka, yaitu bahwa mereka belum lagi

4. Untuk perbandingan atas hasil yang dicapai kaum pemberontak di Sumatera Barat, serta Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, lihat Herbert Feith dan Daniel S. Lev, "The End of the Indonesian Rebellion", dalam *Pacific Affairs* 32, no. 1 (Spring, 1963), hal. 44-45.

memperoleh pelayanan yang diharapkan.

Sebagai penutup dapat dikatakan bahwa ternyata keterlibatan rakyat Aceh secara penuh dalam perjuangan anti-Belanda belum mengurangi keterikatan mereka terhadap kepentingan-kepentingan daerah. Di lain pihak kenyataan ini ada kaitannya dengan sikap pemerintah pusat pada tahun 1950-an yang sangat tidak peka terhadap gugatan-gugatan etnis. Ketidakpekaan itu memang telah ada pada waktu Belanda memanipulasi kesetiaan etnis di daerah-daerah lain, dan hal ini kemudian menyebabkan kaum nasionalis mencurigai tuntutan yang berkaitan dengan identitas etnis pada umumnya. Pada tingkat yang lebih umum, riwayat pemberontakan Aceh memperlihatkan bahwa tanggapan terhadap kepentingan dan nilai-nilai berbagai kelompok etnis, agama, dan daerah akan menentukan kekuatan kesetiaan kepada Pemerintah Pusat.

Istilah dan Singkatan

- Aceh Darussalam.** Nama yang sering digunakan untuk menunjukkan markas besar gerakan Darul Islam di Aceh.
- API.** Angkatan Pemuda Indonesia.
- BKR.** Badan Keinsyafan Rakyat di Aceh.
- dayah.** (Aceh) Sekolah agama tradisional yang sama dengan "pesantren" di Jawa.
- Dewan Fatwa.** Dewan Penasihat yang didirikan oleh Darul Islam di Jawa Barat pada pertengahan 1948.
- Dewan Imamah.** Kabinet Darul Islam sebelum tahun 1949.
- Dewan Militer.** Didirikan oleh Darul Islam di Aceh pada tahun 1954.
- DPRD.** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- eenheid commando.** (Belanda) Kesatuan komando.
- gadeoh keurajeun.** (Aceh) Kehilangan kekuasaan, kekayaan, dan status.
- gampong.** (Aceh) kampung.
- GASIDA.** Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh.
- GPO.** Gabungan Partai-partai dan Organisasi.
- Giyugun.** Tentara sukarela Jepang di Sumatera.
- HMI.** Himpunan Mahasiswa Islam.
- IPI.** Ikatan Pemuda Indonesia.
- kanun azasi.** Konstitusi Darul Islam.
- kaphee.** (Aceh) kafir.
- KDMA.** Komando Daerah Militer Aceh.
- keuchik.** Kepala kampung.
- KNIP.** Komite Nasional Indonesia Pusat.
- korte verklaring.** (Belanda) Perjanjian Pendek.

- Majelis Islam.** Didirikan oleh Darul Islam di Jawa Barat pada awal 1948.
- Majelis Penimbang.** Pengadilan yang didirikan oleh pemerintah daerah di Aceh pada tahun 1946 untuk mengawasi harta yang disita dari kaum *ulebalang*.
- Majelis Syura.** Parlemen Darul Islam.
- Masyumi.** Majelis Syura Muslimin Indonesia.
- meunasah.** (Aceh) Bangunan di kampung yang berfungsi sebagai sebuah pusat kegiatan agama dan sosial.
- nanggro.** (Aceh) Wilayah kekuasaan seorang *Ulebalang*.
- NII.** Negara Islam Indonesia.
- NU.** Nahdatul Ulama.
- OSM.** Operasi Sabang Merauke.
- Parindra.** Partai Indonesia Raya.
- Parkindo.** Partai Kristen Indonesia.
- Peperda.** Penguasa Perang Daerah.
- Peperpu.** Penguasa Perang Pusat.
- Pesindo.** Pemuda Sosialis Indonesia.
- Perti.** Pergerakan Tarbiyah Islamiyah.
- PIR.** Persatuan Indonesia Raya.
- PKI.** Partai Komunis Indonesia.
- PNI.** Partai Nasional Indonesia.
- P3RI.** Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia.
- P4SU.** Panitia Penyelenggaraan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
- prang sabi.** (Aceh) Perang sabil.
- PRRI.** Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia.
- PSI.** Partai Sosialis Indonesia.
- PSII.** Partai Syarikat Islam Indonesia.
- PUSA.** Persatuan Ulama Seluruh Aceh.
- RI.** Republik Indonesia.
- RIA.** Republik Islam Aceh
- RIS.** Republik Indonesia Serikat.
- RPI.** Republik Persatuan Indonesia.
- seumeubeut.** (Aceh) Mengajarkan atau menyebarkan agama.
- SGA.** Sekolah Guru Atas.
- SMA.** Sekolah Menengah Atas.
- SMI.** Sekolah Menengah Islam.
- SMP.** Sekolah Menengah Pertama.

- SOB.** (Belanda) *Staat van Oorlog en Beleg* atau keadaan darurat perang.
- SRI.** Sekolah Rendah Islam.
- Teuku.** (Aceh) Gelar *Ulebalang*, atau anggota lelaki lainnya dari keluarga bangsawan.
- Teungku.** (Aceh) Secara harfiah berarti "Saudara", tetapi juga dipakai sebagai gelar untuk ulama.
- Teungku Chik.** (Aceh) Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ulama yang sangat dihormati.
- teuntra kaphee.** Tentara kafir.
- TII.** Tentara Islam Indonesia.
- TNI.** Tentara Nasional Indonesia.
- TPR.** Tentara Perjuangan Rakyat.
- TRI.** Tentara Republik Indonesia.
- TT-I.** Tentara dan Territorium I.
- tuha peuet.** (Aceh) Dewan desa.
- ulebalang.** (Aceh) Penguasa sesuatu wilayah, atau anggota keluarganya.
- ureung ateu.** (Aceh) Orang gunung.
- ureung glee.** (Aceh) Lihat, **ureung ateu.**
- ureung leubeh.** (Aceh) Orang yang mempunyai lebih banyak pengetahuan atau kekayaan dibandingkan dengan penduduk kampung lainnya.
- Wali Negara.** Gelar pemimpin gerakan Darul Islam di Aceh.
- warasatul anbiya.** Orang yang mengikuti langkah para nabi.

Daftar Pustaka

Buku dan tulisan yang diterbitkan

- Abdullah, Taufik, dan Aswab Mahasin, et al. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1978.
- Ahmad, Z.A. *Republik Islam Demokratis*. Tebing Tinggi: Pustaka Madju, t.t. [1950?]
- Alfian. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*. Jakarta: Leknas, 1971.
- Almanak Umum 1959*. Kutaraja: Atjeh Press Service, 1959.
- Amin, S.M. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Jakarta: Soeroengan N.V., 1956.
- Angell, Robert C. "The Sociology of Human Conflict", dalam *The Nature of Human Conflict*, diedit oleh Elton B. McNeil; Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965.
- Apter, David E. *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1968.
- Arif, Abdullah. *Disekitar Peristiwa Penghianatan Tjoembok*. Kutaraja: Semangat Merdeka, 1946.
- _____. *Seruan Putra Ulama*. Kutaraja: Abdullah Arif, 1950.
- Bafagih, Asa. "Dari Serambi Mekkah Meninjau Atjeh", dalam *Pemandangan*, 24 Desember 1953.
- Baihaqy, A.K. *Ulama dan Madrasah di Aceh*. Jakarta: Leknas-LIPI, 1976.
- Blainey, Geoffrey. *The Causes of War*. London dan Basingstoke: Mac-Millan, 1973.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague:

- Martinus Nijhoff, 1971.
- Bottomore, T.B. *Elites and Society*. Middlesex: Penguin Books, 1971.
- Buss, Arnold H. *The Psychology of Aggression*. New York: Wiley & Sons, 1961.
- Compton, Boyd R. "The Medan Ulama Conference". *Newsletter of the Institute of Current World Affairs*. New York, 20 Agustus 1953.
- Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1968.
- Crozier, Brian. *A Theory of Conflict*. London: Hamish Hamilton, 1974.
- Dahm, Bernhard. *History of Indonesia in the Twentieth Century*; diterjemahkan oleh P.S. Falla. London: Pall Mal Press, 1971.
- Emerson, Rupert. *From Empire to Nation*. Boston: Beacon Press, 1969.
- Feith, Herbert. *The Indonesian Elections of 1955*. Ithaca, New York: Cornell University Modern Indonesia Project, Interim Report Series, 1957.
- _____. "Dynamics of Guided Democracy", dalam *Indonesia*, diedit oleh Ruth T. McVey. New Haven: HRAF Press, 1967, edisi yang telah direvisi.
- _____. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968.
- Feith, Herbert, dan Lance Castles, (ed.). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970.
- Feith, Herbert, dan Daniel S. Lev. "The End of the Indonesian Rebellion", dalam *Pacific Affairs* 32, no. 1 (Spring, 1963).
- Finkle, Jason L., dan Richard W. Gable, (ed.). *Political Development and Social Change*. New York, London, dan Sydney: Wiley & Sons, 1968.
- Friedrich, Carl J. *Tradition and Authority*. London: Pall Mall Press, 1972.
- Gelanggang, A.H. (pseud.). *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*. Kutaraja: Pustaka Murni Hati, 1956.
- Gurr, Ted Robert. *Why Men Rebel*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970.
- Hatta, Mohammad. *Portrait of A Patriot: Selected Writings*. The Hague: Mouton Publishers, 1972.
- Hindley, Donald. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1966.

- Holt, Claire, (ed.). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1972.
- Horikoshi, Hiroko. "The Dar Ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process", dalam *Indonesia 20* (Oktober 1975).
- Hurgronje, C. Snouck. *The Achehnese*, diterjemahkan oleh A.W.S. O'Sullivan, jilid 1. Leyden: E.J. Brill, 1906.
- Hussain, Abdullah. *Terjebak*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965.
- Indonesia. *Agenda Kementerian Agama 1951*. Jakarta: Kementerian Agama, 1951.
- _____. *Dasar Pendidikan dan Pengadjaran*. Jakarta: Kementerian P.P. dan K., 1954.
- _____. *Dua Windhu Kodam-I/Iskandar Muda*. Kutaraja: Sejarah Militer Kodam-I/Iskandar Muda, 1972.
- _____. "Harga² Beras Dipasar Bebas di Indonesia". Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1951-1952, dan 1955.
- _____. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.
- _____. *Kronik Kementerian Penerangan*, no. 14 (1954?) dan 20 (1954?). Jakarta: Kementerian Penerangan R.I.
- _____. *Laporan Tahunan 1954*. Jakarta: Kementerian Agama, 1955, jilid II.
- _____. *Lapuran Tahun 1960 Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh*. Kutaraja: Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh, 1961.
- _____. *Modal Revolusi 45*. Kutaraja: Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, 1960.
- _____. *Population Census of 1971 in North Sumatra*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1971.
- _____. *Republik Indonesia, Propinsi Djawa Barat*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.
- _____. *Revolusi Desember '45*. Kutaraja: Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, t.t. (1950?).
- _____. *Sedjarah TNI Angkatan Darat 1945-1965*. Bandung: Pussemad, 1965.
- _____. *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Fakta Mahjuma, 1968.

- _____. *Statistical Pocketbook 1957*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1957.
- _____. *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945-1970*. Insider (pseud.). *Atjeh Sepintas Lahu*. Jakarta: Archapada, 1950.
- Ismuha. *Ulama Aceh Dalam Perspektip Sejarah*. Jakarta: Leknas-LIPI, 1976.
- _____. *Ulama Atjeh: Tgk. Abd. Rahman Mat. Glp. Dua*. Jogjakarta: Pustaka Awe Geutah, 1949.
- Jackson, Karl D., dan Johannes Moeliono. "Participation in Rebellion: The Dar'ul Islam in West Java", dalam *Political Participation in Modern Indonesia*, diedit oleh R. William Liddle. Monograph Series No. 19. Yale University Southeast Asia Studies, 1973.
- Jongejans, J. *Land en Volk van Atjeh, vroeger en nu*. Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939.
- Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970.
- Kerkvliet, Benedict J. *The Huk Rebellion, A Study of Peasant Revolt in the Philippines*. Berkeley, Los Angeles dan London: University of California Press, 1977.
- Lasswell, Harold D., dan Abraham Kaplan. *Power and Society*. New Haven dan London: Yale University Press, 1970.
- Legge, J.D. *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1961.
- _____. *Sukarno, A Political Biography*. Middlesex: Penguin Books, 1973.
- Lev, Daniel S. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966.
- Liddle, R. William. *Ethnicity, Party and National Integration*. New Haven dan London: Yale University Press, 1970.
- _____. (ed.). *Political Participation in Modern Indonesia*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1973.
- Lubis, Mochtar. *Twilight in Jakarta*. London: Hutchinson, 1963.
- Mackie, J.A.C. *Problems of Indonesian Inflation*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967.
- McNeil, Elton B. (ed.). *The Nature of Human Conflict*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1965.
- Mahdan, Hasjim. "Dari Gangguan Keamanan Sampai Ke Konperensi

- Bermuda", dalam *Indonesia Raya*, 23 November 1953.
- Maryanov, Gerald S. *Decentralization in Indonesia as a Political Problem*. Ithaca, New York: Cornell University, Modern Indonesia Project, 1958.
- Mattalioe, Bahar. *Kahar Muzakkar dengan Petualangannya*. Jakarta: C.V. Delegasi, 1965.
- Meuraxa, Dada. *Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh c.s.* Medan: Pustaka Hasmar, t.t.
- _____. *Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Medan: Pustaka Sedar, 1956.
- Nasution, A.H. *Tentara Nasional Indonesia*, jilid 2. Jakarta: Seruling Masa, 1968.
- Natsir, M. *Capita Selecta*, vol. 2. Jakarta: Pustaka Pendis, 1957.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*, jilid 1. Medan: Dwipa, 1965.
- Panglima Polim, T.M.A. *Memoir (Tjatanan) Panglima Polim*. Banda Aceh, 1972.
- Piekaar, Dr. A.J. *Atjeh en de Oorlog Met Japan*. 'sGravenhage dan Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1949.
- Pinardi. *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*. Jakarta: Aryaguna, 1964.
- Raliby, Oesman. "Masjarakat Atjeh Baroe", dalam *Penjoeloeh*, Oktober 1941.
- _____. *Documenta Historica*. Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Said, Mohamad. *Atjeh Sepandjang Abad*. Medan: Mohamad Said, 1961.
- Saleh, Hasan. *Revolusi Islam di Indonesia*. Darussalam (Sigli?): Pustaka Djihad, 1956.
- Sanusi, Anwar. *Sedjarah Indonesia*, jilid 2. Jakarta dan Bandung: Pustaka Pakuan, 1960.
- Sastroamidjojo, Ali. *Tonggak-tonggak di Perjalananku*. Jakarta: P.T. Kinta, 1974.
- Sati, Datuk Madjo. *Aku Menggugat*. Jakarta: C.V. R. Hamzah, 1959.
- Scott, James C. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", dalam *American Political Science Review* 66 (1972).
- Siegel, James T. *The Rope of God*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Simatupang, T.B. *Pemerintah, Masjarakat, Angkatan Perang*. Jakarta: Indira, 1960.
- Sjah, Tusny (pseud.). *Suasana Atjeh*, dua jilid. Jilid I, Jakarta: Teesyela,

- 1950; jilid II, Jakarta: Tusny Sjah, 1951.
- Smail, John R.W. "The Military Politics of North Sumatra: December 1956-October 1957", dalam *Indonesia* 6 (October 1968).
- Sukarno, Ir. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965.
- Talsya, Tk. Alibasjah. *Sedjarah dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Atjeh*. Jakarta: Penerbit Kesuma, t.t.
- _____. *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*. Kutaraja: Pustaka Putro Tjanden, 1969.
- Tiro, Hasan Muhammad. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Aceh: Penerbit Seulawah, 1958.
- Vlekke, Bernhard, H.M. *Nusantara, A History of Indonesia*. The Hague dan Bandung: W. van Hoeve, 1959.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: The Free Press, 1964.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition*, edisi perbaikan yang kedua. The Hague: W. van Hoeve, 1969.
- Wolf, Eric R. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. London: Faber and Faber, 1971.
- Yakub, Ismail. "Pergerakan di Atjeh Dalam 10 Tahun", dalam *Sinar* 7 (April 1940).

Karya yang tidak diterbitkan

- Abubakar, Said. Surat kepada Gubernur S.M. Amin, bertanggal Penang, 18 Februari 1954.
- Aceh, DPRD. "Pelaksanaan Unsur-unsur Sjariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Atjeh"; stensilan, 1962.
- _____, Koordinator Pemerintahan. Surat-surat kepada Majelis Penimbang di Sigli, bertanggal Kutaraja, 8 Maret, 7 April, 15 Mei, 9 Juni, 9 Agustus, dan 2 Oktober 1952; ketikan.
- _____, Pemerintah Daerah. "Peraturan Daerah", no. 1, tanggal 24 Juni 1946.
- _____, Komando Daerah Militer. Surat Keputusan tentang Penahanan Beberapa Orang di Kutaraja, tanggal 29 Mei 1959;

- ketikan.
- _____. Laporan Intelijen, tanggal 16 Mei 1959; ketikan.
- Ali, Hasan. Surat dari Kejaksaan Aceh kepada Wakil Jaksa Agung untuk Sumatera di Bukittinggi, bertanggal Kutaraja, 5 Juli 1950; ketikan.
- _____. Surat untuk Gubernur S.M. Amin, tanggal 14 November 1955; ketikan.
- Amin, Gubernur S.M. Surat kepada Daud Beureueh dan Pemimpin-pemimpin Pemberontakan lainnya, bertanggal Medan, 5 Desember 1953; ketikan.
- _____. Surat kepada Badan Kontak Pribadi Peristiwa Aceh, bertanggal Kutaraja, 5 Januari 1954; ketikan.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh dan Pemimpin-pemimpin Pemberontak lain, bertanggal Medan, 23 Agustus 1954; ketikan.
- _____. Surat kepada Hasan Ali, bertanggal Medan, 30 September 1955; ketikan.
- _____. "Pendapat Gubernur Sumatera Utara Mengenai Usaha Pemulihan Keamanan di Atjeh", bertanggal Medan, 13 Desember 1955; ketikan.
- _____. Surat kepada Perdana Menteri Burhanuddin Harahap/Dewan Keamanan di Jakarta, bertanggal Medan, 6 Februari 1956; ketikan.
- Arahas. Laporan kepada Front Pemuda Aceh, bertanggal Medan, 26 Januari 1956; ketikan.
- Assegaf, Said Ali. Daftar orang-orang yang harus ditahan di Aceh, bertanggal Kutaraja, 1 September 1953; ketikan.
- Badan Keinsyafan Rakyat di Aceh. Anggaran Dasar BKR yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1951; ketikan.
- _____. Resolusi, bertanggal 15 April 1951; ketikan.
- Beureueh, Teungku Muhammad Daud. "Bekerdja Sama Dengan Musjrik Untuk Menghantjurkan Islam Adalah Musjrik"; naskah pidato, stensilan, t.p.
- _____. "Da'wah"; bertanggal 4 November 1961; stensilan.
- _____. Instruksi kepada semua Komandan Resimen TII, bertanggal Aceh Darussalam, 20 Maret 1961; ketikan.
- _____. Pesan radio kepada Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri PRRI, tanggal 9 November 1959; stensilan.

- _____. Pesan radio kepada para pemimpin PRRI, tanggal 9 November 1959; stensilan.
- _____. Pesan radio kepada Perdana Menteri PRRI, tanggal 9 November 1959; stensilan.
- _____. Pesan radio kepada Perdana Menteri PRRI, tanggal 15 Januari 1960; stensilan.
- _____. Pesan radio kepada Perdana Menteri PRRI, tanggal 16 Januari 1960; stensilan.
- _____. Surat kepada Majelis Penimbang Kabupaten Pidie, bertanggal Kutaraja, 19 November 1949; ketikan.
- _____. Surat dari Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri di Jogjakarta, bertanggal Kutaraja, 5 September 1950; ketikan.
- _____. Surat kepada semua Menteri dari Kabinet NBA, tanggal 17 Februari 1956; ketikan.
- _____. Surat kepada S.M. Kartosuwirjo, bertanggal Aceh Darussalam, 4 Oktober 1956; ketikan.
- _____. Surat kepada Kolonel M. Jasin, bertanggal Aceh Darussalam, 27 April 1961; ketikan.
- _____. Surat kepada Jenderal A.H. Nasution, bertanggal Mardlati'llah, 5 November 1961; ketikan.
- _____, dan Hasan Ali. Surat kepada Gubernur S.M. Amin, tanggal 1 Juni 1954; ketikan.
- _____. Surat kepada Gubernur S.M. Amin, tanggal 5 Oktober 1954; ketikan.
- Darul Islam. Keputusan-keputusan Konferensi Bate Kureeng; t.t. (1955), stensilan.
- _____. Keputusan-keputusan Konferensi Militer yang diselenggarakan di Krueng Pinang, tanggal 4 Juni 1957; ketikan.
- _____. Keputusan-keputusan Majelis Syura, bertanggal Aceh Darussalam, 27 September 1955; ketikan.
- _____. "Keterangan Politik", tanggal 21 September 1953; ketikan.
- _____. "Konsepsi Krueng Pinang", tanggal 29 Mei 1957; ketikan.
- _____. Notulen rapat antara Daud Beureueh dengan utusan Kartosuwirjo, tanggal 4 Maret 1957; ketikan.
- _____. "Piagam Bate Kureeng", tanggal 23 September 1955; ketikan.
- _____. "Sidang Pleno ke III Madjelis Sjura Republik Islam Atjeh",

- t.t.; stensilan.
- _____. "Susunan Kabinet Hasan Ali ke 2"; pamflet, bertanggal 1 Mei 1959.
- Dewan Repolusi. Keputusan no. 163/DR/1959 tentang Susunan Delegasi ke Perundingan dengan Pemerintah, tanggal 24 Mei 1959; stensilan.
- _____. "Dewan Repolusi, Komunike" no. 1 dan 2; tanggal 26 Maret 1959.
- _____. "Penetapan Menteri Urusan Perang NBA (*sic.*) tentang Pengambil Alihan pimpinan N.B.A.", pamflet bertanggal 13 Maret 1959.
- _____. "Naskah Perdamaian (*sic.*) Darussalam Tentang Penyelesaian Persengketaan Bersendjata Antara Pihak NBA Dengan RI di Atjeh", n.d.; stensilan.
- _____. Pidato Ketua Dewan Repolusi, tanggal 15 Maret 1959; edisi cetakan.
- _____. Pidato Ketua Dewan Repolusi pada Pembukaan Sidang Perundingan dengan Pemerintah Pusat, tanggal 25 Mei 1959; stensilan.
- _____. "Prinsip2 Naschah Perdamaian Darussalam", tanggal 10 Mei 1959; stensilan.
- _____. "Surat Pernyataan Dewan Repolusi, Gerakan Repolusioner Islam Atjeh", tanggal 26 Mei 1959; stensilan.
- Djambek, Kolonel Dahlan. Pesan radio kepada Daud Beureueh, tanggal 1 Desember 1959; stensilan.
- Front Pemuda Aceh. Surat kepada Menteri Dalam Negeri, bertanggal Kutaraja, 20 November 1955; ketikan.
- _____. Laporan dari Cabang Medan kepada Pengurus Pusat di Kutaraja, t.t.; ketikan.
- _____. Laporan tentang Organisasi NURI, bertanggal Kutaraja, 1 November 1957; stensilan.
- _____. Pernyataan tentang Peristiwa Pulot/Cot Jeumpa, bertanggal Kutaraja, 4 Maret 1955; stensilan.
- _____. Surat edaran rahasia yang dikirimkan kepada cabang-cabang di seluruh Indonesia, bertanggal Kutaraja, 11 Oktober 1957; stensilan.
- Gaharu, Kolonel Sjammaun. Surat tulisan tangan kepada para pemimpin Darul Islam, bertanggal Kutaraja, 30 Desember 1956.

- _____. Naskah pidato radio di Kutaraja, 19 Maret 1957; stensilan.
- _____. "Penjelesaian Peristiwa Pemberontakan di Atjeh", t.t. (Februari 1957?); stensilan.
- _____. "Perintah Harian", bertanggal Kutaraja, 27 April 1958; pamflet.
- _____. "Pidato Ketua Penguasa Perang Dimuka Sidang DPRDP (sic.) Propinsi Atjeh", tanggal 13 Maret 1958; stensilan.
- _____. "Pidato dan Usulan2 Pokok dari Komandan Daerah Militer Atjeh Selaku Penguasa Militer Daerah dalam rapat Penguasa Perang Militer Pusat tgl. 17 s/d 19 Djuni 1957"; stensilan.
- _____. Riwayat hidup; ketikan.
- _____. "Seruan"; pamflet, bertanggal 16 Maret 1959.
- GASIDA. Notulen Rapat Antara Pemimpin2 GASIDA Dengan Sjech Marhaban, bertanggal Kutaraja, 13 Juni 1957; stensilan.
- _____. "Kesimpulan dari Pokok2 Pikiran Dalam Konperensi Gasida ke III", Kutaraja, 1957; stensilan.
- Harahap, Perdana Menteri Burhanuddin. Surat kepada Gubernur S.M. Amin dan Kolonel Simbolon, bertanggal Jakarta, 30 September 1955.
- _____. Surat keterangan rahasia, no. 1076/PM/'56 yang diberikan kepada Abdullah Arif, bertanggal 12 Februari 1956.
- Hardi, Wakil Perdana Menteri. Pidato pada sidang pembukaan perundingan antara Dewan Revolusi dengan Pemerintah Pusat, Kutaraja, 25 Mei 1959; stensilan.
- _____. "Pernyataan Misi Pemerintah Pusat", bertanggal Kutaraja, 26 Mei 1959; stensilan.
- Harvey, Barbara Sillars. "Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965"; tesis Doktor, Cornell University, 1974.
- Hasjim S.H., Tuanku. "Perjuangan Pemuda Atjeh Periode 1928- 1945"; makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Sejarah Perjuangan Pemuda di Aceh, Kutaraja, November 1964; ketikan.
- Hasjim, Teungku Abdurrahman. Surat kepada Daud Beureueh, tanggal 10 Februari 1956; ketikan.
- _____. Surat kepada Zainul Abidin Tiro, tanggal 19 Februari 1956; ketikan.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh, tanggal 14 Mei 1958; ketikan.
- _____. Surat kepada Perdana Menteri NBA, Hasan Ali, tanggal 23

- Januari 1961; ketikan.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 11 September 1961; ketikan.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 12 September 1961; ketikan.
- Hanafiah, Teungku Hasan. Surat kepada Letnan Kolonel Njak Adam Kamil, tanggal 5 September 1961; ketikan.
- Hasan, Teuku Ahmad. Surat kepada Gubernur S.M. Amin, bertanggal Sigli, 15 Mei 1954; ketikan.
- Hasjmy, Ali. Pidato didepan DPRD, 17 Maret 1958; stensilan.
- _____. "Pidato Radio Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Atjeh Berkenaan Genap Dua Tahun Ikrar Lam Teh"; edisi cetakan dikeluarkan oleh Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh, 1959.
- _____. Riwayat hidup; ketikan.
- Jasin, Kolonel Muhammad. "Dari Darulharb Mendjadi Darussalam"; pidato yang diucapkan di Langsa pada tanggal 17 Agustus 1961; edisi cetakan dikeluarkan oleh Kodam-I/Iskandar Muda, 1961.
- _____. "Mentjiptakan Kerukunan Hidup Rakjat Atjeh"; pidato diucapkan di Kutaraja pada tanggal 18 Desember 1962; stensilan.
- _____. "Pelaksanaan Unsur-unsur Sjariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Atjeh"; stensilan.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 7 Maret 1961; ketikan.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 5 Agustus 1961; ketikan.
- _____. Surat tulisan tangan kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 12 September 1961.
- _____. Surat kepada Daud Beureueh, bertanggal Kutaraja, 28 Desember 1961.
- Jusuf, Husin. Surat kepada Gubernur S.M. Amin, bertanggal Fisabilillah, Juli 1954; ketikan.
- _____. Riwayat hidup; ketikan.
- Kartosuwirjo, S.M. Surat kepada Daud Beureueh, tanggal 7 Maret 1957; ketikan.
- Keputusan-keputusan Konferensi Masyarakat Aceh di Medan, tanggal 19 September 1956; stensilan.
- Krueng Kalee, Teungku Hasan, dan Teungku Habib Muda Wali. Surat

- kepada Presiden Soekarno, bertanggal 29 November 1954; ketikan.
- Laporan rahasia tentang NURI, bertanggal Sigli, 9 September 1957; ketikan.
- Majelis Ifta Daerah Aceh. "Pidato Pembukaan Sidang I Madjelis Ifta Daerah Atjeh", disampaikan oleh Ketuanya, Teungku Hasballah Indrapuri, di Kutaraja pada tanggal 15 Februari 1950; ketikan.
- _____. Resolusi, bertanggal Kutaraja, 16 Februari 1950; ketikan.
- Masyumi. Telegram dari Masyumi cabang Aceh kepada pengurus pusat di Jakarta, bertanggal Kutaraja, 27 Oktober 1956.
- Mat Jan, Abdul Murat bin. "Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959"; skripsi sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1976.
- "Makloemat Oelama Seleroeh Atjeh"; pamflet, bertanggal Kutaraja, 15 Oktober 1945.
- "Mochammadijah". Brosur, Kutaraja, 1935.
- Mudzakkar, Abdul Qahhar. "Kambing Hitam D.I./T.I.I. di Sulawesi"; t.p., 1960.
- "Mutasi Pegawai Di Daerah Atjeh (Prop. Sumatera Utara) sedjak pemberontakan Tgk. Mohd. Daud Beureueh c.s. pada tanggal 20 September 1953", t.t.; stensilan.
- Nasution, A.H. "Sejarah Kembali ke UUD '45", t.t. (1975); stensilan.
- _____. "Politik Keamanan Setjara Integral", bertanggal Jakarta, 3 Desember 1955; ketikan.
- Nawawi, M.A. "Regionalism and Regional Conflicts in Indonesia"; disertasi Doktor, Princeton University, 1968.
- Panglima Polem, T. Bachtiar Effendi. "Pengendalian Sosial di Aceh Besar"; ringkasan penelitian; stensilan. Kutaraja: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, 1974.
- Panglima Polim, T.M.A. Catatan tulisan tangan mengenai pemberontakan di Aceh, bertanggal Medan, 11 Oktober 1954.
- _____. "Memoir (Tjataan) T.M.A. Panglima Polim"; stensilan. Banda Aceh, 1972.
- "Pernyataan Ulama2 Besar di Atjeh"; pamflet, bertanggal Kutaraja, 28 September 1953.
- Pernyataan menuntut status hukum bagi mahkamah agama di Aceh, dikeluarkan oleh beberapa ulama di Kutaraja, 25 Januari 1956; ketikan.
- Perti Cabang Aceh. Notulen rapat antara Wakil Kepala Staf KDMA,

- Mayor A.M. Namploh, dengan Habib Muda Wali di Labuhan Haji, pada tanggal 6 September 1958; ketikan.
- Pohan, S. Laporan kepada Kartosuwirjo, t.t. (13 Januari 1957?); ketikan.
- _____. Laporan kepada Daud Beureueh, tanggal 5 Mei 1957; ketikan.
- PRRI, Perdana Menteri. Pesan radio kepada Daud Beureueh, tanggal 9 Januari 1960; stensilan.
- PUSA/Pemuda PUSA. "Pengumuman PUSA/Pemuda PUSA"; pamflet, t.t. (September 1950?).
- Putra Ulama. "Ulama-ulama Dituduh Oleh T.T. Hanafiah Mendjual Atjeh Kepada Belanda"; pamflet, t.t. (Agustus 1950?).
- Resimen I, Komandan. "Bapak2 Ibu2 sdra/sdri di D. Atjeh"; pamflet bertanggal Kutaraja, 23 September 1953.
- _____. Pernyataan tentang razia di Aceh pada tahun 1951, bertanggal Kutaraja, 29 Agustus 1951.
- _____. "Saudara2 Seluruh Rakjat Atjeh"; pamflet yang dikeluarkan di Kutaraja, t.t. (1953).
- _____. "Segenap Penduduk Diseluruh Atjeh"; pamflet, bertanggal Kutaraja, 22 September 1953.
- _____. "Seruanku Kepada Seluruh Rakjat Atjeh"; pamflet, bertanggal Kutaraja, 23 September 1953.
- RPI, Presiden. Pesan radio kepada Daud Beureueh, tanggal 8 Februari 1960.
- Salamah, Ummi. Catatan tulisan tangan tentang pengalamannya selama pemberontakan.
- Salah, Hasan. Surat kepada Daud Beureueh, tanggal 20 Juli 1958; ketikan.
- _____. "Unsur2 Penting Dalam Usaha Pemerintah Utk Menggabungkan Tugas (Memiliterisasi) Kepolisian Negara Dengan Tentara T&T TGK Tjhik Ditiro TII", tanggal 20 Februari 1957; ketikan.
- Salah, Hasan, dan Abdurrahman Hasjim. Pernyataan bersama, tanggal 17 Januari 1958; ketikan.
- Simbolon, Kolonel Maludin. Surat kepada Gubernur S.M. Amin, bertanggal Medan, 28 September 1955; ketikan.
- _____. "Pendapat Plm. TT I Mengenai Penjelesaian Keamanan di Daerah Atjeh", Medan, 12 Desember 1955; ketikan.

- Singodimedjo, Kasman. Surat kepada Jaksa Agung Suprpto, Jakarta, 28 Agustus 1950; ketikan.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. "The Course of the National Revolution in Aceh, 1945-1949"; tesis MA, Monash University, 1974.
- Somadisastra, Machdar. "Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Aceh Besar"; ringkasan penelitian; stensilan. Kutaraja: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1974.
- Staf Keamanan Sipil. "Pendjelasan Procedure Militaire Bijstand", Kutaraja, 30 Desember 1953; ketikan.
- _____. Notulen rapat antara Staf Keamanan Sipil dengan Pejabat-pejabat lain, Kutaraja, Februari 1954; ketikan.
- Sub-Komite Menuntut Keadilan dan Pembangunan. "Mengapa Rakjat Disalahkan?"; pamflet, bertanggal Medan, 12 September 1950.
- _____. "Rakjat Atjeh Dituduh Pembunuh dan Perampok Oleh P.B. PUSA/Pemuda PUSA"; pamflet, bertanggal Medan, 14 September 1950.
- Sumatera Utara, Gubernur. "Petundjuk dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara"; pamflet, bertanggal Medan, 23 September 1953.
- _____, Komando Militer. Laporan militer, bertanggal Medan, 22 Oktober 1953; ketikan.
- _____. Komisariat Polisi. Surat kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, bertanggal Medan, 5 November 1955; ketikan.
- Tarmuli. Surat kepada Jaksa Agung Suprpto, bertanggal Sigli, 15 Januari 1952; ketikan.
- Tiro, Hasan Muhammad. Surat kepada salah seorang pemimpin pemberontak, bertanggal New York, 13 Juni 1956; ketikan.
- "Verslag Tablegh Akbar di Loeboek III Mks. Keurukon dan Pertemoean Oelama-oelama di Koetaradja 1-2 October 1926"; brosur yang dikeluarkan oleh Pengoeroes Besar Djami'ijah Al-Islahijjah, Sungei Limpah (Kutaradja), 1936.

Surat kabar dan majalah

- Bidjaksana* (Kutaraja), 1953-1957.
- Duta Masjarakat* (Jakarta), Maret 1955.
- Gelora Massa* (Kutaraja), April-Juli 1953.

- Harian Rakyat* (Medan), 1950.
Indonesia Raya (Jakarta), 1950-1953.
Merdeka (Jakarta), 1956.
Mestika, kemudian menjadi, *Warta* (Medan), 1953-1960.
Mimbar Umum (Medan), 1950-1954.
Patriot (Medan), 1954-1955.
Pendorong (Medan), 3 Maret 1953.
Penjedar (Medan), 4 (30 Desember 1953).
Peristiwa (Kutaraja), 1954-1959.
Star Weekly (Jakarta), 1953-1954.
Siaran Penerangan Daerah (Kutaraja), no. 6 (2 Maret 1961).
Tangkas (Medan), Juli-Agustus 1955.
Tegas (Kutaraja), 1950-1953.
Tjermim Masjarakat (Medan), Oktober-November 1951.
Waktu (Medan), 1956.
Waspada (Medan), 1950-1954.

Orang-orang yang diwawancarai

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| Jenderal Abdul Haris Nasution | Jakarta |
| Teungku Abdurrahman Hasjim | Sabang |
| Acha | Kutaraja |
| Haji Affan | Bireuen |
| Ali Hasjmy | Kutaraja |
| Teuku Ali Keurukon | Kutaraja |
| Teuku Ali Lamlagang | Kutaraja |
| Haji Adjhari | Medan |
| Teuku Ahmad Hasan | Kutaraja |
| Hasan Ali | Kutaraja |
| Hasan Saleh | Kutaraja |
| Haji Hasanuddin (Sorri Siregar) | Kuala Simpang |
| Mr. Hardi | Jakarta |
| Tuanku Hasjim S.H. | Medan |
| Husin Jusuf | Kutaraja |
| Teungku Husin Al-Mudjahid | Lhokseumawe |

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ishak Amin | Kutaraja |
| Teungku Jahja | Penang (Malaysia) |
| Kusen Tjokrosantoso | Medan |
| Teungku Junus Djamil | Kutaraja |
| Mohamad Said | Jakarta |
| Teuku Muhammad Amin | Kutaraja |
| Teungku Muhammad Asjik | Medan |
| Teungku Muhammad Daud Beureuh | Beureunuen |
| Kolonel Muhammad Diah Hadji | Jakarta |
| Muhammad Natsir | Jakarta |
| Muhammad Saleh Kafa | Kutaraja |
| Nur el-Ibrahimi | Jakarta |
| Said Saleh | Kutaraja |
| Brigadir Jenderal Sjammaun Gaharu | Medan/Kutaraja |
| Sulaiman Gading | Kutaraja |
| Tarmuli (Teuku Abdurrahman Muli) | Jakarta |
| Zaini Bakri | Kutaraja |

Komando Militer. Laporan militer, bertanggal Medan, 22 Oktober 1953; ketikan.

Komisariat Polisi. Surat kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, bertanggal Medan, 5 November 1953; ketikan.

Tarmuli. Surat kepada Jaksa Agung, bertanggal Medan, 2 Januari 1952; ketikan.

Tiro, Hasun Muhammad. Surat kepada salah seorang pemimpin gerakan berontak, bertanggal New York, 13 Juni 1956; ketikan.

"Verslag Tablegh: Akhbar di Loebock III Mks. Keurufon dan Keurufon Ali Hasmy".

Oelama-oeelama. Kutaraja 1-2 October 1953; ketikan.

dikeluarkan oleh Kantor Besar Djambi. Akhbar Ali Hasmy.

Lumpang (Kutaraja) 1956.

Teuku Ahmad Hassan

Hassan Ali

Hassan Saleh

Haji Hassanuddin (Sori Sugor)

Mr. Harbi

Toanku Hasjim S.H.

Husin Juari

Teungku Husin Al-Mudjibid

Bidjaksana (Kutaraja) 1953-1957.

Duta Manjawai (Kutaraja), Maret 1953.

Gelora Mase (Kutaraja) April-Juli 1953.

Indeks

(Angka menunjukkan halaman, c menunjukkan catatan kaki)

- A
API, 26
Abas, Zainul Arifin, 95
Abidin, Zainal, 272, 273, 274^c
Abdulgani, Roeslan, 164
Abubakar, Said, 65^c, 143, 250
Aceh, adat, 12, 18, 24; DPRD, 37, 42-44, 152^c, 282, 287, 290^c, 298, 328^c, 333; gencatan senjata, 14, 167, 265, 282, 287, 288; identitas, 5, 38, 338, 347; isolasi, 103, 105; keadaan darurat, 156; kepolitikan, 4, 8, 19, 51, 104, 106, 125, 192, 194, 202, 314, 338; nasionalisme, 72, 91, 103; otonomi, 2, 4, 5, 8-12, 14, 33, 88, 106, 141, 197, 232, 289, 310, 311, 313, 335; pembentukan kembali propinsi, 11, 34, 35, 39, 46, 112, 234, 271, 272, 274, 278; pembubaran propinsi, 34, 41, 47-52, 58, 60, 67, 77, 116, 119, 120, 174, 197, 200, 208, 335; pemisahan dari Propinsi Sumatera Utara, 36, 37, 277; pendidikan, 12, 18-21, 43, 71-74, 86, 113, 117, 118, 190, 328, 329, 343, 344, 345; penggabungan ke Propinsi Sumatera Utara, 37, 41, 88, 193, 335; penggeledahan, 64-66; perdagangan, 11, 33, 39^c, 78-81, 117, 119, 135, 136, 201, 220, 279; pertanian, 43, 75, 76, 79, 119; regionalisme, 3, 5, 36, 67, 82, 105-107, 145, 306, 334; sentimen keagamaan, 38, 174, 175, 205, 306, 334; status daerah istimewa, 12, 13, 292, 329, 339; status propinsi, 3, 9, 14, 46, 48, 52, 112, 119, 120, 149, 152, 158, 160, 163, 208, 229, 231-233, 252, 271, 272, 286, 337, 339, 345
Aceh Barat, 39, 76, 81, 85, 127, 137, 138, 142, 149, 169, 177, 185, 186, 190, 211, 212, 220, 223, 267, 282, 294, 296, 324
Aceh Besar, 26, 76, 81, 84, 85, 137, 144, 182^c, 184-187, 192, 211, 212, 214^c, 219^c, 223, 266, 284, 293, 296, 297, 312, 318, 319, 323
Aceh Darussalam, 89^c, 209, 232^c, 251^c, 313^c, 324^c, 328^c
Aceh Selatan, 12, 62, 76, 81, 85, 107, 132, 137, 142, 149, 169, 177, 185-187, 190, 211, 212, 214^c, 223, 227, 281, 282, 294, 296, 321, 324^c
Aceh Tengah, 28, 39, 85, 93, 101, 136, 137, 142, 155, 185, 187, 209, 211, 227, 267, 294, 296, 318
Aceh Timur, 27-29, 39, 52, 75, 76, 78, 81, 84, 85, 97, 119^c, 136, 137, 142, 185, 195, 196, 211, 219, 220, 223, 227, 267, 277, 296, 297, 318, 323, 332,

- 333
 Aceh Utara, 53, 75, 76, 81, 84, 85, 97,
 101, 132, 137, 142, 155, 185, 190,
 198, 206, 209, 211, 212, 217^c, 223,
 227, 267, 284, 296, 318, 320, 323,
 324
 Acha, 146, 147^c, 148^c, 160, 299^c, 320^c
 Adjhari, Teungku Haji, 173^c
 Adjie, Ibrahim, 127
 Adjitorop, Jusuf, 64
 Adri, Saleh, 227, 292, 294, 295, 299^c
 Affan, Haji, 217^c
 Affandi, 253, 254, 256^c
 Al-Mudjahid, Teungku Amir Husin, 21,
 23, 27, 92, 93, 142, 196-198, 200,
 203, 206, 207, 224-227, 292, 294, 309
 Al-Murthala, *libat* Ali, Hasan
 Alamsjah, 57
 Alas, suku, 223
 Ali, Hasan, 89, 92^c, 93-95, 96^c-99^c, 113^c,
 121^c, 123, 142, 143, 154^c, 200^c, 207,
 208^c, 209, 220^c, 228-232, 242, 248,
 249, 250^c, 258, 275, 284^c, 285^c, 289-
 291, 293, 294, 296, 297, 330, 332
 Amelz, 123, 140^c, 195
 Amerika Serikat, 257
 Amin, Abdul Djalil, 229
 Amin, Ishak, 95^c, 99^c, 214^c, 218^c, 232^c,
 275, 277^c, 299-301, 304^c, 309
 Amin, S. M., 3, 4, 7, 31^c, 36, 41^c, 57^c, 65^c,
 101^c, 116^c, 129, 130, 132^c, 133^c, 135,
 136, 138, 140-143, 152, 154, 155,
 158, 159, 174^c, 191^c, 209, 214, 225^c
 Amin, Teuku Muhammad, 23^c, 31, 59,
 113^c, 115, 117, 129, 131, 228, 230,
 284^c, 294, 295^c, 309
 Amuntai, 121
 Angkatan Darat, 10, 11, 15, 58, 123, 140,
 144, 150, 151, 156, 157, 162-164,
 198, 202, 224-226, 233, 267-269, 271,
 277, 301, 302, 304-306, 314, 315,
 322, 325^c, 326^c, 329, 342
 Angkatan Laut, 157, 220, 329
 Angkatan Udara, 85, 126, 127, 157, 329
 Arahah, 158^c
 Arif, Abdullah, 54^c, 152-154, 156
 Arif, Teuku Njak, 22, 24-27, 38, 52, 192,
 196
 Arifin, Zainul, 149
 Arsjad, Thoha, 246
 Asjik, Teungku Muhammad, 31^c, 195^c
 Assaat, Mr., 44, 45^c, 46, 47, 309
 Assegaf, Said Ali, 31, 34, 52, 61, 62, 107,
 108, 123, 195
 Aziz, Tuanku Abdul, 24
 Aziz, Usman, 136, 137
- B**
 BKR, 60-63, 66, 108, 109, 131, 176, 278
 Badan Kontak Pribadi Peristiwa Aceh,
 141, 142
 Badan Koordinasi Rakyat Aceh, 278^c
 Bakri, Zaini, 98^c, 136, 312
 Banjarmasin, 162, 202
 Banten, 261
 Banteng Hitam, 52
 Batak, suku, 56, 82, 137, 168, 197, 268,
 277, 316
 Batak Toba, suku, 41, 65, 160, 161, 268,
 316^c
 Batalion Diponegoro, 281, 285
 Batalion Sriwijaya, 267
 Bate Kureeng, 205, 206, 208, 210
 Belanda, 1, 2, 13, 16-18, 20-23, 25, 29,
 31-34, 38-40, 50, 52, 53^c, 61, 90, 102,
 103, 108, 119, 156, 163, 183^c, 190,
 191, 203, 205, 245-247, 249, 273,
 304, 307, 321, 330, 336, 347; Aksi
 Militer Pertama, 29, 32; Aksi Militer
 Kedua, 31, 32, 247
 Belawan, pelabuhan, 78
 Beureueh, Teungku Muhammad Daud,
 6, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32^c, 35,
 36, 38, 44, 46-49, 54^c, 56, 59, 61, 65,
 66, 74^c, 83, 87^c, 89-91, 93, 94, 95^c,
 97-99, 111, 113^c, 115, 116, 121-123,
 127, 129, 133, 134, 136, 141-143,
 151-154, 158, 164, 175, 183, 188-196,
 198, 200, 204-210, 223-228, 231-233,
 235-245, 247-253, 254^c, 255-258,
 260^c, 261, 263, 264, 273-276, 279,
 284-286, 289-299, 304, 309, 311, 313,

- 316-319, 323-325, 328^c, 331-333, 338, 344
- Beureunen, 32^c, 48^c, 175^c, 233^c, 236^c, 290^c, 304^c
- Binjai, 95
- Bireuen, 73, 85, 93, 126-128, 148^c, 171, 198, 210^c, 217^c, 222^c, 227, 265, 273
- Blang Bladeh, 198
- Blang, Teungku Makam Gampong, 62, 108^c, 132, 186
- Blangkejren, 85, 127
- Brigade AA, 57, 64, 65^c
- Bugis, suku, 259
- Bukittinggi, 113^c
- C**
- Calang, 85
- Chaeduddin, 249
- Cigalontang, 250^c
- Cina, pedagang, 65, 78, 80, 158, 173, 218, 268, 269, 304
- Cirebon, 261
- Comite van Ontvangst, 52, 53
- Copra Fonds, 80^c, 117
- Cot Jeumpa, 144, 150, 151, 173^c
- Cot Tupah, 128
- Cubo, 232, 234, 289
- Cumbok, 26, 27, 153, 190
- D**
- Daerah Istimewa Aceh Darussalam, 310, 311
- Danubroto, R.M., 56, 63
- Darul Islam, 12, 38^c, 83^c, 84-87, 89, 90, 93, 95-97, 99-101, 106, 107^c, 122, 124-128, 131-134, 137, 140, 142-144, 147, 149-155, 157, 163, 165, 167-169, 171-178, 186-188, 190, 191, 194, 195, 198-200, 204, 206^c, 207-209, 212, 216-219, 220^c, 226, 245, 247-250, 252, 253^c, 254-266, 275^c, 276, 280, 281, 284, 288^c, 290, 291, 298, 300, 301, 307, 310, 311, 315, 318, 328, 329, 333, 338, 343, 344, 346; konferensi pimpinan, 255
- Daud, Hasballah, 152
- Daud, Teungku Sulaiman, 86, 87, 98
- Daudsjah, Teuku Chik, 27, 41, 62, 123
- Demokrasi Terpimpin, 10, 15, 314, 325
- Dewan Fatwa, 246
- Dewan Imamah, 246, 247, 249, 261, 262
- Dewan Konstituante, 314, 315
- Dewan Militer, 207
- Dewan Nasional, 314
- Dewan Penasihat Keresidenan untuk Aceh, 24
- Dewan Repolusi, 287, 294-301, 304, 305, 308-313, 319, 324, 330^c
- Dewan Syura, 205, 206
- Divisi Payabakong, 196
- Divisi X, 57, 58, 92
- Divisi Teungku Chik Di Tiro, 207, 210
- Djambek, Dahlan, 297, 317^c
- Djamil, Teungku Junus, 24^c
- Djuanda, 289, 299, 300, 308, 314
- Djunet, Muhammad, 141
- E**
- El-Ibrahimi, Nur, 45^c, 46^c, 100^c, 123, 136^c
- F**
- Fatah, Abdul, 89, 90, 93, 98, 99, 245
- Frankfurt, 290, 315
- Front Pemuda Aceh, 145, 147, 150, 158^c, 159^c, 160, 161^c, 195, 272, 278, 282^c, 283^c, 298, 299^c, 327
- G**
- GASIDA, 77^c, 279; Konperensi III, 78^c, 80^c
- GPO, 138
- Gading, Sulaiman, 212^c, 214^c, 232^c, 293^c
- Gaharu, Sjammaun, 27, 152, 162, 193, 198, 201, 202, 203^c, 234, 236, 239, 266, 267, 269-271, 273-277, 279-289, 291, 294-300, 307^c, 312, 319-322, 330, 341
- Gani, Abdul, 44, 46, 200, 228, 242, 243, 291-294, 295^c, 296, 309, 310^c, 311, 324
- Gani, Ayah, *libat* Gani, Abdul

Gayo, suku, 223, 227
 Gelanggang, A.H. *libat* Hasan, Teuku Ahmad
 Gerakan Ibnu Hajar, 245
 Gerakan Said Ali, 31, 34, 61, 62, 107, 108, 195
 Geumpang, 127
 Gintings, Djamin, 128, 268, 269, 277
 giyugun, 26, 198, 321
 Glumpangdua, Teungku Abdurrahman, 189, 190, 195

H

HMI, 146
 Hadjad, A.R., 96
 Hadjar, Ibnu, 206^c, 245, 249, 318^c
 Hadji, Muhammad Diah, 89^c, 99^c
 Hakim, Abdul, 86, 129, 130
 Halim, Abdul, 35, 40
 Hamidjojo, Munar, 137
 Hamzah, Keuchik, 137
 Hamzah, Teuku, 312, 319-322
 Hanafi, Abdurrahman, 211
 Hanafiah, Teuku Teungoh, 46^c, 52, 53, 112^c
 Hanafiah, Teungku Hasan, 190, 324^c
 Harahap, Burhanuddin, 152, 153, 156, 158-160, 208, 229, 266, 284, 289, 297, 316, 318^c
 Hardi, 300, 308, 310-313, 320
 Hasan, Alim, 95
 Hasan, Mr. Teuku Muhammad, 27, 109, 129, 191
 Hasan, Teuku Ahmad, 57^c, 83^c, 136, 143^c, 148^c, 205^c, 207^c, 216^c, 225, 228, 230
 Hasanuddin, Haji, 211, 267^c, 331, 333
 Hasjim, Abdurrahman, 228, 229, 232, 235-243, 295, 296, 324^c, 325, 330^c, 331, 332
 Hasjimi, Sahim, 137
 Hasjmy, Ali, 31, 46^c, 52, 56, 59, 115, 117, 123, 128, 158, 161, 193, 200-202, 228, 272-275, 279, 280^c, 281, 287-289, 290^c, 291, 292^c, 294-297, 300, 309, 312, 345

Hatta, Mohammad, 35, 40-45, 56, 59, 99, 100, 144, 151, 157, 162, 193
 Hazairin, 109
 Hisbullah, pasukan, 246
 Huda, I., 248, 249, 258
 Husein, Ahmad, 269, 284
 Husin, Peutua, 65
 Husin, Tuanku, 136, 282, 283

I

IPI, 26
 IPKI, 325^c
 Ibrahim, 46^c
 Ibrahim, Abdul Wahab, 211, 296, 319
 Ibrahim, Haji, 211
 Idee 4 Desember, 270, 271
 Idie, 73, 195
 Idris, Gazali, 211
 Idris, Teuku, 273
 Idris, Teuku Raja, 211, 293
 Ikrar Lam Teh, 275^c, 286, 288, 294, 300
 Indocolim, 117
 Indolco, 117
 Indonesia Timur, 97, 159, 226, 252
 Indrapuri, 83, 98, 183, 187
 Indrapuri, Teungku Hasballah Hadji, 21, 38, 40^c, 57, 66, 96, 98, 115, 123, 128, 162, 183, 184, 187, 188, 193, 194, 217, 228
 Inggris, 22, 220^c
 Insja, Muhammad, 159, 161, 162, 234, 275, 288
 Institut Islam Normal, 227
 Institut Suffah, 261
 Irian Barat, 163, 327
 Islam, 4, 6^c, 7, 9, 32, 43, 68, 71^c, 73, 91, 94, 97, 103, 105, 106, 115, 118, 120, 121, 133, 146, 153, 158, 176, 194, 195, 207, 216, 217, 233, 234, 237, 249, 250^c, 254, 260, 286, 289, 292^c, 304^c, 307, 310, 313-317, 331, 333-335, 340; partai politik, 7, 115, 121, 125, 153, 158; syariah, 32, 194, 207, 216, 217, 233, 234, 237, 260, 289, 304^c, 310, 313, 317, 318, 331, 333, 339

Ismail, Datuk, 302

J

Jahja, Teungku, 221^c

Jahja, Zamzami, 227

Jakarta, 3, 5, 11, 13-15, 40, 41, 44, 45^c,
46-51, 54, 58, 61-64, 67, 68, 69^c, 71,
73, 78, 81, 82, 90, 96, 98, 99, 100^c,
101, 108^c, 109, 110, 111^c, 114, 119,
120, 123, 128, 136, 136^c, 139, 145-
147, 152, 153, 155^c, 156^c, 158^c, 161,
162, 189, 193, 198, 201, 202, 208,
210, 229, 233, 234, 238, 245, 250,
252, 256, 257, 267, 268, 270^c, 271-
273, 276, 284, 286, 289-291, 295,
301-304, 305^c, 308-312, 314, 319-323,
325, 333, 338, 341, 342

Jakub, Ismail, 21^c, 86, 93, 98, 174^c

Jasin, Muhammad, 322-325, 330-333, 341

Jawa, 13, 19, 29^c, 41, 50, 55-57, 66, 69^c,
79, 105, 134, 178, 199, 210, 223, 226,
247, 252, 327, 328, 339, 340; suku,
13, 56

Jawa Barat, 41^c, 89, 90, 93, 99, 124, 125,
127, 150-152, 155, 160, 178, 185,
200, 205, 206, 244-248, 251-264, 291,
307, 308

Jawa Tengah, 41^c, 125, 160, 168^c, 252,
322

Jawa Timur, 41^c, 64, 322

Jepang, 16, 22-25, 28, 50, 52, 76, 100,
126, 183^c, 203, 205, 220, 273, 321,
334, 336, 337

Jerman Barat, 290, 296

Jeuram, 132

Jusuf, Husin, 57^c, 58, 61, 92, 93, 115^c,
123, 171, 193, 197-199, 203, 207,
224-227, 230, 234^c, 235, 237, 238,
242, 294, 295, 300^c, 309

Jusuf, M.A., 256

K

KDMA, 271, 274, 275^c, 277-280, 281^c,
282, 284-288, 297, 298, 299^c, 311,
312, 319, 321, 322, 330, 341

KNIP, 74^c

KW IV NII, 247

KW V NII, 206-208, 247

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, 4, 5, 7, 99,
101, 110, 120-122, 124, 125, 130,
144, 145, 151-153, 158-160

Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 159, 266

Kabinet Burhanuddin Harahap, 160, 208,
266, 289

Kabinet Djuanda, 314

Kabinet Hatta, 35, 41, 42, 44, 45, 56, 59,
193

Kabinet Natsir, 44, 45, 49, 60, 108

Kabinet Sukiman, 56, 64, 99, 108, 124

Kabinet Wilopo, 99, 100, 108, 124, 125,
130

Kafa, Muhammad Saleh, 212^c, 227, 232^c

Kalee, Teungku Hasan Krueng, 21, 62,
107, 132, 134, 176^c, 186, 193-195,
280, 281

Kalimantan, 41^c, 124, 202, 206^c, 245,
258, 272

Kamarusid, 137

Kamil, Njak Adam, 321, 322, 324^c, 330

Kamran, 246, 261, 262

Kanun Azasi, 205

Karim, Darwin, 155, 158, 159

Kartasasmita, Udin, 249

Kartawinata, Arudji, 149

Kartohadikusumo, Sutardjo, 149

Kartosuwirjo, Sekarmadji Maridjan, 15,
84^c, 89, 90, 93, 95, 96, 99, 122, 151,
152, 204, 206^c, 210, 245-248, 250,
251, 253-260, 262-264, 307, 318,
libat juga Huda, I.

Kasim, Muhammad Ali, 230

Kawilarang, Alex, 58, 198

Kementerian Agama, 71, 273

Kementerian Dalam Negeri, 87, 99, 130,
193

Kementerian Penerangan RI, 3^c, 153,
250^c

Kementerian Perdagangan, 136^c

Kementerian Pertahanan, 198

Kementerian Sosial, 161, 272

Kesultanan Aceh, 22

Keterangan Politik, 83, 98, 106, 107

- Keumangan, 191, 283
 Keureukon, 219^c
 Keureukon, Teuku Ali, 77^c, 219^c
 Khadidjah, Pocut, 216^c
 Kleef, Ch. W. van, 249, *libat juga* Huda, I.
 Komandemen Tertinggi, 247, 253-255, 258, 262-264
 Komando Teritorial Aceh, 206
 Komite Nasional Daerah, 26, 190, 192
 Komite Rakyat, 61
 Konferensi Bate Kureeng, 205, 206, 208, 210, 213^c, 216^c, 217, 219^c, 229, 230, 233, 243, 248, 252
 Konferensi Cubo, 289
 Konferensi "Madinah Indonesia", 250
 Konferensi Mahasiswa Dan Pelajar Aceh Seluruh Indonesia, 145
 Konferensi Meja Bundar, 34, 42, 156
 Konferensi Militer di Krueng Pinang, 213^c, 240, 289
 Konferensi Militer di Kutaraja, 293
 Konferensi Pemimpin-pemimpin Daerah di seluruh Aceh, 253
 Konferensi Pemimpin-pemimpin Islam, 246
 Konferensi Perwira-perwira Tamatan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, 269
 Kongres Pemuda, Pelajar, dan Masyarakat Aceh, 277
 Konsepsi Hasan Ali, 232, 289
 Konsepsi Hasan Saleh, 232
 Konsepsi Krueng Pinang, 240^c, 242^c
 Konsepsi Prinsipil Bijaksana, 265, 274, 279, 282, 287-289, 294-295, 319-322
 Koordinator Pemerintahan, 63, 86^c, 87
 Kristen, 18, 56, 103, 197, 315-317, 325^c; partai politik, 315, 325^c
 Krueng Pinang, 213^c, 240^c, 242^c, 289
 Kuala Langsa, 39, 78, 80
 Kuala Simpang, 267^c
 Kutaraja, 19, 20, 22, 23^c, 24^c, 26-30, 32, 35, 38, 40^c, 43, 44, 47, 49, 53, 54^c, 57, 60, 61^c, 62, 63^c, 64, 65, 69, 72-74, 77, 79, 81, 83-86, 89, 92, 93^c, 94, 95^c, 96, 97^c, 98-100, 102, 107, 111^c, 113^c, 115^c, 118, 121^c, 122, 123^c, 126, 127, 131, 132^c, 133, 135^c, 136, 137, 140, 141^c, 142^c, 145, 146, 147^c, 148, 152, 161, 162, 173^c, 176, 184, 186, 187, 189, 193-195, 197, 198^c, 200, 208^c, 211, 212^c, 214^c, 215^c, 217, 218^c-220^c, 229^c, 232^c, 234, 235, 249^c, 266, 267^c, 270-272, 273^c, 274^c, 275, 276^c, 277, 280, 282^c, 283^c, 284, 285, 286^c, 288^c, 290^c, 292, 293, 295, 297^c, 299^c-301^c, 304^c, 308, 309, 313, 319, 320^c, 321^c, 323, 324^c, 325, 331^c, 332^c, 333, 340
- L
 Labuhan Haji, 186, 281^c
 Lamlagang, Teuku Ali, 60^c, 61, 62, 109, 122
 Lammeulo, 26
 Lampisang, Teungku Muhammad Ali, 132^c, 186
 Langkat, 29, 35, 96, 137, 190, 192
 Langsa, 29, 39, 84, 92, 126, 211, 219^c
 Lembaga Islam dan Pendidikan Atjeh, 74^c
 Leube, Iljas, 93, 99, 211, 227, 228, 297, 331, 333
 Leuwisari, 250^c
 Lhokseumawe, 23^c, 84, 85, 97, 195^c, 197, 198
 Lhoksukon, 211
 Liga Demokrasi, 325^c, 326^c
 Lubis, Manaf, 126
 Lubis, Zulkifli, 144, 151, 152, 332^c
 Luqman, 249
- M
 Mahdan, Hasjim, 102^c, 141^c
 Mahkamah Agama, 248, 255
 Mahkamah Negeri Luar Biasa, 217
 Mahkamah Shariah, 115
 Mahkamah Tinggi Luar Biasa, 217
 Majelis Iftah Daerah Aceh, 38, 194, 217
 Majelis Islam, 246
 Majelis Penimbang, 54^c, 62, 63, 65, 88, 111, 112
 Majelis Syura, 196, 205, 206, 231, 232^c,

247, 248, 255, 292
 Malaka, Selat, 307
 Malaka, Tan, 29^c
 Malaya, 11, 22, 33, 117, 201, 221, 251,
 291, 302, 331
 Maluku, 41^c, 57, 199
 Manaf, Abdul, 57
 Mandalatar, R. Oni, 246, 247, 261, 262
 Mandailing, suku, 41, 43, 82, 159, 316^c
 Manifesto Politik, 339
 Manjak, Teuku Agam, 236, 284-286, 287
 Marhaban, Sjech, 65, 115, 117, 128, 195
 Markas Besar Angkatan Darat, 58, 128,
 162, 163, 268, 269, 271, 277, 322
 Masyumi, 2, 4, 5, 8, 30, 36, 37, 44, 45, 56,
 59, 100, 102, 107, 110, 115, 116, 120-
 122, 124-126, 129, 130, 133, 138,
 141, 146, 153-155, 157-160, 163, 195,
 273, 282, 287, 298, 299^c, 301, 315,
 325^c, 327, 328
 Medan, 29, 31^c, 34, 35, 39, 43, 52, 53,
 56-58, 64^c, 65, 71^c, 72, 77, 78, 82, 83,
 86, 91, 92, 94-96, 98, 117^c, 121, 123,
 126-128, 131, 137, 139, 142^c, 143^c,
 150, 153^c-156^c, 159, 161, 162, 172^c,
 173^c, 195^c, 197, 198, 200, 201, 217^c,
 224, 234, 258, 266^c, 267, 269, 270-
 274, 277, 278, 283, 285, 288, 320^c
 Melayu, Semenanjung, 307
 Metareum, 295
 Meulaboh, 85, 127, 220^c
 Meuraksa, Teungku Abdussalam, 62,
 108^c, 132, 134, 186
 Meureudu, 85, 89, 284
 Minahasa, suku, 316
 Minangkabau, 6, 20, 148, 223, 306; suku,
 148, 223, 306, 316^c
 Montasi, 200
 Muhammad, Teuku, 136, 137
 Muhammad, Z.Z., 141
 Muhammadiyah, 6, 19-21, 61, 133
 Mujahidin, pasukan, 27, 30, 190, 211,
 212^c
 Muli, Teuku Abdurrahman, 53, 55, 64,
 65, 66^c, 112^c
 Murat Bin Mat Jan, Abdul, 220^c, 226^c,

275^c
 Mustafa, *libat* Fatah, Abdul
 Mutyara, Abdul Gani, 92, 93, 216, 228,
 230, 294, 309
 Muwahhid, 262
 Muzakkar, Abdul Kahar, 13, 15, 90, 101,
 152, 199, 210, 248, 249, 254-261,
 263, 264, 302, 303, 307, 318, 330

N

NBA, 204, 206, 208-210, 212-219, 221,
 222, 226, 228-230, 236-238, 9243-
 245, 249, 252, 253, 255, 256, 266,
 267, 274^c, 275-288, 291-293, 294^c,
 295-297, 299, 308, 311^c, 313, 314,
 316, 318, 321
 NII, 83, 89, 90, 93, 96, 98, 101, 106, 143,
 176, 204, 205, 206^c, 208^c, 216, 229,
 244-249, 252-259, 261, 262, 318;
 konstitusi, 253; proklamasi, 98, 101,
 229; struktur negara, 93, 247
 NU, 130, 133, 149, 156, 157, 163, 305,
 315, 325^c, 328^c
 NURI, 282, 283
 Nainggolan, Boyke, 283, 285
 Namploh, A.M., 281^c, 321
 Nasution, Abdul Haris, 123^c, 140, 152,
 156, 157, 161-164, 202, 266-270, 274,
 275, 279, 292, 299, 300, 304, 305,
 307^c, 315, 332^c, 333^c, 342
 Natsir, Muhammad, 44-46, 48, 49, 60,
 105^c, 108, 133, 138, 139^c, 193, 284,
 316
 Nazier, 57, 58, 64, 67
 Negara Sumatera, 33, 291
 Neh, Njak, 128
 New York, 222^c, 250
 Nias, 80^c
 Noor, Ismet, 321
 Nusa Tenggara, 103

O

OSM, 283, 285, 297
 Oetji, Pak, 248, 249
 Operasi Badak Hitam, 295

- P**
 PBB, 145, 221, 249, 250
 P4SU, 41, 44, 47
 PIR, 110, 130, 134, 149
 PKI, 61^c, 64, 105^c, 125, 129, 145, 157,
 160, 163, 216, 233, 271, 272, 278^c,
 282, 283, 301, 305, 306, 328^c, 331,
 332
 PNI, 4, 5, 37, 46, 56, 100, 101, 109, 111,
 124-126, 129, 130, 136, 137, 139,
 146^c, 147, 148, 157, 160, 163, 164,
 193, 197, 216, 233, 271, 278^c, 282,
 283, 300, 305, 325^c, 328^c, 331, 332;
 Konferensi Seluruh Sumatera, 37^c
 PON, 83, 96
 PRRI, 10, 14, 148^c, 253^c, 283-286, 288,
 290, 291, 296, 297, 301-303, 306,
 313-319, 325, 326, 332, 338, 346;
 konferensi di Frankfurt, 290, 315
 PSI, 138, 141, 146, 315, 325^c
 PSII, 8, 116, 133, 149, 156-158, 161, 196,
 201, 245, 263, 272, 273, 315, 328^c;
 Komite Pembela Kebenaran, 245
 P3RI, 159
 PUSA, 6, 8, 9, 11, 12, 21-29, 31, 33, 44-
 46, 48-68, 70, 71, 73, 74, 81, 82, 88-
 95, 97, 100-102, 106-118, 119^c,
 120-123, 125, 126, 128, 129, 131-133,
 135-137, 141, 153, 162, 187, 189,
 190, 192-195, 198, 201, 202, 209,
 216^c, 225, 227, 230, 266, 272, 273,
 278-281, 298, 335-338, 340-346; kon-
 ferensi pertama, 58, 194; konferensi
 kedua, 57, 58, 92; konferensi ketiga,
 92-94; politik trilateral, 63, 67
 PUSA Trading Company, 117
 Padang, 148^c, 284-286
 Padmosumarto, Sutikno, 140
 Pancasila, 231, 314, 315, 317
 Palembang, 37^c, 128
 Pandu Islam, 92-94
 Pangkalan Brandan, 39
 Panjo, Teungku Husin Pulo, 188
 Pardede, T.D., 197
 Parindra, 18, 37
 Parkindo, 282
 Partai Buruh, 109
 Partawidjaja, Sanusi, 246, 249, 261
 Pematang Siantar, 199, 203
 Pemerintah Pentadbiran Militer, 319
 Pemerintah Pusat, 1-14, 17, 29-33, 35,
 41, 42, 44-52, 54^c, 55-58, 60, 61, 63,
 67-79, 81, 82, 87, 90, 91, 99-123, 126,
 128, 134, 143, 145, 147, 149, 150,
 155, 159, 161, 162, 185, 188, 192,
 193, 195, 199, 202, 208, 229, 231-
 237, 244, 245, 252, 266, 270, 271,
 273-275, 278, 279, 281, 283, 287-289,
 291-293, 295, 298, 301, 303, 304,
 306-313, 320, 326, 327, 329, 331,
 334, 335, 337-344, 346, 347
 Pemuda PUSA, 21, 23, 28, 53, 65, 92,
 160, 196, 198
 Pemuda Pasundan, 160
 Penang, 65^c, 78, 79, 80^c, 136^c, 143, 220,
 221, 249
 Peperda, 11, 152^c, 163^c, 305
 Peperpu, 279^c, 304
 Perang Aceh, 16, 18, 22, 191, 194
 Peristiwa Pulot-Cot Jeumpa, 144, 158,
 160, 161
 Peristiwa Tanjung Morawa, 130
 Perjanjian Lam Teh, 275
 Perjanjian Renville, 90, 246, 307
 Permai, 117
 Permesta, 291, 315, 316^c, 346
 Persatuan Bekas Pejuang Aceh, 92-94,
 198
 Persatuan Perjuangan, 29, 33
 Perti, 8, 9, 12, 107, 108, 130-134, 136,
 142, 145, 149, 160, 169, 176^c, 186,
 187, 190, 196, 214, 216, 280-283,
 298, 321, 331, 332, 335, 336, 343-345
 Perwakilan Kabinet Presiden di Sulawesi,
 256
 Pesindo, 26-30, 116, 161, 179
 Pesindo Trading Company, 201
 Petraco, 117
 Peureulak, 84
 Piagam Bate Kureeng, 208^c, 229, 230,
 238
 Piagam Jakarta, 32, 340

Pidie, 22, 25-27, 54^c, 55, 63, 65, 76, 81, 85, 88, 101, 117, 127, 132, 136, 138, 185, 191, 192, 209, 211, 212, 216^c, 217^c, 223, 225, 226, 230, 232, 236, 240, 250, 284, 294-296, 320, 321, 323, 332^c

Pineung, Teuku Bentara, 191

Pinto, Jahja, 95

Pohan, S., 251^c, 253, 254, 255^c, 264^c

Polim, Panglima, 283

Polim, Teuku Muhammad Ali Panglima, 21^c, 22, 25, 77, 136, 155^c, 172^c, 176, 217^c, 283

Pontas, Komala, 159, 164, 199

Prawiranegara, Mr. Sjafrudin, 35, 36, 47, 54^c, 113, 316, 332^c

Prijatna, 67, 140

Pulot, 145, 150, 151

R

RIA, 313, 323, 325, 327, 328, 330

RIS, 40, 41, 45, 252

RPI, 253^c, 257, 258, 313, 314, 316-319, 325, 326, 332^c; proklamasi, 316; Republik Islam, 316, 318^c

Rahmany, Tjek Mat, 58, 160, 161

Raliby, Osman, 21^c, 33^c, 158, 160, 161

Raya, Saleh Meuseugit, 132

Reksodiharjo, Raden Sarimin, 41

Republik Indonesia, 1, 2, 14, 25, 26, 29^c, 32-36, 40-42, 44, 45, 50, 64, 67, 75, 79, 89-91, 102, 105, 106, 121, 134^c, 163, 211, 213, 220, 211, 245, 246, 251, 252, 254, 282^c, 288^c, 289, 291, 302, 307, 309, 316, 321, 326, 327, 337; dasar negara, 32, 105, 115; integrasi nasional, 1, 14, 15; konsolidasi pemerintahan, 108; kembali ke UUD 1945, 15, 314, 315, 326, 339, 340; reorganisasi propinsi, 42, 47; revolusi nasional, 1-3, 5, 6, 9, 16, 17, 31, 32, 34, 36, 38, 45, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 64, 66, 77, 88, 103, 108-110, 113, 114, 116, 117, 119-121, 129, 132, 146, 161, 168, 191, 199-201, 203, 205, 207, 211, 212^c, 225, 228, 230,

273, 300^c, 305, 310, 322, 330, 334, 337-340; UUDS 1950, 314

Roem, Mr. Muhammad, 45^c

Rusjdi, Latif, 299^c

S

Sab, Husin, 65

Sabang, 18, 22, 238^c, 296^c, 299^c, 322

Sabilillah, pasukan, 246

Said, Haji Muhammad, 132^c, 135^c, 139

Salama, Ummi, 171^c

Salamuddin, OKH, 138

Saleh, Ibrahim, 96, 211, 225, 243, 294

Saleh, Teungku Haji Hasan, 57, 97, 199, 200, 209^c, 211, 216, 224-228, 230, 232, 233, 235-243, 267^c, 275, 284^c, 288^c, 289-297, 299, 302, 308, 309, 311, 313, 316, 319, 324, 338

Saleh, Teungku Muhammad, 321

Samalanga, 148^c, 320, 321

Samikidin, 64

Sarekat Islam, 105^c

Sastroamidjojo, Ali, 3-5, 7, 99, 101, 110, 120-122, 124, 125, 130, 134, 138, 142-145, 151-153, 158-160, 162, 173^c, 234, 266, 271, 272

Sati, Datuk Madjo, 306^c

Sedang, Muda, 137

Setjoutomo, 258, 262

Seulimeum, Abdul Wahab, 44, 59, 115, 123, 190, 272, 274^c

Sibolga, 35

Sidikalang, 96

Sigli, 63^c, 85, 127, 132, 171, 174^c, 190, 194, 199, 202, 225^c, 282, 283^c

Silangit, Leiko, 64

Simalungun, 104, 105

Simbolon, Maludin, 64, 65, 141, 142, 147, 153, 155, 159, 161, 163, 253^c, 267-272, 274, 276, 279, 297, 317

Sinaga, Radja Kaliamsah, 41

Singapura, 11, 220-222, 250, 251, 253^c, 257, 291, 302

Singodimedjo, Mr. Kasman, 110, 111

Siregar, Binanga, 41

Siregar, Sori, *lihat* Hasanuddin, Haji

- Sitorus, 127
 Sjahrir, Sutan, 29^c
 Smith, *libat* Kleef, Ch. W. van
 Socfindo, 220^c
 Soekarno, Presiden, 10, 31, 32, 48, 60, 61, 83, 96, 105^c, 115, 120-122, 157, 176^c, 189, 193, 198, 268, 272, 299-301, 303-306, 314, 315, 323, 325-327, 339, 342
 Staf Keamanan Sipil, 88, 140
 Sub-Komite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Aceh, 53
 Subijakto, 300
 Subroto, Gatot, 308
 Suib, 146
 Sukabumi, 200
 Sukiman, 45, 46, 56, 64, 99, 108, 124
 Sukunsari, Agus Abdullah, 258, 261, 262
 Sukunsari, Kiai, 261
 Sulaiman, Jahja, 89
 Sulawesi, 14, 41^c, 90, 199, 256, 257, 271, 275
 Sulawesi Selatan, 13, 57, 67, 95^c, 124, 127, 146, 150-152, 155, 167, 199, 206^c, 244, 245, 247, 249, 254, 256, 258, 259, 263, 264, 302, 303, 307, 308, 316, 318^c, 338, 346^c
 Sulawesi Utara, 290, 291, 346
 Sumatera, 14, 27, 33, 35, 36, 39, 64^c, 75, 90, 113^c, 129, 134, 191, 271, 272, 275, 283, 287, 291
 Sumatera Barat, 8, 19, 107, 126, 126, 147, 148, 150, 195, 284, 285, 290, 306^c, 346^c
 Sumatera Selatan, 36, 41^c, 202, 267
 Sumatera Tengah, 36, 41^c, 269, 270, 284
 Sumatera Timur, 29, 34-36, 43, 56, 59, 64, 66, 69, 71, 75, 76, 78, 79, 82, 95-97, 110, 113, 117, 138, 155, 158, 160, 168, 195, 199, 201, 203, 211, 252, 267^c, 268, 272, 277, 285, 296, 297, 330, 331
 Sumatera Utara, 3, 29, 36-41, 43, 45, 46, 48, 57^c, 71, 72, 77, 86, 88, 100, 104, 112, 116, 125, 126, 129, 130, 137, 155, 156^c, 158, 159, 160^c, 161-164, 168, 193, 198-201, 216, 221, 253^c, 267-269, 270^c, 271, 274, 276, 277, 285, 335
 Sunarjo, 150
 Sunda, suku, 67, 178
 Sunda Kecil, 41^c
 Suprajogi, 308
 Suprpto, Jaksa Agung, 55, 109, 122
 Suprpto, 322
 Surjadarma, 300
 Sutikno, 140^c
- T**
 T&T TGK Tjhik Ditiro, 239^c, 311
 TII, 83, 93, 166-168, 171, 198, 200, 207, 209, 210, 212-216, 220^c, 225, 226, 235, 236, 239, 240^c, 242, 243, 246, 248, 253, 256^c, 265, 266, 284, 292-294, 303, 323, 324^c, 328^c, 330; Resimen I, 211, 274; Resimen II, 211; Resimen III, 211; Resimen IV, 211; Resimen V, 211; Resimen VI, 211; Resimen VII, 211
 TNI, 26^c, 30, 56, 57, 84, 93; program rasionalisasi, 56, 57, 68, 163, 168, 196, 215^c, 216
 TPR, 28, 196, 198, 203
 TRI, 26^c, 27, 30, 56, 197, 198
 TT-I, 57, 58, 64, 141, 267-271
 Takengon, 85, 101, 127, 142
 Tanah Karo, 29, 35, 190, 192
 Tangse, 142
 Tangse, Daud, 65, 236
 Tanjung Morawa, 130
 Tapaktuan, 85
 Tapanuli, 35, 36, 43, 56, 57, 59, 71, 72, 78, 82, 95, 148, 161, 168, 322
 Tapanuli Selatan, 71^c
 Tapanuli Utara, 71^c, 72
 Tarmuli *libat* Muli, Teuku Abdurrahman
 Tasikmalaya, 250^c, 261
 Tauziri, Kiai Jusuf, 260^c
 Teluk Nimbang, 268
 Teunom, 137
 Teupin Raya, 202
 Tiro, Hasan Muhammad, 54^c, 222^c, 228,

249-251, 257
 Tiro, Teungku Chik Di, 183
 Tiro, Zainal Abidin, 95, 230, 238^c
 Tirtoprodjo, Mr. Susanto, 41, 111
 Tjokroadisurjo, Iskak, 56
 Tjokroaminoto, Haji Oemar Said, 245
 Tjut, Teungku Njak, 249
 Trias Politika, 255
 Tusi, Kiai Haji Gozali, 246, 261

U

ulama, 2-6, 8-10, 12, 13, 16-22, 24-26, 28-32, 38, 40, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57-60, 62, 67, 74, 90-92, 94-96, 104, 107-109, 113, 115-118, 120, 121, 129, 131-133, 139, 142, 179, 182-189, 191, 193-196, 199, 200, 202, 207, 208, 211, 215, 217, 222, 227-237, 239-243, 246, 247, 252, 258-262, 289-291, 302, 307, 332, 334-340, 342-345; konferensi di Bogor, 133, 134; konferensi di Kutaraja, 40; Konferensi Ulama Seluruh Indonesia di Medan, 91, 92, 94, 95, 121, 258; reformis, 5, 6, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 31, 32, 50, 190, 194, 202, 344; tradisional, 6, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 31, 32, 60, 62, 107, 108, 115, 129, 194, 195, 336, 345
 Ulebalang, 2^c, 16-19, 21-27, 33, 53, 54, 112, 175, 176, 191, 203, 219^c, 282, 320, 321
 ulebalang, 2-6, 8, 16-20, 24-28, 31, 46, 50-55, 57, 59, 60, 62, 63, 65-67, 88,

104, 106-114, 116, 118, 122, 129, 131, 136, 138, 139, 145, 153, 160, 163, 167, 190-192, 196, 198, 201, 203, 214, 219, 236, 272, 278^c, 280, 282, 283, 298, 320-332, 335, 338, 340-343
 Umar, Teuku, 191
 Undang-undang Darurat Perang, 301, 306
 Uni Indonesia-Belanda, 156

W

Wahab, Abdul, 46, 89, 137, 140^c, 273
 Walad, Jusuf, 61^c
 Walad, Muzakkir, 332
 Wali, Teungku Habib Muda, 62, 107, 132, 134, 138, 149, 176^c, 186, 195, 281
 Wilopo, 99, 100, 108, 121, 122, 124-125, 130, 139
 Wondoamiseno, 245
 Wongsonegoro, 134

Y

Yogyakarta, 6^c, 19, 34-36, 40, 41, 44, 72, 74^c, 110, 111, 113^c, 300

Z

Zain, Munir, 148
 Zamzami, Teungku Jahja, 190
 zuama, 7-10, 12-14, 28-31, 115-117, 120, 123, 179, 188, 196, 197, 199-201, 208, 223, 227-243, 252, 286, 289-292, 295, 302, 313, 326, 334, 335, 338, 339

berantakan Darul Islam di Jawa Barat, namun hanya sedikit kaumnya yang berani bertentangan dengan keajuteraan plus Cendekianya adalah Karl D. Jackson. Tak pelak lagi buku ini harus menjadi bacaan wajib Anda.

Pesanan melalui Pos akan ditambah ongkos kirim 10% dari harga buku.



PT PUSTAKA UTAMA GRAFIK
 Jl. Cideng Gunung Kidul No. 14-16 Jakarta 10120
 Telepon: (021) 520111, 520112, 520113, 520114, 520115
 Distributor: Toko Buku dan ALY, Jl. Pasar A-38 / 4 Senen, Yogyakarta, telepon: (0271) 42221

TEORI BERONTAK DARUL ISLAM

ANTARA TRADISI
DAN BINTANG JASA

KARL D. JACKSON

KEWIBAWAAN
TRADISIONAL,
ISLAM, DAN
PEMBERONTAKAN

KABUS DARUL ISLAM JAWA BARAT

Banyak teori tentang pemberontakan yang digelar, namun hanya sedikit ilmuwan yang telah menganalisis motif-motif kaum tani pemberontak melalui tingkah laku maupun data sejarah. Salah satunya adalah Karl D. Jackson.

Rp 10.000,00.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat ini (1948-1962), dalam analisis Jackson ini, ternyata menampilkan sesuatu yang khas. Tidak mengherankan jika ia kemudian menganggap pemberontakan itu hanya sebagai sekedar laboratorium guna menguji sejumlah teori tingkah laku politik masyarakat petani subyek politik itu sendiri. Hasilnya? Analisis ini antara lain, mengungkapkan kenyataan bahwa ideologi Islam yang selama ini dikambinghitamkan sebagai picu-letus pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat, ternyata kurang terbukti.

Banyak orang telah mengungkapkan latar belakang pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat, namun hanya sedikit ilmuwan yang berani berkata dengan kejujuran plus. Contohnya adalah Karl D. Jackson. Tak pelak lagi buku ini harus menjadi bacaan wajib Anda.

Pesanan melalui Pos wesel tambah ongkos kirim 10% dari harga buku



PT PUSTAKA UTAMA GRAFITI
Jl. Kelapa Gading Boulevard TN-2 No. 14-15 Jakarta 14240
Telepon 4710246, 4710747, 4710751. PO. BOX 292/JAT.
DISTRIBUTOR Jawa Tengah dan D.I.Y : Jl. Pacar A-39 / 4 Baciro,
Yogyakarta. Telepon (0274)62231.

DARUL ISLAM TEORI BERONTAK

Banyak teori tentang pemberontakan yang digaris, namun hanya sedikit ilmuwan yang telah menganalisis motif-motif kaum muslimin dalam berontak melalui tingkah laku maupun data sejarah. Salah satunya adalah Karl D. Jackson.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat ini (1948-1962), dalam analisis Jackson ini ternyata merupakan sesuatu yang khas. Tidak

mungkinan jika ia kemudian menganggap pemberontakan itu hanya sebagai sekedar labirinisme guna menguji sejumlah teori tingkah laku politik masyarakat petani subur politik itu sendiri. Hasilnya? Analisis ini antara lain mengungkapkan kenyataan bahwa ideologi Islam yang selama ini dihindarkan sebagai pemicu pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat ternyata kurang terdakt.

Banyak orang telah mengungkapkan latar belakang pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat, namun hanya sedikit ilmuwan yang berani berurusan dengan kejuruan psik. Contohnya adalah Karl D. Jackson. Tak pelak lagi buku ini harus menjadi bacaan wajib Anda.

Perintah melalui surat wasiat sendiri dengan kitab 104 dan tanpa biaya

PT PUSTAKA UTAMA GRAFITI
Jl. Kebon Gedang Boulevard TMC No. 14-15 Jakarta 14240
Telepon 6310248, 6310249, 6310241, 6310242, 6310243
DISTRIBUSI Jawa Tengah dan D.I.Y. : Jl. Pabelan 6-24 & Boyolali
Telepon: 0271/82231

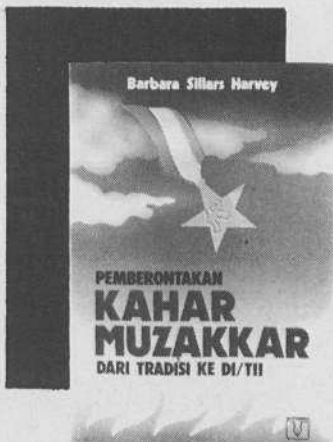




SULSEL BERGOLAK:

ANTARA TRADISI
DAN BINTANG JASA

Pemberontakan Kahar Muzakkar dalam peta sejarah revolusi Indonesia, telah padam ketika pasukan Siliwangi berhasil membungkamnya. Siapa Kahar Muzakkar? Mengapa, selaku perwira senior di Sulsel, ia menuntut 'hak historisnya'? Apa pula 'hak historis' itu? Begitu pentingkah ia? Menurut Harvey, penulis buku ini, upaya makar Kahar Muzakkar yang dilakukannya sejak tahun 50-an -- atau sejumlah pemberontakan sejenis lainnya yang bergolak di Sulsel jauh sebelum Kahar Muzakkar -- bukan semata-mata disebabkan oleh kerumitan masalah politis, tetapi 'uniknya' justru lebih berkaitan erat dengan masalah historis, tradisi, dan agama setempat. Pemberontakan Kahar Muzakkar dalam kaitan ini, hanya 'produk' dari kerumitan itu. Dalam kaitan ini pula, nilai informatif buku ini menjadi penting; demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.



Rp 10.000,00

Pesanan melalui pos wesel tambah ongkos kirim 10 % dari harga buku



PT PUSTAKA UTAMA GRAFITI
Jl. Kelapa Gading Boulevard TN-2 No. 14-15 Jakarta 14240
Telepon 4710246, 4710747, 4710751. PO. BOX 292/JAT.
DISTRIBUTOR Jawa Tengah dan D.I.Y : Jl. Pacar A-39 / 4 Baciro,
Yogyakarta. Telepon (0274)62231.

SULSEL BERGOLAK:



ANTARA TRADISI DAN BINTANG JASA

Pemilihan Kahar Muzakkar dalam peta sejarah revolusi Indonesia, telah padam ketika pasukan Siliwangi berhasil menemukannya. Siapa Kahar Muzakkar? Mengapa, selaku perwira senior di Sulsel, ia menuntut 'hak historisnya'? Apa pula 'hak historis' itu? Begitu pentingnya? Menurut Harvey, penulis buku ini, upaya makar Muzakkar yang dilakukannya sejak tahun 20-an -- atau sejumlah pemertanian sejenis lainnya yang bergolak di Sulsel jauh sebelum



Rp 10.000,00

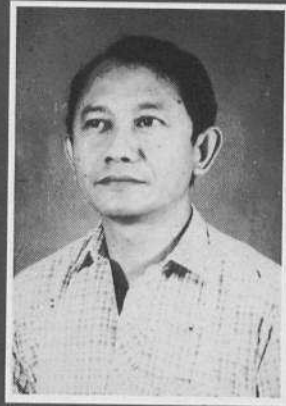
Kahar Muzakkar -- bukan semata-mata disebabkan oleh keruntutan masalah politik, tetapi 'uluknya' justru lebih berkaitan erat dengan masalah historis, tradisi, dan agama setempat. Pemilihan Kahar Muzakkar dalam kaitan ini hanya 'produk' dari keruntutan itu. Dalam kaitan ini pula, nilai historis-buku ini menjadi penting, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pesanan melalui pos wesel tambah ongkos kirim 10 Rp dan biaya buku

PT PUSTAKA UTAMA GRAFIK
Jl. Klaten Dalam, Bandung 40132, No. 14-15, Jakarta 14120
Telp. 4710241, 4710242, 4710243, P.O. BOX 0021/LAT
DISTRIBUTOR: Jatin Padang dan D.I.Y. : J. Tandi A-39 / 4 Bando
Yogyakarta: Tokoan (0274) 82321



4977 1990



Aceh tidak pernah sepi dari gejolak. Tetapi faktor-faktor apakah yang memicu pergolakan yang hampir tanpa henti itu? Di balik keunikan setiap gejolak, adakah benang merah yang menghubungkan berbagai gejolak itu satu sama lain? Bagaimana hubungannya dengan gejolak sejenis di daerah-daerah lain? Buku ini mengupas pergolakan besar di Aceh selama 1953-1962 dalam kaitannya dengan sejarah politik dan tradisi keagamaan setempat. Ditulis dari perspektif daerah, buku ini menyajikan sebuah telaah yang menyeluruh dan proporsional tentang gejolak di Aceh itu berkenaan dengan integrasi nasional di Indonesia.

Nazaruddin Sjamsuddin kini lektor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus lektor luar biasa pada Fakultas PascaSarjana di Universitas Indonesia. Ia, setelah menamatkan kuliah dalam ilmu politik di FISIP-UI (1970), memperoleh gelar M.A. dari Universitas Monash, Melbourne, Australia. Di Universitas yang sama ia meraih Ph.D. dengan disertasi berjudul "The Acehese Rebellion of 1953-1962, A Case Study of Problems of National Integration in Indonesia", yang kemudian diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies dengan judul *The Republican Revolt, a Study of the Acehese Rebellion*, (Singapura, 1985). Karya tulis Nazaruddin yang lain, *PNI dan Kepolitikannya* (1984) dan *Integrasi Politik di Indonesia* (1989).

ISBN 979-444-097-3